



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

QUANTUM TRANSFORMATION

FOR THE BEST OF THE NATION

Laporan Tahunan 2018





QUANTUM TRANSFORMATION FOR THE BEST OF THE NATION

Seperti kehidupan yang selalu berevolusi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("WIKA") terus bertumbuh demi menunjukkan komitmen sebagai entitas yang selalu berpikiran maju. Semangat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Bangsa menjadi kekuatan besar yang membimbing langkah WIKA untuk senantiasa menjadi entitas yang dinamis, responsif, adaptif, dan inovatif untuk menghasilkan karya monumental yang bermutu tinggi.

Semangat itu juga yang menjadi inspirasi WIKA untuk terus bertransformasi dari yang sebelumnya hanya berfokus pada sektor yang menjadi kompetensi inti, hingga kini menjelma menjadi suatu perusahaan dengan bisnis yang terintegrasi dan telah merambah ke sektor yang lebih luas, yaitu Infrastruktur & Gedung, Energy & Industrial Plant, Realty & Property, Industri, Investasi, Rekayasa Konstruksi, dan Integrated Transportation System. Seiring suksesnya transformasi ini, kapasitas WIKA tumbuh semakin besar sebagaimana tercermin pada berbagai pencapaian unggul di aspek operasional, finansial, kapasitas bisnis, sumber daya manusia dan aspek-aspek lainnya.

Membangun potensi untuk memberdayakan Negeri adalah perjalanan panjang yang harus ditempuh dengan komitmen yang kokoh. Untuk itu, WIKA senantiasa konsisten untuk memberikan yang terbaik terhadap seluruh elemen yang dikerjakan. Tidak sekedar membangun, namun WIKA juga memastikan bahwa seluruh proyek yang berjalan dapat berkontribusi secara merata dari kota-kota besar di Pulau Jawa hingga ke pelosok Papua.

Dengan harapan bahwa akan tercipta keberlanjutan usaha dan harmoni antar *people*, *planet* dan *profit*, WIKA terus berekspansi dan mewujudkan kinerja terbaik demi membangun Bangsa yang sejahtera dan berkelanjutan. Melalui sinergi yang baik antar entitas anak, entitas asosiasi, mitra bisnis dan seluruh pemangku kepentingan, WIKA semakin menegaskan posisi sebagai pusat keunggulan yang memiliki kapabilitas untuk menghadirkan gerbang menuju kehidupan Bangsa yang lebih berkualitas.

KESINAMBUNGAN TEMA

2013



MENGEMBANGKAN HUMAN CAPITAL UNTUK PERTUMBUHAN DAN KEUNGGULAN

Pertumbuhan Bisnis WIKA yang semakin meningkat tidak lepas dari peran setiap orang yang berada di dalamnya, dengan kata lain “orang” merupakan salah satu kunci keberhasilan pertumbuhan organisasi. Oleh karena itu WIKA memandang setiap pegawainya sebagai *Human Capital*. Bahwa setiap orang mempunyai kekuatan dan kompetensi yang mampu melakukan transformasi untuk meng-elevasi perusahaan WIKA.

2014



KEUNGGULAN OPERASIONAL UNTUK HASIL TERBAIK

WIKA yang semakin memantapkan diri di panggung perusahaan multi nasional kini telah memiliki berbagai macam instrumen dalam mengelola produk maupun jasa sesuai dengan standar kerja internasional. Melalui *Operational Excellence*, WIKA membangun integrasi manajemen yang mendorong peningkatan produktivitas, memperbesar efisiensi dan menumbuhkan profit.

2015



MENCIPTAKAN MASA DEPAN YANG MENJANJIKAN

Kita adalah masa depan. Sebuah keberanian untuk melakukan terobosan, hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya visi terhadap masa depan. WIKA yang terus berkembang, bereksplorasi, dan menciptakan hal-hal baru adalah satu titik terang yang membangun masa depan negeri.

2016



MEWUJUDKAN KEHIDUPAN YANG LEBIH BERKUALITAS DAN TUMBUH BERSAMA

WIKA memiliki komitmen untuk berperan serta dalam mendukung dan mensukseskan program Pemerintah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan bisnis inti Perseroan dalam bidang konstruksi. Melalui berbagai pembangunan infrastruktur yang telah diamanahkan oleh Pemerintah kepada Perusahaan, WIKA menghadirkan pengembangan infrastruktur dan bangunan yang memberikan dampak positif “Create Impact” serta manfaat kepada masyarakat (*stakeholders*). Hadirnya infrastruktur dan bangunan dengan desain yang tidak hanya modern, namun infrastruktur dan bangunan yang memiliki konsep “social impact”, dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

2017



DREAM. BELIEVE. ACHIEVE.

Selama kurun 58 tahun aktif dalam pembangunan infrastruktur tanah air, WIKA menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa. Perjalanan hampir 6 dekade tersebut membuktikan bahwa WIKA selalu berani mencoba sesuatu yang baru dengan terukur. Bagaimana WIKA bisa berhasil sedemikian rupa? Kuncinya sederhana. WIKA berani bermimpi tinggi, berkeyakinan dan optimistis untuk merealisasikannya. Dream, Believe, Achieve.

2018



QUANTUM TRANSFORMATION FOR THE BEST OF THE NATION

Kesesuaian dengan Tema Annual Report Award 2018:

"Keakuratan Informasi untuk Kinerja Perusahaan Secara Berkelanjutan dengan Memenangkan dukungan Stakeholders"

Sepanjang perjalanan bisnisnya, WIKA terus bertransformasi dan berupaya memenangkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, WIKA mengerjakan berbagai proyek Pemerintah, sesama BUMN, maupun swasta dengan komitmen memberikan yang terbaik. Komitmen tersebut menegaskan posisi WIKA sebagai pelaksana tugas krusial dalam pembangunan peradaban, yang akan memberikan manfaat jangka panjang dalam memajukan dan mengembangkan perekonomian negara Indonesia.

WIKA sangat menyadari bahwa kualitas pengelolaan *stakeholder* merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal dan output yang membanggakan. Untuk itu, WIKA melibatkan, mengelola, memanfaatkan, dan berkomunikasi dengan setiap *stakeholder* secara efektif, untuk pencapaian tujuan dan rencana Perseroan sesuai harapan. Laporan Tahunan ini disajikan dengan informasi yang akurat tentang kinerja Perseroan di tahun 2018.

KEUNGGULAN WIKA

VALUE CREATOR

Merupakan *value creator* yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Memulai usaha dari instalatur listrik kemudian tumbuh berkembang menjadi *Engineering, Procurement, Construction (EPC)* dan *Investment Company* pada banyak sektor antara lain pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan dan industri transportasi.



BACKWARD-FORWARD

Mampu bertransformasi menjadi sebuah kelompok usaha dengan ragam pilar bisnis, pengembangan entitas anak, entitas asosiasi yang masing-masing fokus menggarap segmen-segmen usaha tertentu. Akan tetapi, tetap berintegrasi satu sama lain melalui strategi integrasi vertikal (*backward-forward integration*).

LEADERSHIP

Memiliki *leadership* yang kuat dan kemampuan memilih *human capital* yang tepat dalam mewujudkan arah bisnis ke depan.



PIONEER

Pelopor pengembangan industri beton pracetak pertama di tanah air yang ditandai dengan pembangunan pabrik beton pracetak di beberapa wilayah Nusantara pada akhir dekade 1970-an. Kini terus berkembang dengan 15 pabrik beton berkapasitas produksi 3,6 juta ton/tahun yang senantiasa menghasilkan ragam produk beton pracetak beton sebagai *pioneer* bagi proyek-proyek monumental (bantal rel kereta api, tiang pancang, tiang listrik, *box girder*, span terowongan MRT, sudetan, dan lain-lain)

HIGH TECHNOLOGY

Selalu menjadi yang terdepan dalam teknologi konstruksi dan perluasan bisnis unit (*Mass Rapid Transit, Oil and Gas*, serta teknologi *Power Plant*).



EPCC

Terdepan dalam mengembangkan *Engineering, Procurement, Construction and Commissioning* (EPCC), serta berinvestasi dan mengembangkan sejumlah proyek infrastruktur, khususnya proyek-proyek yang menjadi program Pemerintah terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



OVERSEAS EXPANSION

Berpengalaman mengerjakan berbagai proyek mancanegara yang tersebar di berbagai Negara di Asia dan Afrika yang terus diperluas ekspansinya melalui pengembangan pola Project Management Services (PMS) serta merambah ke pola *main contractor* dan *sub-contractor* di luar negeri.

DESIGN & BUILD

Mampu mengerjakan proyek konstruksi sipil dengan metode rancang bangun (*design and build*) mulai dari proses perencanaan proyek hingga proses konstruksi.



TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT

Berpengalaman dalam pengembangan bisnis realti dan properti, baik sebagai kontraktor maupun pengembang (*developer*). Saat ini, WIKA juga masuk ke dalam bisnis *Transit Oriented Development* (TOD) yaitu salah satu pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan maksimalisasi penggunaan angkutan massal, seperti *Bus Rapid Transit* (BRT), *Commuter Line*, *Mass Rapid Transit* (MRT), *Light Rail Transit* (LRT), *Automated People Mover System* (APMS).

INNOVATION

Inovasi dan pengembangan *intangible assets*; *knowledge management* (KM-WIKA), Sistem Manajemen Wika (ISO 9001, ISO 14001, ISO 31000, OHSAS 18001, Sistem Manajemen Pengamanan) dan Sistem Informasi Wika yang sudah terintegrasi.



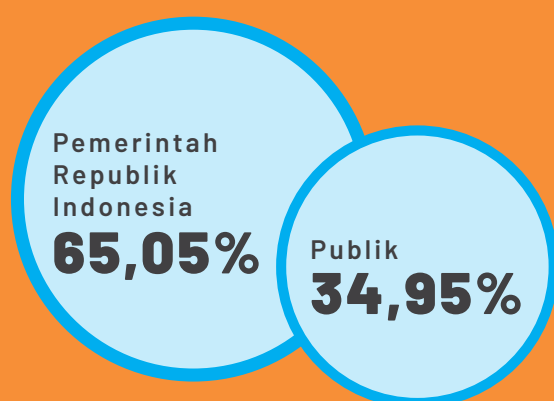
BUILDING INFORMATION MODELLING

Terdepan dalam memanfaatkan teknologi terkemuka *Building Information Modelling* (BIM) yang mampu memberikan gambaran menyeluruh secara 3 dimensi tentang proyek yang akan dikerjakan. Dengan pemanfaatan BIM, WIKA dapat menyusun perencanaan dengan lebih tepat dan meminimalisir risiko yang muncul pada tahapan pengerjaan proyek tersebut.

KILAS KINERJA WIKA

SEKILAS TENTANG PERUSAHAAN

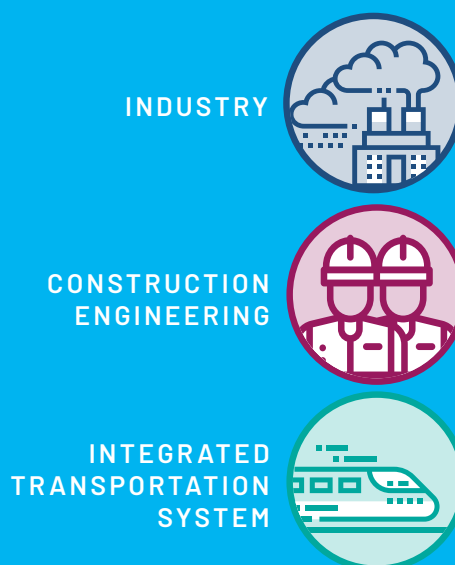
KEPEMILIKAN SAHAM



ENTITAS ANAK

PT Wijaya Karya Beton Tbk. (60,00%)
PT Wijaya Karya Realty (93,05%)
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi (97,22 %)
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (90,04%)
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (69,30%)
PT Wijaya Karya Bitumen (99,00%)
PT Wijaya Karya Serang Panimbang (80,00%)

LINI BISNIS



PENCAPAIAN WIKA DI 2018

KONTRAK BARU



Meningkat sebesar 19,24% menjadi Rp50,56 triliun per 31 Desember 2018.

KONTRAK DIHADAPI



Meningkat sebesar 15,82% menjadi Rp123,51 triliun per 31 Desember 2018.

PENJUALAN



Meningkat sebesar 19,03% menjadi Rp31,16 triliun per 31 Desember 2018.

LABA BERSIH



Meningkat sebesar 52,89% menjadi Rp2,07 triliun per 31 Desember 2018.

PENGHARGAAN PENTING

Asia Sustainability Report 2017 Kategori Asia's Most Transparent Report.

Top 2 of the Best Growth Strategies in the category of BUMN Tbk.

Champion for ASEAN 2018 Sektor Konstruksi.

Indonesia Good Corporate Governance (GCG) Award 2018 dan Operational Excellence Award I 2018 Kategori Public Company.

Platinum Rank "Asia Sustainability Reporting Rating 2018".

Best of The Best versi Majalah Forbes Indonesia.

Indonesia Most Trusted Company 2018.



KOMODO BOND

WIKA sukses menerbitkan Komodo Bond yang tercatat di Singapore Exchange dan London Stock Exchange. Komodo Bond WIKA mengalami *oversubscribed* 2,5x dan berhasil menghimpun dana sebesar Rp5,4 triliun.

SURAT BERHARGA PERPETUAL

Surat Berharga Perpetual I WIKA Tahun 2018 sukses diterbitkan dengan jumlah sebesar Rp600 miliar. Dana hasil penerbitan Surat Berharga Perpetual tersebut akan dipergunakan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja Perseroan.



DAFTAR ISI

KILAS KINERJA

12	Ikhtisar Keuangan	24	Strategi Utama 2018
20	Ikhtisar Operasional	25	Peristiwa Penting 2018
21	Ikhtisar Saham	30	Aksi Korporasi
23	Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi	30	Aksi Penghentian Sementara

LAPORAN MANAJEMEN

34	Laporan Dewan Komisaris
42	Laporan Direksi

PROFIL PERUSAHAAN

54	Nama dan Alamat Lengkap Perusahaan	122	Struktur Grup Perusahaan
56	Jejak Langkah	123	Kronologis Pencatatan Saham
60	Riwayat Singkat Perusahaan	124	Kronologis Pencatatan Obligasi dan Efek Lainnya
64	Bidang Usaha	126	Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
66	Peta Wilayah Usaha	128	Penghargaan dan Sertifikasi
68	Produk dan Jasa	136	Nama dan Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Strategic Business Unit, Kantor Cabang Luar Negeri dan Kantor Divisi
70	Lini Bisnis	145	Informasi pada Website Perusahaan
72	Struktur Organisasi	146	Demografi Karyawan
74	Visi, Misi dan Budaya Perusahaan	152	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit internal
78	Identitas dan Riwayat Hidup Dewan Komisaris	160	Sumber Daya Manusia
88	Identitas dan Riwayat Hidup Direksi	172	Teknologi Informasi
98	Profil Pejabat Eksekutif		
108	Struktur dan Komposisi Pemegang Saham		
111	Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi		

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

180	Tinjauan Industri dan Kondisi Makroekonomi Indonesia 2018	201	Struktur Modal
184	Tinjauan Operasional	202	Ikatan Material Investasi Barang Modal
185	Tinjauan Operasi per Segmen Usaha	204	Perbandingan antara Target pada Awal Tahun Buku dan Realisasinya
189	Kinerja Keuangan	205	Prospek Usaha
199	Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang	206	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

- 207 Aspek Pemasaran
- 208 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi Atau Restrukturisasi Utang/Modal
- 209 Kebijakan Dividen
- 210 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen
- 211 Realisasi Penggunaan Dana dan Realisasi PMHMETD S/D 31 Desember 2018

- 212 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Berelasi
- 216 Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya
- 217 Perubahan Kebijakan Akuntansi
- 218 Informasi Kelangsungan Usaha
- 219 Tingkat Kesehatan
- 220 Kinerja Entitas Anak

TATA KELOLA PERUSAHAAN

- 224 Komitmen Perusahaan dalam Menerapkan Corporate Governance dan Governance Outcome
- 250 Struktur dan Mekanisme Corporate Governance
- 258 Dewan Komisaris
- 277 Penilaian Kinerja Komisaris
- 280 Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
- 289 Direksi
- 298 Penilaian Kinerja Direksi
- 306 Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi
- 314 Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
- 318 Komite Audit
- 327 Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG
- 333 Komite Lain dibawah Dewan Komisaris
- 334 Fungsi Pemantauan Risiko
- 335 Sekretaris Perusahaan

- 337 Satuan Pengawasan Intern
- 344 Akuntan Publik
- 346 Manajemen Risiko
- 350 Sistem Pengendalian Internal
- 355 Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik
- 356 Perkara Penting
- 358 Akses Informasi dan Data Perusahaan serta Hubungan dengan Stakeholders
- 360 Kode Etik
- 366 Sistem Pelaporan Pelanggaran
- 368 Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali
- 369 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
- 370 Pencegahan Transaksi Orang Dalam
- 371 Buyback Saham dan Buyback Obligasi
- 372 Kesesuaian Penerapan Corporate Governance Sesuai ASEAN Corporate Governance Scorecard

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- 384 Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- 391 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia
- 392 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Subjek Operasi yang Adil
- 394 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Kelestarian Lingkungan Hidup

- 396 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 402 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Tanggung Jawab kepada Konsumen
- 405 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
- 409 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Tanggung Jawab kepada Pemasok



KILAS KINERJA

- 12 Ikhtisar Keuangan
- 20 Ikhtisar Operasional

- 21 Ikhtisar Saham
- 23 Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi



Jalan Tol Surabaya-Gempol Ruas Porong Gempol Paket I

24 Strategi Utama 2018
25 Peristiwa Penting 2018

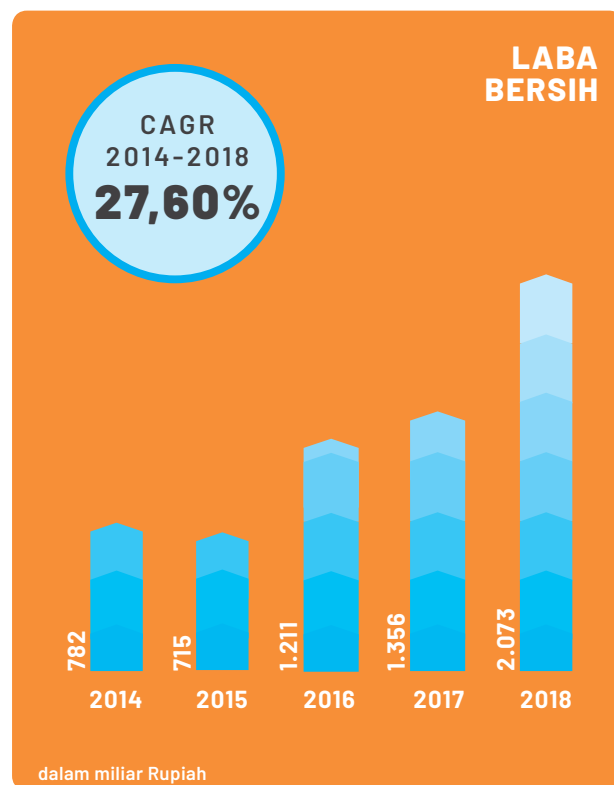
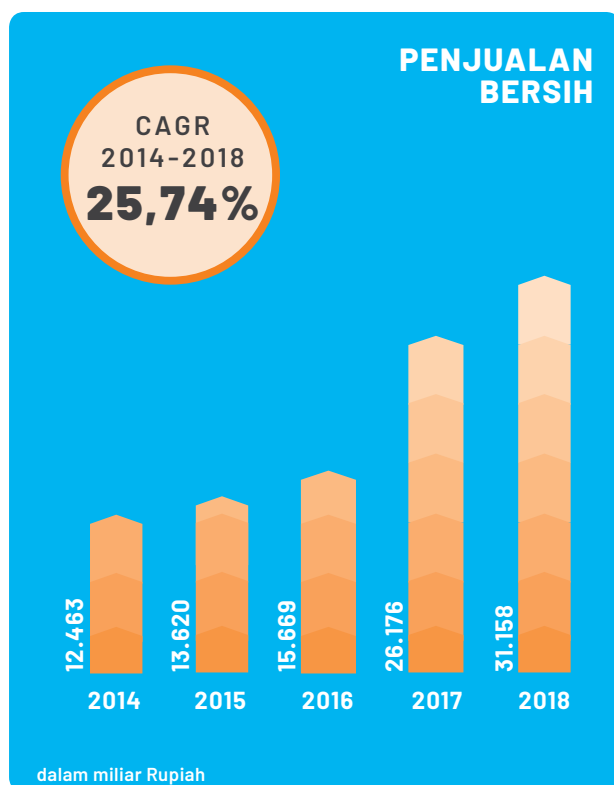
30 Aksi Korporasi
30 Aksi Penghentian Sementara

IKHTISAR KEUANGAN

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2017	2016	2015	2014
Pendapatan Bersih	31.158.193.498	26.176.403.026	15.668.832.513	13.620.101.419	12.463.216.288
Beban Pokok Pendapatan	(27.553.466.348)	(23.300.168.938)	(13.476.892.423)	(11.959.841.920)	(11.035.578.572)
Laba Kotor	3.604.727.150	2.876.234.088	2.191.940.090	1.660.259.499	1.427.637.716
Beban Penjualan	(10.445.343)	(9.958.720)	(9.094.812)	(7.695.193)	(6.838.756)
Beban Umum dan Administrasi	(775.299.502)	(666.714.154)	(517.734.503)	(421.462.453)	(386.009.513)
Pendapatan Bunga	-	-	50.971.372	59.686.089	73.500.762
Kenaikan nilai wajar properti investasi	-	-	4.484.439	-	-
Keuntungan Pembelian dengan Diskon	-	-	51.474.654	-	-
Laba (Rugi) Selisih Kurs	-	-	(5.445.321)	28.350.510	(2.039.829)
Beban Penurunan Nilai Piutang	-	-	(46.400.343)	(30.500.231)	(46.244.153)
Pendapatan Lain-lain	1.122.197.667	416.734.338	-	-	-
Beban Lain-lain	(106.482.566)	(295.507.893)	-	-	-
Beban dari Pendanaan	(972.528.679)	(677.973.460)	(435.314.128)	(431.409.359)	(197.704.174)
Beban Pajak Penghasilan Final	(726.942.503)	(629.479.208)	(365.015.329)	(346.788.000)	(286.455.956)
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	(309.628.664)	(123.644.382)	(38.190.543)	(5.514.535)	(7.123.198)
Bagian Entitas Ventura Bersama	533.031.374	572.700.749	378.836.006	288.402.591	369.757.130
Lain-lain Bersih	-	-	34.727.654	(27.998.951)	(35.738.242)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.358.628.934	1.462.391.358	1.295.239.236	765.329.966	902.741.788
Beban Pajak Penghasilan	(285.329.070)	(106.275.869)	(84.209.926)	49.900.712	121.144.974
LABA BERSIH	2.073.299.864	1.356.115.489	1.211.029.310	715.429.254	781.596.814
Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak					
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi:					
Keuntungan (Kerugian) aktuarial Atas Program Imbal kerja Pasti	140.243.105	(47.649.429)	(16.618.045)	6.306.290	(7.616.608)
Jumlah Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	2.213.542.969	1.308.466.060	1.194.411.265	721.735.544	773.980.206
Laba yang Dapat Diatribusikan Ke:					
Pemilik Entitas Induk	1.730.256.243	1.202.069.175	1.058.935.366	635.257.252	640.818.710
Kepentingan Non Pengendali	343.043.621	154.046.314	152.093.944	80.172.002	140.778.104
Jumlah	2.073.299.864	1.356.115.489	1.211.029.310	715.429.254	781.596.814
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	1.860.117.752	1.158.684.399	1.043.915.368	645.904.113	635.901.757
Kepentingan Non Pengendali	353.425.217	149.781.661	150.495.897	75.831.411	138.078.448
Jumlah	2.213.542.969	1.308.466.060	1.194.411.265	721.735.544	773.980.206
Laba Bersih Per Saham Dasar (Rupiah penuh)	193,02	134,10	162,21	103,31	104,21



LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2017	2016	2015	2014
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.722.531.219	1.885.252.166	(1.113.343.805)	224.272.849	(179.730.589)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.917.957.798)	(2.637.548.255)	(1.338.524.756)	(325.091.864)	(1.268.223.615)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	4.876.802.750	2.727.823.454	9.175.983.354	345.914.785	2.360.099.519
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	2.681.376.171	1.975.527.365	6.724.114.793	245.095.770	912.145.315
Dampak Selisih Kurs	38.612.091	8.251.266	(14.235.692)	14.132.531	2.039.829
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	11.253.778.215	9.269.999.584	2.560.120.483	2.300.892.182	1.386.707.038
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	13.973.766.477	11.253.778.215	9.269.999.584	2.560.120.483	2.300.892.182

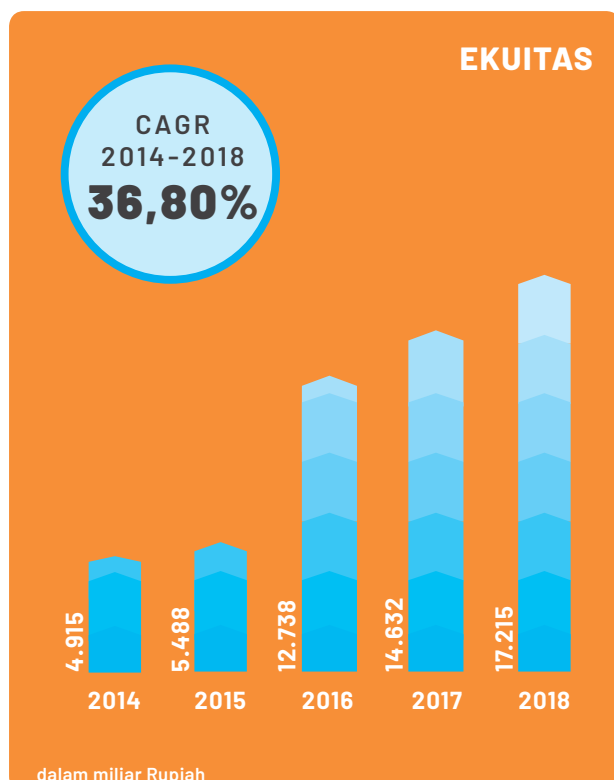
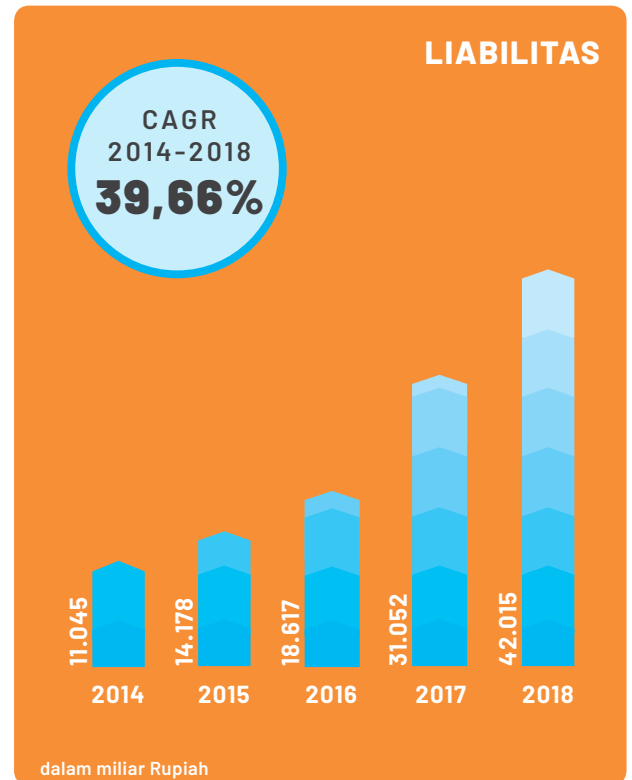
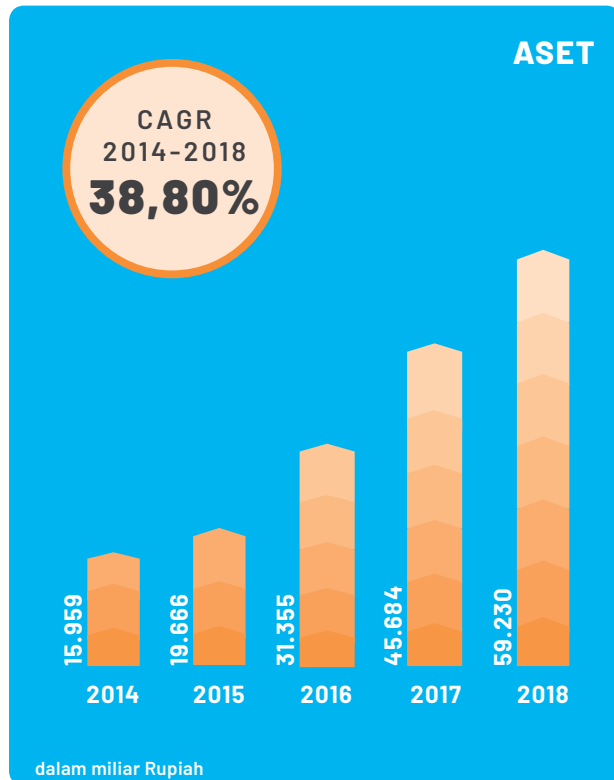
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2017	2016	2015	2014
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	13.973.766.477	11.253.778.215	9.269.999.584	2.560.120.483	2.300.892.182
Deposito yang Dibatasi Penggunaannya	20.000.000	20.100.000	-	-	-
Piutang Usaha					
Pihak Berelasi	2.745.540.433	3.000.643.116	1.195.435.762	937.535.147	691.807.092
Pihak Ketiga	2.605.300.003	1.929.510.016	2.555.662.357	1.844.445.009	1.271.025.540
Piutang Retensi					
Pihak Berelasi	677.642.045	348.167.986	230.315.881	205.416.970	179.581.695
Pihak Ketiga	1.246.488.344	979.998.517	556.569.838	391.860.998	313.023.077
Tagihan Bruto Pemberi Kerja					
Pihak Berelasi	5.565.798.797	5.826.664.167	1.763.089.366	1.733.563.354	1.195.553.937
Pihak Ketiga	4.336.247.938	3.434.294.927	2.207.768.831	1.510.834.434	1.174.305.923
Piutang yang Belum Ditagih - Bagian Lancar	924.845.767	592.563.302	349.559.336	251.510.864	82.846.240
Piutang Lain-Lain					
Pihak Berelasi	1.420.649.920	170.978.921	139.086.756	29.575.526	10.757.700
Pihak Ketiga	58.488.669	133.988.030	77.931.227	76.695.192	97.897.949
Persediaan	5.978.533.161	3.839.540.301	3.182.130.677	1.031.277.931	817.307.342
Uang Muka	1.487.325.514	1.180.612.848	627.823.946	439.641.163	384.431.063
Pajak Dibayar di Muka	1.615.704.032	1.298.271.722	757.785.883	529.036.987	425.794.117
Biaya Dibayar di Muka	735.419.058	702.804.644	595.314.817	465.274.857	241.370.431
Jaminan Usaha	105.100.463	88.042.632	33.211.810	15.032.335	12.895.738
Aset Real Estate	-	-	-	920.214.145	836.280.348
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi - Bagian Lancar	58.645.244	110.148.921	110.148.921	110.148.921	110.148.921
Jumlah Aset Lancar	43.555.495.865	34.910.108.265	23.651.834.992	13.052.184.316	10.145.919.295
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang Usaha - Bagian Tidak Lancar					
Pihak Ketiga	1.719.973	4.657.606	184.873.545	13.402.337	40.182.013
Piutang Lain-Lain-Bagian Tidak Lancar					
Pihak Berelasi	3.984.331.159	1.211.412.309	285.000.000	285.000.000	-
Pihak Ketiga	14.617.480	5.324.891	-	-	-
Piutang yang Belum Ditagih - Bagian Tidak Lancar	444.232.429	114.576.313	34.645.312	-	-
Uang Muka - Bagian Tidak Lancar	280.000.000	247.857.941	148.763.335	-	-

URAIAN	2018	2017	2016	2015	2014
Biaya dibayar di Muka - Bagian Tidak Lancar	-	354.297.694	-	-	-
Jaminan Usaha - Bagian Tidak Lancar	-	172.513.482	179.184.563	7.611.346	5.865.179
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi - Bagian Tidak Lancar	-	58.645.244	168.794.166	278.925.495	389.074.416
Aset Real Estate	711.009.859	512.182.215	258.905.609	275.446.573	142.006.418
Investasi pada Entitas Asosiasi	727.823.591	396.918.845	330.174.029	300.607.375	227.137.428
Investasi pada Ventura Bersama	1.813.165.802	2.812.600.560	2.114.559.007	1.597.379.391	1.669.608.387
Properti Investasi-Neto	1.593.674.779	538.548.500	461.185.251	456.084.911	430.056.664
Aset Tetap-Neto	4.675.679.014	3.932.108.696	3.324.669.312	3.184.400.113	2.676.043.079
Goodwill	4.847.052	4.847.052	4.847.052	4.847.052	4.847.052
Investasi Jangka Panjang Lainnya	559.267.882	116.658.458	89.450.795	67.860.215	37.532.807
Aset Tak Berwujud	714.353.513	139.077.296	-	-	-
Aset Lain-Lain	118.345.546	125.739.132	100.088.704	116.417.694	162.807.477
Aset Pajak Tangguhan	31.437.295	25.699.803	18.229.018	26.283.705	28.147.824
Jumlah Aset Tidak Lancar	15.674.505.374	10.773.666.037	7.703.369.698	6.614.266.208	5.813.308.744
JUMLAH ASET	59.230.001.239	45.683.774.302	31.355.204.690	19.666.450.524	15.959.228.039
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Pinjaman Jangka Pendek					
Pihak Berelasi	1.663.039.321	2.974.410.303	1.959.410.812	608.319.568	570.012.133
Pihak Ketiga	2.536.992.008	3.449.443.672	2.752.415.707	613.502.788	358.503.311
Utang Usaha					
Pihak Berelasi	176.597.892	139.182.504	68.179.539	36.378.547	60.004.589
Pihak Ketiga	13.006.775.938	8.785.803.858	4.459.255.102	4.287.019.827	3.842.802.356
Utang Lain-lain	29.816.535	265.454.484	238.762.353	99.048.974	73.678.786
Kewajiban Bruto Pemberi Kerja	9.705.502	-	-	13.224.506	9.641.161
Utang Pajak	467.488.448	441.631.879	188.857.241	177.085.029	168.940.523
Uang Muka dari Pelanggan	1.233.776.339	1.442.187.701	767.675.536	477.381.896	316.364.321
Beban Akruai	8.634.099.492	7.805.962.536	3.247.437.280	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	196.987.012	188.856.055	125.127.130	406.959.558	178.593.992
Bagian Jangka Pendek dari					
Pinjaman Jangka Menengah	250.000.000	175.000.000	800.000.000	249.000.000	541.000.000
Utang Sewa Pembiayaan	37.299.977	41.259.887	18.772.830	22.300.954	16.893.554
Pinjaman Jangka Panjang	9.372.921	266.424.418	283.123.166	324.706.736	221.620.359
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	28.251.951.385	25.975.617.297	14.909.016.696	10.600.100.431	8.478.608.469

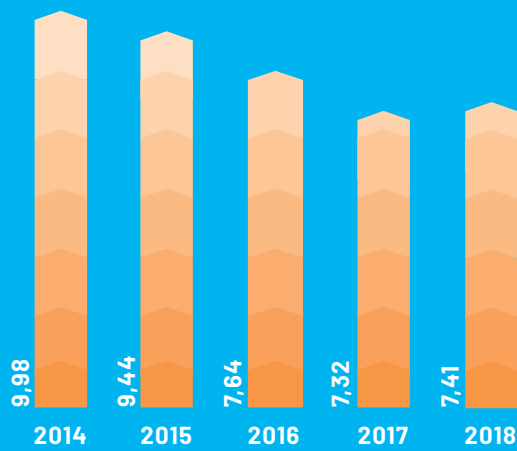
URAIAN	2018	2017	2016	2015	2014
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	178.708.069	337.172.202	243.072.993	200.490.168	181.284.262
Liabilitas Pajak Tangguhan	140.226.300	45.890.326	46.147.721	24.963.304	14.342.845
Uang Muka Proyek	3.644.322.003	2.477.316.688	2.327.873.112	1.662.677.044	1.049.416.204
Utang lain-lain	707.321.016	107.894.953	159.520.193	-	-
Bagian Jangka Panjang - setelah dikurangi bagian Jangka pendek					
Pinjaman Jangka Menengah	6.084.622.512	1.000.000.000	425.000.000	975.000.000	800.000.000
Utang Sewa Pembiayaan	213.628.754	96.849.868	52.064.738	46.365.276	48.454.961
Pinjaman Jangka Panjang	2.793.906.635	1.011.208.355	454.519.946	668.501.024	472.538.845
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	13.762.735.289	5.076.332.392	3.708.198.703	3.577.996.816	2.566.037.118
JUMLAH LIABILITAS	42.014.686.674	31.051.949.689	18.617.215.399	14.178.097.247	11.044.645.587
EKUITAS					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Modal Saham Nilai Nominal: Rp100 (nilai penuh) per Saham Modal Dasar - 35.000.000.000 Saham					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 8.969.951.372 Saham	896.995.137	896.995.137	896.995.137	614.922.500	614.922.500
Modal Saham diperoleh kembali	(10.272.110)	(10.272.110)	(10.272.110)	(10.272.110)	(10.272.110)
Tambahan Modal Disetor	6.555.720.677	6.555.720.677	6.555.720.677	715.858.789	715.858.789
Perubahan ekuitas Entitas Anak	1.283.644.636	1.330.850.680	997.335.383	997.335.383	997.335.383
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	-	-	(99.591.149)	(84.571.151)	(90.877.441)
Surat Berharga Perpetual	597.600.000	-	-	-	-
Saldo Laba	5.479.925.961	3.860.221.964	3.005.085.913	2.170.755.948	1.679.270.994
Sub Total	14.803.614.301	12.633.516.348	11.444.865.000	4.404.029.359	3.906.238.115
Kepentingan Non Pengendali	2.411.700.264	1.998.308.265	1.293.124.291	1.084.323.918	1.008.344.337
Total Ekuitas	17.215.314.565	14.631.824.613	12.737.989.291	5.488.353.277	4.914.582.452
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	59.230.001.239	45.683.774.302	31.355.204.690	19.666.450.524	15.959.228.039



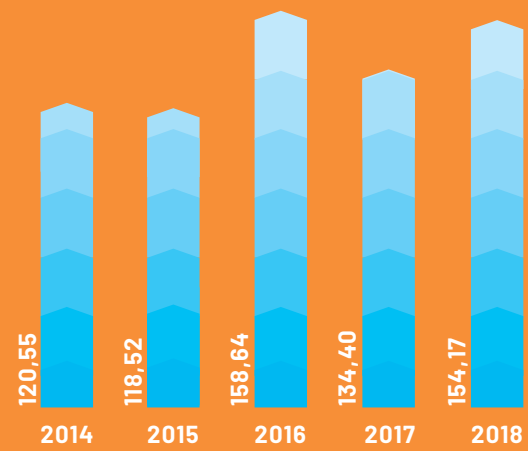
RASIO KEUANGAN

URAIAN	2018	2017	2016	2015	2014
PROFITABILITAS (%)					
Imbal Hasil terhadap Ekuitas	14,18	10,52	10,70	16,71	21,09
Imbal Investasi	7,41	7,32	7,64	9,44	9,98
Imbal Hasil terhadap Aset	3,95	3,52	4,75	7,17	5,22
LIKUIDITAS (%)					
Rasio Kas	49,53	43,40	62,18	24,16	27,14
Rasio Lancar	154,17	134,40	158,64	118,52	120,55
Quick Ratio	133,01	127,99	150,83	108,79	110,91
AKTIVITAS					
Periode Penagihan (hari)	63	69	87	75	57
Perputaran Aset (kali)	53,07	58,32	50,48	71,72	81,92
STRUKTUR MODAL KERJA (KALI)					
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas	2,44	2,12	1,46	2,60	2,26
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Aset	0,71	0,68	0,59	0,72	0,69
Rasio Utang Berbunga terhadap Ekuitas	0,79	0,62	0,53	0,65	0,62
Rasio Ekuitas terhadap Jumlah Aset	0,29	0,32	0,41	0,28	0,31
MARJIN (%)					
Marjin Laba Kotor	11,57	10,99	13,99	12,15	11,43
Marjin Laba Usaha	10,76	10,59	13,04	11,12	11,24
Marjin Laba Bersih	6,65	5,18	7,73	5,16	5,97
PERTUMBUHAN (%)					
Penjualan	19,03	67,06	15,04	9,28	4,87
Laba Usaha	20,41	35,63	35,01	8,02	15,26
Laba yang dapat diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk	40,25	13,52	69,42	2,78	6,71
Jumlah Aset	29,65	45,70	59,96	23,21	26,31
Ekuitas	17,66	14,87	134,24	11,51	51,13

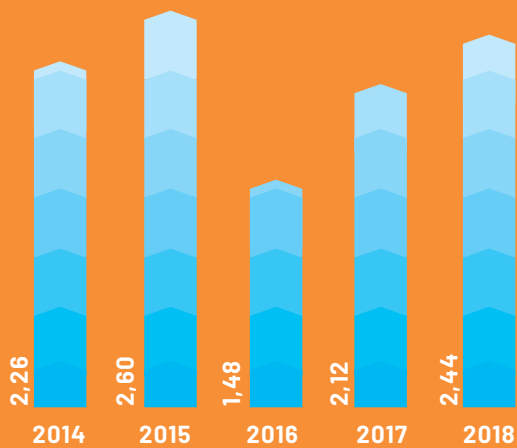
RASIO IMBAL INVESTASI (ROI)



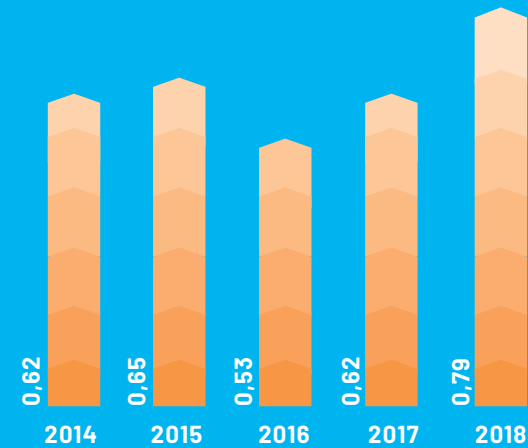
RASIO LANCAR



RASIO LIABILITAS TERHADAP EKUITAS



RASIO UTANG BERBUNGA TERHADAP EKUITAS



IKHTISAR OPERASIONAL

Tabel Kinerja Operasional Segmen Infrastruktur dan Gedung

(dalam miliar Rupiah)

KETERANGAN	2018	2017	PERTUMBUHAN
	(RP)	(RP)	(%)
Omset Kontrak Baru	41.145,14	26.413,01	55,78
Omset Kontrak Dihadapi	98.356,01	79.684,21	23,43

Tabel Kinerja Operasional Segmen Energi dan Industrial Plant

(dalam miliar Rupiah)

KETERANGAN	2018	2017	PERTUMBUHAN
	(RP)	(RP)	(%)
Omset Kontrak Baru	1.786,78	7.379,39	(75,79)
Omset Kontrak Dihadapi	12.752,23	15.613,27	(18,32)

Tabel Kinerja Operasional Segmen Industri

(dalam miliar Rupiah)

KETERANGAN	2018	2017	PERTUMBUHAN
	(RP)	(RP)	(%)
Omset Kontrak Baru	6.455,20	6.648,69	(2,91)
Omset Kontrak Dihadapi	9.769,24	8.304,73	17,63

Tabel Kinerja Operasional Segmen Realiti dan Properti

(dalam miliar Rupiah)

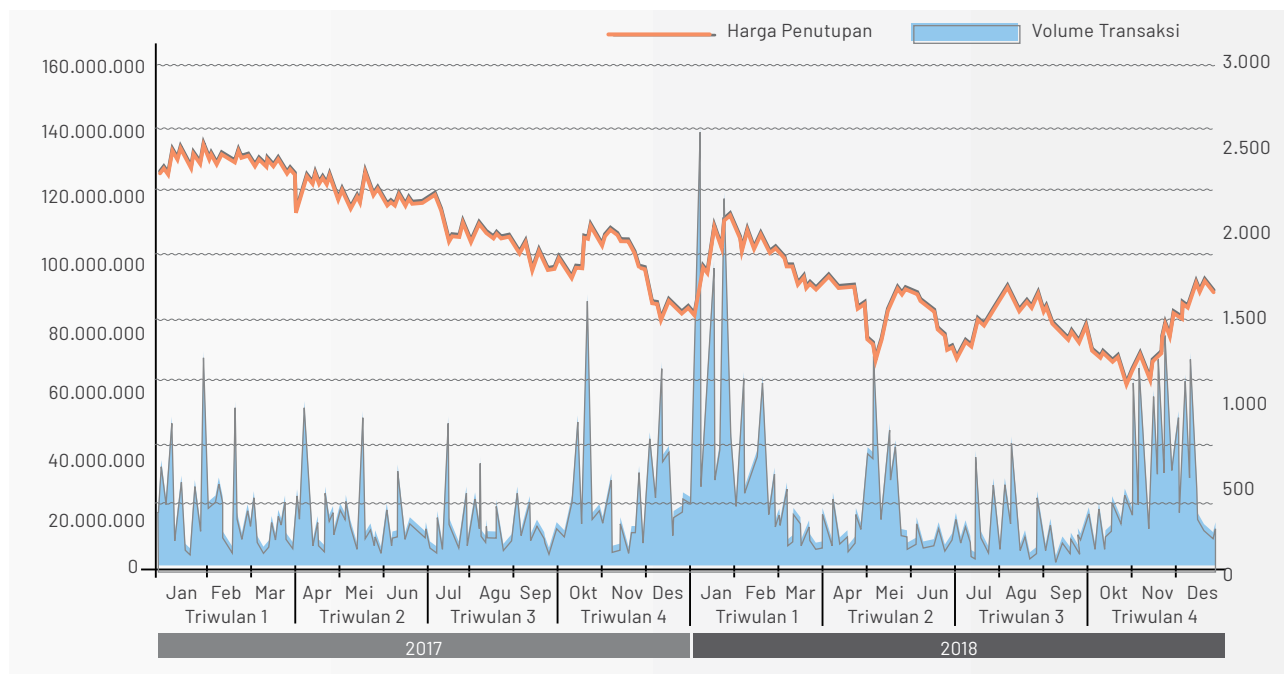
KETERANGAN	2018	2017	PERTUMBUHAN
	(RP)	(RP)	(%)
Omset Kontrak Baru	1.173,07	1.961,10	(40,18)
Omset Kontrak Dihadapi	2.635,80	3.039,90	(13,29)

IKHTISAR SAHAM

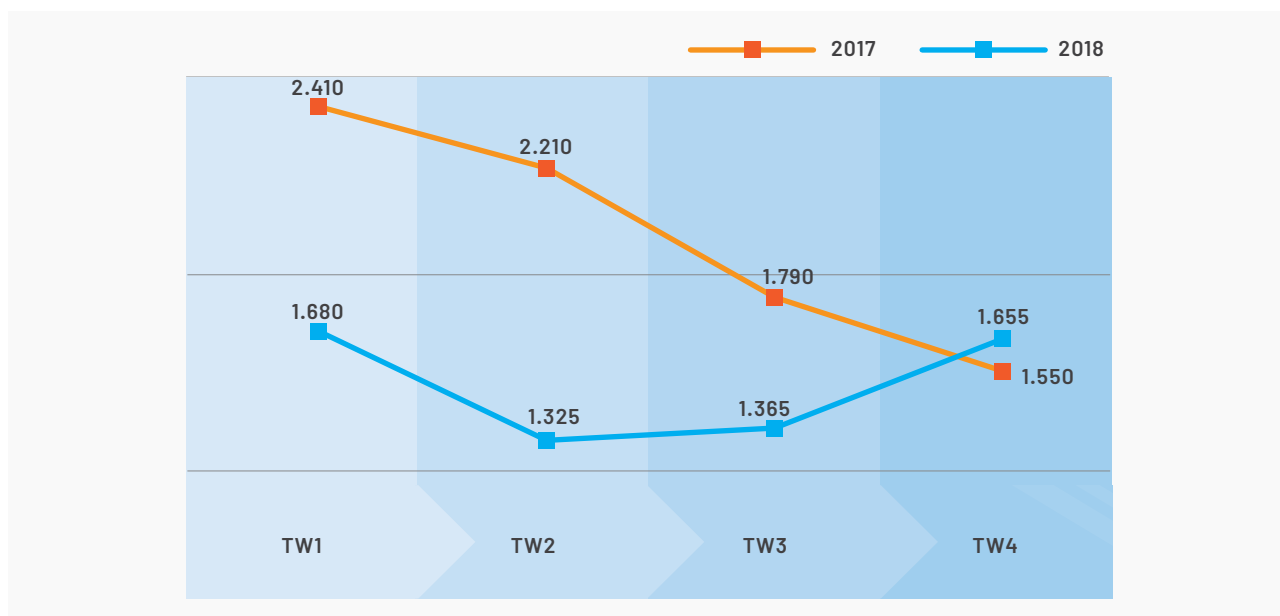
Tabel Harga, Volume dan Kapitalisasi Saham WIKA 2017-2018

TAHUN	HARGA PER SAHAM (RP)				JUMLAH SAHAM (DALAM JUTA LEMBAR)	VOLUME TRANSAKSI (SAHAM)	KAPITALISASI PASAR (RP JUTA)
	PEMBUKAAN	TERTINGGI	TERENDAH	PENUTUPAN			
2018							
Triwulan I	1.560,00	2.120,00	1.525,00	1.680,00	8.969,95	7.111,00	15.069,52
Triwulan II	1.700,00	1.755,00	1.250,00	1.325,00	8.969,95	8.492,70	11.885,19
Triwulan III	1.325,00	1.690,00	1.255,00	1.365,00	8.969,95	9.853,20	12.243,98
Triwulan IV	1.375,00	1.720,00	1.100,00	1.655,00	8.969,95	12.978,70	14.845,27
2017							
Triwulan I	2.360,00	2.570,00	2.400,00	2.410,00	8.969,95	1.140,00	21.617,58
Triwulan II	2.410,00	2.390,00	2.180,00	2.210,00	8.969,95	864,85	19.823,59
Triwulan III	2.210,00	2.250,00	1.790,00	1.790,00	8.969,95	908,37	16.056,21
Triwulan IV	1.790,00	2.050,00	1.505,00	1.550,00	8.969,95	1.480,00	13.903,42

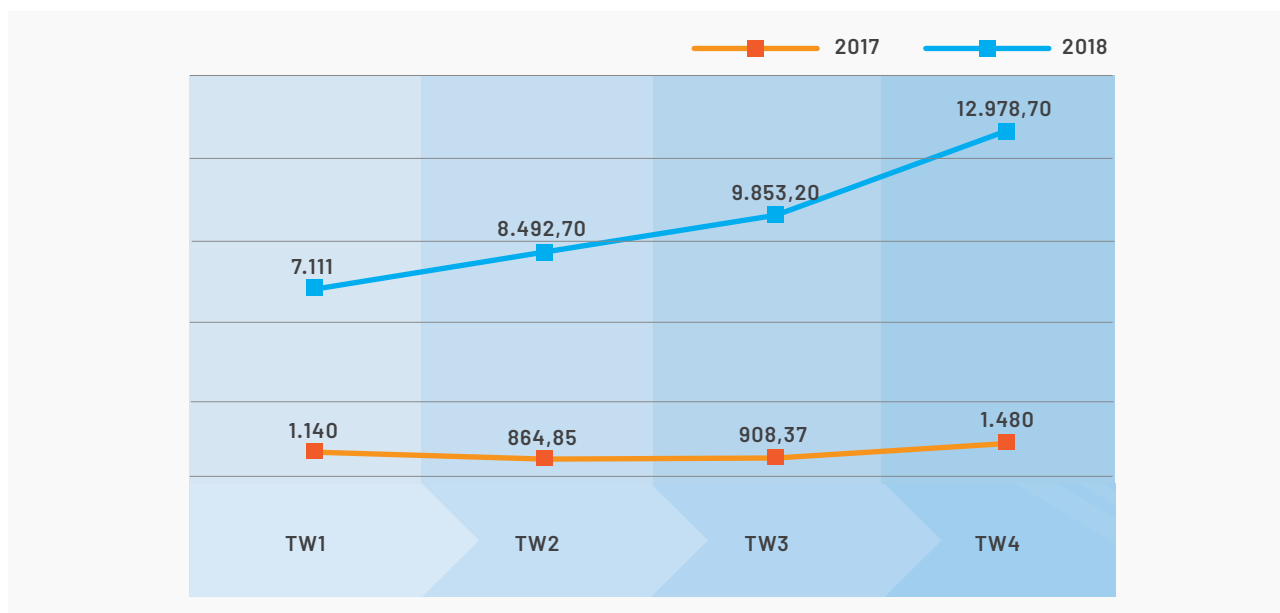
Grafik Pergerakan Harga dan Volume Saham tahun 2017-2018



Grafik Pergerakan Harga Penutupan Saham Triwulanan 2017-2018



Grafik Pergerakan Volume Saham Triwulanan 2017-2018



INFORMASI OBLIGASI, SUKUK DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI

INFORMASI OBLIGASI

KOMODO BOND

Pada tanggal 29 Januari 2018, WIKA menerbitkan obligasi berdenominasi Rupiah sebesar Rp5.400.000.000 yang akan jatuh tempo pada bulan Januari 2021. Obligasi ini dikenakan biaya bunga 7,7% per tahun. Obligasi Komodo Bond ini tercatat di Singapore Exchange dan London Stock Exchange.

INFORMASI SUKUK

Sampai dengan Desember 2018, WIKA tidak menerbitkan sukuk dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai sukuk.

INFORMASI OBLIGASI KONVERSI

Sampai dengan Desember 2018, WIKA tidak menerbitkan obligasi konversi dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai obligasi konversi.

INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA

SURAT BERHARGA PERPETUAL

Pada tanggal 27 Desember 2018, Surat Berharga Perpetual I WIKA Tahun 2018 berhasil diterbitkan. Total dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan Tahap I 2018 ini adalah sebesar Rp600.000.000.000. Imbal hasil yang ditetapkan sebesar 10,5% per tahun ditambah *Step-up Rate* (jika ada).

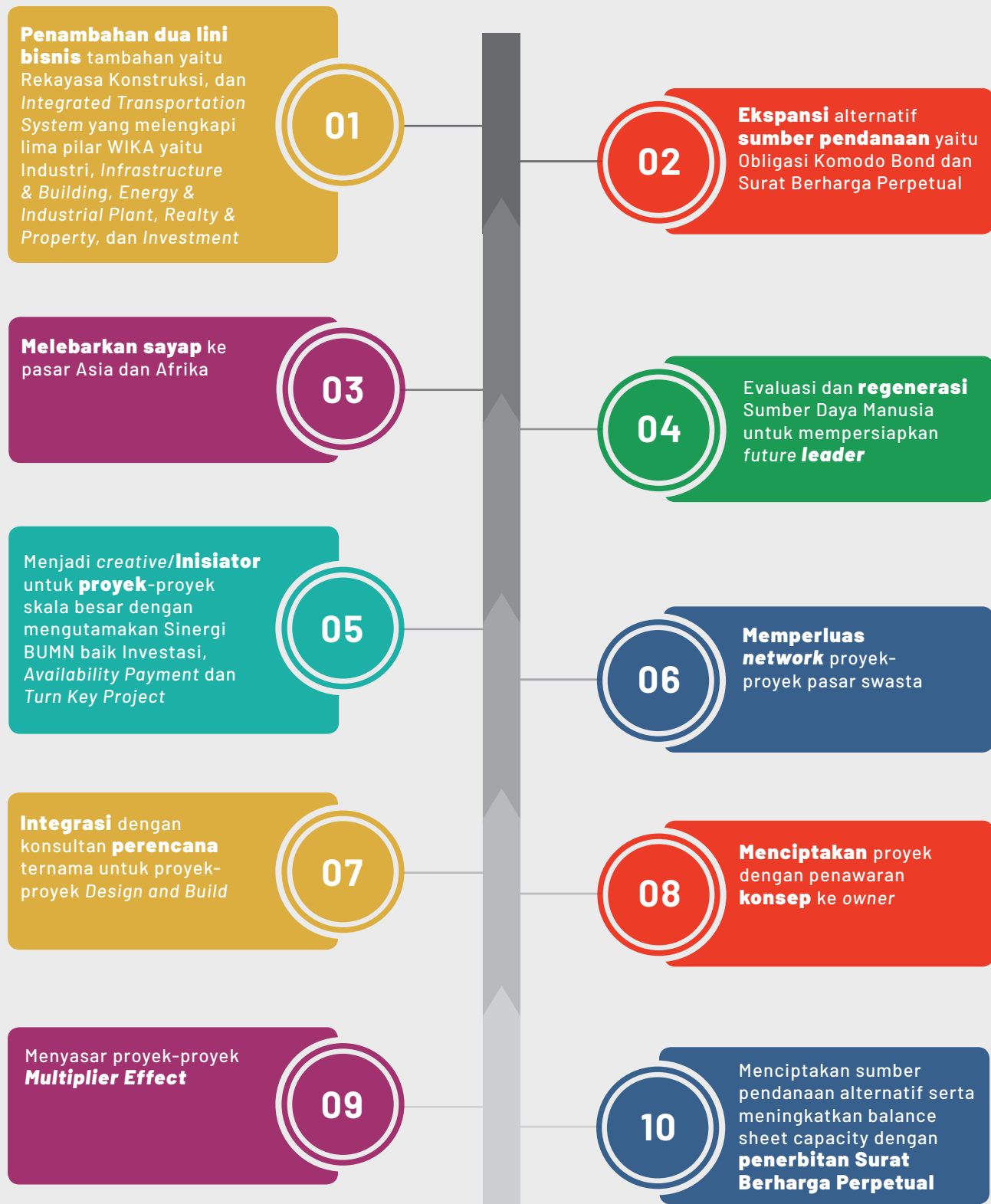
Tabel Penerbitan Obligasi

URAIAN	TANGGAL TERBIT	TENOR	MATA UANG	NILAI (MILIAR)	TANGGAL JATUH TEMPO	TINGKAT SUKU BUNGA	STATUS PEMBAYARAN	PERINGKAT		WALI AMANAT
								2018	2017	
KOMODO BOND										
Komodo Bond	29 Januari 2018	3 Tahun	Rp	5.400	29 Januari 2021	7,7%	Belum Lunas	Fitch : BB Moody's : B2a	-	The Bank of New York Mellon

Tabel Penerbitan Surat Berharga Perpetual

URAIAN	TANGGAL TERBIT	TENOR	MATA UANG	NILAI (MILIAR)	TANGGAL JATUH TEMPO	TINGKAT SUKU BUNGA	STATUS PEMBAYARAN	PERINGKAT		WALI AMANAT
								2018	2017	
SURAT BERHARGA PERPETUAL										
Surat Berharga Perpetual	27 Desember 2018	Sampai dengan dilaksanakannya opsi tebus oleh penerbit	Rp	600	Sampai dengan dilaksanakannya opsi tebus oleh penerbit	10,5% berlaku Step-up Rate (jika ada)	Belum Lunas	Fitch: AA	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk.

STRATEGI UTAMA 2018



PERISTIWA PENTING



15 JANUARI 2018

WIKA menjalin kerja sama usaha patungan (*joint venture*) dengan PT Bandar udara Internasional Jawa Barat (BIJB) *Aerocity Development*. Penandatanganan MoU antara DOP III Destiawan Soewardjono dengan Direktur Utama BIJB Alfiansyah dilakukan di Grand Preanger, Bandung. Kerja sama kedua belah pihak ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan *aerocity* yang akan menjadi penyangga Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.



29 JANUARI 2018

WIKA resmi menerbitkan "Komodo Bonds" di London Stock Exchange senilai Rp5,4triliun atau setara dengan US\$405 juta dengan kupon obligasi 7,7% per tahun. Komodo Bonds WIKA mendapat dukungan yang besar dari investor global dan mengalami *oversubscribed* mencapai 250%.



5 FEBRUARI 2018

WIKA bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) III dalam pembangunan *flyover* akses Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur. Sinergi kedua BUMN ini ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja sama senilai Rp1,3 triliun oleh General Manager WIKA dan Manajemen Pelindo III di Teluk Lamong. Penandatanganan disaksikan oleh Asisten II Sekretaris Kota Surabaya, M. Taswin, Direktur Utama Pelindo III I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra (Ari Ashkara), Direksi WIKA, serta Direksi PT Mitrakarya Multiguna.



20 FEBRUARI 2018

WIKA semakin mengibarkan kiprahnya di luar negeri dengan membangun 1.700 dan 2.250 unit Lodgement AADL yang berlokasi di Aljazair. Pada proyek ini WIKA memberangkatkan 108 duta bangsa dengan seremoni yang diselenggarakan di Auditorium WIKA Tower.



7 MARET 2018

Presiden RI Joko Widodo melaksanakan kunjungan kerja ke Proyek MRT Stasiun Senayan Jakarta yang dikerjakan oleh WIKA dalam Konsorsium Shimizu - Obayashi - WIKA - Jaya Konstruksi (SOWJ).



12 MARET 2018

WIKA yang diwakili oleh Direktur Destiawan Soewardjono menyambut kedatangan Duta Besar Indonesia untuk Afghanistan, Arief Rachman MD beserta delegasi pemerintahan Afghanistan di Gedung WIKA. Kunjungan ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian Kunjungan Delegasi bisnis Afghanistan ke Indonesia.



10-11 APRIL 2018

WIKA semakin mengoptimalkan pasar Afrika melalui inisiasi kerja sama dengan Pemerintah Zambia. Momentum ini menjadi salah satu agenda penting yang ditorehkan Perseroan pada ajang Indonesia Africa Forum (IAF) di Nusa Dua Bali Convention Center.



24 APRIL 2018

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 Tahun Buku 2017 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. berlangsung di Auditorium WIKA Tower 2.



30 APRIL 2018

WIKA meraih penghargaan "Best Partnership Program and Community Development in Construction Category" pada ajang bertajuk Apresiasi Program Kemitraan & Bina Lingkungan Indonesia 2018 yang digelar oleh Warta Ekonomi di Hotel Sari Pacific.



25 JUNI 2018

Presiden RI Joko Widodo meninjau serangkaian proyek WIKA (konstruksi jalan dan trotoar Sudirman - Thamrin dan venues GBK) yang digunakan pada Asian Games 2018. Dalam inspeksi tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Ketua Inasgoc Eric Thohir, dan DOP I Agung Budi Waskito.



11 JULI 2018

WIKA kembali berhasil masuk kedalam jajaran Indeks 25 Perusahaan SRI KEHATI tahun 2018 pada acara Indonesia Green Company Achievement 2018 di Hotel Ayana Mid Plaza.


11 MEI 2018

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Direktur Utama WIKA Tumiyana, Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin dan Direktur Utama Pupuk Sriwijaya Palembang (Pusri) Mulyono Prawiro bersama-sama melakukan penekanan sirine (*groundbreaking*) yang menandai langkah awal Pembangunan Proyek Pabrik Pupuk NPK (Nitrogen Phospor & Kalium) Fusion II berkapasitas produksi 2x100 ribu ton bertempat di Palembang.


17 MEI 2018

WIKA menandatangani Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Sinergi dengan Semen Indonesia, Semen Baturaja, Hotel Indonesia Natour dan Pelindo III di Kementerian BUMN.


30 MEI 2018

WIKA Jalin Kerjasama dengan Citra Consortium untuk Bangun Jalan Tol Elevated Manila-Taguig Express Way. Kesepahaman bersama ini ditandatangani oleh Direktur Utama WIKA Tumiyana, *Authorized Representative* Citra Lamtoro Gung Persada Phillipines Sahra M. Mayor, dan disaksikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno serta Direktur Utama PT Citra Persada Infrastruktur Indrawan Sumantri.


18 JULI 2018

WIKA melanjutkan kerja sama dengan perusahaan konstruksi asal Jepang KAJIMA Corporation (KAJIMA) untuk terus mengembangkan WIKA Engineering and Research Institute (WERI). Kesepakatan ini ditandai dengan Penandatanganan Perpanjangan Nota Kesepahaman antara kedua perusahaan di WIKA Tower 2.


12 AGUSTUS 2018

WIKA Group Raih 4 Penghargaan dalam ajang BUMN Award 2018 yang diselenggarakan oleh Majalah BUMN Track. Penghargaan yang diterima adalah: Top 2 Strategi Pertumbuhan Terbaik kategori BUMN Tbk., *Excellence in Interpersonal Relationship* yang disematkan pada CEO WIKA Tumiyana, Top 2 Inovasi Bisnis Terbaik untuk PT WIKA Gedung Tbk., dan Top 2 Pengembangan Talenta Terbaik untuk PT WIKA Beton Tbk.


27 AGUSTUS 2018

Direksi dan manajemen hadir dalam Public Expose 2018 di Bursa Efek Indonesia dalam rangkaian acara Investor Summit 2018. Dalam kesempatan ini, Direksi memaparkan *update* laporan keuangan semester-I 2018 dan beberapa rencana aksi korporasi.



6 SEPTEMBER 2018

WIKA kembali raih Indonesia Champion for ASEAN 2018 Sektor Konstruksi yang diberikan langsung oleh Hermawan Kartajaya selaku Founder dan CEO MarkPlus Inc, kepada Direktur Operasi I WIKA Agung Budi Waskito di Raffles Hotel Jakarta pada acara The 4th ASEAN Marketing Summit.



18 SEPTEMBER 2018

WIKA mendapatkan kehormatan sebagai satu-satunya BUMN yang terpilih untuk dikunjungi oleh Delegasi Singapore Business Federation (SBF) di Kantor Pusat WIKA.



11- 14 OKTOBER 2018

Dalam ajang Annual Meeting IMF & World Bank 2018, WIKA mengoptimalkan kesempatan dan meraih beberapa *dealing business* strategis dengan beberapa negara. Beberapa di antaranya adalah kesepakatan pembangunan rumah hunian dan gedung kantor dengan The Development Bank of Rwanda serta pembangunan *smelter* timah di Nigeria yang difasilitasi oleh Indonesian Exim Bank.



30 NOVEMBER 2018

WIKA masuk dalam kategori Best of the Best versi majalah Forbes Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada 50 perusahaan terbaik Indonesia dalam peringkat Forbes Indonesia. Penghargaan ini diterima oleh Corporate Affairs Manager WIKA Satrio Adji pada gala *dinner* dan malam penganugerahan yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta.



2 DESEMBER 2018

Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno meninjau program penyambungan Listrik 450 Watt yang turut diprakarsai oleh WIKA bagi 100 ribu keluarga yang dinilai kurang mampu di Kabupaten Bogor.


19 OKTOBER 2018

WIKA sukses terpilih sebagai pemenang dalam ajang Internasional Year in Infrastructure 2018 Award yang digelar oleh perusahaan penyedia software Bentley di London, Inggris. WIKA meraih Juara I pada Kategori Advancements in Bridges pada Proyek Design and Build of Road Bridge at Teluk Lamong Port Project 2018 serta Juara I pada Kategori Advancements in Environmental Engineering pada Proyek Landside Disaster Protection Project on the National Road Network 2018.


21 OKTOBER 2018

Direktur Utama WIKA Tumiyana dan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) ("AP II") Muhammad Awaluddin menandatangani nota kesepahaman sinergi BUMN dan/ atau Anak Perusahaan dalam pengoperasian dan pemeliharaan bandara yang dikelola oleh AP II.


29 NOVEMBER 2018

Direktur Keuangan A.N.S. Kosasih meraih penghargaan sebagai pemenang pertama dalam Indonesia Best Chief Financial Officer Award 2018. Indonesia Best Chief Financial Officer Award 2018 merupakan event rutin yang diselenggarakan oleh majalah SWA dalam rangka mengapresiasi perkembangan profesional di bidang keuangan yang kembali digelar di Hotel Shangri-La Jakarta.


4 DESEMBER 2018

Direktur Operasi III WIKA, Destiawan Soewardjono meraih penghargaan The Best Industry Marketing Champion Kategori Konstruksi dalam ajang The Best Marketeer of The Year (MOTY) 2018 yang diselenggarakan oleh Mark Plus Inc.


7 DESEMBER 2018

WIKA meraih CFO Innovation Awards for Excellence In Supply Chain Finance pada CFO Innovation Awards 2018.


11 DESEMBER 2018

WIKA Bersama PT Angkasa Pura II (Persero) menyepakati proses peninjauan pembangunan Hotel Integrated Building Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta melalui penandatanganan Nota Kesepahaman.

AKSI KORPORASI

Tabel Aksi Korporasi WIKA

PERIODE	KETERANGAN	NILAI NOMINAL (RP)	HARGA PENAWARAN (RP)	JUMLAH SAHAM YANG DITERBITKAN	MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR		
					JUMLAH SAHAM	TOTAL NILAI (RP)	TOTAL HARGA PENAWARAN
SEBELUM IPO					4.000.000.000	4.000.000.000	
2007	Perseroan melakukan penawaran umum perdana	100	420	1.846.154.000	5.846.154.000	584.636.750.000	775.384.680.000
2009	exercise ESOP/MSOP	100	322,74	213.500	5.846.367.500	584.636.750.000	68.904.990
2010	exercise ESOP/MSOP	100	322,74	155.173.000	6.001.540.500	600.154.050.000	50.080.534.020
2011	exercise ESOP/MSOP	100	322,74	25.727.000	6.027.267.500	602.726.750.000	8.303.131.980
2012	exercise ESOP/MSOP	100	322,74	80.699.000	6.107.966.500	610.796.650.000	26.044.795.260
2013	exercise ESOP/MSOP	100	322,74	32.001.500	6.139.968.000	613.996.800.000	10.328.164.110
2014	exercise ESOP/MSOP	100	322,74	9.257.000	6.149.225.000	614.922.500.000	2.987.604.180
2016	Penawaran Umum Terbatas	100	2.180	2.820.726.372	8.969.951.370	896.995.137.000	6.149.183.490.960

AKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (SUSPENSION) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (DELISTING)

Sampai dengan Desember 2018, WIKA tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).



Tamansari Parama Jakarta



LAPORAN MANAJEMEN

34 Laporan Dewan Komisaris

42 Laporan Direksi



Jakarta Giant Sea Wall

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

DR. IR. IMAM SANTOSO, M.SC.
Komisaris Utama



**“DEWAN KOMISARIS MEMANDANG BAHWA DIREKSI
TELAH MENUNJUKKAN KINERJA YANG OPTIMAL,
TERUTAMA MELALUI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN STRATEGIS
DIREKSI YANG DIJALANKAN SECARA TEPAT DAN TERARAH.”**

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa di tahun 2018, WIKA kembali mencatat jejak langkah signifikan dalam melaksanakan peran strategis sebagai entitas yang turut mendukung pembangunan perekonomian Indonesia. Berkat lindungan serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa, WIKA berhasil mewujudkan aspirasi dan bahkan melampaui target yang dicanangkan.

Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili jajaran Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan kinerja WIKA di sepanjang tahun 2018. Melalui laporan ini, Dewan Komisaris akan menyampaikan penilaian terhadap kinerja Direksi, pengawasan terhadap implementasi strategi Perseroan, pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi, penerapan Good Corporate Governance, penilaian atas komite penunjang Dewan Komisaris, perubahan komposisi Dewan Komisaris, dan frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.

Seluruh tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa kegiatan operasional Perseroan telah mengacu kepada rencana bisnis yang telah ditetapkan, dikelola secara profesional, sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL DAN INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2018 terus mengalami perbaikan. Meskipun demikian, beberapa risiko masih terus membayangi. Perekonomian negara-negara maju dan berkembang pada tahun 2018 masih mengarah kepada pemulihan meskipun lajunya mengalami moderasi jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Faktor global seperti tingginya sentimen perang dagang antara AS dan Tiongkok, risiko geopolitik di Timur Tengah dan Semenanjung Korea, serta kenaikan harga minyak dunia berperan dalam meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Dari sisi domestik, tekanan juga datang akibat peningkatan permintaan valuta asing untuk kebutuhan pembayaran utang luar negeri, pembayaran dividen dan impor.

Pada triwulan pertama 2018, pertumbuhan ekonomi solid terjadi secara luas yang umumnya didukung oleh peningkatan investasi. Peningkatan tingkat permintaan turut mendorong kenaikan harga komoditas, terutama komoditas minyak mentah dunia. Kenaikan harga minyak juga disebabkan oleh penurunan produksi serta ketegangan geopolitik yang melibatkan negara penghasil minyak.

Meskipun tingkat aktivitas ekonomi secara global masih sangat solid, namun lajunya terhambat melambat di tahun 2018, yang menunjukkan bahwa puncak pemulihan ekonomi global telah terjadi pada akhir 2017. Hal ini juga nampak pada indeks perdagangan dan manufaktur global yang berada dalam tren perlambatan meski masih mencatatkan pertumbuhan positif dan berada pada posisi yang cukup tinggi.

Kondisi global turut berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di dalam negeri, seperti yang terlihat dari nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang terus melemah. Meski diterpa berbagai tekanan dari eksternal yang cukup berat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup terjaga. Salah satunya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 5%.

Pencapaian ini merupakan hal yang sangat positif yang membuktikan bahwa meskipun di bawah tekanan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih

mengalami momentum pertumbuhan yang cukup kuat. Indikator ekonomi triwulan IV 2018 menunjukkan konsumsi swasta tetap kuat ditopang daya beli dan keyakinan konsumen yang terjaga serta dampak positif persiapan Pemilu. Kuartal per kuartal dalam tiga tahun terakhir menunjukkan konsumsi rumah tangga masih relatif terjaga, tumbuh di atas 5% sepanjang 2018. Angka ini jauh lebih baik dibanding 2017 maupun 2016 yang beberapa kuartal mengalami penurunan di bawah 5%. Pencapaian ini antara lain juga didukung oleh asumsi inflasi yang sesuai target karena berhasil dikendalikan di level 3,13% dari target 3,5%. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 mencapai 5,15% dari target APBN 2018 sebesar 5,4%. Kesulitan mencapai asumsi makro tersebut terjadi karena pengaruh ketidakpastian ekonomi global.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Fokus Pemerintah yang masih menekankan pada percepatan infrastruktur menjadi nilai tambah tersendiri bagi WKA yang menjalankan *core business* di sektor konstruksi. Selama tahun 2018, Perseroan telah berhasil meningkatkan pendapatan di hampir semua segmen yang dimiliki. Pendapatan segmen infrastruktur dan gedung di tahun 2018 mencapai Rp20,60 triliun, meningkat sebesar 20,32%, dari tahun 2017 yang sebesar Rp17,12 triliun.

Sementara itu, pendapatan segmen industri mencapai Rp4,12 triliun meningkat sebesar 13,80% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3,62 triliun. Sedangkan pendapatan segmen energi dan industrial plant mencapai Rp5,12 triliun, meningkat 29,28% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp3,96 triliun. Pertumbuhan ketiga segmen operasi Perseroan telah berhasil meningkatkan total pendapatan sebesar 19,03% di 2018. Peningkatan kinerja operasional di 2018 telah berdampak pada peningkatan aset dan laba Perseroan. Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar 29,65%, sedangkan laba bersih mengalami peningkatan sebesar 52,89% di 2018.

Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Direksi yang telah bekerja keras dan mencapai target yang telah dicanangkan, bahkan melampaui target. Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah menunjukkan kinerja yang optimal, terutama melalui

kebijakan-kebijakan strategis Direksi yang dijalankan secara tepat dan terarah. Dewan Komisaris melakukan Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang merangkum target-target yang harus dicapai Direksi di tahun berjalan.

Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan berdasarkan pencapaian target-target yang telah ditetapkan pada RKAP Perseroan yang disetujui secara bersama-sama dengan mempertimbangkan kapasitas dan kondisi eksternal. Dari aspek target kontrak baru, Direksi berhasil mewujudkan pencapaian pada angka Rp50,56 triliun. Sementara dari aspek finansial, Direksi berhasil mencapai target penjualan sebesar 79,01% dan laba bersih yang melampaui target yaitu pada angka 110,50%. Menilai bahwa di tengah tantangan kondisi perekonomian, baik dalam skala nasional maupun global, serta persaingan usaha yang terus meningkat, Direksi telah mengupayakan berbagai langkah strategis agar Perseroan tetap bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan.

Beberapa strategi utama yang digaribawahi oleh Dewan Komisaris adalah keberhasilan dalam meluncurkan ekspansi alternatif sumber pendanaan Global IDR Bond dan Surat Berharga Perpetual. Sebuah alternatif pendanaan yang terbukti berhasil melesatkan kinerja WIKA dan semakin memperkuat struktur permodalan WIKA. Selain itu juga strategi ekspansi dengan melebarkan sayap ke beberapa pasar internasional, antara lain ke Aljazair, Filipina, Taiwan, Malaysia, Niger dan lain-lain. Upaya yang dilakukan telah menunjukkan hasil di mana WIKA dipercaya untuk melakukan pekerjaan dan melahirkan inovasi-inovasi di negara-negara tersebut.

TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Tingkat kesehatan Perseroan yang diukur berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 100/MBU/2002 menunjukkan bahwa secara keseluruhan realisasi skor tingkat kesehatan Perseroan pada tahun 2018 adalah sebesar 81,75 dengan kualifikasi AA dan SEHAT. Pengukuran tersebut didasarkan pada kinerja Perseroan yang meliputi aspek operasional, keuangan dan administrasi.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERSEROAN

Dewan Komisaris senantiasa menempatkan pengawasan atas implementasi strategi Perseroan sebagai salah satu prioritas. Seluruh kegiatan operasional serta pengelolaan finansial senantiasa dilakukan dengan berlandaskan pada *best practices* terhadap prinsip-prinsip yang berlaku sesuai Peraturan Perundang-undangan. Terhadap Direksi, Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan saran dan rekomendasi yang konstruktif dan solutif dalam menghadapi tantangan. Satu hal yang selalu ditekankan Dewan Komisaris kepada Direksi adalah untuk senantiasa mengedepankan aspek kepatuhan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja Direksi juga dilakukan melalui rapat-rapat yang diselenggarakan minimal satu bulan sekali termasuk penyampaian Evaluasi Hasil Usaha Perseroan dan Laporan *Progress Kinerja* per Direktorat secara periodik. Rapat yang diselenggarakan terdiri dari Rapat Gabungan Dewan Komisaris Direksi, serta Rakomsus yang diselenggarakan untuk membahas kejadian khusus pada saat diperlukan. Pengawasan Dewan Komisaris juga dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.

Selain itu, Dewan Komisaris melakukan pengawasan langsung ke lapangan dengan mengunjungi lokasi pengerjaan proyek-proyek strategis dan entitas anak Perseroan. Pada kunjungan tersebut, Dewan Komisaris melakukan pengecekan apakah pengerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan kualitas, kontrak, dan memenuhi ekspektasi pelanggan.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Implementasi tata kelola perusahaan yang baik senantiasa menjadi fokus dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Di tahun 2018, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi dan seluruh elemen WIKA telah menerapkan

prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran. Prinsip-prinsip tersebut adalah kunci utama yang penting untuk selalu dijalankan dengan kesadaran penuh sehingga WIKA senantiasa berjalan dengan baik, memiliki kinerja tinggi tanpa mengorbankan independensi dan tanggung jawab.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris memandang bahwa Perseroan telah menerapkan pedoman tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal sebaik-baiknya. Dari waktu ke waktu, Dewan Komisaris melihat Perseroan mempunyai komitmen kuat untuk senantiasa meningkatkan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan telah mewujudkannya secara konsisten. Perwujudan komitmen ini terlihat dari berbagai raihan penghargaan di bidang kepatuhan serta perolehan skor penilaian GCG tahun 2018 yang mencapai 94,949 dengan predikat "Sangat Baik".

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mengawasi dan mengelola Perseroan didukung oleh Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG. Selama tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya antara lain dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan penelaahan atas informasi keuangan, penelaahan atas aktivitas pelaksanaan manajemen risiko, penelaahan atas hasil audit Satuan Pengawasan Intern dan KAP atas Sistem Pengendalian Internal. Sementara Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG telah melaksanakan tugasnya antara lain dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas Nominasi, Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, *monitoring* kepatuhan atas kegiatan Perseroan, serta penerapan GCG.

Di tahun 2018, Dewan Komisaris memandang bahwa komite-komite di bawah supervisi Dewan Komisaris ini telah melaksanakan fungsi masing-masing dengan efektif dengan masukan dan arahan yang konstruktif kepada Dewan Komisaris.

PANDANGAN DAN PERAN DALAM PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Sebagai salah satu poin pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), WIKA senantiasa berupaya memastikan bahwa *Whistleblowing System* (WBS) dapat meningkatkan kesadaran dan inisiatif terhadap pengawasan pelanggaran di tubuh Perseroan sebagai sarana dalam pencegahan, pengungkapan pelanggaran atau tindak kecurangan dalam Perseroan, termasuk di dalamnya *Insider Trading*, *Fraud*, *Money Laundering*, *Anti-Bribery and Corruption* (ABC), diskriminasi dan penyimpangan lainnya. Untuk itu, sosialisasi serta penyempurnaan terus dilakukan agar pihak internal dan eksternal dapat berpartisipasi dalam mengawasi kinerja Perseroan dan bersama-sama membangun WIKA yang bersih.

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris secara aktif terlibat dan mengawasi efektivitas pelaksanaan WBS di Perseroan. Setiap laporan yang diterima dalam WBS akan diproses oleh Tim Kepatuhan GCG, Tim Pencari Fakta, dan Majelis Kehormatan Pegawai dengan keterlibatan Direksi dan Komisaris sebagai penentu keputusan atas laporan tersebut. Laporan dipastikan akan ditindaklanjuti secara tegas dengan sanksi yang sesuai dan berimbang. Dari tindak lanjut yang dilakukan, diharapkan bahwa akan terdapat efek jera bagi pelaku pelanggaran serta menjadi peringatan bagi pihak yang memiliki niat melakukan pelanggaran.

Selama tahun 2018 tidak terdapat laporan pelanggaran yang disampaikan melalui WBS. Dewan Komisaris mendukung setiap usaha untuk mendorong komitmen WIKA pada praktik bisnis yang bersih dan akuntabel.

FREKUENSI DAN MEKANISME PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi. Selain melalui rapat-rapat dan kunjungan lapangan, Dewan Komisaris memberikannya dalam bentuk tertulis. Setiap rencana yang diajukan Direksi akan ditindaklanjuti Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa pelaksanaannya senantiasa selaras dengan peraturan serta aspirasi Pemegang Saham.

Dewan Komisaris mengkaji setiap usulan rencana kerja yang diajukan untuk kemudian memberikan masukan, kritik, *reminder*, dan tanggapan kepada Direksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Proses pengkajian ini dilakukan juga dengan melibatkan komite-komite dengan memperhatikan kondisi lapangan, kapasitas sumber daya manusia dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Di tahun 2018, frekuensi pemberian nasihat Dewan Komisaris dilakukan dengan lebih intensif seiring diterbitkannya Surat Berharga Perpetual dan Obligasi Komodo Bond. Dalam hal ini, penggunaan atas hasil dana yang terhimpun harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Rapat-rapat internal Dewan Komisaris pun terus dilakukan untuk mendapat masukan-masukan dari Komite.

PANDANGAN ATAS PROSPEK YANG TELAH DISUSUN OLEH DIREKSI

Direksi telah menyusun RKAP 2019 dan sudah disetujui oleh Dewan Komisaris dengan menggarisbawahi pada target laba bersih serta kontrak baru yang meningkat signifikan. Dewan Komisaris yang turut mendukung penyusunan RKAP tersebut memandang bahwa target yang dicanangkan sudah sesuai dengan prediksi-prediksi ekonomi, pasar, politik, dan kondisi masyarakat tahun 2019 dan sesuai dengan kemampuan serta kapasitas WIKA. Direksi sepenuhnya memahami bahwa tren perkembangan ke depan akan semakin menuntut kualitas, inovasi, konektivitas, serta teknologi. Direksi mampu mempersiapkan Perseroan untuk dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tersebut beriringan dengan pemenuhan dukungan Perseroan terhadap proyek-proyek strategis nasional.

Dewan Komisaris menyadari bahwa tantangan di tahun 2018 nanti tidak akan lebih mudah dibandingkan dengan tahun 2017. Kondisi ekonomi makro Indonesia diperkirakan tetap pada rentang pertumbuhan ekonomi 5,1-5,3%. Namun demikian, tantangan dari eksternal terutama dari aspek kondisi ekonomi global dan situasi geopolitik masih membayangi dan berpeluang memberikan tekanan kepada kondisi perekonomian dalam negeri.

Tahun 2019 akan menjadi tahun demokrasi dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif secara serentak yang sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Menghadapi kondisi tersebut, Dewan Komisaris berharap bahwa kondisi bisnis akan tetap stabil dan keamanan tetap terjaga. Di tahun 2019, proyek-proyek infrastruktur dalam naungan proyek strategis nasional juga masih akan tetap berjalan. Capaian kontrak baru WIKA di Tahun 2018 adalah Rp50,56 triliun yang ditargetkan meningkat menjadi Rp61,74 triliun di tahun 2019. Dewan Komisaris optimis bahwa target kontrak baru ini akan dapat tercapai dan laba Perseroan semakin melonjak. Terlebih dengan APBN yang masih banyak menekankan pada infrastruktur sehingga WIKA berharap akan dapat meraih kontrak yang lebih banyak dan terus membangun negeri.

Dewan Komisaris melihat bahwa WIKA adalah sebuah entitas yang besar. Untuk mempertahankan eksistensi, WIKA harus mempertahankan margin yang tinggi, menghindari stagnansi, dan semakin ekspansif. Dewan Komisaris juga mengimbau agar alokasi laba yang didapat serta penggunaan dana yang telah terhimpun dapat digunakan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan Perseroan dengan strategi yang tepat sasaran dan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG agar WIKA tetap berada pada koridor yang tepat.

Tahun 2019 juga akan menandai langkah besar dua entitas anak Perusahaan yang akan melakukan *Initial Public Offering* (IPO), yaitu Wika Realty dan WIKA Industri & Konstruksi. Dewan Komisaris berharap IPO akan berjalan dengan lancar dan menghimpun dana masif yang akan mendukung ekspansi WIKA. Melalui IPO ini, diharapkan juga WIKA akan memberikan *multiple effect* bagi masyarakat luas di seluruh penjuru Indonesia. Masyarakat semakin terberdayakan, serapan tenaga kerja semakin besar, dan Indonesia yang semakin sejahtera. Dewan Komisaris yakin, dengan kebijakan strategis Direksi yang *prudent* dan peraturan yang berlaku, fluktuasi pasar akan dapat dihadapi dengan baik.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2018, komposisi Dewan Komisaris Perseroan mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

Periode 1 Januari 2018-24 April 2018, Dewan Komisaris berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat WIKA.

Periode 1 Januari 2018 – 24 April 2018

NAMA	JABATAN
Imam Santoso	Komisaris Utama
Eddy Kristanto	Komisaris
Freddy R. Saragih	Komisaris
Lilie Mayasari	Komisaris
Nurrachman	Komisaris Independen
Imas Aan Ubudiah	Komisaris Independen

Periode 24 April 2018-31 Desember 2018, Dewan Komisaris berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Komisaris dan 3 (tiga) orang Komisaris Independen.

Periode 24 April 2018 – 31 Desember 2018

NAMA	JABATAN
Imam Santoso	Komisaris Utama
Eddy Kristanto*	Komisaris
Freddy R. Saragih	Komisaris
Lilie Mayasari	Komisaris
Imas Aan Ubudiah**	Komisaris Independen
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen
Achmad Hidayat	Komisaris Independen

*) Berdasarkan Keputusan RUPSLB pada tanggal 25 Maret 2019 yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan

**) Per 20 September 2018, yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI untuk Pemilihan Umum tahun 2019 sehingga sesuai Anggaran Dasar pasal 14 ayat 29, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris dikarenakan adanya larangan rangkap jabatan sebagai caleg DPR.

PENUTUP DAN APRESIASI

Atas capaian kinerja yang tinggi dan seluruh prestasi yang telah terukir di tahun 2018, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direksi, Manajemen dan seluruh Insan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., atas kerja keras yang telah dikerahkan sehingga Perseroan dapat terus menorehkan kinerja positif. Apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh mitra bisnis, para pemasok bahan baku dan masyarakat sekitar yang mendukung kontribusi terbaik Perseroan bagi seluruh pemangku kepentingan.

WIKA adalah sebuah perusahaan yang besar. Untuk itu, Dewan Komisaris mengajak seluruh insan WIKA untuk bersama-sama menjaga dan membangun WIKA untuk tumbuh lebih besar dan menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. *Sense of belonging* sebagai bagian dari keluarga besar WIKA akan menjadi kekuatan yang memotivasi untuk bekerja dengan hati dan rasa tanggung jawab. Semoga pertumbuhan berkelanjutan yang kita cita-citakan bersama akan selalu mendorong semangat untuk meraih keunggulan di tahun-tahun mendatang.

Atas Nama Dewan Komisaris



DR. IR. IMAM SANTOSO, M.SC.
Komisaris Utama

LAPORAN DEWAN DIREKSI



IR. TUMIYANA, M.B.A.
Direktur Utama

**"KAPASITAS WIKA KINI TUMBUH SEMAKIN BESAR
SEBAGAIMANA TERCERMIN PADA BERBAGAI PENCAPAIAN
UNGGUL DI ASPEK OPERASIONAL, FINANSIAL, SUMBER
DAYA MANUSIA DAN ASPEK-ASPEK LAINNYA. LOMPATAN
BISNIS YANG LUAR BIASA INI AKAN MENDORONG KINERJA
FINANSIAL SERTA OPERASIONAL WIKA YANG KONSISTEN
DAN BERKELANJUTAN"**

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa di tahun 2018 kami berhasil menjaga momentum pertumbuhan berkelanjutan. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan dinamika yang terjadi di sepanjang tahun, Perseroan berhasil menutup tahun 2018 dengan melakukan ekspansi, inovasi, dan persiapan untuk bertumbuh lebih signifikan di tahun berikutnya. Suatu kehormatan bagi saya atas nama Direksi untuk menyajikan Laporan Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. untuk tahun buku 2018.

PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL DAN INDONESIA

Di tahun 2018, kondisi ekonomi global dihadapkan pada sejumlah ketidakpastian yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti Bank Sentral Amerika (*The Federal Reserve*) yang menaikkan suku bunganya sebanyak tiga kali selama tahun 2018, perang dagang Amerika Serikat – Tiongkok, krisis Turki, hingga krisis politik dan gejolak keuangan di Italia. Hal tersebut berpengaruh cukup banyak terhadap kondisi ekonomi di dalam negeri. Hal ini tercermin dari nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang terus melemah. Ditambah lagi dengan kondisi *Current Account Deficit* (CAD) yang terus melebar akibat kinerja ekspor yang tumbuh lebih rendah daripada impor. Kondisi ini menunjukkan turunnya kepercayaan investor terhadap *emerging market*.

Di tengah perkembangan ekonomi global yang kurang kondusif, kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2018 masih cukup baik dengan stabilitas yang tetap terjaga dan momentum pertumbuhan yang terus berlanjut. Bahkan, Badan Pusat Statistik menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada 2018 adalah sebesar 5,17% atau terbaik sejak lima tahun terakhir. Kendati pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17% atau yang terbaik sejak 2014, nilai tersebut masih belum mencapai target. Pada APBN 2018, Indonesia mencanangkan asumsi dasar ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%.

Jika dilihat dari komponen pengeluaran, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2018 menunjukkan kontribusi ekspor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang negatif 0,99%. Namun jika dilihat dari pertumbuhan secara kumulatif pada 2018 dibandingkan 2017, maka ekspor tumbuh 6,48%. Meski tumbuh, angka ekspor itu lebih rendah dibanding pertumbuhan impor yang melesat 12,04%. Ekspor yang negatif ini menjadi faktor penurun dari laju pertumbuhan ekonomi. Sementara ekonomi Indonesia pada 2018 paling banyak disokong konsumsi rumah tangga sebesar 2,74%. Adapun konsumsi rumah tangga telah pulih dan tumbuh sesuai trennya di 5,05% secara kumulatif pada 2018.

Sejak tahun 2015, pemerintah mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif, yakni pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Anggaran infrastruktur terus meningkat dari Rp155 triliun pada 2014 menjadi sekitar Rp410 triliun pada tahun 2018. Menurut laporan World Bank Group 2018, daya saing infrastruktur Indonesia tahun ini berada di peringkat ke-52, membaik dibandingkan pada 2010-2013 yang berkisar di peringkat 70-an. Kenaikan ini memperlihatkan peranan strategis sektor konstruksi sebagai penggerak ekonomi nasional.

Infrastruktur mendukung sektor ketahanan pangan dan kelancaran proses produksi, meningkatkan aksesibilitas dan ruang mobilitas kepada masyarakat terhadap kegiatan sosial dan ekonomi. Peran strategis sektor konstruksi juga dapat dilihat dari keterkaitan ke belakang dengan sektor-sektor pendukungnya serta keterkaitan ke depan dengan sektor yang memanfaatkan produk sektor konstruksi. Artinya, pertumbuhan

sektor konstruksi akan mampu menarik gerbong pertumbuhan sektor pendukung serta mendorong pertumbuhan sektor pembangunan yang lain.

KENDALA YANG DIHADAPI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITEMPUH

Fluktuasi pertumbuhan sektor konstruksi cenderung bersamaan dengan fluktuasi pertumbuhan ekonomi. Seiring kondisi ekonomi yang kondusif di tahun 2018, kami menyampaikan bahwa tahun 2018 adalah sebuah Quantum Leap yang membanggakan bagi WIKA. Lima pilar yang kami miliki yaitu Industri, *Infrastructure & Building, Energy & Industrial Plant, Realty & Property*, dan *Investment*, kini semakin diperkuat dengan lini bisnis tambahan yaitu Rekayasa Konstruksi, dan *Integrated Transportation System*. Inisiatif ini berasal dari keinginan besar WIKA untuk memiliki bisnis yang *sustain*. Untuk itu, ekspansi ke luar sektor jasa adalah hal mutlak yang harus dilakukan untuk memaksimalkan *resources* yang telah dimiliki.

Bisnis WIKA kini terintegrasi dari hulu ke hilir. *Knowledge* yang telah diraih selama perjalanan bisnis puluhan tahun harus dimanfaatkan dengan optimal. Dari fokus jasa konstruksi di *middle stream*, kini WIKA bangkit dan memaksimalkan setiap potensi lini bisnis yang ada. Kapasitas WIKA kini telah tumbuh semakin besar sebagaimana tercermin pada berbagai pencapaian unggul di aspek operasional, finansial, sumber daya manusia dan aspek-aspek lainnya. Lompatan bisnis yang luar biasa ini akan mendorong kinerja finansial serta operasional WIKA yang konsisten dan berkelanjutan.

Penjualan di 2018 tercatat sebesar Rp31,16 triliun mengalami kenaikan 19,03% jika dibandingkan dengan penjualan di 2017 yaitu sebesar Rp26,18 triliun. Kenaikan tingkat penjualan yang paling besar adalah kenaikan penjualan pada segmen Industri sebesar Rp5,46 triliun pada tahun 2018 atau naik 50,52% dari tahun 2017. Peningkatan penjualan telah menghasilkan peningkatan laba bersih. Di tahun 2018, Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp2,07 triliun, mengalami peningkatan 52,89% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp1,36 triliun.

Dari sisi posisi keuangan, Perseroan telah berhasil meningkatkan total aset dan ekuitas. Per 31 Desember 2018, total aset Perseroan meningkat menjadi Rp59,23 triliun dari Rp45,68 triliun per 31 Desember 2017. Peningkatan total aset tersebut mencapai Rp13,55 triliun atau sebesar 29,65%. Upaya ekspansif ini didukung juga dengan lompatan ekuitas yang luar biasa. Di tahun 2017, ekuitas WIKA berada pada angka Rp14,63 triliun dan berhasil kami tingkatkan menjadi Rp17,22 triliun di tahun 2018. Upaya menguatkan *balance sheet* ini menjadi salah satu cara dalam menciptakan sebuah bisnis tersendiri yang dapat mendorong *balance sheet* yang cukup untuk WIKA.

Menghadapi kondisi tersebut, WIKA mampu mengelola kinerja finansial dan operasional dan menutup tahun 2018 dengan *statement* laba sebesar Rp2,07 triliun, *positive cash flow* sebesar Rp2,68 triliun, dan *excess cash* sebesar Rp13,97 triliun. Sebuah performa yang menunjukkan bahwa WIKA adalah sebuah entitas yang solid. Dengan resistensi tersebut, WIKA memiliki kapasitas untuk melakukan investasi dengan *cost of fund* yang tetap terjaga.

Dengan integrasi bisnis yang dilakukan, WIKA kini memiliki *on hand contract* dengan nilai yang sangat besar. Nilai kontrak baru WIKA tercatat mengalami lompatan signifikan dari Rp42,40 triliun di tahun 2017, menjadi Rp50,56 triliun di tahun 2018.

Inisiasi yang kuat harus didukung oleh *engineering processor* yang mumpuni. Seiring lonjakan nilai kontrak yang sudah diraih, manajemen melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di WIKA. Regenerasi dipersiapkan secara matang dengan dukungan strategi *human development* yang terarah dengan tujuan utama untuk menghindari *lag* pada level *middle management*. Oleh karena itu, *Human development* juga menjadi inisiasi yang digarisbawahi di tahun 2018 untuk menunjang ekspansi dan mimpi-mimpi besar yang WIKA tuju. *Mind mapping* dilakukan secara terperinci untuk menemukan generasi potensial yang layak masuk ke jajaran berikutnya dan membawa WIKA menyongsong potensi bisnis yang akan berkembang jauh lebih besar.

Pengembangan dan pelatihan juga diberikan secara intensif kepada pekerja operasional, terutama bagi para Manajer Proyek. *Key Performance Indicator*

(KPI) yang ada disusun kembali dengan rincian yang lebih tajam dan efisien. Selain itu, *hard competence* masing-masing personel pun semakin dikembangkan dengan *roadmap* yang telah dirancang untuk jangka panjang. Seluruh *upper level management* diwajibkan untuk melaksanakan *transfer knowledge* dalam rangka mendukung percepatan *human development* untuk mencapai setiap target yang telah ditetapkan dalam KPI.

Tantangan terbesar dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis tahun 2018 adalah tuntutan untuk bekerja lebih keras dan mendetail dalam mengevaluasi, menentukan, serta mengimplementasikan standar-standar baru secara konsisten agar segera menjadi kebiasaan yang positif. Seluruh rencana kerja, target, program, dan proses harus ditinjau, dimonitor, dan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian.

Dari segi tantangan kompetisi, *success rate* WIKA berada pada angka 37% yang berarti sangat baik. Di tahun 2018 WIKA semakin melebarkan sayap untuk berjaya tak hanya secara nasional, namun juga di peta persaingan internasional. Di ASEAN, posisi WIKA telah berada pada posisi yang diperhitungkan sebagaimana tercermin pada *balance sheet*, ekuitas dan *market size* Perseroan yang termasuk dalam kualifikasi posisi unggulan.

Dalam perjalanan bisnis yang terus bergulir, WIKA juga terus dipercaya untuk menjalankan proyek-proyek yang memiliki nilai signifikan bagi Negara. Hingga tahun 2018, WIKA dimandatkan untuk membangun sebanyak 47 proyek strategis di Indonesia. Proyek tersebut di antaranya Proyek Tol Ruas Pekanbaru Padang, Pembangunan Terminal Kijing, Pembangunan Dermaga Patimban Cirebon, Bendungan Sadawarna dan Bendungan Randu Gunting.

PERBANDINGAN TARGET PADA AWAL TAHUN 2018 DAN PENCAPAIANNYA

Seiring upaya transformasi pada *business process*, tatanan operasional, dan visi besar yang diwujudkan dengan kerja cerdas serta sinergi seluruh elemen, Perseroan mampu mewujudkan target-target yang dicanangkan pada RKAP 2018 dengan baik. Jumlah kontrak baru tercapai sebesar 88,32% dari target, dengan kontrak dihadapi mencapai 94,34%. Di sisi

lain, target penjualan tercapai sebesar 79,01% dari target dan menghasilkan laba bersih yang berhasil melampaui target yaitu sebesar 110,50%.

Dari gambaran perbandingan target dan pencapaian tersebut, Perseroan telah melakukan evaluasi

terhadap kendala serta tantangan yang dihadapi. Dengan kapasitas Perseroan yang terus meningkat serta prospek dan peluang yang terbuka, Perseroan optimis untuk dapat menciptakan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan di masa mendatang.

(dalam miliar Rupiah)

URAIAN	TARGET RKAP 2018	REALISASI 2018	PENCAPAIAN TARGET (%)	DEVIASI (%)
Kontrak Dihadapi	130.925	123.513	94,34	(5,66)
Kontrak Baru	57.248	50.560	88,32	(11,68)
Penjualan	39.438	31.158	79,01	(20,99)
Laba Bersih	1.876	2.073	110,50	10,50

ANALISIS TENTANG PROSPEK USAHA

Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2019. Hal ini sebagai dampak dari ketegangan perdagangan juga meningkatnya suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global 2019 akan mencapai 3,5%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2018 yang sebesar 3,7%.

Untuk kawasan Asia, IMF memprediksi ekonomi Asia akan tumbuh 5,4% pada 2019 dan mengingatkan untuk terus waspada di situasi global. Sebagai garda terdepan dalam konteks pertumbuhan ekonomi global, Asia telah menyumbang 60% pertumbuhan ekonomi dunia. Inflasi di Asia diperkirakan meningkat menjadi 2,8% pada peningkatan harga komoditas, tetapi akan tetap di bawah target untuk beberapa negara. Indonesia sendiri diprediksi akan mampu mempertahankan pertumbuhannya pada angka 5,1%.

Tahun 2019 akan menjadi tahun selebrasi demokrasi seiring dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif serentak di Indonesia. WIKA optimis bahwa kondisi global dan nasional yang akan terjadi seiring gejolak politik tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi perekonomian.

Di tahun 2019, pemerintah akan mulai menggeser program unggulan dari infrastruktur menjadi program besar-besaran untuk memperkuat Sumber Daya Manusia. Meskipun demikian, pemerintah masih

mengalokasikan porsi anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2019 sebesar Rp420,5 triliun, yakni 17,2% dari total belanja APBN 2019 sebesar Rp2.439,7 triliun. Dalam RAPBN 2019, pemerintah mengalokasikan budget Rp420,5 triliun ke dalam anggaran infrastruktur. Angka tersebut naik sekitar 2,46% dibanding alokasi di APBN 2018 senilai Rp410,4 triliun.

Perseroan sangat optimis bahwa dengan pemahaman mendalam akan potensi Indonesia yang sangat besar, WIKA akan mampu membuka pintu kesempatan untuk terus melaju menjadi penyedia jasa konstruksi terintegrasi terkemuka di Indonesia dan mencapai tujuan untuk unggul di pasar internasional.

WIKA memasuki tahun 2019 dengan kontrak *on hand* sebesar Rp123,51 triliun yang masih layak garap hingga dua tahun ke depan. Untuk memaksimalkannya, *human development* adalah strategi krusial yang harus dijalankan agar semua elemen siap untuk menjalankan kontrak yang sudah ada di tangan. Untuk menghadapi fluktuasi yang mungkin akan terjadi, tantangan WIKA adalah untuk melakukan seleksi ketat terhadap proyek-proyek yang layak garap dan memastikan bisnis WIKA berjalan secara berkelanjutan. Untuk itu, WIKA akan semakin memperdalam penetrasi ke sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan *recurring income* dan meningkatkan rasio laba.

Berbagai kesempatan pun terbuka pada lini bisnis WIKA lainnya. Pada sektor pembangkit, target Indonesia

adalah untuk memasang 72.000 megawatt dan saat ini baru tercapai sebesar 27.000. Sementara dari sektor perumahan, *back log* yang terbuka mencapai sebesar 11,4 juta dan masih menjanjikan peluang market yang sangat besar dengan *demand* serta *supply* yang masih belum seimbang. Sektor-sektor tersebut menyediakan prospek yang sangat besar untuk dikembangkan.

Secara keseluruhan, fokus utama bisnis WIKA di tahun 2019 adalah pada lini bisnis dengan rasio paling tinggi, yaitu lini bisnis Investasi khususnya di bidang energi, dengan tetap fokus pada *core business* WIKA yaitu jasa bisnis konstruksi. Fokus kedua ditetapkan pada sektor properti dengan pertimbangan bahwa *back log* sektor ini masih sangat besar, memiliki *return* cepat dan margin yang baik. Di tahun politik, sektor properti diprediksi akan mengalami kenaikan, mengingat bahwa investasi di sektor lain seperti pertambangan, konsensi lahan dan lainnya akan cenderung melakukan strategi *wait and see*. Fokus ketiga adalah pada pembangunan infrastruktur seperti tol, dermaga, *airport*. Seluruh fokus yang telah ditetapkan tersebut ditargetkan untuk bermuara pada *quality delivery*, *time delivery*, *financial delivery*, *cost delivery*, dan *human development*. Selain itu, fokus-fokus tersebut juga diharapkan dapat mendorong WIKA untuk semakin andal dalam menjalankan kompetensi intinya, sekaligus meraup *recurring income* dari jasa yang diberikan.

Perseroan optimis untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas bisnis yang dihasilkan dan tumbuh lebih baik di tahun 2019.

IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Efektivitas penerapan GCG tercermin dari *governance outcome* yang telah diperoleh. Perseroan dan para pemangku kepentingan telah mendapatkan manfaat dari penerapan GCG dengan dicapainya kinerja keuangan maupun operasional yang baik di tahun 2018. Di samping itu, hasil dari implementasi GCG juga terlihat dari kepercayaan pihak eksternal kepada Perseroan sebagaimana tercermin dari diraihnya berbagai penghargaan, antara lain: Peringkat Terbaik ke-3 BUMN dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard, Kategori Platinum for Very Excellence, Grade A in Indonesia GCG Award 2018, The Most Trusted Company in Corporate Governance Perception

Index, Excellence Company for Product and Business Process Innovation, dan masih banyak raihan penghargaan lainnya.

Skor penilaian GCG tahun 2018 mencapai 94,949 dengan predikat "Sangat Baik". Beberapa kelemahan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berhasil diidentifikasi dari proses *assessment* telah ditindaklanjuti antara lain penyempurnaan pedoman gratifikasi dan melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan dan penerapan *whistleblowing system* kepada karyawan dan *stakeholders* Perseroan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan *whistleblowing system*, memuatnya dalam laporan tahunan, dan mempublikasikannya dalam majalah.

Pencapaian tersebut merupakan buah komitmen seluruh insan WIKA yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip GCG dalam melaksanakan setiap *business process*. Untuk terus menanamkan kesadaran dan komitmen tersebut, CEO Talk menjadi sebuah *forum delivery* yang diselenggarakan secara rutin untuk dihadiri seluruh karyawan dari *top level* sampai dengan *top executor*, yaitu para manager. Rapat-rapat rutin pun diselenggarakan secara mingguan, bulanan, tiga bulanan, dan tahunan.

Di tahun 2018, WIKA juga melakukan penambahan organisasi dengan pengadaan jabatan General Manager Risk Management dengan tujuan untuk menajamkan *process control*, manajemen risiko, dan sekaligus sebagai Project Management Officer yang memimpin jalannya proses bisnis. Transformasi pada manajemen Sumber Daya Manusia melibatkan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk memastikan bahwa WIKA dijalankan oleh orang-orang terpilih yang siap untuk mendukung perjuangan WIKA untuk menjadi lebih besar.

HUBUNGAN PERSEROAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

Perseroan telah mengatur, mengakomodir dan mengaplikasikan penerapan GCG terkait pemenuhan hak-hak dan hubungan dengan Pemegang Saham yang diterapkan secara adil. Berkenaan dengan hal tersebut Pemegang Saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama akan mendapatkan perlakuan yang setara dan dapat menggunakan

hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemenuhan terhadap hak-hak Pemegang Saham diimplementasikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan setiap Pemegang Saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah persentase saham yang dimilikinya. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 ayat 4 huruf a; yang menyatakan bahwa “para Pemegang Saham memiliki hak yang sama atas setiap 1 saham memberikan 1 hak suara”. Turunan atas ketentuan Anggaran Dasar tersebut diimplementasikan melalui prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara yang terdapat dalam Tata Tertib RUPS, di mana Tata Tertib RUPS diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir dan dijelaskan kembali oleh Pimpinan RUPS saat pembukaan RUPS. Perseroan telah menunjuk pihak independent yaitu Biro Administrasi Efek dan Notaris dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi.

Perseroan telah membuat ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta diumumkan 1 (satu) hari kerja setelah RUPS dari 2 (dua) hari yang dipersyaratkan oleh regulasi, untuk memenuhi informasi kepada *stakeholders* salah satunya diumumkan melalui *website* Perseroan (www.wika.co.id), pada menu Informasi Bagi Pemegang Saham bagian Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam melaksanakan hubungan dengan pemegang saham Perseroan wajib memperlakukan Pemegang Saham secara adil. Sesuai dengan *Code of Conduct* Perseroan (yang dapat diakses pada web www.wika.co.id), Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada Tahun 2018, jumlah dan komposisi Direksi WIKA mengalami perubahan sebagaimana penjelasan sebagai berikut.

Periode 1 Januari 2018-24 April 2018, Direksi berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur.

Periode 1 Januari 2018 – 24 April 2018

NAMA	JABATAN
Bintang Perbowo	Direktur Utama
Chandra Dwiputra	Direktur Operasi I
Bambang Pramujo	Direktur Operasi II
Destiawan Soewardjono	Direktur Operasi III
Antonius N.S. Kosasih	Direktur Keuangan
Novel Arsyad	Direktur Human Capital dan Pengembangan Sistem

Periode 24 April 2018-31 Desember 2018, Direksi berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 6 (enam) orang Direktur.

Periode 24 April 2018 – 31 Desember 2018

NAMA	JABATAN
Tumiyana	Direktur Utama
Agung Budi Waskito	Direktur Operasi I
Bambang Pramujo	Direktur Operasi II
Destiawan Soewardjono	Direktur Operasi III
Antonius N.S. Kosasih*	Direktur Keuangan
Novel Arsyad	Direktur Human Capital dan Pengembangan
Danu Prijambodo	Direktur Quality, Safety, Health and Environment

*) Per 31 Januari 2019, yang bersangkutan telah diangkat sebagai Anggota Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-31/MBU/01/2019.

Perubahan pada komposisi Direksi dilakukan untuk memenuhi mandat Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham mayoritas PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan sejalan dengan upaya peningkatan kinerja Perseroan.

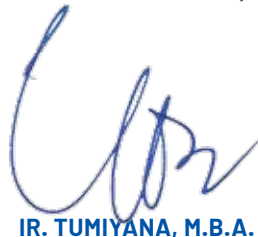
APRESIASI MENDALAM

Akhir kata, atas nama Direksi, kami menyampaikan terimakasih dan apresiasi mendalam kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris atas pengawasan serta arahan-arahan yang membimbing langkah kami dalam menjalankan amanat untuk mengelola dan menghasilkan nilai-nilai terbaik. Ucapan terima kasih

juga kami sampaikan kepada seluruh Mitra Bisnis, Investor, dan regulator sehingga WIKA dapat semakin berkembang sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bertanggung jawab dan berprestasi. Kami berharap bahwa seluruh kerja sama serta jalinan hubungan baik dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi mewujudkan visi dan misi bersama.

Kepada segenap Manajemen dan Insan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., mari kita bekerja dengan penuh dedikasi, meningkatkan performa, dan mengasah profesionalisme sebagai kekuatan bagi setiap langkah WIKA untuk senantiasa melangkah menuju masa depan Perusahaan, Bangsa, dan Negara yang lebih gemilang.

Atas nama Direksi,



IR. TUMIYANA, M.B.A.

Direktur Utama

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Jakarta, 8 April 2019



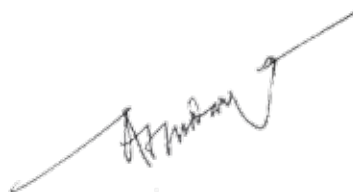
Dr. Ir. Imam Santoso, M.Sc.

Komisaris Utama



Prof. Ir. Suryo Hapsoro Tri Utomo, Ph.D.

Komisaris Independen



Drs. Achmad Hidayat

Komisaris Independen



Ir. Edy Sudarmanto

Komisaris



Liliek Mayasari, S.E.

Komisaris



Drs. Freddy R. Saragih, MPAcc.

Komisaris



Ir. Tumiyan, M.B.A.
Direktur Utama



Agung Budi Waskito, S.T., M.Tech.
Direktur Operasi I

Ir. Bambang Pramujo, M.T.
Direktur Operasi II



Ir. Destiawan Soewardjono, M.M.
Direktur Operasi III



Ade Wahyu, S.E., M.M.
Direktur Keuangan



Danu Prijambodo, S.T., Master Medea
Direktur Quality, Safety,
Health and Environment



Ir. Novel Arsyad, M.M.
Direktur Human Capital
dan Pengembangan



PROFIL PERUSAHAAN

54	Nama dan Alamat Lengkap Perusahaan	74	Visi, Misi dan Budaya Perusahaan
56	Jejak Langkah	78	Identitas dan Riwayat Hidup Dewan Komisaris
60	Riwayat Singkat Perusahaan	88	Identitas dan Riwayat Hidup Direksi
64	Bidang Usaha	98	Profil Pejabat Eksekutif
66	Peta Wilayah Usaha	108	Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
68	Produk dan Jasa	111	Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi
70	Lini Bisnis	122	Struktur Grup Perusahaan
72	Struktur Organisasi		



Jakarta International Velodrome

123	Kronologis Pencatatan Saham	145	Informasi pada Website Perusahaan
124	Kronologis Pencatatan Obligasi dan Efek Lainnya	146	Demografi Karyawan
126	Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang	152	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit internal
128	Penghargaan dan Sertifikasi	160	Sumber Daya Manusia
136	Nama dan Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Strategic Business Unit, Kantor Cabang Luar Negeri dan Kantor Divisi	172	Teknologi Informasi

NAMA DAN ALAMAT LENGKAP PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Nama Panggilan	WIKA
Bidang Usaha	Konstruksi
Tanggal Pendirian	11 Maret 1960
Dasar Hukum Pendirian	Akta No 110 tanggal 20 Desember 1972, dibuat di hadapan Notaris Dian Paramita Tamzil, pengganti Djojo Muljadi, S.H. dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 16 Mei 1973.
Kepemilikan	• Pemerintah Republik Indonesia 65,05% • Publik 34,95%
Modal Dasar	Rp3.500.000.000.000
Modal Ditempatkan	Rp896.995.137.200
Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	29 Oktober 2007
Kode Saham di Bursa Efek Indonesia	WIKA
Jumlah Pegawai	2.595
Sekretaris Perusahaan	Puspita Anggraeni Tel: +6221 806 79200 Fax: +6221 228 93830 E-mail: puspita@wikamail.co.id
Alamat Kantor Pusat	WIK Tower 1 & 2 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9 - 10 Jakarta 13340 - Indonesia T : +6221 806 79200 F : +6221 228 93830
Situs Web	www.wika.co.id

Kontak Alamat

Corporate Secretary

WIKA Tower 2
Jalan D.I. Panjaitan Kav. 10 Lt.1
Jakarta 13340 - Indonesia

Investor Relations

(khusus Capital Market)
WIKA Tower 2
Jalan D.I. Panjaitan Kav. 10 Lt.1
Jakarta 13340 - Indonesia
E: investor.relations@wika.co.id

Customer Care

E-mail: humas@wika.co.id

Media Sosial

Facebook: PT Wijaya Karya
Twitter: @PTWijayaKarya
Instagram: ptwijayakarya
YouTube: WIJAYA KARYA TV

Entitas Anak

PT Wijaya Karya Beton Tbk.
PT Wijaya Karya Realty
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
PT Wijaya Karya Bitumen
PT Wijaya Karya Serang Panimbang

JEJAK LANGKAH

Berdasarkan PP No. 2 tahun 1960 dan SK Menteri PUTL No. 5 tanggal 11 Maret 1960, WIKA didirikan dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja. Kegiatan usaha WIKA pada saat itu adalah pekerjaan instalasi listrik dan pipa air.

1960

WIKA membentuk divisi baru: Divisi Sipil Umum, Divisi Bangunan Gedung, Divisi Sarana Papan, Divisi Produk Beton dan Metal, Divisi Konstruksi Industri, Divisi Energy, dan Divisi Perdagangan. Proyek yang ditangani saat itu di antaranya adalah Gedung LIPI, dan Proyek Bangunan dan Irigasi.

1982

1972

Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja berubah menjadi PT Wijaya Karya. WIKA kemudian berkembang menjadi sebuah kontraktor konstruksi dengan menangani berbagai proyek penting seperti pemasangan jaringan listrik di Asahan dan proyek irigasi Jatiluhur.

1997

WIKA mendirikan Entitas Anak yang pertama, yaitu PT Wijaya Karya Beton.

Pendirian PT Wijaya Karya Realty sebagai pengembangan Divisi Realty. Didirikan pula PT Wijaya Karya Intrade sebagai pengembangan Divisi Industri dan Perdagangan dan pada tahun 2015 berubah nama menjadi PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi.

2000

WIKA mendirikan Entitas Anak PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. yang memiliki spesialisasi dalam bidang usaha pembangunan high-rise building. WIKA mengakuisisi 70,08% saham PT Catur Insan Pertiwi yang bergerak di bidang Mekanikal Elektrikal dan pada tahun 2015 berubah nama menjadi PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi.

2008

2007

WIKA melakukan Initial Public Offering (IPO) pada tanggal 29 Oktober 2007 di Bursa Efek Indonesia (saat itu bernama Bursa Efek Jakarta). WIKA melepas 35% saham ke publik, sehingga Pemerintah Republik Indonesia memegang 65% saham (setelah dilaksanakan ESA, ESOP dan MSOP).

2009

Bersama dengan PT Jasa Sarana dan PT RMI, mendirikan PT Wijaya Karya Jabar Power yang bergerak dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). WIKA bersama perusahaan lain berhasil menyelesaikan Jembatan Suramadu yang menghubungkan pulau Jawa dengan pulau Madura.

WKA telah menyiapkan visi baru, yaitu VISI 2020 untuk menjadi salah satu perusahaan EPC dan Investasi terintegrasi terbaik di Asia Tenggara. Visi ini diyakini dapat memberi arah ke segenap jajaran WKA untuk mencapai pertumbuhan yang lebih optimal, sehat dan berkelanjutan.

2010

Sepanjang tahun 2012, WKA berhasil menuntaskan proyek power plant yang terdiri dari:

- Pembangkit Listrik Tenaga Gas Borang, 60 MW;
- Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Rengat, 21 MW;
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Ambon, 34 MW 2013.

2012

WKA semakin memantapkan diri menjadi pemain di bidang pembangkit listrik dan migas melalui proyek-proyek yang dimenangkannya. Kiprahnya pun semakin dikenal di internasional.

2014

2011

- Pelaksanaan Commercial Operation Date (COD) untuk proyek PLTD Marine Fuel Oil (MFO) 50 MW di Bali yang merupakan proyek investasi WKA di bidang energi.
- WKA-PU meresmikan Tol Surabaya-Mojokerto seksi IA
- WKA menerima penghargaan 1.000.000 jam kerja tanpa kecelakaan (zero accident) dari PT Pertamina untuk proyek DPPU Kualanamu Medan.

2013

- Meraih Penghargaan "Best Employers" Asia Pasifik 2013 Aon Hewitt;
- WKA mengakuisisi 100% saham PT Sarana Karya (Persero) sebanyak 5.000 lembar milik Pemerintah senilai Rp50 miliar;
- Penandatanganan Kontrak Kerja Proyek Mass Rapid Transit (MRT) sebagai terobosan transportasi massa secara resmi dimulai;
- WKA menyerahtherimakan secara resmi PLTU Amurang kepada PT PLN (Persero) di desa Tawaang, Kecamatan Tenga, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;
- WKA memimpin Konsorsium Perluasan dan Pengembangan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta;
- Diluncurkan sejak hari jadi WKA yang ke 53, Wikasatrian secara resmi digunakan untuk pelatihan batch 1 pada 8-11 April di Gadog, Bogor;
- WKA Kerjakan Proyek Sodetan Kali Ciliwung.

- WIKA menggarap proyek-proyek infrastruktur sesuai dengan program percepatan proyek strategis nasional, antara lain jalan Tol Trans Sumatera, Kalimantan dan LRT Jakarta.
- WIKA Grup mendirikan anak usaha yang bergerak di bidang jalan tol, properti, dan precast gedung.
- WIKA mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan melaksanakan Rights Issue dengan total dana diperoleh sebesar Rp6,1 triliun.

2016

- WIKA sukses menerbitkan Komodo Bond yang tercatat di London Stock Exchange. Komodo Bond WIKA mengalami oversubscribed 2,5x dan berhasil menghimpun dana sebesar Rp5,4 triliun.
- Perolehan beberapa proyek strategis, seperti Terminal Kijing Mempawah Rp2,49 triliun dan Flyover Teluk Lamong Rp1,19 triliun.
- Surat Berharga Perpetual I WIKA Tahun 2018 sukses diterbitkan dengan jumlah sebesar Rp600 miliar. Dana hasil penerbitan Surat Berharga Perpetual tersebut akan dipergunakan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja Perseroan.

2018

2015

WIKA menggarap proyek-proyek infrastruktur berskala raksasa yang tak hanya menantang namun mempertaruhkan nama baik bangsa, yakni proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jurusan Bundaran HI-Lebak Bulus di Jakarta dan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

2017

- Pendirian Entitas Anak PT Wijaya Karya Serang Panimbang.
- Penerapan Corporate Value baru Agility, Caring, Excellence (ACE).
- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. telah resmi IPO di Bursa Efek Indonesia.
- Perolehan kontrak beberapa proyek besar, seperti Tol Serang Panimbang Rp5,33 triliun, Tol Kunciran Cengkareng Rp1,98 triliun dan Pembangunan Lodgement di Aljazair Rp1,35 triliun.

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN



PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut WKA atau Perseroan) didirikan berdasarkan Undang-undang No.19 tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No.64 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara/PN "Widjaja Karja" tanggal 29 Maret 1961. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.64 ini pula, perusahaan bangunan bekas milik Belanda yang bernama Naamloze Vennootschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co. yang telah dikenakan nasionalisasi, dilebur ke dalam PN Widjaja Karja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 tanggal 22 Juli 1971, PN. Widjaja Karja dinyatakan

bubar dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 Undang-undang No.9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia No.40 tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2904).

Selanjutnya, Perseroan ini dinamakan "PT Wijaya Karya", berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.110 tanggal 20 Desember 1972 yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pada waktu itu pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan



Jakarta Mass Rapid Transit

Naskah Pendirian Perseroan Terbatas "PT Wijaya Karya" No.106, tanggal 17 April 1973 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, keduanya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.1723 dan No.1724 tanggal 16 Mei 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76 tanggal 21 September 1973, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.683. Pada saat itu, WIKA menggarap instalasi listrik dan pipa air. WIKA mulai menunjukkan perannya dalam

proyek pembangunan Gelanggang Olah Raga Bung Karno yang dimulai pada awal tahun 60-an sebagai bagian dalam persiapan penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces (GANEFO) dan Asian Games ke-4 di Jakarta.

Selanjutnya, WIKA mengembangkan diri ke dalam proyek kelistrikan dengan menjadi pengembang jaringan listrik tegangan rendah, menengah dan tinggi, sebelum menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan di tahun '70-an. Pada saat itu, tepatnya pada tahun 1972, nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja berubah menjadi PT Wijaya Karya atau disingkat WIKA. Kiprahnya mulai berkembang menjadi kontraktor konstruksi dengan menangani proyek-proyek skala raksasa, seperti proyek irigasi bendungan Jatiluhur dan proyek pemasangan jaringan listrik di Bendungan Asahan.

Pada tahun 1982, WIKA mendiversifikasi usahanya secara signifikan melalui pembentukan beberapa divisi baru, yakni Divisi Sipil Umum, Divisi Bangunan Gedung, Divisi Sarana Papan, Divisi Produk Beton dan Metal, Divisi Konstruksi Industri, Divisi Energi, dan Divisi Perdagangan. Beberapa proyek Pemerintah yang ditangani saat itu adalah pembangunan Gedung LIPI, Gedung Bukopin, dan Proyek Bangunan dan Irigasi. Dengan semakin banyaknya proyek yang ditanganinya, maka semakin banyak anak perusahaan yang didirikan sehingga WIKA tumbuh menjadi perusahaan infrastruktur yang terintegrasi dan saling bersinergi.

Dalam bidang konstruksi, sejak 1997, WIKA mulai mengembangkan diri dengan mendirikan beberapa anak perusahaan mandiri yang mengkhususkan diri dalam menciptakan produknya masing-masing, yakni WIKA Beton, WIKA Intrade, dan WIKA Realty. Keberhasilannya dalam mencapai pertumbuhan yang cukup pesat mendapat apresiasi yang tinggi dari publik. Dalam penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) WIKA pada 27 Oktober 2007 di Bursa Efek Indonesia, WIKA berhasil melepas 28,46 persen sahamnya ke publik, sisanya masih dipegang Pemerintah Republik Indonesia. Saham yang dilepas ke publik meningkat menjadi 35 persen sejak 31 Desember 2012. Dari sejumlah saham yang dijual tersebut, karyawan WIKA juga berkesempatan memilikinya melalui Employee/Management Stock Option Program (E/MSOP), dan Employee Stock Allocation (ESA).



Selepas memperoleh dana dari IPO, WIKA semakin leluasa untuk tumbuh dan berkembang. Langkah-langkah antisipatif dan inovatif semakin mudah diwujudkan. Walhasil, WIKA tetap berdiri kokoh tatkala menghadapi berbagai krisis, baik krisis global maupun nasional. WIKA juga terus mengembangkan kemampuan Engineering, Procurement and Construction (EPC). Pasarnya pun diperluas hingga ke mancanegara. WIKA tak pernah melewatkan kesempatan menggarap proyek-proyek menantang, baik dari swasta maupun proyek Pemerintah yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satunya adalah Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura yang manfaatnya kian dirasakan oleh seluruh penduduk Jawa dan Madura.

Pesatnya perubahan global mendorong WIKA untuk mereposisi visi dan misinya sebagai perusahaan konstruksi nasional yang sudah merambah ke tingkat dunia. Pada tahun 2010 WIKA menyiapkan VISI 2020 yang salah satu tujuannya adalah menjadi salah satu perusahaan EPC dan investasi terintegrasi terbaik di Asia Tenggara, di mana WIKA memiliki SDM yang dapat diandalkan dan mampu bersaing dengan tenaga ahli dari mancanegara. Dengan visi baru tersebut, WIKA memiliki harapan semangat dan strategi baru guna

meningkatkan pertumbuhan perusahaan yang lebih optimal.

Pada tahun 2014, WIKA hadir dengan paradigma baru. WIKA mengklasifikasi ulang segmen bisnisnya menjadi 5 pilar, yakni: Industri, Infrastruktur & Gedung, Energi dan Industrial Plant, Realty dan Property, dan Investasi. WIKA berharap, melalui segmentasi demikian kinerja WIKA lebih solid dalam mewujudkan "operational excellence for best results" melalui peningkatan kualitas produk, anggaran yang lebih efisien serta waktu penyelesaian proyek yang lebih cepat. Posisi WIKA pun semakin mantap sebagai salah satu pemain di industri kelistrikan dan migas berkat kontrak-kontrak baru di industri tersebut yang berhasil dimenangkannya. Tahun 2015 menandai dimulainya babak baru WIKA dengan menggarap proyek-proyek infrastruktur berskala raksasa. Proyek ini tak hanya menantang, namun mempertaruhkan nama baik bangsa, yakni proyek MRT (Mass Rapid Transportation) Jurusan Bundaran HI-Lebak Bulus di Jakarta.

Pada tahun 2016 WIKA melakukan penawaran saham umum terbatas kepada para pemegang saham lama, sehingga jumlah saham beredar WIKA menjadi sebanyak 8.969.951.372. Dana hasil penawaran umum terbatas tersebut selanjutnya akan digunakan

untuk mendanai beberapa proyek strategis seperti pembangunan jalan tol dan pembangkit listrik. Di tahun 2017 WIKA melakukan transformasi terhadap *corporate value* dari yang sebelumnya adalah CIBERTI (Commitment, Innovation, Balance, Excellence, Relationship, Teamwork dan Integrity) menjadi ACE (Agility, Caring, dan Excellence) sebagai bentuk respon WIKA untuk menghadapi tantangan bisnis yang dinamis.

Dalam rangka memperkuat daya saing dan menjaga keunggulannya, di tahun 2018 WIKA melakukan revitalisasi terhadap lini bisnisnya dengan menambahkan 2 lini bisnis baru, yaitu rekayasa konstruksi dan *integrated transportation system*. WIKA yang sebelumnya memfokuskan bisnisnya pada bidang konstruksi, kini juga telah mulai memperkuat bisnisnya pada bidang investasi, seperti di sektor jalan tol, *power plant* dan *transit oriented development*. Melalui strategi ini WIKA ingin memperbesar porsi *recurring income* sehingga bisnis WIKA dapat semakin besar dan stabil. Di tahun 2018, WIKA juga semakin memperkuat bisnisnya di pasar luar negeri. Melalui strategi pemasaran *selective market*, WIKA telah berhasil merambah pasar konstruksi di Afrika dan Asia.

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA

Sebagaimana telah dijabarkan di atas, dari awal pendirian sampai dengan saat ini WIKA telah mengalami satu kali perubahan nama dan badan hukum dari semula bernama PN Widjaja Karya menjadi

PT Wijaya Karya (Persero). Perubahan ini efektif berlaku pada 20 Desember 1972. Kemudian WIKA juga mengalami perubahan status menjadi Perusahaan Terbuka, yang efektif berlaku pada 27 Oktober 2007. Dengan demikian, nama yang digunakan saat ini adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

BRAND PERUSAHAAN

Identitas *brand* WIKA terdiri dari simbol, huruf logo, warna dan *tagline*. Secara sederhana masing-masing items dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bentuk *frame* melebar elips, seperti peta dunia yang digelar secara horizontal. Hal ini menggambarkan betapa WIKA tumbuh berkembang menjadi perusahaan besar dengan ragam produk dan jasa, ekspansi usaha, serta pendapatan.
- Adanya perubahan penulisan identitas dari WK menjadi WIKA, ditujukan sebagai diferensiasi *brand* dengan BUMN karya lain yang memiliki inisial identitas sama. Penyusunan kata WIKA disusun menyambung sebagai cermin perusahaan yang tumbuh berkembang.
- Penulisan dibuat miring (*italic*) mengadopsi posisi pelari yang condong ke depan saat melakukan *start*, maksudnya bahwa WIKA siap berlari cepat dalam mengejar cita-cita.
- Warna *frame* berubah menjadi biru langit melambangkan cita-cita WIKA yang akan diraih setinggi langit.



PN Widjaja Karya
1960 - 1972



PT Wijaya Karya
(Persero)
1972 - 1981



PT Wijaya Karya
(Persero)
1981 - 2007



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk.
2007 - Sekarang

BIDANG USAHA

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggara perkereta-apian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, *engineering procurement construction*, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan

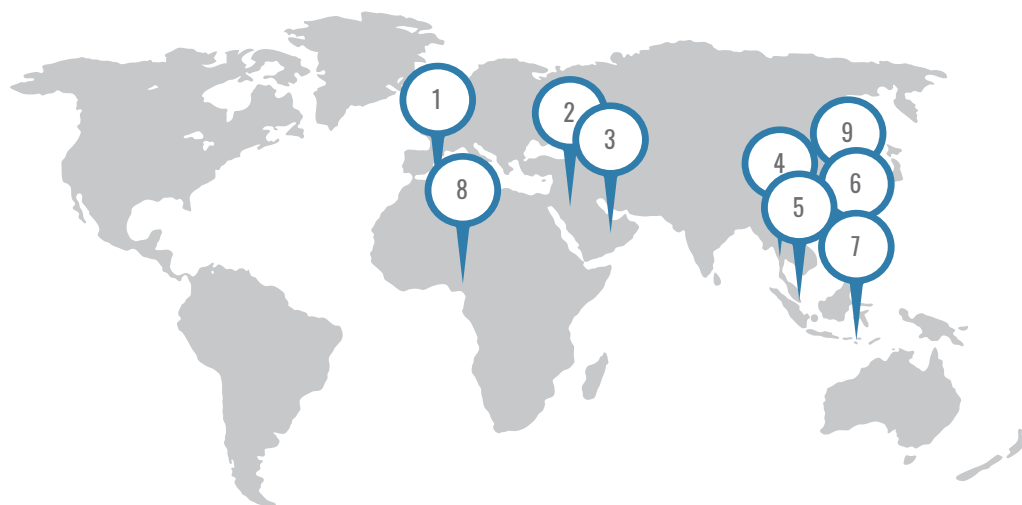
kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa engineering dan perencanaan, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur), untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan antara lain adalah:

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR		KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN WKA	
KEGIATAN USAHA UTAMA		KEGIATAN USAHA UTAMA	
		SUDAH	BELUM
Pekerjaan pelaksanaan konstruksi		√	
Pelaksanaan pekerjaan EPC (Engineering Procurement Construction) termasuk investasi		√	
Perbaikan/pemeliharaan/renovasi pada pekerjaan-pekerjaan di atas		√	
Operation dan maintenance termasuk investasi		√	
Kegiatan usaha penyelenggaraan perkeretaapian		√	
Kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus termasuk investasi		√	
Kegiatan usaha penyelenggaraan kebandarudaraan termasuk investasi			√
Kegiatan usaha logistik termasuk investasi			√
Pengembangan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus termasuk investasi			√
KEGIATAN USAHA PENDUKUNG		KEGIATAN USAHA PENDUKUNG	
		SUDAH	BELUM
		SUDAH	BELUM
Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi		√	
Pengukuran, penggambaran, perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan konstruksi		√	
Layanan jasa konsultasi manajemen, manajemen proyek konstruksi, rekayasa industri, engineering dan perencanaan		√	
Melakukan usaha penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi		√	
Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa handling impor, ekspor, jasa ekspedisi/angkutan darat serta perdagangan umum		√	
Melakukan usaha dalam bidang agro industri			√
Melakukan usaha pengembangan dan pengelolaan kawasan			√
Melaksanakan usaha dalam bidang jasa teknologi informasi			√
Building management		√	
System development		√	
Industri pabrikasi		√	
Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi		√	
Penyedia jasa pengembangan sistem informasi			√
Penyelenggara pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta riset teknologi terapan, pengembangan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja		√	
Penyedia pekerjaan Maintenance, Repair dan Overhaul (MRO) kebandarudaraan			√
Usaha-usaha lain yang langsung menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas		√	



**Tamansari
La Grande Bandung**

PETA WILAYAH USAHA



1. Aljazair
2. Saudi Arabia
3. Uni Emirat Arab
4. Myanmar
5. Malaysia
6. Filipina
7. Timor Leste
8. Niger
9. Taiwan



Persebaran Proyek

PRODUK DAN JASA

INFRASTRUKTUR DAN GEDUNG

Lini bisnis ini terdiri dari bidang usaha jasa Konstruksi Sipil dan Konstruksi Gedung. Konstruksi Sipil membawahi sejumlah sub bidang usaha yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, pengairan dan prasarana perhubungan. Kini pekerjaannya tidak sekedar sebagai kontraktor melainkan juga mencakup rancang bangun (*design and build*) dari mulai proses perencanaan hingga proses konstruksi. Konstruksi sipil yang sedang dikerjakan saat ini maupun yang telah diselesaikan baik proyek berskala nasional dan berteknologi tinggi di antaranya Tol Balikpapan-Samarinda, FO Teluk Lamong, Dermaga Patimban dan Simpang Susun Semangi.

Konstruksi Gedung meliputi pembangunan hunian dan bangunan fasilitas. Berkat dukungan kemampuan di bidang perekayasaan, Konstruksi Gedung mampu melakukan pekerjaan rancang bangun atau *design and build* sejak proses perencanaan sampai proses konstruksi. Sub bidang usaha jasa konstruksi bangunan hunian, meliputi pembangunan apartemen, kondominium, hotel, rumah susun, dan kompleks perumahan. Konstruksi gedung yang sedang dikerjakan saat ini maupun yang telah diselesaikan di antaranya: Mandiri University, Masjid Sriwedari Solo, Bandara Internasional Jawa Barat, PLBN Aruk, serta beberapa *venue* Asian Games 2018 seperti Stadion Madya GBK, Jakarta International Velodrome dan Equestrian Park.

ENERGI DAN INDUSTRIAL PLANT

Lini bisnis ini terdiri dari bidang usaha Energi dan Industrial Plant. Bidang usaha Energi ini meliputi jasa EPC (Engineering, Procurement dan Construction) di bidang ketenagalistrikan. Beberapa proyek yang sedang dikerjakan saat ini maupun yang telah diselesaikan dalam EPC Power Plant antara lain PLTGU Muara Karang 500 MW, PLTU Cilacap Ekspansi 1x1000 MW dan PLTG Arun 184 MW.

Bidang usaha Industrial Plant membangun suatu *processing plant*, yang terdiri atas fasilitas bangunan, serangkaian fasilitas mesin, peralatan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya sehingga dapat terbentuk

suatu proses produksi dari *raw material* menjadi produk tertentu, di antaranya Pabrik Pengolahan Migas, Pengolahan Petrokimia, Pabrik Semen, Pembangkit Listrik, Bahan bakar Biofuels, Pabrik Pupuk dan Pabrik Minyak Goreng. Beberapa proyek yang sedang dikerjakan saat ini maupun yang telah diselesaikan dalam bidang industrial Plant antara lain Pabrik Feronikel Halmahera Timur, Pabrik Gula Assembagoes Situbondo, Pabrik NPK Fusion II PUSRI, Pabrik Minyak Goreng Sei Mangke dan Fasilitas Produksi Gas Matindok.

INDUSTRI

Bidang usaha Industri sebagai pendukung dari kompetensi inti perusahaan, memiliki variasi dari produk-produk pendukung aktivitas konstruksi, seperti:

- Beton Pracetak, yaitu: produk beton pracetak, seperti PC Poles, PC Piles, Railway Sleeper CP, Bridge Concrete, Sheet Pile, PC Pipes, RC Box Culvert, Marine Structure CP, HCS, PC Cylinder dan Rigid Pavement Fabricated.
- Fasilitas Industri, yaitu: fabrikasi baja dengan menghasilkan produk konstruksi baja, struktur rangka baja, *conveyor*, *pipe rack*, *tower* telekomunikasi, *tower transmisi listrik*, jembatan rangka baja, tanki baja, silo, *hopper*, *pressure vessel*, *welded beam*, dan *steel plate work* lainnya serta aluminium *casting* dan *plastic injection*.
- Bitumen, yaitu: *granular asphalt* dan *extraction asphalt*.

REALTI DAN PROPERTI

Lini bisnis Realiti dan Properti bergerak dalam bidang usaha realti, jasa properti dan jasa lainnya seperti penggarapan *landed house*, *highrise building* (*apartment*, *condotel*, *office mixed use*) serta *industrial estate*. Di bidang realti, WIKI Realty telah sukses mengembangkan produk unggulan Tamansari. Dengan mengusung makna di balik nama Tamansari yang berarti peristirahatan raja, WIKI Realty berhasil menggabungkan keindahan arsitektur, unsur alam dan kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia sehingga tercipta konsep hunian yang asri dan nyaman.



INVESTASI

Sesuai dengan visi Perusahaan untuk menjadi salah satu Perusahaan EPC dan Investasi terbaik di Asia Tenggara, Perseroan semakin aktif dalam melakukan kegiatan investasi. Melalui investasi yang dijalankan, Perseroan ingin memperbesar porsi *recurring income* sehingga kelak bisnis WIKA dapat semakin besar dan stabil. Investasi yang dilakukan Perseroan mencakup berbagai sektor seperti Infrastruktur, energi, transportasi serta pengembangan kawasan. Dalam melakukan kegiatan investasi tersebut, Perseroan juga berafiliasi dengan beberapa perusahaan lain sebagai upaya untuk memperoleh portofolio investasi yang semakin besar.

CONSTRUCTION ENGINEERING

Lini bisnis ini merupakan salah satu motor EPC serta Operation & Maintenance Perseroan. Lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Perseroan pada lini ini terbilang kompleks, antara lain, EPC pembangkit listrik dan industri, termasuk operasi dan pemeliharannya. Pada EPC pembangkit listrik, lingkup pekerjaan yang dilakukan meliputi pekerjaan *erection, installation, mechanical, piping, dan electrical*. Beberapa portofolio pekerjaan yang telah dilakukan Perseroan hingga saat ini di antaranya, Pembangkit Listrik

Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH).

INTEGRATED TRANSPORTATION SYSTEM

Integrated Transportation System (ITS) merupakan lini bisnis terbaru yang dikembangkan oleh Perseroan guna mengoptimalkan *opportunity market* dua kota megapolitan Jakarta dan Bandung melalui implementasi moda transportasi kereta cepat masa depan dan pengembangan sentra ekonomi koridor Jakarta – Bandung.

Ketika infrastruktur Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) selesai, mobilitas Jakarta – Bandung, maupun sebaliknya diprediksi akan berubah. Masyarakat hanya cukup membutuhkan waktu 35 menit untuk menuju ke masing-masing kota tersebut. Selain itu, kehadiran ITS juga akan menstimulasi lahirnya kota-kota baru dengan infrastruktur yang memadai, agar menjadi sentra bisnis, kawasan hunian, pusat pemerintahan, pendidikan, dan wisata yang diminati masyarakat. Lini bisnis ini diharapkan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi kawasan pertumbuhan baru, tetapi juga akan memberikan kontribusi untuk menopang perekonomian Nasional.

LINI BISNIS



INVESTMENT

ENERGY

- Power Plant :
- Build Operate Transfer
 - Build Operate Own Renewable Energy

INFRA & WATER

- Infra :
- Toll Road
 - Seaport & Jetty
 - Facilities & Transportation Infrastructure
- Water :
- Water Treatment Plant

01

REALTY & PROPERTY

PROPERTY DEVELOPMENT

- Real Estate & Property :
- Landed House
 - High-Rise (Apartment, Condotel)
 - Office Mixed Use
 - Industrial Estate

Property Management

02



INFRASTRUCTURE & BUILDING

CIVIL CONSTRUCTION & HIGH RISE BUILDING

- Civil Construction :
- Road and Bridge
 - Seaport and Jetty
 - Dam and Barrage Building
- Construction :
- Residential & Commercial
 - Airport
 - Facility Steel

- Construction :
- Erection
 - Equipment Installation

03



ENERGY & INDUSTRIAL PLANT

EPC & POWER ENERGY

- EPC :
- Oil and Gas Plant
 - Petrochemical Plant
 - Cement Plant
 - Power Plant
 - Mining, Biofuels, Fertiliser

04





INDUSTRY

PRECAST CONCRETE

- Precast Concrete Product
- Natural Resources Management

BITUMEN

- Granular Asphalt
- Extraction

CONSTRUCTION INDUSTRY

- Steel Fabrication
- Aluminium Casting
- Plastic Injection

05

CONSTRUCTION ENGINEERING

OPERATING & MAINTENANCE

Operation & Maintenance :

- Power Plant
- Industrial Equipment

06



INTEGRATED TRANSPORTATION SYSTEM

HIGH SPEED RAILWAY

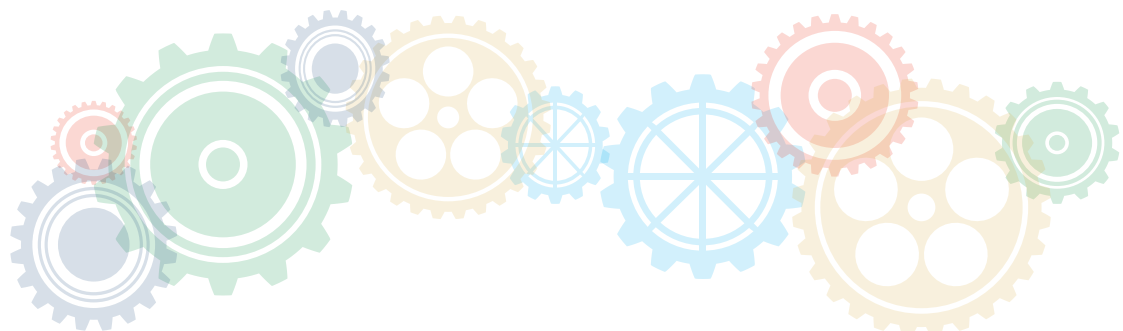
Civil Construction

Station Design

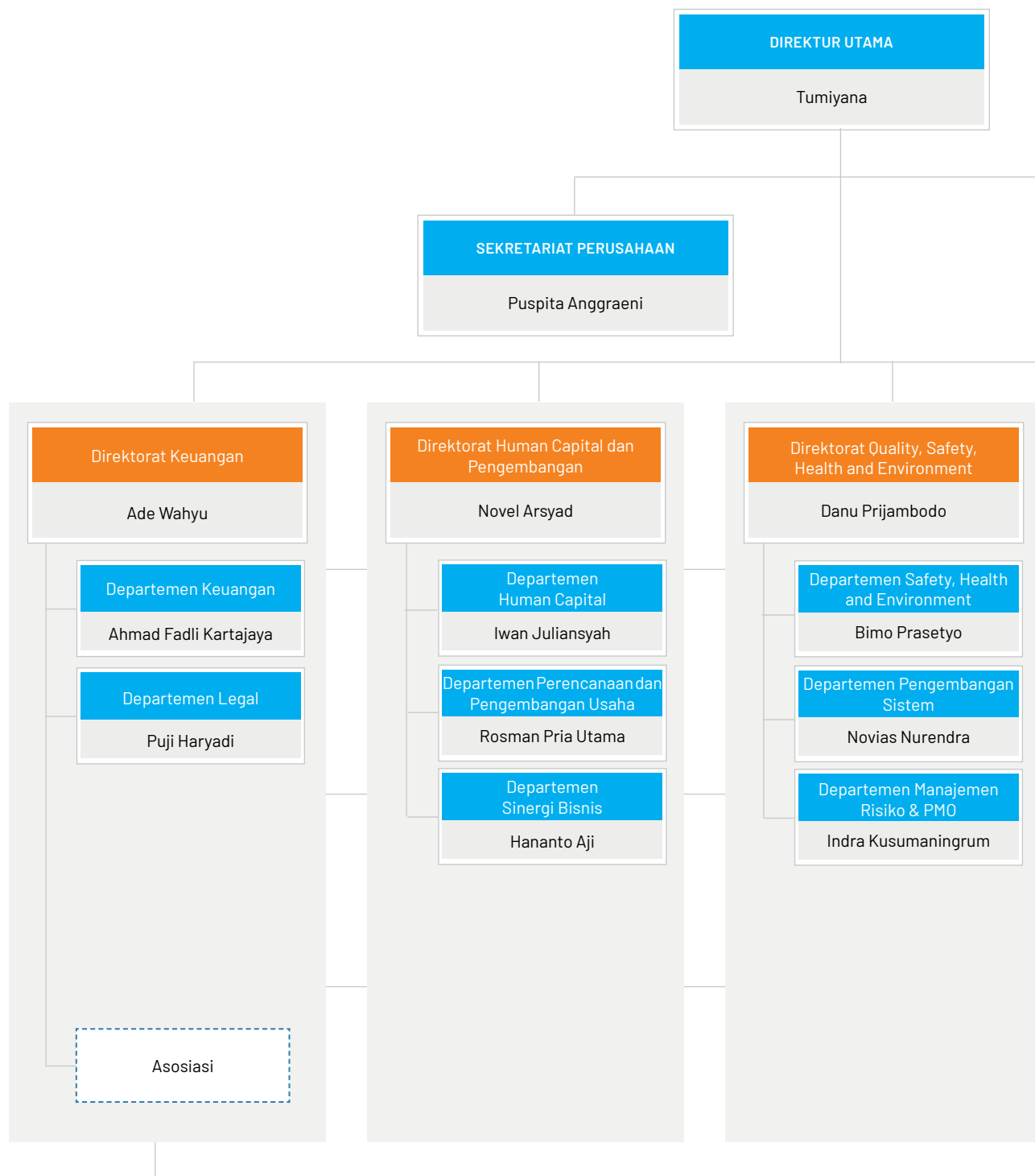
Transit Oriented Development (TOD):

- Detail Master Plan
- Development
- Selling & Marketing
- Property Management

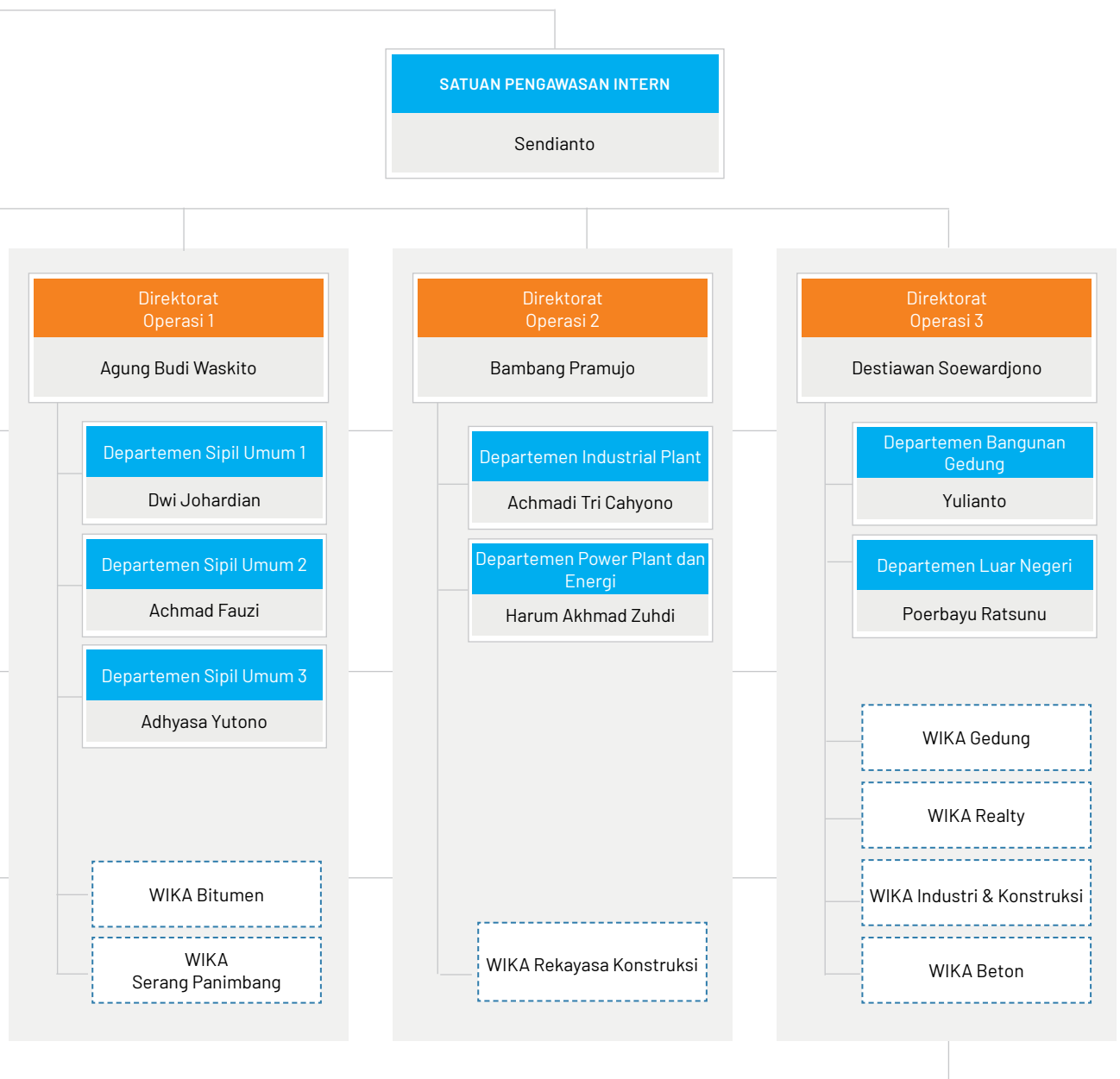
07



STRUKTUR ORGANISASI



Seiring dengan dinamika perkembangan bisnis, Struktur Organisasi WIKA telah mengalami beberapa kali perubahan. Per 31 Desember 2018, berdasarkan Lampiran Surat No. SE.01.01/A.DIR.9452/2018 Tanggal 31 Mei 2018 struktur organisasi WIKA adalah sebagai berikut:



VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

VISI

Menjadi Salah Satu Perusahaan terbaik di Bidang Engineering, Procurement and Construction (EPC) dan Investasi terintegrasi di Asia Tenggara.

MISI

- Menyediakan produk dan jasa yang unggul dan terpadu di bidang EPC dan investasi untuk infrastruktur, gedung bertingkat, energi, *industrial plant*, industri dan properti.
- Memenuhi harapan pemangku kepentingan utama.
- Mengimplementasikan etika bisnis untuk mendukung tata kelola perusahaan yang berkesinambungan.
- Ekspansi strategis ke luar negeri.
- Mengimplementasikan 'best practice' dalam sistem manajemen terpadu.

Perumusan Visi dan Misi Perusahaan telah disetujui dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi (Rakomdir) Nomor: 02/RISKOMDIR/WIKA/2010 tanggal 26 Februari 2010.

Dalam upaya menjalankan misi yang telah ditetapkan Perseroan menetapkan formulasi sebagai berikut:



Integrated

Perseroan memiliki kemampuan untuk memberikan jasa secara total (*total solution*), mulai dari perancangan (*engineering*), pengadaan (*procurement*), konstruksi (*construction*), pengoperasian dan pemeliharaan (*operation and maintenance*) termasuk pendanaan (*financing*) melalui sinergi WIKA Grup.



Excellent Product

Perseroan memberikan jaminan bahwa produk yang diserahkan kepada pelanggan adalah memenuhi kinerja dan persyaratan sesuai kesepakatan.



Key Stakeholders

Perseroan memperhatikan para pemangku kepentingan yang meliputi pelanggan, pemegang saham, karyawan dan mitra kerja.



Business Ethics

Perseroan mengaplikasikan etika bisnis sesuai prinsip dan norma GCG, yaitu *fairness, transparency and accountability*.



Best Practice

Perseroan mengaplikasikan sistem manajemen yang sudah teruji dan diakui keandalannya, seperti ISO 9001 & 14001 untuk sistem pengendalian mutu dan lingkungan, OHSAS 18001 untuk sistem keselamatan dan kesehatan kerja.



Strategic Overseas Expansion

Perseroan mengembangkan pasar luar negeri dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pasar strategis yang memberikan *competitive advantage* dibandingkan dengan negara lain.



Integrated Management System

Perseroan mengaplikasikan sistem manajemen yang terdiri atas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Pengamanan dan Sistem Manajemen Lingkungan secara terintegrasi.

BUDAYA PERUSAHAAN

Pada tahun 2017, WIKA melakukan transformasi nilai perusahaan dari sebelumnya Commitment, Innovations, Balance, Excellence, Relationship, Teamwork, Integrity (CIBERTI) menjadi Agility, Caring, Excellence (ACE). Perubahan ini dikukuhkan dengan Surat Keputusan nomor SK.01.01/A.DIR.12240/2017 tanggal 01 Agustus 2017 tentang Rumusan Budaya Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Dalam pengelolaan *human capital* WIKA, nilai-nilai perusahaan mempunyai arti penting dalam pencapaian Visi dan Misi Perseroan. Nilai ACE WIKA harus dipahami dengan baik dan menjadi pedoman bagi seluruh insan WIKA. Penjabaran nilai-nilai tersebut dilakukan dalam keseharian, melekat menjadi Budaya Perusahaan dan menjadi kepribadian manusia WIKA serta *brand image* Perusahaan.



AGILITY



CARING



EXCELLENCE

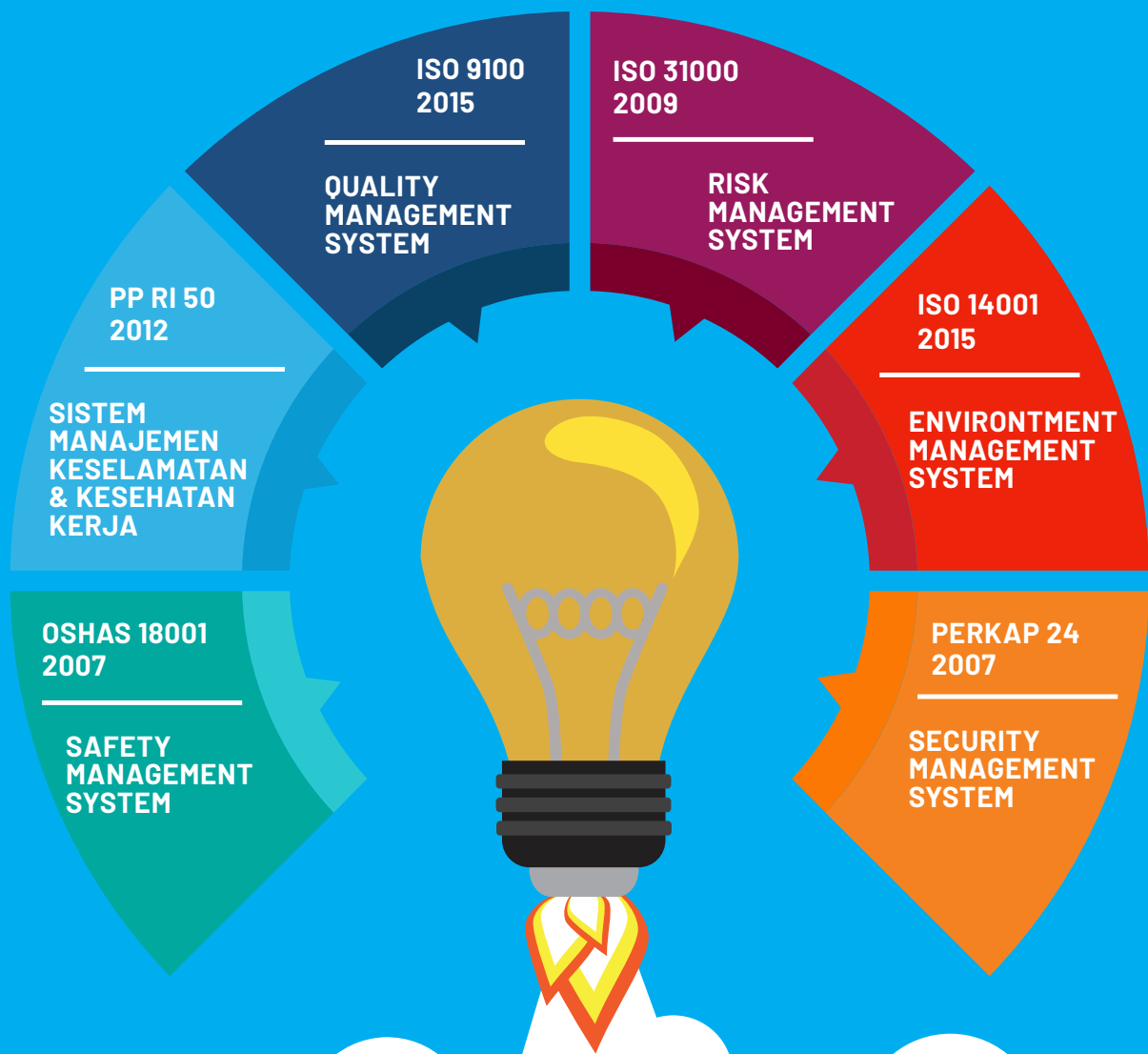
	NILAI INTI	PERILAKU KUNCI	INDIKATOR YANG TERCAKUP
Agility	Bertindak trengginas dan cepat terhadap peluang dan perubahan bisnis	Change: bertindak berdasarkan orientasi pada perubahan yang lebih baik	Adaptable, make a difference, continuously improve
		Focus: memusatkan pikiran dan tindakan pada satu hal tertentu hingga tuntas	Priority setting, target oriented, completed work
		Fast: bertindak trengginas	Sense of crisis, move swiftly, intolerance to delay, brave and self-confidence
Caring	Proaktif dan peduli terhadap pemangku kepentingan	Accountable: menyadari apa yang diharapkan dari dirinya dan mengambil tindakan yang diperlukan	proactive, disciplined, responsible, trust, process-oriented
		Respect: memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri	appreciate others, active-listening, empathy, say "Thanks", helpful, courteous, customer focused
		Safety oriented: berorientasi dan bersikap peduli terhadap setiap aspek terkait keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan	care for human life, concerns for environmental issues, health-oriented, ergonomic workplace
Excellence	Memberi hasil unggul kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya	Commitment: konsisten memenuhi apa yang telah disepakati bersama sebagai hasil unggul dan melakukan tindakan nyata	engaged, motivated, follow-through, quality oriented
		Innovation: berorientasi pada hal-hal baru yang berbeda dan menindaklanjutinya dalam eksperimentasi yang terukur kemajuannya	future-oriented, visionary, business orientation
		Professional: ahli di bidangnya, setiap tindakan yang ia lakukan mencerminkan upaya untuk selalu memberikan hasil berkualitas	competent, teamwork, results-oriented, problem solving

PENGENALAN SISTEM MANAJEMEN WIKA (SMW)

Untuk memastikan WIKA selalu menghasilkan produk dan jasa sesuai dengan tuntutan pelanggan, penerapan Sistem Manajemen WIKA menjadi kunci keberhasilan WIKA dilapangan.

Sistem Manajemen WIKA terdiri dari:

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2. Sistem Manajemen Mutu
3. Sistem Manajemen Risiko
4. Sistem Manajemen Lingkungan
5. Sistem Manajemen Pengamanan



IDENTITAS DAN RIWAYAT HIDUP DEWAN KOMISARIS

Dari Kiri ke Kanan:

Posisi Berdiri:

Edy Sudarmanto
Komisaris

Liliek Mayasari
Komisaris

Suryo Hapsoro Tri Utomo
Komisaris Independen

Achmad Hidayat
Komisaris Independen

Posisi Duduk:

Freddy R. Saragih
Komisaris

Imam Santoso
Komisaris Utama







DR. IR. IMAM SANTOSO, M.SC.
Komisaris Utama

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Yogyakarta, 08 Maret 1958 Usia 60 tahun per Desember 2018

Riwayat Pendidikan	- Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1982 - Master of Science, Institute of Irrigation and Water Resources, Southampton University, tahun 1990 - Doktor/S3 Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2018
Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2018	Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini di halaman 152.
Pengalaman Kerja	- Kepala BWS Nusa Tenggara 1 (2006-2008) - Kepala Sub Dit. Perencanaan Wilayah Sungai (2008 - 2011) - Kepala BBWS Ciliwung Cisadane (2011-2013) - Kepala BBWS Pemali Juana (2013-2014) - Direktur Sungai dan Pantai (2014-2015) - Kepala Pusat Bendungan (2015-2016) - Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2016 - 2018)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat pertama kalinya sebagai Komisaris Utama sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Nomor 39 Tanggal 23 Maret 2017.
Jabatan Rangkap	Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2016 - Juli 2018)
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham WIKA	Beliau tidak memiliki saham di WIKA
Periode Jabatan	17 Maret 2017 - sekarang



MAYJEN TNI EDDY KRISTANTO, S.H.*
Komisaris

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Surabaya, 20 Desember 1960 Usia 58 tahun per Desember 2018

Riwayat Pendidikan	- Menempuh pendidikan AKABRI, tahun 1984 - Menempuh pendidikan SESKOAD, tahun 1997
Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2018	Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini di halaman 152.
Pengalaman Kerja	- Kepala Badan Intelijen Negara, Bali (2014-2016) - Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Badan Intelijen Negara (2016)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat pertama kalinya sebagai Komisaris sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2016 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Nomor 82 Tanggal 28 April 2016.
Jabatan Rangkap	Perwira Tinggi TNI di Badan Intelijen Negara
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Kepemilikan Saham WIKA	Beliau tidak memiliki saham di WIKA
Periode Jabatan	28 April 2016 - 25 Maret 2019

*) Berdasarkan Keputusan RUPSLB pada tanggal 25 Maret 2019 yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan



DRS. FREDDY R. SARAGIH, MPACC.
Komisaris

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Pematang Purba, 23 Mei 1959 Usia 59 tahun per Desember 2018

Riwayat Pendidikan	- Sarjana Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1984 - Master Profesional Akuntansi, University of Texas, Austin tahun 1992
Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2018	Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini di halaman 152.
Pengalaman Kerja	- Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan di Kementerian Keuangan (2006 - 2009) - Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal - BKF di Kementerian Keuangan (2009 - 2014) - Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur di Kementerian Keuangan (2015 - sekarang)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat pertama kalinya sebagai Komisaris sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juli 2015, berdasarkan Akta Keputusan RUPSLB Nomor 22 Tanggal 12 Agustus 2015.
Jabatan Rangkap	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur di Kementerian Keuangan (2015 - sekarang).
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham WIKA	Beliau tidak memiliki saham di WIKA
Periode Jabatan	30 Juli 2015 - sekarang



LILIEK MAYASARI, S.E.
Komisaris

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Tegal, 24 Agustus 1969 Usia 49 tahun per Desember 2018

Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1994
Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2018	-
Pengalaman Kerja	- Kepala Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIIb Kementerian BUMN (2010-2014) - Kepala Bidang Usaha Energi dan Pertambangan I di Kementerian BUMN (2014-2015) - Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN (2015-2017) - Plt. Kepala Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Kementerian BUMN (2016-2017) - Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN (2017-sekarang) - Kepala Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Kementerian BUMN (sekarang)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat pertama kalinya sebagai Komisaris sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juli 2015, berdasarkan Akta Keputusan RUPSLB Nomor 22 Tanggal 12 Agustus 2015.
Jabatan Rangkap	- Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN (2017 - sekarang) - Kepala Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Kementerian BUMN (2017-sekarang)
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya
Kepemilikan Saham WIKA	Beliau tidak memiliki saham di WIKA
Periode Jabatan	30 Juli 2015 - sekarang



IR. EDY SUDARMANTO
Komisaris

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bandung
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Bangli, 10 Februari 1959 Usia 59 tahun per Desember 2018

Riwayat Pendidikan	- Menempuh pendidikan AKABRI tahun 1982 - Menempuh pendidikan SUSSARCAB HUB tahun 1982 - Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut tahun 1992 - Menempuh pendidikan DIKLAPA II/HUB tahun 1993 - Menempuh pendidikan SESKOAD tahun 1996 - Menempuh pendidikan SESKO TNI tahun 2000 - Menempuh pendidikan LEMHANAS tahun 2009
Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2018	-
Pengalaman Kerja	- Dansatkomlek (Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika) TNI (2015) - Deputi Bidang Intelijen Teknologi di Badan Intelijen Negara (2015)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat pertama kalinya sebagai Komisaris sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2019 berdasarkan Akta Keputusan RUPSLB Nomor 32 Tanggal 25 Maret 2019.
Jabatan Rangkap	Beliau tidak memiliki jabatan rangkap.
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham WIKA	Beliau tidak memiliki saham di WIKA
Periode Jabatan	25 Maret 2019 - sekarang



IMAS AAN UBUDIAH, S.PD, M.SI*
Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Garut, 19 April 1975 Usia 43 tahun per Desember 2018

Riwayat Pendidikan	Sarjana di Universitas Islam Bandung, tahun 2008
Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2018	-
Pengalaman Kerja	- Direktur Utama PT Tambang Mutiara Bumi Selatan (MBS) (2008-2013) - Wakil Ketua ICMI Garut (2009-2013) - Ketua Yayasan Ubudiah Karya Abadi (YUKA Indonesia) (2010 – sekarang)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat pertama kalinya sebagai Komisaris Independen sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 yang diselenggarakan pada tanggal 22 April 2015, berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 45 Tanggal 22 April 2015.
Jabatan Rangkap	Ketua Yayasan Ubudiah Karya Abadi (YUKA Indonesia) (2010 – sekarang)
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham WIKA	Beliau tidak memiliki saham di WIKA
Periode Jabatan	22 April 2015 – 20 September 2018

*) Per 20 September 2018, yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI untuk Pemilihan Umum tahun 2019 sehingga sesuai Anggaran Dasar pasal 14 ayat 29, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris dikarenakan adanya larangan rangkap jabatan sebagai caleg DPR.



PROF. IR. SURYO HAPSORO TRI UTOMO, PH.D.
Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Yogyakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Yogyakarta, 1 September 1956 Usia 62 tahun per Desember 2018

Riwayat Pendidikan	- Sarjana Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1984 - Ph.D. (Doctor of Philosophy), University of Newcastle upon Tyne, Inggris tahun 1996
Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2018	Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini di halaman 152.
Pengalaman Kerja	- Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen/Kementerian Pendidikan Nasional/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2009 - 2012) - Country Representative of Indonesia to the SEAMEO SEARCA Governing Board (2009-2012) - Rektor Universitas Budi Luhur Jakarta (2012-2016) - Wakil Ketua Board of Advisory, Institut Teknologi Yogyakarta (2015 - sekarang)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat pertama kalinya sebagai Komisaris Independen sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2018, berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 94 Tanggal 26 April 2018.
Jabatan Rangkap	Wakil Ketua Board of Advisory, Institut Teknologi Yogyakarta (2015 - sekarang)
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham WKA	Beliau tidak memiliki saham di WKA
Periode Jabatan	24 April 2018 - sekarang



DRS. ACHMAD HIDAYAT
Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Tasikmalaya, 30 Juli 1957 Usia 61 tahun per Desember 2018

Riwayat Pendidikan	- Menempuh pendidikan Akademi Kepolisian tahun 1980 - Menempuh pendidikan PTIK tahun 1986 - Menempuh pendidikan Sespim Polri tahun 1997 - Menempuh pendidikan Sespati Polri tahun 2005 - Sarjana Hukum tahun 2008
Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2018	Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini di halaman 153.
Pengalaman Kerja	- Kepala Biro Bin Opsnal Bareskrim Polri (2010) - Kepala Biro Analis Bareskrim Polri (2010) - Kepala Divisi Teknologi dan Informasi Polri (2013)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat pertama kalinya sebagai Komisaris Independen sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2018, berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 94 Tanggal 26 April 2018.
Jabatan Rangkap	Beliau tidak memiliki jabatan rangkap.
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham WIKA	Beliau tidak memiliki saham di WIKA
Periode Jabatan	24 April 2018 - sekarang

IDENTITAS DAN RIWAYAT HIDUP DIREKSI

Dari Kiri ke Kanan:

Agung Budi Waskito
Direktur Operasi I

Destiawan Soewardjono
Direktur Operasi III

Novel Arsyad
Direktur Human Capital
dan Pengembangan

Tumiyana
Direktur Utama

Ade Wahyu
Direktur Keuangan

Bambang Pramujo
Direktur Operasi II

Danu Prijambodo
Direktur Quality, Safety,
Health and Environment







IR. TUMIYANA, M.B.A.
Direktur Utama

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Klaten, 10 Februari 1965 Usia 53 tahun per Desember 2018

Riwayat Pendidikan	- Sarjana Teknik Sipil Universitas Borobudur tahun 1994 - Magister Manajemen Jakarta Institute of Management Studies tahun 1997
Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2018	Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Direksi pada Laporan Tahunan ini di halaman 153.
Pengalaman Kerja	- Finance Director - PT PP (Persero) Tbk. (2008 – 2016) - President Director - PT PP (Persero) Tbk. (2016 – April 2018)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat pertama kalinya sebagai Direktur Utama sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2018, berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 94 Tanggal 26 April 2018.
Jabatan Rangkap	Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham WIKA	Beliau tidak memiliki saham di WIKA
Periode Jabatan	24 April 2018 – sekarang


AGUNG BUDI WASKITO, S.T., M.TECH.

Direktur Operasi I

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Domisili

Jakarta

 Tempat dan Tanggal
Lahir/Usia

 Boyolali, 17 Juli 1971
Usia 47 tahun per Desember 2018

Riwayat Pendidikan	- Sarjana Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada - Master di Engineering Civil, Indian Institute Technology Roorkee tahun 2002
Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2018	Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Direksi pada Laporan Tahunan ini di halaman 153.
Pengalaman Kerja	- Manajer Divisi Operasi 4 Sipil Umum II (2014 - 2015) - General Manager Departemen Pemasaran (2016 - 2017) - General Manager Departemen Sipil Umum I (2017 - April 2018)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat pertama kalinya sebagai Direktur Operasi I sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2018, berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 94 Tanggal 26 April 2018.
Jabatan Rangkap	Komisaris Utama PT Wijaya Karya Bitumen
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham WIKA	0,0000803% (7.200 lembar saham)
Periode Jabatan	24 April 2018 - sekarang



IR. BAMBANG PRAMUJO, M.T.
Direktur Operasi II

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bekasi
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Wonogiri, 13 Juni 1957 Usia 61 tahun per Desember 2018

Riwayat Pendidikan	- Insinyur Jurusan Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada tahun 1982 - Master di Sipil Engineering, Universitas Indonesia pada tahun 1999
Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2018	Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Direksi pada Laporan Tahunan ini di halaman 153-154.
Pengalaman Kerja	- General Manager Departemen EPC di WIKA (2005 - 2009) - General Manager Departemen Energi di WIKA (2009 - 2010) - General Manager Departemen Utilitas di WIKA (2010) - General Manager Departemen Industrial Plant di WIKA (2011-2013)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat pertama kalinya sebagai Direktur Operasi II PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2012 yang diselenggarakan pada 25 April 2013 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 47 tanggal 26 April 2013. Kemudian beliau diangkat kembali sebagai Direktur Operasi II sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2018, berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 94 Tanggal 26 April 2018.
Jabatan Rangkap	Komisaris Utama Entitas Anak yaitu PT Wijaya Karya Beton (2018 - sekarang)
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham WIKA	Beliau tidak memiliki saham di WIKA
Periode Jabatan	25 April 2013 - sekarang

**IR. DESTIAWAN SOEWARDJONO, M.M.**

Direktur Operasi III

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Domisili

Jakarta

Tempat dan Tanggal
Lahir/UsiaSurabaya, 10 April 1961
Usia 57 tahun per Desember 2018

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknik Sipil, Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 1987
- Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2008

Pelatihan/Sertifikasi Tahun
2018

Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Direksi pada Laporan Tahunan ini di halaman 154.

Pengalaman Kerja

- Manajer Proyek PLTGU Borang (2004)
- Manajer Proyek Jembatan Surabaya Madura (2004-2007)
- Manajer Divisi Luar Negeri di WIKA (2008 - 2011)
- Manajer Proyek East West Motorway - Aljazair WIKA (2009 -2010)
- General Manager Departemen Luar Negeri di WIKA (2012 - 2013)

Dasar Hukum
Pengangkatan

Diangkat pertama kalinya sebagai Direktur Operasi III PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2012 yang diselenggarakan pada tanggal 25 April 2013 berdasarkan Akta Risalah RUPS Tahunan Nomor 47 Tanggal 26 April 2013. Kemudian beliau diangkat kembali sebagai Direktur Operasi III sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2018, berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 94 Tanggal 26 April 2018.

Jabatan Rangkap

Komisaris Utama Entitas Anak yaitu PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (2014 - sekarang)

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Kepemilikan Saham WIKA

Beliau tidak memiliki saham di WIKA

Periode Jabatan

25 April 2013 - sekarang



ANTONIUS N.S. KOSASIH, S.E., M.M.FI.*
Direktur Keuangan

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Jakarta, 12 Juli 1970 Usia 48 tahun per Desember 2018

Riwayat Pendidikan	- Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1992 - Magister Keuangan dan Investasi dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) pada tahun 2006
Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2018	Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Direksi pada Laporan Tahunan ini di halaman 154-155.
Pengalaman Kerja	- Direktur Keuangan Perum Perhutani (2008 - 2012) - Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) (2014-awal 2016)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat pertama kali sebagai Direktur Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 28 April 2016 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 82 Tanggal 28 April 2016
Jabatan Rangkap	Komisaris Utama Entitas Anak yaitu PT Wijaya Karya Realty (2017-sekarang)
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham WIKA	Beliau tidak memiliki saham di WIKA
Periode Jabatan	28 April 2016 – 31 Januari 2019

*) Per 31 Januari 2019 yang bersangkutan telah diangkat sebagai Anggota Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-31/MBU/01/2019.



IR. NOVEL ARSYAD, M.M.
Direktur Human Capital dan Pengembangan

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Solo, 30 September 1967 Usia 51 Tahun per Desember 2018

Riwayat Pendidikan	- Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 1991 - Magister Manajemen dari Binus University pada tahun 2013
Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2018	Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Direksi pada Laporan Tahunan ini di halaman 155-156.
Pengalaman Kerja	- Manajer Divisi Bangunan Gedung, Departemen Bangunan Gedung di PT WIKA (2012 - 2013) - Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (2014 - 2016) - General Manager Departemen Bangunan Gedung di WIKA (2014 - 2016) - Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (2016 - 2017)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat pertama kalinya sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 17 Maret 2017 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 39 Tanggal 23 Maret 2017.
Jabatan Rangkap	- Komisaris Utama Entitas Anak yaitu PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi - Komisaris Utama Entitas Anak yaitu PT Wijaya Karya Serang Panimbang
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham WIKA	0,0095508% (856.700 lembar saham)
Periode Jabatan	17 Maret 2017 - sekarang



DANU PRIJAMBODO, S.T., MASTER MEDEA
Direktur Quality, Safety, Health and Environment

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Cirebon, 17 Desember 1969 Usia 49 Tahun per Desember 2018

Riwayat Pendidikan	- Sarjana Teknik Sipil Universitas Hasanuddin tahun 1994 - Magister Manajemen Scuola Superiore Enrico Mattei tahun 2000
Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2018	Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Direksi pada Laporan Tahunan ini di halaman 156.
Pengalaman Kerja	- Direktur PT PGAS Solution (2012) - Group Head PMO Infrastructure PT Perusahaan Gas Negara (2015-2016)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat pertama kalinya sebagai Direktur Quality, Safety, Health and Environment sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2018, berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 94 Tanggal 26 April 2018.
Jabatan Rangkap	Komisaris Utama Entitas Anak yaitu PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham WIKA	Beliau tidak memiliki saham di WIKA
Periode Jabatan	24 April 2018 – sekarang



ADE WAHYU
 Direktur Keuangan

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Palembang, 30 September 1974 Usia 44 tahun per Desember 2018

Riwayat Pendidikan	- Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta pada tahun 1999 - Magister Management, Universitas Bina Nusantara tahun 2015
Pelatihan/Sertifikasi Tahun 2018	-
Pengalaman Kerja	- Manager Keuangan dan HC Bangunan Gedung di WIKA (2011-2015) - Manager Biro Keuangan di WIKA (2015-2016) - General Manager Departemen Keuangan WIKA (2017-2019)
Dasar Hukum Pengangkatan	Diangkat pertama kalinya sebagai Komisaris sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2019 berdasarkan Akta Keputusan RUPSLB Nomor 32 Tanggal 25 Maret 2019.
Jabatan Rangkap	Komisaris Utama Jasamarga Balikpapan-Samarinda
Hubungan Afiliasi	Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris lainnya.
Kepemilikan Saham WIKA	0,0050996 (457.435 lembar saham)
Periode Jabatan	25 Maret 2019 - sekarang

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF



DWI JOHARDIAN
General Manager
Departemen Sipil Umum 1

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bekasi
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Kediri, 6 Mei 1967 Usia 51 tahun per Desember 2018
Riwayat Pendidikan	- S2 Manajemen, Jurusan Manajemen Keuangan, Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2008
Pengalaman Kerja	- Manajer Proyek Besar DSU 2 Proyek Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Seksi IA) Departemen Sipil Umum 2 (2013) - Manajer Divisi Operasi Divisi Operasi Timur 2 Departemen Sipil Umum 2 (2014) - Manajer Divisi Operasi Divisi 3 Sipil Umum 2 Departemen Sipil Umum 2 (2015-2019)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai General Manager Departemen Sipil Umum I berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.02.01/A.DIR.02405/2019.



AHMAD FAUZI
General Manager
Departemen Sipil Umum II

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bekasi
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Jakarta, 10 Februari 1966 Usia 52 tahun per Desember 2018
Riwayat Pendidikan	- S1 Teknik Sipil Universitas Jayabaya tahun 1994 - Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara tahun 2001
Pengalaman Kerja	- Manajer Divisi Korporasi Divisi Investasi Infrastruktur Sipil Umum 2 Departemen Sipil Umum 2 (2015) - Manajer Divisi Operasi Divisi 4 Sipil Umum 2 Departemen Sipil Umum 2 Tahun (2016-2017)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai General Manager Departemen Sipil Umum II berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.01.01/A.DIR.7781/2018.



ADHYASA YUTONO
General Manager
Departemen Sipil Umum III

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Yogyakarta, 21 Agustus 1962 Usia 56 tahun per Desember 2018
Riwayat Pendidikan	- Sarjana Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1990 - Master Banchelor of Art, Strayer University, Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 2010
Pengalaman Kerja	- Manajer Pemasaran di WIKA (2003- 2004) - Manajer Proyek Bendungan Jatigede di WIKA (2007 - 2010) - Manajer Divisi Pengembangan Usaha di WIKA (2011 - 2012) - General Manager Departemen Wilayah di WIKA (2013 - 2014)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai General Manager-Departemen Sipil Umum III berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.01.02/A.DIR.08128/2015.



ACHMAD TRI CAHYONO
General Manager
Departemen Industrial Plant

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Sidoarjo
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Jombang, 5 Mei 1966 Usia 52 tahun per Desember 2018
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin tahun 2002
Pengalaman Kerja	- Manajer Proyek Besar Proyek Engineering, Procurement, Construction and Commissioning of New Condensate and Diesel Tanks Departemen Industrial Plant (2015). - Manajer Divisi Operasi Divisi Operasi Industrial Plant Departemen Industrial Plant (2016-2018)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai General Manager Departemen Industrial Plant berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.02.01/A.DIR.14470/2018.



HARUM AKHMAD ZUHDI

General Manager
Departemen Power Plant & Energy

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Malang
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Surabaya, 18 Oktober 1970 Usia 48 tahun per Desember 2018
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Sipil, Institut Teknologi 10 Nopember tahun 1994
Pengalaman Kerja	- Manajer Bidang Operasi Bidang Pemasaran Power Plant dan Energi Departemen Power Plant & Energi (2016-2017) - Manajer Divisi Operasi EPC Power Plant dan Energi Departemen Power Plant & Energi (2017-2018)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Deputy General Manager-Departemen Power Plant & Energy berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.02.01/A.DIR.01008/2019.



POERBAYU RATSUNU

General Manager
Departemen Luar Negeri

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Depok
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Bitung, 8 Mei 1968 Usia 50 tahun per Desember 2018
Riwayat Pendidikan	S2 Manajemen, Jurusan Manajemen, Universitas Sumatera Utara Tahun 2007
Pengalaman Kerja	- Manajer Biro Operasi Biro Quantity Survey Luar Negeri Departemen Luar Negeri (Maret-Mei 2017) - Manager Divisi Area 2 (Asia Pasifik) Departemen Luar Negeri (2017-2019)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai General Manager Departemen Luar Negeri berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.02.01/A.DIR.04419/2019.



YULIANTO
General Manager
Departemen Bangunan Gedung

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Surakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Ponorogo, 13 Juli 1970 Usia 48 tahun per Desember 2018
Riwayat Pendidikan	- Politeknik Universitas Brawijaya Malang (1992) - Sarjana Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2007.
Pengalaman Kerja	- Manajer Proyek GMF dan Manajer Divisi DBG (2012 - 2014) - Manajer Proyek Terminal 3 Soekarno Hatta (2014 - 2017) - General Manager Departemen Luar Negeri WKA (2018-2019)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai General Manager Departemen Luar Negeri berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.02.01/A.DIR.04418/2019.



ROSMAN PRIA UTAMA
General Manager
Departemen Perencanaan dan Pengembangan Usaha

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bekasi
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Jember, 5 April 1971 Usia 47 tahun per Desember 2018
Riwayat Pendidikan	Magister Management Binus Business School (2014)
Pengalaman Kerja	- Deputi Manajer Proyek WKA New Condensate and Diesel British Petroleum Bintuni Papua Barat (2017) - Manajer Divisi Pemasaran Department Industrial Plant (2018)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai General Manager Departemen Perencanaan dan Pengembangan Usaha berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.02.01/A.DIR.00274/2019.



AHMAD FADLI KARTAJAYA

General Manager
Departemen Keuangan

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Palembang, 23 November 1973 Usia 45 tahun per Desember 2018
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta 2000
Pengalaman Kerja	- Manajer Keuangan Operasi (2014 - 2018) - Manajer Biro Strategi Keuangan (2018 - 2019)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai General Manager Departemen Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.02.01/A.DIR/04446/2019



PUJI HARYADI

General Manager
Departemen Legal

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bekasi
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Cilacap, 25 Juli 1964 Usia 54 tahun per Desember 2018
Riwayat Pendidikan	Gelar sarjana Hukum dari Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1988
Pengalaman Kerja	- PS Kepala Bagian Umum PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2007-2015) - Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2012-2017)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai General Manager Departemen Legal berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.02.01/A.DIR.9839/2018.


BIMO PRASETYO

General Manager
Departemen Quality, Safety, Health
and Environment

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bekasi
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Jakarta, 18 September 1967 Usia 51 tahun per Desember 2018
Riwayat Pendidikan	- Magister Manajemen STIE IPWI Jakarta - Sarjana Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada tahun 1993
Pengalaman Kerja	- Manajer Proyek Besar (Rangkap) Proyek East/Weast Motorway Algeria Area 1 Luar Negeri Departemen Luar Negeri (2015) - Manajer Divisi Korporasi Divisi Operasi Area 1 Luar Negeri Departemen Luar Negeri (2016 - 2018)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai General Manager Departemen Quality, Safety, Health and Environment berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.02.01/A.DIR.7785/2018.


INDRA KUSUMA NINGRUM

General Manager
Departemen Manajemen Risiko
& PMO

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bekasi
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Semarang, 22 Januari 1961 Usia 57 tahun per Desember 2018
Riwayat Pendidikan	- Magister Teknik Universitas Tarumanegara
Pengalaman Kerja	- Manajer Biro Operasi Biro Perencanaan dan Pengendalian Proyek Bangunan Gedung Departemen Bangunan Gedung (2015-2016) - Manajer Biro Operasi Satuan Pengawasan Intern PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (2017-2018)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai General Manager Departemen Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.02.01/A.DIR.11224/2018.



HANANTO AJI
General Manager
Departemen Sinergi Bisnis

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Surakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Surakarta, 5 April 1974 Usia 44 tahun per Desember 2018
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret Surakarta Lulus Tahun 1997
Pengalaman Kerja	- Manajer Divisi Korporasi Divisi 2 Sipil Umum 1 Departemen Sipil Umum 1 (Agustus-Desember 2015) - Manajer Divisi 5 Sipil Umum 3 Departemen Sipil Umum (2017-2019)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai General Manager Departemen Sinergi Bisnis berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.02.01/A.DIR.04420/2019.



NOVIAS NURENDRA
General Manager
Departemen Pengembangan Sistem

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Denpasar, 21 November 1969 Usia 49 tahun per Desember 2018
Riwayat Pendidikan	- Sarjana Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1993 - Magister Bisnis jurusan Business Strategy, Hochschule Fur Technik Und Wirtschaft, Berlin pada tahun 2011.
Pengalaman Kerja	- Deputy General Manager Departemen Investasi (2016) - Deputy General Manager Departemen Sipil Umum I (2017)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai General Manager Departemen Pengembangan Sistem berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.02.01/A.DIR.12121/2017.



IWAN JULIANSYAH
General Manager
Departemen Human Capital

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bekasi
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Aceh Timur, 20 Juli 1971 Usia 47 tahun per Desember 2018
Riwayat Pendidikan	Sarjana Teknik Sipil, Universitas Gadjah Mada Tahun 1995
Pengalaman Kerja	- Deputy Manajer Proyek Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (2017-2018) - Manajer Proyek Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (2018-2019)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai General Manager Departemen Human Capital berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.02.01/A.DIR.04417/2019.



SENDIANTO
Kepala Satuan Pengawas Intern

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bekasi
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Bukittinggi, 4 Maret 1960 Usia 58 tahun per Desember 2018
Riwayat Pendidikan	- Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Andalas Padang pada tahun 1988 - Magister Manajemen, STIMA IMMI pada tahun 2011
Pengalaman Kerja	- Kepala bagian akuntansi pajak WIKA Realty (2000 - 2003) - Kepala Pemeriksa di WIKA (2003-2012)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Intern berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.02.01/A.DIR.11950/2015.



PUSPITA ANGGRAENI
Sekretaris Perusahaan

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Magelang, 5 Maret 1980 Usia 38 tahun per Desember 2018
Riwayat Pendidikan	- Sarjana Teknik, Universitas Diponegoro 2003 - Magister Manajemen, Universitas Diponegoro pada tahun 2005.
Pengalaman Kerja	- Koordinator Biro Investor Relations (2013-2014) - Manajer Biro Investor Relations (2015-2017)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.02.01/A.DIR.9840/2018.



Bendungan Logung

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Tabel Komposisi Pemegang Saham WIKA

KEPEMILIKAN SAHAM	JUMLAH PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
NASIONAL			
Pemerintah Republik Indonesia	1	5.834.850.000	65,05
Perorangan Indonesia	24.641	847.057.040	9,44
Karyawan	392	58.414.082	0,65
Koperasi	7	3.969.600	0,04
Yayasan	22	32.392.845	0,36
Dana Pensiun	128	392.435.318	4,38
Asuransi	105	341.465.417	3,81
Perseroan Terbatas	84	367.448.793	4,10
Reksadana	207	400.706.348	4,47
Sub Total	25.587	8.278.739.443	92,29
ASING			
Perorangan Asing	114	6.560.904	0,07
Badan Usaha Asing	205	684.651.025	7,63
Sub Total	319	691.211.929	7,71
Total	25.906	8.969.951.372	100,00

*Per 31 Desember 2018

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar WIKA

NAMA INVESTOR	STATUS	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
NASIONAL			
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Pemerintah	5.834.850.000	65,05
DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT	Lokal	251.500.022	2,80
PT TASPEN (ASURANSI) - AFS	Lokal	122.235.632	1,36
PT TASPEN	Lokal	95.924.900	1,07
BNYMSANV RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDEN	Asing	50.400.736	0,56
JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL	Asing	46.398.587	0,52
JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS	Asing	43.229.270	0,48
DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JP	Lokal	43.197.570	0,48
CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS C	Asing	40.923.622	0,46
REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIA	Lokal	37.349.900	0,42
SSB 2027 S/A ISHARES CORE MSCI EMERGING	Asing	37.336.823	0,42
MANULIFE DANA EKUITAS	Lokal	34.729.205	0,39

NAMA INVESTOR	STATUS	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
NASIONAL			
PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - SEF	Lokal	33.750.000	0,38
PANIN SEKURITAS, PT	Lokal	33.216.400	0,37
CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGI	Asing	30.974.000	0,35
RD MANULIFE DANA SAHAM UTAMA	Lokal	29.356.001	0,33
PT AIA FINL - SYARIAH EQ	Lokal	27.461.800	0,31
CITIBANK NEW YORK S/A THE EMERGING MARKE	Asing	26.680.307	0,30
HSBC-FUND SERVICES, HITS (ASIA) LTD AS T	Asing	24.525.713	0,27
PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES S/A MA	Lokal	23.910.237	0,27

*Per 31 Desember 2018

Tabel Komposisi Pemegang Saham WIKA yang Mencapai 5% atau lebih

NAMA	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
Pemerintah Republik Indonesia	5.834.850.000	65,05

*Per 31 Desember 2018

Tabel Komposisi Kelompok Pemegang Saham Kurang dari 5%

KEPEMILIKAN SAHAM	JUMLAH PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN (%)
NASIONAL			
Perorangan Indonesia	24.641	847.057.040	9,44
Karyawan	392	58.414.082	0,65
Koperasi	7	3.969.600	0,04
Yayasan	22	32.392.845	0,36
Dana Pensiun	128	392.435.318	4,38
Asuransi	105	341.465.417	3,81
Perseroan Terbatas	84	367.448.793	4,10
Reksadana	207	400.706.348	4,47
Sub Total	25.586	2.443.889.443	27,24
ASING			
Perorangan Asing	114	6.560.904	0,07
Badan Usaha Asing	205	684.651.025	7,63
Sub Total	319	691.211.929	7,71

*Per 31 Desember 2018

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi WIKA

NAMA	JABATAN	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE KEPEMILIKAN
DEWAN KOMISARIS			
Imam Santoso	Komisaris Utama	0	0
Eddy Kristanto	Komisaris	0	0
Freddy R. Saragih	Komisaris	0	0
Lilie Mayasari	Komisaris	0	0
Imas Aan Ubudiah	Komisaris Independen	0	0
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen	0	0
Achmad Hidayat	Komisaris Independen	0	0
DIREKSI			
Tumiyana	Direktur Utama	0	0
Agung Budi Waskito	Direktur Operasi I	7.200	0,0000803
Bambang Pramujio	Direktur Operasi II	0	0
Destiawan Soewardjono	Direktur Operasi III	0	0
Novel Arsyad	Direktur Human Capital dan Pengembangan	856.700	0,0095508
Antonius N.S. Kosasih	Direktur Keuangan	0	0
Danu Prijambodo	Direktur Quality, Safety, Health and Environment	0	0
Total		863.900	0,0096311

*Per 31 Desember 2018



ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI

ENTITAS ANAK

NAMA	BIDANG USAHA	KEPEMILIKAN SAHAM (%)	TANGGAL DAN TAHUN PENDIRIAN	STATUS OPERASI	JUMLAH ASET*	DOMISILI
PT Wijaya Karya Beton Tbk.	Perusahaan beton pra cetak	60,00	11 Maret 1997	Beroperasi	8.881.778.299	Indonesia
PT Wijaya Karya Realty	Perusahaan properti	93,05	20 Januari 2000	Beroperasi	9.104.506.456	Indonesia
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	Perusahaan industri manufaktur dan konstruksi.	97,22	20 Januari 2000	Beroperasi	3.276.203.760	Indonesia
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	Perusahaan bidang jasa rekayasa konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan di bidang energi dan industrial plant.	90,04	18 November 1984	Beroperasi	380.602.741	Indonesia
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.	Perusahaan di bidang jasa konstruksi gedung, properti dan investasi properti.	69,30	24 Oktober 2008	Beroperasi	5.890.299.960	Indonesia
PT Wijaya Karya Bitumen	Perusahaan eksplorasi aspal bitumen.	99,00	12 Mei 2013	Beroperasi	168.967.330	Indonesia
PT Wijaya Karya Serang Panimbang	Jalan Tol	80,00	22 Februari 2017	Beroperasi	2.678.584.520	Indonesia

* Per 31 Desember 2018

* Dalam ribuan rupiah



Dermaga Sorong



PT WIJAYA KARYA BETON TBK. (WTON)

PT Wijaya Karya Beton Tbk. (WTON) adalah Entitas Anak WIKA yang bergerak dalam bidang beton pracetak. WTON sebelumnya merupakan bagian dari departemen produk beton milik Perusahaan sejak tahun 1974. Pada tanggal 11 Maret 1997 sesuai dengan akta WTON No. 44 tanggal 11 Maret 1997 dari Achmad Bajumi, S.H., selaku pengganti dari Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta, WTON menjadi entitas anak Perusahaan. WTON bergerak dalam bidang perdagangan dan industri beton, jasa konstruksi dan bidang usaha yang terkait.

Saham WTON dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 April 2014. Porsi kepemilikan WIKA pada WTON adalah sebesar 60,0%. WIKA Beton saat ini memiliki 14 pabrik, 1 *mobile plant* dan 3 *quarry plant*.



DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN
Bambang Pramujo	Komisaris Utama	Hadian Pramudita	Direktur Utama
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	Imam Sudiyono	Direktur
Yohanes Babtista Priyatmo Hadi	Komisaris	I Ketut Pasek Senjaya Putra	Direktur
Yustinus Prastowo	Komisaris Independen	Kuntjara	Direktur
Asfiah Mahdiani	Komisaris Independen	Mursyid	Direktur
Priyo Suprobo	Komisaris Independen	Sidiq Purnomo	Direktur

PT WIJAYA KARYA REALTY (WIKA REALTY)

PT Wijaya Karya Realty (WIKA REALTY) adalah Entitas Anak WIKA yang bergerak dalam bidang properti. WIKA Realty didirikan berdasarkan akta Imas Fatimah, S.H., No.17 tanggal 20 Januari 2000. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.C-20856HT01.01.TH2000, tanggal 15 September 2000. WIKA Realty bergerak dalam bidang usaha realti, jasa properti dan jasa lainnya, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Porsi kepemilikan WIKA pada WR adalah sebesar 93,05%. WIKA Realty saat ini memiliki 19 kawasan *landed houses*, 21 kawasan *high rise* dan *low rise*, dan 21 unit *property investment*.

**DEWAN KOMISARIS****DIREKSI****NAMA****JABATAN****NAMA****JABATAN**

Novel Arsyad	Komisaris Utama
I Ketut Hadi Priatna	Komisaris
Seno Utomo	Komisaris
Puji Haryadi	Komisaris
Hulman Gultom	Komisaris Independen
Ismono Wijayanto	Komisaris Independen

Agung Salladin	Direktur Utama
Adang Hamdani	Direktur
Eri Prananto	Direktur
Suyamat	Direktur
Wahyu Tri Rahmanto	Direktur Independen



PT WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI (WIK)

PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi (WIK) adalah Entitas Anak WIKA yang sebelumnya bernama PT Wijaya Karya Intrade didirikan berdasarkan akta Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., No. 16 tanggal 20 Januari 2000. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C-19656HT 01.TH 2000, tanggal 4 September 2000. Berdasarkan akta No. 35 tanggal 12 April 2013 dari Sri Ismiyati, S.H., notaris di Jakarta, PT Wijaya Karya Intrade berubah nama menjadi WIK. Perubahan anggaran dasar telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-21488.AH. 01.02.Tahun 2013 tanggal 22 April 2013. WIK bergerak dalam bidang industri, perdagangan suku cadang mobil, alat teknik, mekanikal, elektrikal, pipa katup sambungan dan *packing*, bejana tekan, bahan-bahan konstruksi serta usaha jasa konstruksi. Porsi kepemilikan WIKA pada WIK adalah sebesar 97,22%.



DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN
Novel Arsyad	Komisaris Utama	Koko Cahyo Kuncoro	Direktur Utama
Ruslyn H. Silalahi	Komisaris	Sigit Budi Santoso	Direktur
Akmal Malik	Komisaris	Moch. Cholis Prihanto	Direktur
		Hermawan Dhawayanto	Direktur

PT WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI (WRK)

PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (WRK) adalah Entitas Anak WIKA yang sebelumnya bernama PT Wijaya Karya Insan Pertiwi didirikan berdasarkan akta No. 21 tertanggal 28 Februari 1984 dari Ali Harsoyo, S.H. Akta pendirian disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-6005. HT.01.01TH.84 tertanggal 24 Oktober 1984. Berdasarkan akta No. 50 tanggal 12 November 2013 dari Sri Ismiyati, S.H., notaris di Jakarta. PT Wijaya Karya Insan Pertiwi berubah nama menjadi WRK. Perubahan anggaran dasar telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-63607.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 5 Desember 2013. WRK bergerak dalam bidang jasa konstruksi mekanikal dan elektrikal serta jasa operasi dan pemeliharaan. Porsi kepemilikan WIKA pada WRK sebesar 90,04%.

**DEWAN KOMISARIS****NAMA****JABATAN**

Danu Prijambodo	Komisaris Utama
Elvis Nurhasal	Komisaris
Indra Kusumaningrum	Komisaris

DIREKSI**NAMA****JABATAN**

Hendra Jayusman	Direktur Utama
Zakaria	Direktur
Eko Susilo Prayitno	Direktur
Anung Caksono Adi	Direktur



PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK. (WEGE)

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) adalah Entitas Anak WIKA yang didirikan berdasarkan akta Imas Fatimah, S.H., No. 43 tanggal 24 Oktober 2008. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU.92223.AH.01.01.TH 2008, tanggal 1 Desember 2008. Ruang lingkup kegiatan WEGE adalah bergerak dalam industri konstruksi dan *engineering*, jasa pemborongan dengan pola progres termin maupun *turnkey*, Build Operate Transfer (BOT), pengelolaan dan penyewaan gedung/kawasan niaga terpadu, perdagangan dan pemeliharaan peralatan serta material konstruksi, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi dan *engineering* pada khususnya sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan terbatas, realti sebagai pengembang realti, properti sebagai investor properti dan industri pendukung konstruksi bangunan gedung.

Saham WEGE dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2017. Porsi kepemilikan WIKA pada WEGE adalah sebesar 69,30%.



DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN
Destiawan Soewardjono	Komisaris Utama	Nariman Prasetyo	Direktur Utama
Yulianto	Komisaris	Nur Al Fata	Direktur
Ridwan Abdul Muthalib	Komisaris	Syailendra Ogan	Direktur
Adji Firmantoro	Komisaris Independen	Rudy Hartono	Direktur
Dini Yulianti	Komisaris Independen	Djaka Nugraha	Direktur Independen

PT WIJAYA KARYA BITUMEN (WIKa BITUMEN)

PT Wijaya Karya Bitumen adalah Entitas Anak WIKa yang sebelumnya bernama PT Sarana Karya (Persero), didirikan berdasarkan akta Imas Fatimah, S.H. No. 1 tanggal 1 September 1984. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-931.HT.01.01.TH 1986, tanggal 7 Februari 1986. Berdasarkan akta No. 83 tanggal 30 Juni 2014 dari M. Nova Faisal, S.H., notaris di Jakarta, PT Sarana Karya (Persero) berubah nama menjadi WIKa Bitumen. Perubahan anggaran dasar telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU05084.40.20.2014 Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014. WIKa Bitumen bergerak dalam eksplorasi, eksploitasi, pengolahan batuan aspal dan semua bitumen, baik padat maupun cair. Kepemilikan WIKa pada WIKa Bitumen adalah sebesar 99,00%.

**DEWAN KOMISARIS****NAMA****JABATAN**

Agung Budi Waskito

Komisaris Utama

Novias Nurendra

Komisaris

DIREKSI**NAMA****JABATAN**

Bambang Dwi Wijayanto

Direktur Utama

Yudi Widodo

Direktur

Sila Agung Widyantoro

Direktur

**PT WIJAYA KARYA SERANG PANIMBANG**

PT Wijaya Karya Serang Panimbang adalah Entitas Anak WKA yang didirikan berdasarkan akta Rita Utami Djauhari, S.H., No. 02 tanggal 17 Februari 2017. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0007805.AH.01.01.Tahun 2017.

PT Wijaya Karya Serang Panimbang bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol. Porsi kepemilikan WKA pada PT Wijaya Karya Serang Panimbang adalah sebesar 80,00%.

**DEWAN KOMISARIS****NAMA****JABATAN**

Novel Arsyad

Komisaris Utama

Untung Kurniadi

Komisaris

DIREKSI**NAMA****JABATAN**

Mulyana

Direktur Utama

Jaka Suprihana

Direktur

Syafaruddin

Direktur

ENTITAS ASOSIASI

NAMA	BIDANG USAHA	KEPEMILIKAN SAHAM	TANGGAL DAN TAHUN PENDIRIAN	STATUS OPERASI	JUMLAH ASET	DOMISILI
PT WIKA Industri Energi	Perusahaan bidang Industri Pabrikasi, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi.	40%	18 Juni 2010	Beroperasi	Rp 309 Miliar	Cileungsi Bogor
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Perusahaan bidang Pengangkutan Darat, Perdagangan, Jasa, Industri, Pembangunan, Perbengkelan, Perkebunan dan Pertanian.	38%	2 Oktober 2015	Dalam Pengembangan	Rp 2.725 Miliar	Jakarta
PT Citra Marga Lintas Jabar	Perusahaan bidang penyelenggaraan Proyek Jalan Tol, Melakukan investasi dan Jasa Penunjang di bidang jalan tol lainnya.	29,56%	8 Juli 2015	Beroperasi	Rp 1.972 Miliar	Soreang Pasir Koja
PT Jasamarga Surabaya-Mojokerto	Perusahaan bidang Penyelenggaraan Jalan Tol yang meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan jalan tol.	20,34%	19 Agustus 1994 Operasi 2005	Beroperasi	Rp 5.073 Miliar	Surabaya Mojokerto
PT WIKA Jabar Power	Perusahaan bidang usaha Pertambangan Panas Bumi sisi Hulu (<i>Upstream</i>) dan Pembangunan Pembangkit Listrik. Kegiatan eksplorasi meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi. Pembangunan, pendirian, pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan pembangkit listrik antara lain PLTP, PLTG, PLTU, PLTBM, PLTA/PLTMH.	20%	16 Juli 2009	Beroperasi	Rp 5,7 Miliar	Jawa Barat
PT Jasamarga Manado-Bitung	Perusahaan pelaksanaan pengusahaan ruas jalan tol Manado - Bitung yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya.	20%	6 Juni 2016	Dalam Pengembangan	Rp 918 Miliar	Manado Bitung
PT Prima Terminal Petikemas	Perusahaan bidang penyediaan jasa pelayanan terminal petikemas untuk mengakomodasi pertumbuhan trafik dan meningkatkan pertumbuhan bisnis.	15%	30 Juli 2013	Dalam Pengembangan	Rp 1.071 Miliar	Belawan Medan
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Perusahaan pelaksanaan pengusahaan jalan tol Balikpapan-Samarinda yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha-usaha lainnya.	16,25%	6 Juni 2016	Dalam Pengembangan	Rp 3.044 Miliar	Jakarta
PT Air Minum Indonesia	Perusahaan bidang pengusahaan SPAM Jatiluhur.	14%	30 Juli 2015	Dalam Pengembangan	Rp 0,031 Miliar	Jakarta

NAMA	BIDANG USAHA	KEPEMILIKAN SAHAM	TANGGAL DAN TAHUN PENDIRIAN	STATUS OPERASI	JUMLAH ASET	DOMISILI
PT Wijaya Karya Krakatau Beton	Perusahaan bidang industri beton pracetak dan perdagangan, dan kegiatan usaha lain yang terkait, meliputi perindustrian, kegiatan impor mesin-mesin, suku cadang, bahan baku, dan usaha di bidang perdagangan.	10%	16 Desember 2013	Beroperasi	Rp 75 Miliar	Cilegon
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	Perusahaan yang melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol Kunciran Cengkareng yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha lainnya.	2,1%	14 Mei 2008	Dalam Pengembangan	Rp 2.129 Miliar	Tangerang Selatan
PT Jasamarga Bali Tol	Perusahaan bergerak di bidang pengusahaan jalan tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta usaha lainnya.	0,4%	22 Agustus 2011	Beroperasi	Rp 1.900 Miliar	Denpasar
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	Perusahaan bergerak dalam industri Olefin, bahan aromatik, dan pemurnian.	0,14%	9 Oktober 1995	Beroperasi	Rp 8.720 Miliar	Jakarta

*Per 31 Desember 2018

PT WIKA INDUSTRI ENERGI (WINNER)

PT Wijaya Karya Industri Energi (berdasarkan akta nomor 35 tanggal 20 Mei 2013, sebelumnya bernama PT WIKAINtrade Energi). Kepemilikan saham WIKA pada WINNER sebesar 40%, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri pabrikan, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi.

PT PILAR SINERGI BUMN INDONESIA

Pendirian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, dimana Perseroan telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai pimpinan Konsorsium BUMN dalam rangka Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat. Perseroan memiliki 1.710 lembar saham yang merupakan 38% hak kepemilikan pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Bergerak dalam bidang transportasi, perdagangan, jasa,

industri, pembangunan, perbengkelan, perkebunan dan pertanian.

PT CITRA MARGA LINTAS JABAR

Perseroan memiliki 29,56% hak kepemilikan pada PT Citra Marga Lintas Jabar. PT Citra Marga Lintas Jabar, bergerak dalam bidang perencanaan, penyelenggaraan pembangunan jalan, jembatan bangunan pelengkap dan fasilitas jalan tol serta pengelolaan jalan dan fasilitas tol Soreang Pasir Koja. Tol Soreang Pasir Koja telah beroperasi sejak Desember 2017.

PT JASAMARGA SURABAYA MOJOKERTO

Penyertaan saham Perseroan pada PT Jasamarga Surabaya Mojokerto sebesar 20,34%, bergerak dalam bidang perencanaan, penyelenggaraan pembangunan jalan, jembatan bangunan pelengkap dan fasilitas jalan tol serta pengelolaan jalan dan fasilitas tol Surabaya Mojokerto. Tol Surabaya Mojokerto resmi beroperasi penuh pada Desember 2017.

PT WIKA JABAR POWER

Penyertaan saham Perseroan pada PT WIKA Jabar Power sebesar 20%, bergerak di bidang usaha Pertambangan Panas Bumi sisi Hulu (Upstream) dan Pembangunan Pembangkit Listrik. Kegiatan eksplorasi meliputi kegiatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi. Pembangunan, pendirian, pengoperasian, pemeliharaan dan pengembangan pembangkit listrik antara lain PLTP, PLTG, PLTU, PLTBM, PLTA/PLTMH.

PT JASAMARGA MANADO-BITUNG

Penyertaan saham pada PT Jasamarga Manado-Bitung sebesar 20,00%. Bergerak dalam bidang perencanaan, penyelenggaraan pembangunan jalan, jembatan bangunan pelengkap dan fasilitas jalan tol serta pengelolaan jalan dan fasilitas tol pada ruas Manado-Bitung.

PT JASAMARGA BALIKPAPAN-SAMARINDA

Penyertaan saham Perseroan pada PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda sebesar 16,25%. Bergerak dalam bidang perencanaan, penyelenggaraan pembangunan jalan, jembatan bangunan pelengkap dan fasilitas jalan tol serta pengelolaan jalan dan fasilitas tol pada ruas Balikpapan-Samarinda.

PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS

Penyertaan saham Perseroan pada PT Prima Terminal Petikemas sebesar 15%. Bergerak dalam bidang jasa pelayanan operasi kapal, jasa pelayanan operasi lapangan, dan jasa lainnya yang berkaitan dengan pelayanan terminal peti kemas yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan.

PT AIR MINUM INDONESIA

Perseroan memiliki penyertaan saham pada PT Air Minum Indonesia sebesar 14%. Bergerak dalam bidang Sistem Penyediaan Air Minum yang meliputi kegiatan kelembagaan, pendanaan, dan perencanaan

teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan serta usaha-usaha lainnya yang terkait langsung dengan kegiatan usaha utama perusahaan.

PT WIJAYA KARYA KRAKATAU BETON

Perseroan memiliki 10% kepemilikan pada PT WIKA Krakatau Beton. Bergerak dalam bidang industri beton pracetak dan perdagangan, dan kegiatan usaha lain yang terkait.

PT JASAMARGA KUNCIRAN CENGKARENG

Penyertaan saham Perseroan pada PT Jasamarga Kunciran Cengkareng sebesar 2,1%. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan adalah melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Kunciran - Cengkareng, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

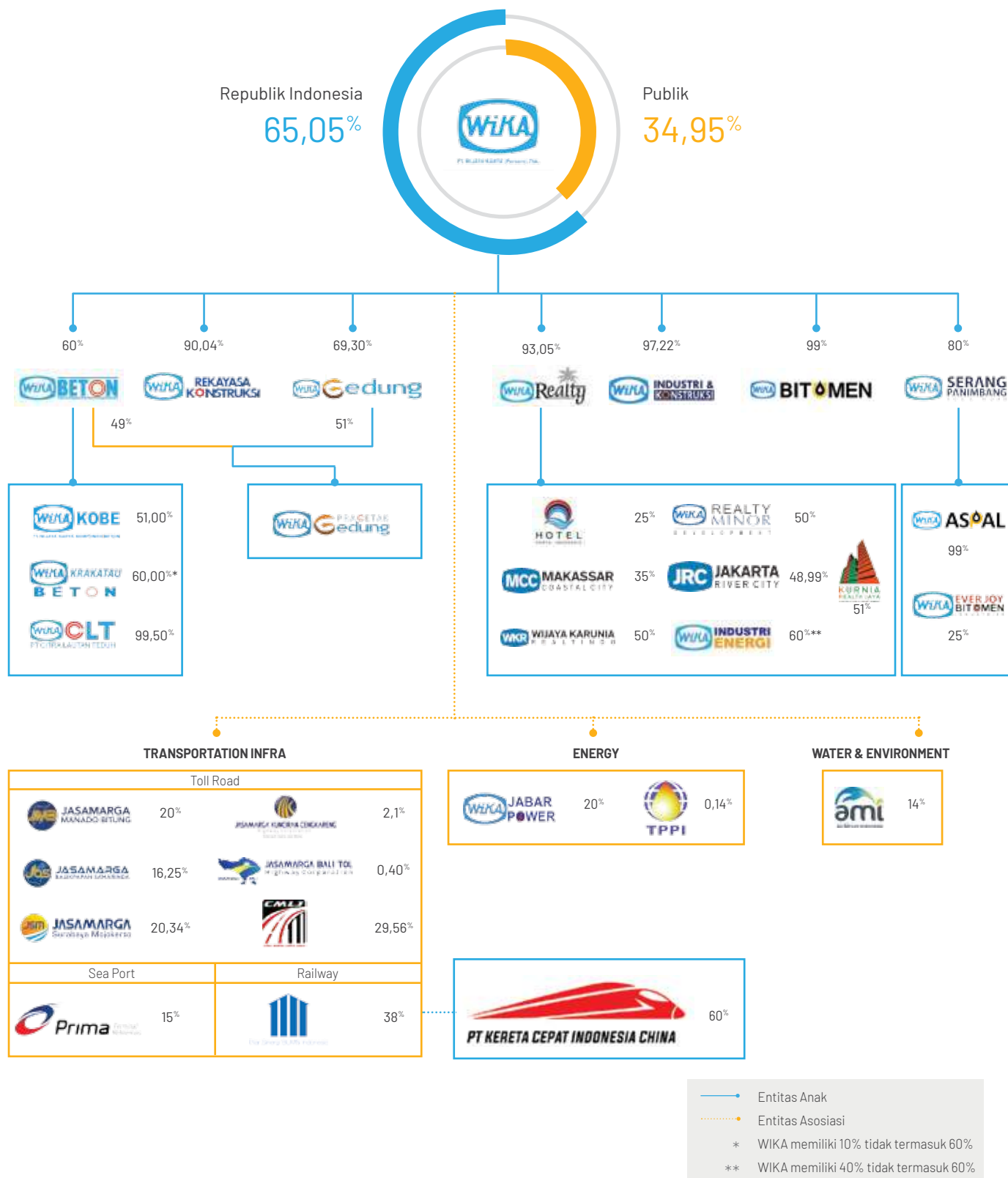
PT JASAMARGA BALI TOL

Penyertaan saham Perseroan pada PT Jasamarga Bali Tol sebesar 0,4%. Bergerak dalam bidang perencanaan, penyelenggaraan pembangunan jalan, jembatan bangunan pelengkap dan fasilitas jalan tol serta pengelolaan jalan dan fasilitas tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa Bali.

PT TRANS PACIFIC PETROCHEMICAL INDOTAMA

Perseroan memiliki penyertaan saham pada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama sebesar 0,14%. Bergerak dalam bidang produksi produk aromatik dan bahan bakar minyak. TPPI memiliki peran penting dalam rantai industri petrokimia dalam negeri. Produk yang dihasilkan TPPI mampu mengurangi kuota impor bahan baku produk plastik dan turunannya.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN



KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

11 OKTOBER 2007

Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-5275/BL/2007 untuk melakukan penawaran umum atas 1.846.154.000 lembar saham seri B dari total 5.846.154.000 lembar saham Perusahaan kepada masyarakat, dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran Rp420 per saham yang didasarkan pada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) No. KD. 01/3406/DPRRI/2007 tanggal 26 April 2007, Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. RIS15/D2.MBU/2007, tanggal 14 Juni 2007 dan surat persetujuan Menteri Negara BUMN No. S717/MBU/2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang persetujuan program Employee Stock Allocation (ESA), Employee Stock Option Plan (ESOP) dan Management Stock Option Plan (MSOP). Sampai dengan tahun 2014, Perusahaan menerbitkan total 303.071.000 saham baru untuk pelaksanaan ESOP dan MSOP.

03 NOVEMBER 2016

Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) no. S-631/D.04/2016 atas Pernyataan Pendaftaran dalam melakukan Penawaran Umum Terbatas.

25 NOVEMBER 2016

Seluruh saham Perusahaan yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Terbatas sebanyak 2.820.726.372 saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tanggal 30 September 2017 dan 31 Desember 2016, saham Perusahaan sejumlah 8.969.951.372 lembar saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

NAMA BURSA TEMPAT SAHAM PERUSAHAAN DICATATKAN

Seluruh saham WIKA telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta (saat ini Bursa Efek Indonesia).

Tabel Kronologis Penerbitan Saham WIKA

PERIODE	KETERANGAN	NILAI NOMINAL (RP)	HARGA PENAWARAN (RP)	MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR			
				JUMLAH SAHAM YANG DITERBITKAN	JUMLAH SAHAM	TOTAL NILAI (RP)	TOTAL HARGA PENAWARAN (RP)
Sebelum IPO	-	-	-	-	4.000.000.000	400.000.000.000	-
2007	Perseroan melakukan penawaran umum perdana	100	420	1.846.154.000	5.846.154.000	584.615.400.000	775.384.680.000
2009	Exercise ESOP/MSOP	100	322,74	213.500	5.846.367.500	584.636.750.000	68.904.990
2010	Exercise ESOP/MSOP	100	322,74	155.173.000	6.001.540.500	600.154.050.000	50.080.534.020
2011	Exercise ESOP/MSOP	100	322,74	25.727.000	6.027.267.500	602.726.750.000	8.303.131.980
2012	Exercise ESOP/MSOP	100	322,74	80.699.000	6.107.966.500	610.796.650.000	26.044.795.260
2013	Exercise ESOP/MSOP	100	322,74	32.001.500	6.139.968.000	613.996.800.000	10.328.164.110
2014	Exercise ESOP/MSOP	100	322,74	9.257.000	6.149.225.000	614.922.500.000	2.987.604.180
2016	Penawaran Umum Terbatas	100	2.180	2.820.726.372	8.969.951.370	896.995.137.000	6.149.183.490.960

KRONOLOGIS PENCATATAN OBLIGASI DAN EFEK LAINNYA

OBLIGASI

KOMODO BOND

Pada tanggal 29 Januari 2018, WIKA menerbitkan obligasi berdenominasi Rupiah sebesar Rp5.400.000.000 yang akan jatuh tempo pada bulan Januari 2021. Obligasi ini dikenakan biaya bunga 7,7% per tahun. Obligasi Komodo Bond ini tercatat di Singapore Exchange dan London Stock Exchange.

MEDIUM TERM NOTES (MTN)

MTN yang dimiliki oleh WIKA

MTN I dan II ini dijamin dengan jaminan fidusia dari piutang penjualan sampai dengan 100% dari jumlah pokok MTN I dan II yang terutang untuk Perusahaan. Penerbitan dana MTN I dan II bertujuan untuk penambahan modal entitas anak, restrukturisasi utang jangka pendek, modal kerja dan investasi.

MTN yang dimiliki oleh WIKA Realty

Pada utang MTN III tidak ada jaminan fidusia dari piutang penjualan (bersifat *clean basis*). Pada utang MTN IV Berkelanjutan ada jaminan fidusia dari piutang penjualan. Pemakaian dana dari MTN ini diperuntukkan sebagai pemakaian modal kerja pembangunan kawasan *realty*.

EFEK LAINNYA

SURAT BERHARGA PERPETUAL

Pada tanggal 27 Desember 2018, Surat Berharga Perpetual I WIKA Tahun 2018 berhasil diterbitkan. Total dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan Tahap I 2018 ini adalah sebesar Rp600.000.000.000. Imbal hasil yang ditetapkan sebesar 10,5% per tahun ditambah *Step-up Rate* (jika ada).

Adapun penjelasan secara rinci mengenai penerbitan obligasi dan efek lainnya WIKA dan Entitas Anak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Kronologis Penerbitan Obligasi

NO	URAIAN	TANGGAL TERBIT	TENOR	MATA UANG	NILAI (DALAM MILIAR RUPIAH)	TANGGAL JATUH TEMPO	TINGKAT SUKU BUNGA	STATUS PEMBAYARAN	PERINGKAT		WALI AMANAT
									2018	2017	
	OBLIGASI										
1	Obligasi Komodo Bond	29 Januari 2018	3 tahun	Rp	5.400	Januari 2021	7,7%	Belum Lunas	Fitch : BB Moody's : B2a	-	The Bank of New York Mellon

Tabel Kronologis Penerbitan Medium Term Notes (MTN)

NO	URAIAN	TANGGAL TERBIT	TENOR	MATA UANG	NILAI (DALAM MILIAR RUPIAH)	TANGGAL JATUH TEMPO	TINGKAT SUKU BUNGA	STATUS PEMBAYARAN	PERINGKAT		WALI AMANAT
									2018	2017	
	MEDIUM TERM NOTES (MTN)										
1	MTN IV Berkelanjutan WIKA Realty Tahun 2016 Tahap I	19 Mei 2016	3 tahun	Rp	150	19 Mei 2019	12,25%	Belum Lunas	idBBB+	idBBB+	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2	MTN IV Berkelanjutan WIKA Realty Tahun 2016 Tahap II	18 Mei 2016	3 tahun	Rp	100	18 Mei 2019	12,25%	Belum Lunas	idBBB+	idBBB+	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3	MTN VI WIKA Realty Tahun 2017	24 Oktober 2017	3 tahun	Rp	500	27 Oktober 2020	9,75%	Belum Lunas	idBBB+	idBBB+	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4	MTN V WIKA Realty Tahun 2017	08 November 2017	3 tahun	Rp	250	08 November 2020	10,35%	Belum Lunas	idBBB+	idBBB+	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tabel Kronologis Penerbitan Surat Berharga Perpetual

URAIAN	TANGGAL TERBIT	TENOR	MATA UANG	NILAI (MILIAR)	TANGGAL JATUH TEMPO	TINGKAT SUKU BUNGA	STATUS PEMBAYARAN	PERINGKAT		WALI AMANAT
								2018	2017	
SURAT BERTAGIH PERPETUAL										
Surat Berharga Perpetual	27 Desember 2018	Sampai dengan dilaksanakannya opsi tebus oleh penerbit	Rp	600	Sampai dengan dilaksanakannya opsi tebus oleh penerbit	10,5% berlaku <i>Step-up Rate</i> (jika ada)	Belum Lunas	Fitch: AA	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk.

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

INFORMASI PERDAGANGAN DAN PENCATATAN SAHAM

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : +6221 515 0515 Website : www.idx.co.id
Fax : +6221 515 4153 E-mail : listing@idx.co.id

KUSTODIAN

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : +6221 515 2855 Website : www.ksei.co.id
Fax : +6221 529 91199 E-mail : helpdesk@ksei.co.id

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Plaza Asia, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman No.59
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : +6221 514 01340 Website : www.rsm.id
Fax : +6221 514 01350 E-mail : inquiry@rsm.id

Jasa yang diberikan:

1. Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Tahun Buku 2018;
3. Laporan Audit kepatuhan (*compliance audit*) terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern Tahun Buku 2018;
4. Laporan Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Fee : Rp900.919.800 lumpsum kontrak tidak termasuk PPN Jasa 10% dan Out of Pocket Expenses maksimal sebesar 5% biaya Jasa Audit.

Periode: Tahun Buku 2018

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28
Jakarta 10120, Indonesia
Telp : +6221 350 8077
Fax : +6221 350 8078
E-mail : sastra-s@datindo.com

Jasa yang diberikan:
Pencatatan Daftar Pemegang Saham dan Jasa Administrasi di Pasar Modal

Periode :2007-sekarang

**LEMBAGA PEMERINGKAT
EFEK**

Moody's Singapore Pte Ltd

50 Raffles Place #23-06
Singapore Land Tower 048623
Tel : +65 6398 8300
Fax : +65 6398 8301
Website : www.moody.com

PT Fitch Ratings Indonesia

Prudential Tower Lt. 20
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910, Indonesia
Tel : +6221 5795 7755
Fax : +6221 5795 7750
Website : www.fitchratings.com

Jasa yang diberikan:
Melakukan pemeringkatan atas Perseroan

NOTARIS

Fathiah Helmi

Jl HR Rasuna Said Blok X-1 Kav 1-2
Jakarta 12950, Indonesia
Tel : +6221 529 07304
Fax : +6221 526 1136

Jasa yang diberikan:
Notaris dalam pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dan Perubahan Anggaran Dasar perusahaan.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI



02



04

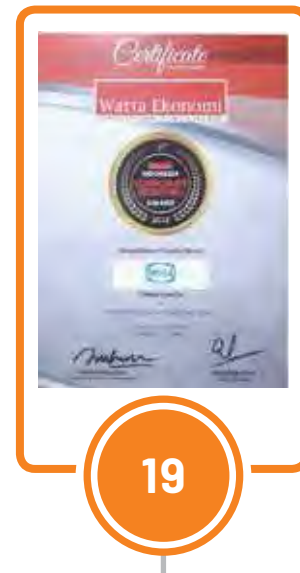


06

No	Nama Penghargaan	Jenis Penghargaan	Waktu Penganugerahan	Pemberi Penghargaan
01	Asia Sustainability Report 2017 Kategori Asia's Most Tranparent Report	Corporate Award	6 Februari 2018	CSR Works International
02	Top 2 Best Sustainability Report 2017 Kategori Infrastruktur di Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) 2017	Corporate Award	24 Februari 2018	Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP)
03	Pembayar Pajak Terbesar	Corporate Award	13 Maret 2018	Ditjen Pajak
04	Excellent Company for Product and Business Process Innovation in Construction and Building Sector.	Corporate Award	23 Maret 2018	Warta Ekonomi
05	Penghargaan Ramah Lingkungan untuk Proyek Dermaga Sorong	Corporate Award	14 April 2018	Pemerintah Kota Sorong
06	Best Partnership Program and Community Development in Construction Category	Corporate Award	30 April 2018	Warta Ekonomi



No	Nama Penghargaan	Jenis Penghargaan	Waktu Penganugerahan	Pemberi Penghargaan
07	Pencapaian 2.000.000 Jam Kerja Selamat Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Halmahera Timur (P3FH)	Corporate Award	4 Juni 2018	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
08	Apresiasi Penghargaan Pencapaian 1.000.000 Jam Kerja Selamat Proyek EPCC Pengembangan dan Modernisasi Pabrik Gula Assembagoes Situbondo	Corporate Award	7 Juni 2018	PTPN XI
09	Index 25 Perusahaan SRI KEHATI 2018 Indonesia Green Company Achievement	Corporate Award	11 Juli 2018	Majalah SWA
10	Top 2 Strategi Pertumbuhan Terbaik Kategori BUMN Tbk.	Corporate Award	9 Agustus 2018	BUMN Track
11	Excellence in Interpersonal Relationship	CEO Award	9 Agustus 2018	BUMN Track
12	Champion for ASEAN 2018 Sektor Konstruksi	Corporate Award	6 September 2018	Mark Plus



No	Nama Penghargaan	Jenis Penghargaan	Waktu Penganugerahan	Pemberi Penghargaan
13	PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. atas dukungan dan dedikasi yang luar biasa dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga serta infrastruktur pendukung lainnya dalam penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018	Corporate Award	10 September 2018	Wakil Presiden Republik Indonesia Selaku Ketua Pengarah Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018
14	Social Business Innovation Award Kategori Building Construction	Corporate Award	27 September 2018	Warta Ekonomi
15	Green CEO Award	CEO Award	27 September 2018	Warta Ekonomi
16	Golden Thropy Award	Corporate Award	30 September 2018	Info Bank Magazines
17	Juara I pada Kategori Advancements in Environmental Engineering pada Proyek Landside Disaster Protection Project on the National Road Network 2018 dalam Year in Infrastructure 2018 Award	Corporate Award	19 Oktober 2018	Bentley


22

25

27

No	Nama Penghargaan	Jenis Penghargaan	Waktu Penganugerahan	Pemberi Penghargaan
18	Juara I pada Kategori Advancements in Bridges pada Proyek Design and Build of Road Bridge at Teluk Lamong Port Project 2018 dalam Year in Infrastructure 2018 Award	Corporate Award	19 Oktober 2018	Bentley
19	Indonesia Corporate Secretary Award, Top 5 GCG Issues in Construction Sector	Corporate Award	26 Oktober 2018	Warta Ekonomi
20	Pelaporan BHUN 2017 Terbaik	Corporate Award	29 Oktober 2018	Kementerian BUMN
21	Pemenang Terbaik II Kategori Benda Rumah Veteran 2015-2017 di bawah 100 Rumah	Corporate Award	29 Oktober 2018	Kementerian BUMN
22	Indonesia Good Corporate Governance (GCG) Award 2018 dan Operational Excellence Award I 2018 Kategori Public Company	Corporate Award	2 November 2018	Majalah Economic Review di Graha CIMB Niaga
23	Best of The Best versi Majalah Forbes Indonesia	Corporate Award	29 November 2018	Forbes Magazine



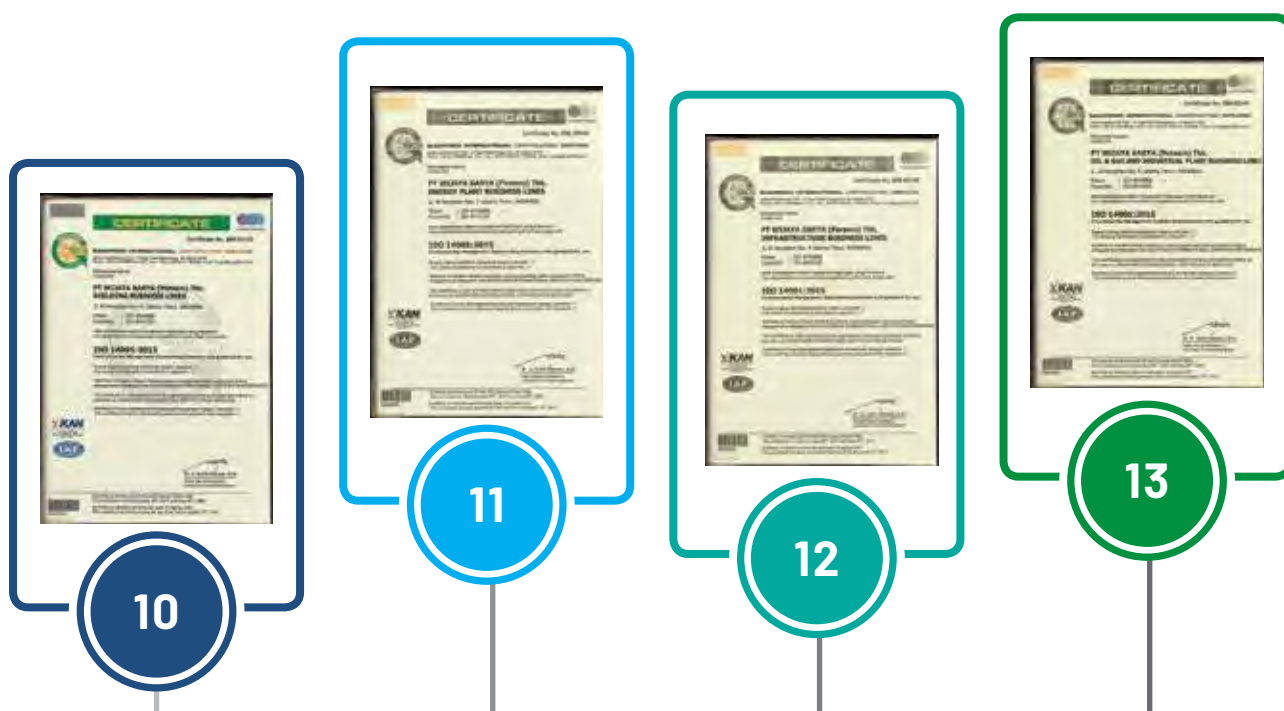
No	Nama Penghargaan	Jenis Penghargaan	Waktu Penganugerahan	Pemberi Penghargaan
24	Best Chief Financial Officer Award 2018	CFO Award	29 November 2018	Majalah SWA
25	The Best Industry Marketing Champion Kategori Konstruksi dalam ajang The Best Marketeer of The Year (MOTY) 2018	Directorship Award	6 Desember 2018	Mark Plus
26	International CFO Innovation Awards 2018 for Excellence in Supply Chain Finance	CFO Award	7 Desember 2018	International CFO
27	Platinum Rank "Asia Sustainability Reporting Rating 2018"	Corporate Award	7 Desember 2018	National Center for Sustainability Reporting
28	Top 50 Big Capitalization Public Listed Company	Corporate Award	10 Desember 2018	Indonesian Institute for Corporate Directorship
29	3 Besar IT Governance Award 2018 Sektor Informasi dan Komunikasi	Corporate Award	19 Desember 2018	FORTI BUMN
30	Indonesia Most Trusted Company 2018	Corporate Award	19 Desember 2018	Majalah SWA dan IICG



No	Jenis Sertifikasi	Penerima	Validasi	Dikeluarkan Oleh
01	OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System-Requirements	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Building Business Line	15 Agustus 2015 – 14 Agustus 2018	Sucofindo
02	OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System-Requirements	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Energy Plant Business Line	15 Agustus 2015 – 14 Agustus 2018	Sucofindo
03	OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System-Requirements	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Oil & Gas and Industrial Plant Business Lines	15 Agustus 2015 – 14 Agustus 2018	Sucofindo
04	OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System-Requirements	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Infrastructure Business Lines	15 Agustus 2015 – 14 Agustus 2018	Sucofindo
05	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	30 Juli 2018 – 30 Juli 2021	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia



No	Jenis Sertifikasi	Penerima	Validasi	Dikeluarkan Oleh
06	SNI ISO 9001:2015 Quality Management System- Requirements	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Energy Plant Business Lines	04 Mei 2017 - 03 Mei 2020	Sucofindo
07	SNI ISO 9001:2015 Quality Management System- Requirements	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Infrastructure Business Lines	04 Mei 2017 - 03 Mei 2020	Sucofindo
08	SNI ISO 9001:2015 Quality Management System- Requirements	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Building Business Line	04 Mei 2017 - 03 Mei 2020	Sucofindo
09	SNI ISO 9001:2015 Quality Management System- Requirements	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Oil & Gas and Industrial Plant Business Lines	04 Mei 2017 - 03 Mei 2020	Sucofindo



No	Jenis Sertifikasi	Penerima	Validasi	Dikeluarkan Oleh
10	ISO 14001:2015 Environmental Management System Requirements with Guidance for Use	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Building Business Line	04 Mei 2017 - 03 Mei 2020	Sucofindo
11	ISO 14001:2015 Environmental Management System Requirements with Guidance for Use	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Energy Plant Business Lines	04 Mei 2017 - 03 Mei 2020	Sucofindo
12	ISO 14001:2015 Environmental Management System Requirements with Guidance for Use	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Infrastructure Business Lines	04 Mei 2017 - 03 Mei 2020	Sucofindo
13	ISO 14001:2015 Environmental Management System Requirements with Guidance for Use	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Oil & Gas and Industrial Plant Business Lines	04 Mei 2017 - 03 Mei 2020	Sucofindo

NAMA DAN ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, STRATEGIC BUSINESS UNIT, KANTOR CABANG LUAR NEGERI DAN KANTOR DIVISI

ALAMAT	
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.	
HEAD OFFICE	Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 WIKATower 1 & 2, Jakarta 13340 Telp. (+6221) 80679200 Fax. (+6221) 22893830 Website : www.wika.co.id E-mail : investor.relations@wika.co.id
DEPARTMENTS	
CIVIL CONSTRUCTION I	WIKATower 2 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340 Telp. (+6221) 80679200 E-mail : rekrutmendsu1@gmail.com
CIVIL CONSTRUCTION II	WIKATower 2 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340 Telp. (+6221) 80679200 E-mail : sipildsu2@gmail.com
CIVIL CONSTRUCTION III	WIKATower 2 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340 Telp. (+6221) 80679200 E-mail : wika-dsu3@wikamail.id
POWER PLANT & ENERGY	WIKATower 2 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340 Telp. (+6221) 80679200 E-mail : epc@wika.co.id
OVERSEAS	WIKATower 2 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340 Telp. (+6221) 80679200 E-mail : overseasdepartment@wika.co.id
INDUSTRIAL PLANT	WIKATower 2 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340 Telp. (+6221) 80679200 E-mail : utilitas@wika.co.id
BUSINESS SINERGY	WIKATower 2 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340 Telp. (+6221) 80679200 E-mail : adpa.dsu@gmail.com
CORPORATE PLANNING AND BUSINESS DEVELOPMENT	WIKATower 2 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340 Telp. (+6221) 80679200 E-mail : investasi@wika.co.id
BUILDING CONSTRUCTION	WIKATower 2 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340 Telp. (+6221) 80679200 E-mail : dbg@wika.co.id
DIVISIONS	
DIVISION I NAD, North Sumatera, Riau, Kepulauan Riau and West Sumatera, Jambi	Jl. Gunung Krakatau No. 15, Kel. Pulo Brayan Darat 2, Kec. Medan Timur - Medan 20239 Telp. (+6261) 6639496 Fax. (+6261) 6610740
DIVISION II Jabodetabek	WIKATower 2, 9th Floor Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340 Telp. (+6221) 80679200

ALAMAT
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.

DIVISION III South Sumatera, Lampung, Banten and West Java	WIKA Tower 2, 10th Floor Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340 Telp. (+6221) 80679200
DIVISION IV Central Java, DIY, East Java, Bali,	Gedung Tamansari Papilio, 6th Floor Jl. A. Yani No. 176-178 Surabaya 60235, Jawa Timur Telp. (+6231) 99003189 Fax. (+6231) 99043855
DIVISION V Kalimantan	Jl. Telaga Kihung Syarifudin Yoes Dalam No. 115-116, Balikpapan 76115 Telp. (+62542) 8510888 Fax. (+62542) 8510888
DIVISION VI Sulawesi & Maluku	Jl. Padjonga Dg. Ngalle No. 12, Makassar 90125 Telp. (+62411) 8728 59 Fax. (+62411) 8728 59
DIVISION VII Papua	Jl. Majapahit No. 104, Dasan Agung Baru, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125 Telp. (+62370) 632541 Fax. (+62370) 632541
HSR DIVISION	WIKA Tower 2, 9th Floor Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340 Telp. (+6221) 80679200
OVERSEAS BRANCH OFFICE	
MALAYSIA	Lot 382, 2nd Floor, Section 5. Wisma Polarwood KTL D, Jalan Satok Kuching, Sarawak, Malaysia 93400
SAUDI ARABIA	Syarbatli Center, Gate 4, No. 27 Hail Street, Alruwaisy District, Jeddah - Kingdom Of Saudi Arabia
UAE	1108, The Onyx Tower - 1 Sheikh Zayed Road, The Greens, Dubai, United Arab Emirates
TIMOR LESTE	Rua Saboria, Delta 2, Comoro, Dili Timor Leste
MYANMAR	No. 37 #406, Lapyayt Wun Plaza, Alanpya Pagoda Road, Dagon Township, Yangon
ALGERIA	Cite Les Castors, 3eme Groupe, Villa N 26 - Said Hamdne, Bir Mourad Rais - Algeria
PHILLIPINES	U-18V Legaspi Tower 300 Roxas Blvd Cor. P. Ocampo, Malate Manila, Metro Manila
TAIWAN	No. 1778, Fuxing North Road, Zhongshan District, Taiwan 10491

KANTOR ENTITAS ANAK	ALAMAT
PT WIKA BETON TBK.	
HEAD OFFICE	WIKA Tower 1, 2nd - 4th Floor Jl. D. I. Panjaitan Kav. 9 - 10, Jakarta 13340 Telp. (+6221) 819 2802 (hunting) Fax. (+6221) 8590 3872 E-mail: wbcc@wika-beton.co.id marketing@wika-beton.co.id Website: www.wikabeton.co.id
SALES AREA OFFICES	
Marketing Region I North Sumatera	Jl. Gunung Krakatau No. 15 Medan 20239 Tel : (+6261) 6626225, 6627577 Fax : (+6261) 6628076 E-mail : wilayah1@wika-beton.co.id
Marketing Region I	Komplek Perkantoran Grand Sudirman D-17 Jl. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah Pekanbaru 28282 Telp. (+62761) 849909 E-mail : wilayah1@wika-beton.co.id betonmed@indosat.net.id
Marketing Region II South Sumatera	Jl. Bambang Utoyo, Rama Kasih Raya No. 957, Palembang 30115 Telp. (+62711) 712534, 7300399 Fax. (+62711) 720093 E-mail : wilayah2@wika-beton.co.id
Marketing Region II Representative Lampung	Jl. Wolter Monginsidi No. 222 Teluk Betung, Bandar Lampung 35215 Telp. (+62721) 482336 E-mail : lampung@wika-beton.co.id
Marketing Region III Jakarta	Jl. Biru Laut X No. 20-21 Jakarta 13340 Telp. (+6221) 8192808, 8193024 Fax. (+6221) 8560694, 8519903 E-mail : wilayah3@wika-beton.co.id
Marketing Region IV Central Java	Jl. Teuku Umar No. 21, Semarang 50234 Telp. (+6224) 841890, 8318787 Fax. (+6224) 8318135, 8318091 E-mail : wilayah4@wika-beton.co.id
Marketing Region V	Gedung Tamansari Papilio, 5th Floor Jl. Ahmad Yani No. 176-178, Surabaya Telp. (+6231) 99003395, 99003384 Fax. (+6231) 99003384 E-mail : wilayah5@wika-beton.co.id
Marketing Region VI Wilayah Operasi Manado Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara	Tamansari Metropolitan, A1/01; Jl. A. A. Maramis, Kel. Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Manado Telp. (+62431) 7241793
Marketing Region VI South Sulawesi	Jl. Kima Raya II Kav. S/4-6 Kawasan Industri Makassar Makassar 90241 Telp. (+62411) 511761, 4723100, 4723200 Fax. (+62411) 511955, 4723166 E-mail : wilayah6@wika-beton.co.id
Marketing Region VI Wilayah Operasi Jayapura	Ruko Polimak No. 16 Jl. Ardiapura 3 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Telp. (+62967) 521332

KANTOR ENTITAS ANAK	ALAMAT
PT WIKA BETON TBK.	
Marketing Region VII Wilayah Operasi Balikpapan	Komp. Balikpapan Super Blok (BSB)/E-Walk Blok A No.1 Jl. Jend. Sudirman, Balikpapan 76114 E-mail: kaltim@wika-beton.co.id, wikabeton_kaltim@yahoo.com
SEKRETARIAT PPWB PERHIMPUNAN PEGAWAI PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.	WIKATower 1, 2nd – 4th Floor Jl. D. I. Panjaitan Kav. 9, Jakarta 13340 Telp. (+6221) 8067 9200 (hunting) Fax. (+6221) 8590 3872 E-mail: ppwb@wika-beton.co.id
FACTORIES	
North Sumatera	Jl. Binjai Km. 15,5 No. 1, Diski Deli Serdang, Sumatera Utara 20351 Telp. (+6261) 8821543, 8821111 Fax. (+6261) 8821668, 883035
Lampung	Jl. Raya Tegineneng Km. 34 Desa Bumi Agung, Tegineneng, Pesawaran 35363 Lampung Telp. (+62725) 411318 Fax. (+62725) 7851568
South Lampung	Jl. WIKAT Beton (Jl. Lintas Timur Sumatera Km. 4) Desa Sumur, Ketapang, Lampung Selatan 35596
Bogor	Jl. Raya Narogong Km. 26, Cileungsi Bogor 16820 Telp. (+6221) 8674010 Fax. (+6221) 8674018
Karawang	Jl. Surya Madya III Kav. I-34 Kawasan Industri Surya Cipta Karawang 41361 Telp. (+62267) 89115167, (+62267) 8630315 Fax. (+62267) 8610259
Majalengka	Jl. Raya Burujul Kulon, Jatiwangi Majalengka 45454 Telp. (+62233) 882575, 881425
Boyolali	Jl. Raya Boyolali-Solo Km. 4,5 Mojosongo, Boyolali 57300 Telp. (+62276) 321138, 881125 Fax. (+62276) 321138
Pasuruan	Jl. Raya Kejaman No. 323, Gempol Pasuruan 67155 Telp. (+62343) 851488, 852130, 853161 Fax. (+62343) 851480
South Sulawesi	Jl. Kima Raya II Kav. S/4-5-6 Kawasan Industri Makassar, Makassar 90241 Telp. (+62411) 511764 Fax. (+62411) 510893, 4723206
Subang	Jl. Raya Cipeundeuy – Pabuaran Km. 3,6 Desa Karang Mukti Kec. Cipeundeuy Subang 41272
CRUSHING PLANT	
Crushing Plant Bogor	Desa Mekar Jaya, Cigudeg Bogor 16660 Fax. (0251) 8680232
Crushing Plant Lampung Selatan	Jl. Wijaya Karya Beton (Jl. Lintas Timur Sumatera Km. 4) Desa Sumur, Ketapang, Lampung Selatan 35596
Crushing Plant Donggala	Jl. Poros Palu Donggala Km. 23 Desa Loli Dondo, Banawa, Donggala 94351

KANTOR ENTITAS ANAK	ALAMAT
PT WIKA GEDUNG TBK.	
HEAD OFFICE	WIKA Tower 1, 8-10th Floor Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340 Telp. (+6221) 85908862 / 85909003 Fax. (+6221) 85904146 Website : www.wikagedung.co.id

KANTOR ENTITAS ANAK	ALAMAT
PT WIKA INDUSTRI & KONSTRUKSI	
HEAD & MARKETING OFFICE	Tamansari Hive Office 8th Floor Jalan D.I. Panjaitan Kav.2 Jakarta 13340 Telp. (+6221) 21013545 Fax. (+6221) 21013772 Email : sekdir@wikaikon.co.id, info@wikaikon.co.id Website: www.wikaikon.co.id
FACTORY	Kawasan Industri WIKI Jalan Raya Narogong Km.26, Celeungsi - Bogor 16820 Telp. (+6221) 86863103, 86863104 Fax. (+6221) 86863102
EQUIPMENT DIVISION	Tamansari Hive Office 6th Floor Jalan D.I. Panjaitan Kav.2 Jakarta 13340 Telp. (+6221) 2208 5149

KANTOR ENTITAS ANAK	ALAMAT
PT WIKA REALTY	
HEAD OFFICE	Tamansari Hive Office, 12th Floor Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta 13340 Telp. (+6221) 21011200, 21011201, Fax. (+6221) 22085123 E-mail : corsec@wikarealty.co.id Website : www.wikarealty.co.id Customer Service Unit Realty: cs@wikarealty.co.id Unit Property: biroproperti@wikarealty.co.id
HOUSING ESTATE	
Tamansari Bukit Mutiara	Perumahan Tamansari Bukit Mutiara, Jl. MT. Haryono, Balikpapan Utara, 76125 Telp. (+62542) 8522900
Tamansari Grand Samarinda	Jl. HAMM Rifaddin, Komplek Tamansari Grand Samarinda, Ruko E2 No. 11, Kel Harapan Baru, Kec. Loajanan Ilir, Samarinda - 75131 Telp. (+62541) 726 8979, 7268999
Tamansari Metropolitan Manado	Jl. A. A. Maramis Km. 8, Blok C02/05, Mapengat, Manado Telp. (+62431) 812 222, 813 333

KANTOR ENTITAS ANAK	ALAMAT
PT WIKA REALTY	
Tamansari Kahyangan	Jl. Poros Bandara, Desa Ranooha, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan Sulawesi Tenggara Telp. (+62401) 319 6070, 319 0011 Fax. (+62401) 3196070
Tamansari Puri Bali II - Depok	Jl. Raya Sawangan Km. 1 Depok Telp. (+62) 811156781
APARTMENT, CONDOTEL, VILLATEL	
Tamansari Panoramic	Jl. Soekarno Hatta No. 783 A Bandung Telp. (+6222) 878 83435
Tamansari Lagoon	Komplek Bahu Mall Blok A.3 Jl. Wolter Monginsidi No. 1, Manado Telp. (+62431) 834608
Tamansari Jivva	Jl. Subak Leping No. 16, Pantai Leping, Klungkung, Bali - 80752 Telp. Marketing Office: (021) 2940 1400 Telp. Proyek: (0366) 5437988
Tamansari Gangga	Jl. Yeh Gangga, Sudimara, Tabanan, Bali Telp. (+62361) 44577111
Tamansari Skylounge Makassar	Jl. Poros Bandara Baru, Sudiang, Biringkanaya, Makassar Telp. (+62411) 445280
Tamansari Skylounge Balikpapan	Jl. Pelita No. 19 Sepinggan Raya Balikpapan, Kalimantan Timur Telp. (+62542) 8521999
Tamansari Kencana	Jl. Sulaksana No. 1-6, RT 07/RW 07, Kel. Cicaheum, Kec. Kiaracandong, Bandung Telp. (+6222) 4265421
Tamansari Cendekia	Jl. Durian Raya, Semarang Telp. (+6224) 76403000
Tamansari Emerald - Surabaya	Jl. Emerald Mansion TX3, Citraland, Surabaya Telp. (+6231) 9916 00550
Tamansari La Grande Merdeka	Jl. Merdeka No. 25, 27, 29, Bandung Telp. (+6222) 4265421
Tamansari Papilio	Jl. Ahmad Yani No. 176-178, Surabaya Telp. (+6231) 828272
Tamansari Sky Hive	Jl. D.I. Panjaitan Kav. 48 Jakarta 13340 Telp. (+6221) 2232 6200, 2232 6400
PENJUALAN ASET TAMANSARI	Tamansari Semanggi Apartemen Jl. AKRI 134, Karet, Jakarta Selatan
PROPERTY	
Unit Property I	Tamansari Persada Raya Club Perumahan Tamansari Persada Raya, Jatibening, Bekasi Telp. (+6221) 86902137
Unit Property II	Tamansari Semanggi Apartment Tower A, 2nd Floor, Jl. AKRI No. 134 Karet, Semanggi, Jakarta Selatan Telp. (+6221) 52901518

KANTOR ENTITAS ANAK	ALAMAT
PT WIKA REKAYASA KONSTRUKSI	
HEAD OFFICE	Tamansari Hive Office, 5th Floor Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta 13340 Telp. (+6221) 2268 4446 – 8 E-mail : marketing@wikarekon.co.id Website : www.wikarekon.co.id

KANTOR ENTITAS ANAK	ALAMAT
PT WIKA BITUMEN	
HEAD OFFICE	Jl. Poros Banabungi, Pasar Wajo Pulau Buton, Sulawesi Tenggara
REPRESENTATIVE OFFICE JAKARTA	WIKATower 1, 7th Floor Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta 13340 Telp. (+6221) 21013928 Fax. (+6221) 85909416 E-mail : info@wikabitumen.co.id Website : www.wikabitumen.co.id

KANTOR ENTITAS ANAK	ALAMAT
PT WIKA SERANG PANIMBANG	
REPRESENTATIVE OFFICE JAKARTA	Tamansari Hive Office, 3rd Floor Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2, Jakarta 13340 E-mail : wikaserangpanimbang@wika.co.id Telp. (+6221) 22807100

ASSOCIATES	ALAMAT
PT WIJAYA KARYA KOMPONEN BETON (PT WIKAKOBE)	Jl. Surya Madya III, Kav. I-280 Kawasan Industri Surya Cipta Karawang 41361 Telp. (+62267) 8630416, 8630417, 8637597 Fax. (+62267) 8630349 E-mail : marketing@wikakobe.com
PT WIJAYA KARYA KRAKATAU BETON (PT WIKAKRATON)	Jl. Australia I Kav. K2/1 Kawasan KIEC Kel. Warnasari, Kec. Citangkil, Kota Cilegon, Banten Website : www.wikakraton.com
PT CITRA LAUTAN TEDUH	Jl. Hang Jebat Km.1, Batu Besar, Kota Batam 29432 Telp. (+62778) 761185, 761186 Fax. (+62778) 761184

ASSOCIATES	ALAMAT
PT KURNIA REALTY JAYA	Tamansari Hive Apartment, 2nd Floor Jl. D. I. Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta 13340 Telp. (+6221) 3513339
PT JASAMARGA SURABAYA MOJOKERTO	Surabaya: Jl. Taman Gayung Kebonsari No. 5-7 Surabaya 60231 Jakarta: Gedung MLI, 2nd Floor Jl. MT. Haryono Kav. 49, Jakarta 12770 Telp. (+6221) 7987077 Fax. (+6221) 7980464
PT JASAMARGA BALI TOL	Kawasan Ikat Plaza Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 505 Pemogan 80221, Denpasar, Bali Telp. (+62361) 725326 Fax. (+62361) 725327
PT JASAMARGA KUNCIRAN CENGKARENG	Ruko Business Park Tangerang City No. A 19 Jl. Jend. Sudirman No. 1 Cikokol Tangerang, Banten 15117 Telp. (+6221) 55782453
PT CITRA MARGA LINTAS JABAR	Jl. Taman Kopo Indah V, Ruko Pinewood No. 30, Kab. Bandung, Jawa Barat 40215 Telp. (+6222) 54116358, 54416367
PT JASAMARGA BALIKPAPAN SAMARINDA	Gedung Graha Simatupang Wing 2B Jl. T.B. Simatupang No. 38, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
PT JASAMARGA MANADO BITUNG	Jl. Raya Bina Marga, No. 42C, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung Jakarta 13840
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS	Jl. Kartini No. 22 Medan 20152 E-mail : prima@primatpk.co.id Website : www.primatpk.co.id
PT WIKA INDUSTRI ENERGI	HEAD OFFICE WIKA Tower 1, 2nd Floor Jalan D. I. Panjaitan Kav. 9 - 10 Jakarta 13340 Telp. (+6221) 8508 650 Fax. (+6221) 8514 249 FACTORY Kawasan Industri WIKA Jalan Raya Narogong Km. 26 Cileungsi - Bogor 16820 Telp. (+6221) 8686 3293 Fax. (+6221) 8686 3294
PT WIKA JABAR POWER	Jl. Pananikan, No. 7 Menteng, Jakarta Pusat Telp. (+6221) 3925678 Fax. (+6221) 3924567
PT AIR MINUM INDONESIA	Gedung Jaya, 12th Floor Jl. M.H. Thamrin No. 12 Jakarta Pusat Telp. (+6221) 745 3105

ASSOCIATES	ALAMAT
PT TRANS PACIFIC PETROCHEMICAL INDOTAMA	Patra Jasa Office Tower 15th Floor Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 32 – 34 Jakarta 12950 Telp. (+6221) 52901300 Fax. (+6221) 52901310
PT PILAR SINERGI BUMN INDONESIA	Signature Park 3rd Floor Suite 03 – 06 Jalan M.T. Haryono Kavling 22 Jakarta 12870 Telp. (+6221) 29386554 Fax. (+6221) 29386826



INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

Dengan diberlakukannya peraturan OJK No.8/POJK.04/2015 tentang situs *web* emiten atau perusahaan publik, maka pada situs resmi Perusahaan www.wika.co.id WIKA telah melengkapi *website* perusahaan memuat berbagai informasi terkini Perusahaan, diantaranya:

1. Informasi Perseroan
Menjelaskan tentang Perusahaan, Susunan Organisasi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, Budaya Perusahaan, Penghargaan dan Sertifikat.
2. Lini Bisnis Perseroan
Menggambarkan 7 lini bisnis Perseroan, yaitu Industri, Infrastruktur dan Gedung, Energi dan Industrial Plant, Realiti dan Properti, Investasi, Rekayasa Konstruksi dan Integrated Transportation System.
3. Pengelolaan Perusahaan yang Baik
Menjelaskan Komitmen GCG, Struktur GCG, Pedoman GCG, Peta GCG, Manajemen Risiko, Tata Kelola Informasi Teknologi, Audit Eksternal dan Piagam Komite Audit dan Komite GCG.
4. Pers
Menjabarkan berita dan siaran pers, Majalah Internal (elektronik), *Press Kit* dan kegiatan pers.
5. Hubungan Investor
Menjelaskan Informasi Saham (grafik saham, informasi deviden, struktur pemegang saham), Informasi Keuangan (Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, Analisa Kinerja Keuangan), Presentasi Perseroan, Pengumuman IDX dan Layanan Investor.
6. Kinerja Berkelanjutan (CSR)
Mejabarkan Berita kegiatan CSR, Laporan CSR yang meliputi People, Planet dan Profit.
7. Karir
Menjelaskan Ikhtisar Human Capital, Penerimaan Pegawai, Manajemen Talenta.
8. Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Menjelaskan Ikhtisar Informasi Publik dan Formulir Permohonan Informasi Publik.

PEMENUHAN INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

NO	KRITERIA ARA	KETERSEDIAAN DI WEBSITE
1	Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu	√
2	Isi Kode Etik	√
3	Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	√
4	Laporan keuangan tahunan terpisah 5 tahun terakhir	√
5	Profil Dewan Komisaris dan Direksi	√
6	Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	√

DEMOGRAFI KARYAWAN

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

LEVEL ORGANISASI	2018			2017		
	PRIA	WANITA	TOTAL	PRIA	WANITA	TOTAL
ENTITAS INDUK						
Direksi	7	0	7	6	0	6
General Manager	15	2	17	16	2	18
Manajer Divisi	22	0	22	24	0	24
Manajer Biro	70	10	80	67	8	75
Manajer Bidang/Ahli Madya 1/Manajer Wilayah	98	4	102	52	3	55
Manajer Proyek	125	1	126	119	2	121
Manajer Konstruksi/Ahli Madya 2/Manajer Bidang Wilayah	76	9	85	93	9	102
Kepala Seksi/Pelaksana Utama/Ahli Muda/Manajer Lapangan	656	53	709	617	44	661
Staf/Pelaksana	810	90	900	782	112	894
Subtotal	1.879	169	2.048	1.776	180	1.956
ENTITAS ANAK						
Subtotal	513	34	547	468	22	490
Jumlah	2.595			2.446		

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	2018			2017		
	PRIA	WANITA	TOTAL	PRIA	WANITA	TOTAL
Strata 2/Strata 3	210	27	237	197	28	225
Strata 1	1.833	151	1.984	1.700	128	1.828
Diploma	214	23	237	358	24	382
Non Akademik	135	2	137	9	2	11
Jumlah	2.595			2.446		

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

STATUS KEPEGAWAIAN	2018			2017		
	PRIA	WANITA	TOTAL	PRIA	WANITA	TOTAL
Organik	1.947	166	2.113	1.809	149	1.958
Terampil	445	37	482	452	36	488
Jumlah	2.595			2.446		

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN RENTANG USIA

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Rentang Usia

RENTANG USIA	2018			2017		
	PRIA	WANITA	TOTAL	PRIA	WANITA	TOTAL
51-60	295	13	308	253	12	265
41-50	556	31	587	605	37	642
31-40	668	72	740	663	66	729
21-30	873	87	960	740	70	810
Jumlah	2.595			2.446		

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN PENEMPATAN KERJA

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Penempatan Kerja

PENEMPATAN KERJA	2018			2017		
	PRIA	WANITA	TOTAL	PRIA	WANITA	TOTAL
Kantor Pusat	907	148	1.055	99	49	148
Kantor Divisi/Proyek	1.404	53	1.457	2.098	133	2.231
Perwakilan Algeria	30	1	31	11	1	12
Perwakilan Malaysia	8	0	8	1	0	1
Perwakilan Myanmar	1	0	1	1	0	1
Perwakilan Timor Leste	42	1	43	51	2	53
Jumlah	2.595			2.446		

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN MASA KERJA

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Masa Kerja

MASA KERJA	2018			2017		
	PRIA	WANITA	TOTAL	PRIA	WANITA	TOTAL
< 1 Tahun	148	20	168	240	45	285
1 – ≤ 3 Tahun	624	73	697	415	26	441
> 3 – 5 Tahun	318	17	335	317	16	333
> 5 – 10 Tahun	494	39	533	470	39	509
> 10 – 15 Tahun	152	23	175	144	23	167
> 15 Tahun	656	31	687	675	36	711
Jumlah	2.595			2.446		

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Kebijakan

WIKA senantiasa memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan, mulai dari level Pelaksana hingga ke level Top Level Management untuk dapat meningkatkan serta mengembangkan kemampuan diri melalui program Pendidikan dan/atau pelatihan, dengan menganut beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Menyediakan jasa pengembangan kepemimpinan bercirikan kearifan Indonesia yang terpadu dengan rencana strategis *human capital*;
- Menyediakan jasa pengembangan keahlian fungsional yang memenuhi persyaratan pelanggan dan standar internasional; dan
- Menerapkan sistem manajemen pelatihan dan pengembangan yang berstandar internasional dan terintegrasi dengan sistem manajemen.

Tujuan Pengembangan Kompetensi

Tujuan pelatihan yang diselenggarakan Perseroan adalah untuk meningkatkan hard competency dan soft competency dengan tingkat jabatan yang diemban agar senantiasa adaptif dengan perkembangan saat ini.

Pengembangan Kompetensi

Kebijakan WIKA untuk memberikan kesempatan yang sama bagi karyawannya di tiap level jabatan tercermin dalam tabel berikut:

Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2018

NO	LEVEL JABATAN	JENIS PELATIHAN	PROGRAM PELATIHAN	JUMLAH
1	Direktur	Umum (Teknik dan Non Teknik)	Directorship	42
2	Senior Management (198)	Umum (Teknik dan Non Teknik)	Finance For Non Finance GM/Dir AP & MD	43
			Masa Persiapan Pensiun (MPP)	33
			Business Improvement Leader	60
			Effective Business Execution	6
			Directorship	32
			Strategic Implementation	19
			Global Leadership	5
3	Middle Management (352)	Umum (Teknik dan Non Teknik)	Contract Management Training	30
			Effective Business Execution Strategic Mindset Level MD	27
			SHE Leadership Madya	71
			Middle Management Development Program (MMDP)	46
			Aspek Legal	19
			Monitoring Satria Utama Batch 3	13
			Eksplorasi Maritim Satria Utama	15
			Training For Trainer SHE	13
			SHE Sharing	40
			Finance For Non Finance & Communication As A Leader	28
			Workshop Supply Chain Management	29
			Workshop Manajemen Risiko	21
4	Junior Management (440)	Umum (Teknik dan Non Teknik)	Satria Pratama	68
			Training of Trainers (TOT) ACE	39
			PMBOK	36
			High Performance Team	57
			Eksplorasi Alam	38
			WIKI Project Management	32
			Workshop ISO IT 20000	28
			SHE Sharing	57
			Workshop Manajemen Risiko	85

NO	LEVEL JABATAN	JENIS PELATIHAN	PROGRAM PELATIHAN	JUMLAH
5	Supervisor (600)	Umum (Teknik dan Non Teknik)	Advanced Leadership Program Kepala Seksi (ALP KASI)	274
			Intrapreneurship	25
			Communication Cross Generation	48
			Commissioning Lanjutan	21
			Pembekalan APEI	35
			Pembekalan Manajemen Proyek	27
			International Trade	31
			Hubungan Industrial	89
			Leader As Coach	50
6	Officer/Staf (1138)	PEW dan PCW: Teknik PFW: Non Teknik	Practical Construction Workshop (PCW) Rigid Pavement, Management Konstruksi Bidang Jembatan	82
			Practical Engineering Workshop (PEW) Beton, Commisioning, Drywall & Ceiling, Piping, Rigging & Lifting, dsb	138
			Practical Functional Workshop (PFW) Investasi, Hubungan Industrial, Supply Chain Management (SCM) Dasar, Problem Solving & Decision Making, SCM Kepabeanaan, SHE, K3, Pengadaan	1.106
			Soft Competency WIKAPRATAMA Problem Solving Decision Making, Communication Cross Generation, Presentasi Memukau, Emotional Intelligence, MPP	162

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Sepanjang tahun 2018, WIKA telah merealisasikan biaya pendidikan dan pelatihan bagi karyawan sebesar Rp13,92 miliar, angka tersebut meningkat 17% dibandingkan realisasi biaya pendidikan dan pelatihan tahun 2017.

URAIAN	2018	2017	PENINGKATAN (RP)	PENINGKATAN (%)
Pendidikan dan Pelatihan	13.922.401.488	11.856.426.662	2.065.974.826	17



PLTU Ketapang

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2018, anggota Dewan Komisaris WIKA telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	TEMA DAN/ATAU MATERI PELATIHAN	TANGGAL PELATIHAN	LOKASI PELATIHAN
Imam Santoso	Komisaris Utama	Sosialisasi Integrated Talent Management System	02 Agustus 2018	Kementerian BUMN

NAMA	JABATAN	TEMA DAN/ATAU MATERI PELATIHAN	TANGGAL PELATIHAN	LOKASI PELATIHAN
Eddy Kristanto	Komisaris	Seminar Komisaris Profesional ke-4	08 - 09 Mei 2018	Hotel Mulia Senayan Jakarta
		Directorship : "Business Judgement Rule in Practices for Commissioner and Director WIKA Group"	29 Juni 2018	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
		Leaders Talk "Winning Strategy" Leading Strategic Growth & Change	11 - 12 Oktober 2018	Hotel Fairmont Jakarta
		Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices "Corporate Culture & Leadership Journey"	22 - 23 Oktober 2018	Hotel Fairmont Jakarta
		Workshop Hukum online 2018 "Membedah Aspek Hukum Praktik Bisnis Anti Suap sebagai Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Tata Aturan di Indonesia"	04 Desember 2018	Fraser Place Setiabudi Jakarta

*) Berdasarkan Keputusan RUPSLB pada tanggal 25 Maret 2019 yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan

NAMA	JABATAN	TEMA DAN/ATAU MATERI PELATIHAN	TANGGAL PELATIHAN	LOKASI PELATIHAN
Freddy R. Saragih	Komisaris	Directorship : "Business Judgement Rule in Practices for Commissioner and Director WIKA Group"	29 Juni 2018	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

NAMA	JABATAN	TEMA DAN/ATAU MATERI PELATIHAN	TANGGAL PELATIHAN	LOKASI PELATIHAN
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen	Directorship : "Business Judgement Rule in Practices for Commissioner and Director WIKA Group"	29 Juni 2018	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
		Leaders Talk "Winning Strategy" Leading Strategic Growth & Change	11 - 12 Oktober 2018	Hotel Fairmont Jakarta
		Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices "Corporate Culture & Leadership Journey"	22 - 23 Oktober 2018	Hotel Fairmont Jakarta

NAMA	JABATAN	TEMA DAN/ATAU MATERI PELATIHAN	TANGGAL PELATIHAN	LOKASI PELATIHAN
Achmad Hidayat	Komisaris Independen	Directorship : "Business Judgement Rule in Practices for Commissioner and Director WIKA Group"	29 Juni 2018	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
		Sosialisasi Integrated Talent Management System	02 Agustus 2018	Kementerian BUMN
		Leaders Talk "Winning Strategy" Leading Strategic Growth & Change	11 - 12 Oktober 2018	Hotel Fairmont Jakarta
		Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices "Corporate Culture & Leadership Journey"	22 - 23 Oktober 2018	Hotel Fairmont Jakarta
		"Comparison of Corporate Governance Methodology"	01 November 2018	Le Meridien Hotel Jakarta

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2018, anggota Direksi WIKA telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi

NAMA	JABATAN	TEMA DAN/ATAU MATERI PELATIHAN	PENYELENGGARA	TANGGAL PELATIHAN	LOKASI PELATIHAN
Tumiyana	Direktur Utama	Lokakarya dan Penetapan Business Improvement Leader/ 2018	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	1 September 2018	Wikasatrian

NAMA	JABATAN	TEMA DAN/ATAU MATERI PELATIHAN	PENYELENGGARA	TANGGAL PELATIHAN	LOKASI PELATIHAN
Agung Budi Waskito	Direktur Operasi I	Seminar Transportation Review	Kementerian PUPR	5 September 2018	Hotel Borobudur
		Lokarya & Penetapan BIL (Business Improvement Leader)	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	9 Januari 2018	Wikasatrian

NAMA	JABATAN	TEMA DAN/ATAU MATERI PELATIHAN	PENYELENGGARA	TANGGAL PELATIHAN	LOKASI PELATIHAN
Bambang Pramujio	Direktur Operasi II	Executive Briefing "Business Transformation Change of Minds"	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	11 Oktober 2018	Ruang Serbaguna Lt. 17 WITO 2
		Lokakarya & Penetapan Business Improvement Leader	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	1 September 2018	Wikasatriama

NAMA	JABATAN	TEMA DAN/ATAU MATERI PELATIHAN	PENYELENGGARA	TANGGAL PELATIHAN	LOKASI PELATIHAN
Bambang Pramujo	Direktur Operasi II	Sosialisasi Tata Cara Pengisian e Filing LHKPN	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. & KPK	21 Agustus 2018	Ruang Serbaguna It 17, WITO 2
		Pelatihan K 3 Konstruksi,	Kementerian PUPR	5 - 6 Juni 2018	Hotel GranDhika - Jakarta
		Narasumber Pelatihan SHE Leadership Madya	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	23 Juli 2018	Wikasatrian
		Narasumber Seminar K 3 UNS	Universitas Sebelas Maret (UNS)	21 Maret 2018	Solo
		Narasumber Kuliah Umum K 3	Institut Pertanian Bogor (IPB)	24 Februari 2018	Kampus IPB Darmaga - Bogor

NAMA	JABATAN	TEMA DAN/ATAU MATERI PELATIHAN	PENYELENGGARA	TANGGAL PELATIHAN	LOKASI PELATIHAN
Destiawan Soewardjono	Direktur Operasi III	Mandiri Investment Forum	Bank Mandiri	7 Februari 2018	Hotel Fairmont
		SHE Sharing on Excellence "Lifting & Rigging"	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	14 Februari 2018	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
		ASEAN Contractor Federation	Asosiasi Kontraktor Indonesia	9 Maret 2018	Manila
		Lokarya & Penetapan BIL (Business Improvement Leader)	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	1 September 2018	Wikasatrian
		Markplus Conference 2019	Markplus	6 Desember 2018	Ritz Carlton PP

NAMA	JABATAN	TEMA DAN/ATAU MATERI PELATIHAN	PENYELENGGARA	TANGGAL PELATIHAN	LOKASI PELATIHAN
Antonius N.S. Kosasih	Direktur Keuangan	Forum Engineering 9	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	8 Mei 2018	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
		Seminar Airport of the future	PT Angkasa Pura II	11 Agustus 2018	Jakarta
		Lokakarya & Penetapan BIL (Business Improvement Leader)	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	1 September 2018	Jakarta
		Workshop CSR	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	25 September 2018	Jakarta
		Seminar New Paradigm in Infrastructure Financing	IMF World Bank	9 Oktober 2018	Bali

NAMA	JABATAN	TEMA DAN/ATAU MATERI PELATIHAN	PENYELENGGARA	TANGGAL PELATIHAN	LOKASI PELATIHAN
		State Owned Enterprises Investment Forum	IMF World Bank	11 Oktober 2018	Bali
		CEO Networking 2018 dalam rangka Peringatan HUT Pasar Modal ke-41	OJK	3 Desember 2018	Jakarta
		Panelist "Indonesia Credit Briefing"	Fitch Ratings	22 Maret 2018	Jakarta
		Pembicara acara tahunan "Fund Manager Training & Seminar"	Panin Asset Management	13 April 2018	Yogyakarta
		Narasumber Pelatihan Pembelajar Sukses bagi mahasiswa baru UGM 2018, tema Internalisasi Nilai-Nilai Integritas & Intelektual serta mengedepankan nilai kepedulian sosial guna membangun jiwa kepemimpinan generasi masa depan	FEB UGM	8 Agustus 2018	Yogyakarta
		Talkshow dengan IDX	BEI	27 Agustus 2018	Jakarta
		Narasumber acara Global Network of Export Import Banks & Development Financial Institutions (G-NEXID) Exchange program	Indonesia Exim Bank	4 Oktober 2018	Jakarta

NAMA	JABATAN	TEMA DAN/ATAU MATERI PELATIHAN	PENYELENGGARA	TANGGAL PELATIHAN	LOKASI PELATIHAN
Novel Arsyad	Direktur Human Capital dan Pengembangan	Knowledge Sharing & Engineering Forum "Millennial Digital Business Are You Ready?"	PT Wika Gedung Tbk.	3 Mei 2018	Jakarta
		Forum Engineering	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	8 Mei 2018	Jakarta
		Lokakarya & Penetapan BIL (Business Improvement Leader)	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	1 September 2018	Jakarta
		Temu Nasional Seribu Organisasi Perempuan Indonesia	Kementerian BUMN	14 September 2018	Yogyakarta
		Seminar New Paradigm in Infrastructure Financing	IMF World Bank	9 Oktober 2018	Bali
		Narasumber Kuliah Tamu Arsitektur ITB, topik : Manajemen Lingkup Proyek (Project Scope Management)	ITB	21 Februari 2018	Bandung

NAMA	JABATAN	TEMA DAN/ATAU MATERI PELATIHAN	PENYELENGGARA	TANGGAL PELATIHAN	LOKASI PELATIHAN
		Pembicara Nasional Civil Days 2018, tema The Implementation of Renewable Technology for Acceleration of Infrastructure Development in Modern Era	UII	23 September 2018	Yogyakarta
		Narasumber dalam acara Konferensi Pers Holding BUMN Perumahan	Kementerian BUMN	15 November 2018	Jakarta
		Narasumber Diskusi Panel "Indonesian Most Trusted Companies", tema : Transformasi Model Bisnis dalam Kerangka GCG	IICG	19 Desember 2018	Jakarta

NAMA	JABATAN	TEMA DAN/ATAU MATERI PELATIHAN	PENYELENGGARA	TANGGAL PELATIHAN	LOKASI PELATIHAN
Danu Prijambodo	Direktur Quality, Safety, Health and Environment	FGD Penerapan K3 pada Pembangunan Konstruksi Perkeretaapian	Kementerian Perhubungan & KAI,	22 Mei 2018	Hotel Aston -Sentul City
		Pelatihan Sertifikasi K3 Konstruksi	Kementerian PUPR	5-6 Juni 2018	Hotel GranDhika
		Pembicara Materi SHE Leadership pada Pelatihan SHE Leadership Madya	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	24 Juni 2018	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
		Directorship "Business Judgement Rule in Practice for Commissioner & Director WKA Group	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	29 Juni 2018	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
		Narasumber Pelatihan SHE Leadership Madya	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	23 Juli 2018	Wikasatrian
		Sosialisasi Tata Cara Pengisian e-Filing LHKPN	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. & KPK	21 Agustus 2018	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
		Lokakarya & Penetapan Business Improvement Leader	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	1 September 2018	Wikasatrian
		The 7th International Indonesia Gas Infrastructure Conference & Exhibition	INDOPIPE,	25 September 2018	Hotel Pullman Jakarta
		Executive Briefing "Business Transformation Change of Mind"	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	11 Oktober 2018	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
		Seminar K 3 Konstruksi	Kementerian PUPR	1 November 2018	Jakarta Int'l Expo Kamayoran Jakarta

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2018, anggota Komite Audit WIKA telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Audit

NO	NAMA	TANGGAL	PENYELENGGARA	TEMPAT	PELATIHAN/WORKSHOP/SEMINAR
1	Waluyati Supriyanti	22 Februari 2018	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)	Sasono Mulyo 3, Hotel Le Meridien, Jakarta	Diskusi Panel IKAI : "Empowering Audit Committee : As the Ultimate Guardian of Investors Interests and Corporate Accountability"
2	Suryo Hapsoro Tri Utomo	29 Juni 2018	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Directorship : "Business Judgement Rule in Practices for Commissioner and Director WIKA Group"
3	Nanda Ayu Wijayanti				
4	Suryo Hapsoro Tri Utomo	11 - 12 Oktober 2018	Pertamina Training & Consulting	Hotel Fairmont Jakarta	Leaders Talk "Winning Strategy" Leading Strategic Growth & Change
5	Suryo Hapsoro Tri Utomo	22 - 23 Oktober 2018	Pertamina Training & Consulting	Hotel Fairmont Jakarta	Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices "Corporate Culture & Leadership Journey"
6	Nirsihing Asmoro	6 - 8 November 2018	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)	Ruang Sadewa Lt.2, Hotel Bidakara, Jakarta	Workshop Certification in Audit Committee Practices (CACP) Batch IX
7	Nanda Ayu Wijayanti				

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GCG

Sepanjang tahun 2018, anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG WIKA telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

NO	NAMA	TANGGAL	PENYELENGGARA	TEMPAT	PELATIHAN/WORKSHOP/SEMINAR
1	Fahrul Ismaeni	5 April 2018	IICD	Main Hall Bursa Efek Indonesia	2nd Indonesian Conference on Governance and Sustainability, Towards Governance and Sustainable Growth
2	Freddy R. Saragih	29 Juni 2018	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Directorship : "Business Judgement Rule in Practices for Commissioner and Director WIKA Group"

NO	NAMA	TANGGAL	PENYELENGGARA	TEMPAT	PELATIHAN/WORKSHOP/SEMINAR
3	Achmad Hidayat	11 - 12 Oktober 2018	Pertamina Training & Consulting	Hotel Fairmont Jakarta	Leaders Talk "Winning Strategy" Leading Strategic Growth & Change
	Eddy Kristanto				
4	Achmad Hidayat	22 - 23 Oktober 2018	Pertamina Training & Consulting	Hotel Fairmont Jakarta	Strategic Discussion Forum & Sharing Best Practices "Corporate Culture & Leadership Journey"
5	Achmad Hidayat	1 November 2018	Indonesian Institute for Corporate Directorship	Le Meridien Hotel Jakarta	"Comparison of Corporate Governance Methodology"
	Fahrul Ismaeni	06 - 08 November 2018	Indonesian Institute of Audit Committee	Hotel Bidakara	Certification in Audit Committee Practices (CACP) Batch IX
6	Eddy Kristanto	04 Desember 2018	Hukumonline.com	FrasePlaceSetiabudi Jakarta	Workshop Hukumonline 2018 "Membedah Aspek Hukum Praktik Bisnis Anti Suap sebagai Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Tata Aturan di Indonesia"
	Fahrul Ismaeni				

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN KOMITE LAINNYA

Perseroan tidak memiliki komite lainnya, sehingga tidak terdapat informasi tentang pengembangan kompetensi komite lainnya.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Perusahaan WIKA telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pendidikan dan/atau Pelatihan Sekretaris Perusahaan

PELATIHAN	TANGGAL	PENYELENGGARA
GCG Implementation Between Holding & Subsidiary	2018	Indonesian Institute for Corporate Directorship
Developing Strategic Mindset Program Batch 3	2018	PPM Manajemen
Leadership Development Program	2018	National University Singapore
The 2nd Batch of Subsidiary Governance : GCG Implementation Between Holding & Subsidiary	2018	Indonesian Institute for Corporate Directorship
The 15th Corporate Governance Leadership Program	2018	Indonesian Institute for Corporate Directorship
1st Batch of Comparison of Corporate Governance Methodology	2018	Indonesian Institute for Corporate Directorship
Subsidiary Governance Training Program	2018	Indonesian Institute for Corporate Directorship

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN UNIT INTERNAL AUDIT

Sepanjang tahun 2018, Unit Internal Audit WIKA telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pendidikan dan/atau Pelatihan Unit Internal Audit

NAMA	PELATIHAN/WORKSHOP/SEMINAR	TANGGAL	PENYELENGGARA
Sendianto, CA	Seminar Nasional Internal Audit "The Auditor of the Future: Trusted & Influencing"	17-19 April 2018	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
Sonny Primawanto	Seminar Nasional Internal Audit "The Auditor of the Future: Trusted & Influencing"	17-19 April 2018	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
D Heru Aryanto	Seminar Nasional Internal Audit "The Auditor of the Future: Trusted & Influencing"	17-19 April 2018	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
Achwan	Seminar Nasional Internal Audit "The Auditor of the Future: Trusted & Influencing"	17-19 April 2018	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
Andi Sugiarto	Seminar Nasional Internal Audit "The Auditor of the Future: Trusted & Influencing"	17-19 April 2018	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
Sendianto, CA	Peran Auditor Internal dalam Peningkatan Governance, Risk and Control (GRC) di Era Disruptif	08-10 Agustus 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
Sonny Primawanto	Peran Auditor Internal dalam Peningkatan Governance, Risk and Control (GRC) di Era Disruptif	08-10 Agustus 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
D. Heru Aryanto	Peran Auditor Internal dalam Peningkatan Governance, Risk and Control (GRC) di Era Disruptif	08-Agustus 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
Sendianto, CA	Nuturing Agile Internal Auditors In Disruptive Times	27-29 Agustus 2018	The Institute of Internal Auditors Indonesia
Sendianto, CA	Pelatihan PSAK 71, 72 dan 73	04 Oktober 2018	Dept. HC
Andi Sugiarto	Pelatihan PSAK 71, 72 dan 73	04 Oktober 2018	Dept. HC
Sendianto, CA	Memahami Risiko Hukum dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	08 Oktober 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
Sonny Primawanto	Memahami Risiko Hukum dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	08 Oktober 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
Achwan	Memahami Risiko Hukum dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	08 Oktober 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
Andi Sugiarto	Memahami Risiko Hukum dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	08 Oktober 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
John Ferry	Memahami Risiko Hukum dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	08 Oktober 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
Desih Yanti	Memahami Risiko Hukum dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	08 Oktober 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
Titik Sri Sugiyanti	Memahami Risiko Hukum dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	08 Oktober 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
Aditama Acthur	Memahami Risiko Hukum dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	08 Oktober 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
Sendianto, CA	Konfrensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VI	12-13 Desember 2018	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko

SUMBER DAYA MANUSIA



Sejalan dengan upaya untuk mencapai target bisnis yang sudah ditetapkan maka perlu untuk memastikan adanya pemenuhan SDM yang dibutuhkan secara efektif. Pemenuhan ini terutama untuk mengisi posisi-posisi kritikal baik di Kantor Pusat dan Entitas Anak Perusahaan dengan tetap mengacu kepada arahan yang diberikan dan memperhatikan komposisi pegawai secara fungsional sesuai kebutuhan organisasi.

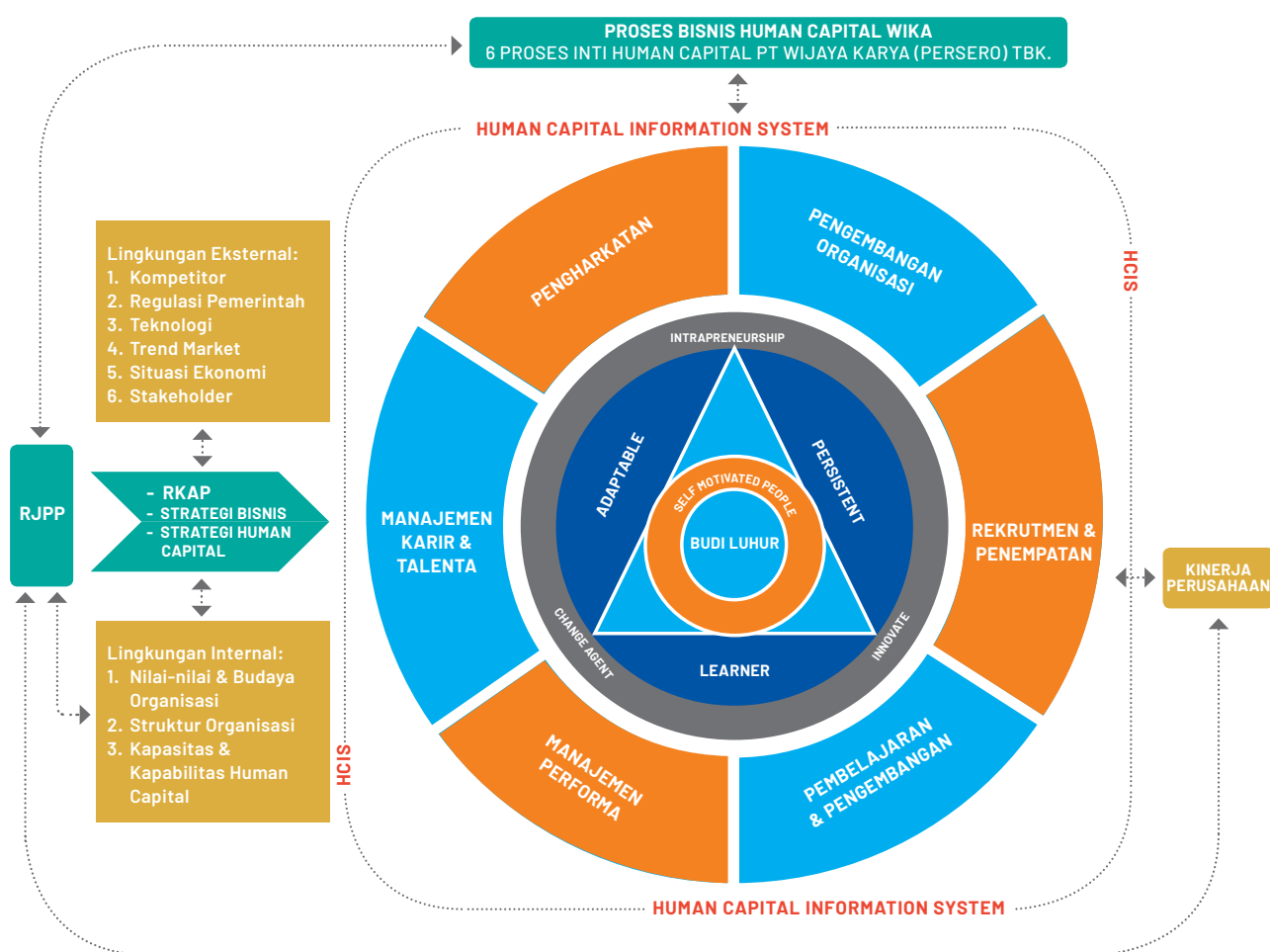
Pada tahun 2018, dilakukan restrukturisasi terhadap organisasi WIKA sebagai respon atas kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Untuk memenuhi posisi yang dibutuhkan, pemenuhan kebutuhan human capital dilakukan melalui rekrutmen pegawai baru, baik fresh graduate maupun tenaga pengalaman. Rekrutmen dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi (University Career Center) di seluruh Indonesia, iklan, job fair, lamaran umum, dan kerjasama dengan lembaga rekrutmen. Selain itu, rekrutmen juga dilakukan melalui program beasiswa kepada para

mahasiswa yang berprestasi, yang setelah lulus akan diberikan kesempatan bekerja di WIKA.

Proses seleksi dilakukan dengan beberapa tahapan yang dimaksudkan untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan budaya WIKA. Karakter dasar manusia WIKA yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ada di WIKA adalah "Self Motivated People" yang dicirikan dengan sifat-sifat Persistent, Adaptable dan Learner. Dalam proses seleksi ini melibatkan lembaga independen dan tim rekrutmen yang terdiri dari wakil seluruh unit kerja, yang dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan menjunjung prinsip good corporate governance.

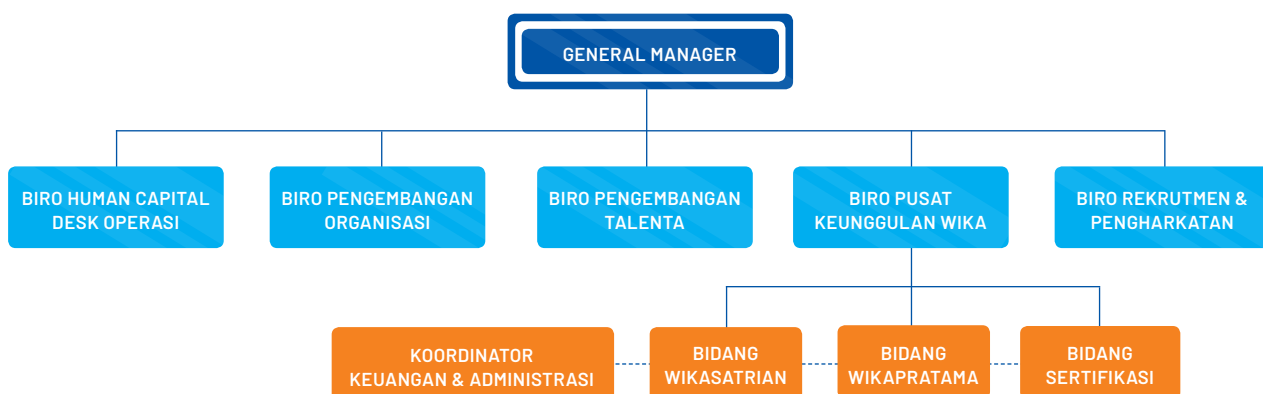
Setelah melalui proses seleksi, para calon pegawai diikutsertakan dalam Program Pelatihan calon Pegawai (PPCP) yang bertujuan untuk menanamkan karakter manusia WIKA dan nilai-nilai WIKA yaitu Agility, Caring, dan Excellence (ACE). Selain itu juga

memberikan pembekalan dan pengenalan dasar-dasar sistem manajemen WIKA agar dapat membantu para calon pegawai dalam menyesuaikan diri mengikuti irama kerja dan budaya perusahaan. Dalam program ini diberikan materi di kelas, Outbound dan On The Job Training yang didampingi oleh Mentor serta melakukan presentasi. Pada akhir PPCP para calon pegawai harus memenuhi nilai passing grade yang telah ditetapkan untuk bisa Lulus dan diangkat sebagai Pegawai tetap.



BIRO PENGEMBANGAN ORGANISASI	BIRO PUSAT KEUNGGULAN WIKA (PUKA)	BIRO MANAJEMEN TALENTA	BIRO REKRUTMEN DAN PENGHARKATAN
- RKAP & RJP - Scorecard - Culture & Change - Organization - Job Analysis - Workforce Planning - Sitem Grading - Sistem Coaching - Employee Engagement Program - Strategi Remunerasi - Strategi Performance Management System (PMS)	- Training - Sertifikasi - Uji Keahlian - Pusat Pembelajaran - Wikapratama - Pusat Kepemimpinan - Wikasatrian	- TNA & Development Plan - Development - Career Management - Succession Planning - Assessment Center - Talent Development - Assignment for talent - Coaching and Mentoring for Talent - Diklan - HCIS	- Penerapan Grading - Pelaksanaan PMS - Total Rewards - Employee Engagement (retain) - Wellbeing Program - PKB, PHK, bipartit - Pensiun - Talent Sourcing - Recruitment and Transfer (attract)

Organisasi Departemen Human Capital tahun 2018 tertuang dalam Surat Keterangan Struktur Organisasi nomor SK.01.01/A.DIR/9456/2018 tanggal 31 Mei 2018 Adapun Struktur Organisasi yang dimaksud adalah sebagai berikut.



KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REKRUTMEN

Dalam rangka menyiapkan Human Capital yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan organisasi dalam mencapai visi dan misi, WKA melakukan kajian terkait Rencana Kebutuhan Human Capital dengan mempertimbangkan arah pengembangan bisnis jangka panjang, produktivitas, kapasitas dan kapabilitas. Dari hasil kajian ini didapatkan Perencanaan Kebutuhan Human Capital setiap tahun sampai empat tahun mendatang. Kajian ini merupakan Manpower Planning yang menjadi acuan dalam melakukan rekrutmen pegawai baru dan dilakukan review setiap tahun untuk pemutakhiran data. Proses perencanaan kebutuhan human capital ini telah diatur dalam Prosedur Nomor WKA-HCE-PM-01.01.

Sejak tahun 2012, Perseroan melakukan program percepatan rekrutmen, yang dimaksudkan agar dapat lebih cepat mempersiapkan kader di masa mendatang mengingat pengembangan human capital membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan pertumbuhan bisnis yang ada saat ini.

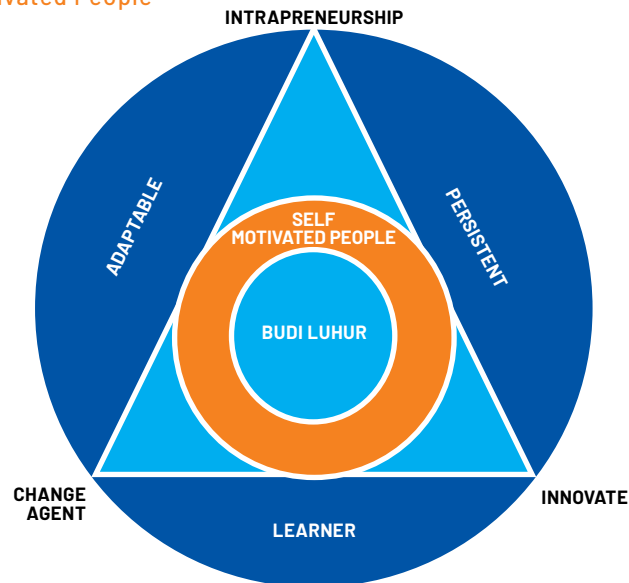
Pemenuhan kebutuhan human capital dilakukan melalui rekrut pegawai baru, baik fresh graduate maupun tenaga pengalaman. Rekrutmen dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi (University Career Center) di seluruh Indonesia,

iklan, job fair, lamaran umum, dan kerja sama dengan lembaga rekrutmen. Kebijakan program rekrut WKA adalah membuka kesempatan luas dengan melakukan rekrutmen dari seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini, WKA percaya terhadap kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia dan mengembangkan putra daerah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan maupun gender. Selain itu, rekrutmen juga dilakukan melalui program beasiswa kepada para mahasiswa yang berprestasi, yang setelah lulus akan diberikan kesempatan bekerja di WKA.

Proses Seleksi

Proses seleksi pegawai diatur dalam Prosedur WKA-HCEPM-02.01. Proses seleksi dilakukan dengan beberapa tahapan yang dimaksudkan untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan budaya WKA. Karakter dasar manusia WKA yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang ada di WKA adalah "Self Motivated People" yang dicirikan dengan sifat-sifat Persistent, Adaptable dan Learner. WKA tidak hanya menekankan pengetahuan dan ketrampilan atau aspek kecerdasan (IQ), namun juga kematangan emosi dan sosial. Dalam proses seleksi ini melibatkan lembaga independen dan tim rekrutmen yang terdiri dari wakil seluruh unit kerja, yang dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan menjunjung prinsip good corporate governance.

Self Motivated People



Hasil rekrut Calon Pegawai yang dilaksanakan selama tahun 2018 sebanyak 331 orang.

Tabel Hasil Rekrutmen Pegawai WIKA tahun 2015-2018

JENIS REKRUTMEN	2018	2017	2016	2015
Lulusan Baru	216	260	217	110
Tenaga Berpengalaman	115	112	109	47
Jumlah	331	372	326	157

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Program Pelatihan Calon Pegawai

Setelah melalui proses seleksi, para calon pegawai diikutsertakan dalam Program Pelatihan calon Pegawai (PPCP) sesuai Prosedur WIKA-HCE-PM-03.01. Program ini bertujuan untuk menanamkan karakter manusia WIKA dan nilai-nilai WIKA yaitu Agility, Caring, dan Excellence (ACE). Selain itu juga memberikan pembekalan dan pengenalan dasar-dasar sistem manajemen WIKA agar dapat membantu para calon pegawai dalam menyesuaikan diri mengikuti irama kerja dan budaya perusahaan. Dalam program ini diberikan materi di kelas, Outbound dan On The Job Training yang didampingi oleh Mentor serta melakukan presentasi. Pada akhir PPCP para calon pegawai harus memenuhi nilai passing grade yang telah ditetapkan untuk bisa Lulus dan diangkat sebagai Pegawai

tetap. Nilai skor hasil penilaian selama PPCP bersifat transparan dan disampaikan secara terbuka kepada Calon Pegawai.

Penempatan pegawai mempertimbangkan kebutuhan dari unit kerja dan latar belakang pegawai yaitu kompetensi dan hasil pemeriksaan psikologis terkait karakter setiap pegawai dengan tuntutan dan jenis pekerjaan yang ada. Rotasi penempatan dilakukan secara periodik disesuaikan dengan pola pengembangan karir yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kinerja dan kompetensi setiap pegawai.

Realisasi Program Pelatihan dan Pengembangan

Informasi Realisasi Program Pelatihan dan Pengembangan telah disajikan di bagian Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan

Informasi Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan telah disajikan di bagian Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KARIR

Pengembangan Human Capital

Dalam mempersiapkan program pengembangan pegawai, Perseroan memperhatikan kebutuhan pengembangan yang dirasakan pegawai melalui hasil coaching dalam rangka penilaian karya dan evaluasi kompetensi yang memunculkan kebutuhan pelatihan sesuai kondisi operasional di lapangan.

Di samping itu, Perseroan menetapkan komposisi program pengembangan *hard competency* dan *soft competency* sesuai dengan tingkat jabatan yang diemban. Untuk tingkat staf, porsi *hard competency* lebih besar dibanding *soft competency* dan *hard competency*.

Semakin tinggi jabatan struktural maupun keahlian maka semakin kecil komposisi *hard competency* daripada *soft competency* dan *managerial competency*. Silabus pengembangan disesuaikan dengan Visi, Misi, Rencana Jangka Panjang, percepatan pengembangan Human Capital WKA, dinamika dunia usaha dan tuntutan kompetensi dari tingkat jabatan dan keahlian yang bersangkutan, baik dari sisi *soft competency* dan *hard competency*.

JENJANG	SASARAN PENGEMBANGAN	PESERTA
WKA Senior Management Development Program	Fostering Transformation Melakukan adaptasi terhadap perubahan eksternal dengan pendekatan yang terintegrasi	Direktur Anak Perusahaan General Manager Ahli Utama 1
WKA Middle Management Development Program	Integrating Value Chain Memiliki ketrampilan untuk mengembangkan kemanfaatan lebih satu proses maupun output.	Manajer Biro Korporasi Manajer Divisi Manajer Proyek Mega Manajer Proyek Besar Ahli Utama 2
WKA Junior Management Development Program	Aligning Execution Memahami sasaran & rencana strategi, serta menjabarkannya ke dalam sasaran & rencana operasional.	Manajer Biro Operasi Manajer Bidang Operasi Manajer Proyek Menengah Manajer Proyek Kecil Manajer Konstruksi Manajer Bidang Proyek Ahli Madya 1
WKA Emerging Leadership Development Program	Optimizing Business Resources Mengenali sumber-sumber daya yang terkait dengan proses maupun kelompok	Koordinator Kepala Laboratorium Kepala Seksi/Pelaksana Utama/ Lead Ahli Madya 2 Ahli Muda
WKA Officer Development Program	Exellence Performance Memiliki pengetahuan umum serta pemahaman terhadap teknik & konsep dasar	Staff Departemen Staff Proyek

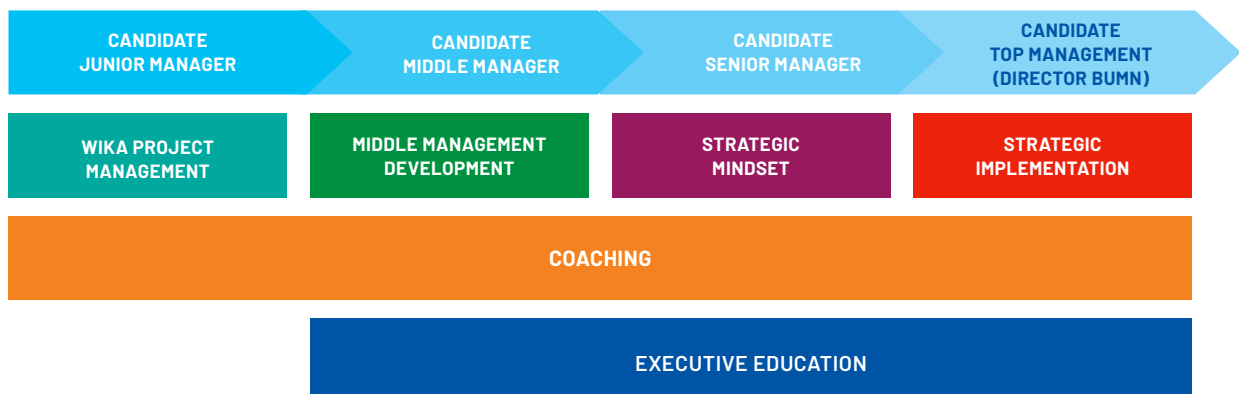


WIKA Talent Development Process

Sejak tahun 2015, WIKA memiliki biro Pengembangan Talenta yang secara khusus untuk mengelola Pegawai yang memiliki Performance dan Kompetensi yang unggul. Dalam Pengelolaan Talenta Pegawai, WIKA memiliki alur pengembangan talenta yaitu:

1. Talent Identification & Selection: WIKA memiliki proses identifikasi terhadap seluruh performance dan kompetensi pegawai WIKA. (Hal ini dapat terlihat di Talent Box WIKA);
2. Talent Development: WIKA memiliki proses pengembangan yang sistematis dan kontinyu terhadap pegawai yang diikutsertakan dalam suatu program Talenta.

WIKA memiliki 5 kategorisasi/cluster jabatan yaitu Senior Manager, Middle Manager, Junior Manager, Supervisor, dan Staff. WIKA mempersiapkan metode "dik-duk" dengan arti pegawai dididik terlebih dahulu sebelum menduduki jabatan tersebut. Metode ini diharapkan pegawai lebih siap dalam menjalani tugas dalam menduduki suatu pergerakan rotasi dan promosi. Pada tingkat Middle Manager, WIKA tidak hanya mempersiapkan program Dalam Negeri, namun juga Program Luar Negeri sebagai benchmark pengetahuan dan keterampilan.



ENGAGEMENT KARYAWAN

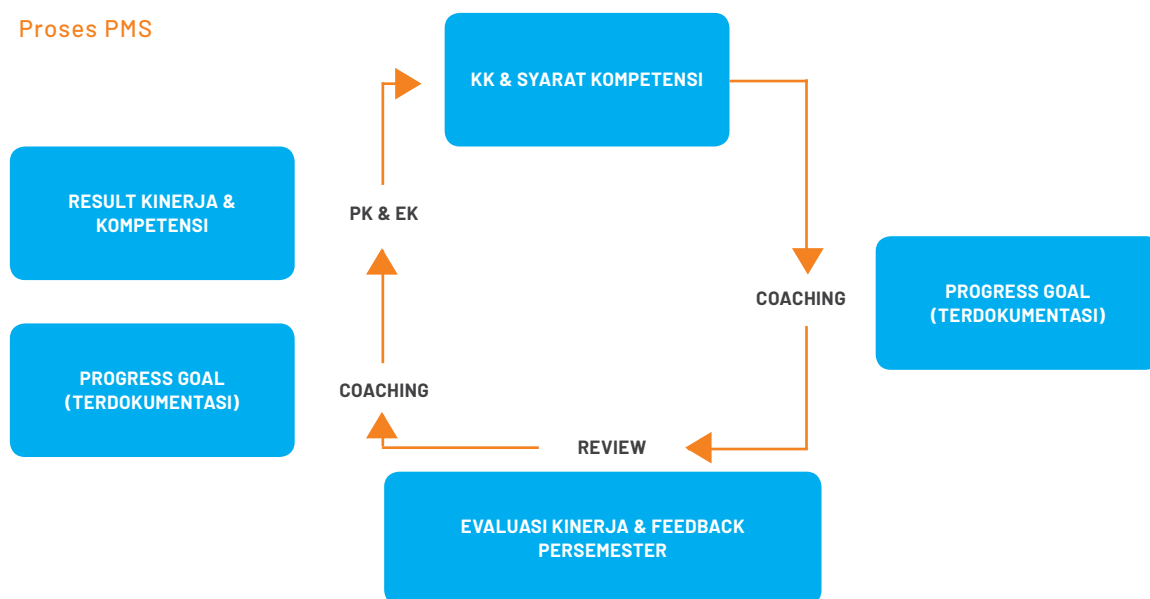
WIKA menerapkan prinsip “More for More” dalam menjalankan kebijakan remunerasi bagi pegawai. Setiap pegawai secara cascade menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan. KPI akan ditinjau dan dirumuskan setiap tahun sesuai dengan tahapan pencapaian Rencana Jangka Panjang menuju tercapainya Visi Perusahaan. Target setiap pegawai dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Karya (KK) yang akan dimonitoring pencapaiannya setiap semester. Pencapaian hasil dari target yang ditetapkan tersebut akan dinilai dalam Penilaian Karya (PK) setiap akhir tahun dan digunakan sebagai bahan peninjauan remunerasi.

Selain pencapaian hasil/kinerja, peninjauan remunerasi juga mempertimbangkan hasil Evaluasi

Kompetensi (EK) dan assessment psikologis yang dilakukan kepada setiap pegawai. Porsi bobot EK dan PK akan disesuaikan dengan kebutuhan, karena EK merepresentasikan “kebisaan” sedangkan PK merepresentasikan “hasil/ kinerja”.

Sejak tahun 2014 Perseroan telah melakukan restrukturisasi sistem penggajian, yaitu dengan menggunakan pola global grading system. Dengan sistem ini, Perseroan dapat mengukur tingkat pendapatan pegawai dengan mempertimbangkan aspek keadilan internal dan eksternal sesuai dengan gradenya. Mekanisme penilaian EK dan PK dilakukan dengan multi rater dan hasilnya disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan sebagai feedback dan menetapkan kesepakatan untuk melakukan perbaikan. Mekanisme coaching dapat digambarkan sebagai berikut.

Proses PMS



Penghargaan Satya Karya

Perseroan memberikan apresiasi terhadap pegawai yang telah mengabdikan dirinya selama kurun waktu tertentu, melalui penghargaan Satya Karya, yang diberikan setiap tahun pada saat perayaan ulang tahun perseroan. Jumlah Satya Karya yang diberikan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut.

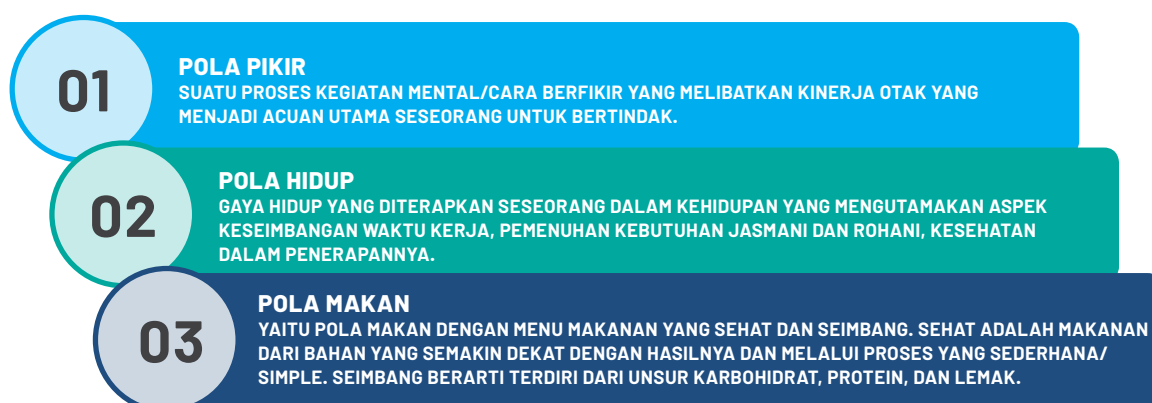
MASA KERJA	JUMLAH PENERIMA
15	16
20	45

MASA KERJA	JUMLAH PENERIMA
25	67
30	23

Kesejahteraan

Dalam upaya mendukung peningkatan kinerja karyawan untuk menjadi lebih baik, termasuk dalam mempertahankan loyalitas karyawan, salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah pengharkatan yang komprehensif/holistik. WIKA tidak hanya fokus pada besaran remunerasi, benefit, tetapi juga melakukan intervensi kesehatan agar karyawan memiliki mindset gaya hidup sehat, yaitu sehat dalam pola makan, pola pikir dan pola hidup.

WIKA menekankan pentingnya pengharkatan kepada setiap pegawai, tidak hanya sebatas menghargai secara materi. Salah satu bentuk pengharkatan ini diwujudkan dalam Program Wellbeing, yaitu pola hidup seimbang yang dijelaskan dalam gambar berikut:



Aspek pola hidup yang sehat meliputi dimensi fisik, emosi dan pola pikir.

Aspek Pola Hidup Sehat



Pegawai yang direkrut dan telah dibina melalui pengembangan, dipertahankan oleh WIKA dalam proses pengharkatan. Proses pengharkatan bukan hanya memberikan system remunerasi yang sesuai namun juga aspek sosial dan humanis dari pegawai. Salah satu yang dilakukan oleh WIKA adalah menjalankan program wellbeing melalui pola hidup sehat. Aspek pola hidup yang sehat meliputi dimensi fisik, emosi dan pola pikir. WIKA memberikan pengharkatan kepada setiap pegawai yang meliputi ketiga dimensi tersebut. Perusahaan memberikan kebebasan dan memfasilitasi pada para pegawai membentuk kelompok-kelompok sesuai hobi (olah raga dan seni), kegiatan-kegiatan spiritual, fasilitas Ruang dan Peralatan Olah Raga, Ruang Laktasi, serta kegiatan gathering untuk menyeimbangkan antara kegiatan kerja dan istirahat. Perseroan menjamin kesehatan pegawai melalui asuransi rawat jalan dan rawat inap. Selain itu pegawai diikuti dalam pemeriksaan general check up setiap 2 tahun sekali.

Di samping itu, WIKA menyediakan makan siang dan makan malam saat lembur sebagai bagian dari proses pengharkatan kepada pegawai. Pola makan yang diterapkan di perusahaan didampingi oleh dokter profesional. Makanan yang disediakan mengikuti pola makan sehat, yang terdiri dari karbohidrat, protein dan vitamin untuk memastikan tercukupinya asupan gizi yang dibutuhkan setiap orang. Perusahaan yakin, dengan pola makan yang sehat merupakan dasar dan modal awal untuk bisa hidup sehat. WIKA melakukan

pembinaan terhadap para vendor penyedia makanan untuk mengikuti cara-cara yang lebih sehat.

Hasil dari bentuk pengharkatan yang telah dilakukan juga diukur melalui Engagement Survey. Survei dilakukan oleh lembaga independen, yaitu Aon Hewitt. Dimensi survei meliputi aspek Say, Stay dan Strive. Say, adalah sejauh mana pegawai mempersepsikan perusahaan secara positif, mampu mengatakan hal-hal yang positif terhadap perusahaan. Dimensi Stay adalah sejauh mana pegawai ingin tetap tinggal atau bergabung dalam perusahaan. Sedangkan dimensi Strive adalah mengukur kerelaan pegawai untuk berjuang demi perusahaan atau memperjuangkan kepentingan perusahaan.

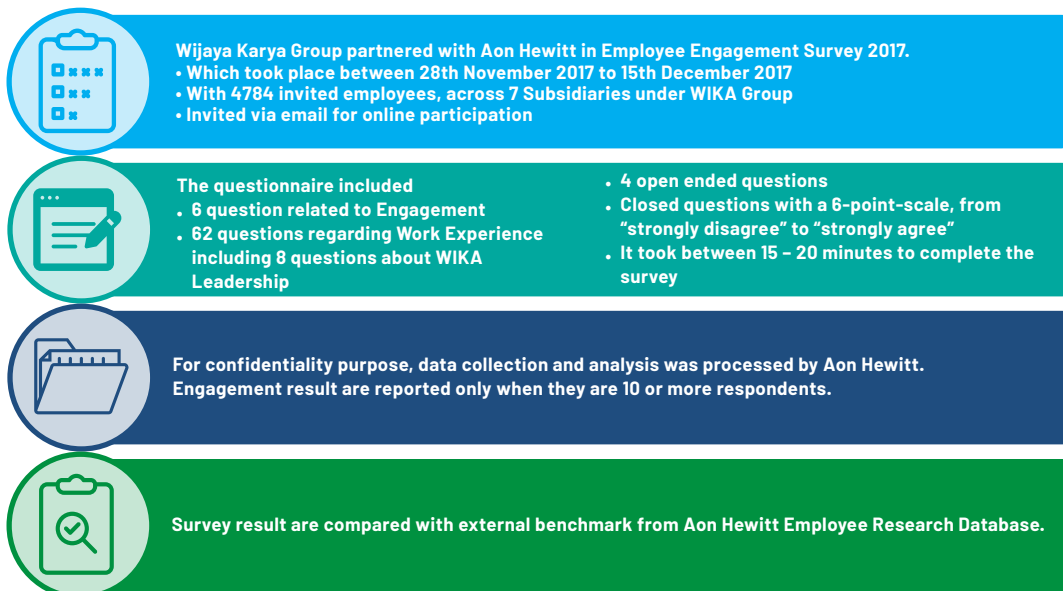
EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY (EES)

Employee Engagement Survey dilakukan WIKA secara berkala untuk mengukur tingkat engagement Pegawai. Hasil dari *Employee Engagement Survey* ini selain menggambarkan tingkat engagement Pegawai juga digunakan sebagai *feedback* terhadap program-program yang telah dilakukan perusahaan serta input untuk penyusunan program-program berikutnya. Target engagement level Pegawai WIKA ditetapkan 10% di atas rata-rata engagement level perusahaan di Indonesia. Hasil Employee Engagement Survey tahun 2016 dan 2017 WIKA dibandingkan dengan Perusahaan di Indonesia adalah sebagai berikut.

TAHUN	WIKA		
	RENCANA (RA)	REALISASI (RI)	RATA-RATA PERUSAHAAN DI INDONESIA
2017	75%	76%	65%
2016	73%	75%	63%

Employee Engagement Survey (EES) dilakukan dua tahun sekali, terakhir dilakukan di 2017 sehingga di 2018 tidak ada EES, EES selanjutnya akan dilakukan di tahun 2019

Employee Engagement Survey Background

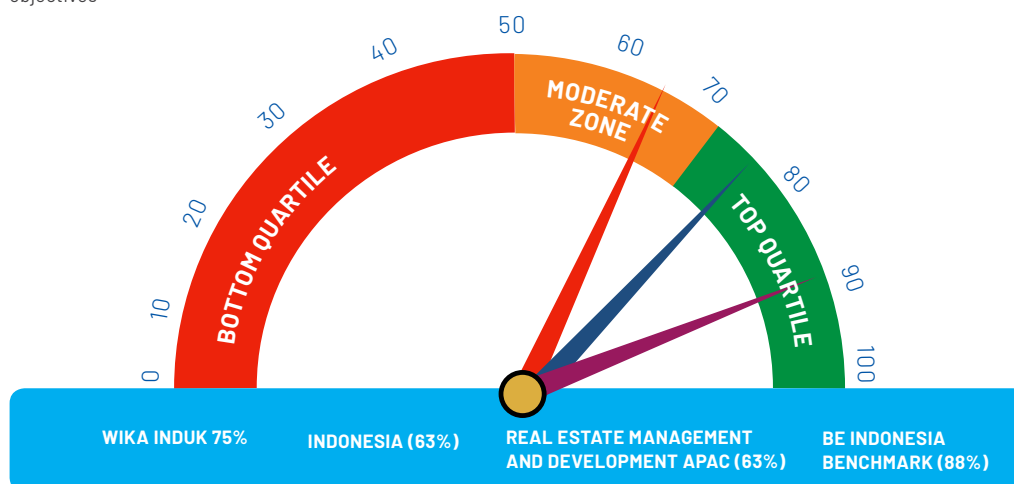


AON HEWITT | INDONESIA
PROPIETARY & CONFIDENTIAL



Engagement Score for WIKA Induk is 76% which shows increment

Aon Hewitt's research indicates that organization with Engagement Scores above 73% consistently deliver better business result. Employee Engagement levels below 51% tend to erode an organization's ability to seliver on its objectives



NOTES:

- The engagement Score shows the percentage of the respondent who are categorized as "Engaged" which has the average of 4.5 and above from the six engagement questions
- It means that 76% from the 1743 of WIKI Induk's employees for (or around 1325) who filled in the EES is classified as "Engaged"

AON HEWITT | INDONESIA
PROPIETARY & CONFIDENTIAL



KEBIJAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

WIKA berupaya memastikan terjalinnya hubungan yang saling menghormati dan mampu menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban, melalui komunikasi intensif dan keterlibatan antara WIKA dan karyawan dalam mencapai target Perusahaan. WIKA memiliki serikat karyawan untuk memastikan setiap karyawan memiliki wadah untuk menyalurkan aspirasinya. Agar terjalin komunikasi yang baik antara pihak perusahaan dan pihak karyawan, WIKA secara berkala melakukan rapat bipartit yang melibatkan pihak serikat karyawan dan perwakilan perusahaan. Untuk mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dan dinamis antara perusahaan dan pegawai serta menjamin kepastian antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka WIKA telah menyusun perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB merupakan pedoman kerja sama antara pegawai dan perusahaan dimana PKB akan membantu kedua belah pihak menyelesaikan masalah/perselisihan dalam kerja.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang merupakan hasil perundingan antara WIKA dan Serikat Karyawan telah memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. PKB yang berlaku saat ini telah didaftarkan dan mendapat pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 094/PHIJSK-PK/PKB/V/2018. Sebagai perusahaan yang tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, WIKA kebebasan kepada semua pegawai untuk bergabung dalam organisasi Serikat Karyawan. Serikat Karyawan merupakan serikat pekerja yang dibentuk untuk menjalin hubungan yang baik antara pegawai dan manajemen WIKA, sehingga tercipta hubungan industrial yang harmonis.

Saat ini terdapat dua serikat karyawan di WIKA yaitu SP KORPRI PRABU yang didirikan pada 23 Maret 1999 dan telah terdaftar di Sudin Nakertrans Kodya Jakarta Timur dengan Nomor: 90/IV/P/VII/2001 tanggal 12 Juli 2001. SEKAR WIKA yang didirikan pada 11 Maret 1999 yang telah terdaftar di Sudin Nakertrans Kodya Jakarta Timur dengan Nomor: 508/IV/P/X/2004 tanggal 15 Oktober 2004.



KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENSIUN

WIKA memperhatikan pengharkatan kepada pegawainya termasuk pada saat pegawai memasuki usia pensiun dengan memberikan fasilitas perlindungan paska bekerja berupa:

1. Dana Pensiun
Perseroan menyelenggarakan program dana pensiun melalui Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP).
 - a. Program Pensiun Manfaat Pasti dikelola oleh Dana Pensiun Wijaya Karya (DP-WIKA) yang pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-207/KM.17/1998 tanggal 9 Juni tahun 1998 dan terdaftar pada Berita Negara Republik Indonesia No. 53 Tahun 1998 dan tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 28 Juli 1998 yang mengelola Program Pensiun Manfaat Pasti berdasarkan UU No. 11 tahun 1992, dan merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun

PT Wijaya Karya yang telah didirikan sebelumnya. Peserta PPMP adalah pegawai tetap Perseroan yang diangkat sebelum 1 Januari 2007. Sesuai dengan perhitungan aktuaria per 30 Juni 2014. Iuran atas program tersebut dibebankan kepada karyawan sebesar 5% dari PhDP (Penghasilan Dasar Pensiun) dan kepada perusahaan sebesar 19,2% dari PhDP. Sedangkan iuran PSL menjadi beban Perseroan.

- b. Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Iuran Pasti (DAPEN WIKAPPIP) didirikan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-146/D.05/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Iuran Pasti yang ditetapkan oleh Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. melalui Surat Keputusan Nomor SK.01.01/A. DIR.2524/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Wijaya Karya Program Pensiun Iuran Pasti sebagaimana terdaftar pada Berita Negara Republik Indonesia Nomor 7 tanggal 23 Januari 2015 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5/DP Tahun 2015. Peserta DAPEN WIKAPPIP adalah setiap pegawai yang bekerja pada Pendiri yang telah diangkat sebagai Pegawai Organik sejak 1 Januari 2007 dan setelahnya maupun Pegawai Terampil sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku pada Pendiri, dan Pegawai Mitra Pendiri yang statusnya sesuai dengan Peraturan yang ada di masing-masing Perusahaan yang menjadi Mitra Pendiri. Iuran atas program tersebut dibebankan kepada pegawai sebesar 5% dari PhDP (Penghasilan Dasar Pensiun) dan kepada perusahaan sebesar 12,5% dari PhDP.
2. Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan
Semua pegawai perseroan diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), yang terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Iuran sebesar 3% menjadi beban pegawai dan sebesar 6,24% menjadi beban Perseroan.
3. Program Imbalan Pasca Bekerja
Program Imbalan Pasca Bekerja diberikan kepada pegawai yang diterima sebelum 1 Januari 2014, sesuai dengan kesepakatan dengan Serikat Pekerja yang tertuang dalam PKB tahun 2018-2020, program ini hanya diberikan kepada pegawai yang masuk sebelum 1 Januari 2014 dengan perhitungan yang dilakukan dengan posisi saat itu dan dilakukan pengembangan setiap tahunnya, sedangkan untuk pegawai yang masuk setelah itu hanya diberikan Program pensiun, dengan catatan manfaat dari program pensiun yang diterima tidak boleh kurang dari Peraturan Perundangan yang berlaku.
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Perseroan juga memberikan bantuan kesehatan dalam bentuk kepesertaan di asuransi umum maupun BPJS kesehatan untuk pensiunan pegawai dan pasangannya sampai dengan usia 70 tahun.

TEKNOLOGI INFORMASI

Visi TI WIKA: Menjadi *trusted business partner* bagi tercapainya WIKA sebagai salah satu perusahaan terbaik di bidang Engineering Procurement dan Construction (EPC) dan Investasi terintegrasi di Asia Tenggara

MISI TI WIKA:

EPCCOM Service Excellence

Menyediakan layanan EPCCOM (beserta pendukungnya terkait) yang terintegrasi, aman dan andal kepada stakeholder internal perusahaan atau grup; merujuk kepada perkembangan dinamika bisnis dan benchmarking Industri.

Secure & Reliable Infrastructure

Menyediakan layanan jaringan komunikasi, data center/disaster recovery center yang aman dan andal melalui adopsi platform teknologi yang memperhatikan aspek keberlangsungan layanan dan skalabilitas beban ke depan.

IT/Data Governance Maturity/ Capability

Meningkatkan kematangan atau kapabilitas pengelolaan teknologi dan data, dalam rangka pemenuhan kepatuhan regulasi dan kebutuhan pemenangan persaingan industri.

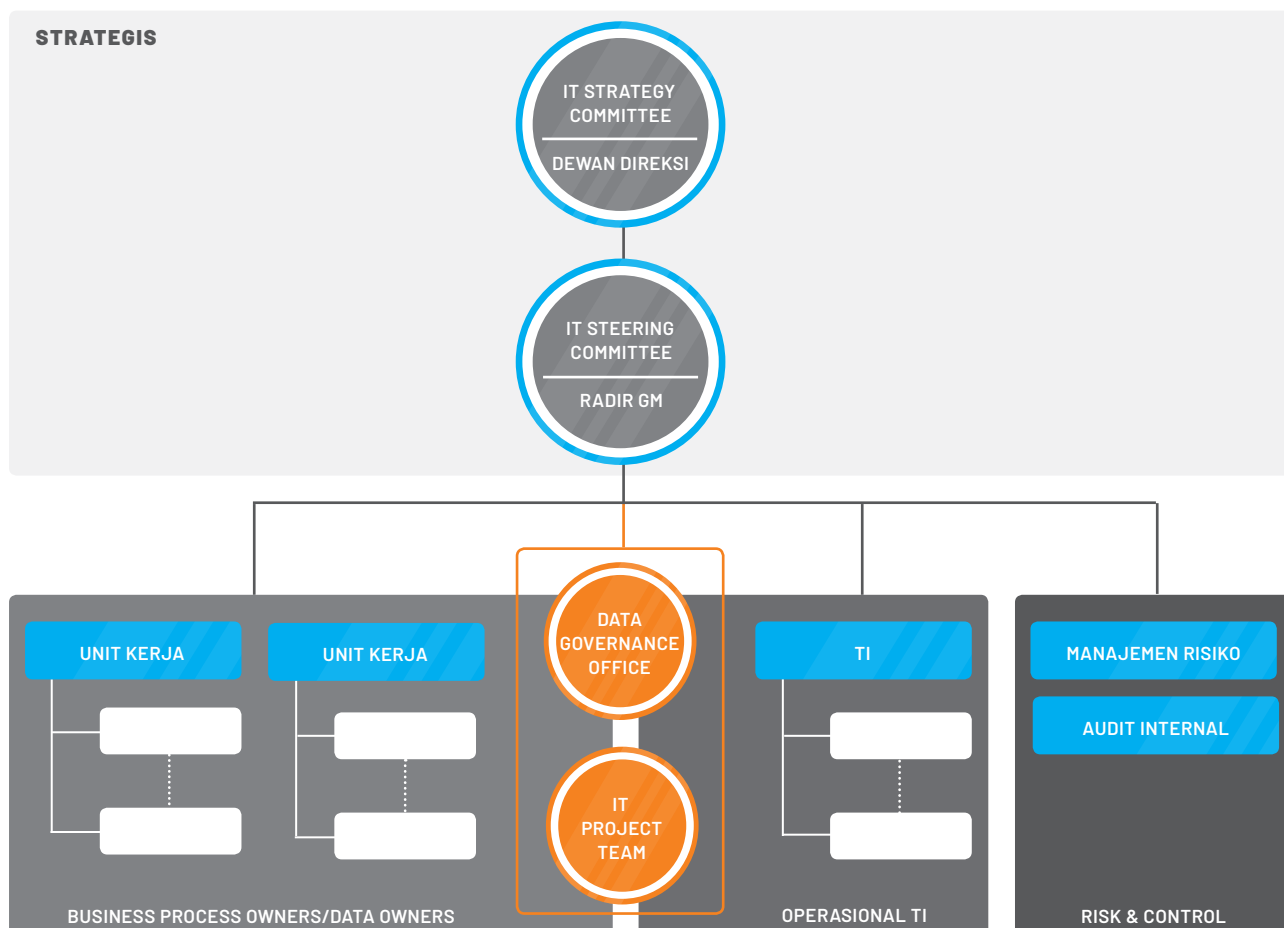
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Penerapan kebijakan TI dimulai dengan penyusunan Pedoman Tata Kelola TI dan Prosedur TI WIKA berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan internal Perusahaan terkait dengan struktur organisasi dan Good Corporate Governance.

MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Perusahaan bertanggung jawab memastikan terlaksananya good practices IT Governance/Management sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri BUMN. Untuk memastikan keberhasilan implementasi program TI, Perusahaan membentuk IT Steering Committee dan menetapkan penanggung jawab dari masing-masing fungsi yang memiliki pengetahuan dan kompetensi sesuai bidangnya masing-masing sehingga proses pembentukan dan pengembangan TI serta implementasinya dapat dilakukan sesuai dengan rencana. IT steering committee memberikan dukungan terhadap perencanaan dan implementasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan program. Perusahaan menetapkan aturan dan kebijakan-kebijakan yang mampu mendukung percepatan inisiatif-inisiatif yang mengacu pada standar operasional TI internasional.

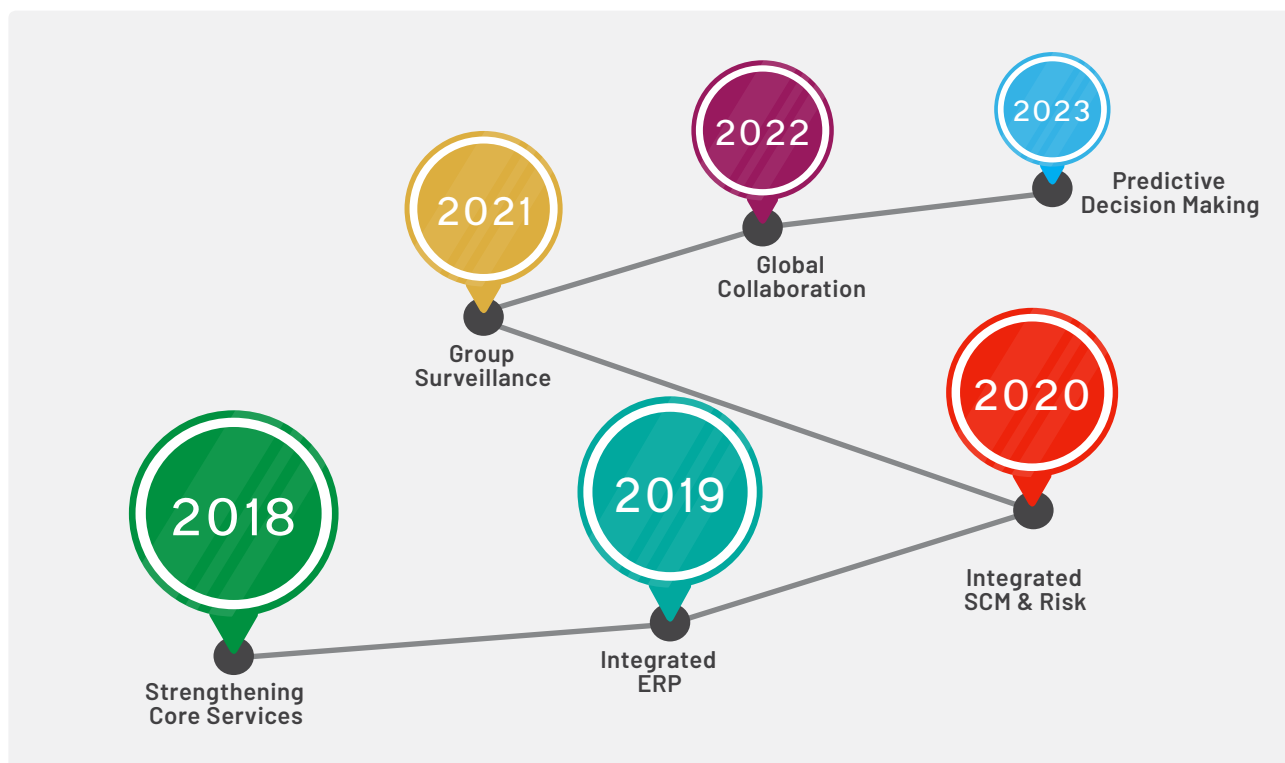
Di tahun 2018, Perusahaan terus menjalankan rekonfigurasi deskripsi kerja dalam rangka transformasi pendekatan pengelolaan IT berbasis objek menjadi berbasis fungsi. Untuk menguatkan dan memastikan proses bisnis dan tata kelola yang benar, Perusahaan menginisiasi untuk mendapatkan sertifikasi ISO 20000 ITSM, ISO 27001 Security dan Cobit 4.1 dengan score minimal 3.



Perusahaan melihat operasi TI sangatlah penting dan menjadi bagian dari budaya perusahaan, baik di induk maupun di anak perusahaan. Berdasarkan identifikasi peran strategis TI, maka Model Operasi Ti Perusahaan yang diimplementasi adalah *"Deconsolidate – Centralize"*.

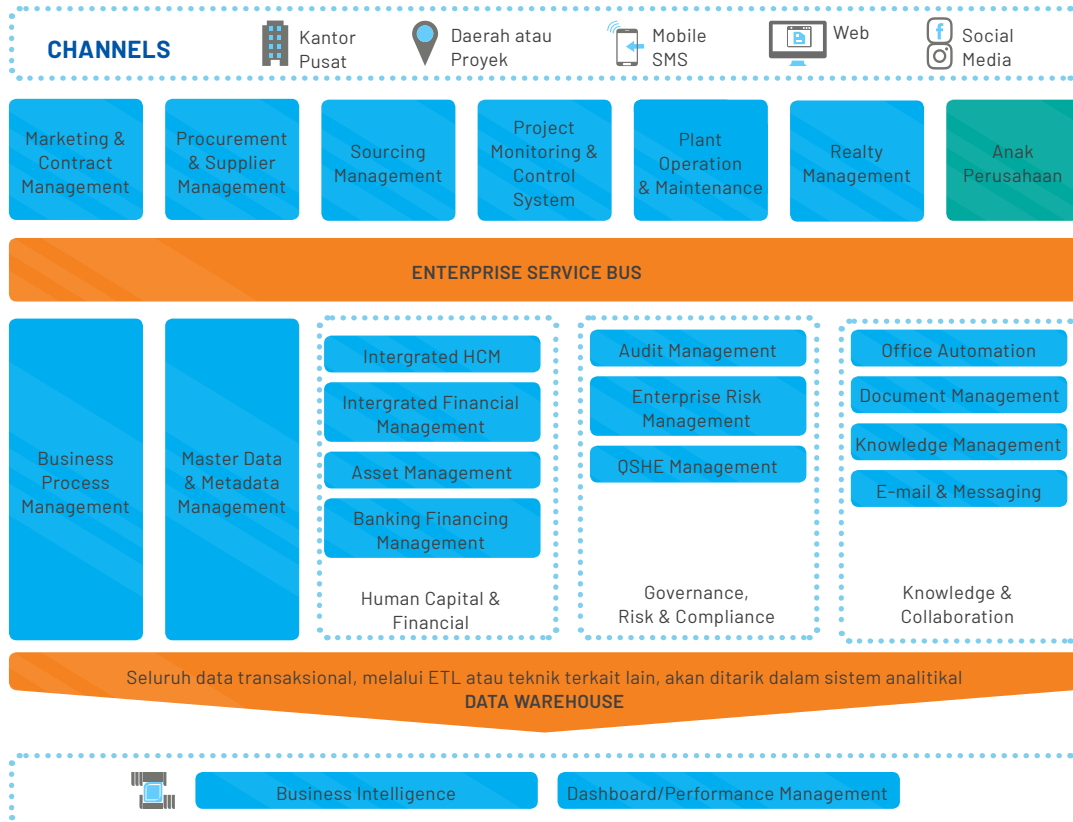
FOKUS AREA DI TAHUN 2018

Perusahaan mengembangkan teknologi informasi untuk meraih arsitektur sistem yang dapat menopang efektivitas serta efisiensi kinerja. Di tahun 2018, fokus pengembangan sistem teknologi informasi WIKI adalah untuk melakukan **Strengthening Core Services**. Fokus tersebut ditetapkan sesuai dengan arahan RJPP serta arahan strategis *Road Map* Digitalisasi TI sebagai berikut.



Perusahaan menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar fungsi yang memungkinkan data-data transaksional pada sistem operasional dan eksternal Perusahaan dapat dikonsolidasikan.

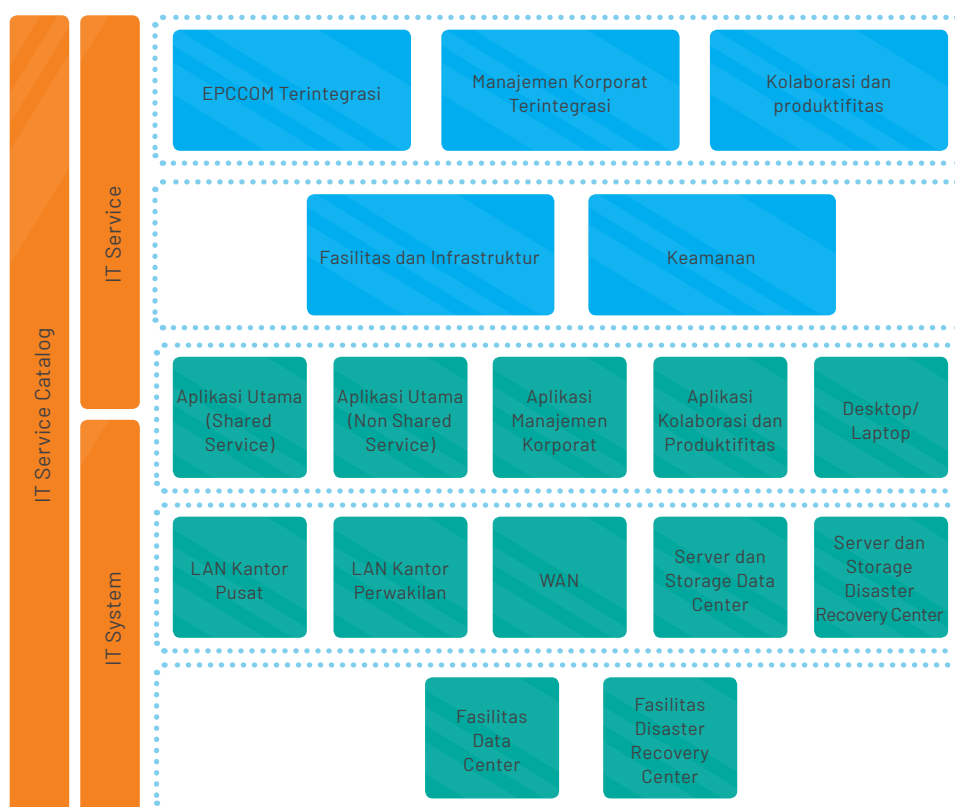




Hotel Pullman Mandalika

MODEL LAYANAN TI

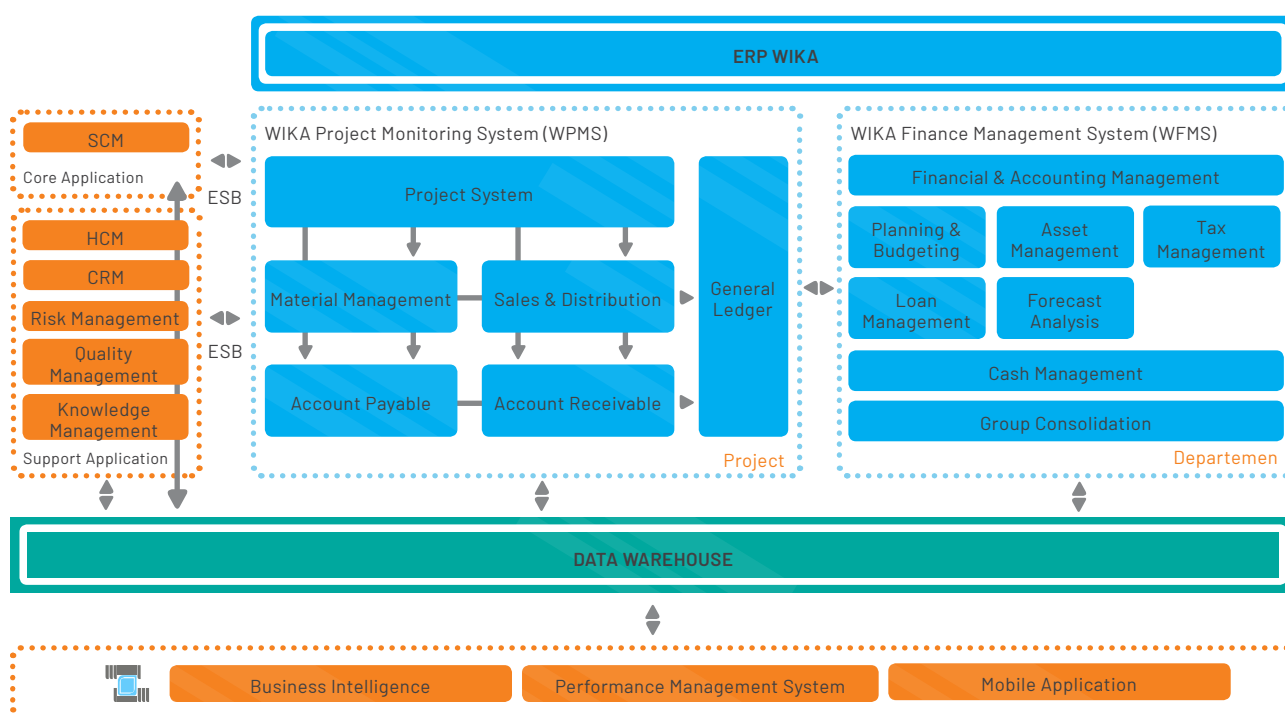
Untuk mendukung operasional perusahaan, secara garis besar layanan TI dibagi menjadi IT System dan IT Service yang tertuang didalam IT Service Catalog sebagai berikut:



OUTLOOK DAN PRIORITAS DI TAHUN MENDATANG

Sesuai dengan Roadmap Digitalisasi Perusahaan dan arahan strategis perusahaan, di tahun 2019 ini Perusahaan akan fokus pada Integrated **ERP-WIKA**. Inisiasi awal telah dilakukan dengan integrasi aplikasi menggunakan *Enterprise Service Bus* (ESB) dan *Data Warehouse*. Berikut adalah bagan **ERP-WIKA** terkait fokus inisiatif di tahun 2019:

Arsitektur ERP-WIKA





ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

180	Tinjauan Industri dan Kondisi Makroekonomi Indonesia 2018	204	Perbandingan antara Target pada Awal Tahun Buku dan Realisasinya
184	Tinjauan Operasional	205	Prospek Usaha
185	Tinjauan Operasi per Segmen Usaha	206	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
189	Kinerja Keuangan	207	Aspek Pemasaran
199	Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang	208	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi Atau Restrukturisasi Utang/Modal
201	Struktur Modal		
202	Ikatan Material Investasi Barang Modal		



Bandara Internasional Jawa Barat

209	Kebijakan Dividen	217	Perubahan Kebijakan Akuntansi
210	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan Manajemen	218	Informasi Kelangsungan Usaha
211	Realisasi Penggunaan Dana dan Realisasi PMHMETD S/D 31 Desember 2018	219	Tingkat Kesehatan
212	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Berelasi	220	Kinerja Entitas Anak
216	Perubahan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya		

TINJAUAN INDUSTRI DAN KONDISI MAKROEKONOMI INDONESIA 2018



ANALISIS PEREKONOMIAN GLOBAL

Risiko ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global yang melandai, dinamika kenaikan Fed Fund Rate (FFR), serta masih tingginya risiko ketegangan hubungan dagang. Ketidakpastian pasar keuangan global didorong oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai sehingga mendorong perlambatan pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas. Selain itu, pasar keuangan juga masih menghadapi risiko terkait ketidakpastian pasar keuangan AS yang masih tetap tinggi, meskipun mereda, termasuk percepatan dan besaran normalisasi kebijakan moneter di negara maju.

Risiko-risiko tersebut kemudian memicu beberapa bank sentral baik di negara maju, sementara negara berkembang terus menaikkan suku bunga kebijakannya (tightening). Ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi juga berdampak pada peningkatan ketidakpastian dan risiko di negara berkembang sehingga memengaruhi aliran dana ke negara berkembang. Kondisi tersebut kemudian berisiko mendorong aliran modal keluar (capital outflow) dari

negara berkembang (EM). Meskipun demikian, aliran modal negara berkembang saat ini semakin membaik dengan menunjukkan posisi inflow.

Di Eropa, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat, meskipun arah normalisasi kebijakan moneter bank sentral Eropa (ECB) pada 2019 tetap menjadi perhatian. Di negara berkembang, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus melambat dipengaruhi melemahnya konsumsi dan ekspor neto antara lain akibat pengaruh ketegangan hubungan dagang dengan AS, serta berlanjutnya proses deleveraging di sistem keuangan. Pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai serta risiko hubungan dagang antar negara dan geo-politik yang masih tinggi berdampak pada tetap rendahnya volume perdagangan dunia. Sejalan dengan itu, harga komoditas global menurun, termasuk harga minyak dunia akibat peningkatan pasokan dari AS, OPEC dan Rusia.

ANALISIS PEREKONOMIAN NASIONAL

Di sisi lain, kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2018 tetap terjaga dengan momentum pertumbuhan


PLTMG BIMA 50MW

yang terus berlanjut. Pada 31 Desember 2018, angka pertumbuhan ekonomi tercatat pada angka 5,17%, meningkat dari 5,07% pada tahun sebelumnya. Indikator ekonomi triwulan IV 2018 menunjukkan konsumsi swasta tetap kuat ditopang daya beli dan keyakinan konsumen yang terjaga serta dampak positif persiapan Pemilu. Investasi tetap kuat didorong proyek infrastruktur Pemerintah sedangkan investasi nonbangunan melambat seiring perkembangan sektor manufaktur dan pertambangan yang turut melambat.

Nilai tukar Rupiah bergerak sesuai dengan mekanisme pasar dan konsisten mendukung penyesuaian sektor eksternal. Pada Desember 2018, Rupiah mendapat tekanan dipengaruhi kembali meningkatnya ketidakpastian global serta meningkatnya permintaan valuta asing musiman untuk kebutuhan akhir tahun. Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga disertai intermediasi perbankan yang meningkat dan risiko kredit yang terkelola dengan baik.

Disarikan dari "Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2018", Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, 15 Januari 2019

ANALISIS INDUSTRI

Gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu faktor meningkatnya peran sektor konstruksi terhadap perekonomian Indonesia. Layaknya sebuah negara berkembang, Indonesia memiliki skala pasar di bidang konstruksi yang sangat pesat selama 20 tahun terakhir. Investasi untuk pembangunan telah menjadi fokus pemerintah dalam waktu yang cukup panjang. Pada tahun 2008, pemerintah menghabiskan kurang lebih Rp35 triliun hanya untuk pekerjaan jaringan jalan dan sumber daya air. Upaya pembangunan ini masih terus berlanjut hingga saat ini dan jadi sorotan utama program kerja pemerintahan Joko Widodo dengan nama Nawa Cita.

Meskipun demikian, pencapaian positif sektor konstruksi tak terlepas dari tantangan. Di balik kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, Indeks Tendensi Bisnis konstruksi terbilang cukup rendah karena proyek infrastruktur cenderung padat modal dan padat teknologi, sehingga multiplier effect-nya ke pertumbuhan ekonomi terbilang kecil khususnya ke kontraktor kecil.

Menurut data Biro Statistik Ketenagakerjaan Amerika Serikat, Asosiasi Perusahaan Bangunan dan Kontraktor menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan biaya dalam material suatu proyek konstruksi. Peningkatan biaya pengadaan material menjadi bagian dari tren industri konstruksi yang akan terus berlanjut hingga 2019. Harganya sendiri diperkirakan akan meningkat hingga 3 persen dimulai dari tahun 2018. Besi dan baja serta produk turunan baja dan kayu merupakan material yang paling terasa kenaikan harganya. Tren konstruksi ini diperkirakan akan terus berlanjut selama terjadi penurunan pasokan dan peningkatan biaya untuk suplai material bangunan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan konstruksi harus mempersiapkan kemampuan dalam hal finansial dan suatu cara agar tetap kompetitif dalam industri.

Menghadapi kondisi global tersebut, segenap upaya dicurahkan terus menerus dalam upaya membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan sekaligus mengejar kemajuan posisi dari negara-negara lain yang lebih maju. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, Badan Pusat Statistik mencatat pembangunan Infrastruktur yang berhasil dilaksanakan antara lain 39 bendungan (30 baru dan 9 selesai) dimana bendungan yang telah terbangun tersebut menambah luas layanan irigasi waduk dari semula 761.542 hektare (11%) menjadi 859.626 hektare (12,9%). Pembangunan jalan tol APBN dan non-APBN yang telah terbangun sepanjang 568 kilometer dari target 1000 kilometer pada akhir 2019 nanti, peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum yang telah mencapai 20.430 liter/detik, capaian penyediaan perumahan yang telah mencapai 2.204.939 unit, dan seterusnya. Tidak berhenti sampai di sana, untuk menyelesaikan target pembangunan Infrastruktur dalam kurun waktu 2015-2019, Kementerian PUPR terus bekerja tiada henti sehingga sampai dengan akhir tahun 2019 diperkirakan akan terbangun 1.851 kilometer jalan tol.

Pada 2018, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dengan penandatanganan kontrak payung antara KPPIP dengan 35 perusahaan konsorsium konsultan. Pembentukan panel konsultan ini merupakan sebuah terobosan baru dalam upaya percepatan penyediaan infrastruktur, baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun proyek prioritas. Panel ini bisa mempercepat proses pengadaan

jasa konsultansi dalam suatu proyek infrastruktur, dengan memangkas proses pra-qualification hingga menghemat waktu 1-2 bulan. Panel Konsultan ini adalah panel konsultan pertama di Indonesia yang pengelolaannya murni dilakukan pemerintah Indonesia. Selain keuntungan dalam segi efisiensi waktu dan biaya, keberadaan panel konsultan ini juga dapat menjamin kualitas jasa konsultansi suatu proyek infrastruktur sehingga proses pengadaan jasa konsultansi lebih transparan dan jelas.

Menurut laporan World Bank Group 2018, daya saing infrastruktur Indonesia tahun 2018 berada pada peringkat ke-52, membaik dibandingkan tahun 2010-2013 yang berkisar di peringkat 70-an. Di Asia, lembaga independen dunia Internasional Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dibangun begitu masif membuat Indonesia menempati posisi tiga dengan Infrastruktur terbaik di Asia Tenggara (ASEAN), berada di bawah Singapura dan Malaysia yang menempati peringkat pertama dan kedua. Tak hanya itu, peringkat kemudahan Berusaha (Easy of Doing Business/EoDB) Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 peringkat EoDB Indonesia naik dari peringkat 91 menuju 72 dan naik lagi pada tahun 2019 menjadi peringkat 40.

(Disarikan dari "Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2018", Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, 15 Januari 2019)

ANALISIS POSISI PERUSAHAAN DALAM INDUSTRI

Tahun 2018 menjadi tahun besar bagi WIKA seiring suksesnya Quantum Transformation yang dilakukan WIKA yang sebelumnya hanya berfokus pada sektor yang menjadi kompetensi inti, kini semakin berkembang menjadi suatu perusahaan dengan bisnis yang terintegrasi dan telah merambah ke sektor yang lebih luas, yaitu Infrastruktur & Gedung, Energy & Industrial Plant, Realty & Property, Industri, Investasi, Rekayasa Konstruksi, dan Integrated Transportation System.

Dengan suksesnya transformasi yang dilakukan, WIKA memiliki peluang bisnis yang semakin terbuka lebar. Pesatnya perubahan global mendorong WIKA untuk

mereposisi visi dan misinya sebagai perusahaan konstruksi nasional yang sudah merambah ke tingkat dunia. Pada tahun 2010 WIKA menyiapkan VISI 2020 yang salah satu tujuannya adalah menjadi salah satu perusahaan EPC dan investasi terintegrasi terbaik di Asia Tenggara, di mana WIKA memiliki SDM yang dapat diandalkan dan mampu bersaing dengan tenaga ahli dari mancanegara.

Untuk mencapai visi tersebut, WIKA berupaya untuk mengaktualisasikan strategi ekspansi ke luar negeri serta menerapkan best practice integrated management system. Melalui strategi pemasaran selective market, WIKA telah berhasil merambah pasar konstruksi di Afrika, Asia Tenggara dan telah memasuki pasar Timur Tengah. WIKA juga tercatat memiliki proyek on going di luar negeri yaitu diantaranya Clarin Bridge di Filipina, Limbang Bridge di Malaysia, Lodgement di Aljazair, Residential Palace di Nigeria, Circular Railway Yangon di Myanmar dan Bandara Oecusse di Timor Leste.

Pada tahun 2018, WIKA melakukan ekspansi perdana ke negara Taiwan yang ditandai dengan kerja sama Joint Operations dengan Dong - Pi Co., Ltd (Dong-Pi) untuk membangun Bridge Across the Kinmen Island. Jembatan ini memiliki panjang 5400m dan nantinya akan menghubungkan dua pulau di bawah teritori Taiwan yang berdekatan dengan Tiongkok yaitu Pulau

Kinmen Besar dan Pulau Kinmen Kecil. Pencapaian ini tentunya akan semakin membawa dampak positif bagi perkembangan perseroan di industri konstruksi internasional.

Untuk semakin memperkuat posisi dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat, Perseroan akan melakukan penawaran umum saham perdana dua anak usaha, yaitu PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. dan PT Wijaya Karya Beton Tbk. sejalan dengan rencana jangka panjang dalam memperkuat ekuitas. Selain itu, WIKA telah sukses menerbitkan instrumen surat berharga yang semakin memperkuat struktur permodalan Perseroan. Komodo Bond tercatat di London Stock Exchange. Pada saat peluncurannya, Komodo Bond WIKA mengalami oversubscribed 2,5x dan berhasil menghimpun dana sebesar Rp5,4 triliun. WIKA juga menerbitkan Surat Berharga Perpetual I WIKA Tahun 2018 yang sukses diterbitkan dengan jumlah sebesar Rp600 miliar. Dana hasil penerbitan instrumen tersebut akan dipergunakan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja Perseroan.

Upaya-upaya tersebut mendorong tingkat kesehatan profil keuangan Perseroan menjadi semakin kuat di tahun 2018. Pencapaian tersebut tercermin pada hasil pemeringkatan oleh Lembaga rating seperti Fitch Rating dan Moody's yang menempatkan Perseroan dengan level rating tertinggi di industri.

	FITCH NATIONAL		FITCH INTERNATIONAL		MOODY'S	
	RATING	OUTLOOK	RATING	OUTLOOK	RATING	OUTLOOK
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	AA (idn)	NEG	BB	NEG	Ba2	STABLE

TINJAUAN OPERASIONAL

STRATEGI PERUSAHAAN

Strategi Pemasaran “Pasar Selektif”

Strategi Pasar Selektif yang dilakukan oleh Perseroan merujuk pada pasar yang terpilih. Saat ini, pasar Perseroan terdiri dari pasar domestik dan luar negeri, strategi untuk pasar domestik adalah dengan memilih proyek yang berasal dari Pemerintah yang telah disesuaikan dengan anggaran Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta yang dinilai menguntungkan. Untuk pasar luar negeri, Perseroan memfokuskan diri pada pasar yang sudah dikuasai.

Strategi Keuangan “Sentralisasi dan Pembiayaan Mandiri”

Strategi Keuangan Perseroan berfokus pada optimalisasi tingkat likuiditas. Hal ini dapat dicapai melalui strategi keuangan terpusat dan kebijakan pembiayaan proyek secara mandiri. Kedua kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga tingkat likuiditas Perseroan.

Strategi Operasional “QSHE, Sentralisasi Pengadaan, Program Efisiensi dan Mitigasi Risiko”

Strategi Operasional didasarkan kepada tiga hal keunggulan yaitu:

1. Quality, Safety, Health and Environment
2. Pengadaan Terpusat
3. Program Efisiensi, dan
4. Mitigasi Risiko

Perseroan memperhatikan Quality, Safety, Health, and Environment dalam beroprasi. Pengadaan Terpusat merupakan salah satu cara substansial dalam mengurangi biaya khususnya mendapatkan harga yang terbaik dan efisiensi pada biaya persediaan. Program Efisiensi dilakukan dengan melakukan upaya-upaya perbaikan yang berkelanjutan di setiap proses bisnis, baik di harga pokok maupun di biaya operasional. Mitigasi risiko dilakukan sebagai bagian utuh dari pengelolaan risiko yang ditujukan untuk meniadakan atau meminimalkan tingkat risiko yang dapat diterima.

Strategi Investasi “Perkuatan Integrasi Forward-Backward”

Strategi Investasi yang diterapkan adalah melakukan investasi yang bernilai tambah dan mempunyai keunggulan bersaing. Strategi nilai tambah dilakukan dengan membuat keputusan investasi secara tepat dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan khususnya dalam hal tingkat pengembalian investasi. Strategi keunggulan bersaing adalah strategi pemilihan investasi untuk meningkatkan kemampuan sinergi perusahaan untuk memberi nilai tambah kepada customer dibanding kompetitor.

Strategi Pengembangan “Human Capital Berbasis Kompetensi dan Pengharkatan”

Strategi Pengembangan Human Capital dimulai dari desain organisasi yang disesuaikan dengan arah perkembangan Perseroan dan mengembangkan Kompetensi Human Capital untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. Penerapan prinsip “more for more” dalam penerapan kebijakan pengharkatan.

Strategi-strategi tersebut telah diimplementasikan secara efektif yang didukung oleh komitmen Direksi dan seluruh karyawan WIKA. Kedepannya, Perseroan akan terus melakukan perbaikan-perbaikan agar kinerja Perseroan bisa tetap terjaga dan mendorong pengembangan usaha kedepannya.

TINJAUAN PER SEGMENT USAHA

Segment operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara reguler direvisi oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segment operasi.

Segment operasi adalah suatu komponen dari Entitas

1. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
2. Yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segment tersebut dan menilai kinerjanya; dan
3. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan mengklasifikasikan segment operasi meliputi Infrastruktur dan gedung, energi dan industrial plant, industri, realti dan properti. Segment geografis berdasarkan wilayah yaitu Indonesia dan Luar Negeri.

SEGMENT OPERASI

Di bawah ini penjelasan mengenai tiap-tiap segment operasi per 31 Desember 2018.

Infrastruktur dan Gedung

Segment ini terdiri dari bidang usaha jasa Konstruksi Sipil dan Konstruksi Gedung. Konstruksi Sipil membawahi sejumlah sub bidang usaha yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, pengairan dan prasarana perhubungan. Kini pekerjaannya tidak sekedar sebagai kontraktor melainkan juga mencakup rancang bangun (design and build) dari mulai proses perencanaan hingga proses konstruksi. Sementara Konstruksi Gedung meliputi pembangunan hunian dan bangunan fasilitas. Berkat dukungan kemampuan di bidang perekayasaan, Konstruksi Gedung mampu melakukan pekerjaan rancang bangun atau design and build sejak proses perencanaan sampai proses konstruksi. Sub bidang usaha jasa konstruksi bangunan hunian, meliputi pembangunan apartemen, kondominium, hotel, rumah susun, dan kompleks perumahan.

Energi dan Industrial Plant

Segment ini terdiri dari bidang usaha Energi dan Industrial Plant. Bidang usaha Energi ini meliputi jasa EPC (Engineering, Procurement dan Construction) di bidang ketenagalistrikan. Sementara Bidang usaha Industrial Plant membangun suatu processing plant, yang terdiri atas fasilitas bangunan, sersangkaian fasilitas mesin, peralatan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya sehingga dapat terbentuk suatu proses produksi dari raw material menjadi produk tertentu, diantaranya Pabrik Pengolahan Migas, Pengolahan Petrokimia, Pabrik Semen, Pembangkit Listrik, Bahan bakar Biofuels, Pabrik Pupuk dan Pabrik Minyak Goreng.

Industri

Segment Industri sebagai pendukung dari kompetensi inti perusahaan, memiliki variasi dari produk-produk pendukung aktivitas konstruksi, seperti:

1. Beton Pracetak, yaitu: produk beton pracetak, seperti PC Poles, PC Piles, Railway Sleeper CP, Bridge Concrete, Sheet Pile, PC Pipes, RC Box Culvert, Marine Structure CP, HCS, PC Cylinder dan Rigid Pavement Fabricated.
2. Fasilitas Industri, yaitu: fabrikasi baja dengan menghasilkan produk konstruksi baja, struktur rangka baja, conveyor, pipe rack, tower telekomunikasi, tower transmisi listrik, jembatan rangka baja, tanki baja, silo, hopper, pressure vessel, welded beam, dan steel plate work lainnya serta aluminium casting dan plastic injection.
3. Bitumen, yaitu: granular asphalt dan extraction asphalt.

Realti dan Properti

Segmen Realiti dan Properti bergerak dalam bidang usaha realti, jasa properti dan jasa lainnya seperti penggarapan landed house, highrise building (apartment, condotel, office mixed use) serta industrial estate. Di bidang realti, WIKA Realty telah sukses mengembangkan produk unggulan Tamansari. Dengan mengusung makna di balik nama Tamansari yang berarti peristirahatan raja, WIKA Realty berhasil menggabungkan keindahan arsitektur, unsur alam dan kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia sehingga tercipta konsep hunian yang asri dan nyaman.

SEGMENT GEOGRAFIS

Segmen geografis adalah komponen Perseroan dan Entitas Anak yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

Segmen geografis WIKA dibagi ke dalam wilayah sebagai berikut.

- Indonesia
- Luar Negeri meliputi: Aljazair, Filipina, Malaysia, Myanmar, Timor Leste, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Taiwan dan Niger.

PRODUKSI SEGMENT

Di bawah ini akan diuraikan kinerja produksi dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebagai entitas utama yang disajikan dalam laporan ini.

Segmen Operasi

Infrastruktur dan Gedung

Tabel Kinerja Operasional Segmen Infrastruktur dan Gedung

(dalam miliar Rupiah)

KETERANGAN	2018	2017	PERTUMBUHAN (%)
Omset Kontrak Baru	41.145,14	26.413,01	55,78
Omset Kontrak Dihadapi	98.356,01	79.684,21	23,43

Energi dan Industrial Plant

Tabel Kinerja Operasional Segmen Energi dan Industrial Plant

(dalam miliar Rupiah)

KETERANGAN	2018	2017	PERTUMBUHAN (%)
Omset Kontrak Baru	1.786,78	7.379,39	(75,79)
Omset Kontrak Dihadapi	12.752,23	15.613,27	(18,32)

Industri

Tabel Kinerja Operasional Segmen Industri

(dalam miliar Rupiah)

KETERANGAN	2018	2017	PERTUMBUHAN (%)
Omset Kontrak Baru	6.455,20	6.648,69	(2,91)
Omset Kontrak Dihadapi	9.769,24	8.304,73	17,63

Realti dan Properti

Tabel Kinerja Operasional Segmen Realiti dan Properti

(dalam miliar Rupiah)

KETERANGAN	2018	2017	PERTUMBUHAN (%)
Omset Kontrak Baru	1.173,07	1.961,10	(40,18)
Omset Kontrak Dihadapi	2.635,80	3.039,90	(13,29)

Segmen Geografis

Data berikut menunjukkan distribusi dari seluruh pendapatan, laba bersih dan aset Perseroan berdasarkan geografis:

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	NILAI TERCATAT ASET SEGMENT			PENDAPATAN			LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		
	2018	2017	PERTUMBUHAN (%)	2018	2017	PERTUMBUHAN (%)	2018	2017	PERTUMBUHAN (%)
Indonesia	57.641.517	44.538.970	29,42	29.611.735	25.097.164	17,99	1.982.473	1.302.993	52,15
Luar Negeri	1.588.484	1.144.804	38,76	1.546.458	1.079.239	43,29	90.827	53.122	70,98
Jumlah	59.230.001	45.683.774	29,65	31.158.193	26.176.403	19,03	2.073.300	1.356.115	52,89

Pendapatan segmen geografis meningkat sebesar 19,03% dari Rp26,18 triliun di tahun 2017 menjadi Rp31,16 triliun di tahun 2018. Laba bersih tahun berjalan segmen geografis di tahun 2018 sebesar Rp2,07 triliun, meningkat sebesar 52,89% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1,36 triliun. Peningkatan pendapatan dan laba bersih tahun berjalan didukung oleh pertumbuhan segmen luar negeri.

PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS SEGMENT

Pendapatan dan profitabilitas segmen operasi disajikan dalam tabel berikut.

Segmen Operasi**Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi Tahun 2018**

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2018					
	INFRASTRUKTUR DAN GEDUNG	ENERGI DAN INDUSTRIAL PLANT	INDUSTRI	REALTI DAN PROPERTI	ELIMINASI	KONSOLIDASI
Penjualan	21.788.100	5.280.718	6.935.063	1.350.320	(4.196.008)	31.158.193
Laba (Rugi) Bersih	1.484.033	(175.579)	475.187	289.659	-	2.073.300

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi Tahun 2017

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	2017					
	INFRASTRUKTUR DAN GEDUNG	ENERGI DAN INDUSTRIAL PLANT	INDUSTRI	REALTI DAN PROPERTI	ELIMINASI	KONSOLIDASI
Penjualan	17.388.041	4.024.994	5.006.506	1.511.382	(1.754.520)	26.176.403
Laba (Rugi) Bersih	1.236.549	60.186	232.016	222.516	(395.153)	1.356.114

Tabel Pertumbuhan Segmen Operasi

(dalam juta Rupiah)

URAIAN	PERTUMBUHAN (%)					
	INFRASTRUKTUR DAN GEDUNG	ENERGI DAN INDUSTRIAL PLANT	INDUSTRI	REALTI DAN PROPERTI	ELIMINASI	KONSOLIDASI
Penjualan	25,31	31,20	38,52	(10,66)	139,15	19,03
Laba (Rugi) Bersih	20,01	(391,73)	104,81	30,17	(100)	52,89

Berdasarkan jumlah laba bersih segmen operasi tahun 2018 diketahui bahwa segmen yang memiliki pertumbuhan tertinggi secara berurutan yaitu:

1. Segmen Industri sebesar 104,81%
2. Segmen Realiti dan Properti sebesar 30,17%
3. Segmen Infrastruktur dan gedung sebesar 20,01%
4. Segmen Energi dan Industrial Plant sebesar (391,73%)

KINERJA KEUANGAN

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan serta mendapat opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Aset

Per 31 Desember 2018, total aset Perseroan meningkat menjadi Rp59,23 triliun dari Rp45,68 triliun per 31 Desember 2017. Peningkatan total aset tersebut mencapai Rp13,55 triliun atau sebesar 29,65%. Peningkatan total aset tersebut khususnya berasal dari peningkatan pada aset lancar dan aset tidak lancar.

Tabel Aset

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			(RP)	%
(1)	(2)	(3)	2-3	5 = 4/3
Aset Lancar	43.555.495.865	34.910.108.265	8.645.387.600	24,76
Aset Tidak Lancar	15.674.505.374	10.773.666.037	4.900.839.337	45,49
Jumlah Aset	59.230.001.239	45.683.774.302	13.546.226.937	29,65

Aset Lancar

Per 31 Desember 2018, total aset lancar Perseroan meningkat menjadi Rp43,55 triliun dari Rp34,91 triliun per 31 Desember 2017. Peningkatan ini mencapai Rp8,64 triliun atau sebesar 24,76% yang berasal dari kenaikan piutang lain-lain bagian lancar pihak berelasi sebesar 730,89%.

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			(RP)	%
(1)	(2)	(3)	2-3	5 = 4/3
Kas dan Setara Kas	13.973.766.477	11.253.778.215	2.719.988.262	24,17
Deposito Yang Dibatasi Penggunaannya	20.000.000	20.100.000	(100.000)	(0,50)
Piutang Usaha - neto				
Pihak Berelasi	2.745.540.433	3.000.643.116	(255.102.683)	(8,50)
Pihak Ketiga	2.605.300.003	1.929.510.016	675.789.987	35,02
Piutang Retensi - neto				
Pihak Berelasi	677.642.045	348.167.986	329.474.059	94,63
Pihak Ketiga	1.246.488.344	979.998.517	266.489.827	27,19

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			(RP)	%
(1)	(2)	(3)	2-3	5 = 4/3
Tagihan Bruto Pemberi Kerja – neto				
Pihak Berelas	5.565.798.797	5.826.664.167	(260.865.370)	(4,48)
Pihak Ketiga	4.336.247.938	3.434.294.927	901.953.011	26,26
Piutang Yang Belum Ditagih – Bagian Lancar	924.845.767	592.563.302	332.282.465	56,08
Piutang lain-lain – bagian lancar				
Pihak Berelasi	1.420.649.920	170.978.921	1.249.670.999	730,89
Pihak Ketiga	58.488.669	133.988.030	(75.499.361)	(56,35)
Persediaan	5.978.533.161	3.839.540.301	2.138.992.860	55,71
Uang Muka – Bagian Lancar	1.487.325.514	1.180.612.848	306.712.666	25,98
Pajak Dibayar Dimuka	1.615.704.032	1.298.271.722	317.432.310	24,45
Biaya Dibayar Dimuka – Bagian Lancar	735.419.058	702.804.644	32.614.414	4,64
Jaminan Usaha – Bagian Lancar	105.100.463	88.042.632	17.057.831	19,37
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi – Bagian Lancar	58.645.244	110.148.921	(51.503.677)	(46,76)
Jumlah Aset Lancar	43.554.855.763	34.910.108.265	8.644.747.498	24,76

Aset Tidak Lancar

WIKA membukukan jumlah Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2018 sebesar Rp15,67 triliun, meningkat sebesar Rp4,90 triliun atau 45,49% bila dibandingkan dengan 2017 yang tercatat sebesar Rp10,77 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan meningkatnya piutang lain-lain pihak berelasi sebesar 228,90%.

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			(RP)	%
(1)	(2)	(3)	2-3	5 = 4/3
Piutang Usaha – bagian tidak lancar				
Pihak Ketiga	1.719.973	4.657.606	(2.937.633)	(63,07)
Piutang Lain-Lain – bagian tidak lancar				
Pihak Berelasi	3.984.331.159	1.211.412.309	2.772.918.850	228,90
Pihak Ketiga	14.617.480	5.324.891	9.292.589	174,51
Piutang Yang Belum Ditagih – bagian tidak lancar	444.232.429	114.576.313	329.656.116	287,72
Uang Muka – bagian tidak lancar	280.000.000	247.857.941	32.142.059	12,97
Biaya dibayar dimuka – bagian tidak lancar	-	354.297.694	(354.297.694)	(100)
Jaminan Usaha – bagian tidak lancar	-	172.513.482	(172.513.482)	(100)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			(RP)	%
(1)	(2)	(3)	2-3	5 = 4/3
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi – Bagian Tidak Lancar	-	58.645.244	(58.645.244)	(100)
Aset Real Estate - setelah dikurangi bagian lancar	711.009.859	512.182.215	198.827.644	38,82
Investasi Pada Entitas Asosiasi	727.823.591	396.918.845	330.904.746	83,37
Investasi pada Ventura Bersama	1.813.165.802	2.812.600.560	(999.434.758)	(35,53)
Properti Investasi – Neto	1.593.674.779	538.548.500	1.055.126.279	195,92
Aset Tetap – Neto	4.675.679.014	3.932.108.696	743.570.318	18,91
Goodwill	4.847.052	4.847.052	-	0,00
Investasi Jangka Panjang Lainnya	559.267.882	116.658.458	442.609.424	379,41
Aset Tak Berwujud	714.353.513	139.077.296	575.276.217	413,64
Aset Lain-Lain	118.345.546	125.739.132	(7.393.586)	(5,88)
Aset Pajak Tangguhan	31.437.295	25.699.803	5.737.492	22,33
Jumlah Aset Tidak Lancar	15.674.505.374	10.773.666.037	4.900.839.337	45,49

Liabilitas

Per 31 Desember 2018, total liabilitas Perseroan meningkat sebesar Rp10,96 triliun atau 35,30% dari Rp31,05 triliun per 31 Desember 2017 menjadi Rp42,01 triliun per 31 Desember 2018. Peningkatan total liabilitas khususnya berasal dari kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar 171,11%.

Tabel Liabilitas

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			(RP)	%
(1)	(2)	(3)	2-3	5 = 4/3
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	28.251.951.385	25.975.617.297	2.276.334.088	8,76
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	13.762.735.289	5.076.332.392	8.686.402.897	171,11
Jumlah Liabilitas	42.014.686.674	31.051.949.689	10.962.736.985	35,30

Liabilitas Jangka Pendek

Perseroan membukukan peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar 8,76% dari Rp25,98 triliun di 2017 menjadi Rp28,25 triliun di 2018. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha pihak ketiga sebesar 48,04%.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			(RP)	%
(1)	(2)	(3)	2-3	5 = 4/3
Pinjaman Jangka Pendek				
Pihak Berelasi	1.663.039.321	2.974.410.303	(1.311.370.982)	(44,09)
Pihak Ketiga	2.536.992.008	3.449.443.672	(912.451.664)	(26,45)
Utang Usaha				
Pihak Berelasi	176.597.892	139.182.504	37.415.388	26,88
Pihak Ketiga	13.006.775.938	8.785.803.858	4.220.972.080	48,04
Utang Lain-lain	29.816.535	265.454.484	(235.637.949)	(88,77)
Kewajiban Bruto Pemberi Kerja	9.705.502	-	9.705.502	100
Utang Pajak	467.488.448	441.631.879	25.856.569	5,85
Uang Muka dari Pelanggan	1.233.776.339	1.442.187.701	(208.411.362)	(14,45)
Beban Akrua	8.634.099.492	7.805.962.536	828.136.956	10,61
Pendapatan Diterima Dimuka	196.987.012	188.856.055	8.130.957	4,31
Bagian Jangka Pendek dari				
Pinjaman Jangka Menengah	250.000.000	175.000.000	75.000.000	42,86
Utang Sewa Pembiayaan	37.299.977	41.259.887	(3.959.910)	(9,60)
Pinjaman Jangka Panjang	9.372.921	266.424.418	(257.051.497)	(96,48)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	28.251.951.385	25.975.617.297	2.276.334.088	8,76

Liabilitas Jangka Panjang

Pada akhir tahun 2018, Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tercatat sebesar Rp13,76 triliun, meningkat 171,12% dibandingkan 2017 sebesar Rp5,08 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan Pinjaman Jangka Menengah sebesar 508,46%.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			(RP)	%
(1)	(2)	(3)	2-3	5 = 4/3
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	178.708.069	337.172.202	(158.464.133)	(47,00)
Liabilitas Pajak Tangguhan – Bersih	140.226.300	45.890.326	94.335.974	205,57

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			(RP)	%
(1)	(2)	(3)	2-3	5 = 4/3
Uang Muka Proyek	3.644.322.003	2.477.316.688	1.167.005.315	47,11
Utang lain-lain	707.321.016	107.894.953	599.426.063	555,56
Bagian Jangka Panjang – setelah dikurangi bagian Jangka pendek				
Pinjaman Jangka Menengah	6.084.622.512	1.000.000.000	5.084.622.512	508,46
Utang Sewa Pembiayaan	213.628.754	96.849.868	116.778.886	120,58
Pinjaman Jangka Panjang	2.793.906.635	1.011.208.355	1.782.698.280	176,29
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	13.762.735.289	5.076.332.392	8.686.402.897	171,12

Ekuitas

Per 31 Desember 2018, total ekuitas Perseroan meningkat menjadi Rp17,22 triliun atau sebesar 17,66% dari Rp14,63 triliun per 31 Desember 2017. Peningkatan total ekuitas khususnya berasal dari adanya penerbitan Surat Berharga Perpetual.

Tabel Ekuitas

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			(RP)	%
(1)	(2)	(3)	2-3	5 = 4/3
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal Saham				
Nilai Nominal: Rp100 (nilai penuh) per Saham				
Modal Dasar – 35.000.000.000 Saham				
Modal Ditempatkan dan Disetor Issued and Fully Paid-Up – Penuh – 8.969.951.372 Saham	896.995.137	896.995.137	-	100
Modal Saham Diperoleh Kembali	(10.272.110)	(10.272.110)	-	100
Tambahan Modal Disetor	6.555.720.677	6.555.720.677	-	100
Perubahan Ekuitas Entitas Anak	1.283.644.636	1.330.850.680	(47.206.044)	(3,55)
Surat Berharga Perpetual	597.600.000	-	-	100
Saldo Laba	5.479.925.961	3.860.221.964	1.619.703.997	41,96
Sub Total	14.803.614.301	12.633.516.348	1.619.703.997	41,96
Kepentingan Non Pengendali	2.411.700.264	1.998.308.265	413.391.999	20,69
Total Ekuitas	17.215.314.565	14.631.824.613	2.583.489.952	17,66

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Perseroan pada tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp31,16 triliun dan Rp26,18 triliun, tumbuh Rp4,98 triliun atau 19,03%. Peningkatan ini mayoritas berasal dari segmen energi dan industrial plant.

Tabel Pendapatan Usaha

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			(RP)	%
(1)	(2)	(3)	2-3	5 = 4/3
Infrastruktur dan gedung	20.599.606.700	17.120.202.886	3.479.403.814	20,32
Energi dan industrial plant	5.122.920.493	3.962.674.299	1.160.246.194	29,28
Industri Beton	4.124.881.774	3.624.747.238	500.134.536	13,80
Realti dan properti	1.310.784.531	1.468.778.603	(157.994.072)	(10,76)
Jumlah	31.158.193.498	26.176.403.026	4.981.790.472	19,03

Beban Pokok Pendapatan

Di tahun 2018, Perseroan mengalami kenaikan Beban Pokok pendapatan sebesar 18,25%. Beban Pokok pendapatan tahun 2018 tercatat sebesar Rp27,55 triliun terutama karena peningkatan beban pokok pendapatan pada segmen infrastruktur dan gedung sebesar 31,47%.

Tabel Beban Pokok Pendapatan

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			(RP)	%
(1)	(2)	(3)	2-3	5 = 4/3
Infrastruktur dan Gedung	18.597.468.914	14.145.757.917	4.451.710.997	31,47
Energi dan Industrial Plant	4.606.987.897	3.586.793.131	1.020.194.766	28,44
Industri	3.182.546.106	4.399.745.067	(1.217.198.961)	(27,66)
Realti dan Properti	1.166.463.431	1.167.872.823	(1.409.392)	(0,12)
Jumlah	27.553.466.348	23.300.168.938	4.253.297.410	18,25

Laba Kotor

Laba Kotor Perseroan di tahun 2018 tercatat sebesar Rp3,60 triliun, naik sebesar Rp728,49 miliar atau 25,33% dibanding Laba Kotor 2017 yang sebesar Rp2,88 triliun, yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan bersih sebesar 19,03%.

Tabel Laba Kotor

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			(RP)	%
(1)	(2)	(3)	2-3	5 = 4/3
Pendapatan bersih	31.158.193.498	26.176.403.026	4.981.790.472	19,03
Beban pokok pendapatan	(27.553.466.348)	(23.300.168.938)	(4.253.297.410)	18,25
Laba kotor	3.604.727.150	2.876.234.088	728.493.062	25,33

Laba Sebelum Pajak

Pada tahun 2018, Laba Sebelum Pajak mengalami kenaikan sebesar 61,29% menjadi 2,36 triliun. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya pertumbuhan pada laba kotor sebesar 25,33%.

Tabel Laba Sebelum Pajak

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			(RP)	%
(1)	(2)	(3)	2-3	5 = 4/3
Laba Kotor	3.604.727.150	2.876.234.088	728.493.062	25,33
Beban Penjualan	(10.445.343)	(9.958.720)	(486.623)	4,89
Beban Umum dan Administrasi	(775.299.502)	(666.714.154)	(108.585.348)	16,29
Pendapatan Lain-Lain	1.122.197.667	416.734.338	705.463.329	169,28
Beban Lain-lain	(106.482.566)	(295.507.893)	189.025.327	(63,97)
Beban dari Pendanaan	(972.528.679)	(677.973.460)	(294.555.219)	43,45
Beban Pajak Penghasilan Final	(726.942.503)	(629.479.208)	(97.463.295)	15,48
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	(309.628.664)	(123.644.382)	(185.984.282)	150,42
Bagian Laba Entitas Ventura Bersama	533.031.374	572.700.749	(39.669.375)	(6,93)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.358.628.934	1.462.391.358	896.237.576	61,29

Beban Pajak Penghasilan

Beban Pajak Penghasilan Perseroan di tahun 2018 tercatat sebesar Rp285,33 miliar, naik sebesar Rp179,05 miliar atau 168,48% dibanding Beban Pajak Penghasilan 2017 yang sebesar Rp106,28 miliar, yang disebabkan meningkatnya beban pajak kini sebesar 78,24%.

Tabel Beban Pajak Penghasilan

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			(RP)	%
(1)	(2)	(3)	2-3	5 = 4/3
Beban Pajak Kini	(202.780.772)	(113.767.247)	(89.013.525)	78,24
Pajak Tangguhan	(83.177.853)	7.491.378	(90.669.231)	(1.210,31)
Jumlah	(285.329.070)	(106.275.869)	(179.053.201)	168,48

Laba Bersih Tahun Berjalan

Di tahun 2018, Perseroan membukukan Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp2,07 triliun, mengalami kenaikan 52,89% dibandingkan Laba Bersih tahun 2017 sebesar Rp1,36 triliun. Peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan pada pendapatan usaha sebesar 19,03%.

Tabel Laba Bersih Tahun Berjalan

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			(RP)	%
(1)	(2)	(3)	2-3	5 = 4/3
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	2.358.628.934	1.462.391.358	896.237.576	61,29
Beban Pajak Penghasilan	(285.329.070)	(106.275.869)	(179.053.201)	168,48
Laba Bersih	2.073.299.864	1.356.115.489	717.184.375	52,89

Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan

Di tahun 2018, Perseroan membukukan Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp2,21 triliun, naik 69,17% dibanding 2017 tercatat sebesar Rp1,30 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan keuntungan aktuarial atas program imbalan pasti sebesar Rp187,89 miliar.

Tabel Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			(RP)	%
(1)	(2)	(3)	2-3	5 = 4/3
Laba Bersih	2.073.299.864	1.356.115.489	717.184.375	52,89
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya yang tidak Direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan (Kerugian) aktuarial atas program imbalan kerja pasti	140.243.105	(47.649.429)	187.892.534	394,32
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan	2.213.542.969	1.308.466.060	905.076.909	69,17

Laba Bersih Per Saham Dasar

Pada tahun 2018, Laba Bersih Per Saham Dasar mengalami peningkatan sebesar 43,94%. Adapun Laba Bersih Per Saham Dasar pada 2018 sebesar Rp193,02 triliun, sedangkan Laba Bersih Per Saham Dasar pada 2017 sebesar Rp134,10 triliun.

Tabel Laba Bersih Per Saham Dasar

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			(RP)	%
(1)	(2)	(3)	2-3	5 = 4/3
Laba yang Diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk	1.730.256.243	1.202.069.175	528.187.068	43,94
Jumlah rata- rata tertimbang saham biasa untuk tujuan laba per saham dasar	8.963.932.872	8.963.932.872	0	0,00
Laba bersih per saham (Rupiah penuh)	193,02	134,10	58,92	43,94

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Dengan arus kas operasi yang kuat, Perseroan memiliki posisi solid untuk tumbuh di masa depan. Hal tersebut tercermin dalam pengungkapan dalam arus kas sebagai berikut.

Tabel Arus Kas Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	2017	PERTUMBUHAN	
			(RP)	%
(1)	(2)	(3)	2-3	5 = 4/3
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.722.531.219	1.885.252.166	837.279.053	44,41
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.917.957.798)	(2.637.548.255)	(2.280.409.543)	86,46
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	4.876.802.750	2.727.823.454	2.148.979.296	78,78
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	2.681.376.171	1.975.527.365	705.848.806	35,73
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing	38.612.091	8.251.266	30.360.825	367,95
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	11.253.778.215	9.269.999.584	1.983.778.631	21,40
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	13.973.766.477	11.253.778.215	2.719.988.262	24,17

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi di 2018 sebesar Rp2,72 triliun, meningkat sebesar Rp837,28 miliar atau 44,41% dari tahun 2017. Peningkatan Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi disebabkan oleh meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi di 2018 tercatat sebesar Rp4,92 triliun, mengalami peningkatan Rp2,28 triliun atau 88,46% dibanding Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi 2017. Peningkatan signifikan penggunaan Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi tersebut karena adanya kenaikan pinjaman jangka panjang kepada entitas asosiasi.

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan di 2018 sebesar Rp4,88 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp2,15 triliun dibanding Arus Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan 2017. Peningkatan ini salah satunya disebabkan oleh penerimaan obligasi Komodo Bonds.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek diukur melalui beberapa rasio antara lain rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek, sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk digunakan untuk mengukur kemampuan memenuhi seluruh kewajiban.

Berikut ini adalah rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dan solvabilitas Perseroan.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas)

Rasio likuiditas 2018 baik diukur dengan menggunakan Rasio Kas, Rasio Lancar dan Rasio Cepat dengan pencapaian secara berurutan antara lain: 49,53%, 154,17%, dan 133,01%. Berdasarkan besarnya rasio lancar, bahwa kemampuan Perseroan dalam membayar utang di 2018 masih relatif baik.

Tabel Likuiditas

URAIAN	2018 (%)	2017 (%)	PERUBAHAN (%)
(1)	(2)	(3)	2-3
Rasio Kas	49,53	43,40	6,13
Rasio Lancar	154,17	134,40	19,77
Rasio Cepat	133,01	127,99	5,02

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas)

Rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membayar kewajiban-kewajibannya antara lain dapat diukur melalui rasio liabilitas terhadap ekuitas, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, dan rasio liabilitas terhadap aset, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

Tabel Solvabilitas

URAIAN	2018 (%)	2017 (%)	PERUBAHAN (%)
(1)	(2)	(3)	2-3
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas	2,44	2,12	0,32
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Aset	0,71	0,68	0,03
Rasio Utang Berbunga terhadap Ekuitas	0,79	0,62	0,17
Rasio Ekuitas terhadap Jumlah Aset	0,29	0,32	(0,03)

Total hutang yang dimiliki Perseroan masih dapat tertutup oleh seluruh aset yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa solvabilitas Perseroan dalam kondisi baik.

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Rasio perputaran piutang tahun 2018 mengalami penurunan dari 69 hari di tahun 2017 menjadi 63 hari di tahun 2018, atau mengalami perubahan selama 6 hari.

Tabel Tingkat Kolektibilitas Piutang

URAIAN	2018	2017	PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	2-3
Aktivitas			
Periode Penagihan (hari)	63	69	(6)

Lodgement Aljazair



STRUKTUR MODAL

KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL DAN DASAR PEMILIHAN

Perseroan memiliki kebijakan untuk menitikberatkan penggunaan Liabilitas sebagai sumber modalnya. Sampai dengan 2018, struktur Modal WIKA masih didominasi oleh Liabilitas. Dalam rangka pengembangan usaha tahun 2018, Perseroan melakukan kebijakan struktur modal dengan penambahan liabilitas sebesar Rp10,96 triliun dan penambahan ekuitas sebesar Rp2,58 triliun.

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Komposisi struktur modal di 2018 yang dimiliki oleh Perseroan adalah 70,93% berasal dari Liabilitas dan 29,07% berupa Ekuitas, komposisi ini mengalami perubahan jika dibandingkan dengan 2017. Komposisi struktur modal yang berasal dari Liabilitas mengalami peningkatan 35,30% sedangkan Ekuitas meningkat 17,66% Sehingga, secara keseluruhan total modal yang diinvestasikan Perseroan meningkat sebesar 29,65%.

Tabel Rincian Struktur Modal

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	2018	PERSENTASE TOTAL MODAL (%)	2017	PERSENTASE TOTAL MODAL (%)	PERUBAHAN	
					NOMINAL	%
Liabilitas	42.014.686.674	70,93	31.051.949.689	67,97	10.962.736.985	35,30
Ekuitas	17.215.314.565	29,07	14.631.824.613	32,03	2.583.489.952	17,66
Total Modal Liabilitas dan Ekuitas	59.230.001.239	100	45.683.774.302	100	13.546.226.937	29,65



IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

NAMA PIHAK

Terdapat Ikatan investasi/kredit yang digunakan oleh Perseroan untuk membiayai investasi pengembangan yaitu sebagai berikut:

1. Pinjaman Sindikasi – Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, merupakan fasilitas kredit investasi yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran modal kerja secara umum dari proyek infrastruktur dengan nilai sebesar Rp5 triliun.
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., memberikan fasilitas kredit modal kerja revolving kepada WIKA Beton dengan nilai sebesar Rp400 miliar.
3. PT Bank CIMB Niaga Tbk., memberikan fasilitas kredit pinjaman transaksi khusus 4 (on liquidation) kepada WIKA Realty dengan total nilai fasilitas sebesar Rp282 miliar.
4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., memberikan fasilitas kredit investasi jangka panjang yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan pembangkit listrik tenaga Gas (PLTG) dengan limit sebesar Rp349,2 miliar.
5. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Indonesia Eximbank, memberikan fasilitas kredit jangka Panjang yang digunakan untuk pembiayaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan limit sebesar Rp232,8 miliar.
6. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk., memberikan fasilitas pinjaman Rekening Koran sebesar Rp3 miliar dan Kredit Investasi sebesar Rp12 miliar kepada WIKA Bitumen.

TUJUAN IKATAN

Perseroan dalam memperkuat kegiatan usaha melalui pilar bisnis investasi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan dan pertumbuhan Perseroan kedepan. Kegiatan investasi yang dilakukan saat ini melalui:

1. Pembelian Aset Tetap, yang berupa peralatan konstruksi, Land Bank dan Bangunan dan Prasarana Penunjang.
2. Penyertaan modal, yang berupa tambahan penyertaan pada Entitas Anak maupun Entitas Asosiasi yang bertujuan untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan profitabilitas.
3. Pengembangan Usaha modal, yang berupa pengembangan usaha baru yang mendukung strategi backward dan forward Perseroan seperti pengembangan sarana transportasi, pengembangan infrastruktur pelabuhan, pengembangan pembangkit listrik, pengembangan kawasan baik industri maupun hunian dan pengembangan pengolahan air bersih.

Keikutsertaan Perseroan didalam proyek proyek investasi yang dimasukinya diharapkan juga memberikan sumbangan dalam membantu pencapaian target Pemerintah diantaranya dalam bidang ketahanan energi, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan daya saing industri serta mengurangi ketergantungan atas barang import.

SUMBER DANA

Sumber Dana yang digunakan untuk memenuhi investasi berasal dari sumber dana internal maupun eksternal, sumber dana tersebut dapat berupa kas/modal sendiri, dana dari rights issue, dana dari penerbitan obligasi (MTN dan Global IDR Bond), penerbitan Surat Berharga Perpetual maupun pinjaman bank/lembaga keuangan lainnya.

MATA UANG

Transaksi yang dilakukan dalam rangka pengikatan material untuk belanja modal adalah dalam mata uang Rupiah atau dalam mata uang lainnya yang telah disepakati didalam perjanjian.

LANGKAH PERLINDUNGAN RISIKO MATA UANG

Dalam melakukan transaksi investasi, Perseroan dapat menggunakan mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang telah disepakati didalam perjanjian. Apabila Perseroan menggunakan mata uang selain Rupiah, maka terdapat risiko nilai tukar (currency exposure), dalam hal ini Perseroan selaku kontraktor memiliki beberapa sumber penerimaan dalam bentuk mata uang asing, apabila memiliki eksposur maka secara natural dapat terpenuhi dari penerimaan mata uang asing (natural hedge).

INVESTASI BARANG MODAL

Jenis dan Nilai investasi Barang Modal

Salah satu peranan yang sangat penting dalam mengembangkan Perseroan adalah dengan melakukan investasi. Investasi Barang Modal (Capital Expenditure) merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah Aset atau Investasi yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

Perseroan melakukan investasi barang modal yaitu melalui investasi penyertaan, investasi aset tetap dan investasi pengembangan. Investasi barang modal Perseroan sepanjang tahun 2018 terealisasi sebesar Rp8,02 triliun, yang terdiri dari investasi aset tetap sebesar Rp552 miliar, investasi penyertaan sebesar Rp7,28 triliun dan investasi pengembangan bisnis sebesar Rp182 miliar.

Tabel Realisasi Belanja Modal Tahun 2018

(dalam miliar Rupiah)

JENIS	REALISASI BELANJA MODAL
Investasi Aset Tetap	552
Tambahan Penyertaan	7.283
Pengembangan Bisnis	182
Jumlah	8.017

TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Pembelian barang modal tersebut bertujuan mendukung dan menunjang aktivitas operasional kegiatan Perseroan secara menyeluruh.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET PADA AWAL TAHUN BUKU DAN REALISASINYA

PENCAPAIAN TARGET 2018

Pencapaian target di 2018 menunjukkan hasil yang baik. Meskipun pencapaian target Kontrak Baru sedikit di bawah target yaitu sebesar 88,32%, akan tetapi pencapaian target laba bersih yaitu sebesar 110,50%

Beberapa komponen belum melampaui yang ditargetkan dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi Perseroan. Ke depannya, Perseroan akan senantiasa melakukan evaluasi pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, sehingga kinerja Perseroan di masa yang akan datang akan senantiasa mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

Tabel Perbandingan Target RKAP 2018 dan Realisasi (dalam miliar Rupiah)

(dalam miliar rupiah)

URAIAN	TARGET RKAP 2018	REALISASI 2018	PENCAPAIAN TARGET (%)	DEVIASI (%)
Kontrak Dihadapi	130.925	123.513	94,34	(5,66)
Kontrak Baru	57.428	50.560	88,32	(11,68)
Penjualan	39.438	31.158	79,01	(20,99)
Laba Bersih	1.876	2.073	110,50	10,50



PLTMG Maumere 40MW

PROSPEK USAHA

PROYEKSI 2019

Manajemen Perseroan telah menyusun Rencana Bisnis Perseroan untuk tahun 2019 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2019, baik dari segi makro maupun mikro. Rencana Bisnis Perseroan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Tabel Proyeksi

(dalam miliar rupiah)

URAIAN	REALISASI 2018	PROYEKSI 2019	%
Kontrak Dihadapi	123.513	145.543	17,84
Kontrak Baru	50.560	61.743	22,12
Penjualan	31.158	42.132	35,22
Laba Bersih	2.073	3.010	45,20

ASUMSI DALAM MENYUSUN PROYEKSI

Asumsi perencanaan yang digunakan dalam penyusunan RKAP Tahun 2019 mencakup beberapa indikator ekonomi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,3%
2. Inflasi 3,5%
3. Nilai Tukar Rp/USD 14.400
4. Suku Bunga SPN 5,3%
5. Harga Minyak US\$/barrel 70
6. Lifting Minyak ribu barrel/hari 750
7. Lifting Gas ribu barrel/hari 1.250



INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN KEUANGAN

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

DAMPAK PERISTIWA

Tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal periode laporan keuangan.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan yang berpengaruh terhadap posisi keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 serta tidak berdampak terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Dengan demikian, Perseroan tidak menyajikan informasi tentang kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

ASPEK PEMASARAN

STRATEGI PEMASARAN TAHUN 2018

Perekonomian domestik pada 2018 menghadirkan kondisi ekonomi yang kondusif bagi pengembangan bisnis Perseroan. Dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan secara maksimal, Perseroan menjalankan beberapa strategi pemasaran sebagai berikut:

1. Creative/Inisiator untuk proyek-proyek skala besar (diatas Rp500 miliar) dengan mengutamakan Sinergi BUMN baik Investasi, Availability Payment dan Turn Key Project.
2. Memperluas network proyek-proyek pasar swasta
3. Integrasi dengan konsultan perencana ternama untuk proyek-proyek Design and Build.
4. Menciptakan proyek dengan penawaran konsep ke owner.
5. Menyasar proyek-proyek Multiplier Effect.

PANGSA PASAR

Sesuai dengan data BPS, total pasar proyek konstruksi kurang lebih sebesar Rp1.101,71 triliun di tahun 2018. Sedangkan total perolehan proyek Perseroan di tahun 2018 adalah sebesar Rp50,56 triliun. Dengan demikian, pangsa pasar Perseroan di 2018 adalah kurang lebih sebesar 4,8%.

Pelanggan Perseroan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok utama, yaitu Pemerintah, BUMN dan swasta. Tabel berikut memperlihatkan kontribusi perolehan kontrak dari masing-masing kelompok selama 2 tahun terakhir.

Tabel Perolehan Kontrak Baru

(dalam miliar Rupiah)

	2018	2017
BUMN	20.738,67	10.088,07
Swasta	22.567,35	24.824,31
Pemerintah	7.254,16	7.489,81

Sampai akhir tahun 2018, Perseroan mendapatkan kontrak baru sebesar Rp50.560 miliar. Secara penguasaan pasar, omset kontrak tersebut berasal dari proyek swasta sebesar Rp22.567 miliar, atau 44,63%, proyek pemerintah sebesar Rp7.254 miliar, atau 14,35% dan proyek BUMN sebesar Rp20.739 atau 41,02%.

Dalam upaya untuk mewujudkan visi untuk menjadi salah satu perusahaan terbaik di bidang EPC di Asia Tenggara di tahun 2020, Perseroan akan terus berupaya mengejar berbagai peluang bisnis dalam industri konstruksi baik di Indonesia maupun negara-negara lainnya. Perseroan juga telah mengembangkan pangsa pasar konstruksi ke sejumlah negara seperti Aljazair, Filipina, Malaysia, Myanmar, Timor Leste, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Taiwan dan Niger.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

INVESTASI

Informasi mengenai investasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. disajikan sebagai berikut.

NO	NAMA TINDAKAN KORPORASI	NILAI TRANSAKSI (RP)	KETERANGAN	PERIODE PELAKSANAAN
1	Setoran modal ke PT WIKA Realty	1.440.000.000.000	Penyertaan Modal	2018
2	Setoran modal ke PT WIKA Bitumen	63.000.000	Penyertaan Modal	2018
3	Setoran modal ke PT WIKA Industri Konstruksi	1.080.000.000.000	Penyertaan Modal	2018
4	Setoran modal ke PT WIKA Serang Panimbang	1.279.000.000.000	Penyertaan Modal	2018
5	Setoran modal ke PT Prima Terminal Petikemas	21.000.000.000	Penyertaan Modal	2018
6	Setoran modal ke PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	2.000.000.000	Penyertaan Modal	2018
7	Setoran modal ke PT Jasamarga Manado Bitung	23.000.000.000	Penyertaan Modal	2018
8	Setoran modal ke PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	419.000.000.000	Penyertaan Modal	2018
9	Setoran modal ke PT Citra Marga Lintas Jabar	18.000.000.000	Penyertaan Modal	2018

EKSPANSI

Pada 2018, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. melakukan ekspansi berupa penambahan setoran modal kepada anak perusahaan PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi fabrikasi baja.

DIVESTASI

Pada tahun 2018 tidak terdapat aktivitas divestasi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai transaksi dan sumber dana dari divestasi.

AKUISISI

Selama tahun 2018, Perseroan tidak melakukan kegiatan Akuisisi.

RESTRUKTURISASI UTANG DAN MODAL

Selama tahun 2018, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. melakukan transaksi restrukturisasi utang melalui penerbitan Global IDR Bond dan restrukturisasi modal melalui penerbitan Surat Berharga Perpetual.

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

WIKA memiliki komitmen dan kontinjensi. Ikhtisar komitmen dan kontinjensi Perseroan yang dinyatakan dalam nilai kontrak telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian perseroan pada halaman 200-204.

KEBIJAKAN DIVIDEN

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan berusaha untuk memperhatikan hak para pemegang saham tanpa mengabaikan kondisi keuangan Perseroan. Keputusan pembagian dividen Perseroan dikaitkan dengan, antara lain laba bersih yang didapat pada tahun fiskal dan kewajiban Perseroan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku serta kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ke depan dan rencana ekspansi dalam keputusan pembagian dividen.

PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Pembagian Dividen dilaksanakan berdasarkan Keputusan RUPS sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Tabel Pembayaran Dividen Tahun Buku 2016-2017

URAIAN	TAHUN BUKU 2017	TAHUN BUKU 2016
Laba Bersih (Rp)	1.202.069.175.063	1.011.827.718.000
Dividen (Rp)	240.413.755.299	303.548.348.024
Dividen Per Saham (Rp)	26,82012	33,8633
Dividend Pay Out Ratio (%)	20%	30%
Tanggal Pengumuman	26 April 2018	20 Maret 2017
Tanggal Pembayaran	25 Mei 2018	18 April 2017

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 24 April 2018 menetapkan penyetoran dividen sebesar Rp240.413.755.299 untuk tahun buku 2017. Pembayaran dividen tahun buku 2017 dilakukan pada tanggal 25 Mei 2018. Adapun untuk penetapan dividen tahun buku 2018 akan diputuskan pada RUPS tahunan 2019.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Pelaksanaan Employee Stock Ownership Program (ESOP) dan Management Stock Ownership Program (MSOP) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. mengacu pada Surat Perseroan ke Bursa Efek Indonesia No.PU.01.09/A.DIR.0421/2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Laporan Rencana Pelaksanaan ESOP/MSOP PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Pelaksanaan Program ESOP/MSOP dilaksanakan dengan menerbitkan Hak Opsi dalam 2 tahap dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah Hak Opsi yang diterbitkan adalah masing-masing sebanyak 153.846.000 lembar saham seri B setiap tahap dengan harga pelaksanaan ESOP/MSOP per saham Rp 322,74.
- Hak Opsi Tahap Pertama dan Kedua dapat digunakan untuk membeli saham Seri B baru Perseroan setelah melewati masa tunggu selama 1 (satu) tahun. Hak Opsi yang diberikan dapat digunakan pada Periode Pelaksanaan yang telah ditetapkan terhitung tanggal 29 Oktober 2007 dan telah berakhir pada 30 hari bursa dimulai sejak 13 Mei 2013 pada Tahap Pertama. Tahap Kedua pelaksanaan ditetapkan tanggal 29 Oktober 2008 dan telah berakhir pada 30 hari bursa sejak tanggal 14 Mei 2014.
- Saham yang didistribusikan berasal dari saham dalam portofolio, dan bukan merupakan saham yang telah diterbitkan atau dibeli kembali oleh Perseroan.



REALISASI PENGGUNAAN DANA DAN REALISASI PMHMETD S/D 31 DESEMBER 2018

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

RENCANA PENGGUNAAN		REALISASI	SISA
URAIAN	NILAI		
Belanja Modal	4.322.758.255.934	2.151.033.059.437	2.171.725.196.497
Modal Kerja	1.785.420.712.462	1.764.291.075.844	21.129.636.618
Total	6.108.178.968.396	3.915.324.135.281	2.192.854.833.115

Seluruh dana hasil penawaran umum dimaksud, telah digunakan sesuai rencana penggunaan dana yang diungkapkan dalam Prospektus dan RUPSLB telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat Nomor: SE.01.01/A.SEKPER.00142/2019 tanggal 14 Januari 2019 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. per 31 Desember 2018.



Proyek Pelebaran Jalan Batas Sarawak-Entikong-Balai Karangan-Kembayan

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

KEBIJAKAN MEKANISME REVIEW ATAS TRANSAKSI DAN PEMENUHAN PERATURAN DAN KETENTUAN TERKAIT

Perseroan memiliki kebijakan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi material diputuskan oleh Dewan Komisaris dan senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, transaksi material juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara Independen.

Selama tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi serta tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

KEWAJARAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Seluruh transaksi yang dilakukan pada tahun 2018 dilakukan secara wajar (Arm's Length) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal. Kewajaran transaksi dengan pihak terkait atau mengandung benturan kepentingan telah dilakukan secara wajar sesuai peraturan perundang-undangan. Transaksi dilakukan atas dasar alasan kebutuhan Perseroan dan bebas dari konflik kepentingan.

Terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang didefinisikan antara lain:

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor)

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

- iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

NAMA DAN SIFAT HUBUNGAN BERELASI

Pihak-pihak berelasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau pengelolaan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Perseroan beserta sifat dari transaksi tersebut.

NAMA HUBUNGAN BERELASI

Ikhtisar pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan adalah sebagai berikut.

Tabel Pihak-Pihak Berelasi

NAMA PIHAK BERELASI	SIFAT PIHAK BERELASI	JENIS TRANSAKSI
Bank Indonesia	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Kepemilikan Sama Terikat	Rekening Koran, Pinjaman Dana
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Kepemilikan Sama Terikat	Rekening Koran, Pinjaman Dana
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Kepemilikan Sama Terikat	Rekening Koran, Pinjaman Dana
PT Bank Syariah Mandiri	Kepemilikan Sama Terikat	Rekening Koran, Pinjaman Dana
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Kepemilikan Sama Terikat	Rekening Koran, Pinjaman Dana
PT Bank BRI Syariah	Kepemilikan Sama Terikat	Rekening Koran
PT Bank BNI Syariah	Kepemilikan Sama Terikat	Rekening Koran
PT Utama Karya (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Antam (Persero) Tbk.	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Angkasa Pura Property	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT PLN (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT PP (Persero) Tbk.	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Istaka Karya (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi

NAMA PIHAK BERELASI	SIFAT PIHAK BERELASI	JENIS TRANSAKSI
BPJS Kesehatan	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Utama Karya Infrastruktur	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Waskita Beton Precast Tbk.	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Boma Bisma Indra (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Yodya Karya (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Indah Karya (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Citra Marga Lintas Jabar	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Marga Sarana Jabar	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Kereta Cepat Indonesia China	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Angkasa Pura II (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Kawasan Berikat Nusantara	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Pindad (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Semen Tonasa Indonesia (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Bhandha Ghara Rekso (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Pertamina (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PLTD Ambon (Sewa Mesin)	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
Koperasi Jasa Marga Indonesia	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Industri Nabati Lestari	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi

NAMA PIHAK BERELASI	SIFAT PIHAK BERELASI	JENIS TRANSAKSI
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Nindya Karya (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Indonesia Power	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Semen Padang	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Jakarta River City	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Makassar Coastal City	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Wijaya Karunia Realtindo	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
Koperasi Karyawan WIKA	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi
Koperasi Karyawan Beton Makmur	Kepemilikan Sama Terikat	Jasa Konstruksi

SIFAT PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan adalah pemegang saham utama Perseroan.
2. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup.
4. Entitas yang merupakan perusahaan asosiasi dari Grup;
5. Entitas yang merupakan ventura bersama dari Grup.
6. Manajemen kunci yang meliputi anggota dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
7. Dana Pensiun Wijaya Karya adalah entitas yang didirikan oleh Perseroan untuk mengelola program manfaat imbalan dan iuran pasti Perseroan.

REALISASI TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Adapun nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; serta jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait telah diungkapkan pada Laporan Keuangan Audited Perseroan pada halaman 158-163.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA

Adapun perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap Perseroan beserta dampak serta respon Perseroan terhadap perubahan tersebut selama tahun 2018 adalah sebagai berikut.

REGULASI	POKOK PENGATURAN	DAMPAK TERHADAP PERSEROAN
Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN ("Permen BUMN 02/2017")	- Untuk mempercepat dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan/atau Program Bina Lingkungan dapat memberikan pinjaman tanpa bunga atau hibah dana Program Kemitraan kepada BUMN di bidang jasa keuangan yang khusus didirikan (BUMN Khusus) untuk melakukan pinjaman permodalan dan/atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil. - Dalam pelaksanaan Permen tersebut, RUPS telah memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -	Perseroan dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan/atau Program Bina Lingkungan Tahun 2019 akan mengalokasikan dana Program Kemitraan yang akan dihibahkan kepada BUMN Khusus untuk melakukan pinjaman permodalan dan/atau pembinaan kepada usaha mikro dan kecil. Dalam pelaksanaannya Perseroan akan mencatatkan sebagai biaya pada laporan keuangan PKBL Perseroan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) SERTA INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

Alasan Penerapan

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan dilakukan untuk mematuhi PSAK yang berlaku dalam tahun berjalan, Perseroan telah menerapkan sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018.

Perubahan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Amandemen dan penyesuaian atas standar, serta Interpretasi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

1. PSAK 22 (Penyesuaian 2018): "Kombinasi Bisnis"
2. PSAK 24 (Amandemen 2018): "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program"
3. PSAK 26 (Penyesuaian 2018): "Biaya Pinjaman"
4. PSAK 46 (Penyesuaian 2018): "Pajak Penghasilan"
5. PSAK 66 (Penyesuaian 2018): "Pengaturan Bersama"
6. ISAK 33: "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"
7. ISAK 34: "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

1. PSAK 71: "Instrumen Keuangan"
2. PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
3. PSAK 73: "Sewa"
4. PSAK 62 (Amandemen 2017): "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi"
5. PSAK 15 (Amandemen 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
6. PSAK 71 (Amandemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

Dampak Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Penerapan amandemen dan interpretasi standar tahun 2018 tidak berdampak pada kinerja atau posisi keuangan konsolidasian Perseroan. Untuk dampak standar penyesuaian dan interpretasi tahun 2019-2020 terhadap laporan keuangan konsolidasian masih dalam proses penelaahan/pengkajian yg dilakukan oleh Perseroan.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Berdasarkan hasil penilaian manajemen atas kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usaha di masa yang akan datang, dapat disimpulkan bahwa Perseroan tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

ASSESSMENT MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen secara rutin melakukan evaluasi dan assessment terkait hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha. Evaluasi antara lain dilakukan melalui analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) dimana analisis ini melihat faktor internal, beserta mengidentifikasi faktor secara eksternal melalui Kesempatan (Opportunity) dan Ancaman (Threat) yang bertujuan sebagai asumsi dasar kelangsungan bisnis Perseroan dalam menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASSESSMENT

Dalam melaksanakan penilaian atas kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usaha di masa yang akan datang, digunakan beberapa asumsi dan pertimbangan. Asumsi dan pertimbangan tersebut, antara lain analisis SWOT, kinerja keuangan, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, permasalahan internal dan perkara hukum yang dihadapi, serta kondisi ekonomi mikro dan makro pada saat ini dan masa yang akan datang.

TINGKAT KESEHATAN

Realisasi tingkat kesehatan Perseroan tahun 2018 perhitungannya berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 adalah sebagai berikut.

NO	URAIAN	BOBOT	REALISASI	
			2018	2017
I	Aspek Keuangan			
1	Imbalan Kepada Pemegang Saham/ROE (%)	20,00	18,00	14,00
2	Imbalan Investasi/ROI (%)	15,00	6,00	6,00
3	Rasio Kas (%)	5,00	5,00	5,00
4	Rasio Lancar (%)	5,00	5,00	5,00
5	Periode Koleksi (hari)	5,00	4,50	4,50
6	Perputaran Persediaan (hari)	5,00	5,00	5,00
7	Perputaran Total Aset (%)	5,00	3,00	3,50
8	Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (%)/HC	10,00	7,25	7,25
Total Aspek Keuangan		70,00	53,75	50,25
II	Aspek Operasional			
1	Inovasi	5,00	5,00	5,00
2	Customer Satisfaction Index	5,00	4,00	5,00
3	Productivity on Sales/HC Capability Index	5,00	4,00	5,00
Total Aspek Operasional		15,00	13,00	15,00
III	Aspek Administrasi			
1	Laporan Audit	3,00	3,00	3,00
2	Rancangan RKAP	3,00	3,00	3,00
3	Laporan Periodik	3,00	3,00	3,00
4	Kinerja PKBL			
	a. Efektivitas Penyaluran Dana	3,00	3,00	3,00
	b. Kolektabilitas Penyaluran Pinjaman	3,00	3,00	3,00
Total Aspek Administrasi		15,00	15,00	15,00
Total Skor		100,00	81,75	80,25
Kualifikasi			AA	AA
Tingkat Kesehatan			SEHAT	SEHAT

Secara keseluruhan realisasi skor tingkat kesehatan Perseroan pada tahun 2018 adalah sebesar 81,75 lebih tinggi di bandingkan tahun 2017 sebesar 80,25 dengan kualifikasi AA dan SEHAT.

KINERJA ENTITAS ANAK

Sampai dengan tahun 2018, Perseroan telah memiliki 7 (tujuh) entitas anak. Penjelasan mengenai entitas anak disajikan dalam bagian Profil dalam Laporan Tahunan ini. Perseroan hanya menyajikan kinerja entitas anak yang telah melakukan Initial Public Offering (IPO), adapun kinerja entitas anak tersebut disajikan sebagai berikut.

PT WIJAYA KARYA BETON TBK.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta rupiah)

	2018	2017	PERTUMBUHAN	
	(RP)	(RP)	(RP)	(%)
Aset	8.881.778	7.067.976	1.813.802	25,66
Liabilitas	5.744.966	4.320.041	1.424.925	32,98
Ekuitas	3.136.812	2.747.935	388.877	14,15

Total aset PT Wijaya Karya Beton Tbk. tahun 2018 sebesar Rp8,88 triliun meningkat 25,66% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp7,07 triliun, sementara total liabilitas tahun 2018 sebesar Rp5,74 triliun, meningkat 32,98% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp4,32 triliun dan total ekuitas pada tahun 2018 sebesar Rp3,14 triliun meningkat 14,15% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp2,75 triliun.

Laporan Laba Rugi

(dalam juta rupiah)

	2018	2017	PERTUMBUHAN	
	(RP)	(RP)	(RP)	(%)
Pendapatan	6.930.628	5.362.263	1.568.365	29,25
Laba Bersih	486.640	340.459	146.181	42,94

Pendapatan yang diperoleh PT Wijaya Karya Beton Tbk. tahun 2018 sebesar Rp6,93 triliun, meningkat 29,25% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp5,36 triliun, sementara laba bersih tahun 2018 sebesar Rp486.64 miliar, meningkat 42,94% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp340,46 miliar.

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK.**Laporan Posisi Keuangan**

(dalam juta rupiah)

	2018	2017	PERTUMBUHAN	
	(RP)	(RP)	(RP)	(%)
Aset	5.890.230	4.607.728	1.282.502	27,83
Liabilitas	3.753.472	2.883.989	869.482	30,00
Ekuitas	2.136.828	1.723.739	413.089	23,96

Total aset PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. tahun 2018 sebesar Rp5,89 triliun meningkat 27,83% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp4,61 triliun, sementara total liabilitas tahun 2018 sebesar Rp3,75 triliun, meningkat 30,00% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp2,88 triliun dan total ekuitas pada tahun 2018 sebesar Rp2,14 triliun meningkat 23,96% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp1,72 triliun.

Laporan Laba Rugi

(dalam juta rupiah)

	2018	2017	PERTUMBUHAN	
	(RP)	(RP)	(RP)	(%)
Pendapatan	5.822.505	3.899.286	1.923.219	49,32
Laba Bersih	444.499	295.746	148.753	50,30

Pendapatan yang diperoleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. tahun 2018 sebesar Rp5,82 triliun, meningkat 49,32% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp3,90 triliun, sementara laba bersih tahun 2018 sebesar Rp444,50 miliar, meningkat 50,30% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp295,75 miliar.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

224	Komitmen Perusahaan dalam Menerapkan Corporate Governance dan Governance Outcome	306	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi
250	Struktur dan Mekanisme Corporate Governance	314	Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
258	Dewan Komisaris	318	Komite Audit
277	Penilaian Kinerja Direksi dan Komisaris	327	Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG
280	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi	333	Komite Lain dibawah Dewan Komisaris
289	Direksi	334	Fungsi Pemantauan Risiko
298	Penilaian Kinerja Direksi	335	Sekretaris Perusahaan
		337	Satuan Pengawasan Intern



PLTU Cilacap

344 Akuntan Publik	366 Sistem Pelaporan Pelanggaran
346 Manajemen Risiko	368 Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali
350 Sistem Pengendalian Internal	369 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
355 Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik	370 Pencegahan Transaksi Orang Dalam
356 Perkara Penting	371 Buyback Saham dan Buyback Obligasi
358 Akses Informasi dan Data Perusahaan serta Hubungan dengan Stakeholders	372 Kesesuaian Penerapan Corporate Governance Sesuai ASEAN Corporate Governance Scorecard
360 Kode Etik	

KOMITMEN PERUSAHAAN DALAM MENERAPKAN CORPORATE GOVERNANCE DAN GOVERNANCE OUTCOME

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. senantiasa menjunjung tinggi implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Perseroan berupaya untuk terus memelihara integritas dan berbenah diri dalam penerapan komitmen GCG demi mencapai tujuan sebagai sebuah entitas bisnis yang adaptif, berkesinambungan serta berkembang dengan memiliki daya saing.

Demi melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan, Perseroan memastikan bahwa seluruh elemen bertindak sesuai dengan standar etika berperilaku dan berbisnis. Untuk mendukung upaya tersebut, Perseroan membentuk *governance structure*, sebuah kerangka kerja tata kelola perusahaan untuk mengatur hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi serta para pemangku kepentingan lainnya. Dengan mengacu pada kerangka kerja ini, Perseroan menjalankan *Governance Process* dan meraih *Governance Outcome* yang mendukung kesehatan finansial dan pencapaian tujuan Perusahaan sesuai aspirasi pemangku kepentingan.

GOVERNANCE FRAMEWORK

Komitmen Perseroan dalam menerapkan *corporate governance* diwujudkan dalam *Corporate Governance Framework* sebagai berikut:

GOVERNANCE STRUCTURE	GOVERNANCE PROCESS	GOVERNANCE OUTCOME
- Organ Utama - Organ Penunjang - Infrastruktur	- Pemenuhan Hak Pemegang Saham dan Perlakuan yang Sama Kepada Seluruh Pemegang Saham. - Pemenuhan Hak Para Pemangku kepentingan. - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. - Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan.	- Mengoptimalkan nilai Perseroan sehingga memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. - Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, efisien, dan efektif dan meningkatkan kemandirian Organ Perseroan. - Mendorong Organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan hidup. - Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional. - Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

DASAR PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan GCG di Perseroan mengacu kepada beberapa ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero);
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan perubahannya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
5. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;



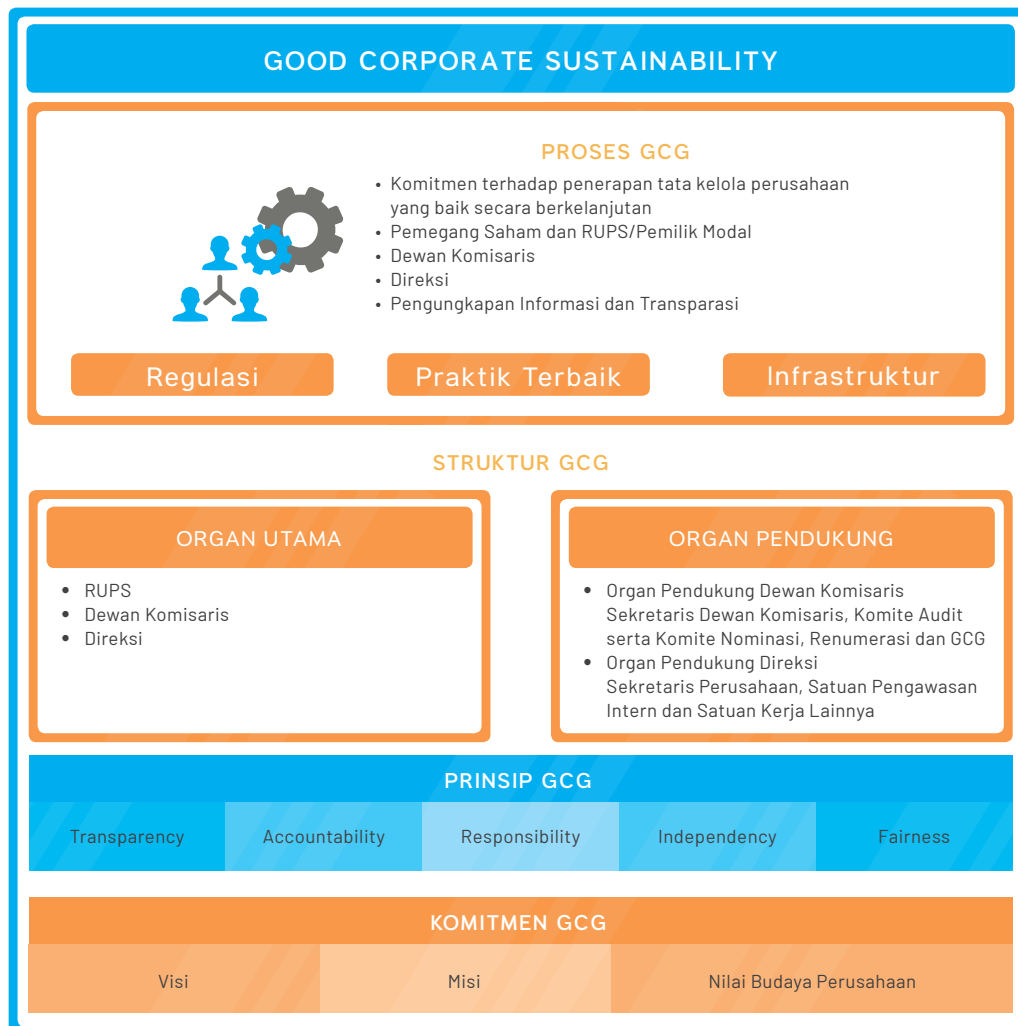
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

Selain itu, untuk lebih mengefektifkan implementasi GCG, Perseroan juga melakukan praktik-praktik bisnis terbaik yang mengacu:

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* untuk *State Owned Company* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD); dan
2. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.

3. Penerapan GCG dengan melihat indeks terkait tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).
4. Penilaian penerapan bisnis ekselen melalui Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) khususnya pelaksanaan tata kelola dan kepemimpinan.
5. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Tahun 2006.

Internalisasi dari berbagai Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman tersebut ke dalam kebijakan internal Perseroan merupakan komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh *human capital* Perseroan. Komitmen terhadap penerapan GCG tersebut ditunjukkan sebagai berikut:



Komitmen Perseroan dalam menerapkan GCG ditunjukkan komitmen perseroan dalam menerapkan GCG ditunjukkan dengan senantiasa berpegang pada asas-asas GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness, dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi perseroan. Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Perseroan senantiasa berpegang pada asas-asas GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness*.

Berdasarkan asas-asas GCG, Perseroan mengembangkan struktur GCG yang meliputi organ utama dan organ pendukung guna menjalankan mekanisme GCG sesuai Peraturan Perundang-undangan serta *best practices* yang ada. Dengan mendasarkan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-

prinsip GCG, diharapkan akan tercipta kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

GOVERNANCE OUTCOME

Efektivitas penerapan GCG tercermin dari *governance outcome* yang telah diperoleh. Perseroan dan para pemangku kepentingan telah mendapatkan manfaat dari penerapan GCG dengan dicapainya kinerja keuangan maupun operasional yang baik di tahun 2018 sebagai berikut.

1. Penjualan mencapai Rp31,16 triliun;
2. Laba Bersih mencapai Rp2,07 triliun;
3. Kontrak Dihadapi mencapai Rp130,61 triliun;
4. Kontrak Baru mencapai Rp58,11 triliun.

Di samping itu, hasil dari implementasi GCG juga terlihat dari kepercayaan pihak eksternal kepada Perseroan, antara lain:

1. Terbaik ke-3 BUMN dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard, Februari dari RSM.
2. Kategori Platinum for Very Excellence, Grade A in Indonesia GCG Award 2018 yang diselenggarakan oleh Economic Review dan IPMI, 2 November 2018.
3. The Most Trusted Company in Corporate Governance Perception Index dari Indonesia Institute for Corporate Governance dan SWA.
4. Top 4 Social Business Innovation Company 2018 Category Building Construction di Green CEO Award 2018 ke-7, 27 September 2018.
5. Excellence Company for Product and Business Process Innovation dalam Indonesia Most

Innovative Business Award 2018, dari Warta Ekonomi, 23 Maret 2018.

6. Peringkat 3 Kategori Platinum Indonesia CSR Award dari Economic Review 2018, 23 Februari 2018.
7. Top 5 GCG Issues in Construction Sector, 26 Oktober 2018 dalam Indonesia Corporate Secretary Award 2018 dari Warta Ekonomi.

Berikut adalah penghargaan yang diterima oleh PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. dari Januari – Desember 2018. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kekuatan di setiap elemen bisnis WKA menarik perhatian publik dan apresiasi diberikan kepada perusahaan, dan menjadi kebanggaan WKA sebagai perusahaan yang selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk *Stakeholder*.

NO	NAMA PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	WAKTU PENGANUGERAHAN	PEMBERI PENGHARGAAN
01	Asia Sustainability Report 2017 Kategori Asia's Most Tranparent Report	Corporate Award	6 Februari 2018	CSR Works International
02	Top 2 Best Sustainability Report 2017 Kategori Infrastruktur di Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) 2017	Corporate Award	24 Februari 2018	Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP)
03	Pembayar Pajak Terbesar	Corporate Award	13 Maret 2018	Ditjen Pajak
04	Excellent Company for Product and Business Process Innovation in Construction and Building Sector.	Corporate Award	23 Maret 2018	Warta Ekonomi
05	Penghargaan Ramah Lingkungan untuk Proyek Dermaga Sorong	Corporate Award	14 April 2018	Pemerintah Kota Sorong
06	Best Partnership Program and Community Development in Construction Category	Corporate Award	30 April 2018	Warta Ekonomi
07	Pencapaian 2.000.000 Jam Kerja Selamat Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Halmahera Timur (P3FH)	Corporate Award	4 Juni 2018	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.
08	Apresiasi Penghargaan Pencapaian 1.000.000 Jam Kerja Selamat Proyek EPCC Pengembangan dan Modernisasi Pabrik Gula Assemagoes Situbondo	Corporate Award	7 Juni 2018	PTPN XI
09	Index 25 Perusahaan SRI KEHATI 2018 Indonesia Green Company Achievement	Corporate Award	11 Juli 2018	Majalah SWA
10	Top 2 Strategi Pertumbuhan Terbaik Kategori BUMN Tbk.	Corporate Award	9 Agustus 2018	BUMN Track
11	Excellence in Interpersonal Relationship	CEO Award	9 Agustus 2018	BUMN Track

NO	NAMA PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	WAKTU PENGANUGERAHAN	PEMBERI PENGHARGAAN
12	Champion for ASEAN 2018 Sektor Konstruksi	Corporate Award	6 September 2018	Mark Plus
13	PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. atas dukungan dan dedikasi yang luar biasa dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga serta infrastruktur pendukung lainnya dalam penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018	Corporate Award	10 September 2018	Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Pengarah Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018
14	Social Business Innovation Award Kategori Building Construction	Corporate Award	27 September 2018	Warta Ekonomi
15	Green CEO Award	CEO Award	27 September 2018	Warta Ekonomi
16	Golden Thropy Award	Corporate Award	30 September 2018	Info Bank Magazines
17	Juara I pada Kategori Advancements in Environmental Engineering pada Proyek Landside Disaster Protection Project on the National Road Network 2018 dalam Year in Infrastructure 2018 Award	Corporate Award	19 Oktober 2018	Bentley
18	Juara I pada Kategori Advancements in Bridges pada Proyek Design and Build of Road Bridge at Teluk Lamong Port Project 2018 dalam Year in Infrastructure 2018 Award	Corporate Award	19 Oktober 2018	Bentley
19	Indonesia Corporate Secretary Award, Top 5 GCG Issues in Construction Sector	Corporate Award	26 Oktober 2018	Warta Ekonomi
20	Pelaporan BHUN 2017 Terbaik	Corporate Award	29 Oktober 2018	Kementerian BUMN
21	Pemenang Terbaik II Kategori Benda Rumah Veteran 2015-2017 di bawah 100 Rumah	Corporate Award	29 Oktober 2018	Kementerian BUMN
22	Indonesia Good Corporate Governance (GCG) Award 2018 dan Operational Excellence Award I 2018 Kategori Public Company	Corporate Award	2 November 2018	Majalah Economic Review di Graha CIMB Niaga
23	Best of The Best versi Majalah Forbes Indonesia	Corporate Award	29 November 2018	Forbes Magazine
24	Best Chief Financial Officer Award 2018	CFO Award	29 November 2018	Majalah SWA
25	The Best Industry Marketing Champion Kategori Konstruksi dalam ajang The Best Marketeer of The Year (MOTY) 2018	Directorship Award	6 Desember 2018	Mark Plus
26	International CFO Innovation Awards 2018 for Excellence in Supply Chain Finance	CFO Award	7 Desember 2018	International CFO
27	Platinum Rank "Asia Sustainability Reporting Rating 2018"	Corporate Award	7 Desember 2018	National Center for Sustainability Reporting
28	Top 50 Big Capitalization Public Listed Company	Corporate Award	10 Desember 2018	Indonesian Institute for Corporate Directorship
29	3 Besar IT Governance Award 2018 Sektor Informasi dan Komunikasi	Corporate Award	19 Desember 2018	FORTI BUMN
30	Indonesia Most Trusted Company 2018	Corporate Award	19 Desember 2018	Majalah SWA dan IICG

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Perseroan menerapkan GCG sesuai standar yang telah ditetapkan. Penerapan GCG Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan perubahannya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.

Pada prinsipnya pelaksanaan penerapan GCG di Perseroan berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh *Human Capital* pada setiap kegiatan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Mekanisme pelaksanaan implementasi GCG digambarkan dalam siklus implementasi berikut.



PENETAPAN STANDAR KUALITAS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Standar implementasi GCG di Perseroan khususnya mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan perubahannya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012; dan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Standar penerapan GCG tersebut meliputi:

1. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan.
2. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal.
3. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
4. Aspek Direksi.

5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi.
6. Aspek lainnya yang antara lain meliputi pelaporan keberlanjutan dan kemampuan Perseroan sebagai *benchmark* dalam bidangnya.

Berikut ini adalah capaian dan kegiatan-kegiatan terkait GCG tahun 2018:

1. Melakukan *self assessment*: skor *self assessment* sebesar 94,949 dengan verifikator Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Menerima 7 penghargaan untuk bidang GCG sepanjang tahun 2018 dan Manajemen, yaitu:
 - Terbaik ke- 3 BUMN dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard , Februari dari RSM.
 - Kategori Platinum for Very Excellence, Grade A in Indonesia GCG Award 2018 yang diselenggarakan oleh Economic Review dan IPMI, 2 November 2018.
 - The Most Trusted Company in Corporate Governance Perception Index dari Indonesia Institute for Corporate Governance dan SWA.
 - Top 4 Social Business Innovation Company 2018 Category Building Construction di Green CEO Award 2018 ke-7, 27 September 2018.
 - Excellence Company for Product and Bussiness Process Innovation dalam Indonesia Most Innovative Business Award 2018, dari Warta Ekonomi, 23 Maret 2018.
 - Peringkat 3 Kategori Platinum Indonesia CSR Award dari Economic Review 2018, 23 Februari 2018.
 - Top 5 GCG Issues in Construction Sector, 26 Oktober 2018 dalam Indonesia Corporate Secretary Award 2018 dari Warta Ekonomi Penghargaan BUMN Performance Excellence Award 2017 dari penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN dengan skor 704,50 dan masuk sebagai "Industry Leader" sekategori dengan Jasa Marga, Telkomsel dan Pertamina, yang diselenggarakan oleh Forum Ekselen BUMN.
3. Menandatangani Pernyataan Benturan Kepentingan Komisaris dan Direksi Tahun 2018-2019.
4. Menandatangani Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan tahun 2018-2019.
5. Menandatangani Pemberlakuan *Board Manual*, *Code of Corporate Governance* dan *Code of Conduct* Edisi 2017-2018.
6. Menandatangani Pedoman *Subsidiary Governance* dengan Surat Keputusan No. SK.02.01/A. DIR.21446/2018 tertanggal 12 Desember 2018 .
7. Melakukan amandemen *Subsidiary Governance* tahun 2018-2019.
8. Membuat video sosialisasi tentang GCG.
9. Mendukung penyusunan *Sustainability Report* Tahun Buku 2017.
10. Mendukung kegiatan RUPST Tahun Buku 2017.
11. Mendukung aspek legal terkait *Management Building*.
12. Mendokumentasikan Dinamika Rapat Direksi, Rapat Direksi, Rapat Direksi Khusus dan GM dan Rapat Komisaris yang menyertakan Direksi sebanyak minimal 12 kali sepanjang 2018.
13. Melakukan pembaharuan desain *website* yang lebih mengakomodasi interaksi dengan publik dan melengkapi materi *Website* WIKA sesuai dengan kriteria ASEAN *Scorecard*.
14. Menyelenggarakan sosialisasi GCG dalam MR Departemen:
 - Sebagai Narasumber pendampingan asesmen GCG di Entitas Anak.
 - Kelas *Indoor* Karyawan Baru, Januari, Juli, September, Desember 2018 sebagai pembicara.
 - Sebagai narasumber Seminar GCG.
 - Sebagai pendamping pengembangan dan penguatan GCG di WIKA Gedung (lumintu jelang IPO).
15. Mengisi Rubrik GCG dalam *Newsletter* WIKA dan WIKAMagz.
16. Menyelenggarakan pertemuan Pelaporan Kegiatan Unit GCG kepada Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dan diskusi persiapan penerapan *Whistle Blowing System* On-Line sebanyak dua kali.
17. Mencapai target 100% pelaksanaan CoC di bulan Desember 2018.
18. Menandatangani serentak seluruh Pedoman dan Kebijakan GCG oleh seluruh Dekom, Direksi *Holding* dan Manajemen WIKA dan Entitas Anak pada 28 Desember 2018.
19. Mengembangkan mekanisme *Whistle Blowing System* dan Pengendalian Gratifikasi (Amandemen dan pemberlakuan SOP yang baru).

PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SE.OJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, pedoman Tata Kelola mencakup 5 aspek, 8 prinsip dan 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Pedoman Tata Kelola adalah standar penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang harus diterapkan Perseroan untuk mengimplementasikan prinsip tata kelola. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut.

PRINSIP	REKOMENDASI	KETERANGAN REKOMENDASI OJK	PENJELASAN PENERAPAN DI WIKA	KETERANGAN
ASPEK 1				
HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM				
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	- Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. - Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.	Perseroan telah mengatur, mengakomodir dan mengaplikasikan penerapan GCG terkait pemenuhan hak-hak dan hubungan dengan Pemegang Saham yang diterapkan secara adil. Berkenaan dengan hal tersebut Pemegang Saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama akan mendapatkan perlakuan yang setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan terhadap hak-hak Pemegang Saham diimplementasikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan setiap Pemegang Saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah presentase saham yang dimilikinya. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 ayat 4 huruf a; yang menyatakan bahwa "para Pemegang Saham memiliki hak yang sama atas setiap 1 saham memberikan 1 hak suara". Turunan atas ketentuan Anggaran Dasar tersebut diimplementasikan melalui prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara yang terdapat dalam Tata Tertib RUPS, dimana Tata Tertib RUPS diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir dan dijelaskan kembali oleh Pimpinan RUPS saat pembukaan RUPS. Perusahaan telah menunjuk pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek dan Notaris dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi. Adapun dalam penerapannya memiliki tata cara sebagai berikut:	Comply

PRINSIP	REKOMENDASI	KETERANGAN REKOMENDASI OJK	PENJELASAN PENERAPAN DI WIKA	KETERANGAN
ASPEK 1				
HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM				
			1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis. 2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. 3. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan: "Mengangkat Tangan" dengan ketentuan sebagai berikut: • Mereka yang memberikan suara, baik Tidak Setuju maupun Blanko/Abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya. • Mereka yang memberikan suara, baik Tidak Setuju maupun Blanko/Abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat terdeteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah. • Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju. • Jika ada yang meninggalkan ruangan Rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat. 4. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.	
	2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham terkait mata acara dalam RUPS.	Perseroan telah membuat Akta Risalah RUPS Tahunan 2018 Nomor 94 Tanggal 26 April 2018 mengungkapkan bahwa seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan turut hadir dalam RUPS Tahunan tersebut.	Comply
	3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	Perseroan telah membuat ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta diumumkan 1 (satu) hari kerja setelah RUPS dari 2 (dua) hari yang dipersyaratkan oleh regulasi, untuk memenuhi informasi kepada Stakeholders yang salah satunya diumumkan melalui website Perusahaan (www.wika.co.id), pada menu Informasi Bagi Pemegang Saham bagian Rapat Umum Pemegang Saham.	Comply

PRINSIP	REKOMENDASI	KETERANGAN REKOMENDASI OJK	PENJELASAN PENERAPAN DI WIKA	KETERANGAN
ASPEK 1				
HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM				
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Di samping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemegang Saham Perseroan wajib memperlakukan Pemegang Saham secara adil, sesuai dengan <i>Code of Conduct</i> Perseroan (yang dapat diakses pada web www.wika.co.id), Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan.	Comply
	5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	Kebijakan terkait komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor terdapat pada <i>Code of Conduct</i> yang telah diunggah dalam <i>website</i> Perusahaan, pada Menu <i>Home website</i> bagian <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Investor Relations</i> yang terdapat berbagai macam Manual Kebijakan, Komitmen dan Laporan Perusahaan dan dapat diunduh dari <i>website</i> Perusahaan. Selain itu di dalam <i>website</i> Perusahaan juga tersedia alamat penanggung jawab <i>representative</i> serta nomor telepon Perusahaan yang dapat dihubungi.	Comply
ASPEK 2				
FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS				
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda di antara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Penentuan jumlah dan penetapan/pengangkatan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan, yang mengacu pada Peraturan yang berlaku dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015, Anggaran Dasar Perusahaan dan <i>Board Manual</i> .	Comply

PRINSIP	REKOMENDASI	KETERANGAN REKOMENDASI OJK	PENJELASAN PENERAPAN DI WIKA	KETERANGAN
ASPEK 2				
FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS				
	7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan mempertimbangkan komposisi Komisaris Independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten/Perusahaan Publik dan Nomor 34 tahun 2014 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 yang telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan berdasarkan usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, memiliki komposisi yang cukup beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menerapkannya di dalam Perusahaan, Dewan Komisaris mengacu pada Rencana Kerja Dewan Komisaris yang diturunkan kembali pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 69/DK/WIKA/2018 terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian saran oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka yang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan latar belakang keahlian dan riwayat pekerjaan anggota Dewan Komisaris. Komposisi anggota Dewan Komisaris merupakan hak dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Selama Tahun 2018, Dewan Komisaris WIKA memiliki latar belakang keahlian yang mencakup bidang Teknik konstruksi, Teknik kelistrikan, Industrial Plant, Powerplant & Energy, Keuangan, Legal, Tata Kelola, Sumber Daya Manusia, Investasi, Pemasaran dan Ekonomi.	Comply
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Kebijakan Penilaian individual Dewan Komisaris dalam bentuk <i>self assessment</i> bertujuan untuk menilai kinerja individual dalam hal peningkatan kinerja dan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Tolak ukur yang digunakan dalam penilaian adalah: 1. Tingkat kehadirannya dan keaktifan dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada. 2. Kemampuan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris lainnya dan Manajemen. 3. Kompetensi individual dalam menyelesaikan permasalahan atau potensi permasalahan di Perseroan dalam konteks pengawasan. 4. Ketersediaan waktu dan perhatian dalam menyelesaikan permasalahan dan/atau potensi permasalahan Perseroan dalam konteks pengawasan. 5. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu. 6. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan. 7. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kebijakan Perusahaan.	Comply

PRINSIP	REKOMENDASI	KETERANGAN REKOMENDASI OJK	PENJELASAN PENERAPAN DI WIKA	KETERANGAN
ASPEK 2				
FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS				
			Selain itu, dalam Renja <i>self assessment</i> Dewan Komisaris juga didasarkan pada Kontrak Manajemen yang secara bersama-sama ditandatangani bersama Direksi di awal tahun di tahun berjalan, Kontrak Manajemen ini berisi rencana-rencana pencapaian kerja yang disertai dengan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang menjadi acuan kinerja yang hendak dicapai di tahun berjalan. Proses <i>Self Assessment</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui ketaatan terkait dengan GCG (<i>self assessment</i>) yang dilakukan secara berkala.	
	9. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Direksi Perseroan Bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyampaikan pertanggungjawaban atas rencana dan pencapaian kerja Perseroan yang dilaksanakan selama tahun buku berjalan yang dituangkan dalam Laporan Tahunan Perseroan yang dapat diperoleh langsung oleh Pemegang Saham melalui situs web maupun berkunjung langsung ke Unit Kerja Sekretariat Perusahaan yang berlokasi di Lantai 1 WIKA TOWER 2 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 10. Pertanggungjawaban Perseroan kepada Pemegang Saham juga disampaikan oleh Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris melalui RUPS Tahunan.	Comply
	10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Perseroan telah mengatur sistem pengunduran diri dan/atau pemberhentian Dewan Komisaris Perseroan melalui Anggaran Dasar Perseroan dan <i>Board Manual</i> dengan tetap mendasarkan kepada Asas <i>Presumption of Innocence</i> .	Comply

PRINSIP	REKOMENDASI	KETERANGAN REKOMENDASI OJK	PENJELASAN PENERAPAN DI WIKA	KETERANGAN
ASPEK 2				
FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS				
	11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Dalam menjalankan fungsinya sesuai regulasi untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi, Perseroan meratifikasinya ke dalam ketentuan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan <i>Good Corporate Governance</i> yang telah dilakukan pengesahan melalui Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Nomor: 104/DK/WIKA/2018	Comply
ASPEK 3				
FUNGSI DAN PERAN DIREKSI				
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengelolaan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Di samping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	Penentuan jumlah dan penetapan/pengangkatan Direksi ditetapkan oleh RUPS dan telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan, yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015, Anggaran Dasar Perusahaan dan <i>Board Manual</i> .	Comply
	13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal.	Penentuan komposisi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten/Perusahaan Publik, serta POJK Nomor: 34 tahun 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 yang telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan berdasarkan usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki komposisi cukup beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara individual maupun kolegal.	Comply

PRINSIP	REKOMENDASI	KETERANGAN REKOMENDASI OJK	PENJELASAN PENERAPAN DI WKA	KETERANGAN
ASPEK 3				
FUNGSI DAN PERAN DIREKSI				
	14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain Peraturan Perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundangundangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.	Laporan Keuangan yang <i>diupload</i> ke <i>website</i> Perusahaan merupakan salah satu bentuk cara perusahaan dalam menjalankan praktik transparansi GCG. Selain itu, informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan tersebut mengandung unsur-unsur dan/atau yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan regulasi yang berlaku. Direktur Keuangan Perseroan merupakan salah satu ahli keuangan terbaik yang berpengalaman di beberapa perusahaan serta memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan investasi yang dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan.	Comply
Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	15. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolektif. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolektif, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Selain penilaian menggunakan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), Perusahaan juga telah menetapkan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) masing-masing Direktorat selama tahun 2018, dan telah dijelaskan melalui Laporan Tahunan Perusahaan bagian Tata Kelola Perusahaan sub bagian Penilaian Kinerja Direksi.	Comply

PRINSIP	REKOMENDASI	KETERANGAN REKOMENDASI OJK	PENJELASAN PENERAPAN DI WIKA	KETERANGAN
ASPEK 3				
FUNGSI DAN PERAN DIREKSI				
	16. Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.	<i>Self Assessment</i> untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan bagian Tata Kelola Perusahaan sub bagian Penilaian Kinerja Direksi.	Comply
	17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Untuk meningkatkan kepercayaan para <i>stakeholders</i> terhadap Perseroan melalui Integritas yang diterapkan, maka Perseroan memiliki Kebijakan terkait dengan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan <i>Board Manual</i> Perseroan. Selain itu bagi Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti yang disebabkan meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.	Comply
ASPEK 4				
PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN				
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Dalam pelaksanaannya, kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> terdapat pada Code of Conduct yang di dalamnya mengatur pula terkait dengan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku. Perseroan berkomitmen mewujudkan pertumbuhan kegiatan operasi yang berkelanjutan berdasarkan standar bisnis yang ada sehingga Perseroan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi <i>Shareholder</i> .	Comply

PRINSIP	REKOMENDASI	KETERANGAN REKOMENDASI OJK	PENJELASAN PENERAPAN DI WIKA	KETERANGAN
ASPEK 4				
PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN				
	19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i> , suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	Perseroan menetapkan kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> yang dituangkan dalam <i>Code of Conduct</i> , prosedur-prosedur gratifikasi, dan prosedur lainnya serta dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh insan Perseroan agar tidak melakukan penyelewengan dan penyimpangan sejenisnya.	Comply
	20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> .	Penjelasan Kebijakan tentang seleksi pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas <i>output</i> perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau <i>vendor</i> , mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> , dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau <i>vendor</i> .	Kebijakan Perseroan terkait seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> telah diatur di dalam <i>Code of Conduct</i> Perseroan atau Prosedur Perseroan yang dapat diakses melalui situs web Perseroan yang disosialisasikan secara terbuka untuk menjamin Perseroan memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif, kualitas yang baik, efisien, efektif dan menjamin <i>supply</i> yang kontinuitas oleh subkon.	Comply
	21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan Kreditur yaitu Bank atau Lembaga Keuangan untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perseroan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kreditur. Oleh karena itu, Perseroan mempunyai komitmen untuk menggunakan modal kerja dan fasilitas tersebut secara akuntabel, transparan dan efisien. Perseroan selalu senantiasa menyampaikan informasi material menyangkut hubungan dengan Kreditur kepada para investor/calon investor secara adil, benar dan akurat. Perseroan juga mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan kewajiban Perseroan terhadap Kreditur secara tepat waktu yang dituangkan dalam <i>Code of Conduct</i> Perusahaan. Pemenuhan kewajiban tersebut meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain Kreditur sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang disepakati antara Perseroan dan Kreditur serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait.	Comply

PRINSIP	REKOMENDASI	KETERANGAN REKOMENDASI OJK	PENJELASAN PENERAPAN DI WIKA	KETERANGAN
ASPEK 4				
PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN				
	22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i> , cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	Dalam menerapkan, Perseroan memiliki mekanisme penegakan Prosedur Pengaduan Pelanggaran terhadap <i>Code of Conduct (Whistleblowing System)</i> No. WIKALDSPM-01.02, yang salah satunya mengatur mengenai Etika Usaha Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Kebijakan tentang Larangan Suap, Kebijakan tentang Hadiah, Imbalan dan Sumbangan (Donasi) yang tidak dibenarkan, serta disosialisasikan melalui <i>web</i> yang siapa saja dapat melakukan pelaporan dengan jaminan kerahasiaan bagi pelapor.	Comply
	23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Perseroan dalam memberikan insentif penghasilan atas penghargaan kepada Direksi dan Pegawai didasarkan kepada Prosedur Perseroan Nomor: WIKAHCE-PM-08.02 terkait dengan Prosedur Pemberian Jasa Produksi, di mana dalam Anggaran Jasa Produksi ditetapkan berdasarkan penilaian tingkat kesehatan perusahaan yang berpedoman pada Regulasi yang berlaku di antaranya: Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/06/2016 Jo. Peraturan BUMN Nomer PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN tanggal 4 Juni 2002.	Comply
ASPEK 5				
KETERBUKAAN INFORMASI				
Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Selain <i>website</i> , Perusahaan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi media sosial lainnya seperti melalui Portal Internal, E-mail, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Call Center. SEKRETARIAT PERUSAHAAN Website: www.wika.co.id Twitter: @PTWijayaKarya Facebook: PT Wijaya Karya Instagram: ptwijayakarya Youtube: WIJAYA KARYA TV E-mail: humas@wika.co.id	Comply

PRINSIP	REKOMENDASI	KETERANGAN REKOMENDASI OJK	PENJELASAN PENERAPAN DI WIKA	KETERANGAN
ASPEK 5				
KETERBUKAAN INFORMASI				
	25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Peraturan Perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Laporan Tahunan 2018 menampilkan profil 20 pemegang saham terbesar per 31 Des 2018 pada Bab Profil Perusahaan hal 108-109.	Comply



PEMONITORAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Perencanaan, Pengkoordinasian, Pemantauan, Implementasi dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan GCG dilakukan oleh Biro Corporate Relations yang memiliki salah satu fungsi terkait dengan *monitoring* terhadap implementasi GCG, yang secara struktural berada di bawah Corporate Secretary. Adapun program kerja yang dilakukan oleh Biro Corporate Relations dalam *monitoring* pelaksanaan implementasi GCG di Perseroan sebagai berikut.

1. Melakukan *assessment* GCG yang dilakukan secara berkala untuk memperoleh penilaian yang objektif mengenai implementasi GCG di Perseroan.
2. Memantau, menganalisis dan menyesuaikan setiap Kebijakan Perseroan dan Kebijakan Pokok terhadap *best practice* terkait penerapan GCG.
3. Melakukan *review document* terhadap kesesuaian GCG dengan perkembangan bisnis Perseroan.
4. Melakukan *review* atas kebutuhan dan kepentingan *stakeholders* yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi atas kebijakan sistem tata kelola Perusahaan.
5. Melakukan *review* atas rencana dan pelaksanaan program kepatuhan dan tata kelola keberlanjutan Perseroan.
6. *Monitoring* atas Laporan harta kekayaan pejabat Negara (LHKPN) sesuai WKA-HCE-IK-06.02 tentang Instruksi Kerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Perseroan dalam mendukung program KPK mewujudkan transparansi terhadap penyelenggaraan Negara, aplikasi dalam penerapan GCG, serta meningkatkan proses GCG baik secara administratif maupun substantif guna mendukung kegiatan BUMN Bersih dari Kementerian BUMN.
7. *Monitoring* atas mekanisme pelaksanaan *whistleblowing system*.
8. *Monitoring* atas mekanisme pelaksanaan komunikasi interen dan ekstern Perseroan, Publisitas Perseroan secara efektif dan efisien.

Selain itu, *monitoring* dari pelaksanaan implementasi GCG dilakukan oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG. Program kerja yang dilakukan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG terkait dengan pemantauan pelaksanaan GCG, yaitu:

1. Melakukan Pendampingan atau *counterpart* terhadap pelaksanaan *assessment* GCG yang dilakukan oleh BPKP.
2. *Monitoring* terhadap kebijakan tentang GCG dan Standar Etika serta tindak lanjut hasil *assessment* yang dilakukan oleh eksternal konsultan serta mengevaluasi dan melakukan penyempurnaan terhadap pedoman-pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.
3. Melakukan penyelidikan dan verifikasi berdasarkan hasil temuan di lapangan berkaitan dengan pelanggaran etika dan pelanggaran praktik GCG yang terjadi di Perseroan.
4. Memberikan nasihat, arahan, masukan, serta rekomendasi kepada Direksi mengenai praktik terbaik penerapan GCG di Perseroan.
5. Bersama-sama dengan Manajemen melakukan tugas pembinaan dan pengawasan efektivitas penerapan praktik GCG di Perseroan sebagai upaya meningkatkan nilai Pemegang Saham, termasuk sosialisasi dan internalisasi.
6. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan GCG oleh Organ Utama dan Organ Pendukung serta memberikan masukan penyempurnaan serta upaya-upaya pemantapannya.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

GCG merupakan upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data (fakta dan informasi) yang andal dan sah sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen agar pelaksanaan GCG dapat dilakukan secara efektif. *Assessment* menjadi bagian dari mekanisme *check and balances*. Dengan *assessment*, maka capaian kegiatan dapat diketahui dengan pasti dan tindakan lebih lanjut untuk memperbaiki kinerja suatu kegiatan dapat ditetapkan.

Perseroan secara berkala melakukan pengukuran implementasi GCG. Hal ini dilakukan untuk memperoleh penilaian yang objektif mengenai implementasi GCG di Perseroan. *Assessment* GCG di Perseroan dapat dilakukan secara mandiri oleh internal Perseroan (*self assessment*) ataupun dengan menggunakan jasa pihak independen (evaluasi eksternal).

Self-Assessment

• Kriteria yang Digunakan

Pelaksanaan GCG *assessment* tersebut berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Indikator yang digunakan dalam *assessment* GCG tersebut meliputi:

- Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan;
- Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
- Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
- Direksi;
- Pengungkapan informasi dan transparansi; serta
- Aspek lainnya.

• Pihak yang Melakukan Assessment

Pada tahun 2018, *self assessment* terhadap implementasi GCG dilakukan oleh Tim Counterpart yang terdiri dari berbagai macam fungsi dari Perseroan seperti GCG, Legal, Human Capital dan Pengembangan Sistem. *Self Assessment* dilakukan dengan pendampingan oleh BPKP.

• Skor Penilaian

Pencapaian hasil GCG *assessment* WKA dalam 4 (empat) tahun terakhir sebagai berikut.

ASSESSMENT IMPLEMENTASI GCG	SKOR ASSESSMENT GCG	KATEGORI	PELAKSANA
2019	94,949	Sangat Baik	Self Assessment
2018	94,925	Sangat Baik	BPKP
2017	94,93	Sangat Baik	Self Assessment
2016	93,35	Sangat Baik	BPKP

Hasil self assessment GCG pada untuk tahun buku 2018 yang dilaksanakan tahun 2019 adalah sebagai berikut.

NO.	PENJELASAN KRITERIA	BOBOT INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2018	
			SKOR	CAPAIAN (%)
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	6,436	91,94
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal	9,00	8,676	96,40
3	Dewan Komisaris	35,00	33,186	94,82
4	Direksi	35,00	33,383	95,38
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	8,269	91,88
6	Aspek Lainnya	5,00	5,000	100,00
Skor Keseluruhan			94,949	

Pada tahun 2019, telah dilaksanakan Self Assessment GCG untuk Tahun Buku 2018 dan menghasilkan skor sebesar 94,949 Rekomendasi hasil self assessment akan ditindaklanjuti untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

• Rekomendasi dan Tindakanlanjutan

Beberapa kelemahan pelaksanaan Good Corporate Governance yang berhasil diidentifikasi dari proses assessment GCG selanjutnya direkomendasikan untuk ditindaklanjuti guna peningkatan kualitas implementasi GCG ke depannya. Beberapa kelemahan yang direkomendasikan untuk dilakukan tindakan perbaikan adalah sebagai berikut:

Aspek Dewan Komisaris

NO	REKOMENDASI	ALASAN BELUM/TIDAK DITERAPKANNYA
1	Melibatkan Komite Dewan Komisaris dalam penyusunan rencana kerja Dewan Komisaris	Sudah diterapkan pada tahun 2018
2	Memasukkan Rencana Kerja Dewan Komisaris yang berkaitan dengan proses persetujuan rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan Direksi secara khusus kedalam Rencana Kerja (RENJA) Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris	Sudah diterapkan pada tahun 2018
3	Menambahkan pada kebijakan Dewan Komisaris mengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha dan kinerja Perseroan yang perlu mendapat perhatian Dekom dengan muatan: a) Lingkup lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha dan kinerja Perseroan, b) mekanisme yang dilakukan Dewan Komisaris	Sudah diterapkan pada tahun 2018
4	Memasukkan rencana kerja Dewan Komisaris yang membahas hal-hal tersebut dibawah ini secara khusus ke dalam rencana kerja Dewan Komisaris dan Organ Komisaris sebagai berikut: a) sistem pengendalian internal, b) manajemen risiko Perseroan, c) sistem pelaksanaannya, d) pengelolaan sumber daya manusia, e) pengadaan barang dan jasa beserta peklaksanaannya, f) mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya.	Sudah diterapkan pada tahun 2018
5	Melakukan telaah atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian internal, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal secara entitas dan evaluasi atas laporan internal control yang dibuat oleh Direksi	Sudah diterapkan pada tahun 2018
6	Mendokumentasikan keterlibatan Komite Dewan Komisaris dalam membahas teknologi informasi Perseroan	Sudah diterapkan pada tahun 2018
7	Memasukkan rencana kerja Dewan Komisaris yang membahas hal-hal tersebut dibawah ini secara khusus ke dalam Rencana Kerja Dekom dan Organ pendukung meliputi: a) Rencana kerja Dekom yang membahas kepatuhan direksi terhadap peraturan-peraturan perundangan dan perjanjian dengan pihak ketiga, b) Rencana pembahasan transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkungan kewenangan Dewan Komisaris yang terjadi pada tahun berjalan, c) Rencana kerja penunjukan dan anggaran biaya audit eksternal untuk calon auditor, d) Rencana kerja Dewan Komisaris tentang pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan efektivitas audit internal	Sudah diterapkan pada tahun 2018
8	Menambahkan dalam kebijakan dan prosedur tentang Pelaporan kepada RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan dengan muatan: a) Pembahasan gejala menurunnya kinerja Perseroan, b) Pemberian saran kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada menurunnya kinerja Perseroan tersebut	Sudah diterapkan pada tahun 2018
9	Memasukkan rencana pembahasan atas kebijakan/rancangan pengelolaan entitas anak secara khusus ke dalam Rencana Kerja Dekom	Sudah diterapkan pada tahun 2018
10	Memasukkan rencana penelaahan remunerasi Direksi secara khusus ke dalam RENJA Dewan Komisaris dan Organ	Sudah diterapkan pada tahun 2018
11	Menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan	Sudah diterapkan pada tahun 2018
12	Menginstruksikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar mencantumkan alasan ketidakhadiran Dewan Komisaris dalam Risalah Rapat	Sudah diterapkan pada tahun 2018

Aspek Direksi

NO	REKOMENDASI	ALASAN BELUM/TIDAK DITERAPKANNYA
1	Menambahkan tugas anggota Direksi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan muatan memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga	Saat ini GCG berada di bawah koordinasi Direktur Utama, namun penjabaran tugas terkait GCG belum dituangkan detail
2	Menginstruksikan kepada penyelenggara Negara/pejabat yang ditetapkan Direksi untuk menyampaikan LHKPN secara tepat waktu	Sudah diterapkan pada tahun 2018
3	Menyempurnakan kebijakan pengendalian gratifikasi dengan menambahkan muatan: komitmen Dewan Komisaris dan Direksi, fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi, dan pemantauan atas pelaksanaan serta melakukan penyempurnaan secara berkala	Sudah diterapkan pada tahun 2018
4	Menyempurnakan Pedoman Penerapan Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistle Blowing System) dengan menambahkan muatan kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran	Sudah diterapkan pada tahun 2018
5	Melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan Whistle Blowing System secara berkala antara lain dengan melakukan evaluasi/pembahasan atas pelaksanaan dan membuat pelaporan hasil evaluasi	Tidak ada pelanggaran CoC yang dijadikan sebagai WBS sehingga tidak dilakukan evaluasi pelaksanaan WBS. Temuan ini akan ditindaklanjuti tahun 2019
6	Membuat laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi.	Sudah diterapkan pada tahun 2018
7	Menindaklanjuti temuan auditor eksternal terkait prosedur untuk proses pendukung	Sudah diterapkan pada tahun 2018
8	Menetapkan standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi	Sudah diterapkan pada tahun 2018
9	Menetapkan ketentuan kesegeraan untuk mengomunikasikan keputusan Direksi kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi, maksimal 7 hari sejak keputusan tersebut disahkan	Sudah diterapkan pada tahun 2018
10	Menyempurnakan pedoman penyusunan RJPP dengan mengacu pada Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-102/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penyusunan Rencana Jangka Panjang BUMN yang sekurang-kurangnya memuat: (1) Pendahuluan, (2) Evaluasi pelaksanaan RJP yang baru lalu, (3) Posisi Perseroan saat ini, (4) Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan RJP, (5) Tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya serta melaksanakannya	Sudah diterapkan pada tahun 2018
11	Menyusun rancangan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan RJPP	Sudah diterapkan pada tahun 2018
12	Mengoptimalkan penggunaan komputer untuk mendukung aplikasi sistem pengukuran kinerja	Sudah diterapkan pada tahun 2018
13	Melaporkan pencapaian target anggota Direksi secara individu	Sudah diterapkan pada tahun 2018
14	Melaporkan pelaksanaan sistem teknologi informasi kepada Dewan Komisaris yang terkait pelaksanaan TI master plan dan TI detail plan	Belum dibuat agenda tersendiri dalam Rakomdir pelaporan pelaksanaan kinerja IT dari GM penanggungjawab IT, namun digabungkan dalam agenda laporan kinerja manajemen secara menyeluruh
15	Mempublikasikan kebijakan pengadaan barang dan jasa	Prosedur belum teratifikasi menjadi petunjuk teknis yang bisa dikonsumsi publik

NO	REKOMENDASI	ALASAN BELUM/TIDAK DITERAPKANNYA
16	Melaksanakan SOP pengadaan barang dan jasa secara konsisten	Sudah diterapkan pada tahun 2018
17	Meningkatkan kinerja entitas anak untuk mendukung kinerja Perseroan	Sudah diterapkan pada tahun 2018
18	Memutakhirkan pedoman akuntansi Perseroan	Sudah diterapkan pada tahun 2018
19	Mendokumentasikan penyelesaian keluhan pelanggan sesuai prosedur	Sudah diterapkan pada tahun 2018
20	Mendokumentasikan tindak lanjut hasil survei kepuasan pelanggan	Sudah diterapkan pada tahun 2018
21	Membuat kebijakan mengenai manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman Jangka panjang sesuai dengan peruntukan dan pelunasannya	Sudah diterapkan pada tahun 2018
22	Melaksanakan kegiatan kemitraan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan	Sudah diterapkan pada tahun 2018
23	Meningkatkan kolektibilitas pengembalian pinjaman	Sudah diterapkan pada tahun 2018
24	Seluruh anggota Direksi menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan	Sudah diterapkan pada tahun 2018
25	Menyempurnakan pedoman/tata tertib Rapat Direksi dengan menambahkan muatan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi	Sudah diterapkan pada tahun 2018
26	Mencantumkan dalam risalah rapat penjelasan alasan ketidakhadiran Direksi	Sudah diterapkan pada tahun 2018
27	Menginstruksikan Kepala SPI untuk melakukan penilaian (assessment) internal secara berkala atas program Jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal secara keseluruhan	Sudah diterapkan pada tahun 2018
28	Menginstruksikan Kepala SPI untuk mengevaluasi sejauh mana sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan sejalan dengan tujuan organisasi dan memberi masukan atas konsistensi hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan/program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada manajemen	Sudah diterapkan pada tahun 2018
29	Menempatkan posisi Sekretaris Perusahaan dalam struktur organisasi di bawah Direktur Utama	Sudah diterapkan pada tahun 2018
30	Memasukkan rencana kerja program pengenalan Perseroan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat dalam program kerja Fungsi Sekretaris Perusahaan	Sudah diterapkan pada tahun 2018
31	Menyempurnakan Laporan Tahunan (Annual Report) dengan memuat bagian tersendiri mengenai Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan: - Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal antara lain tentang langkah-langkah yang direncanakan Perseroan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing terkait yang diuraikan pada Ikatan Material Investasi Barang Modal; - Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan, dan dampak perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Laporan Keuangan.	Sudah diterapkan pada tahun 2018

NO	REKOMENDASI	ALASAN BELUM/TIDAK DITERAPKANNYA
32	Menyempurnakan Laporan Tahunan (Annual Report) dengan memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik: • Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial terutama tentang komitmen Perseroan terhadap perlindungan keonsumen yakni informasi Pusat Pengaduan Konsumen; • Memuat penjelasan tidak adanya komite manajemen risiko.	Sudah diterapkan pada tahun 2018

PENILAIAN PIHAK EKSTERNAL

Selain melakukan penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola berdasarkan ketentuan regulator, WIKA secara aktif meminta Pihak Eksternal untuk menilai dan memberikan feedback dalam pelaksanaan tata kelola WIKA.

ASEAN Corporate Governance Scorecard

Salah satu bentuk *assessment* yang dilakukan terkait dengan implementasi GCG di WIKA adalah *ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang merupakan parameter pengukuran praktik tata kelola yang disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF). Parameter tersebut dibuat berdasarkan OECD *Principles* dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan-perusahaan *listing* di ASEAN.

• Kriteria yang Digunakan

Komponen penilaian *ASEAN Corporate Governance Scorecard* adalah sebagai berikut:

1. Hak-Hak Pemegang Saham
2. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham
3. Peran Pemangku Kepentingan
4. Pengungkapan dan Transparansi
5. Tanggung Jawab Dewan

• Pihak yang Melakukan Assessment

Penilaian *ASEAN Corporate Governance Scorecard* di Indonesia dilakukan oleh lembaga independen yaitu RMS.

• Skor Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap praktik GCG dari WIKA berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam *ASEAN Corporate Governance Scorecard*, total nilai yang berhasil diperoleh adalah sebagai berikut:

SCORECARD LEVEL 1	TOTAL ITEM	ITEM(S) NOT APPLICABLE	ITEMS ADOPTED/ DIPENUHI	ADOPTION RATE/ TINGKAT PEMENUHAN (%)
PART A	21	1	13	65
PART B	15	2	7	53,8
PART C	13	-	11	84,6
PART D	32	-	23	71,9
PART E	65	-	54	83,1
TOTAL SCORE LEVEL 1 & 2	78,94			

Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU)

KPKU merupakan suatu metode berbasis Malcolm Baldrige yang digunakan oleh Kementerian BUMN untuk menilai/mengukur semua elemen sistem pengelolaan perusahaan dan faktor-faktor peningkatan proses juga peningkatan hasil sebagai pertimbangan. Sesuai Surat Sekretaris Kementerian BUMN tentang Penyampaian Pedoman Penentuan *Key Performance Indicators* (KPI) dan KPKU BUMN, KPKU merupakan landasan dan referensi dalam pengelolaan BUMN menuju pencapaian kinerja unggul.

• Kriteria yang Digunakan

Sistem Penilaian pada Evaluasi Kinerja BUMN ini didasarkan pada metode yang diuraikan dalam dokumen Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Kementerian BUMN melalui Surat Deputy Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN no. S-198/D7.MBU/10/2017 tanggal 7 Oktober 2017 yang mengadopsi dan mengadaptasi "Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence" tahun 2013-2014.

Laporan atas pemenuhan persyaratan pada suatu subkategori dinilai dengan mempertimbangkan; persyaratan subkategori tersebut, faktor-faktor bisnis utama yang dilaporkan dalam Profil Perusahaan, kesempurnaan sistem yang diterapkan di perusahaan, keluasan cakupan penerapan sistem, serta konsistensi peningkatan kualitas proses dan kinerja sebagaimana diatur dalam sistem pemberian skor. Evaluasi kinerja BUMN berdasarkan pada dua dimensi penilaian; proses dan hasil. Faktor-faktor penilaian untuk masing-masing dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Penilaian Proses

Faktor yang digunakan untuk menilai proses adalah Metode/Sistem (*Approach*), Penerapan (*Deployment*), Pembelajaran (*Learning*), dan Integrasi (*Integration*) atau disingkat ADLI.

- a. Metode/Sistem (*Approach*) adalah metode/sistem yang didesain untuk melaksanakan pekerjaan. Penilaian mengacu pada: (1) Kesesuaian metode/sistem dengan persyaratan dalam KPKU BUMN dan lingkungan operasi perusahaan, (2) Efektivitas dari penggunaan metode/sistem tersebut, (3) Sejauh mana metode/

sistem dilakukan secara berulang (*repeatable*) dan didasarkan pada data dan informasi yang *reliable* (misalnya, terstruktur dan sistematis).

- b. Penerapan (*Deployment*) mengacu pada sejauh mana: (1) Metode/Sistem diterapkan sesuai dengan desainnya, (2) Metode/Sistem diterapkan secara konsisten, (3) Metode/Sistem dilaksanakan oleh seluruh fungsi/unit kerja yang relevan sesuai dengan desainnya.
 - c. Pembelajaran (*Learning*) mengacu pada: (1) Penyempurnaan Metode/sistem melalui siklus evaluasi dan perbaikan (*improvement*), (2) Inovasi metode/sistem untuk mendorong perubahan yang bersifat terobosan (*breakthrough*), (3) Berbagi hasil penyempurnaan dan inovasi terhadap metode/sistem, kepada unit-unit kerja lain dan pemilik proses lainnya yang relevan dalam perusahaan.
 - d. Integrasi (*Integration*) mengacu pada: (1) Keselarasan sistem/metode dengan kebutuhan perusahaan yang dijelaskan pada Profil Perusahaan dan pada subkategori proses lainnya, (2) Ukuran, informasi dan sistem perbaikan telah saling melengkapi/saling bersesuaian pada lintas unit kerja dan lintas proses, (3) Program kerja, proses, hasil, analisis, pembelajaran, dan tindakan, diharmonisasikan di lintas proses dan lintas unit kerja untuk mendukung tercapainya sasaran perusahaan
2. Faktor Penilaian Hasil-hasil Faktor yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil perusahaan adalah *Level*, *Trend*, *Comparison* dan *Integration* (LeTCI).
- a. *Level* mengacu pada: tingkat pencapaian kinerja saat ini/tahun ini/tahun terakhir.
 - b. *Trend* mengacu pada: (1) Tingkat peningkatan kinerja atau kemampuan mempertahankan kinerja yang sudah baik (yakni, kecuraman data *trend*) dari waktu ke waktu (minimum dalam 3 tahun terakhir), (2) Keluasan (tingkat penerapan) dari hasil-hasil kinerja.
 - c. *Comparison* mengacu pada: (1) Perbandingan kinerja perusahaan relatif terhadap pembanding yang sesuai

misalnya, pesaing atau perusahaan dalam industri sejenis, (2) Perbandingan kinerja perusahaan relatif terhadap *benchmarks* atau pemimpin industrinya, atau dengan perusahaan kelas dunia.

- d. *Integration* mengacu pada: (1) Ukuran hasil-hasil yang terkait persyaratan kinerja pelanggan, produk, pasar, proses, dan program kerja utama, yang dijelaskan dalam Profil Perusahaan dan dalam sub-sub kategori pada kategori 1 s.d 6; (2) Hasil-hasil yang meliputi indikator yang valid tentang kinerja mendatang; (3) Hasil-hasil diharmonisasikan secara lintas proses dan lintas unit untuk mendukung sasaran perusahaan.

- **Pihak yang Melakukan Assessment**

Penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan pelaksanaannya diselenggarakan bersama Forum Ekselen BUMN (FEB).

- **Skor Penilaian**

Hingga Laporan Tahunan ini disahkan, Penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) masih dilaksanakan sehingga Perseroan belum dapat menampilkan hasil penilaiannya di Laporan Tahunan ini.

PENINGKATAN KUALITAS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Hasil dari *assessment* digunakan sebagai pertimbangan di dalam melakukan peningkatan kualitas implementasi GCG. Peningkatan kualitas yang ditetapkan meliputi:

1. Pengembangan kualitas GCG Perseroan dan Anak perusahaan.
2. Pemenuhan kegiatan mandatori sebagai wujud *compliance* Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan program yang meningkatkan komitmen pegawai terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan.
4. Perseroan melakukan upaya untuk memenuhi hak Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik modal.
5. Meningkatkan kualitas pengungkapan informasi dan transparansi.
6. Pengembangan penerapan GCG Perseroan lainnya.

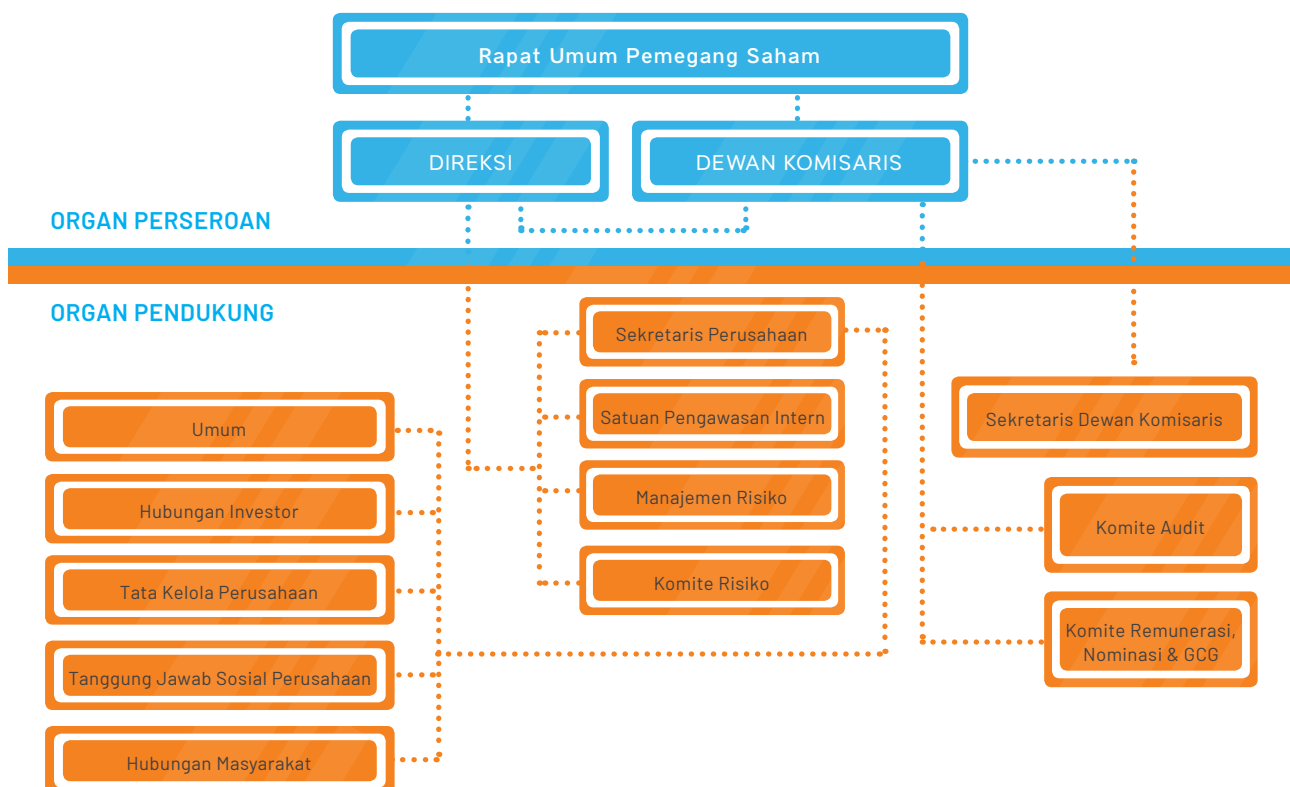
STRUKTUR DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan.

STRUKTUR ORGAN PERUSAHAAN

Sejalan dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, maka struktur GCG WIKA terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga prinsip-prinsip GCG menjadi acuan dalam kegiatan sehari-hari WIKA.

Dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan, Direksi didukung oleh struktur manajemen yang efektif. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris didukung oleh organ penunjang seperti Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Remunerasi, Nominasi dan GCG.



CORPORATE GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

GCG soft structure yang telah dimiliki oleh Perseroan antara lain adalah:

1. Akta Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Nomor 5 tanggal 2 Oktober 2018;
2. Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Code of GCG*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2017-2019, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.02.09/A.DIR.0638/2018;
3. Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor: 05/DK/WIKA/2018 dan Nomor: SK.02.09/A.DIR.0637/2018;
4. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.02.09/A.DIR.0639/2018;
5. Prosedur Pengendalian Gratifikasi Nomor WIKALDS-PM-01.01Rev. 00 Amd. 01 tertanggal 31 Januari 2019;
6. Prosedur Pengaduan Pelanggaran terhadap *Code of Conduct (Whistle Blower)* Nomor WIKALDS-PM-01.02 Rev. 00 Amd. 01 tertanggal 31 Januari 2019;
7. Pedoman Hubungan Induk dan Anak (*Subsidiary Governance*) Nomor SK.02.01/A.DIR.21446/2018 tertanggal 12 Desember 2018;
8. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
9. Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG Nomor 104/DK/WIKA/2018 tertanggal 19 September 2018;
10. Piagam Komite Audit Nomor 79/DK/WIKA/2018 tertanggal 2 Juli 2018;
11. Piagam Satuan Pengawas Internal Nomor MJ.01.00/A.SPI.11215/2018 tertanggal 18 Juli 2018;
12. Prosedur Sistem Manajemen Risiko Nomor WIKASMR-PM-01.01 Rev. 03 tertanggal 1 Februari 2017;
13. Prosedur Perusahaan.

MEKANISME COPORATE GOVERNANCE

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang

dan/atau Anggaran Dasar. RUPS memiliki wewenang Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan Direksi.

Pelaksanaan RUPS telah melalui proses pengumuman dan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan RUPS disampaikan bersamaan dengan pemanggilan RUPS. Namun jika hal tersebut belum tersedia pada saat pemanggilan RUPS, maka bahan informasi tersebut akan disampaikan pada saat RUPS diselenggarakan.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilakukan Perseroan setiap tahun, yang meliputi RUPS Tahunan tentang Laporan Tahunan Perseroan dan RUPS Tahunan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP), sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Pelaksanaan RUPS didahului dengan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

• Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar, Pemegang Saham Perseroan terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia dan Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

• Hak Pemegang Saham

Perseroan mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas saham. Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. Menurut Anggaran Dasar, saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya hak istimewa sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
 - b. Persetujuan perubahan permodalan.
 - c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran.
 - e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - f. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
 - g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
 - h. Persetujuan penggunaan laba.
 - i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
3. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan.

• Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Kebijakan hubungan dengan Pemegang Saham diatur dalam Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*). Perseroan harus memperlakukan Pemegang Saham secara adil. Pemegang Saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama akan mendapatkan perlakuan yang setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah/persentase saham yang dimilikinya. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai

Perseroan. Perseroan menolak Pemegang Saham campur tangan dalam kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Termasuk pengertian dalam campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung maupun tidak langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengelolaan Perseroan atau terhadap pengambilan keputusan yang menjadi wewenang Direksi.

Kegiatan operasional Perseroan yang melibatkan *stakeholders* harus tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga kemandirian Perseroan sebagai badan hukum yang profesional dapat berkembang baik sesuai dengan tujuan usahanya. Perseroan akan berusaha keras agar Perseroan mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan sehingga memberikan kontribusi yang optimal bagi Pemegang Saham. Penetapan dan pembagian dividen ditetapkan dan dilakukan oleh Pemegang Saham melalui RUPS.

• Referensi Peraturan

RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Penyelenggaraan RUPS di Perseroan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tahapan Pelaksanaan RUPS mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

• Ketentuan Kuorum

Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

1. Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir

dalam rapat kecuali Peraturan Perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Peraturan Perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar. Ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, RUPS ketiga diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

• Pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2017 dan Realisasinya

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Tahun Buku 2017 tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2017

PEMBERITAHUAN	PENGUMUMAN	UNDANGAN	PELAKSANAAN	RINGKASAN RISALAH
WIKA telah menyampaikan Pemberitahuan Mata Acara RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam Surat Nomor SE.01/01/A. SEKPER.3907/2018 tanggal 9 Maret 2018.	WIKA menyampaikan Pengumuman RUPST kepada Pemegang Saham pada 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Kontan, situs web Bursa Efek dan situs web WIKA, pada tanggal 16 Maret 2018.	WIKA menyampaikan Pemanggilan RUPST Kepada Pemegang Saham pada 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Investor Daily, situs web Bursa Efek dan situs web WIKA, pada tanggal 2 April 2018.	RUPS tahunan dilaksanakan pada 24 April 2018 pada pukul 15.12 WIB, bertempat di WIKA Tower 2, Ruang Serbaguna, Lantai 17, Jalan D.I. Panjaitan Kav.9-10, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan diumumkan tanggal 26 April 2018 melalui Harian Umum Bisnis Indonesia dan situs web WIKA.

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPST Tahun Buku 2017

Pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2017 dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan dan dihadiri pula oleh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi yaitu:

1. Notaris Fathiah Helmi, S.H.
2. Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom

Adapun Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPST Tahun Buku 2017 yaitu:

NO	NAMA	JABATAN	HADIR	TIDAK HADIR
1	Imam Santoso	Komisaris Utama	V	
2	Eddy Kristanto	Komisaris	V	
3	Freddy R. Saragih	Komisaris	V	
4	Lilie Mayasari	Komisaris	V	
5	Imas Aan Ubudiah	Komisaris Independen	V	

NO	NAMA	JABATAN	HADIR	TIDAK HADIR
1	Bintang Perbowo	Direktur Utama	V	
2	A.N.S. Kosasih	Direktur	V	
3	Chandra Dwiputra	Direktur	V	
4	Bambang Pramujo	Direktur	V	
5	Destiawan Soewardjono	Direktur	V	
6	Novel Arsyad	Direktur	V	

Keputusan RUPST Tahun Buku 2017

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017;

Rapat dengan suara bulat sebesar 100% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: GA118 0157 WIKHA tanggal 27 Februari 2018, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2017;

Rapat dengan suara bulat sebesar 100% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited), sesuai laporannya Nomor: GA118 0311 PKBLWIKHA tanggal 29 Maret 2018 dengan pendapat "Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit PKBL PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. tanggal 31 Desember 2017, serta laporan aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/07/2017, dan perubahan-perubahannya.

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017;

Rapat dengan suara bulat sebesar 99,86% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.202.069.175.063 (Satu triliun dua ratus dua miliar enam puluh sembilan juta seratus

tujuh puluh lima ribu enam puluh tiga Rupiah) sebagai berikut:

- Sebesar 20% atau senilai Rp240.413.755.299,- (Dua ratus empat puluh miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 65,05% saham sebesar Rp156.491.377.209,- (Seratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan Rupiah);
 - Sebesar 80% atau senilai Rp961.655.419.764,- (Sembilan ratus enam puluh satu miliar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan yang Belum Ditentukan Penggunaannya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.
 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018;

Rapat dengan suara bulat sebesar 99,33% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan biaya jasa Kantor Akuntan Publik sebesar Rp2.910.000.000,- (Dua miliar Sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) belum termasuk PPN dan out of

pocket expense (OPE). Biaya OPE ditetapkan maksimal sebesar 5% dari biaya jasa Kantor Akuntan Publik.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2018.
5. Penetapan Tantiem Tahun 2017, Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018;

Rapat dengan suara bulat sebesar 99,91% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017, serta menetapkan Honorarium, Tunjangan, Fasilitas dan Insentif lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018; dan
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun Buku 2017, serta menetapkan Gaji, Tunjangan, Fasilitas dan Insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun Buku 2018.
6. Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun Buku 2017 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan;

Rapat dengan suara terbanyak dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengesahkan laporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara Tahun 2016 dan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. untuk periode Tahun Buku 2017.

7. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan;

Rapat dengan suara terbanyak 93,03% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui perubahan penggunaan dana Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan sesuai dengan paparan yang telah disampaikan dalam Rapat ini.

8. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN ("Permen BUMN"):

Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dan Perubahan-Perubahannya;

Rapat dengan suara terbanyak 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/08/2017 dan perubahannya Nomor: PER-04/MBU/09/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.

9. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Rapat dengan suara terbanyak 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas;

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

10. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.

Rapat dengan suara terbanyak 93,09% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:

- 1) Sdr. Bintang Perbowo sebagai Direktur Utama;
- 2) Sdr. Chandra Dwiputra sebagai Direktur Operasi I;
- 3) Sdr. Bambang Pramujio sebagai Direktur Operasi II;
- 4) Sdr. Destiawan Soewardjono sebagai Direktur Operasi III.

terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan.

2. Mengubah Nomenklatur Jabatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

NO.	SEMULA	MENJADI
1	Direktur Human Capital dan Pengembangan Sistem	Direktur Human Capital dan Pengembangan
2	(Belum Ada)	Direktur Quality, Safety, Health and Environment

3. Mengalihkan penugasan Sdr. Novel Arsyad yang semula Direktur Human Capital dan Pengembangan Sistem menjadi Direktur Human Capital dan Pengembangan, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
 - 1) Sdr. Tumiyana sebagai Direktur Utama;
 - 2) Sdr. Agung Budi Waskito sebagai Direktur Operasi I;
 - 3) Sdr. Bambang Pramujio sebagai Direktur Operasi II;
 - 4) Sdr. Destiawan Soewardjono sebagai Direktur Operasi III;
 - 5) Sdr. Danu Prijambodo sebagai Direktur Quality, Safety, Health and Environment
5. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Nurrachman sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 19 April 2018, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
6. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) Sdr. Achmad Hidayat sebagai Komisaris Independen;
 - 2) Sdr. Suryo Hapsoro Tri Utomo sebagai Komisaris Independen.
7. Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
8. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana

dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menjadi sebagai berikut:

A. Direksi

NO.	NAMA	JABATAN
1	Tumiyana	Direktur Utama
2	Agung Budi Waskito	Direktur Operasi I
3	Bambang Pramujio	Direktur Operasi II
4	Destiawan Soewardjono	Direktur Operasi III
5	Novel Arsyad	Direktur Human Capital dan Pengembangan
6	Antonius N.S. Kosasih	Direktur Keuangan
7	Danu Prijambodo	Direktur Quality, Safety, Health and Environment

B. Komisaris

NO.	NAMA	JABATAN
1	Imam Santoso	Komisaris Utama
2	Eddy Kristanto	Komisaris
3	Freddy R. Saragih	Komisaris
4	Lilie Mayasari	Komisaris
5	Imas Aan Ubudiah	Komisaris Independen
6	Achmad Hidayat	Komisaris Independen
7	Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen

9. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perseroan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan dan komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, peran Dewan Komisaris sangat strategis. Oleh karena itu, komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus memungkinkan pengambil keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap direksi.

REFERENSI PERATURAN

RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Penyelenggaraan RUPS di Perseroan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

BOARD MANUAL DEWAN KOMISARIS

Secara lebih rinci, Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* yang mengatur tentang Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris antara lain berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing

untuk mencapai visi dan misi Perseroan. Dengan adanya *Board Manual*, diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi dan selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Board Manual Perseroan telah dilakukan pemutahiran dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor: 05/DK/WIKA/2018 dan Nomor: SK.02.09/A.DIR.0637/2018 tentang Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun isi dari *Board Manual* antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas Dewan Komisaris
2. Kewajiban Dewan Komisaris
3. Wewenang Dewan Komisaris
4. Hak Dewan Komisaris
5. Kriteria Dewan Komisaris
6. Masa Jabatan Dewan Komisaris
7. Program Pengenalan Dewan Komisaris
8. Komisaris Independen
9. Etika Jabatan Dewan Komisaris
10. Rapat Dewan Komisaris
11. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
12. Benturan Kepentingan Dewan Komisaris
13. Hubungan Kerja dengan Direksi
14. Komite yang Membantu Dewan Komisaris
15. Sekretaris Dewan Komisaris

Beberapa pokok pedoman kerja Dewan Komisaris yang diatur dalam *Board Manual* dijabarkan sebagai berikut.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang diatur dalam *Board Manual*, antara lain:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada poin (1), maka:

- a. Dewan Komisaris berwenang untuk:
 - 1) Memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
 - 2) Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
 - 3) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 - 4) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
 - 5) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
 - 6) Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris;
 - 7) Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - 8) Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
 - 9) Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
 - 10) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
 - 11) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern;
 - 12) Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal yang dibicarakan;
 - 13) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau keputusan RUPS.
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
 - 1) Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
 - 2) Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - 3) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
 - 4) Melaporkan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
 - 5) Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan.
 - 6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
 - 7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
 - 8) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 - 9) Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perseroan lain;
 - 10) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
 - 11) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta penegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - 12) Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau keputusan RUPS.
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundang-undangan serta prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajiban;
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas

pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara langsung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat membuktikan:
 1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 2. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
 4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas kewenangan dan kewajibannya Dewan Komisaris berhak untuk:

1. melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
8. membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
9. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
10. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
11. menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern.
12. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
13. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

HAK DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas kewenangan dan kewajibannya Dewan Komisaris berhak untuk:

1. Menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris yang diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris dan Komite-komite yang dianggap perlu, baik bersifat sementara maupun permanen, yang diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebutuhan atas beban Perseroan;
3. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris,

Direksi dan Pemegang Saham yang mengusulkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan;

- a. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri;
- b. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, kecuali pengunduran diri tersebut menyebabkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang;
- c. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya menjadi efektif;
- d. Membebaskan kepada Perseroan biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas kewenangan dan kewajiban Dewan Komisaris dan secara jelas biaya tersebut dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- e. Memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (ke lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota Dewan Komisaris tersebut memenuhi salah satu atau lebih alasan namun tidak terbatas pada:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;

3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
4. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
5. Mengundurkan diri.

Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

KRITERIA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang Saham melalui RUPS memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Dewan Komisaris. Namun demikian, untuk menjamin Dewan maupun anggota Dewan Komisaris yang memiliki kinerja sesuai harapan Pemegang Saham dan kebutuhan Perseroan maka Perseroan perlu menetapkan kebijakan tentang kriteria anggota Dewan Komisaris yang sesuai kebutuhan. Kriteria Dewan Komisaris Perseroan di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota atau lebih yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan kebutuhan.
2. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau

- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
6. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
8. Khusus untuk Anggota Komisaris Independen memiliki kriteria tambahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
10. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
11. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara

anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud di atas, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

12. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SERTA DASAR PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris WIKA telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait, termasuk ketentuan tentang Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya persetujuan lulus *fit and proper test* sebagai berikut.

Tabel Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

NAMA	JABATAN	PERIODE	PELAKSANA	DASAR PENGANGKATAN	TANGGAL EFEKTIF
Imam Santoso	Komisaris Utama	17 Maret 2017 - sekarang	Kementerian BUMN	Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 39 tanggal 23 Maret 2017	17 Maret 2017
Eddy Kristanto	Komisaris	28 April 2016 - 25 Maret 2019	Kementerian BUMN	Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 82 tanggal 28 April 2016	28 April 2016
Freddy R. Saragih	Komisaris	30 Juli 2015 - sekarang	Kementerian BUMN	Akta Keputusan RUPSLB Nomor 22 tanggal 12 Agustus 2015	30 Juli 2015
Lilie Mayasari	Komisaris	30 Juli 2015 - sekarang	Kementerian BUMN	Akta Keputusan RUPSLB Nomor 22 tanggal 12 Agustus 2015	30 Juli 2015

NAMA	JABATAN	PERIODE	PELAKSANA	DASAR PENGANGKATAN	TANGGAL EFEKTIF
Imas Aan Ubudiah	Komisaris Independen	22 April 2015 – 20 September 2018	Kementerian BUMN	Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 45 Tanggal 22 April 2015	22 April 2015
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen	24 April 2018 – sekarang	Kementerian BUMN	Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 94 tanggal 26 April 2018	24 April 2018
Achmad Hidayat	Komisaris Independen	24 April 2018 – sekarang	Kementerian BUMN	Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 94 tanggal 26 April 2018	24 April 2018

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas dengan efektif, maka anggota Dewan Komisaris harus mengenal dan memahami dengan baik profil perusahaan termasuk karakteristik dan proses bisnis Perseroan. Selain itu, agar Dewan Komisaris dapat bekerja selaras dengan organ Perseroan yang lain, maka bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat akan diberikan Program Pengenalan.

Program pengenalan yang diberikan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan ke Kantor Wilayah dan Kantor Cabang atau program lainnya. Tanggung jawab pengadaan program pengenalan ini berada pada Komisaris Utama atau jika Komisaris Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan berada pada Direktur Utama.

Program pengenalan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, antara lain akan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip dan implementasi *Good Corporate Governance*;
2. Gambaran Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta komite audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi;
5. Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kebijakan Perusahaan.

Program Orientasi bagi Dewan Komisaris baru dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Gabungan

Dewan Komisaris dengan Direksi yang diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2018. Rapat Gabungan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan Direksi.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Untuk mengefektifkan peran Dewan Komisaris, dilakukan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan pembagian tugas Direksi. Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris ditujukan agar pelaksanaan tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris secara teknis pada aspek yang dibidangi dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing sehingga terdapat kejelasan tentang peran anggota Dewan Komisaris, baik secara kolektif maupun individual.

Dewan Komisaris melaksanakan pembagian tugas berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 69/DK/WIKA/2018 tentang Pembagian Bidang Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. Berdasarkan keputusan tersebut, pembagian bidang tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, kegiatan pengawasan dan penasihatian terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, Dewan Komisaris harus senantiasa berpedoman pada Anggaran Dasar serta ketentuan Peraturan dan Perundangan yang berlaku;
2. Tugas pengawasan Dewan Komisaris dijabarkan menjadi fungsi *partnership*, konsultan dan katalis untuk menciptakan hubungan dan sinergi yang baik antara Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Pengawasan Dewan Komisaris kepada Direksi

tidak dilaksanakan secara *head to head* setiap anggota Dewan Komisaris kepada setiap anggota Direksi, namun bersifat kolegial yang dibantu pelaksanaannya melalui peran dan fungsi setiap Komite Dewan Komisaris;

4. Di samping melaksanakan tugas sebagaimana butir pertama, disepakati bersama oleh segenap Dewan Komisaris Perseroan bahwa masing-masing personil Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan tugas khusus yang bersifat spesifik dan prioritas, sebagai berikut:

Tabel Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	PERIODE	BIDANG TUGAS
Imam Santoso	Komisaris Utama	17 Maret 2017 - sekarang	- Mengkoordinir semua kegiatan Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan penasihat. - Bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam penyampaian secara tertulis semua kegiatan dan pekerjaan pengawasan - Pengawasan dan penasihat Sipil Umum dan Bangunan Gedung - Koordinasi lintas sektoral
Eddy Kristanto	Komisaris	28 April 2016 - 25 Maret 2019	- Pengawasan dan penasihat di bidang usaha luar negeri, bangunan dan investasi - Koordinasi lintas sektoral - Melaporkan kepada Komisaris Utama semua pekerjaannya
Freddy R. Saragih	Komisaris	30 Juli 2015 - sekarang	- Pengawasan dan penasihat di bidang keuangan dan legal - Koordinasi lintas sektoral - Melaporkan kepada Komisaris Utama semua pekerjaannya
Lilie Mayasari	Komisaris	30 Juli 2015 - sekarang	- Pengawasan dan penasihat di bidang sipil umum dan pemasaran - Koordinasi lintas sektoral - Melaporkan kepada Komisaris Utama semua pekerjaannya
Imas Aan Ubudiah	Komisaris Independen	22 April 2015 - 20 September 2018	- Mengkoordinir kegiatan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG - Koordinasi lintas sektoral - Melaporkan kepada Komisaris Utama semua pekerjaannya
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen	24 April 2018 - sekarang	- Pengawasan dan penasihat di bidang industrial plant dan energi - Koordinasi lintas sektoral - Melaporkan kepada Komisaris Utama semua pekerjaannya
Achmad Hidayat	Komisaris Independen	24 April 2018 - sekarang	- Pengawasan dan penasihat di bidang SHE - Koordinasi lintas sektoral - Melaporkan kepada Komisaris Utama semua pekerjaannya

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN PENERAPANNYA

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris. Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan

baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Dewan Komisaris dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Dewan Komisaris ataupun Dewan Komisaris secara kolegial.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris seperti yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah diakomodir dalam Anggaran Dasar serta *Board Manual* Perseroan. Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan. Namun demikian, kebijakan keberagaman tersebut baru mengatur tentang keberagaman pengetahuan dan/atau keahlian sesuai dengan bidang tugas Dewan Komisaris. Kebijakan keberagaman terkait usia dan jenis kelamin belum dimiliki oleh WIKA, karena nominasi diprioritaskan pada kebutuhan Perseroan.

Pada periode 2018, keberagaman komposisi Dewan Komisaris yang tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	PERIODE	USIA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA	KEAHLIAN
Imam Santoso	Komisaris Utama	17 Maret 2017 - sekarang	60 tahun	Laki-laki	- Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1982 - Master of Science, Institute of Irrigation and Water Resources, Southampton University, tahun 1990 - Doktor/S3 Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2018	- Kepala BWS Nusa Tenggara 1 (2006-2008) - Kepala Sub Dit. Perencanaan Wilayah Sungai (2008 - 2011) - Kepala BBWS Ciliwung Cisadane (2011-2013) - Kepala BBWS Pemali Juana (2013-2014) - Direktur Sungai dan Pantai (2014-2015) - Kepala Pusat Bendungan (2015-2016) - Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2016 - 2018)	Teknik Sipil
Eddy Kristanto	Komisaris	28 April 2016 - 25 Maret 2019	58 tahun	Laki-laki	- Menempuh pendidikan AKABRI, tahun 1984 - Menempuh pendidikan SESKOAD, tahun 1997	- Kepala Badan Intelijen Negara, Bali (2014-2016) - Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Badan Intelijen Negara (2016)	Strategi Bisnis
Freddy R. Saragih	Komisaris	30 Juli 2015 - sekarang	59 tahun	Laki-laki	- Sarjana Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1984 - Master Profesional Akuntansi, University of Texas, Austin tahun 1992	- Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan di Kementerian Keuangan (2006 - 2009) - Kepala Pusat Pengelolaan Resiko Fiskal - BKF di Kementerian Keuangan (2009 - 2014) - Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur di Kementerian Keuangan (2015 - sekarang)	Ekonomi dan Akuntansi

NAMA	JABATAN	PERIODE	USIA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA	KEAHLIAN
Lilie Mayasari	Komisaris	30 Juli 2015 - sekarang	49 tahun	Perempuan	- Sarjana Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1994	- Kepala Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur IIIb Kementerian BUMN (2010-2014) - Kepala Bidang Usaha Energi dan Pertambangan I di Kementerian BUMN (2014-2015) - Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN (2015-2017) - Plt. Kepala Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Kementerian BUMN (2016-2017) - Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian BUMN (2017-sekarang) - Kepala Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia Kementerian BUMN (sekarang)	Ekonomi
Imas Aan Ubudiah	Komisaris Independen	22 April 2015 - 20 September 2018	43 tahun	Perempuan	- Sarjana di Universitas Islam Bandung, tahun 2008	- Direktur Utama PT Tambang Mutiara Bumi Selatan (MBS) (2008-2013) - Wakil Ketua ICMI Garut (2009-2013) - Ketua Yayasan Ubudiah Karya Abadi (YUKA Indonesia) (2010 - sekarang)	Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen	24 April 2018 - sekarang	62 tahun	Laki-laki	- Sarjana Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1984 - Ph.D. (Doctor of Philosophy), University of Newcastle upon Tyne, Inggris tahun 1996	- Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen/Kementerian Pendidikan Nasional/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2009 - 2012) - Country Representative of Indonesia to the SEAMEO SEARCA Governing Board (2009-2012) - Rektor Universitas Budi Luhur Jakarta (2012-2016) - Wakil Ketua Board of Advisory, Institut Teknologi Yogyakarta (2015 - sekarang)	Teknik Sipil dan Manajemen
Achmad Hidayat	Komisaris Independen	Komisaris Independen	61 tahun	Laki-laki	- Menempuh pendidikan Akademi Kepolisian tahun 1980 - Menempuh pendidikan PTIK tahun 1986 - Menempuh pendidikan Sespim Polri tahun 1997 - Menempuh pendidikan Sespasi Polri tahun 2005 - Sarjana Hukum tahun 2008	- Kepala Divisi Teknologi dan Informasi Polri (2013) - Kepala Biro Bin Opsnal Bareskrim Polri (2010) - Kepala Biro Analisis Bareskrim Polri (2010)	Hukum

JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2018, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris WIKA mengalami perubahan sebagaimana penjelasan sebagai berikut.

Periode 1 Januari 2018 – 24 April 2018

NAMA	JABATAN
Imam Santoso	Komisaris Utama
Eddy Kristanto	Komisaris
Freddy R. Saragih	Komisaris
Lilie Mayasari	Komisaris
Nurrachman	Komisaris Independen
Imas Aan Ubudiah	Komisaris Independen

Periode 24 April 2018 – 31 Desember 2018

NAMA	JABATAN
Imam Santoso	Komisaris Utama
Eddy Kristanto *	Komisaris
Freddy R. Saragih	Komisaris
Lilie Mayasari	Komisaris
Imas Aan Ubudiah**	Komisaris Independen
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen
Achmad Hidayat	Komisaris Independen

*) Berdasarkan Keputusan RUPSLB pada tanggal 25 Maret 2019 yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan

**) Per 20 September 2018, yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI untuk Pemilihan Umum tahun 2019 sehingga sesuai Anggaran Dasar pasal 14 ayat 29, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris dikarenakan adanya larangan rangkap jabatan sebagai caleg DPR.

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris

NAMA	JABATAN	PERIODE	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN						HUBUNGAN KELUARGA DENGAN						HUBUNGAN KEPENGURUSAN	
			DEWAN KOMISARIS		DIREKSI		PEMEGANG SAHAM		DEWAN KOMISARIS		DIREKSI		PEMEGANG SAHAM			
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
Imam Santoso	Komisaris Utama	17 Maret 2017 – sekarang		v		v		v		v		v		v		v

NAMA	JABATAN	PERIODE	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN						HUBUNGAN KELUARGA DENGAN						HUBUNGAN KEPENGURUSAN	
			DEWAN KOMISARIS		DIREKSI		PEMEGANG SAHAM		DEWAN KOMISARIS		DIREKSI		PEMEGANG SAHAM			
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
Eddy Kristanto	Komisaris	28 April 2016 – 25 Maret 2019		v		v		v		v		v		v		v
Freddy R. Saragih	Komisaris	30 Juli 2015 – sekarang		v		v		v		v		v		v		v
Liliek Mayasari	Komisaris	30 Juli 2015 – sekarang		v		v		v		v		v		v		v
Imas Aan Ubudiah	Komisaris Independen	22 April 2015 – 20 September 2018		v		v		v		v		v		v		v
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen	24 April 2018 – sekarang		v		v		v		v		v		v		v
Achmad Hidayat	Komisaris Independen	24 April 2018 – sekarang		v		v		v		v		v		v		v

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan *Board Manual*, Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

NAMA	JABATAN	PERIODE	JABATAN PADA PERUSAHAAN/INSTANSI LAIN	NAMA PERUSAHAAN/ INSTANSI LAIN
Imam Santoso	Komisaris Utama	17 Maret 2017 - sekarang	Direktur Jenderal Sumber Daya Air (2016 - Juli 2018)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Eddy Kristanto	Komisaris	28 April 2016 - 25 Maret 2019	Perwira Tinggi TNI	Badan Intelijen Negara
Freddy R. Saragih	Komisaris	30 Juli 2015 - sekarang	Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur	Kementerian Keuangan
Liliek Mayasari	Komisaris	30 Juli 2015 - sekarang	• Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi • Kepala Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia	Kementerian BUMN
Imas Aan Ubudiah	Komisaris Independen	22 April 2015 - 20 September 2018	Ketua Yayasan Ubudiah Karya Abadi	YUKA Indonesia
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen	24 April 2018 - sekarang	Wakil Ketua Board of Advisory	Institut Teknologi Yogyakarta
Achmad Hidayat	Komisaris Independen	24 April 2018 - sekarang	-	-

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Benturan kepentingan Dewan Komisaris adalah suatu kondisi tertentu di mana kepentingan individual anggota Dewan Komisaris berpotensi untuk bertentangan dengan kepentingan Perusahaan untuk meraih laba, meningkatkan nilai Perusahaan, mencapai visi dan menjalankan misi Perusahaan serta melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris WIKA mematuhi Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Beberapa prinsip yang dianut untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris selalu menghindari adanya benturan kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya. Dewan Komisaris tidak akan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang terkait.
2. Dewan Komisaris harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi

independensinya dalam tugas pengawasan Perusahaan.

3. Dewan Komisaris berkewajiban mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan lain.
4. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan.
5. Dewan Komisaris berkewajiban membuat pernyataan mengenai benturan kepentingan terhadap hal-hal yang termaktub dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

WIKA menyelenggarakan Daftar Khusus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk komitmen dalam menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Daftar Khusus tersebut berisi informasi kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan keluarga di Perseroan dan perusahaan lain. Rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	PERIODE	KEPEMILIKAN SAHAM	
			WIKA	PERUSAHAAN LAIN
Imam Santoso	Komisaris Utama	17 Maret 2017 - sekarang	-	-
Eddy Kristanto	Komisaris	28 April 2016 - 25 Maret 2019	-	-
Freddy R. Saragih	Komisaris	30 Juli 2015 - sekarang	-	-
Liliek Mayasari	Komisaris	30 Juli 2015 - sekarang	-	-
Imas Aan Ubudiah*	Komisaris Independen	22 April 2015 - 20 September 2018	-	-
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen	24 April 2018 - sekarang	-	-
Achmad Hidayat	Komisaris Independen	24 April 2018 - sekarang	-	-

KOMISARIS INDEPENDEN

Pengangkatan Komisaris Independen diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik atau Regulasi Bursa Efek Indonesia dalam Peraturan Bapepam No.IX.1.5 dan Bursa Efek Indonesia No.IA Kep-305/BEJ/07-2004. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan Pemegang Saham minoritas.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN PEMENUHANNYA

Perusahaan menyadari pentingnya keberadaan Anggota Dewan Komisaris yang independen. Untuk mempersiapkan keberadaan Anggota Komisaris Independen, maka sejalan dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU.2011 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan mendefinisikan Anggota Komisaris Independen sebagai berikut:

KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN	SURYO HAPSORO TRI UTOMO	ACHMAD HIDAYAT	IMAS AAN UBUDIAH*
Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan yang terafiliasi dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	v	v	v
Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk departemen, lembaga dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.	v	v	v
Tidak bekerja di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.	v	v	v
Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan afiliasinya.	v	v	v
Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Anggota Komisaris Independen yang berasal dari kalangan di luar Perusahaan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	v	v	v

Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang pasar modal yaitu Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 serta peraturan No. I-A Bursa Efek Indonesia, Komposisi jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris.

PERNYATAAN KOMISARIS INDEPENDEN



Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Dengan ini, saya selaku Komisaris Independen PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk., menyatakan bahwa :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung dan/atau hubungan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya dalam bertugas dan bertindak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Perseroan.
2. Tidak memiliki kegiatan atau aktivitas ;
 - a. Menjabat sebagai Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta.
 - b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan,
 - c. Menjabat jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, sebagai pengurus partai politik, Calon atau menjabat Anggota Legislatif, calon atau menjabat sebagai Kepala/ Wakil Kepala Pemerintahan Daerah, dan/atau,
 - d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang berpengaruh pada pengawasan saya sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Apabila suatu hari nanti ditemukan bahwa kami terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang termuat dalam poin 1 dan 2 di atas, maka saya bersedia melepas jabatan Komisaris Independen Perseroan dan bersedia diganti.

Jakarta, 24 Agustus 2018
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Achmad Hidayat
Komisaris Independen

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.



• INDUSTRI • INFRASTRUKTUR & GEDUNG • ENERGI & INDUSTRIAL PLANT • REALTI & PROPERTI • INVESTASI

Jl D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340, Kotak Pos 4174/JKTJ, Telepon : +62-21 8192808, 8508840, 8508850, Faksimili : +62-21 8191235

**Pernyataan Independensi
Komisaris Independen**

Dengan ini, saya selaku Komisaris Independen PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk., menyatakan bahwa :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung dan/atau hubungan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya dalam bertugas dan bertindak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Perseroan.
2. Tidak memiliki kegiatan atau aktivitas ;
 - a. Menjabat sebagai Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta.
 - b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan,
 - c. Menjabat jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, sebagai pengurus partai politik, Calon atau menjabat Anggota Legislatif, calon atau menjabat sebagai Kepala/ Wakil Kepala Pemerintahan Daerah, dan/atau,
 - d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang berpengaruh pada pengawasan saya sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Apabila suatu hari nanti ditemukan bahwa kami terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang termuat dalam poin 1 dan 2 di atas, maka saya bersedia melepas jabatan Komisaris Independen Perseroan dan bersedia diganti.

Jakarta, 24 Agustus 2018
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Suryo Hapsoro Tri Utomo
Komisaris Independen

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.



• INDUSTRI • INFRASTRUKTUR & GEDUNG • ENERGI & INDUSTRIAL PLANT • REALTI & PROPERTI • INVESTASI

Jl D.I. Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta 13340, Kotak Pos 4174/JKT.J, Telepon : +62-21 8192808, 8508640, 8508650, Faksimili : +62-21 8191235

**Pernyataan Independensi
Komisaris Independen**

Dengan ini, saya selaku Komisaris Independen PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk., menyatakan bahwa ;

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung dan/atau hubungan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya dalam bertugas dan bertindak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Perseroan.
2. Tidak memiliki kegiatan atau aktivitas ;
 - a. Menjabat sebagai Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta.
 - b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan,
 - c. Menjabat jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, sebagai pengurus partai politik, Calon atau menjabat Anggota Legislatif, calon atau menjabat sebagai Kepala/ Wakil Kepala Pemerintahan Daerah, dan/atau,
 - d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang berpengaruh pada pengawasan saya sebagai Komisaris Independen Perseroan.
3. Apabila suatu hari nanti ditemukan bahwa kami terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang termuat dalam poin 1 dan 2 di atas, maka saya bersedia melepas jabatan Komisaris Independen Perseroan dan bersedia diganti.

Jakarta, 24 Agustus 2018

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Imas Aan Ubudiah
Komisaris Independen

REKOMENDASI DAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2018, selain tugas melaksanakan rapat, pemberian rekomendasi yang merupakan tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi maupun peninjauan langsung ke cabang, unit kerja, proyek di lingkungan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., tugas Dewan Komisaris juga mencakup:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, serta Ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Dewan Komisaris dalam melaksanakan, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;
3. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepentingan Perusahaan berkaitan dengan kepentingan Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
4. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menganalisis dan meninjau laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut (selama Dewan Komisaris setuju dengan isi Laporan Tahunan);
5. Dewan Komisaris mengkaji kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang berlaku (kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan);
6. Dewan Komisaris mengevaluasi kemajuan praktik penerapan GCG.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris, Dewan Komisaris mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya

Tbk., Nomor 78/DK/WIKA/2018 tanggal 29 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris, yaitu:

1. Sekretariat Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:
 - a. Menyiapkan bahan rapat internal Dewan Komisaris dan bahan rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi;
 - b. Menyiapkan hasil evaluasi atas laporan kinerja keuangan, operasional yang disampaikan Direksi untuk Dewan Komisaris;
 - c. Menyiapkan risalah rapat internal Dewan Komisaris dan risalah rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi;
 - d. Mengembangkan indikator kinerja Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris serta Komite Dewan Komisaris serta metode evaluasi indikator kinerja;
 - e. Memastikan bahwa Dewan Komisaris telah memenuhi seluruh aspek dan ketentuan *Good Corporate Governance*.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat adalah:
 - a. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - b. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
 - c. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
3. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perusahaan.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS



NURUL ALMY FIRDAUSI

Sekretaris Dewan Komisaris

Nurul Almy Firdausi

Warga Negara Indonesia, usia 33 tahun, dilahirkan di Bogor, 7 April 1985. Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak tahun 2018. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Industri Agro dan Farmasi 1b-1 Kementerian BUMN. Pengalaman kedinasan yang pernah diemban antara lain sebagai Staf Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2015-2018), Analis Data BUMN Perbankan dan Asuransi Kementerian BUMN (2013-2015), dan Sekretaris Dewan Komisaris di beberapa perusahaan seperti PT Indofarma (Persero) Tbk. (2014-2015), PT Industri Kereta Api Indonesia (Persero) (2013-2014), PT Garam (Persero) (2011-2013) dan PT Sarana Karya (Persero) (2008-2012).

Selama masa jabatannya tersebut, tugas-tugas yang dilaksanakan antara lain: menyiapkan data dan informasi untuk bahan perumusan kebijakan dan melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang Usaha Perkebunan, membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, dan menyiapkan data dan informasi untuk bahan perumusan kebijakan terkait pengelolaan data portal Direksi dan Dewan Komisaris BUMN, LHKPN eksekutif BUMN dan proses mutasi Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN, dan lain-lain.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018

Pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Sekretaris Dewan Komisaris selama tahun 2018, antara lain:

PELATIHAN	TANGGAL	PENYELENGGARA
Risk Management ISO 31000 IRMS – ERM Fundamentals	2018	Center for Risk Management Studies (CRMS) Indonesia
Business Modeling	2018	PriceWaterhouseCoopers
Problem Solving and Decision Making	2018	Management and Development International (MDI) – Training & Consulting

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan dukungan dalam berbagai kegiatan Dewan Komisaris, kegiatan Komite Dewan Komisaris, maka Kegiatan Sekretariat Dewan Komisaris secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: Kegiatan Rutin dan Kegiatan Non Rutin. Kegiatan Rutin Sekretariat Dewan Komisaris meliputi:

1. Kegiatan Rapat Internal Sekretariat Dewan Komisaris;

Tujuan:

- a. Melakukan pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan administrasi di lingkungan Dewan Komisaris;
- b. Mendukung kelancaran tugas-tugas Dewan Komisaris dan Organnya.

Sasaran:

- a. Terlaksananya fungsi administrasi Sekretariat Dewan Komisaris dengan baik;
- b. Tersedianya bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka Rapat-rapat;
- c. Dewan Komisaris dengan Direksi, Rapat Internal Dewan Komisaris, maupun Rapat Komite Dewan Komisaris;
- d. Terpenuhinya kebutuhan Dewan Komisaris yang terkait dengan fungsi pengawasan Perseroan.

Pelaksanaan:

- a. Apabila diperlukan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu untuk membahas hal-hal yang bersifat penting dan atau mendesak;
- b. Pelaksanaan Rapat Internal Sekretariat Dewan Komisaris mengacu kepada ketentuan yang berlaku di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Output:

Penyediaan bahan rapat Dewan Komisaris/Dewan Komisaris dan Direksi, surat-surat yang harus ditandatangani oleh Dewan Komisaris, dan lain-lain.

2. Kegiatan penyiapan dan dukungan Kegiatan Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris.

Program Kerja Target;

- a. Program Kerja; Target Penyiapan Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris dan Dinamika Rapat Internal Dewan Komisaris
Penyelesaian;
Risalah Rapat Internal disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Rapat Penyelesaian
- b. Program Kerja;
Target Penyiapan Risalah Rakomdir dan Dinamika Rakomdir
Penyelesaian;
Risalah Rakomdir disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Rapat Penyelesaian
- c. Program Kerja Target
Penyiapan seluruh Kegiatan Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris, meliputi;
 - i. Penyiapan bahan Rapat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris;
 - ii. Penyiapan dukungan kegiatan Perjalanan Dinas Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris;
 - iii. Penyiapan dukungan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris
 - iv. dan lain-lain.

Kegiatan Non Rutin Sekretariat Dewan Komisaris meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lainnya yang diberikan sesuai arahan dan kebutuhan Dewan Komisaris.

Program kerja: masing-masing personil Sekretariat Dewan Komisaris mengikuti seminar/workshop/pelatihan/pengembangan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat Dewan Komisaris untuk meningkatkan kompetensi dan/atau pengetahuan Personil Sekretariat Dewan Komisaris.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui beberapa macam prosedur, antara lain sebagai berikut:

- **Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS**

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak pengangkatannya. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris baik selaku Dewan maupun individu merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

- **Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris**

Kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS berdasarkan *Board Manual* dan Rencana Kerja (Renja) Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, yang setiap awal tahun ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan. Renja ini berisi target-target kinerja Dewan Komisaris.

- **Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris**

Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan kriteria kinerja Dewan Komisaris maupun individu anggota Dewan Komisaris. Kriteria evaluasi kinerja individu Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada.
2. Kontribusinya dalam proses pengawasan Perseroan.
3. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu.
4. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan.
5. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.

- **Pihak yang Melakukan Assessment**

Pihak yang melakukan *assessment* atas kinerja Dewan Komisaris yaitu Pemegang Saham dalam RUPS.

- **Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**

Tahun 2018 Dewan Komisaris telah menyusun Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris dengan memperhatikan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah menggunakan Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris tersebut sebagai pedoman kerja bagi setiap anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan Perseroan.

- **Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dengan Metode Self-Assessment GCG**

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dengan metode *Self Assessment* mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

- **Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Dewan Komisaris**

Selama masa tugasnya, anggota Dewan Komisaris akan dinilai kinerjanya. Pelaksanaan *assessment* tersebut dilakukan melalui

beberapa tahap, antara lain: penyampaian dokumen yang dibutuhkan, pengisian kuesioner oleh Dewan Komisaris dan Direksi, wawancara, analisis BPKP terhadap dokumen, kuesioner, wawancara dan observasi yang dilakukan, presentasi hasil sementara oleh BPKP, dan pelaporan oleh BPKP mengenai hasil capaian dan rekomendasi terhadap kinerja Dewan Komisaris.

• Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria penilaian Dewan Komisaris meliputi:

1. Pelaksanaan program pelatihan/ pembelajaran Dewan Komisaris;
2. Pembagian tugas dan penetapan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
3. Pemberian persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi;
4. Pemberian arahan kepada Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;
5. Pelaksanaan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;
6. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan;
7. Peran dalam pencalonan anggota Direksi, penilaian kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan pengusulan tantiem/insentif kinerja Direksi;
8. Pelaksanaan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut Dewan Komisaris;
9. Pemantauan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
10. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadirannya dalam rapat tersebut;
11. Terdapatnya Sekretaris Dewan Komisaris yang mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan Dewan Komisaris;
12. Terdapatnya Komite Dewan Komisaris yang efektif.

• Pihak yang Melakukan Assessment

Pelaksanaan penilaian *self assessment* GCG Dewan Komisaris pada tahun ini dilaksanakan oleh Perseroan dengan verifikator dari BPKP.

• Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Pada 2018, hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris mencapai skor 33,186 dengan capaian 94,82% dan predikat sangat baik.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mengawasi dan mengelola Perseroan didukung oleh Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG. Selama tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya antara lain dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan penelaahan atas informasi keuangan, penelaahan atas aktivitas pelaksanaan manajemen risiko, penelaahan atas hasil audit Satuan Pengawasan Intern dan KAP atas Sistem Pengendalian Internal. Sementara Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG telah melaksanakan tugasnya antara lain dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, monitoring kepatuhan atas kegiatan Perseroan, serta melakukan tinjauan/kunjungan ke beberapa proyek.

Di tahun 2018, Dewan Komisaris memandang bahwa komite-komite di bawah supervisi Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi masing-masing dengan efektif dan memberikan masukan serta arahan yang konstruktif kepada Dewan Komisaris.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan

berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (ke lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota Dewan Komisaris tersebut memenuhi salah satu atau lebih alasan namun tidak terbatas pada:

- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
- e. mengundurkan diri.

Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1(satu) kali masa jabatan.

2. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
3. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada butir 1 a, b, dan c di atas, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c dan d di atas merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut;

5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. Pengunduran dirinya efektif sebagaimana memenuhi ketentuan Anggaran Dasar;
- b. meninggal dunia;
- c. masa jabatannya berakhir;
- d. diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga Perseroan memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

7. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1(satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1(satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2018, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT	PESERTA RAPAT	KEHADIRAN HADIR/ TIDAK HADIR
Rapat Internal Dekom				
1	6 Februari 2018	a. Pembahasan Surat Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan-KBUMN perihal Laporan Kinerja Direksi Eksisting dan Usulan Bakal Calon Direksi. b. Presentasi KAP terkait 2 (dua) transaksi material di WIKA Realty dan Kereta Cepat. c. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Nurrachman	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
2	28 Februari 2018	a. Presentasi PwC terkait Transformasi Organisasi Perseroan. b. Pembahasan Evaluasi Kinerja Direksi Eksisting Tahun 2017. c. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Nurrachman	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
3	1 Maret 2018	a. Presentasi Lanjutan PWC terkait Transformasi Organisasi WIKA. b. Pembahasan Evaluasi Kinerja Direksi Eksisting dan Usulan Bakal Calon Direksi. c. Pembahasan Kinerja Komite Dewan Komisaris. d. Pembahasan <i>Pending Matters</i> di Dewan Komisaris. e. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Nurrachman	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
4	2 April 2018	a. Pendalaman Laporan Keuangan Audit Tahun Buku 2017 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. b. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Nurrachman	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
5	7 Mei 2018	a. Perkenalan Anggota Dewan Komisaris dan Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. b. Penetapan ketua Komite Audit PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. c. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT	PESERTA RAPAT	KEHADIRAN HADIR/ TIDAK HADIR
Rapat Internal Dekom				
6	7 Juni 2018	a. Pembahasan Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SR-64/S. MBU/05/2018 tanggal 24 Mei perihal Usulan Pergantian Sekretaris Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. b. Pembahasan Usulan Penggantian Anggota Komite Audit PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. c. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
7	25 Juli 2018	a. Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Kementerian BUMN terkait Batasan Kewenangan (<i>threshold</i>). b. Laporan Komite Audit atas Format Kunjungan Kerja Dewan Komisaris. c. Persiapan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Bali dan Surabaya. d. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
8	30 Juli 2018	a. Pembahasan Hasil Review Komite Audit atas Kinerja WKA sampai dengan Bulan Mei dan Bulan Juni 2018. b. Review SK Remunerasi Staf Dewan Komisaris. c. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya dan Surat Masuk Dewan Komisaris. d. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
9	9 Agustus 2018	a. Usulan Persetujuan Penyesuaian Piagam SPI. b. Update Usulan Batasan Kewenangan (<i>Threshold</i>). c. Rencana Kunjungan Proyek oleh Dewan Komisaris. d. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya dan Surat Masuk Dewan Komisaris. e. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
10	3 September 2018	a. Review Komite Audit atas Kinerja WKA s.d Juli 2018. b. Update Usulan Batasan Kewenangan (<i>Threshold</i>). c. Rencana Kunjungan Proyek oleh Dewan Komisaris. d. Penyesuaian Remunerasi Anggota Komite Nominasi, Remunerasi & GCG. e. Program Pengembangan Dewan Komisaris. f. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya dan Surat Masuk Dewan Komisaris. g. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat	Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
11	1 Oktober 2018	a. Review Komite Audit atas Kinerja WKA s.d Agustus 2018. b. Update Progress Batasan Kewenangan (<i>Threshold</i>). c. Observasi GCG oleh IICG. d. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya. e. Surat Masuk Dewan Komisaris. f. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat	Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT	PESERTA RAPAT	KEHADIRAN HADIR/ TIDAK HADIR
Rapat Internal Dekom				
12	12 Oktober 2018	a. Penunjukan KAP untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian WIKA Tahun Buku 2018. b. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya. c. Surat Masuk Dewan Komisaris. d. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat	Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir
13	22 Oktober 2018	a. Laporan Pembahasan antara Komite Dewan Komisaris dengan Departemen Perencanaan dan Pengembangan Usaha. b. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat	Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir
14	14 November 2018	a. Laporan <i>Progress</i> Penunjukan KAP Tahun 2018 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat	Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir
15	21 November 2018	a. Pembahasan Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2019. b. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya. c. Surat Masuk Dewan Komisaris. d. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat	Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir
16	28 November 2018	a. <i>Review</i> Komite Audit atas Kinerja Konsolidasian WIKA s.d Bulan Oktober 2018. b. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya. c. Surat Masuk Dewan Komisaris. d. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat	Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir
17	21 Desember 2018	a. <i>Review</i> Komite Audit atas Kinerja WIKA s.d Oktober 2019. b. <i>Review</i> Komite Audit atas Usulan RKAP 2019. c. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya. d. Surat Masuk Dewan Komisaris. e. Lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat	Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir

Tabel Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT	PESERTA RAPAT	KEHADIRAN HADIR/ TIDAK HADIR
Rakomdir				
1	6 Februari 2018	a. Tindak lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan bulan Desember 2017. b. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan, Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan Desember 2017, dan Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2017. c. Pembahasan Perjanjian Kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Tindak Lanjut Proyek SPAM Jatiluhur. d. Perkembangan Penyelesaian Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2017. e. Persiapan Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017. f. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Nurrachman Direksi: - Bintang Perbowo - Chandra Dwiputra - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir
2	28 Februari 2018	a. Tindak Lanjut Rakomdir sampai dengan bulan Januari 2018. b. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan, Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan Desember 2017, dan Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sampai dengan bulan Januari 2018. c. Perkembangan Penyelesaian Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2017. d. Usulan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait dengan Pembagian Laba Bersih Tahun Buku 2017, Pembagian Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2017, Penyesuaian Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 serta Usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. e. Pembahasan Rencana Perubahan Penggunaan Dana PMN dan Kesiapannya untuk Diputuskan dalam Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2017. f. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Nurrachman Direksi: - Bintang Perbowo - Chandra Dwiputra - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir
3	5 Maret 2018	a. Pembahasan Setoran Modal PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). b. Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. termasuk di dalamnya Rencana Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2018. c. Pengesahan Perubahan Kontrak Manajemen antara Direksi dengan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2018. d. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Nurrachman Direksi: - Bintang Perbowo - Chandra Dwiputra - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT	PESERTA RAPAT	KEHADIRAN HADIR/ TIDAK HADIR
Rakomdir				
4	9 April 2018	a. Tindak Lanjut Rakomdir sampai dengan bulan Februari 2018. b. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan, Laporan <i>Progress</i> Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan Februari 2018, dan Laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2018. c. Laporan Proses Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018. d. Laporan Persiapan Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dan Usulan Agenda Persetujuan oleh RUPS. e. Penjelasan Kaitan Hubungan Kerjasama dalam Proyek Laswi antara WIKA - KAI, WIKA - WIKA Realty, dan WIKA Realty - KAI, serta Status Setoran Modal WIKA kepada KAI. f. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Nurrahman Direksi: - Bintang Perbowo - Chandra Dwiputra - Bambang Pramujio - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
5	19 April 2018	a. Penjelasan Kinerja PT WIKA Realty 2017 dan Catatan KAP atas Audit Tahun Buku 2017 PT WIKA Realty. b. Penjesalan Kinerja Tahun 2017 dan RKAP 2018 PT WIKA Bitumen. c. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Nurrahman Direksi: - Bintang Perbowo - Chandra Dwiputra - Bambang Pramujio - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
6	14 Mei 2018	a. Tindak Lanjut Rakomdir sampai dengan bulan Maret 2018 (Triwulan I/2018); b. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan, Laporan <i>Progress</i> Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan Maret 2018 (Triwulan I/2018), dan Laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2018 (Triwulan I/2018). c. Program Pengenalan Kegiatan Usaha Perseroan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Baru. d. <i>Progress</i> dan Tindak Lanjut Program Kerja untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung pasca Pencairan Pinjaman dari China Development Bank (CDB) Tanggal 2 Mei 2018. e. Pemaparan Mekanisme Penyampaian Surat Permohonan Persetujuan atas Aksi Korporasi Perseroan kepada Dewan Komisaris f. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat Direksi: - Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujio - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT	PESERTA RAPAT	KEHADIRAN HADIR/ TIDAK HADIR
Rakomdir				
7	7 Juni 2018	a. Tindak Lanjut Rakomdir sampai dengan bulan April 2018. b. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan, Laporan <i>Progress</i> Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan April 2018, dan Laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2018. c. Pemaparan Program <i>Quality, Safety, Health, and Environment</i> PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. d. Pemaparan Rescuster Organisasi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. e. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat Direksi: - Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir
8	30 Juli 2018	a. Tindak Lanjut Rakomdir sampai dengan bulan Mei 2018. b. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan, Laporan <i>Progress</i> Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan Mei 2018, dan Laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2018.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat Direksi: - Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
9	30 Juli 2018	a. Laporan Hasil Manajemen Review posisi sampai dengan bulan Juni 2018 (Triwulan II/2018). b. <i>Progress</i> Proyek-proyek untuk Asian Games. c. Informasi dan Profil Proyek WIKA Serang Panimbang. d. Evaluasi Kinerja PT WIKA Bitumen sampai dengan bulan Juni 2018 (Triwulan II/2018). e. Usulan Jadwal dan Agenda Rapat Khusus Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdirsus). f. Laporan Hasil Kunjungan Dewan Komisaris dan Rencana Kunjungan berikutnya.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat Direksi: - Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT	PESERTA RAPAT	KEHADIRAN HADIR/ TIDAK HADIR
Rakomdir				
10	3 September 2018	a. Tindak Lanjut Rakomdir sampai dengan bulan Juni 2018. b. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan, Laporan <i>Progress</i> Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan Juni 2018, dan Laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2018. c. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat Direksi: - Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujono - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
11	1 Oktober 2018	a. Tindak Lanjut Rakomdir sampai dengan bulan Agustus 2018. b. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan, Laporan <i>Progress</i> Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan Agustus 2018, dan Laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2018. c. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat Direksi: - Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujono - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
12	26 Oktober 2018	a. Tindak Lanjut Rakomdir sampai dengan bulan September 2018. b. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan, Laporan <i>Progress</i> Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan September 2018, dan Laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2018. c. Pendalaman Rencana Investasi WIK: 1. Divestasi; 2. Tambahan Setoran Modal. d. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat Direksi: - Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujono - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT	PESERTA RAPAT	KEHADIRAN HADIR/ TIDAK HADIR
Rakomdir				
13	28 November 2018	a. Tindak Lanjut Rakomdir sampai dengan bulan Oktober 2018. b. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan, Laporan <i>Progress</i> Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan Oktober 2018, dan Laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2018. c. Pemaparan mengenai Pleno RKAP Tahun 2019 oleh Direksi. d. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat Direksi: - Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir
14	21 Desember 2018	a. Tindak Lanjut Rakomdir sampai dengan bulan November 2018. b. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan, Laporan <i>Progress</i> Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan November 2018, dan Laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2018. c. Pengesahan RKAP PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2019 oleh Direksi. d. dan lain-lain.	Komisaris: - Imam Santoso - Eddy Kristanto - Freddy R. Saragih - Liliek Mayasari - Imas Aan Ubudiah - Suryo Hapsoro Tri Utomo - Achmad Hidayat Direksi: - Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT

Rapat Internal Dewan Komisaris selama 2018 dilaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) kali. Sedangkan, Rakomdir selama 2018 dilaksanakan sebanyak 14 (empat belas) kali. Adapun frekuensi Kehadiran Rapat Internal Dewan dan Rakomdir sebagai berikut.

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2018 – 24 April 2018

NAMA	JABATAN	RAPAT DEWAN KOMISARIS			RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI		
		JUMLAH DAN (%) KEHADIRAN			JUMLAH DAN (%) KEHADIRAN		
		JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	%	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	%
Imam Santoso	Komisaris Utama	4	4	100	5	5	100
Eddy Kristanto	Komisaris	4	4	100	5	5	100
Freddy R. Saragih	Komisaris	4	4	100	5	5	100
Lilie Mayasari	Komisaris	4	4	100	5	5	100
Nurrachman	Komisaris Independen	4	4	100	5	5	100
Imas Aan Ubudiah	Komisaris Independen	4	4	100	5	5	100

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Periode 24 April 2018 – 31 Desember 2018

NAMA	JABATAN	RAPAT DEWAN KOMISARIS			RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI		
		JUMLAH DAN (%) KEHADIRAN			JUMLAH DAN (%) KEHADIRAN		
		JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	%	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	%
Imam Santoso	Komisaris Utama	13	12	90	9	9	100
Eddy Kristanto*	Komisaris	13	13	100	9	9	100
Freddy R. Saragih	Komisaris	13	13	100	9	9	100
Lilie Mayasari	Komisaris	13	13	100	9	8	90
Imas Aan Ubudiah**	Komisaris Independen	13	6	46	9	4	44
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Komisaris Independen	13	13	100	9	9	100
Achmad Hidayat	Komisaris Independen	13	13	100	9	8	89

*) Berdasarkan Keputusan RUPSLB pada tanggal 25 Maret 2019 yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan

**) Per 20 September 2018, yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI untuk Pemilihan Umum tahun 2019 sehingga sesuai Anggaran Dasar pasal 14 ayat 29, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Komisaris dikarenakan adanya larangan rangkap jabatan sebagai caleg DPR.

DIREKSI

Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi sebesar-besar kepentingan Perusahaan, mengelola bisnis dan urusan Perusahaan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perusahaan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan Perusahaan semata-mata.

REFERENSI PERATURAN

Berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BOARD MANUAL

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Edisi 2017. *Board manual* Direksi antara lain berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perseroan.

Adapun isi dari pokok pedoman kerja Direksi yang diatur dalam *Board Manual* antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut.

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi
2. Hak dan Kewajiban Direksi
3. Komposisi dan Pembagian Tugas antar Direksi
4. Penetapan Kebijakan Perusahaan oleh Direksi
5. Pelimpahan Tugas dan Kewenangan
6. Kriteria Anggota Direksi
7. Program Pengenalan
8. Etika Jabatan

9. Pengelolaan Keuangan Perusahaan
10. Rapat Direksi
11. Kinerja Direksi
12. Benturan Kepentingan Direksi
13. Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris
14. Sekretaris Perusahaan
15. Sistem Pengendalian Internal

Beberapa pokok pedoman kerja Direksi yang diatur dalam *Board Manual* dijabarkan sebagai berikut.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan, Panduan *Good Corporate Governance*, *Code of Conduct* dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran.
4. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5.a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan

sebagaimana dimaksud pada huruf (a.), apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
6. I. Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:
- a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerja sama usaha (KSU), kerja sama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
 - d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
 - e. Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - f. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris

pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

- h. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - i. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - j. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - k. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - l. Memberikan pinjaman jangka pendek/ menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
 - m. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - n. Melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - o. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- II. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal-hal sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan (m)

dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna.

- III. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m) dan (o) dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan pemegang saham Seri A Dwiwarna.
- IV. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.
- V. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (b), (e), (f), (g), (h), dan (i) sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek dan/atau memenuhi persyaratan dan/atau pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.
7. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan dan penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada poin (6).
8. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan.
- 9.a Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk:
 1. Melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2. Melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal.
3. Melakukan transaksi lain guna memenuhi Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.
10. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada poin (8) dan (9) di atas yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.
11. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.
12. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.
13. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (13), Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- 15.a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.

- b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang melaksanakan tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada atau berhalangan.
- c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama.
16. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama.
17. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai Wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
18. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
19. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.
20. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.

21. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21) yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

HAK DAN WEWENANG DIREKSI

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi berhak untuk:

1. Menerima gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
2. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, anggota Direksi Perseroan lainnya dan Pemegang Saham yang mengusulkan pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - a. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri;
 - b. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri, maka pengunduran diri dari anggota Direksi tersebut menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, kecuali pengunduran diri tersebut menyebabkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang.
 - c. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak

pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya menjadi efektif.

- d. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga Perseroan memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

Direksi berwenang untuk:

1. menetapkan kebijakan pengelolaan Perseroan;
2. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain;
3. mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris;
6. menghapusbukkan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris serta selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan;
7. tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta melakukan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
8. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengelolaan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan

dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

KRITERIA DIREKSI

WIKI menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang Saham melalui RUPS memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat Direksi. Namun demikian, untuk menjamin anggota Direksi memiliki kinerja sesuai harapan Pemegang Saham dan kebutuhan Perusahaan maka Perusahaan perlu menetapkan kebijakan tentang kriteria anggota Direksi sesuai kebutuhan.

Kriteria Direksi Perusahaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.
2. Persyaratan Anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
 - a. Undang-undang Perseroan Terbatas;
 - b. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
 - c. Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam lima 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

- iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
- iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

- d. memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan;
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan
- f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan ayat (2) Pasal ini.

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SERTA DASAR PENGANGKATAN DIREKSI

Seluruh anggota Direksi WKA telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya persetujuan lulus *fit and proper test* sebagai berikut.

Tabel Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

NAMA	JABATAN	PERIODE	PELAKSANA	DASAR PENGANGKATAN	TANGGAL EFEKTIF
Tumiyana	Direktur Utama	24 April 2018 - sekarang	Kementerian BUMN	Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 94 Tanggal 26 April 2018	24 April 2018
Agung Budi Waskito	Direktur Operasi I	24 April 2018 - sekarang	Kementerian BUMN	Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 94 Tanggal 26 April 2018	24 April 2018
Bambang Pramujito	Direktur Operasi II	25 April 2013 - sekarang	Kementerian BUMN	Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 47 tanggal 26 April 2013 dan Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 94 Tanggal 26 April 2018	25 April 2013
Destiawan Soewardjono	Direktur Operasi III	25 April 2013 - sekarang	Kementerian BUMN	Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 47 tanggal 26 April 2013 dan Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 94 Tanggal 26 April 2018	25 April 2013
Antonius N.S. Kosasih	Direktur Keuangan	28 April 2016 – 31 Januari 2019	Kementerian BUMN	Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 82 Tanggal 28 April 2016	28 April 2016
Novel Arsyad	Direktur Human Capital dan Pengembangan	17 Maret 2017 - sekarang	Kementerian BUMN	Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 39 Tanggal 23 Maret 2017	17 Maret 2017
Danu Prijambodo	Direktur Quality, Safety, Health and Environment	24 April 2018 - sekarang	Kementerian BUMN	Akta Keputusan RUPS Tahunan Nomor 94 Tanggal 26 April 2018	24 April 2018

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Agar Direksi Perusahaan selalu dapat bekerja selaras dengan organ Perusahaan yang lain, maka bagi Anggota Direksi yang baru diangkat akan diberikan Program Pengenalan. Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perusahaan, kunjungan ke cabang-cabang atau program lainnya. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Direktur Utama. Jika Direktur Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan berada pada Komisaris Utama atau anggota Direksi yang lain yang ditunjuk.

Program Pengenalan yang diberikan kepada anggota Direksi baru, antara lain, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip dan implementasi *Good Corporate Governance*.
2. Gambaran Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan

operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.

3. Penjelasan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.
4. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi.
5. Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kebijakan Perusahaan.

Program Orientasi bagi Direksi baru dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi yang diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 2018.

PEMBIDANGAN TUGAS DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibagi atas bidang tugas sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
Tumiyana	Direktur Utama	1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS. 2. Memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola, mengembangkan, menumbuhkan usaha perusahaan sesuai dengan visi, misi, rencana strategis perusahaan dan senantiasa berupaya meningkatkan sinergi sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif. 3. Koordinasi antar Direktorat dalam melakukan pengendalian Perseroan. 4. Pengarahan bisnis Entitas Anak dan Entitas Asosiasi. 5. Pembinaan fungsi Satuan Pengawasan Intern dalam audit kepatuhan. 6. Menetapkan perencanaan dan pengendalian penerapan GCG. 7. Penetapan pelaksanaan program CSR. 8. Penetapan strategi fungsi umum (fasilitas perkantoran dan aset).
Agung Budi Waskito	Direktur Operasi I	1. Membawahi Departemen Sipil Umum 1, Departemen Sipil Umum 2, Departemen Sipil Umum 3 dan pembinaan Anak Perusahaan PT Wijaya Karya Bitumen, PT Wijaya Karya Serang Panimbang. 2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan pembinaan fungsi perusahaan Perseroan pada Direktorat Operasional 1 yaitu di bidang usaha jasa konstruksi infrastruktur. 3. Pengendalian <i>engineering</i>, konstruksi, komersial dan pengadaan.
Bambang Pramujito	Direktur Operasi II	1. Membawahi Departemen Industrial Plant dan Departemen Power Plant dan Energi serta pembinaan Anak Perusahaan PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi. 2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pembinaan fungsi perusahaan Perseroan pada Direktorat Operasional 2, yaitu di bidang usaha strategis konstruksi dan EPC Energy, Industrial Plant serta Petrochemical dan Oil & Gas. 3. Penetapan pola pengendalian <i>engineering</i>, konstruksi, komersial, pengadaan, <i>commissioning</i>, serta operation dan <i>maintenance</i>.

NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
Destiawan Soewardjono	Direktur Operasi III	1. Membawahi Departemen Luar Negeri dan Departemen Bangunan Gedung serta pembinaan Anak Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., PT Wijaya Karya Realty Tbk., PT Wijaya Karya Industri Konstruksi dan PT Wijaya Karya Beton Tbk. 2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan pembinaan fungsi perusahaan Perseroan pada Direktorat Operasional 3, yaitu di bidang usaha jasa konstruksi bangunan gedung bertingkat tinggi dan bidang usaha konstruksi di luar negeri. 3. Pengendalian <i>engineering</i>, konstruksi, komersial dan pengadaan.
Antonius N.S. Kosasih	Direktur Keuangan	1. Membawahi Departemen Keuangan, Legal dan Pembinaan Perusahaan Asosiasi. 2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan pembinaan fungsi Perseroan pada Direktorat Keuangan, yaitu di bidang perencanaan, pengelolaan Keuangan dan bidang Legal.
Danu Prijambodo	Direktur Quality, Safety, Health and Environment	1. Membawahi Departemen Safety, Health, and Environment, Departemen Pengembangan Sistem serta Departemen Manajemen Risiko dan Project Management Office (PMO). 2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan pembinaan fungsi Perseroan pada Direktorat Quality, Safety, Health and Environment, yaitu di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, bidang pengembangan kualitas, sistem serta manajemen risiko dan Project Management Office (PMO).
Novel Arsyad	Direktur Human Capital dan Pengembangan	1. Membawahi Departemen Human Capital, Departemen Perencanaan dan Pengembangan Usaha, serta Departemen Sinergi Bisnis. 2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan pembinaan fungsi Perseroan pada Direktorat Human Capital dan Pengembangan, yaitu di bidang Sumber Daya Manusia (Human Capital) bidang Perencanaan Bisnis jangka Panjang, Investasi dan Pengembangan Bisnis, serta <i>Key Account</i> dan Pengadaan terintegrasi. 3. Penetapan strategi terkait <i>market intelligence</i> dan Analisa pasar yang berhubungan dengan <i>Key Clients</i>.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI DAN PENERAPANNYA

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman komposisi anggota Direksi. Keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif.

Keberagaman komposisi Direksi seperti yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah diakomodir dalam Anggaran Dasar serta *Board Manual* Perseroan. Pengangkatan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, kebijakan keberagaman tersebut baru mengatur tentang keberagaman pengetahuan dan/atau keahlian sesuai dengan bidang tugas Direksi. Kebijakan keberagaman terkait usia dan jenis kelamin belum dimiliki oleh WKA, karena nominasi diprioritaskan pada kebutuhan Perseroan.

Pada periode 2018, keberagaman komposisi Direksi Perseroan tercermin dalam pendidikan, pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi

NAMA	JABATAN	PERIODE	USIA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA	KEAHLIAN
Tumiyana	Direktur Utama	24 April 2018 - sekarang	53 tahun	Laki-laki	- Sarjana Teknik Sipil Universitas Borobudur tahun 1994 - Magister Manajemen Jakarta Institute of Management Studies tahun 1997	- Finance Director - PT PP (Persero) Tbk. (2008 - 2016) - President Director - PT PP (Persero) Tbk. (2016 - April 2018)	Teknik Sipil dan Manajemen
Agung Budi Waskito	Direktur Operasi I	24 April 2018 - sekarang	47 tahun	Laki-laki	- Sarjana Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada - Master di Engineering Civil, Indian Institute Technology Roorkee tahun 2002	- Manajer Divisi Operasi 4 Sipil Umum II (2014 - 2015) - General Manager Departemen Pemasaran (2016 - 2017) - General Manager Departemen Sipil Umum I (2017 - April 2018)	Teknik Sipil
Bambang Pramujito	Direktur Operasi II	25 April 2013 - sekarang	61 tahun	Laki-laki	- Insinyur Jurusan Teknik Sipil, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada tahun 1982 - Master di Sipil Engineering, Universitas Indonesia pada tahun 1999	- General Manager Departemen EPC di WIKA (2005 - 2009) - General Manager Departemen Energi di WIKA (2009 - 2010) - General Manager Departemen Utilitas di WIKA (2010) - General Manager Departemen Industrial Plant di WIKA (2011-2013)	Teknik Sipil
Destiawan Soewardjono	Direktur Operasi III	25 April 2013 - sekarang	57 tahun	Laki-laki	- Sarjana Teknik Sipil, Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 1987 - Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2008	- Manajer Proyek PLTGU Borang (2004) - Manajer Proyek Jembatan Surabaya Madura (2004-2007) - Manajer Divisi Luar Negeri di WIKA (2008 - 2011) - Manajer Proyek East West Motorway - Aljazair WIKA (2009 -2010) - General Manager Departemen Luar Negeri di WIKA (2012 - 2013)	Teknik Sipil dan Manajemen
Antonius N.S. Kosasih	Direktur Keuangan	28 April 2016 - 31 Januari 2019	48 tahun	Laki-laki	- Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1992 - Magister Keuangan dan Investasi dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) pada tahun 2006	- Direktur Keuangan Perum Perhutani (2008 - 2012) - Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) (2014-awal 2016)	Keuangan, Legal dan Investasi
Novel Arsyad	Direktur Human Capital dan Pengembangan	17 Maret 2017 - sekarang	51 tahun	Laki-laki	- Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 1991 - Magister Manajemen dari Binus University pada tahun 2013	- Manajer Divisi Bangunan Gedung, Departemen Bangunan Gedung di PT WIKA (2012 - 2013) - Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (2014 - 2016) - General Manager Departemen Bangunan Gedung di WIKA (2014 - 2016) - Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (2016 - 2017)	Teknik Sipil, Manajemen, Investasi dan Manajemen SDM
Danu Prijambodo	Direktur Quality, Safety, Health and Environment	24 April 2018 - sekarang	49 tahun	Laki-laki	- Sarjana Teknik Sipil Universitas Hasanuddin tahun 1994 - Magister Manajemen Scuola Superiore Enrico Mattei tahun 2000	- Group Head PMO Infrastructure PT Perusahaan Gas Negara (2015-2016) - Direktur PT PGAS Solution (2012)	Teknik Sipil, SHE, Manajemen dan Risiko

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian Kinerja Direksi dilakukan melalui beberapa macam prosedur, antara lain sebagai berikut:

- **Penilaian Kinerja Direksi oleh RUPS**

Kinerja Direksi akan dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam *Statement of Corporate Intent*, tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan serta amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Direksi sejak pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pemberian skema kompensasi bagi Direksi. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Direksi merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Direksi baik selaku Dewan maupun individu juga merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.

- **Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Direksi**

Kinerja Direksi dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

- **Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi**

RUPS menetapkan kriteria kinerja Direksi maupun individu anggota Direksi. Kriteria evaluasi kinerja individu anggota Direksi antara lain meliputi:

1. Tingkat kehadiran dalam Rapat Direksi maupun Rapat Koordinasi Direksi dengan Komisaris.
2. Kesiapannya dengan materi yang akan dibahas dalam rapat.
3. Partisipasinya dalam pembahasan masalah maupun dalam pengambilan keputusan.
4. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan perusahaan.
5. Komitmennya terhadap keputusan bersama yang telah dibuat.

- **Pihak yang Melakukan Assessment**

Pihak yang melakukan Penilaian kinerja Direksi adalah Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban yang tercantum dalam Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham.

- **Hasil Penilaian Kinerja Direksi**

Sepanjang tahun 2018, Direksi telah melaksanakan tugas kepengurusan Perseroan. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab telah menjalankan seluruh tugas yang diamanatkan, mengelola bisnis dan urusan Perseroan dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan serta keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan.

- **Penilaian Kinerja Direksi dengan Metode Self Assessment GCG**

Penilaian Kinerja Direksi dengan metode *self assessment* mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

- **Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Direksi**

Pelaksanaan asesmen tersebut dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain: penyampaian dokumen yang dibutuhkan, pengisian kuesioner oleh Dewan Komisaris dan Direksi, wawancara, analisis BPKP terhadap dokumen, kuesioner, wawancara dan observasi yang dilakukan, presentasi hasil sementara oleh BPKP, dan pelaporan oleh BPKP mengenai hasil capaian dan rekomendasi terhadap kinerja Direksi.

- **Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi**

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan program pelatihan/ pembelajaran Direksi.

2. Pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi yang jelas.
3. Penyusunan perencanaan perusahaan.
4. Pemenuhan target kinerja perusahaan.
5. Pelaksanaan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.
6. Pelaksanaan pengurusan perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
7. Pelaksanaan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan.
8. Memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.
9. Pelaksanaan keterbukaan informasi dan komunikasi, serta penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu.
10. Penyelenggaraan rapat Direksi dan kehadiran pada rapat Dewan Komisaris.
11. Penyelenggaraan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.
12. Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif.
13. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

• Pihak yang Melakukan Assessment

Pelaksanaan penilaian *self assessment* GCG Direksi pada tahun 2018 dilaksanakan oleh Perseroan dengan Narasumber atau Verifikator Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Perwakilan Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan perubahannya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.

• Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Pada 2018, hasil penilaian kinerja Direksi mencapai skor 33,383 dengan capaian 95,38% dan predikat Sangat Baik.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Tidak ada komite di bawah Direksi. Fungsi Manajemen Risiko telah dialihkan ke Departemen Manajemen Risiko dan PMO.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

1. Alasan pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
 - a. tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontak manajemen;
 - b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
 - e. di samping alasan pemberhentian anggota Direksi, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi;
 - f. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. mengundurkan diri;
 - h. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan;
2. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi lowong:
 - a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
 - b. Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut apabila menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah satunya Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau Direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.

- c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
3. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. pengunduran dirinya telah efektif;
 - b. meninggal dunia;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan Peraturan Perundang-undangan;
4. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.
5. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi.
 - b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.
 - c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
 - d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
 - f. Pembatasan kewenangan pada huruf c ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 1. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara pada huruf d ayat ini; atau
 2. lampaunya jangka waktu pada huruf d ayat ini.
 - g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini.
 - i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
 - j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima keputusan RUPS.
 - l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
 1. Keputusan pemberhentian sementara; dan
 2. Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut

atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana tersebut pada huruf d ayat ini, atau informasi mengenai batalnya pemberhentian pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Secara umum, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi diarahkan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sebagai organ Perusahaan. Direksi bertugas menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan Dewan Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direksi tersebut. Namun demikian, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi harus mengikuti prinsip-prinsip:

1. Dalam rangka menjaga independensi masing-masing organ Perusahaan, setiap hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi dalam rangka tugas dan tanggung jawab masing-masing merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggung-jawabkan. Hubungan yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Dewan Komisaris harus menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. Berbagai hal yang menyangkut hubungan kerja sehari-hari antara Dewan Komisaris dengan Direksi, yang belum diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, Panduan *Good Corporate Governance*,

Code of Conduct serta dokumen ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan antara Dewan Komisaris dengan Direksi dengan dilandasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

3. Anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif dapat memperoleh akses informasi yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi mengenai Anak Perusahaan.
4. Dalam hal permintaan informasi oleh Dewan Komisaris menyangkut Anak Perusahaan maka permintaan tersebut disalurkan melalui Direksi Perusahaan. Merupakan wewenang Direksi Perusahaan untuk meminta informasi tersebut dari Anak Perusahaan dengan kewenangannya sebagai Pemegang Saham.
5. Dewan Komisaris bersama-sama Direksi Perusahaan secara periodik melakukan rapat koordinasi untuk membahas berbagai permasalahan yang menyangkut Perusahaan. Dalam rapat koordinasi tersebut, Komisaris Utama berperan sebagai pimpinan rapat. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir maka yang bersangkutan dapat menunjuk Anggota Dewan Komisaris lainnya sebagai orang yang mewakilinya.
6. Keputusan rapat Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan sesuatu yang mengikat bagi semua peserta rapat.
7. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris merupakan jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggota Dewan Komisaris lainnya sehingga setiap hubungan kerja antara seorang anggota Dewan Komisaris dengan salah satu atau beberapa orang Direksi perlu diketahui oleh anggota Dewan Komisaris lainnya.

JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2018, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris WIKA mengalami perubahan sebagaimana penjelasan sebagai berikut.

Periode 1 Januari 2018 – 24 April 2018

NAMA	JABATAN
Bintang Perbowo	Direktur Utama
Chandra Dwiputra	Direktur Operasi I

NAMA	JABATAN
Bambang Pramujo	Direktur Operasi II
Destiawan Soewardjono	Direktur Operasi III
Antonius N.S. Kosasih	Direktur Keuangan
Novel Arsyad	Direktur Human Capital dan Pengembangan Sistem

Periode 24 April 2018 – 31 Desember 2018

NAMA	JABATAN
Tumiyana	Direktur Utama
Agung Budi Waskito	Direktur Operasi I
Bambang Pramujo	Direktur Operasi II
Destiawan Soewardjono	Direktur Operasi III
Antonius N.S. Kosasih*	Direktur Keuangan
Novel Arsyad	Direktur Human Capital dan Pengembangan
Danu Prijambodo	Direktur Quality, Safety, Health and Environment

*) Per 31 Januari 2019 yang bersangkutan telah diangkat sebagai Anggota Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-31/MBU/01/2019.

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional

lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali, yang meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Independensi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

HUBUNGAN KEUANGAN, KELUARGA DAN KEPENGURUSAN DIREKSI																
NAMA	JABATAN	PERIODE	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN						HUBUNGAN KELUARGA DENGAN						HUBUNGAN KEPENGURUSAN	
			DEWAN KOMISARIS		DIREKSI		PEMEGANG SAHAM		DEWAN KOMISARIS		DIREKSI		PEMEGANG SAHAM			
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
Tumiyana	Direktur Utama	24 April 2018 - sekarang		v		v		v		v		v		v		v
Agung Budi Waskito	Direktur Operasi I	24 April 2018 - sekarang		v		v		v		v		v		v		v
Bambang Pramujo	Direktur Operasi II	25 April 2013 - sekarang		v		v		v		v		v		v		v
Destiawan Soewardjono	Direktur Operasi III	25 April 2013 - sekarang		v		v		v		v		v		v		v
Antonius N.S. Kosasih	Direktur Keuangan	28 April 2016 - 31 Januari 2019		v		v		v		v		v		v		v
Novel Arsyad	Direktur Human Capital dan Pengembangan	17 Maret 2017 - sekarang		v		v		v		v		v		v		v
Danu Prijambodo	Direktur Quality, Safety, Health and Environment	24 April 2018 - sekarang		v		v		v		v		v		v		v

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
4. Pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau Kepala daerah;
5. Menjadi calon/ anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
7. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

NAMA	JABATAN	PERIODE	JABATAN PADA PERUSAHAAN/ INSTANSI LAIN	NAMA PERUSAHAAN/ INSTANSI LAIN
Tumiyana	Direktur Utama	24 April 2018 - sekarang	Komisaris	PT Kereta Cepat Indonesia China
Agung Budi Waskito	Direktur Operasi I	24 April 2018 - sekarang	Komisaris Utama	PT Wijaya Karya Bitumen

NAMA	JABATAN	PERIODE	JABATAN PADA PERUSAHAAN/ INSTANSI LAIN	NAMA PERUSAHAAN/ INSTANSI LAIN
Bambang Pramujo	Direktur Operasi II	25 April 2013 - sekarang	Komisaris Utama	PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Destiawan Soewardjono	Direktur Operasi III	25 April 2013 - sekarang	Komisaris Utama	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Antonius N.S. Kosasih	Direktur Keuangan	28 April 2016 - 31 Januari 2019	Komisaris Utama	PT Wijaya Karya Realty
Novel Arsyad	Direktur Human Capital dan Pengembangan	17 Maret 2017 - sekarang	Komisaris Utama	- PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi - PT Wijaya Karya Serang Panimbang
Danu Prijambodo	Direktur Quality, Safety, Health and Environment	24 April 2018 - sekarang	Komisaris Utama	PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Benturan kepentingan Direksi adalah suatu kondisi tertentu di mana kepentingan pribadi Direksi berpotensi bertentangan dengan kepentingan Perusahaan untuk meningkatkan nilai Perusahaan, meraih laba serta pencapaian visi dan misi Perusahaan sebagaimana diamanatkan oleh Pemegang Saham.

Beberapa prinsip yang dianut WKA untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah sebagai berikut:

- Direksi harus menghindari adanya potensi benturan kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut Direksi perlu memenuhi beberapa prinsip yaitu:
 - Direksi wajib menyelenggarakan dan mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan lain secara benar dan akurat.
 - Direksi harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam pengambilan keputusan.
 - tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegiatan pengadaan yang melibatkan suatu Perusahaan di mana yang bersangkutan atau keluarganya mempunyai kepemilikan saham yang signifikan atau mempunyai kepentingan finansial atas transaksi tersebut.
 - Direksi wajib membuat pernyataan mengenai benturan kepentingan terhadap hal-hal yang termaktub dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- Apabila terjadi sesuatu hal, di mana kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Komisaris, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

WIKI menyelenggarakan Daftar Khusus bagi seluruh anggota Direksi sebagai salah satu bentuk komitmen dalam menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Daftar Khusus tersebut berisi informasi kepemilikan saham anggota Direksi dan keluarga di Perseroan dan perusahaan lain.

Rincian Kepemilikan Saham Direksi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

NAMA	JABATAN	PERIODE	KEPEMILIKAN SAHAM	
			WIKI	PERUSAHAAN LAIN
Tumiyana	Direktur Utama	24 April 2018 - sekarang	-	-
Agung Budi Waskito	Direktur Operasi I	24 April 2018 - sekarang	7.200 lembar saham	-
Bambang Pramujo	Direktur Operasi II	25 April 2013 - sekarang	-	-
Destiawan Soewardjono	Direktur Operasi III	25 April 2013 - sekarang	-	-
Antonius N.S. Kosasih	Direktur Keuangan	28 April 2016 - 31 Januari 2019	-	-
Novel Arsyad	Direktur Human Capital dan Pengembangan	17 Maret 2017 - sekarang	856.700 lembar saham	-
Danu Prijambodo	Direktur Quality, Safety, Health and Environment	24 April 2018 - sekarang	-	-

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi untuk membuat berbagai keputusan bisnis, mengevaluasi kinerja Perusahaan dan menetapkan berbagai kebijakan dalam pengurusan Perusahaan. Rapat Direksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 - a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi.
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar.
5. a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan teller, faksimili atau surat elektronik (*e-mail*) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
 - b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.

AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT DIREKSI

Rapat Direksi dilaksanakan dengan rapat internal serta rapat bersama General Manager. Sepanjang tahun 2018, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi yang Menyertakan General Manager dan Direksi Anak Perusahaan

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT	PESERTA RAPAT	KEHADIRAN HADIR/ TIDAK HADIR
RAPAT DIREKSI YANG MENYERTAKAN GENERAL MANAGER DAN DIREKSI ANAK PERUSAHAAN (RADIR GM - DIR.AP)				
1	2 Januari 2018	a. Arahan Direktur Utama Perseroan. b. QSHE Culture Perseroan. c. Update RKAP untuk Publik oleh GM Keuangan dan Tim Global IDR Bond. d. Perkembangan Global IDR Bond oleh Direktur Keuangan dan TIM Global IDR Bond. e. Progress Perhitungan Keuangan termasuk bunga pada Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh GM Investasi dan GM Keuangan. f. Progress Penyelesaian Proyek-proyek APBN 2017 dan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh masing-masing GM Operasi dan Direktur Anak Perusahaan. g. Agenda lain-lain.	- Bintang Perbowo - Chandra Dwiputra - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad	Hadir Tidak Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT	PESERTA RAPAT	KEHADIRAN HADIR/ TIDAK HADIR
RAPAT DIREKSI YANG MENYERTAKAN GENERAL MANAGER DAN DIREKSI ANAK PERUSAHAAN (RADIR GM - DIR.AP)				
2	1 Februari 2018	a. QSHE <i>Culture</i> Perseroan. b. Laporan pelaksanaan <i>fire drill</i> . c. Laporan hasil pelaksanaan <i>Global IDR Bonds</i> . d. Paparan Penyertaan Modal Negara. e. Percepatan Transfer BoT PLTD Bali. f. Agenda Lain-lain.	- Bintang Perbowo - Chandra Dwiputra - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
3	12 Februari 2018	a. QSHE <i>Culture</i> Perseroan. b. Laporan Hasil Belajar Pendidikan Lanjutan Beasiswa Perseroan. c. Paparan Persiapan HUT 58 Perseroan. d. Paparan <i>IDR Bonds market update</i> . e. Paparan Pekerjaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Provinsi Papua dan Papua Barat. f. Laporan hasil kunjungan ke Winsun (3D <i>printing</i> dan BSB) <i>Modular Building</i> . g. Laporan Proyek Strategis Nasional (PSN). h. Agenda lain-lain.	- Bintang Perbowo - Chandra Dwiputra - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
4	26 Februari 2018	a. QSHE <i>Culture</i> Perseroan. b. Laporan Pengimplementasian BIM di Departemen Power and Energy (DPE) c. Laporan hasil <i>Employee Engagement Survey</i> 2017 oleh Aon Hewitt. d. Paparan strategi <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) Tol Seroja. e. Pengakuisisian Lahan di Paiton pada Proyek Pengembangan <i>LPG Refrigerated Storage</i> yang dikerjasamakan dengan PT Pertamina (Persero). f. Hasil Audit Kepatuhan berkenaan dengan Update Prosedur Perseroan. g. <i>Roadmap Knowledge Management</i> 2022. h. Agenda lain-lain.	- Bintang Perbowo - Chandra Dwiputra - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad	Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir
5	26 Maret 2018	a. QSHE <i>Culture</i> Perseroan. b. Pengembangan Ruang Rapat Besar Lantai 3 WITO 2 dengan teknologi <i>Video Wall Monitoring</i> . c. Laporan <i>Video Conference Progress</i> Proyek Oecusse. d. Pembahasan materi RUPST TB 2018. e. Kesiapan Proyek <i>Light Rail Transit</i> (LRT) untuk Operasional Agustus 2018. f. Perubahan Penggunaan Penyertaan Modal Negara II. g. Rencana Kerjasama Investasi Rumah Sakit WIKA dan PBNU. h. <i>Progress</i> Proyek Strategis Nasional (PSN). i. Agenda lain-lain.	- Bintang Perbowo - Chandra Dwiputra - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad	Tidak Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT	PESERTA RAPAT	KEHADIRAN HADIR/ TIDAK HADIR
RAPAT DIREKSI YANG MENYERTAKAN GENERAL MANAGER DAN DIREKSI ANAK PERUSAHAAN (RADIR GM - DIR.AP)				
6	5 April 2018	a. <i>Video Conference</i> Proyek Jalan Tol Balikpapan - Samarinda. b. <i>Benchmarking</i> SHE c. Perkembangan Produksi Motor Gesit (WIKON). d. Hasil Usaha Perseroan. e. Agenda lain-lain.	- Bintang Perbowo - Chandra Dwiputra - Bambang Pramujio - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad	Tidak Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
7	9 April 2018	a. Paparan Direktur Utama Perseroan. b. Agenda lain-lain.	- Bintang Perbowo - Chandra Dwiputra - Bambang Pramujio - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
8	23 April 2018	a. <i>Progress</i> Pelaksanaan IPO WIKA Realty. b. Persiapan RUPS TB 2018. c. Paparan Direktur Utama Perseroan. d. Agenda lain-lain.	- Bintang Perbowo - Chandra Dwiputra - Bambang Pramujio - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
9	30 April 2018	a. QSHE <i>Culture</i> Perseroan. b. Perkenalan Direksi Perseroan. c. Perkenalan Departemen dan Anak Perusahaan. d. Paparan Perubahan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN). e. Arahan Direksi Perseroan. f. Agenda Lain-lain.	- Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujio - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
10	7 Mei 2018	a. QSHE <i>Culture</i> Perseroan. b. Paparan Business Plant Anak Perusahaan dan Departemen Operasi. c. <i>Update</i> Perkembangan Kawasan Laswi oleh WIKA Realty. d. <i>Update</i> Progress Perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh GM Operasi. e. Agenda Lain-lain.	- Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujio - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir
11	21 Mei 2018	a. QSHE <i>Culture</i> Perseroan. b. <i>Update</i> Sistem Manajemen Perseroan. c. <i>Business Plan</i> WIKA Bitumen. d. <i>Progress</i> Proyek Strategis Nasional (PSN) Oleh GM Operasi. e. Agenda Lain-lain.	- Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujio - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
12	4 Juni 2018	a. QSHE <i>Culture</i> Perseroan. b. <i>Video Conference</i> Proyek Light Rail Transit. c. Paparan Persiapan Proyek Kijing. d. <i>Bussines Plan</i> Proyek High Speed Rail dan Transit Oriented Development oleh PT KCIC. e. Agenda Lain-lain.	- Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujio - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT	PESERTA RAPAT	KEHADIRAN HADIR/ TIDAK HADIR
RAPAT DIREKSI YANG MENYERTAKAN GENERAL MANAGER DAN DIREKSI ANAK PERUSAHAAN (RADIR GM - DIR.AP)				
13	26 Juni 2018	a. QSHE <i>Culture</i> Perseroan. b. Kinerja EHU (Ri Mei 2018; <i>Forecast</i> Juni 2018). c. Kinerja Pemasaran Juni 2018 dan <i>Forecast</i> s.d Desember 2018. d. Rencana Operasi Kereta Cepat Jakarta Bandung. e. <i>Progress</i> Proyek Asmat. f. Penjelasan Hasil Usaha, <i>Progress</i> , dan Rencana Tindak Lanjut Proyek Jalan Tol Serang Panimbang oleh WKA Serpan. g. Agenda Lain-lain.	- Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Tidak Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir
14	10 Juli 2018	a. <i>Video Conference</i> Proyek Pembangunan Masjid Raya Al Jabar Provinsi Jawa Barat oleh WKA Gedung b. QSHE <i>Culture</i> Perseroan c. Pembahasan Neraca dan Analisa Rasio Keuangan Perseroan. d. Finalisasi Kinerja Pemasaran seluruh Departemen Operasi dan Anak Perusahaan s.d FY 2018. e. Standar Visual <i>Housekeeping</i> . f. Evaluasi <i>Collection Period</i> dari Departemen Operasi dan Anak Perusahaan Q1 vs Q2. g. Agenda Lain-lain.	- Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
15	23 Juli 2018	a. <i>Video Conference</i> Proyek Teluk Lamong. b. QSHE <i>Culture</i> Perseroan. c. Penanganan Keadaan Darurat oleh Manajer Proyek PLTU Bontang. d. Karya Inovasi Proyek dari DIP dan WEGA. e. Metode Kerja Pemasangan Kubah Masjid Apung Bandung. f. Agenda Lain-lain.	- Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
16	6 Agustus 2018	a. QSHE <i>Culture</i> Perseroan. b. <i>Video Conference</i> Proyek PLTU Cilacap Expansion 1 x 1000 MW dari DPE. c. Organisasi Manrisk dan PMO d. Karya Inovasi Proyek dari DLN dan WKA Realty. e. Penilaian Safety Patrol. f. <i>Standard Housekeeping</i> . g. Progress Pelabuhan Belawan dan Kijing. h. Agenda Lain-lain.	- Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT	PESERTA RAPAT	KEHADIRAN HADIR/ TIDAK HADIR
RAPAT DIREKSI YANG MENYERTAKAN GENERAL MANAGER DAN DIREKSI ANAK PERUSAHAAN (RADIR GM - DIR.AP)				
17	20 Agustus 2018	a. <i>Video Conference</i> Proyek Feni Haltim. b. <i>QSHE Culture</i> Perseroan. c. Kinerja EHU (Ri Juli 2018; Forecast Agustus 2018). d. Kinerja Pemasaran Agustus 2018. e. Evaluasi <i>Standard Housekeeping</i> . f. Karya Inovasi Proyek dari DSU 3. g. Usulan Akuisisi Perusahaan Pemilik AMP oleh WIKA Bitumen. h. Program Departemen Human Capital. i. Agenda Lain-lain.	- Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujio - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
18	3 September 2018	a. <i>QSHE Culture</i> Perseroan. b. <i>Video Conference</i> Proyek Tol Soker Loan. c. Karya Inovasi Proyek dari WIKON. d. <i>Timeline</i> dan Valuasi Aset WIKA Realty yang akan IPO oleh WIKA Realty. e. Agenda Lain-lain.	- Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujio - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir
19	17 September 2018	a. <i>QSHE Culture</i> Perseroan. b. <i>Video Conference</i> Proyek Paket 3 oleh WIKA Rekon. c. Kinerja EHU (Q3 dan Q4 (F) 2018; Ri Agustus 2018; Forecast September 2018). d. Kinerja Pemasaran September 2018. e. Karya Inovasi Proyek dari DSU 2. f. <i>Risk Mapping</i> oleh DQHSE. g. <i>Overseas Project (Investment and JV Opportunities)</i> . h. <i>Housekeeping QSHE Progress</i> . i. Agenda Lain-lain.	- Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujio - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Tidak Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
20	1 Oktober 2018	a. Gugus Tugas Tanggap Darurat Palu Donggala. b. <i>QSHE Culture</i> Perseroan. c. Kinerja EHU; Ri September 2018. d. <i>Video Conference</i> Proyek Jalan Tol Lampung. e. Karya Inovasi Proyek dari WIKA REKON. f. Paparan Departemen Manrisk & PMO. g. Hasil dari <i>Training Global Leadership</i> di Sydney. h. Paparan WIKA BETON terkait <i>Support</i> untuk WIKA Group. i. Agenda Lain-lain.	- Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujio - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT	PESERTA RAPAT	KEHADIRAN HADIR/ TIDAK HADIR
RAPAT DIREKSI YANG MENYERTAKAN GENERAL MANAGER DAN DIREKSI ANAK PERUSAHAAN (RADIR GM - DIR.AP)				
21	15 Oktober 2018	a. QSHE Culture Perseroan. b. <i>Video Conference</i> Proyek Jalan Tol Layang AP Pettarani. c. Kinerja EHU (Q3 dan Q4 (F)) 2018; Ri September 2018. d. Kinerja Pemasaran September 2018. e. Penetapan <i>Manrisk</i> sebagai bagian dari Pengambilan Keputusan Strategis. f. Karya Inovasi Proyek dari DSU 1. g. Hasil <i>Benchmark</i> Kunjungan ke Kajima oleh Divisi Alat. h. Agenda Lain-lain.	- Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Tidak Hadir Hadir
22	29 Oktober 2018	a. QSHE Culture Perseroan. b. <i>Video Conference</i> Proyek <i>Fix Type Gas Engine Power Plant Package #4</i> . c. Karya Inovasi Proyek dari DPE. d. <i>Sharing Visit</i> Proyek Kajima di Singapura. e. <i>Sharing Knowledge</i> Sistem Rangka Plafon untuk Proyek LRT dan Bandara oleh Proyek LRT dan Bandara (Kertajati & Oecusse). f. Agenda Lain-lain.	- Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Tidak Hadir Tidak Hadir Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
23	5 November 2018	a. Pembahasan Dampak/ <i>Feedback Safety Pause</i> . b. Evaluasi Pemasaran Departemen Operasi dan Anak Perusahaan. c. Agenda Lain-lain.	- Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
24	12 November 2018	a. QSHE Culture Perseroan. b. <i>Video Conference</i> Proyek EPCC Pembangunan Pabrik Minyak Goreng Sei Mangke. c. P2K3L d. Kinerja EHU (Q3 dan Q4 (F)) 2018; Ri Oktober 2018). e. Karya Inovasi Proyek dari DPE.	- Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Tidak Hadir Tidak Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir Tidak Hadir Hadir
25	26 November 2018	a. QSHE Culture Perseroan. b. <i>Video Conference</i> Proyek Jalan Tol Balikpapan Samarinda Seksi 2,3,4 oleh DSU 3. c. <i>Opening Meeting</i> Audit Eksternal. d. <i>Corporate Risk</i> . e. Paparan Penggunaan Bekisting. f. Karya Inovasi Proyek dari DPE.	- Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujo - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT	PESERTA RAPAT	KEHADIRAN HADIR/ TIDAK HADIR
RAPAT DIREKSI YANG MENYERTAKAN GENERAL MANAGER DAN DIREKSI ANAK PERUSAHAAN (RADIR GM - DIR.AP)				
26	10 Desember 2018	a. Laporan Investigasi Kecelakaan Kerja Jatuh dari Ketinggian Proyek PLTU Cilacap oleh DPE. b. <i>Update Progress</i> Proyek yang berada di Papua oleh GMSU 3. c. QSHE Culture Perseroan. d. Reviu KPI Individu untuk BOD, GM dan Direksi Anak Perusahaan. e. Presentasi WERI oleh GMPS. f. Karya Inovasi Proyek oleh DIP. g. Status Piutang WIKA dan Prognosa Collection Piutang sampai dengan Desember 2018.	- Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujio - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Tidak Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir
27	17 Desember 2018	a. Paparan Kinerja Keuangan dan <i>Cash Flow</i> FY 2018 oleh GMKU. b. Prognosa Perolehan Proyek Januari sampai dengan Desember 2019 oleh GMSB. c. Hasil Pembahasan KPI Perusahaan oleh GMPS. d. Perubahan Anggaran Dasar dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terkait <i>Holding</i> oleh GM Legal, Sekper dan Tim Holding. e. Penunjukan Langsung Sinergi WIKA Group.	- Tumiyana - Agung Budi Waskito - Bambang Pramujio - Destiawan Soewardjono - A.N.S. Kosasih - Novel Arsyad - Danu Prijambodo	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT

Rapat Direksi selama 2018 dilaksanakan sebanyak 27 kali. Adapun frekuensi kehadiran Rapat Direksi dan Rapat Komisaris yang menyertakan Direksi adalah sebagai berikut:

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi dan Rapat Komisaris yang Menyertakan Direksi
Periode 1 Januari 2018 – 24 April 2018

NAMA	JABATAN	RAPAT DEWAN DIREKSI			RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI		
		JUMLAH DAN (%) KEHADIRAN			JUMLAH DAN (%) KEHADIRAN		
		JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	%	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	%
Bintang Perbowo	Direktur Utama	8	6	75	5	5	100
Chandra Dwiputra	Direktur Operasi I	8	5	62	5	5	100
Bambang Pramujio	Direktur Operasi II	8	8	100	5	5	100
Destiawan Soewardjono	Direktur Operasi III	8	6	75	5	4	80
Antonius N.S. Kosasih	Direktur Keuangan	8	8	100	5	4	80
Novel Arsyad	Direktur Human Capital dan Pengembangan Sistem	8	8	100	5	5	100

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi dan Rapat Komisaris yang Menyertakan Direksi
Periode 24 April 2018 – 31 Desember 2018

NAMA	JABATAN	RAPAT DEWAN DIREKSI			RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI		
		JUMLAH DAN (%) KEHADIRAN			JUMLAH DAN (%) KEHADIRAN		
		JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	%	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	%
Tumiyana	Direktur Utama	19	13	68	9	8	89
Agung Budi Waskito	Direktur Operasi I	19	16	84	9	8	89
Bambang Pramujo	Direktur Operasi II	19	16	84	9	8	89
Destiawan Soewardjono	Direktur Operasi III	19	16	84	9	7	78
Antonius N.S. Kosasih*	Direktur Keuangan	19	18	95	9	9	100
Novel Arsyad	Direktur Human Capital dan Pengembangan	19	16	84	9	9	100
Danu Prijambodo	Direktur Quality, Safety, Health and Environment	19	19	100	9	9	100

*) Per 31 Januari 2019, yang bersangkutan telah diangkat sebagai Anggota Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-31/MBU/01/2019.

PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Selama tahun 2018, Direksi telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengurusan Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan pada awal tahun. Pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2018 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan Perseroan.
2. Pemenuhan target kinerja Perseroan.
3. Pengelolaan aset dan Keuangan.
4. Penyelenggaraan rapat Direksi selama tahun 2018 telah dilakukan sebanyak dua puluh tujuh (27) kali Rapat Direksi dan empat belas (14) kali Rakomdir.
5. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris.
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, di mana pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 24 April 2018.
7. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal.
8. Penerapan dan pengawasan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha.
9. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi mendapat sejumlah remunerasi dan fasilitas lainnya. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan pada Keputusan Pemegang Saham Perseroan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-06/MBU/06/2018 Jo. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Dalam menyusun dasar penetapan dan rekomendasi besaran remunerasi yang kredibel, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG selalu melibatkan konsultan independen. Dengan dukungan *database* yang kuat dari survei pasar pada perusahaan sejenis dan sekelas Perseroan dan mempertimbangkan arahan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, konsultan independen menyusun beberapa faktor utama dalam mengusulkan besaran remunerasi Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris menerima remunerasi tetap dan tidak tetap yang terdiri atas honorarium, asuransi, tantiem serta fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlahnya direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, dan diputuskan oleh Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan. Penetapan remunerasi mengacu pada ketentuan sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-06/MBU/06/2018 Jo. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut, prinsip penetapan penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, dimana komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Gaji/Honorarium;
2. Tunjangan;
3. Fasilitas; dan
4. Tantiem/Insentif Kinerja.

STRUKTUR REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Adapun struktur remunerasi Direksi berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-06/MBU/06/2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

NO	JENIS PENGHASILAN/FASILITAS	KETERANGAN
1	Honorarium	Komisaris Utama 45% dari gaji Direktur Utama. Komisaris 90% dari honorarium Komisaris Utama
2	Tunjangan Tunjangan Hari Raya Tunjangan Transportasi Asuransi Purna Jabatan	Diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium Diberikan sebesar 20% dari honorarium Diberikan selama menjabat Premi asuransi 25% dari honorarium dalam satu tahun
3	Fasilitas a. Kesehatan b. Bantuan Hukum c. Tantiem	Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris serta suami/isteri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Dewan Komisaris diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Dewan Komisaris yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Penetapan tantiem mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan perusahaan.

INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Dalam menetapkan indikator Dewan Komisaris WKA mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha
2. Faktor kompleksitas usaha
3. Tingkat inflasi
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada indikator-indikator sebagai berikut:

1. Remunerasi diberikan dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan;
2. Remunerasi diberikan dengan mengacu pada perkembangan pasar industri konstruksi;
3. Remunerasi diberikan melalui hasil pengukuran kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
4. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan;
5. Prestasi kerja individu;
6. Kewajaran dengan *peer* perseroan lainnya;
7. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan;
8. Besaran remunerasi yang diterima adalah:
 - a. Komisaris Utama 45% dari remunerasi Direktur Utama.
 - b. Anggota Dewan Komisaris 90% dari remunerasi Komisaris Utama.
 - c. Direktur Utama 100%.
 - d. Anggota Direksi 85% dari Direktur Utama.

JUMLAH NOMINAL/KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2018, secara lebih rinci remunerasi masing-masing Dewan Komisaris yang telah terealisasi dapat disampaikan, sebagai berikut.

NAMA	JABATAN	HONORARIUM 2018	TUNJANGAN			TANTIEM (BERSIH)	TOTAL PER TAHUN
			THR	TRANSPORTASI	PREMI ASURANSI		
Imam Santoso	Komisaris Utama	1.026.000.000	85.500.000	205.200.000	256.500.000	948.623.585	2.521.823.585
Liliek Mayasari	Komisaris	923.400.000	76.950.000	184.680.000	230.850.000	1.138.348.303	2.554.228.303
Freddy R. Saragih	Komisaris	923.400.000	76.950.000	184.680.000	230.850.000	1.138.348.303	2.554.228.303
Eddy Kristanto*	Komisaris	923.400.000	76.950.000	184.680.000	230.850.000	1.138.348.303	2.554.228.303
Nurachman **	Komisaris Independen	307.800.000	76.950.000	61.560.000	76.950.000	1.138.348.303	1.661.608.303
Imas Aan Ubudiah	Komisaris Independen	769.500.000	76.950.000	153.900.000	192.375.000	1.138.348.303	2.331.073.303
Achmad Hidayat ***	Komisaris Independen	615.600.000	76.950.000	123.120.000	153.900.000	-	969.570.000
Suryo Hapsoro Tri Utomo ***	Komisaris Independen	615.600.000	76.950.000	123.120.000	153.900.000	-	969.570.000

* Menjabat sampai 25 Maret 2019

** Menjabat sampai 24 April 2018

*** Menjabat sejak 24 April 2018

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

JUMLAH REMUNERASI	JUMLAH KOMISARIS*
Di atas Rp2 miliar	5
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar	2
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar	2
Rp500 juta ke bawah	-

*) Terdapat 2 orang Komisaris yang belum menjabat selama satu tahun penuh

PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Besaran remunerasi Direksi ditetapkan setiap tahun dalam RUPS. Pengkajian besaran remunerasi dilakukan oleh konsultan independen yang sudah memiliki pengalaman, mempunyai database yang kuat dalam menangani perusahaan sekelas Perseroan. Besaran remunerasi Direksi ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Perseroan menetapkan remunerasi Direksi dikaitkan dengan target pencapaian profit, kemampuan menjaga keberlangsungan dan mengembangkan usaha WIKA. WIKA, melalui Dewan Komisaris, mempertimbangkan lima faktor utama dalam menetapkan usulan remunerasi

Direksi, yakni:

- Imbalan jasa untuk menutupi biaya-biaya yang diperlukan dalam menjalankan usaha;

- Menghargai kompetensi dan pengalaman yang dimiliki dan dibutuhkan oleh Perseroan;
- Ketersediaan waktu secara penuh dalam mencurahkan tenaga dan pikiran guna menjalankan tugas Perseroan;
- Kemampuan memitigasi risiko bagi Perseroan dan memberi imbalan terhadap tindakan kedinasan yang berisiko bagi pribadinya; dan
- Menghargai pencapaian target sesuai dengan ukuran kinerja utama (*Key Performance Indicator*) yang ditetapkan.

STRUKTUR REMUNERASI ANGGOTA DIREKSI

Adapun struktur remunerasi Direksi berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur Remunerasi Anggota Direksi

NO	JENIS PENGHASILAN/FASILITAS	KETERANGAN
1	Gaji	a. Direktur Utama sebesar 100% b. Direktur 85% dari gaji Direktur Utama
2	Tunjangan - Tunjangan Hari Raya - Tunjangan Perumahan - Asuransi Purna Jabatan	Diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji Diberikan tunjangan perumahan sebesar 40% dari gaji dengan ketentuan maksimal sebesar Rp27.500.000 a. Diberikan selama menjabat b. Premi asuransi 25% dari gaji dalam satu tahun
3	Fasilitas	
	a. Kendaraan	Diberikan 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional
	b. Kesehatan	a. Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan b. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi serta suami/isteri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah atau bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan.

NO	JENIS PENGHASILAN/FASILITAS	KETERANGAN
	c. Bantuan Hukum	Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Dewan Komisaris diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Dewan Komisaris yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
	d. Tantiem	Penetapan tantiem mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan perusahaan.

INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI DIREKSI

Dalam menetapkan indikator Dewan Komisaris WKA mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha
2. Faktor kompleksitas usaha
3. Tingkat inflasi

4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

JUMLAH NOMINAL/KOMPONEN REMUNERASI DIREKSI

Pada tahun 2018, secara lebih rinci remunerasi masing-masing Dewan Komisaris yang telah terealisasi dapat disampaikan, sebagai berikut.

NAMA	JABATAN	GAJI 2018	TUNJANGAN			TANTIEM (BERSIH)	TOTAL PER TAHUN
			THR	PERUMAHAN	PREMI ASURANSI		
Bintang Perbowo *	Direktur Utama	760.000.000	190.000.000	110.000.000	190.000.000	2.810.736.555	4.060.736.555
Tumiyana **	Direktur Utama	1.520.000.000	190.000.000	220.000.000	380.000.000	-	2.310.000.000
Chandra Dwiputra *	Direktur	646.000.000	161.500.000	110.000.000	161.500.000	1.897.247.172	2.976.247.172
Destiawan Soewardjono	Direktur	1.938.000.000	161.500.000	330.000.000	484.500.000	2.529.662.897	5.443.662.897
Bambang Pramujio	Direktur	1.938.000.000	161.500.000	330.000.000	484.500.000	2.529.662.897	5.443.662.897
A.N.S Kosasih	Direktur	1.938.000.000	161.500.000	330.000.000	484.500.000	2.529.662.897	5.443.662.897
Novel Arsyad	Direktur	1.938.000.000	161.500.000	330.000.000	484.500.000	1.897.247.172	4.811.247.172
Agung Budi Waskito **	Direktur	1.292.000.000	161.500.000	220.000.000	323.000.000	-	1.996.500.000
Danu Prijambodo **	Direktur	1.292.000.000	161.500.000	220.000.000	323.000.000	-	1.996.500.000

* Menjabat sampai 24 April 2018

** Menjabat sejak 24 April 2018

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Direksi

JUMLAH REMUNERASI	JUMLAH KOMISARIS
Di atas Rp2 miliar	7
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar	2
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar	-
Rp500 juta ke bawah	-

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, yaitu mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Dasar pembentukan Komite Audit WIKA, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN;
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit pada BUMN;
3. Peraturan Bapepam Nomor: IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN;
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki pedoman kerja yang disahkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. Nomor: 79/DK/WIKA/2018 tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 73/DK/WIKA/2016 tentang Piagam Komite Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. tanggal 2 Juli 2018. Adapun isi Piagam Komite Audit antara lain: Definisi, Latar Belakang dan Dasar Hukum Pembentukan Serta Tujuan Komite, Organisasi, Masa Jabatan dan Syarat-syarat Keanggotaan, Hak, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Rapat-rapat, Mekanisme Kerja, Pelaporan dan Anggaran.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan WIKA kepada publik dan atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan WIKA.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan WIKA terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan WIKA.
3. Melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan manajemen risiko PT WIKA yang mencakup bidang QSHE.
4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen WIKA dan Auditor Eksternal/Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
5. Melakukan penelaahan dengan manajemen dan Auditor Eksternal/Akuntan Publik terkait dengan semua hal yang diharuskan untuk dikomunikasikan oleh Auditor Eksternal/Akuntan Publik kepada Komite Audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal/Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
7. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit SPI.
8. Melakukan penelaahan atas efektivitas sistem pengendalian intern WIKA termasuk pengendalian dan pengamanan teknologi informasi.
9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan WIKA.
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan WIKA.
11. Menyusun *self assessment tool* dan melakukan *self assessment* terhadap kinerja Komite Audit dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.
12. Setiap anggota Komite Audit bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tugas, kewenangan dan segala kewajiban lainnya terkait dengan pengangkatan dirinya sebagai anggota Komite Audit sebagaimana sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris atas pengangkatannya dan Piagam Komite Audit.
13. Kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh

tiap anggota Komite Audit atas pelaksanaan tugas, kewenangan dan segala kewajiban lainnya terkait dengan pengangkatan dirinya sebagai anggota Komite Audit, maka terhadap anggota Komite Audit dapat diberikan sanksi oleh Dewan Komisaris, dimulai dengan surat peringatan hingga pemberhentian dari jabatannya.

14. Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dari Komite Audit yang berakibat pada kesalahan atau ketidakakuratan penyampaian pendapat atau nasehat Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Direksi, maka setiap anggota Komite Audit bertanggung jawab secara tanggung menanggung dan atau pribadi.
15. Setiap anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi WKA.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Komite Audit mempunyai wewenang antara lain:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi, SPI dan unit yang menangani pengembangan manajemen risiko dan Auditor

Eksternal/Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan dan atau ditugaskan oleh Dewan Komisaris yang ditetapkan melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris maupun Keputusan Dewan Komisaris.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE AUDIT

Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan tidak lebih dari 6 (enam) anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yang ditetapkan dan diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris. Pihak dari luar Perseroan yang diangkat adalah pihak luar/ independen yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang akuntansi dan atau keuangan serta memiliki pemahaman yang baik tentang *Corporate Governance* dan atau bisnis Perseroan dan anak perusahaan.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit per 31 Desember 2018

NAMA	JABATAN	KETERANGAN	KEAHLIAN
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen	Teknik dan Manajemen
Freddy R. Saragih	Wakil Ketua merangkap Anggota	Komisaris	Ekonomi dan Akuntansi
M. Sjukrul Amien	Anggota	Pihak Independen	Tenaga Ahli Bidang Teknis
Nirsihing Asmoro	Anggota	Pihak Independen	Tenaga Ahli Bidang Akuntansi dan Keuangan
Nanda A. Wijayanti	Anggota	Pihak Independen	Tenaga Ahli Bidang Akuntansi dan Keuangan

PROFIL KOMITE AUDIT

SURYO HAPSORO TRI UTOMO KETUA MERANGKAP ANGGOTA KOMITE AUDIT

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

FREDDY R. SARAGIH WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA KOMITE AUDIT

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.



M. SJUKRUL AMIEN

Anggota Komite Audit

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/ Usia	Tuban, 12 September 1952 66 Tahun
Riwayat Pendidikan	- Sarjana Teknik Sipil di STTN/ISTN pada tahun 1986 - Magister Manajemen di STIE pada tahun 1997
Riwayat Pekerjaan	- Penasihat Air Bersih dan Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum - Dosen Pascasarjana Program Air Bersih dan Sanitasi, Universitas Gajah Mada (2012-sekarang). - Direktur Pengembangan Sanitasi Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (Pensiun dengan tingkat IV.E) (2010-2012) - Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum (2006-2010)



NIRSIHING ASMORO

Anggota Komite Audit

Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Tempat dan Tanggal Lahir/ Usia	Jakarta, 28 September 1964 55 Tahun
Riwayat Pendidikan	- Diploma IV Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1994
Riwayat Pekerjaan	- BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (1986 – 1991) - BPKP Pusat (1994 – 1997) - BPKP Perwakilan Provinsi Papua (Jayapura) (1997 – 1999) - Ditempatkan pada Pubsitbang BPKP (2000 – 2001) - BPKP Pusat pada Deputi Akuntan Negara (2001 – 2011) - Komite Audit di PGN (2005 – 2006) - BPKP Perwakilan Bali (2011 – 2013) - BPKP Perwakilan DKI Jakarta (2013 – 2014) - Partner pada Kantor Akuntan Publik Haryono, Junianto & Asmoro (2015 – Sekarang) - Komite Audit pada PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO) (2017 – 2018) - Komite Audit pada PT Wijaya Karya (Persero) (2018 – Sekarang)



NANDA A. WIJAYANTI

Anggota Komite Audit

Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

Tempat dan
Tanggal Lahir/
Usia

Kediri, 12 September 1979
39 Tahun

Riwayat
Pendidikan

- Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia pada tahun 2002
- M.B.A Sejong University, South Korea, Finance pada tahun 2008

Riwayat
Pekerjaan

- Staf Ahli Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi, FEB UI (2019-saat ini)
- Editor Ahli Akuntansi Sektor Publik, Perpajakan dan Komputer Akuntansi Penerbit Salemba Empat (2018-saat ini)
- Konsultan dan Trainer Pusat Pengembangan Akuntansi, FEB UI (2002-2012)
- Dosen Departemen Akuntansi, FEB UI (2008-saat ini)

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Komite Audit

Syarat-syarat keanggotaan Komite Audit yaitu:

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha WIKA, proses audit, manajemen risiko dan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal serta Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib memahami manajemen risiko yang mencakup bidang QSHE.
4. Wajib mematuhi *Code of Conduct* yang berlaku di WIKA.
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Mampu bekerja secara independen, objektif dan profesional, memiliki integritas dan penuh dedikasi.
7. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberikan jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada WIKA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
8. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan WIKA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali sebagai Komisaris Independen.
9. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada WIKA yang dibuktikan dengan ditandatangani surat pernyataan tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung.
10. Dalam hal Anggota Komite Audit memperoleh saham PT WIKA baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
11. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama PT WIKA.
12. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT WIKA.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE AUDIT

Per 31 Desember 2018, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Ketua merangkap Anggota	- Sarjana Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1984. - Ph.D. (Doctor of Philosophy), University of Newcastle upon Tyne, Inggris tahun 1996.	- Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen/Kementerian Pendidikan Nasional/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2009 - 2012). - Country Representative of Indonesia to the SEAMEO SEARCA Governing Board (2009-2012). - Rektor Universitas Budi Luhur Jakarta (2012-2016). - Wakil Ketua Board of Advisory, Institut Teknologi Yogyakarta (2015 - sekarang).
Freddy R. Saragih	Wakil Ketua merangkap Anggota	- Sarjana Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 1984. - Master Profesional Akuntansi, University of Texas, Austin tahun 1992.	- Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan di Kementerian Keuangan (2006 - 2009). - Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal - BKF di Kementerian Keuangan (2009 - 2014). - Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur di Kementerian Keuangan (2015 - sekarang).
M. Sjukrul Amien	Anggota	- Sarjana Teknik Sipil di STTN/ISTN pada tahun 1986. - Magister Manajemen di STIE pada tahun 1997.	- Penasihat Air Bersih dan Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. - Dosen Pascasarjana Program Air Bersih dan Sanitasi, Universitas Gajah Mada (2012-sekarang). - Direktur Pengembangan Sanitasi Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (Pensiun dengan tingkat IV.E) (2010-2012). - Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum (2006-2010).
Nirsihing Asmoro	Anggota	- Diploma IV Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1994	- BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (1986 - 1991). - BPKP Pusat (1994 - 1997). - BPKP Perwakilan Provinsi Papua (Jayapura) (1997 - 1999). - Ditempatkan pada Pubsitbang BPKP (2000 - 2001). - BPKP Pusat pada Deputy Akuntan Negara (2001 - 2011). - Komite Audit di PGN (2005 - 2006). - BPKP Perwakilan Bali (2011 - 2013). - BPKP Perwakilan DKI Jakarta (2013 - 2014). - Partner pada Kantor Akuntan Publik Haryono, Junianto & Asmoro (2015 - Sekarang). - Komite Audit pada PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO) (2017 - 2018). - Komite Audit pada PT Wijaya Karya (Persero) (2018 - Sekarang).

NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA
Nanda A. Wijayanti	Anggota	- Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia pada tahun 2002. - M.B.A Sejong University, South Korea, Finance pada tahun 2008.	- Staf Ahli Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi, FEB UI (2019-saat ini) - Editor Ahli Akuntansi Sektor Publik, Perpajakan dan Komputer Akuntansi Penerbit Salemba Empat (2018-saat ini) - Konsultan dan Trainer Pusat Pengembangan Akuntansi, FEB UI (2002-2012) - Dosen Departemen Akuntansi, FEB UI (2008-saat ini)

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Tabel Independensi Komite Audit

	SURYO HAPSORO TRI UTOMO	FREDDY R. SARAGIH	M. SJUKRUL AMIEN	NIRSIHING ASMORO	NANDA A. WIJAYANTI
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	v	v	v	v	V
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	v	v	v	v	V
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	v	v	v	v	V
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	v	v	v	v	V
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	v	v	v	v	v

RAPAT KOMITE AUDIT

Agenda Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2018, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT
1	05 Januari 2018	Rapat Pembahasan Permohonan Persetujuan Tambahan Setoran Modal pada PT Citra Marga Lintas Jabar ("PT CMLJ")
2	05 Januari 2018	Rapat Pembahasan Permohonan Persetujuan untuk Melakukan Pembukaan Kantor Cabang di Filipina
3	05 Januari 2018	Rapat Internal
4	10 Januari 2018	Rapat Koordinasi dengan SPI

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT
5	24 Januari 2018	Rapat Pemaparan Kajian Investasi Keuangan dan Risiko Proyek
6	24 Januari 2018	Rapat Pemaparan Rencana Aksi Korporasi
7	29 Januari 2018	Rapat Pemaparan Penjelasan Tambahan Setoran Modal PT WIKA (Persero) Tbk. kepada PT WIKA Bitumen sebesar Rp70 Miliar
8	15 Maret 2018	Rapat Pemaparan Proyek
9	16 Maret 2018	Rapat Pembahasan Anak Perusahaan
10	16 Maret 2018	Rapat Pembahasan Proyek
11	21 Maret 2018	Rapat Pembahasan Anak Perusahaan
12	02 Mei 2018	Rapat Koordinasi dengan SPI
13	04 Mei 2018	Rapat Tambahan Penjelasan terkait dengan Surat Direksi perihal Permohonan Persetujuan Pemenuhan Tambahan Setoran Modal pada Entitas Asosiasi
14	30 Mei 2018	Rapat Internal
15	30 Mei 2018	Rapat Koordinasi dengan GM Keuangan
16	30 Mei 2018	Rapat Koordinasi dengan SPI
17	13 Juli 2018	Rapat Internal
18	30 Juli 2018	Rapat Internal
19	09 Agustus 2018	Rapat Internal
20	23 Agustus 2018	Rapat Internal
21	31 Agustus 2018	Rapat Internal
22	07 September 2018	Rapat Koordinasi dengan SPI
23	19 September 2018	Rapat Koordinasi dengan Departemen Perencanaan dan Pengembangan Usaha
24	01 Oktober 2018	Rapat Internal
25	10 Oktober 2018	Rapat Koordinasi dengan Direktur Keuangan, Ka.SPI, GM Keuangan, dan GM Legal
26	10 Oktober 2018	Rapat Internal
27	25 Oktober 2018	Rapat Koordinasi dengan SPI dan Departemen QSHE
28	25 Oktober 2018	Rapat Internal
29	06 November 2018	Rapat Internal
30	21 November 2018	Rapat Internal
31	22 November 2018	Rapat Koordinasi dengan Ka.SPI, GM QSHE, dan GM Manajemen Risiko & PMO
32	28 November 2018	Rapat Internal
33	05 Desember 2018	Rapat Koordinasi dengan GM Keuangan
34	17 Desember 2018	Rapat Koordinasi dengan Departemen Keuangan
35	18 Desember 2018	Rapat Pembahasan Pelaksanaan Program Biro Sisten Informasi
36	18 Desember 2018	Rapat Koordinasi dengan Ka.SPI, GM QSHE, dan GM Manajemen Risiko & PMO
37	18 Desember 2018	Rapat Internal

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Selama tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 37 kali. Berikut frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Komite Audit.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Periode Tanggal 01 Januari 2018 s.d 14 Mei 2018

NAMA	PERIODE	JUMLAH RAPAT	
		13	
		JUMLAH KEHADIRAN	PERSENTASE
Nurrachman	Ketua merangkap Anggota Komite Audit	6	46%
M. Sjukrul Amien	Anggota Komite Audit	12	92%
Darsono Prawironegoro	Anggota Komite Audit	12	92%
Waluyati Supriyanti	Anggota Komite Audit	13	100%

Periode Tanggal 14 Mei 2018 s.d 02 Juli 2018

NAMA	PERIODE	JUMLAH RAPAT	
		3	
		JUMLAH KEHADIRAN	PERSENTASE
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Ketua merangkap Anggota Komite Audit	3	100,00%
Achmad Hidayat	Anggota Komite Audit	3	100,00%
Waluyati Supriyanti	Anggota Komite Audit	3	100,00%
M. Sjukrul Amien	Anggota Komite Audit	3	100,00%
Darsono Prawironegoro	Anggota Komite Audit	3	100,00%

Periode Tanggal 02 Juli 2018 s.d 22 Oktober 2018

NAMA	PERIODE	JUMLAH RAPAT	
		10	
		JUMLAH KEHADIRAN	PERSENTASE
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Ketua merangkap Anggota Komite Audit	10	100,00%
Achmad Hidayat	Anggota Komite Audit	9	90,00%
M. Sjukrul Amien	Anggota Komite Audit	10	100,00%
Nirsihing Asmoro	Anggota Komite Audit	10	100,00%
Nanda Ayu Wijayanti	Anggota Komite Audit	10	100,00%

Periode Tanggal 22 Oktober 2018 s.d 31 Desember 2018

NAMA	PERIODE	JUMLAH RAPAT	
		11	
		JUMLAH KEHADIRAN	PERSENTASE
Suryo Hapsoro Tri Utomo	Ketua merangkap Anggota Komite Audit	10	91%
Freddy R. Saragih	Wakil Ketua merangkap Anggota Komite Audit	8	73%
M. Sjukrul Amien	Anggota Komite Audit	10	91%
Nirsihing Asmoro	Anggota Komite Audit	11	100%
Nanda Ayu Wijayanti	Anggota Komite Audit	10	91%

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN 2018

Pelaksanaan tugas Komite Audit selama tahun 2018, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas Informasi Keuangan yang akan dikeluarkan WIKA kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain Laporan Keuangan, Proyeksi, dan Laporan lainnya terkait dengan Informasi Keuangan WIKA.
2. Memberikan pendapat Independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen WIKA dan Auditor Eksternal/Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
3. Melakukan penelaahan dengan Manajemen dan Auditor Eksternal/Akuntan Publik terkait dengan semua hal yang diharuskan untuk dikomunikasikan oleh Auditor Eksternal/Akuntan Publik kepada Komite Audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal/Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Audit SPI.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
7. Melakukan penelaahan hasil Audit SPI dan KAP atas sistem pengendalian intern WIKA.
8. Analisis dan Evaluasi Executive Summary (Exsum) bulanan sebagai bahan rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi (Rakomdir).
9. Melaksanakan penugasan dari Dewan Komisaris untuk membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan permohonan persetujuan Direksi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris.
10. Kegiatan tinjauan atau kunjungan ke proyek.

KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GCG

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang merupakan perluasan dari Komite Nominasi Remunerasi dan GCG sebagai respon atas keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34 tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten. Sebagai emiten atau Perusahaan Publik, WIKA segera merespon dengan tetap melakukan harmonisasi terhadap peraturan lain yang mengatur WIKA sebagai BUMN, khususnya Peraturan Menteri BUMN Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN khususnya Pasal 17 tentang Komite-komite Lain. Dalam ayat (1) menyatakan bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat membentuk satu komite lain yang nama dan tugasnya disesuaikan dengan terhadap kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang terdiri dari ketua dan anggota. Artinya, secara substantif aturan ini membatasi BUMN hanya boleh mempunyai 2 (dua) komite yaitu yang wajib adalah Komite Audit dan satu komite lainnya. Karena alasan di atas, maka Dewan Komisaris menyetujui perluasan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dengan mengemban tugas sekaligus dengan fungsi Nominasi dan Remunerasi.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GCG

Dasar hukum pembentukan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

PIAGAM KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GCG

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG memiliki pedoman kerja yang disahkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 104/DK/WIKA/2018 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. tanggal 19 September 2018. Adapun isi Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG antara lain:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Pembentukan, Organisasi dan Masa Kerja
- Bab III Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan
- Bab IV Penyelenggaraan Rapat dan Sistem Pelaporan Kegiatan
- Bab V Anggaran
- Bab VI Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GCG

Sesuai dengan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No: 104/DK/WIKA/2018 tentang Piagam Komite Nominasi Remunerasi dan *Good Corporate Governance*, rincian tugas sebagai berikut:

Tugas Pokok Berkaitan Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Melakukan kegiatan terkait nominasi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dalam hal Komite menganggap perlu menggunakan konsultan nominasi independen untuk melakukan penelaahan kembali atas nominasi yang telah ditentukan, maka tugas Komite adalah memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan serta

melakukan *monitoring* pekerjaan konsultan melalui Human Capital.

Tugas Pokok Berkaitan Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas Remunerasi.
2. Melakukan kegiatan terkait remunerasi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dalam hal Komite menganggap perlu menggunakan konsultan nominasi independen untuk melakukan penelaahan kembali atas nominasi yang telah ditentukan, maka tugas Komite adalah memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan serta melakukan pekerjaan konsultan melalui Human Capital.
4. Melakukan kajian atas kesesuaian ketentuan-ketentuan dalam Standar Operasi Prosedur (SOP) dengan Peraturan Perundang-undangan dan kode etik yang berlaku dan relevan.
5. Menyusun *self assessment tools* dan melakukan *self assessment* terhadap kinerja Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.
6. Mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan tugas Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris secara periodik.
7. Melaksanakan tugas khusus dan tugas lainnya dari Dewan Komisaris.
8. Mengevaluasi kebijakan tentang GCG dan Standar Etika serta tindak lanjut hasil *assessment* yang dilakukan oleh konsultan eksternal.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GCG

Tugas Pokok Berkaitan GCG

1. Melakukan kajian, evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan GCG WKA.
2. Melakukan kajian atas kepatuhan perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan karakteristik bidang kegiatan perusahaan, antara lain mengatur tentang badan hukum perseroan, badan hukum milik negara, pasar modal, jasa konstruksi, perjanjian dan tata kelola perusahaan.
3. Memberikan pendapat dan/atau masukan yang objektif, profesional dan independen atas hal-hal yang memerlukan perhatian, tindak lanjut, atau hal-hal lainnya yang dapat membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berkaitan dengan praktik GCG.
1. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Komposisinya adalah 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG berasal dari:
 - a. Anggota Dewan Komisaris
 - b. Pihak yang berasal dari luar
 - c. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi SDM
2. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite.
3. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang bukan anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai anggota Komite lain di lingkungan WKA pada periode yang sama.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

NAMA	JABATAN	KETERANGAN	KEAHLIAN
Achmad Hidayat	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen	Hukum
Eddy Kristanto	Wakil Ketua merangkap Anggota	Komisaris	Strategi Bisnis
Syailendra Ogan	Anggota	GM Human Capital	Keuangan dan Manajemen SDM
Fahrul Ismaeni	Anggota	Pihak Independen	Hukum dan Manajemen

PROFIL KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GCG

ACHMAD HIDAYAT KOMISARIS INDEPENDEN MERANGKAP ANGGOTA KOMITE AUDIT

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

EDDY KRISTANTO KOMISARIS MERANGKAP ANGGOTA KOMITE AUDIT

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris.

SYAILENDRA OGAN GENERAL MANAGER DEPARTEMEN HUMAN CAPITAL MERANGKAP ANGGOTA KOMITE AUDIT

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Eksekutif.



FAHRUL ISMAENI

Anggota Komite Nominasi,
Remunerasi dan GCG

Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia

Tempat dan
Tanggal Lahir/
Usia Surabaya, 22 Mei 1980
38 Tahun

Riwayat
Pendidikan

- Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2003
- Magister Hukum dalam Hukum Perdata Universitas Indonesia pada tahun 2006
- Sarjana Hukum dalam Hukum Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno pada tahun 2012.

Riwayat
Pekerjaan

- National Consultant untuk Social Entrepreneurship (2009 - 2010)
- Anggota Komite Risiko Usaha dan Good Corporate Governance (GCG) di PT Angkasa Pura I (Persero) (2013 - 2014)
- Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GCG

Adapun persyaratan anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG antara lain:

1. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tata kelola perusahaan serta mengkomunikasikan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip dan proses Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG secara umum, prinsip-prinsip fungsi pengawasan dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Peraturan Perundang-undangan tentang perseroan dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
4. Mampu mempelajari kegiatan perusahaan secara cepat sehingga dapat memperoleh pengetahuan yang memadai tentang kegiatan perusahaan dan kaitannya dengan aspek Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.
5. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan santun serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bernilai tambah.

Per 31 Desember 2018, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	PENGALAMAN KERJA
Achmad Hidayat	Ketua merangkap Anggota	- Menempuh pendidikan Akademi Kepolisian tahun 1980 - Menempuh pendidikan PTIK tahun 1986 - Menempuh pendidikan Sespim Polri tahun 1997 - Menempuh pendidikan Sespati Polri tahun 2005 - Sarjana Hukum tahun 2008	- Kepala Divisi Teknologi dan Informasi Polri (2013) - Kepala Biro Bin Opsnal Bareskrim Polri (2010) - Kepala Biro Analis Bareskrim Polri (2010)
Eddy Kristanto	Wakil Ketua merangkap Anggota	- Menempuh pendidikan AKABRI, tahun 1984 - Menempuh pendidikan SESKOAD, tahun 1997	- Kepala Badan Intelijen Negara, Bali (2014-2016) - Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Badan Intelijen Negara (2016)
Syailendra Ogan	Anggota	- Sarjana Akuntansi dari Universitas Ibnu Khaldun pada tahun 2003	- Kepala Seksi Keuangan dan Administrasi (2012-2014) - Manajer Biro Keuangan Departemen Bangunan Gedung (2014-2017)
Fahrul Ismaeni	Anggota	- Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2003 - Magister Hukum dalam Hukum Perdata Universitas Indonesia pada tahun 2006 - Sarjana Hukum dalam Hukum Perdata dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno pada tahun 2012	- National Consultant untuk Social Entrepreneurship (2009 - 2010) - Anggota Komite Risiko Usaha dan Good Corporate Governance (GCG) di PT Angkasa Pura I (Persero) (2013 - 2014) - Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GCG

Seluruh anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Tabel Independensi Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

	ACHMAD HIDAYAT	EDDY KRISTANTO	SYAILENDRA OGAN	FAHRUL ISMAENI
Aspek Independensi	v	v	v	v
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	v	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	v	v	v	v
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	v	v	v	v
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Nominasi, Remunerasi dan GCG	v	v	v	v
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	v	v	v	v

RAPAT KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GCG

Agenda Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Sepanjang tahun 2018, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT
1	1 Maret 2018	1. Laporan Assessment GCG Tahun 2017 oleh BPKP dan Tindak Lanjutnya 2. Paparan Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 3. Lain-lain
2	1 Maret 2018	1. Paparan Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 2. Lain-lain
3	5 April 2018	1. Pembahasan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2018 2. Lain-lain
4	26 Juli 2018	1. Pembahasan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan 2. Batasan Kewenangan (<i>Threshold</i>) Perusahaan
5	30 Agustus 2018	1. Pembahasan Perkembangan Penentuan Batasan Kewenangan (<i>Threshold</i>) Perusahaan 2. Laporan Pelaksanaan CSR dalam Rangka Idul Adha
6	20 September 2018	1. Laporan Kegiatan Komite NRG sampai dengan September 2018 2. Pembahasan Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan
7	20 Desember 2018	1. Rapat Koordinasi dan evaluasi Tahun 2018 terkait Program Kerja dan Rencana Tahun 2019 yang Berkaitan dengan GCG 2. Lain-lain
8	21 November 2018	1. Perkenalan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG 2. Pembahasan Surat Direksi perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan 3. Lain-lain

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GCG

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG

Periode Tgl 01 Januari 2018 s.d 22 Oktober 2018

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	
		6	
		JUMLAH KEHADIRAN	PERSENTASE
Imas Aan Ubudiah	Ketua merangkap Anggota	6	100%
Freddy R. Saragih	Wakil Ketua merangkap Anggota	0	0%
Fahrul Ismaeni	Anggota	6	100%
Syailedra Ogan*	Anggota	2	33%

*) Undangan khusus sebagai ex-officio untuk pembahasan HC, Nominasi, dan Remunerasi.

Periode Tgl 22 Oktober 2018 s.d 31 Desember 2018

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	
		2	
		JUMLAH KEHADIRAN	PERSENTASE
Achmad Hidayat	Ketua merangkap Anggota	2	100%
Eddy Kristanto	Wakil Ketua merangkap Anggota	2	100%
Syailedra Ogan*	Anggota	1	50%
Fahrul Ismaeni	Anggota	2	100%

*) Undangan khusus sebagai ex-officio untuk pembahasan HC, Nominasi, dan Remunerasi.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN GCG TAHUN 2018

Pelaksanaan tugas Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG di tahun 2018, antara lain:

1. Rapat internal dengan melibatkan pihak manajemen dalam hal ini yang menjadi *counter part* dari manajemen adalah Sekretaris Korporasi dengan sub bidang di bawahnya adalah GCG dan CSR, Departemen Human Capital dan Departemen Legal.
2. *Monitoring compliance* kegiatan perusahaan.
 - i. Penyelesaian *review* Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.
 - ii. Koordinasi tentang pengangkatan Direksi dan Komisaris Anak dan Entitas Asosiasi.
3. Kegiatan Tinjauan/Kunjungan ke Proyek.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Kebijakan suksesi Direksi WIKA mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Sumber bakal calon Direksi berasal dari:

1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
3. Talenta BUMN yang diusulkan melalui Dewan Komisaris, terdiri atas:
 - a. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 - b. Direksi anak perusahaan BUMN/Perusahaan patungan BUMN.
4. Talenta Kementerian BUMN;
5. Sumber lain yang terdiri dari:
 - a. Pejabat BUMN lain; dan
 - b. Sumber lainnya.

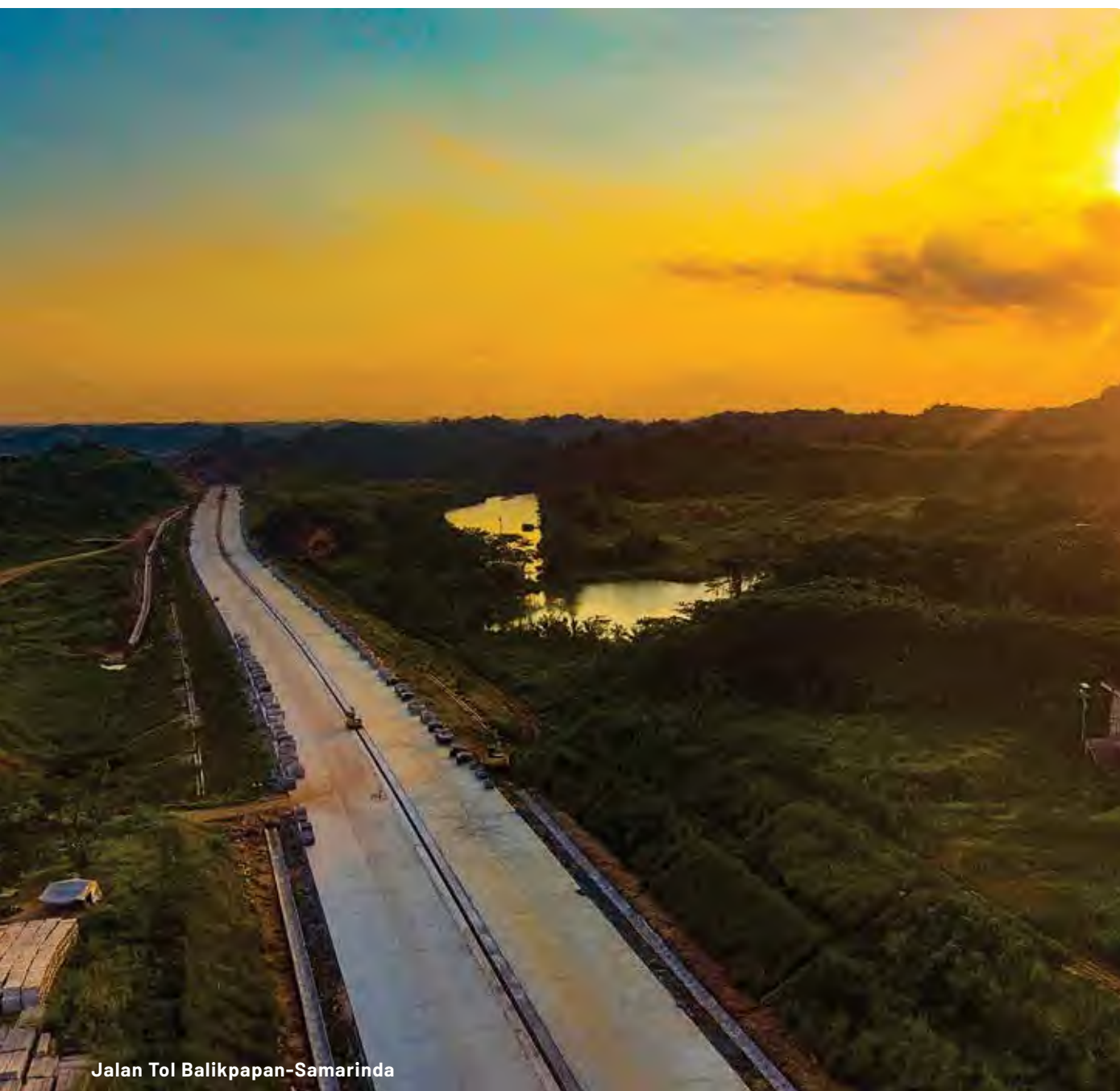
Bakal calon Direksi dapat diusulkan oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap yang bersangkutan dan jika memenuhi syarat agar diusulkan kepada Menteri BUMN. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam PER-03/MBU/02/2015 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

KOMITE LAIN DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

Perseroan tidak memiliki komite lain di bawah Dewan Komisaris selain Komite Audit dan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG.

FUNGSI PEMANTAUAN RISIKO

Sampai saat ini Perseroan tidak memiliki Komite Risiko di bawah Dewan Komisaris. Pelaksanaan fungsi pengawasan terkait identifikasi, pemetaan, analisis dan mitigasi risiko atas seluruh proses bisnis Perseroan dilakukan oleh Komite Audit.



Jalan Tol Balikpapan-Samarinda

SEKRETARIS PERUSAHAAN

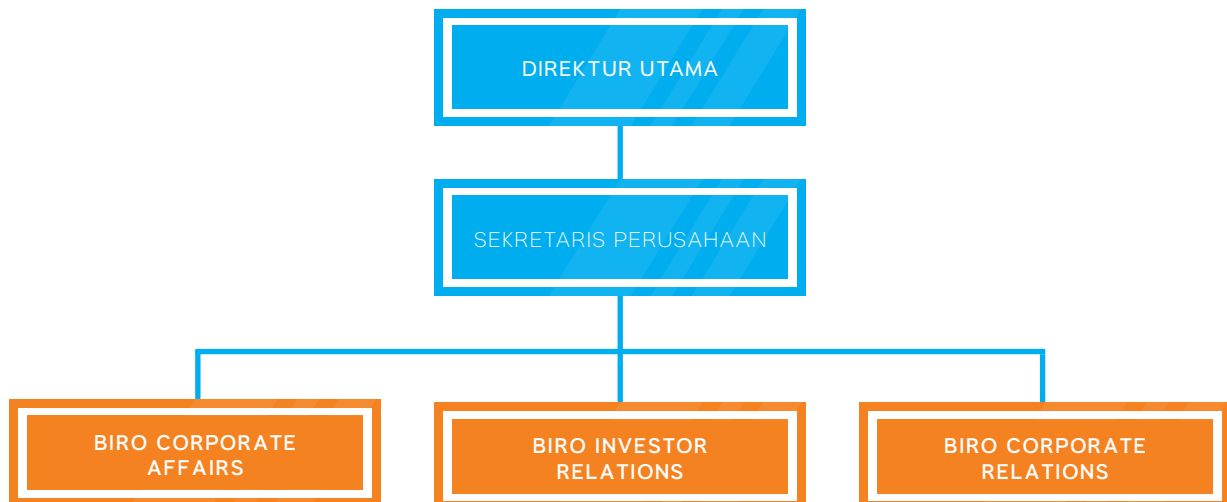
Sekretaris Perusahaan ditetapkan berdasarkan peraturan Bapepam-LK No.IX.1.4. Sebagai organ pendukung perusahaan, Sekretaris berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar organ perusahaan, hubungan antara perusahaan dengan Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemangku Kepentingan lainnya serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan-undangan di bidang Pasar Modal. Sekretaris Perusahaan mempunyai fungsi utama dalam penanganan fungsi sekretariat perusahaan, hubungan kemasyarakatan, *corporate lawyer*, penerapan *Good Corporate Governance*, tanggung-jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholder* (Corporate Social Responsibility), pembinaan usaha kecil dan koperasi, dan bina lingkungan dalam rangka menjaga citra perusahaan ke dalam dan ke luar perusahaan.

DASAR PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan fungsi serta tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain mengacu pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012.

STRUKTUR SEKRETARIS PERUSAHAAN



FUNGSI DAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Sekretaris Perusahaan mempunyai tanggung jawab:

1. Terlaksananya perumusan dan pengkonsolidasian perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, kebijakan perusahaan, kebijakan pokok, anggaran perusahaan lingkup Sekretariat Perusahaan.
2. Terlaksananya publisitas perusahaan, komunikasi internal dan eksternal, protokoler, promosi serta penerapan standar pelayanan pelanggan.
3. Terlaksana dan terbinanya hubungan serta komunikasi dengan para investor, regulator dan lembaga terkait lainnya.
4. Terselenggaranya pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian terhadap rencana/realisasi kegiatan umum antara lain: keanggotaan profesi, asosiasi, klub-klub, dokumen kepemilikan aset perusahaan, pengelolaan gedung, kendaraan, utilitas, kebersihan serta akomodasi Direksi/Dewan Komisaris.

5. Terintegrasinya pelayanan, bantuan, saran, dukungan dan audit di seluruh unit kerja lingkup sekretariat perusahaan.
6. Terlaksananya tertib administrasi, termasuk tapi tidak terbatas pada laporan bulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
7. Terlaksananya upaya peningkatan mutu yang menjadi tanggung jawabnya, melalui penerapan Sistem Manajemen WIK.
8. Terlaksananya pembinaan fungsi di lingkungannya dan sumber daya manusia yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan arah perkembangan perusahaan.
9. Terlaksananya manajemen risiko dalam setiap aktivitas pekerjaan di lingkungan kerjanya.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

PUSPITA ANGGRAENI SEKRETARIS PERUSAHAAN	
Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Jakarta
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Magelang, 5 Maret 1980. Usia 38 tahun per Desember 2018.
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Teknik, Universitas Diponegoro 2003. • Magister Manajemen, Universitas Diponegoro pada tahun 2005.
Pengalaman Kerja	• Koordinator Biro Investor Relations (2013-2014). • Manajer Biro Investor Relations (2015-2017).
Dasar Hukum Pengangkatan	• Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.02.01/A.DIR.9840/2018.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan sejumlah kegiatan meliputi:

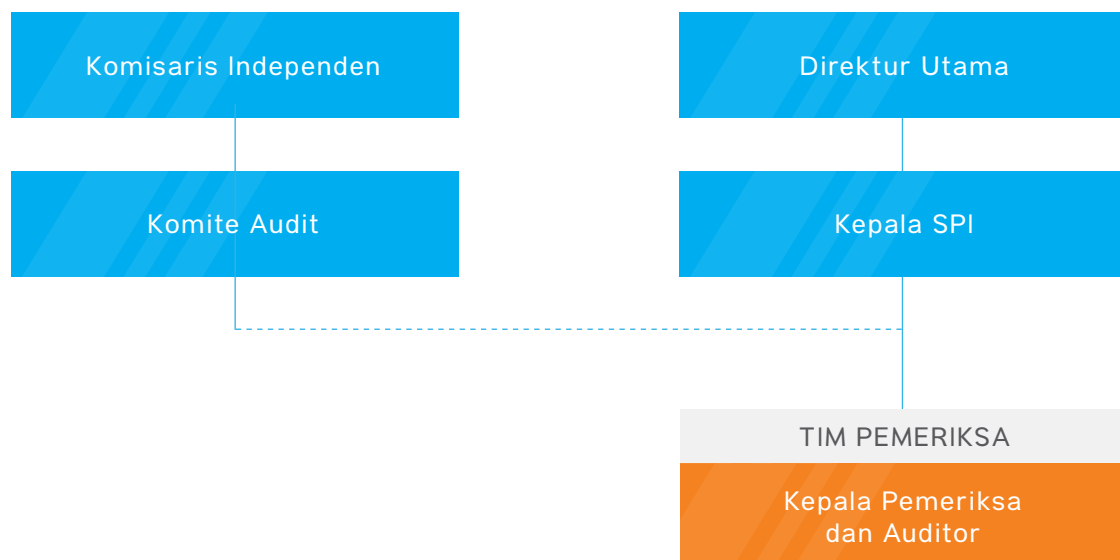
1. Bidang Hubungan Investor
Di bidang hubungan investor, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan antara lain:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. *Analyst meeting*;
 - c. Mengatur kunjungan dari investor-investor asing;
 - d. Pemenuhan *compliance*.
2. Bidang Hubungan Masyarakat
Di bidang hubungan masyarakat, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan antara lain:
 - a. Pembinaan hubungan dengan media melalui *business lunch*, klarifikasi berita, wawancara media;
 - b. Mengatur kunjungan proyek untuk rekan media;

- c. Melakukan pemantauan berita;
 - d. Memperbarui situs WIK dan BUMN *Online* setiap hari.
3. Bidang *Good Corporate Governance* (GCG)
Di bidang GCG, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan antara lain:
 - a. GCG *Assessment*;
 - b. Sosialisasi GCG;
 - c. Riset.
4. Bidang *Corporate Social Responsibility* (CSR)
Di bidang CSR, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan antara lain:
 - a. Melaksanakan kegiatan CSR sesuai dengan konsep keberlanjutan;
 - b. Melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
5. Bidang *General Affair*
Di bidang *General Affair*, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan antara lain:
 - a. Manajemen aset;
 - b. Peningkatan *Building and Security Management System* (SMP).

SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan bagian dari pengendalian internal, yang secara garis besar bertujuan membantu manajemen merealisasikan objektif/sasarannya melalui pemeriksaan kecukupan dan pelaksanaan proses pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. Pembentukan SPI tersebut mengacu kepada Bab VI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1998 tentang Perusahaan-Perseroan (Persero), Keputusan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Surat Keputusan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. No.01.01/A.DIR.11620/2015 tentang Susunan Organisasi Satuan Pengawasan Intern.

Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern dan hubungan kerja dengan organ Komisaris sebagaimana dituangkan pada bagan berikut:



KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi SPI dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern, yang kedudukan dalam organisasi perusahaan setingkat dengan "General Manager", dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk mendukung berjalannya fungsi pengawasan perusahaan dibantu oleh Pemeriksa Intern yang terdiri dari Kepala Pemeriksa dan Pemeriksa sebagai berikut:

1. Kepala Pemeriksa, dalam organisasi dikelompokkan setingkat Manajer Biro Korporasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala SPI.
2. Pemeriksa adalah jabatan keahlian yang mengacu kepada penjenjangan keahlian yang berlaku di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., sesuai dengan Dokumen Prosedur Sertifikasi Keahlian Internal Pegawai No. WIK-HCE-PM-07.03, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dan atau pejabat yang berwenang, dan bertanggung jawab kepada Kepala SPI.

Kedudukan SPI sebagai organ yang membantu Direktur Utama harus ditempatkan dalam struktur organisasi yang setara dengan peran dan tanggung jawabnya, dan dalam mengungkapkan pandangan dan pemikiran terkait dengan pelaksanaan pengawasan kepada Manajemen dilakukan secara bebas dan tidak dapat dipengaruhi ataupun ditekan oleh Manajemen maupun pihak lainnya dalam organisasi perusahaan.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Jabatan Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka.SPI) atau Head of Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dan setiap pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Kepala SPI diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

SENDIANTO, CA KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN	
Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Bekasi
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Bukittinggi, 4 Maret 1960 Usia 58 tahun per Desember 2018.
Riwayat Pendidikan	- Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Andalas Padang pada tahun 1988 - Magister Manajemen, STIMA IMMI pada tahun 2011.
Pengalaman Kerja	- Pemeriksa SPI (1994-2000). - Kepala bagian akuntansi pajak WIKA Realty (2000 - 2003). - Kepala Pemeriksa di WIKA (2003-2012). - Kepala SPI (2012-Sekarang)
Dasar Hukum Pengangkatan	Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK.02.01/A.DIR.11950/2015.

PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER)

Dalam menjalankan tugasnya Satuan Pengawasan Intern memiliki Piagam Satuan Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) yang telah disetujui dan disahkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama pada tanggal 18 Juli 2018. Piagam SPI digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya, yang memuat visi, misi dan tujuan, struktur dan kedudukan, independensi, pertanggungjawaban serta mengatur hubungan kerja SPI dengan Manajemen, Komite Audit dan Auditor Eksternal.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern dalam Piagam Satuan Pengawasan Intern telah diatur tugas dan tanggung jawab SPI antara lain:

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berbasis risiko, termasuk perhitungan anggaran SPI yang mencakup biaya

audit berdasarkan jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa dan biaya operasional.

2. Melakukan pemeriksaan rutin sesuai dengan jadwal yang telah dituangkan dalam PKPT, dan menguji serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas, minimal dilakukan pada bidang Akuntansi, Keuangan, Operasional, Human Capital, Pemasaran, Enjiniring, Produktivitas, Teknologi Informatika dan melakukan evaluasi atas sistem, prosedur dan kebijakan operasi perusahaan yang dilakukan secara berkesinambungan.
4. Menyiapkan dan mendokumentasikan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
5. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan Prosedur Umum Pemeriksaan dan Tindaklanjut Satuan Pengawasan Intern

No. WIKAPEI-PM.01.01 Rev 05, dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

6. Membuat "draft" surat Tindak Lanjut Direktur Utama yang difokuskan kepada permasalahan utama dan perlu mendapatkan penanganan yang segera dari pimpinan unit kerja yang diperiksa, dan Direktur Utama akan menandatangani surat Tindak Lanjut tersebut bilamana telah sesuai dengan pandangannya.
7. Memantau dan menganalisa tindak lanjut dari LHP yang disampaikan kepada pimpinan tertinggi unit kerja sesuai dengan disposisi dari Direktur Utama, dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
8. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan personil SPI melalui pendidikan/pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Profesi seperti *Qualified Internal Auditor* (QIA) yang berkelanjutan baik di dalam maupun di luar negeri.
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan oleh SPI dengan melakukan "peer review" sebagaimana diatur dalam Prosedur Jaminan Kualitas (Quality Assurance) Pemeriksaan SPI No.WIKA-PEI-PM-01.02 Rev.01.
10. Memberikan pendapat, masukan dan pertimbangan maupun jasa konsultasi yang objektif kepada Manajemen dan unit kerja lainnya, baik secara formal maupun informal berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan.
11. Bekerja sama dan membina hubungan yang setara dengan Komite Audit.
12. Melakukan Audit Khusus apabila diperlukan.
13. Dalam hal ditugaskan untuk bekerja sama dengan organ pendukung Dewan Komisaris selain Komite Audit akan ditetapkan dalam Surat Penugasan tersendiri.
3. Meminta keterangan dan penjelasan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan dalam rangka pemeriksaan.
4. Memiliki akses sepenuhnya atas semua dokumen, pencatatan, personil perusahaan dan fsik informasi atas objek pemeriksaan, untuk mendapatkan data dan atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
5. Meminta bantuan tenaga pemeriksa dari dalam perusahaan, dalam hal tidak tersedianya kompetensi personil SPI, dan dari luar perusahaan jika dipandang perlu dengan beban yang menjadi tanggung jawab perusahaan.
6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
7. Melakukan koordinasi dengan Auditor Eksternal yang mencakup KAP, BPK, BPKB dan Instansi lainnya yang relevan.
8. Melakukan pengawasan pada Anak Perusahaan dalam lingkup PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala SPI PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. wajib melakukan koordinasi dengan Kepala SPI Anak Perusahaan untuk meminta keterangan dan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kaedah pengawasan dan menselaraskan program SPI PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dengan SPI Anak Perusahaan dalam rangka untuk memastikan berjalannya aspek pengendalian pada Anak Perusahaan, dan SPI PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dapat melakukan pemeriksaan ke Anak Perusahaan bilamana dipandang perlu dengan penugasan oleh Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
 - b. Atas hasil pemeriksaan SPI PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dilaporkan secara langsung kepada Komisaris Utama Anak Perusahaan dengan tembusan kepada Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan Direktur Utama Anak Perusahaan.

WEWENANG SATUAN PENGAWASAN INTERN

1. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.
2. Memasuki seluruh areal perusahaan dan meninjau tempat usaha, lingkungan kerja dan lokasi aset perusahaan.

KOMPOSISI PERSONIL SATUAN PENGAWASAN INTERN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja organisasi, telah dilakukan *review* Surat Keputusan Susunan Organisasi SPI (Amandemen) dan disahkan pada akhir tahun 2015. Dari hasil *review* tersebut

Kepala SPI membawahi Tim Pemeriksa yang terdiri dari Kepala Pemeriksa dan Pemeriksa. Dalam Pelaksanaan fungsi sehari-hari Kepala Pemeriksa dan Pemeriksa bertanggung jawab langsung kepada Kepala SPI, namun dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, Kepala Pemeriksa bertindak sebagai Ketua Tim yang membawahi Pemeriksa secara langsung. Jumlah pegawai SPI pada tahun 2018 sebanyak 10 orang yang terdiri dari:

Tabel Jumlah Pegawai SPI

JABATAN	JUMLAH
Kepala Satuan Pengawasan Intern	1 Orang
Kepala Pemeriksa	3 Orang
Pemeriksa	3 Orang
Kesekretariatan	1 Orang
Administrasi	1 Orang
Sistem Informasi	1 Orang

Telah dipenuhinya jumlah tim audit sebanyak 3 (tiga) audit masing-masing 2 personil untuk tiap tim audit, sehingga SPI berhasil melakukan pemeriksaan sesuai jumlah yang telah direncanakan.

NO	NAMA	JABATAN	SERTIFIKASI
1	Sendianto	Kepala SPI	QIA (Qualified Internal Audit) CRMP (Certified Risk Management Professional) CA (Chartered Accountant)
2	Sonny Primawanto	Kepala Pemeriksa 1	QIA (Qualified Internal Audit) Level 4
3	D. Heru Aryanto	Kepala Pemeriksa 2	QIA (Qualified Internal Audit)
4	Achwan	Kepala Pemeriksa 3	QIA (Qualified Internal Audit)
5	Andi Sugiarto	Pemeriksa 1	QIA (Qualified Internal Audit)
6	Handoko Winoto	Pemeriksa 2	Proses QIA
7	John Ferry	Pemeriksa 3	Proses QIA

KODE ETIK AUDITOR

Untuk mengatur perilaku dan kepatuhan pemeriksa intern (mencakup Kepala SPI, Kepala Pemeriksa, dan Pemeriksa) perlu ditetapkan prinsip dasar yang dijadikan panduan selama pelaksanaan tugas yang mengacu kepada kode Etik Auditor Internal Indonesia sebagai berikut:

1. Pemeriksa Intern wajib bersikap jujur, objektif, hati-hati, bijaksana, bertanggung jawab, berani dan memiliki integritas yang tinggi serta harus mampu bertindak secara independen dalam

menjalankan tugas maupun kewajibannya, dan harus mampu memelihara kepercayaan yang diberikan oleh Direktur Utama.

2. Pemeriksa Intern harus mampu memelihara kepercayaan yang diberikan dalam rangka tugas pemeriksaan dan mematuhi semua kaedah hukum dan profesi yang menjadi tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas.
3. Pemeriksa Intern harus berusaha untuk meningkatkan keahlian dalam melakukan pekerjaannya dengan memelihara kompetensi jabatan, moralitas dan menjunjung tinggi

kehormatan korps, dan memberikan dukungan kepada tujuan organisasi yang sah sesuai peraturan perundang – undangan.

4. Pemeriksa Intern harus membangun komunikasi yang intens dengan sesama pemeriksa dan auditor eksternal, untuk kepentingan perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugas yang diembannya.
5. Dalam melaksanakan tugasnya Pemeriksa Intern harus berpedoman kepada norma-norma pemeriksaan dan Prosedur Umum Pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern dan Tindak Lanjut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan ketentuan lainnya.
6. Pemeriksa Intern harus menghindarkan diri untuk mengambil bagian dalam aktivitas illegal atau kegiatan yang dapat menurunkan derajat profesi audit internal maupun Perusahaan, dan wajib

menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab sebagai Pemeriksa Intern, kecuali ditetapkan berdasarkan perundang-undangan atau penetapan/putusan Pengadilan.

PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT TAHUN 2018

Satuan Pengawasan Intern sepanjang tahun 2018 telah berhasil melakukan pemeriksaan dan pengawasan pada unit kerja auditee yang mencakup proyek, Departemen Operasi dan Departemen Fungsional sebanyak 42 Objek Pemeriksaan (OBRİK), dari rencana sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2018 sebanyak 38 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI.

Pelaksanaan Audit SPI selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO	DEPARTEMEN	RENCANA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	REALISASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
1	Sipil Umum 1	4	5
2	Sipil Umum 2	3	7
3	Sipil Umum 3	4	4
4	Industrial Plant	6	10
5	Power Plant and Energy	3	4
6	Bangunan Gedung	2	3
7	Luar Negeri	4	2
8	Perencanaan dan Pengembangan Usaha	3	2
9	Audit Konsultasi	3	0
10	Sekretaris Perusahaan	1	1
11	Departemen Keuangan	1	1
12	Departemen Human Capital	1	1
13	Departemen Legal	1	1
14	Sinergi Bisnis	2	1

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Dari hasil audit yang telah dilakukan oleh SPI selama tahun 2018 terdapat temuan sebanyak 327 temuan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 266 temuan atau setara 81,35%.

TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT

Pemeriksaan dilakukan untuk menilai kelayakan berjalannya suatu ketentuan dalam sistem pengendalian akuntansi, operasional dan sistem manajemen WIKA yang dilakukan bersifat integrasi dalam mencapai sasaran perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien dan pelaksanaan pemeriksaan terbatas hanya lingkup Kantor Pusat WIKA. Disamping penugasan yang bersifat umum, Satuan Pengawasan Intern juga melakukan pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan objek tertentu yang diminta maupun diperintahkan oleh Direksi di luar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

PENGEMBANGAN KOMPETENSI UNIT INTERNAL AUDIT

Sepanjang tahun 2018, Unit Internal Audit WIKA telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel Pengembangan Kompetensi Unit Internal Audit

N A M A	PELATIHAN/WORKSHOP/SEMINAR	TANGGAL	PENYELENGGARA
Sendianto, CA	Seminar Nasional Internal Audit "The Auditor of The Future : Trusted & Influencing "	17 s/d 19 April 2018	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
Sonny Primawanto	Seminar Nasional Internal Audit "The Auditor of The Future : Trusted & Influencing "	17 s/d 19 April 2018	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
D Heru Aryanto	Seminar Nasional Internal Audit "The Auditor of The Future : Trusted & Influencing "	17 s/d 19 April 2018	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
Achwan	Seminar Nasional Internal Audit "The Auditor of The Future : Trusted & Influencing "	17 s/d 19 April 2018	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
Andi Sugiarto	Seminar Nasional Internal Audit "The Auditor of The Future : Trusted & Influencing "	17 s/d 19 April 2018	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
Sendianto, CA	Peran Auditor Internal dalam Peningkatan Governance, Risk and Control (GRC) di Era Disruptif	08 s/d 10 Agustus 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
Sonny Primawanto	Peran Auditor Internal dalam Peningkatan Governance, Risk and Control (GRC) di Era Disruptif	08 s/d 10 Agustus 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
D Heru Aryanto	Peran Auditor Internal dalam Peningkatan Governance, Risk and Control (GRC) di Era Disruptif	08 s/d 10 Agustus 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
Sendianto, CA	Nurturing Agile Internal Auditors in Disruptive Times	27 s/d 29 Agustus 2018	The Institute of Internal Auditors Indonesia
Sendianto, CA	Pelatihan PSAK 71, 72 dan 73	4 Oktober 2018	Dept. HC
Andi Sugiarto	Pelatihan PSAK 71, 72 dan 73	4 Oktober 2018	Dept. HC
Sendianto, CA	Memahami Risiko Hukum dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	8 Oktober 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
Sonny Primawanto	Memahami Risiko Hukum dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	8 Oktober 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
Achwan	Memahami Risiko Hukum dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	8 November 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern

N A M A	PELATIHAN/WORKSHOP/SEMINAR	TANGGAL	PENYELENGGARA
Andi Sugiarto	Memahami Risiko Hukum dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	8 November 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
John Ferry	Memahami Risiko Hukum dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	8 November 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
Desih Yanti	Memahami Risiko Hukum dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	8 November 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
Titik Sri Sugiyanti	Memahami Risiko Hukum dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	8 November 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
Aditama Acthur	Memahami Risiko Hukum dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa	8 November 2018	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern
Sendianto, CA	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VI	12 s/d 13 Desember 2018	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko



Lapangan Softball GBK

AKUNTAN PUBLIK

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Perseroan dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor Eksternal yang memeriksa laporan keuangan WIKA tahun buku 2018 ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Dalam penggunaan Auditor Eksternal, WIKA mengacu pada ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Pasal 16 yang menyebutkan bahwa pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.

WIKA selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK, NAMA AKUNTAN DAN FEE PERIODE 5 TAHUN TERAKHIR

Adapun Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan Publik, Fee dan Izin KAP yang mengaudit Laporan Keuangan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Fee dan Izin KAP Periode 5 Tahun Terakhir

TAHUN	KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NAMA AKUNTAN (PARTNER PENANGGUNG JAWAB)	PERIODE AKUNTAN PUBLIK	FEE	IZIN KAP
2018	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Rudi Hartono Purba	1 periode	Rp900.919.800	STTD.KAP-00012/PM.22/2017
2017	Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte)	Henri Arifan	1 periode	Rp1.500.000.000	89/KM.1/2017
2016	Soejatna, Mulyana & Rekan	Drs. Safaat Widjajabrata, CA, CPA	1 periode	Rp675.000.000	KEP-644/KM.17/1998
2015	HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Drs. Hartono, CA, CPA	2 periode	Rp851.815.000	KEP-116/KM.1/2009
2014	HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Drs. Hartono, CA, CPA	1 periode	Rp638.125.000	KEP-116/KM.1/2009

JASA LAIN YANG DIBERIKAN AKUNTAN

Jasa lain yang diberikan akuntan selama tahun 2018 yaitu:

1. Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Tahun Buku 2018;
2. Laporan Audit kepatuhan (*compliance audit*) terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern Tahun Buku 2018;
3. Laporan Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

KOORDINASI AUDITOR EKSTERNAL DAN KOMITE AUDIT

WIKa selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit dan Manajemen untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

Kantor Akuntan Publik berkoordinasi dengan Komite Audit dengan meminta masukan/saran tentang area yang mendapat perhatian khusus dari Komite Audit. Pada saat melakukan Audit, Komite Audit dan Kantor Akuntan Publik melakukan diskusi terkait temuan-temuan yang diperoleh KAP dan saat *exit meeting* KAP menyampaikan hasil auditnya. Komite Audit selalu mengevaluasi pelaksanaan audit umum sesuai dengan standar audit yang berlaku.



Jakarta Light Rail Transit

MANAJEMEN RISIKO

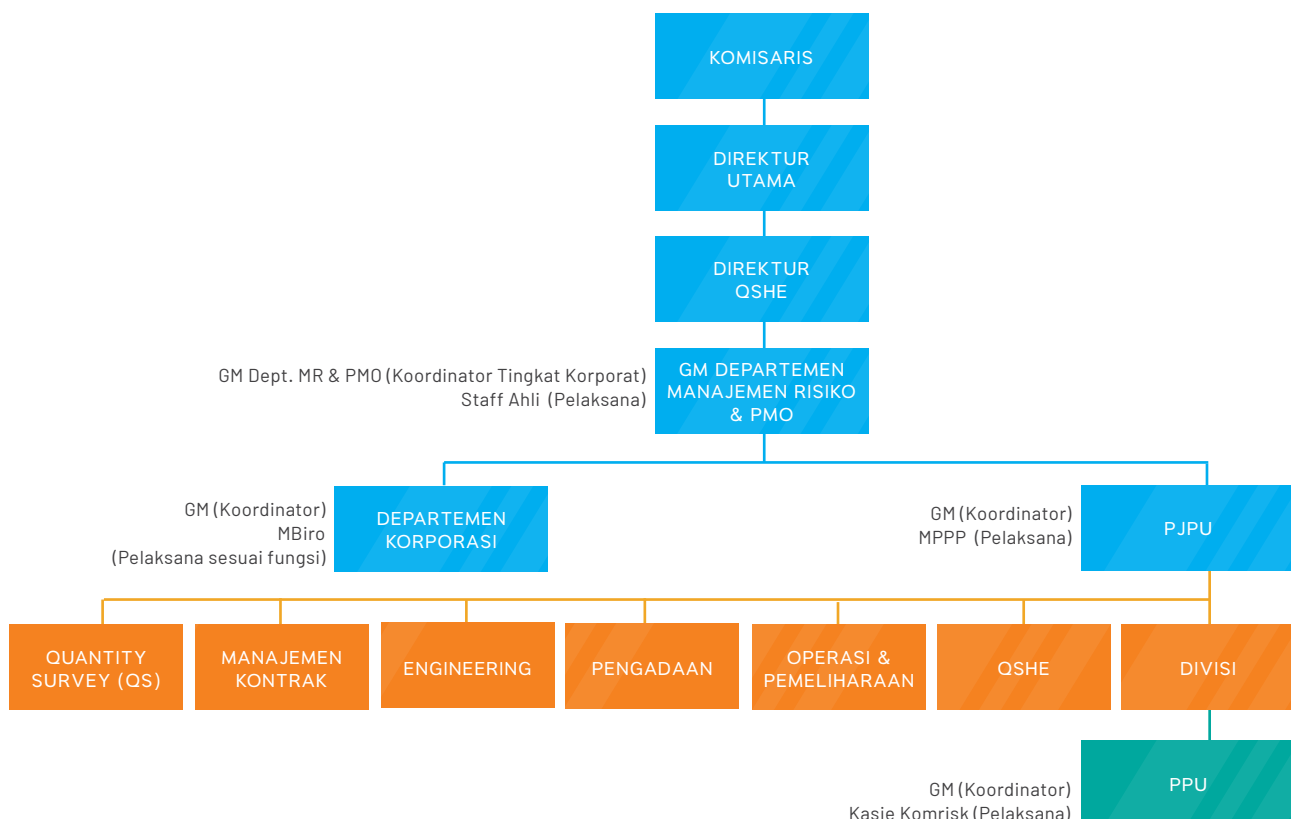
WIKA menyadari bahwa risiko telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses bisnisnya. Risiko-risiko tersebut melekat pada semua aktifitas dan pengambilan keputusan serta dampak dari risiko tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi kestabilan perusahaan. Seiring dengan pencapaiannya menjadi perusahaan EPC dan Investasi, WIKA membutuhkan sistem manajemen risiko yang mampu mengelola segala bentuk ketidakpastian menjadi fokus Perseroan. Manajemen Risiko menjadi semakin penting keberadaannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan demi memastikan roda bisnis perusahaan terus berputar. Manajemen Risiko adalah suatu budaya, dimana proses-proses dan struktur diarahkan untuk mengelola manajemen yang tepat guna, terhadap peluang yang potensial dan dampak yang merugikan.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

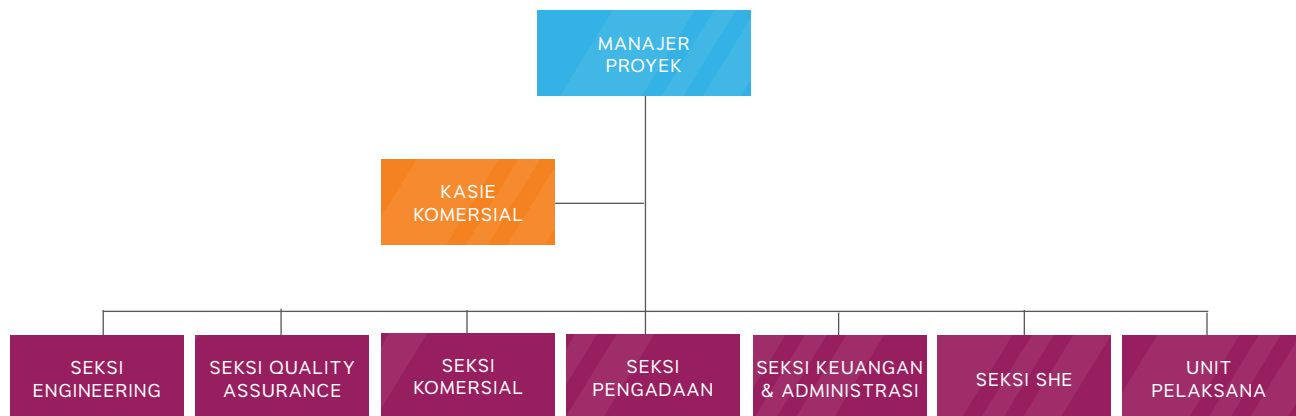
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola perusahaan yang baik (GCG), dalam pelaksanaan program Manajemen Risiko terhitung sejak 31 Mei 2018, dibentuk Departemen Manajemen Risiko yang berada di bawah Direksi. Fungsi utama Departemen Manajemen Risiko dalam penerapan, pengembangan dan asesmen sistem manajemen risiko di tingkat perusahaan yang terintegrasi dari semua fungsi manajemen berdasarkan Visi/Misi WIKA dan pengendalian implementasi sistem manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian produktivitas perusahaan.

Berikut Struktur organisasi yang mendukung Sistem Manajemen Risiko:

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Tingkat Korporat



Struktur Organisasi Manajemen Risiko Tingkat Proyek



SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Penanggung jawab fungsi Manajemen Risiko di setiap level telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko CRMO (Certified Risk Management Officer) dan CRMP (Certified Risk Management Profesional)

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Framework Enterprise Risk Management

Kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM) WIKA adalah seperangkat komponen yang membentuk fondasi dan mengatur organisasi, di mana pengelolaan yang melekat pada masing-masing Biro, Departemen, Divisi dan seluruh fungsi proyek dalam WIKA. Dengan kerangka ini, informasi tentang risiko akan diserahkan kepada pihak berwenang yang akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kerangka Kerja ERM adalah sebagai berikut:

• Mandat Dan Komitmen

Dewan Direksi dan Komisaris WIKA sepenuhnya mendukung kebijakan ERM dan pengelolaan risiko di seluruh organisasi, serta berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk membangun, memelihara, dan melakukan perbaikan kerangka kerja ERM secara berkesinambungan. Direksi telah menciptakan sebuah Departemen yang dipimpin oleh General Manager Manajemen Risiko. Departemen Manajemen Risiko dan koordinator staf di semua divisi, dan anak perusahaan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan dan untuk memberikan saran dan dukungan kepada Direksi, Pemimpin Senior dan *stakeholder* lainnya. Departemen manajemen risiko melakukan *monitoring* dan *controlling* terhadap pelaksanaan serta pelaporan manajemen risiko anak perusahaan sehingga memastikan visi misi perusahaan tercapai. ERM adalah tanggung jawab Manajemen. Auditor internal melalui kegiatan audit berbasis risiko bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan mendukung kegiatan identifikasi risiko serta merekomendasikan perbaikan kerangka kerja ERM.

• Desain Kerangka Kerja ERM

Desain kerangka ERM telah mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

1. Konteks Organisasi

Konteks organisasi membantu Risk Advisor dan Risk Officer untuk menyusun konteks risiko. Kegiatan

ini dilaksanakan untuk memastikan definisi ruang lingkup dan parameter risiko yang dikelola. Kegiatan ini akan mengarahkan proses manajemen risiko selanjutnya. Faktor eksternal meliputi aspek politik, hukum dan perundangan, ekonomi, regulator, penyedia layanan kesehatan, asosiasi profesi, lingkungan yang kompetitif baik lokal maupun regional dan pemangku kepentingan lainnya. Faktor internal meliputi kebijakan, prosedur, budaya perusahaan, sumber daya, sistem informasi, persepsi para pemangku kepentingan dan struktur organisasi.

2. Proses Terintegrasi

Proses yang sudah ada seperti perencanaan strategis, struktur tata kelola, operasional, persyaratan kepatuhan, sistem informasi, prosedur keuangan, manajemen perubahan, dan proses lain, yang diintegrasikan menjadi satu sistem manajemen.

3. Akuntabilitas

Pengelolaan risiko merupakan akuntabilitas dan wewenang fungsi manajemen. Penjabaran tugas ERM disetiap lini organisasi selaras dengan visi dan misi perusahaan. Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun Business Continuity Plans (BCP).

4. Risk Advisor

Fungsi Risk Advisor terdapat pada Biro Manajemen Risiko yang bertugas sebagai koordinator, memberikan advokasi dan fasilitator kepada Risk Officer yang ada dalam setiap lini organisasi. Ruang lingkup penugasan Risk Advisor adalah:

- Mempersiapkan, menerapkan, memelihara pemahaman ERM dan memberikan pelatihan secara berkelanjutan.
- Memberikan saran dan masukan pada semua tingkatan manajemen untuk keberlangsungan bisnis.
- Mengelola sumber-sumber daya eksternal yang diperlukan untuk mendukung kerangka kerja ERM.
- Mekanisme komunikasi dan pelaporan divisi manajemen risiko mengkomunikasikan setiap perubahan kerangka kerja ERM.
- Bertanggung jawab atas penerapan dan pemanfaatan perangkat ERM.

• Tahapan Implementasi ERM

ERM diterapkan dengan tahap sebagai berikut

1. Membangun Konteks Risiko

Dalam persiapan untuk penilaian konteks risiko harus didefinisikan konteksnya dengan mempertimbangkan 3 faktor kunci: Konteks Eksternal, Konteks Internal dan Konteks Manajemen Risiko.

2. Identifikasi Risiko

Sumber risiko harus diidentifikasi untuk dianalisa probabilitas dan akibatnya. Uraian dalam konteks risiko dan *Risk Breakdown Structure* (RBS) dapat dijadikan alat bantu untuk mengidentifikasi risiko.

3. Analisa Risiko

Proses ini membantu dalam memahami risiko. Proses analisa risiko dapat menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif.

4. Evaluasi Risiko

Tujuan evaluasi adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan. *Outputnya* adalah daftar risiko yang memerlukan penanganan dan yang berada dalam *risk appetite* untuk diterima.

• Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan *review* seluruh aktivitas pengelolaan risiko harus direncanakan dan berkelanjutan. Penanggungjawab untuk setiap aktivitas harus ditetapkan. Aktivitas tersebut dapat dikaitkan dengan kegiatan audit internal untuk pembelajaran dan perbaikan terus menerus.

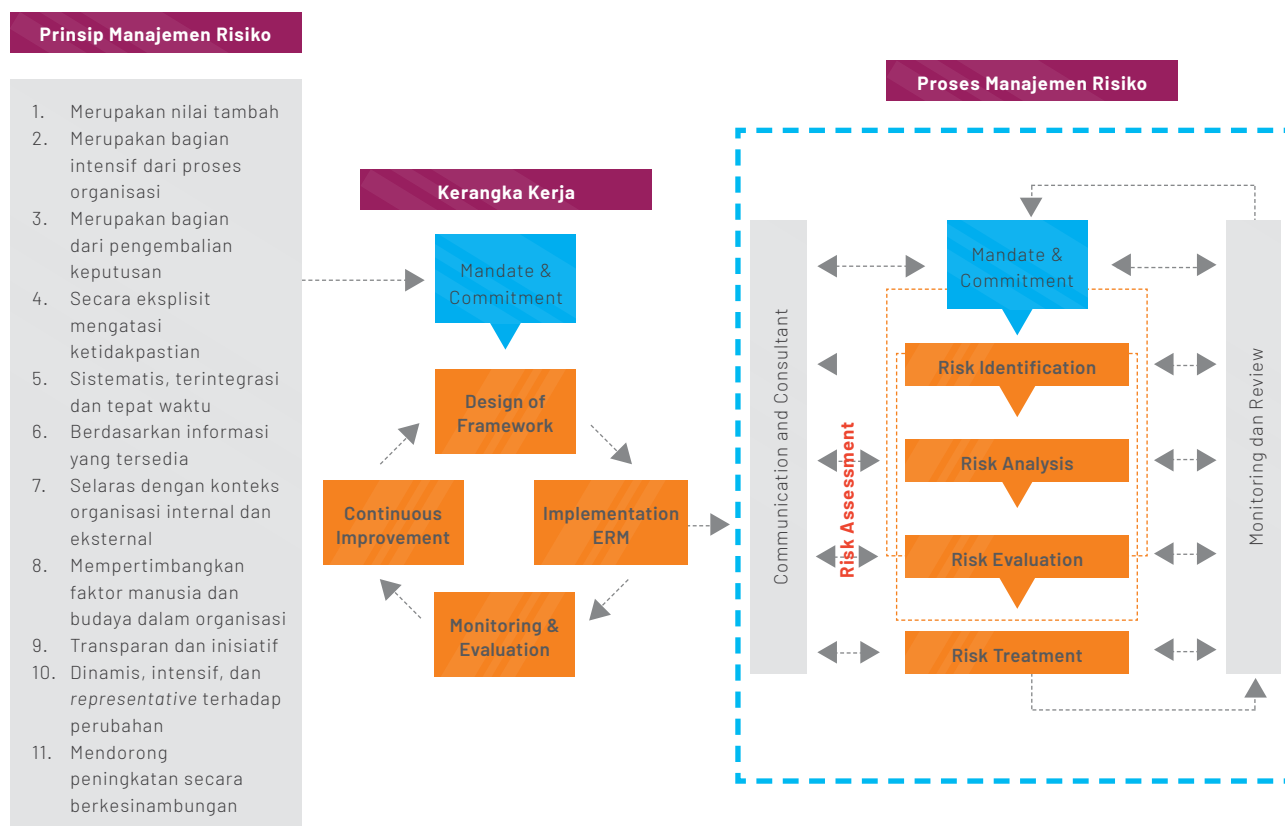
- Review Pedoman ERM dilakukan secara berkala minimal 2 tahun sekali.
- Evaluasi Risiko utama korporat dilakukan secara berkala minimal 12 bulan sekali.

• Perbaikan Berkesinambungan

- ERM harus terus menerus disempurnakan sesuai hasil evaluasi dan rekomendasi dari pemangku kepentingan.
- ERM harus melekat pada budaya manajemen perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan dan perbaikan yang berkesinambungan. Pengelolaan risiko meliputi lima kegiatan utama: komunikasi dan konsultasi, menetapkan konteks, *risk assessment*, *risk treatment* serta *monitoring* dan evaluasi.

Proses manajemen risiko

Hubungan antara Prinsip Manajemen Risiko, Kerangka Kerja serta Proses Manajemen Risiko WIKA adalah sebagai berikut.



EVALUASI PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

- Hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di tahun 2018 menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko di WIKA bersifat managed, dimana risiko-risiko di WIKA terukur, terkelola, berlaku di seluruh perusahaan
- Pengukuran- implementasi manajemen risiko melalui mekanisme self assessment. WIKA terus berupaya melakukan improvement serta meningkatkan konsistensi implementasi manajemen risiko di seluruh proses bisnis dalam rangka pencapaian sasaran yang ekselen.
- Selama tahun 2018 telah teridentifikasi Risiko Strategis maupun Risiko Operasional dan telah dilakukan pelaksanaan mitigasi risiko tersebut

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

KESESUAIAN PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA COSO

Sistem pengendalian intern WKA telah sesuai dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) dan tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi operasional, pelaporan dan kepatuhan.

Tujuan operasional berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi. Tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator maupun Perseroan. Sedangkan tujuan kepatuhan berkaitan dengan kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut COSO, unsur-unsur pengendalian intern meliputi komponen-komponen sebagai berikut.

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Aktivitas pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Kegiatan pemantauan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI dilakukan juga pengujian berjalannya pengendalian intern (*internal control*) atas cakupan Audit yang terdiri dari Operasional, Akuntansi/Keuangan dan Kepatuhan di samping dilakukannya Audit yang bersinerji dengan fungsi lainnya dalam operasional perusahaan yakni Manajemen Mutu, *Safety, Health and Environment* (SHE), Risiko dan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) yang mengacu pada kerangka COSO.

Sistem Pengendalian Intern Perusahaan merupakan suatu proses pengendalian yang dilaksanakan secara terus menerus oleh Direksi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Perusahaan.

TUJUAN PENGENDALIAN

Sistem Pengendalian Internal perusahaan mempunyai tujuan:

1. Tujuan Kepatuhan yaitu menjamin bahwa semua kegiatan usaha perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan oleh perusahaan.
2. Tujuan Informasi yaitu menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tujuan Operasional yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi perusahaan dari risiko kerugian.

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian merupakan faktor yang mempengaruhi keseluruhan perusahaan terutama berkaitan dengan etika bisnis dan GCG dan menjadi atmosfir bagi setiap individu di perusahaan dalam melakukan aktivitas dan melaksanakan tanggung jawab pengendalian yang menjadi tugas pokoknya. Lingkungan pengendalian dibangun sebagai fondasi yang efektif untuk mendukung berjalannya komponen pengendalian internal lainnya, sehingga lingkungan pengendalian di perusahaan wajib memenuhi aspek berikut:

1. Penegakkan integritas dan nilai etika di implementasi dengan cara:
 - a. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku sebagaimana dituangkan dalam budaya perusahaan, terdapat aturan perilaku yang berisi standar etika dan pedoman perilaku bagi pegawai di lingkungan perusahaan.
 - b. Memberikan keteladanan yang nyata dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan di perusahaan dalam bentuk tindakan dan ucapan.
 - c. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat jika terdapat penyimpangan atas kebijakan dan prosedur, atau terjadinya pelanggaran terhadap aturan perilaku yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
 - d. Manajemen dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi

- atau pengabaian pengendalian intern dengan memberikan penjelasan yang memadai.
- e. Menghilangkan peluang/godaan untuk berperilaku tidak etis.
2. Komitmen terhadap kompetensi diwujudkan dengan:
 - a. Mengidentifikasi dan mendefinisikan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di lingkungan perusahaan.
 - b. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di lingkungan perusahaan.
 - c. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya.
 - d. Memilih pejabat yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang dapat dijabarkan secara akurat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menunjang aktivitas perusahaan.
 3. Kepemimpinan kondusif yang ditunjukkan oleh Direksi dengan:
 - a. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan untuk dimitigasi sebelum keputusan diambil oleh Direksi secara kolektif.
 - b. Menerapkan manajemen berbasis kinerja.
 - c. Mendorong setiap unit kerja menerapkan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan.
 - d. Melindungi aset dan informasi dari akses atau penggunaan oleh pihak yang tidak sah.
 - e. Melakukan interaksi yang intensif dengan pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional.
 - f. Menunjukkan sikap yang adil dan tidak memihak dalam memberi penugasan kepada pejabat struktural dan/atau fungsional.
 4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dilakukan dengan aktivitas:
 - a. Menyesuaikan dengan *core* bisnis dan sifat kegiatan perusahaan.
 - b. Memberikan penjelasan kepada pegawai terkait dengan uraian pekerjaan (*job description*) yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Memberikan kejelasan hubungan jenjang pelaporan internal dalam lingkungan perusahaan.
 - d. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian serta perbaikan terhadap struktur organisasi bilamana terjadi perubahan lingkungan strategis.
 - e. Menetapkan jumlah dan komposisi jabatan pegawai yang disesuaikan dengan formasi manajerial dan non manajerial.
 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat dengan memperhatikan aspek:
 - a. Wewenang diberikan kepada pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya melalui *job description* yang selaras dengan ketentuan otorisasi perusahaan.
 - b. Pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana harus memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan mempunyai keterkaitan dengan unit kerja lain di lingkungan perusahaan, sehingga perlu adanya koordinasi yang intens dan efektif.
 - c. Pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana harus memahami bahwa pelaksanaan tanggung jawab dan wewenangnya sepenuhnya berkaitan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern.
 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Human Capital dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Penetapan prosedur dari tahap rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai.
 - b. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen.
 - c. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
 7. Perwujudan dari peran Satuan Pengawasan Intern yang efektif dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan evaluasi dan penilaian atas ketaatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan.
 - b. Memberikan penilaian yang objektif atas kecukupan internal control atas penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan.
 - c. Memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan.

PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan analisa terhadap risiko-risiko yang berpotensi dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Penilaian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko perusahaan yang menjadi prioritas untuk ditangani secara tepat, agar tingkatan risiko perusahaan dapat berkurang sampai pada batasan nilai risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan. Manajemen dalam menjalankan tugas dan fungsinya, wajib melakukan penilaian risiko dan sebelum melakukan penilaian risiko terlebih dahulu harus ditetapkan tujuan aktivitas kegiatan sampai pada tingkatan operasional. Penetapan tujuan perusahaan memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terkait waktu serta dikomunikasikan ke seluruh pegawai. Dalam mencapai tujuan perusahaan maka Manajemen menetapkan strategi dan menerapkannya secara konsisten.

Penilaian risiko pada tingkat Perusahaan dilakukan dengan:

1. Penetapan tujuan perusahaan
Penetapan sasaran dan target bisnis harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan risiko-risiko potensial yang mempengaruhi secara negatif terhadap upaya pencapaian sasaran/target. Manajemen akan selalu menetapkan target bisnis dalam koridor toleransi risiko yang masih dapat ditanggung oleh perusahaan.
2. Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan operasional
Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan berdasarkan pada tujuan dan kaitannya dengan rencana strategis perusahaan, dengan tujuan pada tingkatan kegiatan operasional saling melengkapi, saling menunjang dan tidak bertentangan satu dengan lainnya yang diarahkan pada relevansi dengan seluruh kegiatan utama perusahaan.
3. Identifikasi risiko
Identifikasi risiko dilakukan dengan cara mengidentifikasi setiap peristiwa risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan yang bersumber dari faktor internal dan eksternal perusahaan, maupun faktor lainnya yakni:
 - a. Faktor internal meliputi antara lain infrastruktur, kebijakan/ketentuan

perusahaan, sumber daya manusia, proses bisnis, keuangan, investasi dan teknologi informasi yang dapat diaplikasikan.

- b. Faktor eksternal meliputi antara lain lingkungan alam, ekonomi, sosial, politik dan perkembangan teknologi informasi.
 - c. Faktor lainnya, seperti kegagalan pencapaian misi, tujuan dan sasaran masa lalu dan program yang kompleks dan penting.
4. Analisis Risiko
Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan tingkat kemungkinan terjadinya (*likelihood*) risiko dan tingkat dampak risiko dari hasil identifikasi risiko sebagai acuan untuk mengelolanya dengan pengukuran risiko berdasarkan pendekatan risiko inheren dan risiko residual. Tujuan analisis risiko adalah untuk memperoleh risiko potensial yang perlu memperoleh prioritas pengendalian risiko karena dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan dan menyediakan data untuk membantu dalam melakukan evaluasi dan menetapkan strategi respon berupa mitigasi risiko/*action plan*.

AKTIVITAS PENGENDALIAN

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan bahwa arahan Direksi dilaksanakan oleh semua Unit Kerja terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat perusahaan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan pengendalian dilakukan pada seluruh kegiatan perusahaan.
2. Kegiatan pengendalian dikaitkan dengan proses penilaian risiko untuk memitigasi tingkatan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko.
3. Kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis melalui surat keputusan Direksi.
4. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh Manajemen.

Kegiatan pengendalian dilakukan melalui:

1. Reviu atas kinerja perusahaan.
Reviu atas kinerja keuangan dan non keuangan perusahaan dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan sebelumnya, antara lain

berupa target, anggaran hasil pencapaian kinerja periode tahun sebelumnya dan pencapaian target perusahaan lain dalam industri yang sejenis.

2. Pembinaan sumber daya manusia di perusahaan dilaksanakan melalui:
 - a. Komunikasi yang jelas dan konsisten kepada seluruh pegawai mulai dari Pimpinan Unit Kerja sampai dengan pegawai tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana kerja Anggaran Perusahaan beserta realisasi pencapaian targetnya.
 - b. Penyusunan strategi pembinaan Human Capital yang dituangkan dalam rencana pembinaan yang meliputi: kebijakan, program dan kegiatan yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Penyusunan uraian tugas yang jelas antara lain memuat lingkup jabatan, tanggung jawab utama, wewenang dan spesifikasi jabatan berupa pendidikan dan kompetensi.
 - d. Pembangunan budaya kerja untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan.
 - e. Penyusunan prosedur rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai.
 - f. Penyusunan program pengembangan karir dan kompetensi pegawai.
 - g. Penyusunan program kesejahteraan pegawai.
 - h. Penyusunan pedoman evaluasi kinerja pegawai yang bertujuan untuk membantu pegawai memahami keterkaitan kinerjanya dengan pencapaian tujuan perusahaan.
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi pada perusahaan dilakukan untuk memastikan akurasi, ketersediaan, ketepatan waktu (*up to date*) dan kelengkapan informasi yang meliputi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

PENGENDALIAN OPERASIONAL DAN KEUANGAN

Pengendalian Operasional dan Keuangan meliputi:

1. Pengendalian fisik aset.

Pengendalian fisik aset di lingkungan perusahaan diarahkan untuk mengamankan dan melindungi aset-aset berisiko.
2. Pemisahan fungsi.

Pemisahan fungsi diarahkan untuk mengurangi kesalahan, kecurangan dan pemborosan.

Pemisahan fungsi di lingkungan Perseroan dilakukan dengan memastikan bahwa:

- a. Tidak seorangpun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama kejadian dan transaksi dari awal sampai akhir proses.
 - b. Pemisahan tanggung jawab dan tugas atas kejadian dan transaksi kepada pegawai yang berbeda berkaitan dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, review dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset.
3. Pelaksanaan kejadian dan transaksi

Pelaksanaan kejadian dan transaksi harus diotorisasi dan dilaksanakan oleh pegawai yang berwenang. Untuk melaksanakan kejadian dan transaksi yang sesuai, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 - a. Pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa hanya kejadian dan transaksi yang valid dilaksanakan, sesuai dengan keputusan Direksi dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Pengendalian dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh kejadian dan transaksi yang dilaksanakan telah diotorisasi serta dilakukan oleh pegawai yang bertindak sesuai kapasitas dan tanggung jawabnya.
 - c. Kondisi dan syarat otorisasi secara jelas dikomunikasikan kepada Pimpinan Unit Kerja dan pegawai.
 4. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian dan transaksi.

Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian dan transaksi wajib dilakukan di lingkungan perusahaan untuk menjamin tersedianya informasi yang relevan dan terpercaya untuk pengambilan keputusan dan menjamin pencatatan yang akurat tepat waktu.
 5. Pembatasan akses dan akuntabilitas atas sumber daya dan pencatatannya.
 6. Dokumentasi yang baik atas kejadian dan transaksi pengendalian.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Direksi wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi baik keuangan maupun non keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam

waktu dan bentuk format yang telah ditetapkan, untuk memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawabannya. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif baik komunikasi di lingkungan perusahaan maupun komunikasi dengan pihak luar yang terkait.

AKTIVITAS PEMANTAUAN

Pemantauan adalah proses menilai kualitas sistem pengendalian internal Perseroan untuk jangka waktu tertentu. Pemantauan dilaksanakan melalui:

1. Pemantauan rutin terhadap kegiatan yang sedang berjalan (*on going monitoring*), diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi dan tindakan-tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
2. Evaluasi oleh unit terpisah/independen (*separate evaluation*) diselenggarakan melalui penilaian mandiri, revidi, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan.

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Manajemen bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang andal dan efektif serta memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap jenjang organisasi. Satuan Pengawas Intern melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengawasan Intern secara menyeluruh dan pengawasan yang dilakukan untuk mendukung asersi Direksi tentang efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perseroan yang diterapkan.

Hasil evaluasi disampaikan kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan Sistem Pengendalian Intern berjalan secara efektif. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2018, menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada WIKI telah memadai.



PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK

Pemberian dana kegiatan sosial Perseroan dapat dilihat pada Bab *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada laporan tahunan ini. Selain itu, Perseroan tidak memberikan dana kegiatan terkait dengan kegiatan politik.



Pabrik WIKI Beton

PERKARA PENTING

Sepanjang tahun 2018, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel Permasalahan Hukum

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH		
	PERDATA	PIDANA	HUBUNGAN INDUSTRIAL
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	3	-	-
Dalam proses penyelesaian	12	-	-

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Tabel Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan

NO	POKOK PERKARA DAN PERKEMBANGAN TERAKHIR	STATUS PENYELESAIAN	PENGARUH TERHADAP KONDISI PERUSAHAAN	SANKSI ADMINISTRATIF	NILAI PERKARA
1.	Permohonan Arbitrase Perseroan terhadap PT PLN atas pengenaan Bea Masuk pada pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sulut 2 melalui BANI dengan Perkara Nomor: 41085/X/ARB-BANI/2018	Sedang dalam tahap pemeriksaan di BANI	Tidak berpengaruh pada kondisi Perseroan	Tidak ada	Rp21.545.754.611
2.	Permohonan Arbitrase Perseroan kepada BANI atas Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Proyek Pelabuhan Terminal Peti Kemas Belawan Fase 2 yang dikerjakan oleh Marine-Andema-Tidalmarine KSO dengan Perkara Nomor: 41028/III/ARB-BANI/2018	Saat ini sedang dalam tahap pendaftaran putusan BANI	Tidak berpengaruh pada kondisi Perseroan	Tidak ada	Rp29.001.717.298

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRASI DARI OJK

Selama tahun 2018, Perseroan senantiasa patuh pada peraturan yang berlaku sehingga tidak mendapatkan sanksi dari OJK.

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT SERTA ENTITAS ANAK

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Direksi Dan Dewan Komisaris yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2018, tidak ada permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Permasalahan Hukum Entitas Anak

Sepanjang tahun 2018, kasus hukum yang dihadapi oleh Entitas Anak Perseroan yaitu:

PT Wijaya Karya Beton Tbk.

POKOK PERKARA/GUGATAN	JENIS GUGATAN (PERDATA/PIDANA)	STATUS PENYELESAIAN	PENGARUHNYA TERHADAP KONDISI PERUSAHAAN
Gugatan Pengakuan atas Kepemilikan Lahan Perseroan di PBB Majalengka	Perdata	Selesai dengan isi putusan Hakim yang tidak menerima Gugatan dari Pihak Penggugat	Tidak Ada
Pelaporan Perseroan atas Dugaan Penipuan dan/atau Penggelapan PT Agrawisesa atas lahan PBB Subang	Pidana	Peninjauan berkas perkara oleh Kejaksaan (P19)	Tidak Ada

PT Wijaya Karya Realty Tbk.

POKOK PERKARA/GUGATAN	JENIS GUGATAN (PERDATA/PIDANA)	STATUS PENYELESAIAN	PENGARUHNYA TERHADAP KONDISI PERUSAHAAN
Kepemilikan Tanah seluas 7.000 m ²	Perdata	Dalam proses penyelesaian	Kehilangan Sebagian Aset atas Tanah yang di Klaim Penggugat seluas 7.000 m ²

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN SERTA HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS

WIKA telah menyediakan informasi kepada *stakeholders* yang memungkinkan *stakeholders* menggunakan haknya. Penyebaran informasi Perseroan antara lain dilakukan melalui media sebagai berikut.

MEDIA ELEKTRONIK

Seiring dengan meningkatnya peran WIKA menjadi perusahaan kelas dunia, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*Information & Communication Technology/ICT*) yang andal sangatlah dibutuhkan untuk mendukung penyampaian informasi kepada publik baik internal maupun eksternal, selain sebagai pendukung kegiatan komunikasi WIKA ke seluruh dunia.

Perbaikan di segala bidang dengan basis Teknologi Informasi (TI) menjadi penting dalam beberapa tahun terakhir sebab akses *database* elektronik menjadi salah satu alternatif yang penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi. Karenanya penggunaan TI berbasis digital menjadi tuntutan mutlak dalam pengembangan media komunikasi WIKA saat ini dan di masa mendatang.

SIARAN PERS

Tabel Siaran Pers

NO	TANGGAL	SIARAN PERS
1	24 Januari 2018	WIKA Membukukan Transaksi Global IDR Bonds Terbesar
2	24 Januari 2018	WIKA Issued Indonesia's Largest Komodo Bonds
3	29 Januari 2018	WIKA Raih Kepercayaan Investor Global
4	5 Februari 2018	WIKA PELINDO III Sinergi Bangun Jalur Akses Menuju Terminal Teluk Lamong
5	12 Februari 2018	WIKA Targetkan Laba Bersih 2018 Rp1,96 Triliun
6	24 Februari 2018	WIKA Raih 2 Penghargaan Bergengsi dalam Bidang Corporate Social Responsibility (CSR)
7	28 Februari 2018	Rayakan HUT Ke-58, WIKA Mengajar Hadir di Hadapan 5.800 Siswa Seluruh Indonesia
8	07 Maret 2018	WIKA Dan PELINDO III Mulai Pengerjaan Flyover Terminal Teluk Lamong
9	13 Maret 2018	Laba WIKA Tembus Rp1,2T di Tahun 2017
10	13 Maret 2018	Pemerintah Afghanistan Tawarkan Peluang Kerja Sama Pembangunan Infrastruktur ke WIKA
11	16 Maret 2018	WIKA Bangun 1.400 Rumah di Aljazair
12	24 Mei 2018	Capai Laba Rp1,2 Triliun WIKA Bagikan Dividen Rp240,41 miliar
13	30 Juli 2018	Laba WIKA Semester I 2018 Melonjak Sekitar 40%
14	05 Agustus 2018	Kunjungi Kawasan Industri WIKA (KIW) Cileungsi, Menristekdikti Tinjau Persiapan dan Beri Dukungan Penuh Produksi Motor Nasional GESITS
15	10 Agustus 2018	Bangun Istana Kepresidenan Niger, WIKA Perkuat dan Perluas Pasar di Afrika Barat
16	23 Agustus 2018	WIKA Raih Kontrak Baru Rp23,45 Triliun
17	03 September 2018	Pinjaman CDB Temin ke-II Cair, WIKA Kebut Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung
18	10 September 2018	WIKA - HDCE - Koen Sepakati Proyek Investasi Pengembangan PLTA Peusangan-4
19	14 Oktober 2018	WIKA Raih Kesepakatan Rp15,68 Triliun di IMF 2018
20	18 Oktober 2018	Dalam Dua Minggu, Terminal Bandara Palu Sudah Bisa Difungsikan

NO	TANGGAL	SIARAN PERS
21	19 Oktober 2018	Banggakan Indonesia, WIKA Raih Penghargaan Year in Infrastructure 2018 Award di London
22	25 Oktober 2018	Gubernur Provinsi Skikda Dukung Perluasan Pasar WIKA di Aljazair
23	30 Oktober 2018	Laba Bersih WIKA Kuartal III-2018 Tumbuh 38,57% menjadi Rp1,06 Triliun
24	09 Desember 2018	WIKI Bangun Infrastruktur di 10 Negara

BULETIN

Dalam wujud media cetak, media komunikasi internal WIKA yakni WIKA MAGZ menjadi media komunikasi sekaligus *marketing tool* andalan guna meningkatkan reputasi maupun dalam meningkatkan penjualan perusahaan. Media ini didistribusikan ke seluruh *stakeholder* perusahaan juga dalam bentuk *soft copy* (digital). Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai WIKA, dapat menghubungi:

SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Website : www.wika.co.id
 Twitter : @PTWijayaKarya
 Facebook : PT Wijaya Karya
 Instagram : ptwijayakarya
 Youtube : WIJAYA KARYA TV
 E-mail : humas@wika.co.id

KODE ETIK

Perseroan memiliki kode etik perusahaan yang diatur dalam Buku Pedoman Etika dan Perilaku yang mengacu kepada peraturan dan berbagai ketentuan terkait, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Pedoman Umum GCG Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
4. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-05/MBU/2013 tentang *Road Map* menuju BUMN Bersih;
5. *Road Map* Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014;
6. *The Indonesia Corporate Governance Manual*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & *International Finance Corporation* (IFC), *First Edition*, 2014;
7. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya; dan SK No.16/S.MBU/2012 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola Perusahaan.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Pokok-pokok kode etik yang terdapat dalam Pedoman Etika dan Perilaku tersebut mengatur antara lain:

- **Kebijakan Perseroan Mengenai Etika dan Perilaku**
 - a. Integritas dalam Aktivitas Bisnis dan Pekerjaan.
 - b. Manajemen Risiko.
 - c. Sistem Pemasaran.
 - d. Sistem Pengadaan dan Kontran Pekerjaan.
 - e. Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai.
 - f. Pengelolaan Lingkungan.
 - g. Keterlibatan dalam Politik.
 - h. Pernyataan Palsu, Klaim Palsu dan Konspirasi.
 - i. Benturan Kepentingan.
 - j. Etika Usaha Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Kebijakan tentang Larangan Suap.
 - k. Kebijakan tentang Hadiah, Imbalan dan Sumbangan (Donasi) yang tidak dibenarkan.
 - l. Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi.
 - m. Keterbukaan Informasi.

- n. Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya.
- o. Perlindungan Aset Perseroan.

- **Etika dengan Pemangku Kepentingan**

- a. Hubungan dengan Pemegang Saham.
- b. Hubungan dengan Pemegang Obligasi.
- c. Hubungan dengan Kreditur.
- d. Hubungan dengan Investor dan Pemegang Saham (*Shareholders*).
- e. Hubungan dengan Pemberi Pekerjaan.
- f. Hubungan dengan Rekanan.
- g. Hubungan dengan Pengguna Akhir.
- h. Hubungan dengan Pegawai (Hubungan Industrial).
- i. Hubungan dengan Pejabat Negara.
- j. Hubungan dengan Masyarakat.

- **Mekanisme Pelaporan dan Penegakan Etika dan Perilaku**

- a. Pelaporan Pelanggaran.
- b. Mekanisme Penegakan Kepatuhan Kepatuhan Terhadap Kode Etik.

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

Kode etik adalah komitmen WKA untuk patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi di mana saja WKA melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya. Pengelolaan Perseroan selain harus mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kode etik berlaku bagi seluruh insan Perseroan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan. Seluruh insan Perseroan mempunyai kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perseroan. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi tertuang dalam bentuk tanda tangan setiap pegawai WKA pada Lembar Pernyataan Kepatuhan Standar Etika Perseroan dan Code of Corporate Governance. Seluruh pegawai telah menandatangani pernyataan sebagai Komitmen pelaksanaan Code of Conduct dan Code of Corporate Governance. Penerapan nilai etika ini menjadi bagian dari kepatuhan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

WKA mewajibkan organ Perseroan, pegawai, entitas anak dan afiliasi serta pemangku kepentingan lainnya untuk memahami dan mematuhi pedoman kode

etik, pedoman GCG, anggaran dasar perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai tugas dan kewajiban masing-masing pihak.

Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap program sosialisasi, implementasi koordinasi, serta evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan.

PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Upaya dalam penerapan dan penegakannya Perseroan melakukan sosialisasi, implementasi dan evaluasi terhadap kode Etik tertuang dalam kode Etik perseroan No.SK.01.01/A.DIR.0448/2009 tanggal 10 November 2009 pasal X, Perseroan membentuk Tim Kepatuhan GCG yang diketuai oleh Sekretaris

PENEGAKAN KODE ETIK

Upaya penegakan terhadap pelaksanaan Kode Etik diatur di dalam Standar Operating Procedure (SOP) *Whistle Blowing System* No.WIKA-LDS-PM-01.02 tanggal 31 Januari 2019, yang memuat mekanisme pelaporan pelanggaran terhadap Kode Etik.

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Tabel Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

TINGKAT SANKSI	JENIS SANKSI
Ringan	Teguran Tertulis
Sedang	Teguran Tertulis + Tidak dibayarkan insentif Jabatan maksimal 3 bulan
Berat	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK

Selama tahun 2018, tidak terdapat pelanggaran kode etik.

GRATIFIKASI

Gratifikasi merupakan pemberian/penerimaan uang/setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya dengan nilai berapapun, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang dilakukan oleh Personil WIKA terkait dengan wewenang/jabatannya di Perseroan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan di masa yang akan datang. Pengendalian gratifikasi di WIKA telah diatur dalam No. Dok: WIKA-LDS-PM-01.01 tentang Prosedur Pengendalian Gratifikasi tanggal 31 Januari 2019.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Batasan Pemberian yang Diperbolehkan

1. Pemberian hadiah/cinderamata dan/atau jamuan makan dan/atau hiburan diperbolehkan sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas-batas kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara (seperti antar teman dan antar tetangga), saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan dengan maksud memberikan sesuatu hal kepada Perseroan yang tidak menjadi hak Perseroan secara hukum serta frekuensi pemberian tersebut tidak boleh terlalu sering karena dapat menimbulkan dugaan dari seseorang bahwa ada sesuatu di balik pemberian tersebut.
2. Pemberian hadiah/cinderamata berupa barang yang dimaksudkan untuk promosi Perseroan wajib menggunakan logo Perseroan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud (logo Perseroan pada barang dimaksud tidak dapat dihilangkan).

3. Pemberian honorarium rapat kepada Pihak Ketiga, diperbolehkan sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada Perseroan atas undangan resmi dari Perseroan, sepanjang ketentuan mengenai honorarium tersebut tidak dilarang dalam kode etik atau peraturan internal instansi dari Pihak Ketiga tersebut.
4. Setiap pemberian yang dilakukan, dicatat dan form yang diisi oleh pegawai yang bersangkutan sebagai pihak pemberi dan diketahui oleh Atasan langsung dan Sekretaris Perusahaan.

Batasan Penerimaan yang Diperbolehkan

1. Menerima hadiah/cinderamata dan/atau jamuan makan dan/atau hiburan, dalam batas-batas yang wajar, dengan frekuensi penerimaan yang tidak terlalu sering sehingga patut diduga tidak bertujuan untuk menyuap.
2. Menerima hadiah/cinderamata yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi, dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi seluruhnya sebagai berikut:
 - a. Logo, nama perseroan/pihak yang memberikan benda-benda dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/promosi perseroan pemberi.
 - b. Bukan berupa pemberian yang melanggar kesusilaan dan hukum.
3. Menerima honorarium sebagai pembicara, narasumber yang diundang secara resmi oleh pihak ketiga diperbolehkan, sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan, sepanjang pemberian tersebut patut diduga tidak bermaksud untuk mempengaruhi pegawai yang bersangkutan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya dan tidak dilarang dalam kode etik atau peraturan internal Perseroan.
4. Menerima hiburan yang masih dalam batas kewajaran diperbolehkan jika:
 - a. Hiburan tidak dilakukan secara terus menerus.
 - b. Bila penolakan terhadap hiburan dimaksud dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan bisnis secara institusi antara Perseroan dengan Pihak Ketiga yang menawarkan hiburan.
5. Apabila terdapat penerimaan hadiah/cinderamata dan atau hiburan di luar batasan yang sudah diatur Perseroan, maka Personil WIKA wajib melaporkan hal tersebut melalui:
 - a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Untuk penerimaan yang merupakan barang yang cepat kedaluwarsa (misal: makanan dan minuman), maupun penerimaan yang merupakan barang yang tidak cepat kedaluwarsa (misal: uang, emas dan lainnya) wajib melaporkannya kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan. KPK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan penerimaan tersebut dapat menjadi milik penerima atau milik negara (jika penerimaan dalam bentuk uang dan menjadi milik negara maka uang tersebut ditransfer melalui rekening yang telah disediakan KPK).
 - b. Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System dilakukan apabila pelapor adalah Personil WIKA atau pihak-pihak lainnya (pelanggan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui gratifikasi di Perseroan yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai sistem pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing System.

Diagram Alur Urutan Kerja dan Tanggung Jawab Memberi Hadiah/Bingkisan/Cinderamata/Hiburan

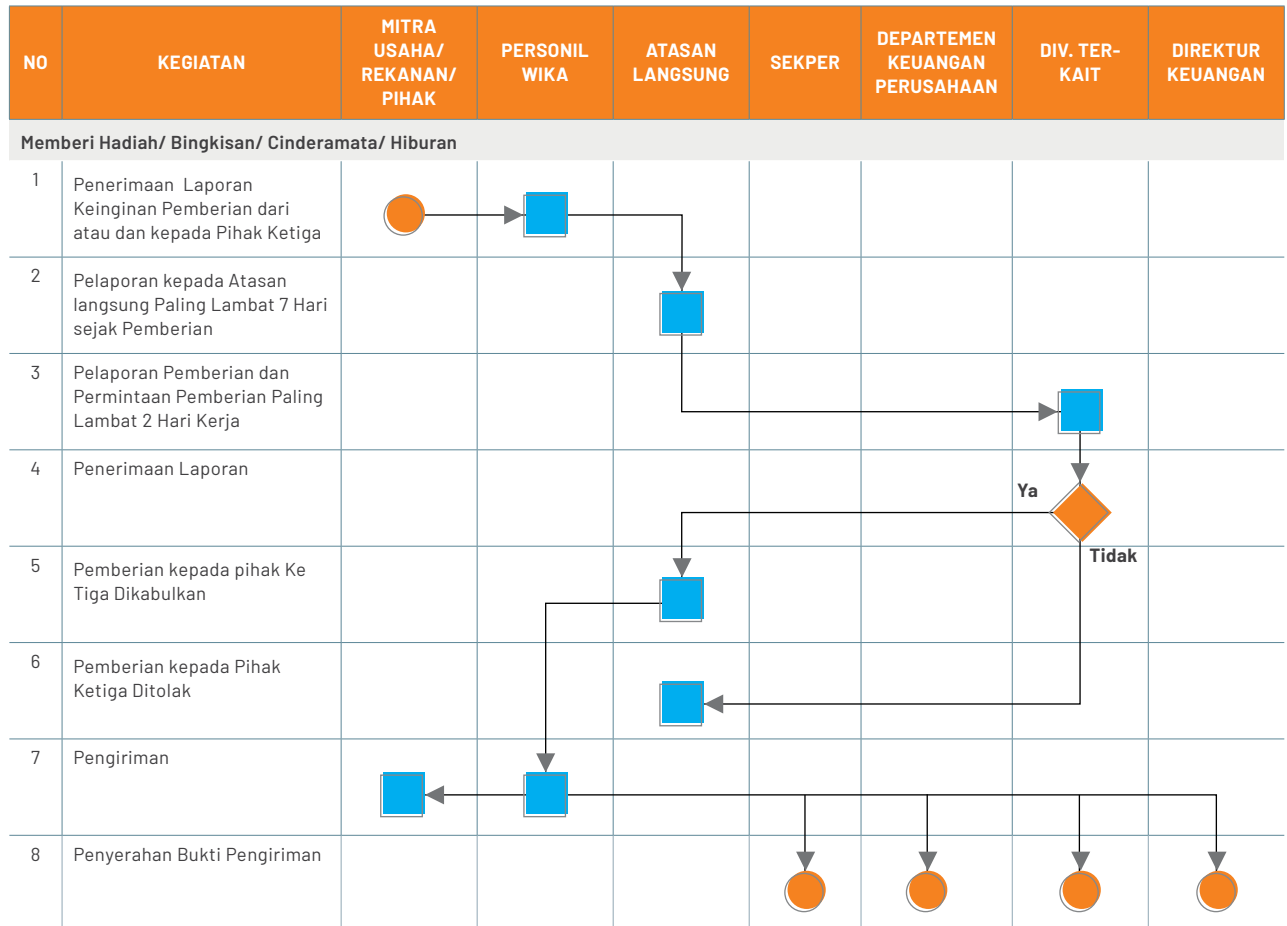
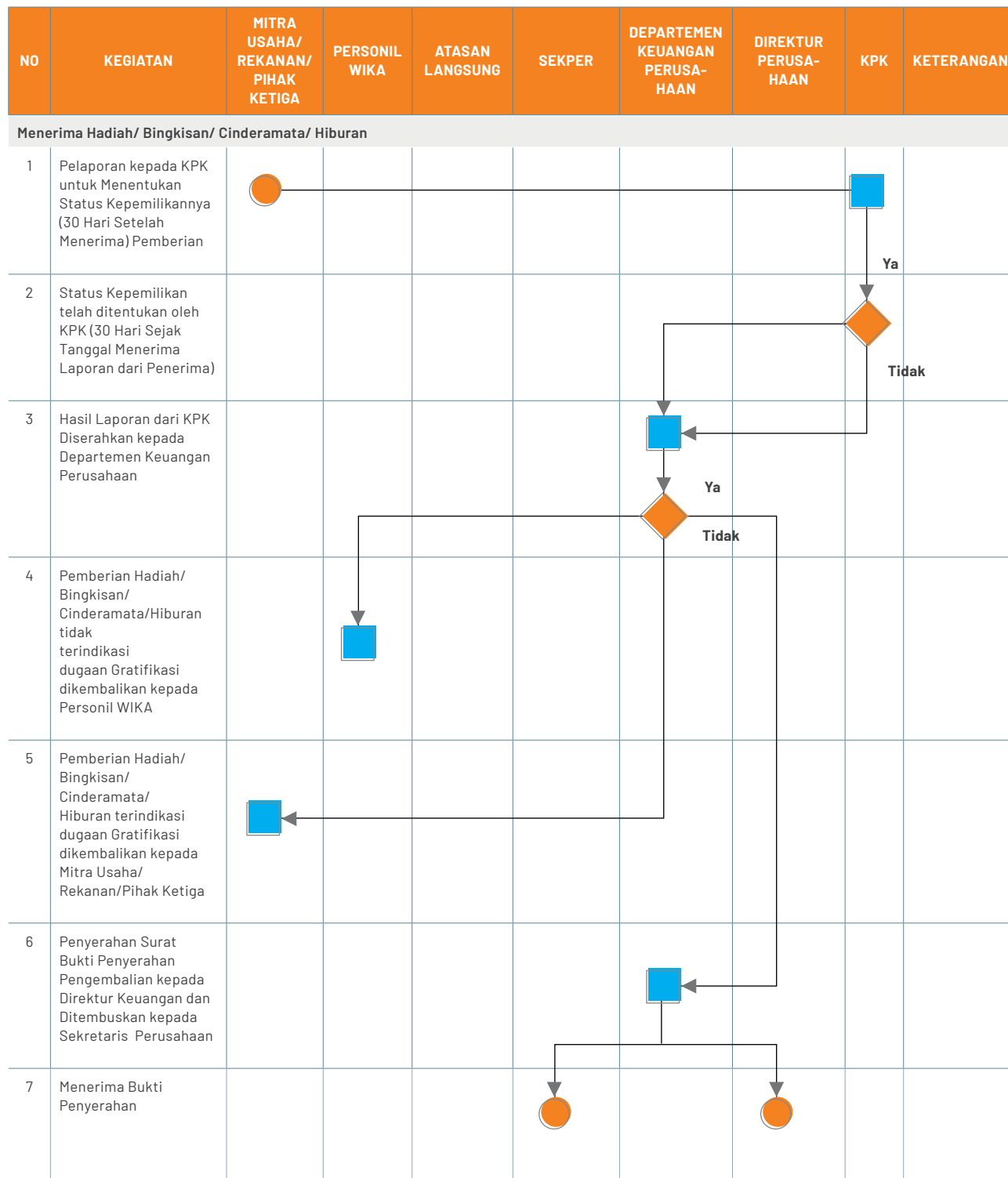


Diagram Alur Urutan Kerja dan Tanggung Jawab Menerima Hadiah/Bingkisan/Cinderamata/Hiburan



SOSIALISASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Selama tahun 2018, dalam rangka sosialisasi Gratifikasi terhadap seluruh pegawai Perseroan, Departemen Sekretariat Perusahaan yang memiliki fungsi *Good Corporate Governance* telah beberapa kali melakukan kegiatan sosialisasi tentang gratifikasi di antaranya, baik itu yang sifatnya rutin maupun yang sifatnya insidental; kegiatan tersebut di antaranya;

1. Sosialisasi Gratifikasi terhadap pegawai dan manajemen, baik di Induk maupun Anak Perusahaan. Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun.
2. Sosialisasi Gratifikasi untuk pegawai *On Job Training* (OJT) Perseroan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dalam setiap tahun dan diselenggarakan dalam setiap rekrutmen Perseroan.
3. Sosialisasi melalui media internal perusahaan.

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2018

Selama tahun 2018 tidak terdapat laporan atas gratifikasi.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Dalam rangka implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), WIKA telah berkomitmen untuk membangun Sistem pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) berfungsi sebagai sarana dalam pencegahan, pengungkapan pelanggaran atau tindak kecurangan dalam Perseroan dan telah dituangkan dalam Prosedur Pengaduan Pelanggaran *Code of Conduct* atau *Whistle Blowing* No WIKA-LDS-PM-01.02 tanggal 31 Januari 2019.

PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Penyampaian Laporan Pelanggaran dan Tindak Lanjutnya

Setiap insan WIKA dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* kepada Perseroan secara pribadi, melalui surat maupun e-mail. Tim Kepatuhan GCG akan menerima dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan tersebut namun ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan:

1. Secara umum, pada prinsipnya semua pelapor harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas. Dalam hal ini kerahasiaan identitas pelapor akan dilindungi.
2. Penggunaan surat yang tidak beridentitas (surat kaleng) akan diperlakukan sebatas sebagai informasi awal di mana tindak-lanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan Tim Kepatuhan GCG atas kebenaran substansi masalah yang dilaporkan.
3. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran terhadap *Code of Conduct* ini. Dalam hal ini pengungkapan hal tersebut dapat merupakan faktor yang meringankan. Apabila pelanggaran tersebut benar terjadi dan pihak pelapor tidak terlibat di dalamnya, maka kepada pihak pelapor akan diberikan penghargaan yang sesuai.
4. Tim Kepatuhan GCG akan berpegang pada azas praduga tak bersalah.
5. Sarana Pengaduan tersebut tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan keluhan pribadi yang tidak terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap *Code of Conduct*.

Media Pelaporan

Pelaporan Pelanggaran dapat dikirimkan melalui E-mail: TimKepatuhanGCG@WIKA.co.id. Setiap pelaporan pelanggaran yang masuk akan ditindaklanjuti.

Perlindungan Bagi Whistleblower

Setiap pelapor berhak mendapat perlindungan dengan sejumlah ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan WBS WIKA, mencakup:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite yang ada serta Pegawai dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* kepada Perseroan secara pribadi, melalui surat, maupun e-mail.
2. Semua pelapor harus mencantumkan identitasnya dengan jelas. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan diperlakukan sebatas informasi awal, sedangkan tindak lanjut atas pelaporan tersebut akan diputuskan oleh Tim Kepatuhan GCG. Identitas pelapor akan dirahasiakan, kecuali apabila timbul hal-hal sebagai berikut:
 - a. Identitas pelapor diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pemerintah;
 - b. Isi pelaporan sejalan dengan kepentingan Perseroan dan sejalan dengan tujuan *Code of Conduct* ini; dan
 - c. Identitas pelapor diperlukan untuk mempertahankan posisi Perseroan di depan hukum.
3. Pelapor berhak mendapat perlindungan, termasuk imunitas administrasi, dari Direksi dan jajaran manajemen Perseroan.
4. Setiap laporan pelanggaran dan/atau penyimpangan wajib bersifat tidak memihak suku, ras, agama, dan golongan tertentu. Laporan juga tidak diperkenankan bersifat fitnah, atau berisi keluhan pribadi, serta tidak terkait dengan *Code of Conduct* Perseroan.
5. Pelaporan tidak akan dikenakan hukuman apapun karena tindakan pelaporannya, kecuali apabila yang bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut atau laporan merupakan fitnah.
6. Tim Kepatuhan GCG bekerja dengan berpegang pada azas praduga tak bersalah.

Penanganan Pengaduan

Organisasi penanganan pelaporan pelanggaran terdiri atas empat elemen utama, yakni:

1. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3), bertugas untuk:
 - a. Menerima, mencatat (meregister) dan mengelompokkan laporan pelanggaran berdasarkan kategori terlapor.
 - b. Melaksanakan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk menjaga kerahasiaan pelapor dan terlapor (asas praduga tidak bersalah).
 - c. Menjaga komunikasi teratur dengan Pelapor.
 - d. Melaporkan laporan perkembangan (*activity report*) setiap 6 bulan sekali kepada Dewan Komisaris.
2. Tim Investigasi, terdiri dari Tim Investigasi Internal, Tim Investigasi Eksternal, dan Tim Investigasi Anak Perusahaan. Tugasnya secara keseluruhan adalah melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan bahwa telah terjadi pelanggaran.
3. Dewan Komisaris, dengan tugas utama: Melakukan seleksi, konfirmasi (dari aspek kategori jenis pelanggaran, siapa yang melakukan dan kelengkapan dokumennya) dan verifikasi, serta memutuskan apakah laporan akan ditindaklanjuti atau diarsip untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.
4. Direksi, dengan tugas utama: Melakukan seleksi, konfirmasi (dari aspek kategori jenis pelanggaran, siapa yang melakukan dan kelengkapan dokumennya) dan verifikasi, serta memutuskan apakah laporan akan ditindaklanjuti atau diarsip untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Pihak-pihak yang mengelola pengaduan antara lain:

1. Tim Kepatuhan GCG
Tim Kepatuhan GCG adalah tim yang dibentuk oleh Perseroan untuk menerima dan

menindaklanjuti laporan tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan *Code of conduct*. Tim Kepatuhan GCG bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan. Identitas dari anggota Tim Kepatuhan GCG bersifat rahasia, dan setiap anggotanya akan diberikan perlindungan terhadap pembalasan, tekanan, ancaman fisik dan/atau psikologis, administrasi, maupun penuntutan hukum.

2. Tim Pencari Fakta
Tim Pencari Fakta dibentuk dan direkomendasikan oleh Tim Kepatuhan GCG. Fungsi tim pencari fakta adalah untuk mencari serta menyelidiki indikasi penyelewengan terhadap pelaksanaan kepatuhan *Code of conduct*. Keberadaan Tim Pencari Fakta bersifat *Ad Hoc*.
3. Majelis Kehormatan Pegawai
Majelis Kehormatan Pegawai terdiri dari pejabat dan/atau pegawai Perseroan yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang dilaporkan/diduga melanggar peraturan/*Code of Conduct*.

Sosialisasi Whistleblowing system

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai *Whistleblowing System* di seluruh tingkatan dalam organisasi, Perseroan secara konsisten mengadakan sosialisasi *Whistleblowing System* dengan berbagai cara. Salah satu yang dilakukan Perseroan adalah dengan melakukan penyebaran buku *Code of Conduct* dan *Code of Corporate Governance* melalui surat elektronik kepada seluruh pegawai Perseroan. Bagi Calon Pegawai Perseroan, Perseroan melakukan presentasi *in class* agar calon pegawai *On Job Training* (OJT) dapat memahami tindakan apa saja yang melanggar terhadap ketentuan *Code of Conduct*.

Selama tahun 2018 Biro Corporate Relations telah melakukan 4 (empat) kali sosialisasi terhadap calon pegawai Perseroan.

JUMLAH SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN DI TAHUN 2018

Selama tahun 2018 tidak terdapat laporan atas *Whistleblowing System*.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Sebagai suatu badan hukum yang dimiliki oleh negara (BUMN), kepemilikan saham mayoritas WIKA dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dari yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Sehingga tidak terdapat Pemegang Saham utama dan pengendali oleh individu.



Sebagai Pemegang Saham mayoritas, saat ini Pemerintah Republik Indonesia mempunyai komposisi kepemilikan saham sebesar 65,05% atau sejumlah 5.834.850.000 lembar saham, dari seluruh jumlah saham tersebut terdapat satu lembar saham Seri A Dwiwarna. Secara lebih rinci Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali dilihat pada bagian Komposisi Pemegang Saham pada Laporan Tahunan ini.

Perlakuan yang Sama Terhadap Seluruh Pemegang Saham

Dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh investor atau Pemegang Saham (transparansi informasi), WIKA memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham, baik Pemegang Saham Mayoritas maupun Minoritas. Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat informasi pihak dalam (*inside information*) yang hanya diketahui oleh Pemegang Saham Mayoritas. Seluruh Pemegang Saham memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi terkait WIKA.

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk menciptakan Pemerintahan yang bersih WIKA mewajibkan pejabat struktural sampai dengan dua tingkat di bawah Direksi untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

DASAR HUKUM

Dasar hukum penyampaian LHKPN terdiri dari:

1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
2. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. PER. KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan PN
4. SE. Pim. KPK Nomor 08/01/10/2016 tentang Pendukung Teknis Penyampaian LHKPN pada masa Peralihan

WAJIB LAPOR LHKPN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK 01.09/A.DIR.16224/2017 tentang Pejabat yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pejabat struktural di WIKA yang wajib menyampaikan LHKPN adalah:

1. Pejabat struktural sampai dengan dua tingkat di bawah Direksi;
2. Direksi Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi dan Badan Hukum yang ditunjuk Perusahaan;
3. Pejabat yang dipandang memegang fungsi strategis.

MEKANISME PELAPORAN LHKPN

Mekanisme pelaporan harta kekayaan pejabat Perseroan dilakukan dengan mengacu pada UU nomor 28 tahun 1999 di mana penyelenggara berkewajiban untuk:

1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
2. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

PENCEGAHAN TRANSAKSI ORANG DALAM

Kebijakan guna mencegah terjadinya *insider trading* terdapat pada *Code of Conduct* yang di dalamnya mengatur pula terkait dengan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku. Perseroan berkomitmen mewujudkan pertumbuhan kegiatan operasi yang berkelanjutan berdasarkan standar bisnis yang ada sehingga Perseroan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi *Shareholders*.

Terkait implementasi kebijakan Perseroan dalam upaya pencegahan terjadinya *insider trading*, Perseroan pernah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE.01.01/A.SEKPER.6144/2013 Perihal "Larangan Transaksi Orang Dalam pada Masa Pembelian Kembali Saham WIKA", yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

"Sehubungan dengan pelaksanaan *buyback* saham Perseroan dan berdasarkan pasal 95 sampai dengan pasal 97 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan pasal 8 dan pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/SE0JK.04/2013 tanggal 27 Agustus 2013, Perseroan menetapkan peraturan sebagai berikut:

1. Bahwa setiap pihak yang merupakan:
 - a. Komisaris, Direktur, Pegawai, dan Pemegang Saham Utama WIKA;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan WIKA memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dilarang melakukan transaksi atas saham WIKA (dalam jangka waktu pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perusahaan melalui Bursa Efek).
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk 3 (tiga) bulan sejak tanggal 3 September 2013;
3. Bahwa terdapat sanksi hukum berdasarkan peraturan di bidang Pasar Modal bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tersebut di atas."

BUYBACK SAHAM DAN BUYBACK OBLIGASI

Perseroan melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.02/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan dan Surat Edaran OJK No.01/SE0JK.04/2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp120.000.000.000 (Seratus Dua Puluh Miliar Rupiah) atau paling banyak 20% dari modal disetor dalam Perseroan. Pelaksanaan Transaksi pembelian saham tersebut dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia.

Sampai dengan tahun buku 2018 Perseroan telah melakukan *buyback* saham dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	VOLUME	TOTAL NILAI
5 September 2013	2.500.000	4.251.909.892
11 September 2013	1.000.000	1.748.373.750
TOTAL	3.500.000	6.000.283.642



KESESUAIAN PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE SESUAI ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

NO	PRINSIP DAN REKOMENDASI	KETERANGAN PENYAJIAN (HALAMAN)
A	RIGHT OF SHAREHOLDER.	
A.1	BASIC SHAREHOLDER RIGHT.	
	Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? In case the company has offered Scrip dividend, did the company paid the dividend within 60 days)	209
A.2	RIGHT TO PARTICIPATE IN DECISIONS CONCERNING FUNDAMENTAL CORPORATE CHANGES	
A.2.1	Amendments to the company's constitution?	252-253
A.2.2	The authorization of additional shares?	252
A.2.3	The transfer of all or substantially all assets, which in effect results in the sale of the company?	252
A.3	RIGHTS TO PARTICIPATE EFFECTIVELY IN AND VOTE IN GENERAL SHAREHOLDER MEETINGS AND SHOULD BE INFORMED OF THE RULES, INCLUDING VOTING PROCEDURES, THAT GOVERN GENERAL SHAREHOLDER MEETINGS.	
A.3.1	Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increase in remuneration for the non-executive directors/commissioners?	226
A.3.2	Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/commissioners?	256-257
A.3.4	Does the company disclose the voting procedures used before the start of meeting?	253
A.3.5	Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded?	253-254
A.3.6	Does the Company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM?	253-254
A.3.7	Does the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM?	253-255
A.3.8	Does the company disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attended the most recent AGM?	253-255
A.3.9	Does the company allow for voting in absentia?	231
A.3.10	Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM?	231
A.3.11	Does the company disclose that is has appointed an independent party (scrutineers/inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM?	231
A.3.12	Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM/EGM for all resolutions?	253
A.3.13	Do companies provide at least 21 days notice for all AGMs and EGMs?	253
A.3.14	Does the company provide the rationale and explanation for each agenda item which require shareholder's approval in the notice of AGM/circular and/or the accompanying statement?	251-252
A.3.15	Does the company give the opportunity for shareholders to place item/s on the agenda of AGM?	251-252
A.4	MARKETS FOR CORPORATE CONTROL SHOULD BE ALLOWED TO FUNCTION IN AN EFFICIENT AND TRANSPARENT MANNER.	
A.4.1	In cases of merger, acquisitions and/or takeovers requiring shareholders' approval, does the board of directors/commissioners of the company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price?	252
A.5	THE EXERCISE OF OWNERSHIP RIGHTS BY ALL SHAREHOLDERS, INCLUDING INSTITUTIONAL INVESTORS, SHOULD BE FACILITATED.	
A.5.1	Does the company disclose its practice to encourage shareholders to engage the company beyond AGM?	252

NO	PRINSIP DAN REKOMENDASI	KETERANGAN PENYAJIAN (HALAMAN)
B	EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS	
B.1	SHARES AND VOTING RIGHTS	
B.1.1	Do the company's ordinary or common shares have one vote for one share?	251-252
B.1.2	Where the company has more than one class of shares, does the company publicise	253
B.2	NOTICE OF AGM	
B.2.1	Does each resolution in the most recent AGM deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?	253
B.2.2	Are the company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version?	251-253
B.2.3	Are the profiles of directors/commissioners (at least age, academic qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/re-election included?	78-97
B.2.4	Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?	255
B.2.5	Were the proxy documents made easily available?	253
B.3	INSIDER TRADING AND ABUSIVE SELF-DEALING SHOULD BE PROHIBITED.	
B.3.1	Does the company have policies and/or rules prohibiting directors/commissioners and employees to benefit from knowledge which is not generally available to the market?	367
B.3.2	Are the directors / commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?	367
B.4	RELATED PARTY TRANSACTIONS BY DIRECTORS AND KEY EXECUTIVES	
B.4.1	Does the company have a policy requiring directors/commissioners to disclose their interest in transactions and any other conflicts of interest?	269, 304
B.4.2	Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/commissioners to review material/significant RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders?	270-271
B.4.3	Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?	269, 304
B.4.4	Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?	210
B.5	PROTECTING MINORITY SHAREHOLDERS FROM ABUSIVE ACTIONS	
B.5.1	Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?	210
B.5.2	In case of related party transactions requiring shareholders' approval, is the decision made by disinterested shareholders?	212-225
C	ROLE OF STAKEHOLDERS	
C.1	THE RIGHTS OF STAKEHOLDERS THAT ARE ESTABLISHED BY LAW OR THROUGH MUTUAL AGREEMENTS ARE TO BE RESPECTED. (DOES THE COMPANY DISCLOSE A POLICY AND PRACTICES THAT ADDRESS)	
C.1.1	The existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare?	252
C.1.2	Supplier/contractor selection procedures?	409-410
C.1.3	The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?	392-393
C.1.4	The company's efforts to interact with the communities in which they operate?	405-408

NO	PRINSIP DAN REKOMENDASI	KETERANGAN PENYAJIAN (HALAMAN)
C.1.5	The company's anti-corruption programmes and procedures?	360-365
C.1.6	How creditors' rights are safeguarded?	238
C.1.7	Does the company have a separate report/section that discusses its efforts on environment/economy and social issues?	Sustainability Report
C.2	WHERE STAKEHOLDER INTERESTS ARE PROTECTED BY LAW, STAKEHOLDERS SHOULD HAVE THE OPPORTUNITY TO OBTAIN EFFECTIVE REDRESS FOR VIOLATION OF THEIR RIGHTS.	
C.2.1	Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?	402-404
C.3	MECHANISMS FOR EMPLOYEE PARTICIPATION SHOULD BE PERMITTED TO DEVELOP.	
C.3.1	Does the company explicitly disclose the policies and practices on health, safety and welfare for its employees?	396-401
C.3.2	Does the company explicitly disclose the policies and practices on training and development programmes for its employees?	149-159
C.3.3	Does the company have a whistle blowing policy which includes procedures for complaints by employees and other stakeholders concerning alleged illegal and unethical behaviour and provide contact details via the company's website or annual report	366-367
C.4	STAKEHOLDERS INCLUDING INDIVIDUAL EMPLOYEE AND THEIR REPRESENTATIVE BODIES, SHOULD BE ABLE TO FREELY COMMUNICATE THEIR CONCERNS ABOUT ILLEGAL OR UNETHICAL PRACTICES TO THE BOARD AND THEIR RIGHTS SHOULD NOT BE COMPROMISED FOR DOING THIS.	
C.4.1	Does the company have procedures for complaints by employees and other stakeholders concerning illegal and unethical behaviour (i.e. corruption, violation of rights)?	359
C.4.2	Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals illegal/unethical behaviour from retaliation?	355
D	DISCLOSURE AND TRANSPARENCY	
D.1	TRANSPARENT OWNERSHIP STRUCTURE	
D.1.1	Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?	108-109
D.1.2	Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/or substantial shareholders?	108-109
D.1.3	Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)?	110, 277
D.1.4	Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?	110, 277
D.1.5	Does the company disclose details of the parent/holding company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/ (SPVs)?	111-121
D.2	QUALITY OF ANNUAL REPORT	
D.2.1	Corporate objectives	74-75
D.2.2	Financial performance indicators	12-20
D.2.3	Non-financial performance indicators	20-22
D.2.4	Dividend policy	209
D.2.5	Biographical details (at least age, qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of Directors/commissioners	78-97
D.2.6	Attendance details of each director/commissioner in all Directors/commissioners meetings held during the year	280-287, 306-313
D.2.7	Total remuneration of each member of the board of Directors/commissioners	315, 317

NO	PRINSIP DAN REKOMENDASI	KETERANGAN PENYAJIAN (HALAMAN)
CORPORATE GOVERNANCE CONFIRMATION STATEMENT		
D.2.8	Does the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non-compliance, identify and explain reasons for each such issue?	231-232
D.3 DISCLOSURE OF RELATED PARTY TRANSACTIONS (RPT)		
D.3.1	Does the company disclose its policy covering the review and approval of material/significant RPTs?	270-273
D.3.2	Does the company disclose the name, relationship, nature and value for each significant/material RPTs?	270-273
D.4 DIRECTORS AND COMMISSIONERS' DEALINGS IN SHARES OF THE COMPANY		
D.4.1	Does the company disclose trading in the company's shares by insiders?	269, 365
D.5 EXTERNAL AUDITOR AND AUDITOR REPORT		
D.5.1	Are the audit and non-audit fees disclosed?	122
D.5.2	Does the non-audit fee exceed the audit fees?	344
D.6 MEDIUM OF COMMUNICATIONS		
D.6.1	Quarterly reporting	402
D.6.2	Company website	54
D.6.3	Analyst's briefing	180-183
D.6.4	Media briefings /press conferences	145
D.7 TIMELY FILING/RELEASE OF ANNUAL/FINANCIAL REPORTS		
D.7.1	Are the audited annual financial report / statement released within 120 days from the financial year end?	Laporan Keuangan
D.7.2	Is the annual report released within 120 days from the financial year end?	Laporan Keuangan
D.7.3	Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company?	Laporan Keuangan
D.8 COMPANY WEBSITE (DOES THE COMPANY HAVE A WEBSITE DISCLOSING UP-TO-DATE INFORMATION ON THE FOLLOWING)		
D.8.1	Financial statements/reports (latest quarterly)	12-19
D.8.2	Materials provided in briefings to analysts and media	145
D.8.3	Downloadable annual report	145
D.8.4	Notice of AGM and/or EGM	253
D.8.5	Minutes of AGM and/or EGM	253-254
D.8.6	Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association)	60-64
D.9 INVESTOR RELATIONS		
D.9.1	Does the company disclose the contact details (e.g. telephone, fax, and email) of the officer/office responsible for investor relations?	54
E RESPONSIBILITIES OF THE BOARD		
E.1 BOARD DUTIES AND RESPONSIBILITIES (CLEARLY DEFINED BOARD RESPONSIBILITIES AND CORPORATE GOVERNANCE POLICY)		
E.1.1	Does the company disclose its corporate governance policy/board charter?	258, 289
E.1.2	Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners' approval disclosed?	289-293, 258-261
E.1.3	Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated?	289-293, 258-261

NO	PRINSIP DAN REKOMENDASI	KETERANGAN PENYAJIAN (HALAMAN)
Corporate Vision/Mission		
E.1.4	Does the company have an updated vision and mission statement?	74
E.1.5	Does the board directors play a leading role in the process of developing and reviewing the company's strategy at least annually?	74
E.1.6	Does the board of directors have a process to review, monitor and oversee the implementation of the corporate strategy?	74, 184
E.2 BOARD STRUCTURE		
Code of Ethics or Conduct		
E.2.1	Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	360-365
E.2.2	Are all the directors/commissioners, senior management and employees required to comply with the code/s?	360
E.2.3	Does the company have a process to implement and monitor compliance with the code/s of ethics or conduct?	360
Board Structure & Composition		
E.2.4	Do Independent directors/ commissioners make up at least 50% of the board of directors/ commissioners?	270
E.2.5	Does the company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years ¹ each for its independent directors/ commissioners? ¹ The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	301-302
E.2.6	Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/commissioner may hold simultaneously?	258-259
E.2.7	Does the company have any executive directors who serve more than two boards of listed companies outside of the group?	276-278
Nomination Committee (NC)		
E.2.8	Does the company have a Nominating Committee?	327-333
E.2.9	Is the Nominating Committee comprised of a majority of Independent directors/commissioners?	331
E.2.10	Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner?	329
E.2.11	Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Nominating Committee?	327-328
E.2.12	Is in the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	331-332
Remuneration Committee (RC)/Compensation Committee		
E.2.13	Does the company have a Remuneration Committee?	327-333
E.2.14	Is the Remuneration Committee comprised of a majority of Independent Directors/Commissioners?	331
E.2.15	Is the chairman of the Remuneration Committee an independent director/commissioner?	329
E.2.16	Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Remunerations Committee?	327-328
E.2.17	Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed and, if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?	331-332
Audit Committee		
E.2.18	Does the company have an Audit Committee?	318-326
E.2.19	Is the Audit Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	323

NO	PRINSIP DAN REKOMENDASI	KETERANGAN PENYAJIAN (HALAMAN)
E.2.20	Is the chairman of the Audit Committee an Independent Director/ Commissioner?	319
E.2.21	Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee?	319
E.2.22	Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	319
E.2.23	Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed and, if so, did the Audit Committee meet at least four during the year?	323-326
E.2.24	Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	318-319
E.3 BOARD PROCESSES		
Board meetings and attendance		
E.3.1	Are the board of directors meeting scheduled before the start of financial year?	280-288, 306-312
E.3.2	Does the board of directors/commissioners meet at least six times during the year?	280-288, 306-312
E.3.3	Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	280-288, 306-312
E.3.4	Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?	252-253
E.3.5	Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any Executives present?	280-288, 306-312
Access to information		
E.3.6	Are board papers for board of directors/commissioners meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	280, 306
E.3.7	Does the company secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	335-336
E.3.8	Is the company secretary trained in legal, accountancy or company secretarial practices and has kept abreast on relevant developments?	356
Board Appointments and Re-Election		
E.3.9	Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners?	258, 288
E.3.10	Did the company describe the process followed in appointing new directors/commissioners?	258-288
E.3.11	Are all directors/commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5 years each? The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	261
Remuneration Matters		
E.3.12	Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e. the use of short term and long-term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	315, 317
E.3.13	Is there disclosure of the fee structure for non- executive directors/commissioners?	316-317
E.3.14	Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?	252
E.3.15	Does the company have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with long-term interests of the company, such as claw back provision and deferred bonuses?	315, 317
Internal Audit		
E.3.16	Does the company have a separate internal audit function?	357-363

NO	PRINSIP DAN REKOMENDASI	KETERANGAN PENYAJIAN (HALAMAN)
E.3.18	Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?	358
Risk Oversight		
E.3.19	Does the company establish a sound internal control procedures/risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework? (AS REPHRASED BY INDONESIA)	346-349
E.3.20	Does the Annual Report/Annual CG Report disclose that the board of directors/commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?	348
E.3.21	Does the company disclose the key risks to which the company is materially exposed to (i.e.financial, operational including IT, nvironmental, social, economic)?	349
E.3.22	Does the Annual Report/Annual CG Report contain a statement from the board of directors/ commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/ risk management systems?	349
E.4 PEOPLE ON THE BOARD		
Board Chairman		
E.4.1	Do different persons assume the roles of chairman and CEO?	262-263
E.4.2	Is the chairman an independent director/commissioner?	264
E.4.3	Is any of the directors a former CEO of the company in the past 2 years?	264-266, 296-297
E.4.4	Are the role and responsibilities of the chairman disclosed?	262
Lead Independent Director		
E.4.5	If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?	262
Skills and Competencies		
E.4.6	Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector that the company is operating in?	264-266, 296-297
E.5	Board Performance	277-279, 298-299
Directors Development		
E.5.1	Does the company have orientation programmes for new directors/commissioners?	271-272, 303
E.5.2	Does the company have a policy that encourages directors/commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes?	152-156
CEO/Executive Management Appointments and Performance		
E.5.3	Does the company disclose the process on how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?	333
E.5.4	Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/ Managing Director/President?	277-279, 298-299
Board Appraisal		
E.5.5	Did the company conduct an annual performance assessment of the board of directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	277-279, 298-299
Director Appraisal		
E.5.6	Did the company conduct an annual performance assessment of the individual directors/ commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	277-279, 298-299
Committee Appraisal		
E.5.7	Did the company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	278, 299

NO	PRINSIP DAN REKOMENDASI	KETERANGAN PENYAJIAN (HALAMAN)
BONUS		
(B)A. RIGHT OF SHAREHOLDER		
(B)A.1	Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.	251-252
(B)A.1.1	Does the company allow the use of secure electronic voting in absentia at the general meetings of shareholders?	251-252
(B)B. EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS		
(B)B.1	Notice of AGM	253
(B)B.1.1	Does the company release its notice of AGM (with detailed agendas and explanatory circulars), as announced to the Exchange, at least 28 days before the date of the meeting?	251-252
(B)C. ROLES OF STAKEHOLDERS		
(B)C.1.1	Does the company adopt an internationally recognized reporting framework for sustainability (i.e. GRI, Integrated Reporting, SASB)?	Sustainability Report
(B)D. DISCLOSURE AND TRANSPARENCY		
(B)D.1.1	Are the audited annual financial report/statement released within 60 days from the financial year end?	Laporan Keuangan
(B)D.1.2	Does the company disclose details of remuneration of the CEO?	317
(B)E. RESPONSIBILITIES OF THE BOARD		
(B)E.1	Board Competencies and Diversity	264-266, 296-297
(B)E.1.1	Does the company have at least one female independent director/commissioner?	85, 267
(B)E.1.2	Does the company have a policy and disclose measurable objectives for implementing its board diversity and report on progress in achieving its objectives?	264-266, 296-297
(B)E.2	Board Structure	296-297
(B)E.2.1	Does the Nominating Committee comprise entirely of independent directors/commissioners?	328-329
(B)E.2.2	Does the Nominating Committee undertake the process of identifying the quality of directors aligned with the company's strategic directions?	327-328
(B)E.3	Board Appointments and Re-Election	327-328
(B)E.3.1	Does the company use professional search firms or other external sources of candidates (such as director databases set up by director or shareholder bodies) when searching for candidates to the board of directors/commissioners?	327-333
(B)E.4. Board Structure & Composition		
(B)E.4.1	Do independent non-executive directors/ commissioners make up more than 50% of the board of directors/commissioners for a company with independent chairman?	267, 301-302
(B)E.5. Risk Oversight		
(B)E.5.1	Does the board describe its governance process around IT issues including disruption, cyber security, disaster recovery, to ensure that all key risks are identified, managed and reported to the board?	172-177
(B)E.6. Board Performance		
(B)E.6.1	Does the company have a separate board level Risk Committee?	334
PINALTY		
(P)A. RIGHTS OF SHAREHOLDERS		
(P)A.1. Basic Shareholder Rights		
(P)A.1.1	Did the company fail or neglect to offer equal treatment for share repurchase to all shareholders?	-

NO	PRINSIP DAN REKOMENDASI	KETERANGAN PENYAJIAN (HALAMAN)
(P)A.2	Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the Principles, subject to exceptions to prevent abuse.	
(P)A.2.1	Is there evidence of barriers that prevent shareholders from communicating or consulting with other shareholders?	-
(P)A.3	Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.	
(P)A.3.1	Did the company include any additional and unannounced agenda item into the notice of AGM/EGM?	-
(P)A.3.2	Did the Chairman of the Board, Audit Committee Chairman and CEO attend the most recent AGM?	-
(P)A.4	Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.	
(P)A.4.1	Shareholders Agreement?	-
(P)A.4.2	Voting Cap?	-
(P)A.4.3	Mutiple Voting Rights?	-
(P)A.5	Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.	
(P)A.5.1	Is a pyramid ownership structure and/or cross holding structure apparent?	-
(P)B	EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS	-
(P)B.1	Insider trading and a business dealing should be prohibited.	
(P)B.1.1	Has there been any conviction of insider trading involving directors/commissioners, management and employees in the past three years?	-
(P)B.2	Protecting minority shareholders from abusive action	
(P)B.2.1	Has there been any cases of non-compliance with the laws, rules and regulations pertaining to material related party transactions in the past three years?	-
(P)B.2.2	Were there any RPTs that can be classified as financial assistance (i.e not conducted at arms length) to entities other than wholly - owned subsidiary companies?	-
(P)C	ROLE OF STAKEHOLDERS	-
(P)C.1	The rights of stakeholders that a reestablished by law or through mutual agreements are to be respected.	
(P)C.1.1	Have there been any violations of any laws pertaining to labour/employment/consumer/insolvency/ commercial/competition or environmental issues?	-
(P)C.2	Where stakeholders participate in the corporate governance process, they should have access to relevant, sufficient and reliable information on a timely and regular basis.	-
(P)C.2.1	Has the company faced any sanctions by regulators for failure to make announcements with in there quisite time period for material events?	-
(P)D	DISCLOSURE AND TRANSPARENCY	-
(P)D.1	Sanctions from regulator on financial reports	
(P)D.1.1	Did the company receive a "qualified opinion" in its external audit report?	-
(P)D.1.2	Did the company receive an "adverse opinion" in its external audit report?	-
(P)D.1.3	Did the company receive a "disclaimer opinion" in its external audit report?	-
(P)D.1.4	Has the company in the past year revised its financial statements for reasons other than changes in accounting policies?	-
(P)E	RESPONSIBILITIES OF THE BOARD	-

NO	PRINSIP DAN REKOMENDASI	KETERANGAN PENYAJIAN (HALAMAN)
(P)E.1	Compliance with listing rules, regulations and applicable laws	
(P)E.1.1	Is there any evidence that the company has not complied with any listing rules and regulations over the past year apart from disclosure rules?	-
(P)E.1.2	Have there been any instances where non-executive directors/commissioner have resigned and raised any issues of governance-related concerns?	-
(P)E.2	Board Structure	
(P)E.2.1	Does the Company have any independent directors/commissioners who have served for more than nine years or two terms of five years each (whichever is higher) in the same capacity? The five years term must be required by legislation which pre-existed before the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	-
(P)E.2.2	Did the company fail to identify who are the independent director(s)/commissioner(s)?	-
(P)E.2.3	Does the company have any independent directors/non-executive/commissioners who serve on a total of more than five boards of publicly-listed companies?	-
(P)E.3	External Audit	
(P)E.3.1	Is any of the directors or senior management a former employee or partner of the current external auditor (in the past 2 years)?	-
(P)E.4	Board Structure and Composition	
(P)E.4.1	Has the chairman been the company CEO in the last three years?	-
(P)E.4.2	Do independent non-executive directors/commissioners receive options, performance shares or bonuses?	-



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

384 Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

391 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia

392 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Subjek Operasi yang Adil

394 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Kelestarian Lingkungan Hidup



396 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan
Keselamatan Kerja

402 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait
Tanggung Jawab kepada Konsumen

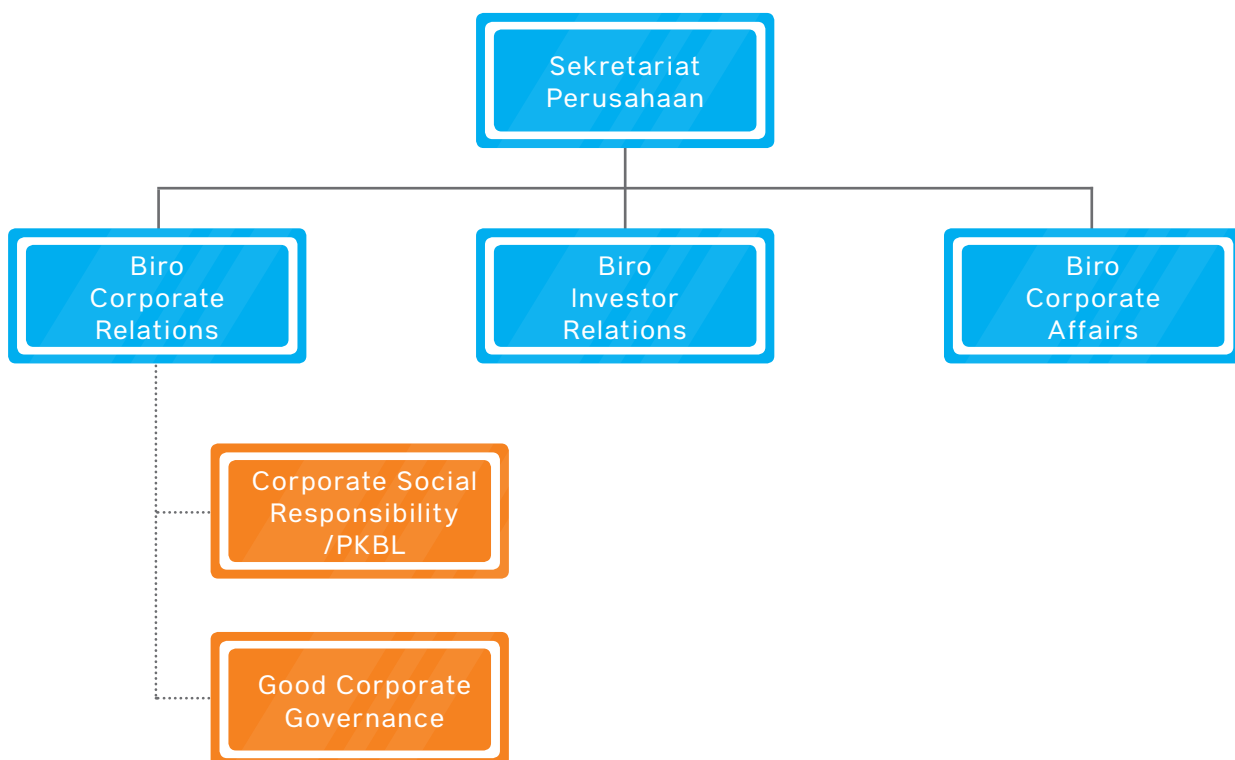
405 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

409 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait
Tanggung Jawab kepada Pemasok

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Kami mempertahankan komitmen untuk melaksanakan bisnis dan kegiatan operasional dengan memperhatikan kualitas (*quality*), tanggung jawab (*responsibility*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Pedoman keberlanjutan WIKA tertuang dalam Misi WIKA poin ke-3, yang menyebutkan bahwa “Menjalankan praktik etika bisnis untuk menjadi warga usaha yang baik dan memelihara keberlanjutan perusahaan”. Sejalan dengan misi tersebut, pelaksanaan bisnis yang diterapkan WIKA selama ini selalu mempertimbangkan nilai-nilai keberlanjutan.

STRUKTUR PENGELOLA TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN



Pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan oleh Fungsi *Corporate Social Responsibility/ PKBL*, yang berada di bawah Biro Corporate Relations dengan pengawasan utama oleh Sekretariat Perusahaan atas tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengembangkan kinerja *Corporate Social Responsibility* sesuai konsep keberlanjutan dan pertimbangan efisiensi biaya dan efektivitas program, merespon isu global serta meminimalkan risiko perusahaan;
2. Tersusunnya program kemitraan dan bina lingkungan sebagai salah satu strategi komunikasi perusahaan.

Sekretariat Perusahaan menerima setiap pengaduan ataupun pelaporan terkait dengan kegiatan CSR Perseroan, melalui media pelaporan berupa e-mail di alamat csr@wikamail.id

DASAR PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Bab V, Pasal 74 ayat (1).
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 02/ MBU/7/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua



Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri BUMN ini diberlakukan pada tahun 2017.

- Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, mencabut Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- ISO 14001:2015 tentang Sistem manajemen lingkungan.

KOMITMEN PADA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

WIKI berkomitmen untuk menerapkan kegiatan tanggung jawab sosial secara holistik. Setiap kegiatan yang kami aktualisasikan tidak bergerak dalam kegiatan bisnis semata, melainkan juga bergerak menuju ke arah CSR yang lebih menekankan pada keberlanjutan pengembangan masyarakat (*community development*). Visi kami adalah agar masyarakat terberdayakan secara merata baik secara ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan (*sustainability*) sehingga WIKI juga dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Menurut ISO 26000, terdapat dua hal utama untuk melakukan CSR holistik, yakni mengikutsertakan dan menyadari keterkaitan antara tujuh area tanggung jawab sosial. Ketujuh area CSR tersebut adalah Tata Kelola, Hak Asasi Manusia (HAM), Praktik Ketenagakerjaan, Lingkungan, Praktik Bisnis yang Adil, Isu Konsumen, serta Pengembangan dan Pelibatan Komunitas.



Selain itu, komitmen WKA dalam mendukung praktik keberlanjutan diwujudkan dengan konsistensi menerbitkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan secara rutin setiap tahun. Laporan Keberlanjutan WKA yang mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan telah dipublikasikan sejak tahun 2010 dan memosisikan WKA sebagai perusahaan EPC pertama di Indonesia yang menerbitkan Laporan Keberlanjutan.

Sejak tahun 2015, Laporan Keberlanjutan WKA telah diverifikasi melalui proses *assurance* oleh pihak ketiga dan merupakan Perusahaan EPC pertama dan satu-satunya hingga saat ini yang menyertakan laporan *independent assurance statement*. WKA menggunakan jasa pihak independen pada proses *assurance* dan dipastikan tidak ada konflik kepentingan dengan Perusahaan. Kegiatan pembuatan Laporan Keberlanjutan WKA hingga proses *assurance* diketahui dan disetujui oleh Direktur Keuangan WKA dan dipantau oleh Sekretariat Perusahaan, Biro Corporate Relations, Fungsi CSR/PKBL.

METODE DAN LINGKUP DUE DILIGENT TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

WKA melaksanakan *due diligent* atas dampak sosial Perseroan secara terintegrasi dengan metode penentuan isi Laporan Keberlanjutan. Proses diawali dengan kegiatan diskusi antara pihak internal (diwakili oleh Tim Corporate Relations-Sekretariat Perusahaan) dan pihak eksternal (diwakili oleh akademisi dan pengamat laporan keberlanjutan) untuk mengidentifikasi topik material.

Dalam menentukan isi laporan, selain pencapaian 2018, WKA mempertimbangkan peristiwa penting yang terjadi di tahun 2018, harapan untuk 2019, dan masukan dari pemangku kepentingan. Hal tersebut menjadi dasar analisis topik material Laporan Keberlanjutan WKA.

Secara lebih spesifik, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi terhadap isu-isu keberlanjutan dan topik penting yang relevan dengan karakteristik bisnis konstruksi, berdasarkan prinsip *stakeholders inclusiveness*, kemudian menentukan dampak dari setiap topik material.
- Membuat prioritas atas topik material yang akan dilaporkan. Prioritas ditentukan dengan pengumpulan pendapat pada saat diskusi internal yang dilaksanakan bersamaan dengan *kick off meeting*.
- Melakukan validasi dan persetujuan pengungkapan informasi yang disajikan sesuai dengan topik material yang telah ditentukan. Proses ini melibatkan persetujuan dari semua jajaran Direksi dan Sekretaris Perusahaan.
- Melakukan kajian *sustainability contex* dan *stakeholder engagement*, serta memeriksa kembali topik material tahun sebelumnya dengan memperhatikan saran dari pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Beberapa saran perbaikan diterima dari keikutsertaan ajang apresiasi laporan keberlanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

STAKEHOLDER PENTING YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH PADA DAMPAK DARI KEGIATAN PERUSAHAAN

WIKa berupaya menjawab isu utama masing-masing pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan WIKa diidentifikasi berdasarkan tingkat kepentingan

hubungan yang mempengaruhi kinerja Perusahaan, demikian juga sebaliknya.

Pemangku kepentingan utama WIKa terdiri atas:

- Pekerja: sebagai pemangku kepentingan utama dan penggerak bisnis Perusahaan;
- Pemegang saham: sebagai pemangku kepentingan utama yang memiliki kendali atas Perusahaan;
- Pemberi kerja: sebagai pemangku kepentingan yang menjadi sumber utama pendapatan Perusahaan;
- Rekanan/mitra kerja: sebagai pemangku kepentingan yang menggerakkan rantai pasokan Perusahaan;
- Kreditur: sebagai pemangku kepentingan yang penting untuk mendukung finansial Perusahaan;
- Masyarakat: sebagai pemangku kepentingan yang menjadi mitra WIKa dalam menyalurkan inisiatif-inisiatif pengembangan nilai-nilai sosial;
- Regulator: sebagai pemangku kepentingan yang mengawasi terlaksananya kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.

INFORMASI TENTANG ISU-ISU PENTING SOSIAL EKONOMI DAN LINGKUNGAN TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERUSAHAAN

Berdasarkan diskusi antara pihak internal dan eksternal mengenai isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan Perseroan, WIKa memberikan perhatian lebih terhadap enam topik material sebagai berikut:

TOPIK MATERIAL	BATASAN	
	IDENTIFIKASI TERJADINYA DAMPAK	KETERLIBATAN WIKa ATAS DAMPAK YANG TERJADI
Kinerja ekonomi	Berdampak pada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.	WIKa menghasilkan nilai ekonomi untuk keberlanjutan perusahaan dan keuntungan pemangku kepentingan, serta menyisihkan laba untuk berkontribusi membiayai kegiatan berbasis sosial dan lingkungan.
Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)	Dampak K3 dapat terjadi di area proyek maupun kantor. Pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) akan menghindarkan pekerja dari kecelakaan dan sakit akibat kerja. Secara langsung, kinerja K3 yang unggul akan berdampak pada kinerja perusahaan untuk mencapai <i>operational excellence</i> .	WIKa memiliki Departemen SHE yang mengelola penerapan K3, dan menyediakan segala kebutuhan terkait K3.

TOPIK MATERIAL	BATASAN	
	IDENTIFIKASI TERJADINYA DAMPAK	KETERLIBATAN WIKA ATAS DAMPAK YANG TERJADI
Praktik pengadaan	Praktik pengadaan merupakan bagian dari rantai pasokan yang penting bagi kegiatan operasi WIKA. Pengadaan yang dilaksanakan tepat waktu dan berkualitas akan berdampak positif bagi kelancaran pembangunan proyek.	1. Membuat kebijakan terkait pengadaan; 2. Melakukan praktik pengadaan sesuai prosedur dan kebijakan yang berlaku; 3. Menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok dan mitra lainnya; 4. Bekerja sama dengan pemasok lokal; 5. Melakukan pembayaran tepat waktu.
Anti-korupsi	Korupsi merupakan tindakan yang merugikan perusahaan juga orang lain. Oleh sebab itu, WIKA dengan tegas memerangi korupsi. WIKA memiliki kebijakan anti-korupsi dan melakukan upaya sosialisasi anti-korupsi dengan tujuan untuk melindungi aset dan reputasi perusahaan.	1. Membuat kebijakan anti-korupsi; 2. Melakukan sosialisasi anti-korupsi; 3. Melakukan <i>assessment</i> terhadap operasi yang berpotensi terhadap korupsi; 4. Memberikan pelatihan terkait anti-korupsi; 5. Memberikan sanksi dan hukuman kepada pelaku korupsi.
Pelatihan dan pendidikan	Pelatihan dan pendidikan bagi pekerja merupakan bagian dari proses kerja. Dampak dari pelatihan dan pendidikan yakni menghasilkan pekerja yang memiliki <i>skill</i> dan kompetensi unggul, sehingga dapat bekerja dengan efektif.	1. WIKA melakukan evaluasi kinerja bagi para pekerja; 2. WIKA menyediakan berbagai modul pendidikan dan pelatihan; 3. WIKA memberikan kesempatan bagi pekerja untuk mendapatkan sertifikasi pekerjaan.

INFORMASI TENTANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BAIK YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN MAUPUN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN

Lingkup PKBL yang merupakan kewajiban dilaksanakan berdasarkan:

- Permen BUMN No: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 8 "Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya".
- Perubahan Pertama Permen No. Per-03/MBU/12/2016
- Perubahan Kedua Permen No. Per-02/MBU/7/2017

Selain itu, WIKA juga melaksanakan program-program lainnya yang termasuk dalam lingkup kegiatan *Corporate Social Responsibility* sebagai wujud tanggung jawab yang melebihi ketentuan yang diatur oleh Peraturan Kementerian BUMN sebagaimana disebutkan di atas.

INFORMASI TENTANG STRATEGI DAN PROGRAM KERJA PERUSAHAAN DALAM MENANGANI ISU ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN DALAM UPAYA STAKEHOLDERS ENGAGEMENT DAN MENINGKATKAN VALUE UNTUK STAKEHOLDER DAN SHAREHOLDER

Dalam membangun relasi dengan pemangku kepentingan, WIKA menggunakan dasar kedekatan (*proximity*) dan tingkat kepentingan (*level of interest*) sebagai dasar penentuan pemangku kepentingan WIKA. Secara internal, hubungan dibangun melalui berbagai saluran komunikasi untuk berinteraksi, seperti melalui surat elektronik dan rapat berkala.

Secara eksternal, WIKA terlibat dengan klien dan pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan proyek sehari-hari, serta di berbagai keanggotaan dan asosiasi industri. Melalui proses pendekatan yang dilakukan pada pemangku kepentingan, WIKA dapat menggali informasi yang menjadi topik kunci dan hal-hal yang menjadi kekhawatiran pemangku kepentingan.

PEMANGKU KEPENTINGAN	METODE PENDEKATAN	TOPIK KUNCI DAN KEBUTUHAN PEMANGKU KEPENTINGAN	RESPON DAN TINDAK LANJUT WIKA
Pemegang Saham	RUPS Tahunan (Setiap RUPS diadakan, dalam setahun minimal 1 kali), RUPS Luar Biasa (minimal satu kali dalam setahun)	- Kinerja tahunan - Besarnya pendapatan yang diperoleh - Laba/rugi perusahaan - Kinerja keberlanjutan - Perubahan struktur manajemen	- Membuat Laporan Tahunan - Membuat Laporan Keberlanjutan - Membuat Laporan PKBL - Membuat Laporan Keuangan
Pekerja	- Rapat terkait pekerjaan yang berlangsung sesuai kebutuhan - Rapat pembahasan PKB (Setiap 2 tahun sekali)	- Pemenuhan hak-hak normatif dan perlindungan kerja - Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) - Kebebasan berserikat - Pelatihan dan pendidikan - Jenjang karir	- Membentuk forum bipartit dan tripartit - Mendukung pembentukan dan kegiatan serikat pekerja - Menyediakan alat perlindungan diri (APD) bagi pekerja dan penerapan standar K3 - Menyediakan <i>medical check up</i> rutin - Rutin mengadakan kegiatan pelatihan dan pendidikan bagi pekerja - Melakukan evaluasi kerja untuk menentukan jenjang karir pekerja
Pemberi Kerja (<i>Owner</i>)	- Pertemuan untuk membahas kontrak kerja - Penandatanganan kontrak kerja, Peresmian proyek (<i>launching</i>) - Pertemuan saat penandatanganan kontrak kerja (Minimal 1 kali dalam setahun)	- Laporan pelaksanaan pekerjaan - Penyelesaian pekerjaan tepat waktu dan tepat anggaran - Jaminan kualitas produk dan jasa sesuai dengan kontrak yang disepakati	- Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak - Mengkaji kontrak kerja - Menyediakan produk dan jasa sesuai ISO 9001: 2015 - Memberikan masa pemeliharaan atas produk - Melakukan survei kepuasan
Rekanan/Mitra Kerja	- Pertemuan untuk membahas tender - Negosiasi pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada masing-masing penawaran pekerjaan - Lebih dari satu kali dalam setahun	- Pemenuhan hak atas pekerjaan yang dilakukan - Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) - Perolehan Kontrak - Evaluasi Penyediaan Jasa dan Pemasok - Kebijakan Pengadaan barang dan jasa	- Memberikan informasi yang jelas saat tender berlangsung - Melakukan kerja sama sesuai kontrak
Kreditur	Saat pertemuan untuk membahas pemberian kredit (dilakukan sesuai dengan jangka waktu dan jatuh tempo kredit)	- Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk memperoleh kredit - Laporan keuangan perusahaan - Kejelasan sumber dana untuk membayar kredit	- Memberikan dokumen yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses kredit - Memberikan informasi lain yang diperlukan - Melakukan kewajiban selaku debitur sesuai ketentuan hukum yang berlaku

PEMANGKU KEPENTINGAN	METODE PENDEKATAN	TOPIK KUNCI DAN KEBUTUHAN PEMANGKU KEPENTINGAN	RESPON DAN TINDAK LANJUT WIKA
Masyarakat	- Pelaksanaan program CSR dan kemitraan (minimal 1 kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan) - Pelaksanaan PKBL yang dilakukan minimal dua kali dalam setahun	- Kondisi lingkungan tempat tinggal mereka, terutama yang berdekatan dengan lokasi proyek WIKA - Mata pencaharian	- Melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan - Kegiatan CSR bagi masyarakat lokal di sekitar proyek - WIKA melakukan kegiatan yang dapat meminimalkan dampak negatif lingkungan di sekitar lokasi proyek
Regulator	Pada saat terjadi pertemuan antara kedua belah pihak untuk membahas pemenuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Pertemuan dilakukan minimal satu bulan sekali.	- Pemenuhan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku - Informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kegiatan perusahaan.	- Melakukan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan melaporkannya - Membuat Laporan Tahunan - Membuat Laporan Keberlanjutan dan melaporkannya kepada Kementerian BUMN, OJK dan pihak berkepentingan lainnya - Memberikan input sesuai kapasitas WIKA sebagai BUMN

INFORMASI TENTANG BERBAGAI PROGRAM YANG MELEBIHI TANGGUNG JAWAB MINIMAL PERUSAHAAN YANG RELEVAN DENGAN BISNIS YANG DIJALANKAN

Dalam setiap pengerjaan proyek, WIKA selalu berupaya untuk mencapai kualitas maksimal, dan tanggung jawab untuk keberlanjutan. Bagi WIKA, tanggung jawab untuk keberlanjutan mencakup komitmen untuk dapat memberi *value* dan dampak positif di manapun proyek berada.

WIKA memiliki kebijakan yakni di setiap pengerjaan proyek diwajibkan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar masing-masing proyek. CSR di tingkat proyek dikelola oleh pekerja di lokasi proyek, kemudian wajib dilaporkan ke WIKA pusat.

Kegiatan CSR yang telah berjalan di lokasi proyek-proyek WIKA antara lain:

- Pemberian bantuan untuk penyediaan fasilitas umum
- Pemberian pelatihan bagi masyarakat sekitar

INFORMASI TENTANG PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Sepanjang tahun 2018, Perseroan mengalokasikan dana untuk program Bina Lingkungan sebesar Rp20,23 miliar dan Program Kemitraan sebesar Rp21,32 miliar.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, WIKA senantiasa berupaya memenuhi Hak-hak Asasi Manusia dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku secara universal, peraturan Kementerian BUMN serta ketentuan Perseroan.

KEBIJAKAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

- UU RI No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan
- Pedoman SMK3L WIKA-PEM-PM-02.02

RUMUSAN PERUSAHAAN TENTANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Sebagai sebuah korporasi, WIKA mengerucutkan lingkup hak asasi manusia terutama pada aspek ketenagakerjaan. Hak Asasi Manusia (HAM) tercantum sebagai bagian dari tujuh area tanggung jawab sosial sesuai dengan ISO 26000 dalam pelaksanaan CSR holistik WIKA.

KOMITMEN, PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Secara spesifik, untuk menghargai hak asasi manusia secara mendasar serta sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja karyawan untuk menjadi lebih baik, termasuk dalam mempertahankan loyalitas karyawan, salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah pengharkatan yang komprehensif/holistik. WIKA tidak hanya fokus pada besaran remunerasi, benefit, tetapi juga melakukan intervensi kesehatan agar karyawan memiliki *mindset* gaya hidup sehat, yaitu sehat dalam pola makan, pola pikir dan pola hidup.

WIKA menekankan pentingnya pengharkatan kepada setiap pegawai, tidak hanya sebatas menghargai secara materi. Salah satu bentuk pengharkatan ini diwujudkan dalam Program *Wellbeing* telah dijabarkan dalam Bab Sumber Daya Manusia di Laporan Tahunan ini serta pada Laporan Keberlanjutan WIKA.

PENCAPAIAN DAN PENGHARGAAN INISIATIF CSR TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Hasil dari bentuk pengharkatan yang telah dilakukan juga diukur melalui *Engagement Survey*. Survei dilakukan oleh lembaga independen, yaitu Aon Hewitt. Dimensi survei meliputi aspek *Say, Stay* dan *Strive*. *Say*, adalah sejauh mana pegawai mempersepsikan perusahaan secara positif, mampu mengatakan hal-hal yang positif terhadap perusahaan. Dimensi *Stay* adalah sejauh mana pegawai ingin tetap tinggal atau bergabung dalam perusahaan. Sedangkan dimensi *Strive* adalah mengukur kerelaan pegawai untuk berjuang demi perusahaan atau memperjuangkan kepentingan perusahaan.

Target *engagement level* Pegawai WIKA ditetapkan 10% di atas rata-rata *engagement level* perusahaan di Indonesia. Hasil *Employee Engagement Survey* tahun 2017 adalah sebesar 75%, lebih tinggi dari rata-rata perusahaan di Indonesia yaitu sebesar 65%.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN SUBJEK OPERASI YANG ADIL

Sebagai sebuah perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, WIKA memahami peran yang sangat penting dalam membangun nusa dan bangsa. Terlebih dengan *core business* yang bersentuhan langsung dengan modifikasi lingkungan, WIKA sangat menyadari kepentingan untuk menjadi sebuah entitas yang adil. Adil bagi seluruh insan WIKA, bagi elemen-elemen lingkungan, bagi masyarakat luas, dan tentunya bagi seluruh pemangku kepentingan.

KOMITMEN, KEBIJAKAN DAN RUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Komitmen, Kebijakan dan Rumusan Tanggung Jawab Sosial terkait operasi yang adil tertuang dengan sangat jelas dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Visi Misi, serta kebijakan-kebijakan internal WIKA yang mengatur segala sesuatunya dengan spesifik dan mendetail.

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN INISIATIF CSR TERKAIT OPERASI YANG ADIL

WIKA menerapkan praktik-praktik terbaik operasi, dengan memenuhi dokumen-dokumen perizinan sebelum melaksanakan proses konstruksi seperti RPL, RKL, dan AMDAL. WIKA melaksanakan kegiatan operasional dengan patuh pada Sistem Manajemen Lingkungan berdasarkan ISO 14001:2015, juga Sistem Manajemen Pengamanan. Kami memastikan menjalankan proses konstruksi sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, kami dapat memperkuat merek (*brand*) sehingga selalu menjadi pilihan utama pemberi kerja selaku pelanggan.

Human Capital merupakan aset penting bagi WIKA. Strategi kami dalam mengelola sumber daya manusia, yaitu dengan pengembangan Human Capital berbasis kompetensi dan pengharkatan, dengan prinsip '*more for more*'. Sepanjang tahun 2018, kami telah melaksanakan ribuan jam pelatihan dengan ratusan modul. Keberhasilan WIKA dalam setiap proyek didukung oleh Human Capital yang unggul.

Hingga akhir 2018, tercatat ribuan orang pekerja WIKA merupakan pekerja bersertifikasi sesuai dengan kompetensi masing-masing.

WIKA juga memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja. Untuk itu, aspek *safety* selalu menjadi hal yang utama. Kami menerapkan sistem manajemen di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), yakni OHSAS 18001:2007. Selain itu, sejak 2003, kami juga mengelola proyek berbasis lingkungan sesuai dengan standar nasional Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sementara untuk masyarakat, peran serta Perseroan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab sosial *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Program Bina Lingkungan yang dijalankan oleh WIKA juga meliputi, pelatihan dan pendidikan; pengembangan sarana dan prasarana umum; peningkatan kesehatan; sarana ibadah; korban bencana alam; pelestarian alam; bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan; pembinaan kemitraan. Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dilakukan dengan dua pendekatan, yakni bersumber dari dana sendiri serta bersinergi dengan BUMN lain.

PENCAPAIAN DAN PENGHARGAAN INISIATIF CSR TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Atas pelaksanaan bisnis WIKA yang terarah dan bertujuan luhur untuk membangun bangsa, WIKA berhasil meraih pencapaian operasional serta finansial yang memberikan dampak positif dalam bentuk nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan. Dari nilai ekonomi yang dihasilkan, WIKA juga mendistribusikannya langsung kepada lingkungan dan masyarakat dalam bentuk kegiatan dan bantuan kepada masyarakat yang diberikan secara pro-bono. Jumlah nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan oleh WIKA dapat dilihat secara detail pada Laporan Keberlanjutan.

Atas pelaporan tentang material terkait operasi yang adil secara transparan, WIKA berhasil meraih beberapa penghargaan sebagai berikut:

1. Asia Sustainability Report 2017 Kategori Asia's Most Tranparent Report
2. Top 2 Best Sustainability Report 2017 Kategori Infrastruktur di Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) 2017
3. Penghargaan Ramah Lingkungan untuk Proyek Dermaga Sorong
4. Best Partnership Program and Community Development in Construction Category
5. Platinum Rank "Asia Sustainability Reporting Rating 2018"
6. Pencapaian 2.000.000 Jam Kerja Selamat Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel Halmahera Timur (P3FH)
7. Apresiasi Penghargaan Pencapaian 1.000.000 Jam Kerja Selamat Proyek EPCC Pengembangan dan Modernisasi Pabrik Gula Assembagoes Situbondo
8. Indonesia Most Trusted Company 2018



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

WIKA percaya bahwa keberlanjutan manusia tetap akan bergantung dengan alam, dan oleh karenanya pelestarian lingkungan menjadi hal mutlak yang harus dijaga.

Landasan:

- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Prosedur WIKA-KON-PM-02.07 tentang Proses Pelaksanaan Konstruksi
- Prosedur WIKA-PEM-PM-03.06 tentang Pengoperasian Alat Angkat atau Angkut
- Prosedur WIKA-KON-PM-05.01 tentang Pengendalian Material Sisa
- Prosedur WIKA-KON-PM-06.01 tentang Penerimaan, Penanganan Material, Pengemasan dan Penyerahan Produk

Secara spesifik, sebelum sebuah proyek dimulai, WIKA melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap kelengkapan dokumen yang dimiliki melalui kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

- Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
- Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
- Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Selain mematuhi kebijakan serta mekanisme yang berlaku, WIKA juga mengaktualisasikan komitmen melalui

- Imbauan
- Maklumat
- Peraturan internal
- Efisiensi operasional pada seluruh unit kerja dan divisi di seluruh Kantor Wilayah

seluruhnya bertujuan untuk meminimalisir dampak operasional Perseroan terhadap lingkungan hidup.

DAMPAK DAN RISIKO LINGKUNGAN YANG TERKAIT DENGAN PERSEROAN

WIKA menyadari bahwa menjalankan bisnis di bidang konstruksi secara tidak langsung akan mengubah bentang alam, dan peruntukkan lahan. WIKA memastikan bahwa seluruh proyek yang dikerjakan telah melalui proses yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Proses konstruksi secara tidak langsung turut berkontribusi pada pengeluaran emisi karbon yang berdampak pada polusi udara dan pemanasan global. WIKA sadar dan peduli akan pentingnya memerangi pemanasan global ini dan mendukung *Sustainable Development Goals* (SDG). Sejalan dengan komitmen ini, WIKA melalui kegiatan produksinya akan terus berupaya membangun konstruksi yang ramah lingkungan.

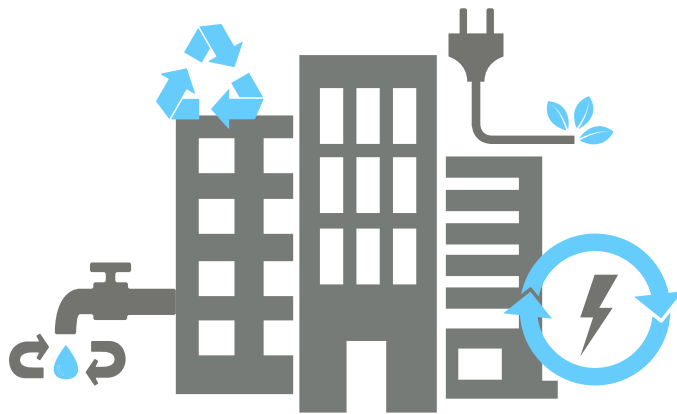
TARGET KEGIATAN CSR 2018

- Meminimalkan pencemaran lingkungan dan dampak terhadap lingkungan lainnya akibat proses konstruksi.
- Efisiensi pada seluruh kegiatan operasional yang menggunakan energi.
- Perbaikan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

KEGIATAN CSR 2018

1. Penghematan Energi

Penghematan energi telah dipertimbangkan sejak proses dibangunnya WIKA Tower. Dengan konsep *green building*, WIKA hadir sebagai salah satu entitas yang mendalami kondisi lingkungan dalam membangun sebuah gedung sekaligus menginisiasi perubahan untuk lingkungan hidup.



WIKI TOWER

- Dibangun dengan material ramah lingkungan
- Mengurangi penggunaan kayu pada interior dan menggunakan *High Pressure Laminated (HPL)*
- Sistem lift dan escalator menggunakan perangkat hemat energi
- Menggunakan jaringan air bersih PAM
- Sistem pemadam kebakaran dan sistem tata udara (*Air Conditioning* atau AC) menggunakan sistem *Variable Refrigerant Volume (VRV)* atau sistem *Variable Refrigerant Flow (VRF)* yang lebih mudah secara operasional dan lebih hemat energi listrik.

2. Pengelolaan Limbah dan Polusi

- WIKI berkontribusi terhadap pengelolaan limbah eksternal dengan menggunakan material daur ulang (*recycle*) dalam konstruksi WIKI Tower seperti kayu bekas peti kemas ataupun limbah serutan kayu; material tidak beracun (*nontoxic*) dan memiliki label 'hijau' tersendiri seperti *Ecolabel* dan *Green Standard*.
- WIKI menerapkan pengelolaan air limbah yang menggunakan sistem *Extended Aeration with Sludge Return Active*.
- Membuat instalasi pengolahan air limbah pada proyek yang sedang dibangun.
- Melakukan penyiraman pada area proyek setiap hari. Air yang digunakan untuk menyiram adalah air hujan yang tertampung dan sebagian air dari Palyja.

3. Pengurangan Emisi

Membangun hutan sengon di Desa Binaan WIKI di Pamijahan, Bogor

- Penanaman sengon untuk mengambil manfaat ekonomi kayu sengon
- Penanaman dilakukan dalam 3 periode
 - » Periode I sudah dimulai pada Desember 2013
 - » Periode II dimulai pada Desember 2014
 - » Periode III dimulai pada Desember 2015

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN CSR LINGKUNGAN 2018

Melalui sistem transportasi vertikal, lift dan eskalator yang hemat energi, WIKI mencatat pembayaran listrik di tahun 2018 sebesar Rp5,02 miliar. Sedangkan melalui penghematan penggunaan air yang dilakukan, total biaya air di tahun 2018 tercatat sebesar Rp376,08 juta.

Selain itu, tanaman sengon yang dikelola di Desa Binaan Pamijahan telah memberi dampak positif bagi lingkungan di Kecamatan Pamijahan, yaitu sengon mampu menyerap emisi karbon sebanyak 2.632.298 kg CO₂. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelestarian lingkungan telah berdampak pada pengurangan emisi karbon.

SERTIFIKASI DI BIDANG LINGKUNGAN

- Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Sumber Daya Manusia adalah aset strategis yang harus diutamakan kepentingannya. Untuk itu WIKA berupaya untuk menjadi lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh pegawai di seluruh lokasi operasional.

- UU RI No.13/2013 tentang Ketenagakerjaan
- Kebijakan Safety, Health, Environment PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. tanggal 29 Januari 2015.
- Kebijakan SHE yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bab XV Pasal 72 tentang penyelenggaraan K3L dan Pasal 73 tentang Alat serta Perlengkapan Keselamatan Kerja dan Lingkungan.
- Pedoman SMK3L WIKA-PEM-PM-02.02

TARGET KEGIATAN 2018

1. Terjaminnya kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang tertuang dalam PKB;
2. Terjaminnya kesetaraan gender dalam kesempatan kerja, maupun kesetaraan dalam kesempatan memperoleh pelatihan bagi seluruh pegawai;
3. Penyempurnaan skema fasilitas kesehatan bagi pegawai serta mewujudkan tempat kerja yang layak dan aman bagi seluruh pegawai Perseroan;
4. Menuju angka kecelakaan kerja nol (*zero accident*).

KEGIATAN 2018

1. Ketenagakerjaan

Kesetaraan Gender dalam Kesempatan Kerja dan Pengembangan Kompetensi

- Penghindaran diskriminasi gender dengan merekrut, memberikan pelatihan, memberikan kesempatan kenaikan jenjang jabatan, memberikan bonus dan remunerasi tanpa membedakan gender sesuai ketentuan Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan.

Kesetaraan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan

- Merealisasikan program pengembangan kompetensi dengan kesempatan yang terbuka bagi seluruh karyawan. WIKA memiliki berbagai Program yang mendukung pengembangan kompetensi antara lain: WSDMP (WIK Senior Management Development Program), WMDP (WIK Middle Management Development Program), WJMDP (WIK Junior Management Development Program), WELDP (WIK Emerging Leadership Development Program) dan WODP (WIK Officer Development Program). Selama tahun 2018, realisasi biaya pendidikan dan pelatihan bagi karyawan tercatat sebesar Rp13,92 miliar meningkat 17% jika dibandingkan tahun 2017.

Remunerasi

- Memberikan remunerasi secara setara dengan besaran yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Perseroan.
- Menjaga gap rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi. Pada tabel berikut, dapat dilihat rasio gaji tertinggi dan terendah WIK selama tahun 2018.

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

URAIAN	RASIO
Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	8.8 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1.18 : 1
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1.11 : 1
Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi	3.4 : 1

Kebebasan Berserikat

- Menjalani komunikasi intensif dan keterlibatan WIK bersama karyawan dalam mencapai target bersama.
- Memastikan terjalinnya hubungan saling menghormati dan mampu menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.
- Mewadahi pegawai dalam bentuk Serikat Pegawai sebagaimana telah dijelaskan pada Bab Sumber Daya Manusia halaman 170.

Mengelola Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

- Mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dan menyusun mekanisme pengaduan ketenagakerjaan seperti penyusunan PKB, pembentukan serikat pegawai, Lembaga Kerjasama Bipartit antara Perseroan dan pegawai.
- Menerima aduan serta keluhan kesah karyawan terkait masalah pekerjaan.

2. Kesehatan

Pemberian Fasilitas Kesehatan

- Memberi perhatian khusus pada pekerjaan berkategori risiko tinggi yaitu bekerja di ketinggian, bekerja dengan menggunakan alat berat, bekerja di cuaca ekstrim, bekerja di *confined space* (ruang terbatas), bekerja di lokasi instalasi tegangan listrik.
- Mematuhi panduan *Safety Golden Rules* sebagai acuan.
- Memberlakukan wajib *medical checkup* (MCU) bagi pekerja berisiko tinggi sebelum, selama dan setelah melakukan pekerjaan.
- Memantau kesehatan pekerja melalui mekanisme *medical checkup* yang dilaksanakan setiap 1 kali dalam setahun.
- Merujuk pekerja yang menderita penyakit serius, ke rumah sakit yang menjadi rujukan Rumah Sakit (RS) Klinik Prodia.
- Mewajibkan pegawai melakukan pemeriksaan *general check-up* setiap 2 tahun sekali.
- Mengikutsertakan seluruh pegawai dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan), yang terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).
- Mengalokasikan biaya kesehatan pegawai.

3. Keselamatan Kerja

- Memerhatikan praktik K3 di lapangan
- Mengimplementasikan K3 tidak hanya berlaku bagi pekerja internal WIKA, namun juga diberlakukan secara tegas pada mitra kontrak dan subkontraktor, bahkan kepada tamu yang meninjau proyek.
- Menginformasikan *Safety induction* pada saat sebelum pekerjaan dimulai, dan sebelum peninjauan proyek.
- Menyediakan pakta integritas yang wajib dipatuhi dan ditandatangani oleh seluruh mitra maupun subkontraktor.
- Memastikan keselamatan kerja tiap pegawai dilakukan melalui QSHE Patrol, yang pelaksanaannya dilakukan seminggu sekali oleh tim manajemen PPU, team K3L PPU dan Pemilik Proyek.
- Melakukan komunikasi dan partisipasi dalam rangka penerapan K3 yang terdiri dari *SHE Induction*, *SHE Morning Talk*, *Toolbox Meeting*, *SHE Meeting*, *Safety Alert*, *SHE Culture* dan *SHE Sharing* dan Audit.

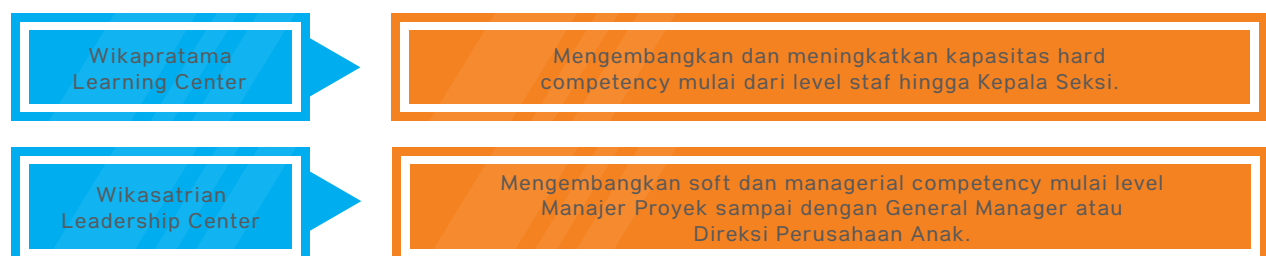
JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
SHE Induction	SHE <i>Induction</i> dilakukan untuk mengkomunikasikan potensi bahaya yang ada di proyek dan apa yang harus dilakukan saat terjadi keadaan darurat. Ditujukan pada seluruh pekerja, pekerja baru dan tamu yang memasuki area proyek/kantor WIKA. Materi yang disampaikan meliputi: Kebijakan Sistem Manajemen SHE Kebijakan Mutu, Risiko dan Pengamanan Sasaran K3L dan Pengamanan Aturan-aturan K3L dan Pengamanan Prosedur Penanganan Keadaan Darurat Program-program K3L dan Pengamanan Bahaya-bahaya yang mungkin terjadi serta pengendalian risikonya Nomor-nomor telepon penting
SHE Morning Talk	Dilaksanakan setiap hari kerja dengan melibatkan seluruh pekerja dan pegawai
SHE Meeting	Pelaksanaan SHE Meeting: 1 minggu sekali untuk tim K3L 2 minggu sekali melibatkan penanggung jawab produksi subkon dan mandor Membahas program-program, hasil inspeksi, pelanggaran dan rencana tindak lanjutnya Notulen terdokumentasi dan didistribusikan kepada fungsi terkait
Toolbox Meeting	Dilaksanakan setiap hari kerja untuk setiap kelompok sesuai jenis pekerjaan. Pelaksanaan dipimpin MK/ Pelut dengan materi mengacu kepada Identifikasi HIRARC dan Aspek dan Dampak
Safety Alert	Berisi penjelasan kejadian, analisis penyebab, tindak lanjut dari kejadian/kecelakaan yang terjadi di suatu proyek untuk menjadi pembelajaran bagi proyek lainnya dalam bentuk <i>hard file</i> dan <i>soft file</i>
SHE Culture	Pembahasan mengenai permasalahan atau issue terkait SHE dan Pengamanan yang ada dengan pengisi materi dari GM Departemen yang bergantian. Dilakukan rutin 2 minggu sekali saat sebelum Rapat Direksi & GM di Proyek dan kantor dan memutuskan solusi yang terbaik
SHE Sharing	Berbagi (<i>sharing</i>) mengenai permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait SHE dan Pengamanan di Proyek yang ditujukan kepada seluruh Manajer Divisi dan Manajer Proyek WIKA. Dilakukan 1 tahun 1 kali
Penghargaan SHE	Penghargaan Jam Kerja Selamat Penghargaan jam kerja selamat dilakukan 1 tahun sekali untuk memberikan penghargaan kepada proyek-proyek WIKA yang jam kerja selamat mencapai 500.000, 1.000.000, 1.500.000 dan 2.000.000 <i>manhour</i>
SHE Audit, Audit Integrasi	SHE Audit dilakukan khusus untuk proyek yang termasuk kriteria potensi bahaya tinggi sebagai tindakan preventif atas kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Audit integrasi dilakukan bersama Biro Sistem Manajemen untuk mengukur penerapan sistem SHE, Pengamanan dan <i>Quality</i> di proyek. Auditor merupakan gabungan auditor dari departemen operasi dan pusat. Setiap temuan yang ada, wajib dibuat RTL dan bukti <i>close</i> nya maksimal 2 minggu untuk verifikasi.

JENIS KEGIATAN	KETERANGAN
SHE Reward	SHE reward dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk memberikan penghargaan kepada proyek dan manajer proyek yang menerapkan sistem SHE secara optimal. Penilaian SHE reward dengan kombinasi nilai SHE Level, 5R, RCA, keluhan pelanggan dan program manajer proyek sebagai <i>role model</i> penerapan SHE di proyek selama 1 tahun, penghargaan yang pernah didapat selama proyek berjalan, dan inovasi terhadap penerapan SHE di proyek.

Sistem Manajemen Safety, Health and Environment (SHE) WIKA dibentuk berdasarkan standar ISO 14001: 2015, SMK3 sesuai PP No.50 Tahun 2012, OHSAS 18001:2007. WIKA juga terus meningkatkan kepatuhan pelaksanaan K3 demi tercapainya kecelakaan nihil (*zero accident*).

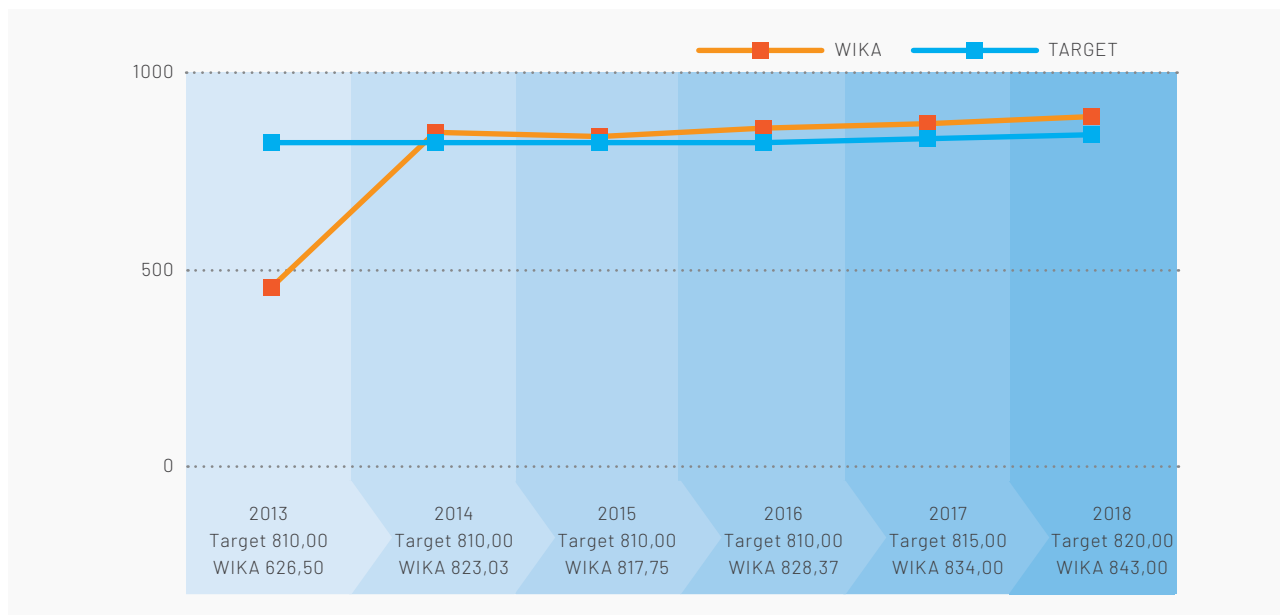


WIKA MENDIDIK DAN MELATIH PEKERJA MELALUI WIKAPRATAMA LEARNING CENTER DAN WIKASATRIAN LEADERSHIP CENTER



DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KESELAMATAN KERJA

- WIKA memperoleh beberapa penghargaan di antaranya The Best Implementation of Integrated System (SMM, SMK3, SML dan SMP) dari Sucofindo ICS tahun 2013.
- WIKA menerapkan sistem level mutu/SMM, K3/SMK3/OHSAS, Lingkungan/SML dan 5R.
- Di tahun 2014, sistem level bertambah dengan SMP dan penggabungan sistem level K3 dan Lingkungan menjadi satu yaitu SHE Level.
- Di tahun 2015, WIKA menambah sertifikasi SMK3 sesuai PP No. 50 Tahun 2012.
- Di tahun 2018, SHE Level WIKA mencapai skor 843. Tren angka SHE ini terus meningkat sejak tahun 2013 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

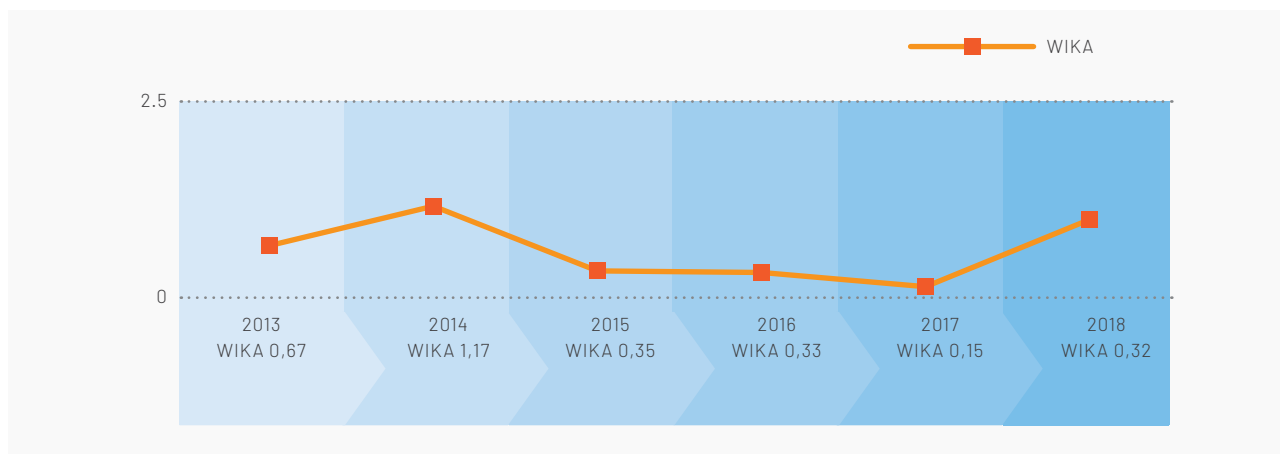


Pencapaian Program Keselamatan Kerja

PROGRAM	TUJUAN	CAPAIAN 2018
SHE Level	Mengukur implementasi program K3L di proyek	102,80%
5R	Mengukur implementasi program house keeping di proyek	100,47%
RCA	Mengukur tingkat keparahan potensi <i>unsafe act</i> dan <i>unsafe condition</i> di proyek	105,73%

Laporan Kecelakaan Kerja

Wika juga mengikuti beberapa program untuk menjamin dipenuhinya standar K3 dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan, di antaranya OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, dan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kinerja K3 dapat dilihat dari Frekuensi Rate (FR) yang didapat dari jumlah kecelakaan kerja yang terjadi dibagi *manhour* per tahun dikali 1 juta *manhour*. FR Wika sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.



DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KESEHATAN KERJA

Komitmen WIKA untuk menjamin kesehatan dari setiap pegawai ditunjukkan melalui peningkatan biaya kesehatan pegawai setiap tahunnya, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

NO	URAIAN	JUMLAH		
		2018	2017	2016
1	Biaya Kesehatan (biaya Asuransi Kesehatan)	18.932.864.363	15.237.688.130	12.948.219.203
	Total rata-rata per keluarga	3.444.217	3.224.908	3.253.321
2	Biaya Pencegahan (biaya <i>Medical Check-up</i>)	2.722.300.625	2.085.887.025	1.813.814.805
	Total rata-rata per keluarga	1.369.366	556.236	948.648

Catatan

1. Jumlah peserta + Keluarga tahun 2016 = 3.980
2. Jumlah peserta + Keluarga tahun 2017 = 4.725
3. Jumlah peserta + Keluarga tahun 2018 = 5.497

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KETENAGAKERJAAN

Angka *Turnover* Karyawan di tahun 2018 sebesar 0,85%. Selain itu, angka *engagement* level pegawai WIKA di 2017 tercatat sebesar 76%, angka ini berada di atas angka rata-rata perusahaan di Indonesia. Tingginya tingkat *engagement* pegawai menunjukkan bahwa program-program terkait ketenagakerjaan yang dijalankan oleh WIKA telah berjalan dengan sangat baik.

SERTIFIKASI DI BIDANG KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Sampai dengan Desember 2018, Perseroan telah memperoleh beberapa sertifikasi terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja antara lain sebagai berikut.

- Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang berlaku sampai dengan 03 Mei 2020
- OHSAS 18001:2007, yang berlaku sampai dengan 14 Agustus 2021;
- Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, yang berlaku sampai dengan 3 Mei 2020;
- Sertifikat SMK3 sesuai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 357 Tahun 2015, yang berlaku sampai dengan 30 Juli 2021 dengan kategori "bendera emas".

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

KEBIJAKAN

- Kebijakan Sistem Manajemen PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., tanggal 1 Oktober 2018
- Kebijakan SHE (*Safety, Health & Environment*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., tanggal 8 Mei 2018
- Kebijakan Larangan Menggunakan Minuman Beralkohol & Obat-Obat Terlarang tanggal 8 Mei 2018
- Kebijakan SWA (*Stop Work Action*) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., tanggal 8 Mei 2018
- Kebijakan Sistem Manajemen Risiko PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., tanggal 24 Agustus 2018
- Pedoman Sistem Manajemen WIKA WIKA-PEM-QM-01.01

TARGET KEGIATAN

Audit Internal Sistem Manajemen WIKA

Kegiatan audit internal terhadap sistem manajemen dilakukan dengan minimal 1 tahun sekali sesuai dengan prosedur Audit Internal WIKA-PEM-PM-04.01. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin organisasi agar mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen, pengendalian, dan tata kelola.

Audit Eksternal (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Sistem Manajemen Pengamanan)

Kegiatan audit eksternal dilakukan setahun sekali oleh badan sertifikasi eksternal. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat penerapan dari sistem manajemen perusahaan selama kurun waktu tersebut.

Management Review

Kegiatan tinjauan manajemen minimal dilakukan 4x (Triwulanan) dalam setahun. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau pencapaian kinerja perusahaan.

KEGIATAN 2018

1. Kegiatan Informasi dan Keamanan Produk

Kebijakan Sistem Manajemen WIKA saat ini telah dikembangkan secara terintegrasi menjadi Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Mutu,

Sistem Manajemen Risiko, Sistem Manajemen Lingkungan, dan Sistem Manajemen Pengamanan yang merupakan implementasi atas komitmen yang dicanangkan Manajemen Puncak kepada jajarannya demi memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan serta seluruh pihak yang berkepentingan dengan menghasilkan produk dan jasa yang unggul, berdaya saing, seraya menjunjung tinggi aspek keselamatan, kesehatan kerja, pengamanan dan manajemen risiko dalam setiap aktivitas perusahaan.

Sepanjang tahun 2018, WIKA bebas dari insiden dan denda terkait dampak ketidakpatuhan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja atas produk maupun jasa yang diberikan.

2. Kegiatan Penanganan Keluhan Konsumen

Kegiatan pengaduan nasabah atau pelanggan tertuang pada prosedur nomor dokumen WIKA-PPE-PM-01.01 No. Rev 02 Amd 6 tentang Prosedur Catatan Peluang Perbaikan dan Permintaan Tindakan Korektif dan Preventif. Prosedur ini mengatur tata cara pengendalian proses yang menyimpang dari ketentuan dan mengatur tata cara pelaksanaan tindakan korektif dan preventif dalam rangka efektivitas sistem manajemen WIKA di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Prosedur ini digunakan di seluruh unit kerja yang terkait dengan penerapan sistem manajemen WIKA untuk mengidentifikasi, memisahkan, menangani dan mendokumentasikan semua yang menyimpang atau tidak sesuai dari ketentuan, di mana penyimpangan yang terjadi bersifat tidak kritis (Catatan Peluang Perbaikan/CPP) atau di mana penyimpangan tersebut diperlukan tindakan korektif dan preventif (Permintaan Tindakan Korektif dan Preventif/PTKP).

Temuan penyimpangan produk dan jasa dapat dibuat oleh seluruh karyawan dan pelanggan dengan cara mengisi form CPP/PTKP yang kemudian diserahkan ke penanggung jawab sistem manajemen mutu di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Keluhan maupun pengaduan yang masuk, dievaluasi dan diawasi oleh pihak internal dan



eksternal agar berjalan efektif. Form CPP dan PTKP juga harus diisi oleh penanggung jawab dan verifikator. WKA menargetkan setiap temuan harus diselesaikan paling lama 2 bulan. Bila temuan belum dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan, maka temuan akan dibawa ke level GM Departemen dan Management Representative. Khusus untuk keluhan pelanggan yang terjadi di proyek, keluhan wajib disampaikan kepada Departemen Representative (DR), Manajer Divisi dan General Manajer ditembuskan kepada Manajemen Representative (MR) maksimal 3 jam setelah keluhan pelanggan diterima.

WKA juga menghargai hak-hak konsumen dan masyarakat, maka dari itu untuk menampung berbagai keluhan lainnya, WKA menyediakan ruang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang berlokasi di WKA Tower 2 lantai 1. Ruang KIP ini melayani siapa saja yang ingin memperoleh informasi seputar WKA, dan juga untuk

menyampaikan saran, kritik, dan keluhan. Selama tahun 2018, belum ada pengaduan yang masuk melalui KIP ini.

Selain itu, WKA juga menyediakan saluran pengaduan secara online 24 jam, melalui:

Website : <http://www.wika.co.id/contact>
E-mail : humas@wika.co.id
Telepon : 021 - 80679200

3. Kegiatan Manajemen Mutu

Pengenalan Sistem Manajemen Mutu WKA

Sistem Manajemen Mutu PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada standar ISO 9001:2015 yang terdiri dari:

- Prosedur, Instruksi Kerja, Surat Keputusan Direksi dan/atau Ka. Komrah dan Kebijakan Perusahaan.
- Penanggung jawab yang ditunjuk (Tim Pengembangan Sistem Manajemen).
- Dokumen referensi atau standar resmi.



DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP KONSUMEN

Untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen, WIKA melaksanakan survey indeks kepuasan pelanggan atau *Customer Satisfaction Index* (CSI). Di tahun 2018, Indeks kepuasan pelanggan WIKA berada pada indeks 4,1 dari skala 5 dan termasuk dalam kategori "PUAS".

SERTIFIKASI TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Sampai dengan Desember 2018, Perseroan telah memperoleh beberapa sertifikasi terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja antara lain sebagai berikut.

- ISO 9001:2015,
- OHSAS 18001:2007,
- ISO 14001:2015,
- Sistem Manajemen K3 dan
- Sistem Manajemen Pengamanan

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

KEBIJAKAN DAN KOMITMEN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Sebagai salah satu BUMN di bidang EPC terbesar, WIKA aktif melaksanakan PKBL sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Pemerintah. Laporan PKBL secara lengkap dapat dibaca pada <http://www.wika.co.id/id/fle/partnership-amp-community-development-report>.

- Permen BUMN No: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 8 “Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya”.
- Perubahan Pertama Permen No. Per-03/MBU/12/2016
- Perubahan Kedua Permen No. Per-02/MBU/7/2017
- Prosedur Program Kemitraan dan Bina Lingkungan No. WIKA-KBL-PM.01.01
- Instruksi Kerja Program Kemitraan No. WIKA-KBL-IK.01.01
- Instruksi Kerja Bina Lingkungan No. WIKA-KBL-IK.01.02

ISU DAN RISIKO SOSIAL YANG DIHADAPI WIKA DI TAHUN 2018

Lini bisnis utama WIKA adalah di bidang konstruksi. Dalam mengerjakan proyek konstruksi, terdapat potensi risiko-risiko terkait kondisi sosial masyarakat yang mungkin bersinggungan dengan kegiatan proyek. Salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini adalah masih tingginya tingkat pengangguran di daerah-daerah tertentu. Bisa jadi, jika pengangguran cukup banyak di area sekitar proyek, hal ini akan memicu meningkatnya premanisme dan juga kriminalitas seperti pencurian yang tentu saja bisa menjadi ancaman bagi proyek. Untuk mencegah hal tersebut, Tim Proyek WIKA biasanya akan berkoordinasi dengan Kepolisian setempat dalam hal pengamanan area proyek dan sekitarnya. Selain itu juga, Tim Proyek WIKA akan merangkul perangkat Desa dan juga Karang Taruna agar mereka dapat membantu memberikan saran terbaik mengenai solusi masalah tersebut. Salah satu cara yang digunakan untuk mencegah timbulnya masalah sosial terkait pengangguran dan premanisme, Tim Proyek biasanya memberi mereka pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan khusus misalnya kuli angkut dan tukang bersih-bersih. Akan tetapi, ada juga yang diberikan pelatihan dulu baru dipekerjakan di proyek seperti petugas jaga lalu lintas kendaraan proyek, bagian keamanan, hingga tukang las dan lain-lain.

Kepedulian Tim Proyek WIKA terhadap masyarakat sekitar tidak hanya bertujuan untuk mencegah masalah sosial, namun juga untuk memberdayakan masyarakat di sekitar proyek. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyediakan fasilitas bertani dengan metode hidroponik dan juga berwirausaha dengan membangun usaha pencucian mobil. Untuk peralatan hidroponik, warga membuatnya dari pipa yang berasal dari sisa pekerjaan proyek. Sedangkan untuk usaha pencucian mobil, Tim Proyek membantu memberikan peralatan-peralatan yang dibutuhkan agar masyarakat sekitar dapat mandiri dan melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Dalam hal ini, Tim Proyek ini selalu berupaya untuk mendekatkan diri melalui cara-cara persuasif agar proyek dapat berjalan lancar serta memberikan perubahan positif.

TARGET KEGIATAN

- Melaksanakan kegiatan PKBL sesuai ketentuan yang berlaku
- Menyalurkan dana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan tepat sasaran
- Pengentasan kemiskinan sesuai dengan visi SDGs ke-1
- Penyediaan air bersih dan sanitasi sesuai dengan visi SDGs ke-6
- Menciptakan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan visi SDGs ke-8

BIAYA YANG DIKELUARKAN

Sepanjang tahun 2018, WKA mengeluarkan biaya sebesar Rp21,32 miliar untuk kegiatan penyaluran Program Kemitraan, sedangkan untuk penyaluran Bina Lingkungan sebesar Rp20,23 miliar. Adapun rincian mengenai dana penyaluran kegiatan CSR terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut.

Tabel Biaya Penyaluran Program Kemitraan

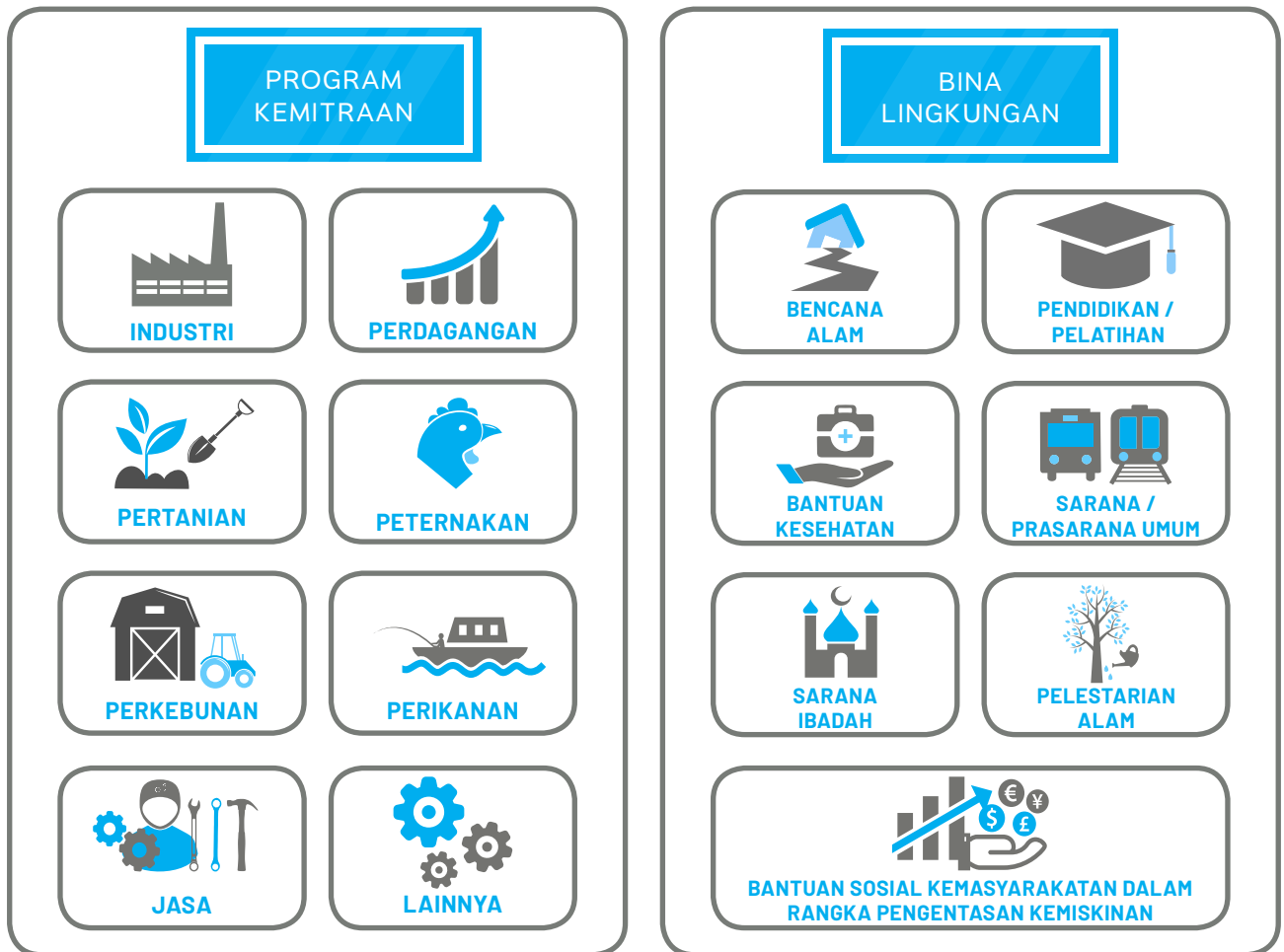
KATEGORI KEGIATAN	BIAYA PELAKSANAAN (RUPIAH PENUH)		PERTUMBUHAN (%)
	2018	2017	
Sektor Industri	-	85.000.000	(100)
Sektor Perdagangan	1.781.000.000	3.200.000.000	(44,34)
Sektor Pertanian	550.000.000	-	100
Sektor Perkebunan	-	-	-
Sektor Peternakan	-	-	-
Sektor Perikanan	90.000.000	50.000.000	80
Sektor Jasa	18.645.200.000	12.227.250.000	52
Sektor Lainnya	-	-	-
Pembinaan Kemitraan	252.268.420	133.000.000	90
TOTAL	21.318.468.420	15.695.250.000	36

Tabel Biaya Penyaluran Bina Lingkungan

KATEGORI KEGIATAN	BIAYA PELAKSANAAN (RUPIAH PENUH)		PERTUMBUHAN (%)
	2018	2017	
Bidang Bantuan Bencana Alam	1.057.203.183	80.455.000	1.214
Bidang Pendidikan dan/atau Pelatihan	8.314.697.868	3.666.586.320	127
Bidang Bantuan Kesehatan	368.615.800	824.675.117	(55)
Bidang Sarana dan Prasarana Umum	2.488.231.610	2.953.843.802	(16)
Bidang Sarana Ibadah	512.937.790	55.000.000	83,3
Bidang Pelestarian Lingkungan	257.530.050	250.465.703	3
Bidang Pengentasan Kemiskinan	7.228.039.382	7.113.082.361	(2)
TOTAL	20.227.255.683	14.944.108.303	35

KEGIATAN 2018

Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan



Sepanjang Tahun 2018, WIKA telah merealisasikan beberapa kegiatan terkait bina lingkungan antara lain seperti:

1. Siswa Mengenal Nusantara

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri yang diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian BUMN sejak tahun 2015. Pada tahun 2018, WIKA yang bertugas menjadi PIC, bekerja sama dengan BUMN-BUMN lain seperti AirNav Indonesia dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) selaku Co-PIC, menyelenggarakan SMN di Sulawesi Tengah pada tanggal 8-19 Agustus 2018. Dalam kegiatan SMN ini, WIKA-AirNav Indonesia-BKI menyeleksi dan mengirimkan 23 siswa Provinsi Sulawesi Tengah untuk berkegiatan SMN di Provinsi Bangka-Belitung. Sebaliknya, WIKA-AirNav Indonesia-BKI menerima 23 siswa Provinsi Bangka Belitung yang dikirim oleh Pelindo 2 untuk berkegiatan SMN di Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Natal Bersama Warga Palu

Kegiatan Natal Bersama ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri. Pada tahun 2018 WIKA Bersama dengan AirNav Indonesia, Biro Klasifikasi Indonesia dan PT Taspen menyelenggarakan kegiatan Natal Bersama di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan anak-anak yang



mayoritas di antaranya berasal dari beberapa Panti Asuhan di Kota Palu. Selain itu juga dalam acara Natal bersama ini WIKA dan Sinergi BUMN melibatkan tenaga kerja lokal untuk pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT). Rangkaian kegiatan Natal Bersama ini juga dilakukan pemberian bantuan ke beberapa Gereja yang terdampak bencana Gempa Bumi di Kota Palu.

3. Mudik Bersama

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, WIKA menyelenggarakan kegiatan Mudik Bersama. Kegiatan Mudik Bersama ini dilakukan dalam 2 bagian, yang pertama diperuntukkan bagi pihak eksternal dan yang kedua diperuntukkan bagi internal WIKA. Dalam kegiatan ini WIKA menyediakan beberapa armada bus dengan berbagai kota tujuan di Pulau Jawa.

4. Sembako Gratis Ramadhan

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan, WIKA memberikan paket sembako bagi *security, office boy/girl, cleaning service* yang bekerja di WIKA Tower. Program ini bertujuan untuk membantu meringankan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok yang cenderung menjadi lebih mahal di saat bulan Ramadhan.

Sedangkan untuk Program Kemitraan dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang dibina WIKA. Pemberian bantuan modal pada pelaku usaha kecil yang disebut mitra binaan, juga disertai dengan pelatihan, dan pendampingan manajemen dan pemasaran bagi mereka. Melalui mekanisme ini diharapkan mereka bisa mengembangkan usaha dengan lebih profesional sehingga meningkatkan omset serta keuntungan, dan mengembalikan pinjaman modal yang diterima. Pinjaman yang dikembalikan selanjutnya bisa dipinjamkan kembali secara bergulir kepada para pelaku usaha lain yang membutuhkan.

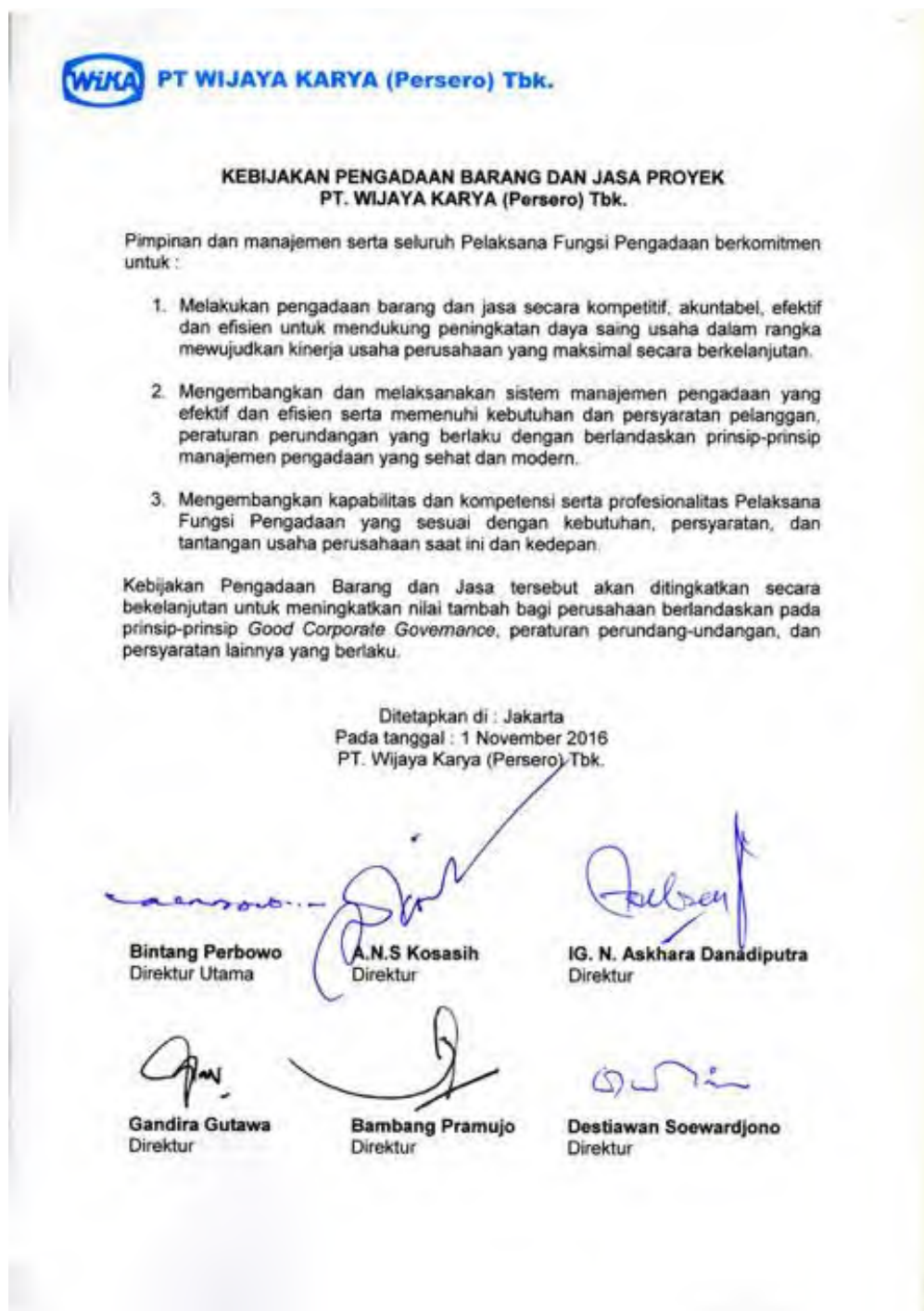
DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

1. Meningkatnya pengetahuan terkait pengembangan usaha bagi masyarakat sekitar dan mitra binaan WIKA
2. Meningkatkan omzet dan keuntungan melalui pelatihan dan pendampingan untuk pengembangan usaha
3. Peningkatan taraf hidup mitra binaan dan masyarakat sekitar
4. Jumlah mitra binaan meningkat dari 150 ke 178 di tahun 2018

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB KEPADA PEMASOK

KEBIJAKAN

Proses pengadaan barang dan jasa yang tertuang dalam prosedur No. WIK-DAN-QM-01.01 tanggal 1 November 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Proyek. Prosedur ini merupakan revisi dari prosedur sebelumnya No. WIK-DAN-KP-01.01 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Kebijakan Perusahaan fungsi Pengadaan.



TARGET KEGIATAN

- Agar seluruh proses pengadaan barang dan jasa terlaksana secara tertib administrasi, sesuai dengan prosedur dan peraturan pengadaan barang dan jasa di lingkungan WIKA.
- Agar seluruh proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan baik dan mendukung pencapaian target Perseroan.
- Menjaga tingkat kepuasan pemasok dengan baik dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kinerja Perseroan secara keseluruhan.

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP PEMASOK

1. Melaksanakan proses kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Adanya proses kualifikasi dan evaluasi kinerja vendor serta pembinaan.
3. Peningkatan penggunaan produksi barang/jasa dalam negeri (TKDN) yang sasarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing.
4. Pengadaan barang jasa dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
5. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa.
6. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di masing-masing unit kerja/biro sebagai proses transparansi kegiatan pengadaan.
7. Menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN CSR TERHADAP PEMASOK

1. Efektivitas proses pengadaan dapat tercapai, spesifikasi dan kebutuhan barang dan jasa untuk operasi tepat guna.
2. Efisiensi pengadaan dapat tercapai. Harga yang dikontrak merupakan harga terbaik. Dengan spesifikasi sesuai kebutuhan.
3. Kepatuhan proses kegiatan pengadaan yang sesuai prosedur dan peraturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya sanggah dan *rework* yang berdampak besar di lokasi pekerjaan/proyek.
4. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di sekitar lokasi proyek.
5. Pelaksanaan pengadaan tidak diskriminatif/adil sehingga memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.



REFERENSI KRITERIA PENILAIAN ANNUAL REPORT AWARD 2018

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
I. UMUM		
1.	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris.	✓
2.	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.	✓
3.	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas.	✓
4.	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.	✓
5.	Laporan tahunan ditampilkan di <i>website</i> perusahaan, mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir	✓
II. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING		12-23
1.	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi); a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.	12 12 12 12 12 12
2.	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.	15 15 16 16
3.	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.	18-19

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
4.	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik. 1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Jumlah saham yang beredar; b. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: - Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; - Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan - Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 2. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.	21 21 21 21 21-22 22
5.	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>); 2. Tingkat bunga/imbilan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2018. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.	23 23 23 23
III. LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI		34-49
1.	Laporan Dewan Komisaris. Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan <i>whistleblowing system</i> (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan 4. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada).	34-41 36-37 39 38 40
2.	Laporan Direksi. Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: a. kebijakan strategis b. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan c. kendala-kendala yang dihadapi perusahaan; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; 4. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada).	42-49 44-45 45-46 44-45 46-47 47 48-49
3.	Tanda tangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau: penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	50-51 ✓ ✓ ✓ N/A

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
IV. PROFIL PERUSAHAAN		52-157
1.	Nama dan alamat lengkap perusahaan yang memuat informasi antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. telp, no. Fax, e-mail, dan <i>website</i> .	54-55
2.	Riwayat singkat perusahaan. Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada) dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan	60-63 √
3.	Bidang usaha. Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	64-71 64 68-69 68-71
4.	Struktur Organisasi. Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi.	72-73
5.	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan. Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; dan 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah di <i>review</i> dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki perusahaan	74-76 74 74 74 75-76
6.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris. Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	78-87 √ √ √ √ √ √ √
7.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi. Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	88-97 √ √ √ √ √ √ √

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
8.	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan). Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	146-150 146 146 146 148-150 150
9.	Komposisi pemegang saham. Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.	108-110 108 109 109 110
10.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi dalam bentuk tabel. Informasi memuat antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan tentang status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	111-121 √ √ √ √
11.	Struktur grup perusahaan. Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i>, dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV).	122
12.	Kronologi penerbitan saham (termasuk <i>private placement</i>) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi; dan 3. Nama bursa di mana saham perusahaan dicatatkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.	123 √ √ √
13.	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalance efek lainnya dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.	124-125 √ √ √ √

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
14.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal. Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan penerbit efek.	126-127 127 126 127
15.	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional. Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi ; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	128-135 ✓ ✓ ✓ ✓
16.	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada). Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan agar diungkapkan.	136-144 ✓ ✓
17.	Informasi pada Website Perusahaan Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi kode etik 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir); dan 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi. 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	145 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
18.	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal. Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal yang diikuti pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan	152-159 152-153 153-156 157 157-158 158 158 159
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN		178-221
1.	Tinjauan operasi per segmen usaha. Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas.	185-188 185-187 188

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
2.	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan 5. Arus kas.	189-198 189-191 191-192 193-197 197-198
3.	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan. Penjelasan tentang: 1. Kemampuan membayar utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.	199-200 199 200
4.	Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>), dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>). Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang bunga/sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	201 ✓ ✓ ✓
5.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir, Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi, dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: Apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.	202-203
6.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir. Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: Apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal agar diungkapkan.	202-203 203 203 203
7.	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, struktur permodalan, atau lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	204 ✓ ✓
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: Apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.	206

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
9.	Uraian tentang prospek usaha perusahaan. Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	205
10.	Uraian tentang aspek pemasaran. Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.	207
11.	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. <i>Payout ratio</i>; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas untuk masing-masing tahun. Catatan: Apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.	209 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
12.	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP). Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga <i>exercise</i>. Catatan: Apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.	210 ✓ ✓ ✓ ✓
13.	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana). Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPU atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Catatan: Apabila tidak memiliki informasi realisasi dana penawaran umum, agar diungkapkan.	211 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
14.	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi. Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme <i>review</i> atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: Apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	212-213 213-215 212 212 215 212 212 218

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
14.	Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal. Memuat uraian mengenai: 1. Tujuan dilakukannya transaksi; 2. Nilai transaksi atau jumlah yang direstrukturisasi; dan 3. Sumber dana. Catatan: Apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.	208 ✓ ✓ ✓
15.	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir. Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan.	216 ✓ ✓
16.	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir. Uraian memuat antara lain: 1. perubahan kebijakan akuntansi 2. alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan.	217 ✓ ✓ ✓
17.	Informasi kelangsungan usaha Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. <i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i>. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.	218 ✓ ✓ ✓
VI. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK		222-408
1.	Uraian Dewan Komisaris. Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	258-288 258-260 278 258
2.	Uraian mengenai Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris). Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	270-273 270 271-273

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
3.	Uraian Direksi. Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada) 3. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru; 4. Pengungkapan mengenai <i>Board Charter</i> (pedoman dan tata tertib kerja Direksi); dan	289-313 289-292, 295-296 299 295 289
4.	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2018 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. 5. Prosedur pelaksanaan <i>assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; 6. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan <i>assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan 7. Pihak yang melakukan <i>assessment</i>. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2018, agar diungkapkan.	277-279, 298-301 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5.	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; dan 4. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi. 5. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.	314-317 314 314-315 316-317 317 315,317
6.	Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan), informasi memuat antara lain: Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	280-288, 306-313 ✓ ✓ ✓
7.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu. Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali. Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	380

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
8.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Catatan: Apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.	267-268, 302-303 √ √ √ √ √
9.	Komite Audit. Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	318-326 319-321 319-323 323 318-319 326 325-326
10.	Komite/Fungsi Nominasi dan Remunerasi. Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	327-333 328-330 331 327-328 332 332 333
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan. Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, riwayat hidup singkat dan periode jabatan anggota ; 2. Riwayat hidup singkat anggota komite lain; 3. Independensi anggota komite lain; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	333
12.	Uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan. Mencakup antara lain: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan; dan	335-336 336 336 335-336 336
13.	Uraian mengenai unit audit internal. Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal; dan 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal.	336-343 338 340 340 337 341 338

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
14.	Akuntan publik. Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir; dan 3. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.	334-345 ✓ ✓ ✓
15.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan. Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	346-349 347-348 349 349 349
16.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern. Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO - <i>internal control framework</i>); dan 3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	350-354 350-351 350 354
17	Uraian mengenai Corporate Social Responsibility yang terkait tata kelola tanggung jawab sosial 1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial 2. Informasi mengenai metode dan lingkup <i>due diligent</i> terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktivitas perusahaan 3. Informasi tentang <i>stakeholder</i> penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan 4. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan 5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban 6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya <i>stakeholders engagement</i> dan meningkatkan <i>value</i> untuk <i>stakeholder</i> dan <i>shareholder</i> 7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan 8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial	384-390 385-386 386-387 387 387-388 388 388-390 390 390
18	Uraian mengenai Corporate Social Responsibility yang terkait <i>core subject</i> Hak Asasi Manusia 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Asasi Manusia 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Hak Asasi Manusia 3. Informasi tentang perencanaan Corporate Social Responsibility bidang Hak Asasi Manusia 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Asasi Manusia	391 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
19	Uraian mengenai Corporate Social Responsibility yang terkait <i>core subject</i> Operasi yang adil 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial <i>core subject</i> Operasi yang adil 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial <i>core subject</i> operasi yang adil 3. Informasi tentang perencanaan Corporate Social Responsibility bidang operasi yang adil 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil	392-393 392 392 392 392 392-393

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
20.	Uraian mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i> yang terkait dengan lingkungan hidup. Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan 2. Informasi tentang dampak dan risiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan 3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen 4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan 5. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup 6. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 7. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	394-395 394 394 394-395 394-395 395 395
21.	Uraian mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i> yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> ketenagakerjaan 2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan 3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; dan 4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut 5. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat <i>turnover</i> karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	396-401 396 397-399 396 397-401 397-399
22.	Uraian mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i> yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen. Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut 3. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	402-404 402 402-404 402-404
23.	Uraian mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i> yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan <i>core subject</i> pengembangan sosial dan kemasyarakatan 2. Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan 3. Informasi tentang risiko sosial yang dikelola perusahaan 4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan 5. Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; 6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 7. Biaya yang dikeluarkan 8. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	405-408 405 405 405 405 405 407-408 405 407-408

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
24.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan. Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; dan 4. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 5. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada entitas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: Dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.	356 √ √ √ √ √
25.	Akses informasi dan data perusahaan. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	358-359
26.	Bahasan mengenai kode etik. Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan. 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	360 360 361 361 361
27.	Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i>. Memuat uraian tentang mekanisme <i>whistleblowing system</i> antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi <i>whistleblower</i>; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya. 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	366-367 366 366 367 367 367 367
28.	Kebijakan mengenai keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: Apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.	264-266, 296-297
VII. INFORMASI KEUANGAN		
1.	Surat pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan keuangan. Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang tanggung jawab atas laporan keuangan.	√
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan.	√

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
3.	Deskripsi auditor independen di opini. Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal laporan audit; dan 3. Nomor izin KAP dan nomor izin akuntan publik.	√
4.	Laporan keuangan yang lengkap. Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi komprehensif; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; dan 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	Lampiran hal. 1-5 √ √ √ √ √ √
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas. Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.	√
6.	Laporan arus kas. Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan/atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	Lampiran hal. 5
7.	Ikhtisar kebijakan akuntansi. Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan dan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pengakuan pendapatan dan beban; 4. Pajak penghasilan; 5. Imbalan kerja; dan 6. Instrumen keuangan.	Lampiran hal. 16-17
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi. Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.	Lampiran hal. 158-163

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan. Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	Lampiran hal. 125-127
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap. Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	Lampiran hal. 31-32
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi. Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	Lampiran hal. 49
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan instrumen keuangan. Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	Lampiran hal. 173-179
13.	Penerbitan laporan keuangan. Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	√

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
III. LAPORAN DIREKSI LAPORAN DIREKSI PALING SEDIKIT MEMUAT:		
1.	Uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi: a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; b. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.	44-45 √ √ √
2.	Gambaran tentang prospek usaha.	46-47
3.	Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan	47-48
4.	Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada).	48-49
IV. LAPORAN DEWAN KOMISARIS LAPORAN DEWAN KOMISARIS PALING SEDIKIT MEMUAT:		
1.	Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik.	36-37
2.	Pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik.	37
3.	Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi.	39
4.	Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	39
5.	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	37-38
6.	Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.	38-39
V. PROFIL EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK PROFIL EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK PALING SEDIKIT MEMUAT:		
1.	Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku.	54-63
2.	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: a. Alamat; b. Nomor telepon; c. Nomor faksimile; d. Alamat surat elektronik; dan e. Alamat Situs Web;	54-55
3.	Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik.	60-63
4.	Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik.	74
5.	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan.	64-71
6.	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan.	72-73

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
7.	Profil Direksi, paling sedikit memuat: a. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; b. Foto terbaru; c. Usia; d. Kewarganegaraan; e. Riwayat pendidikan; f. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; 2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan 3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; g. Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan h. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi;	88-97
8.	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a. Nama; b. Foto terbaru; c. Usia; d. Kewarganegaraan; e. Riwayat pendidikan; f. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; 2) dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; 3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan 4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; g. Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); h. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; dan i. Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);	78-87
9.	Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya.	√
10.	Jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku.	146-150
11.	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari: a. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan c. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;	108-110
12.	Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: a. Kepemilikan institusi lokal; b. Kepemilikan institusi asing; c. Kepemilikan individu lokal; dan d. Kepemilikan individu asing;	108-109
13.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan.	122

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
14.	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama di mana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada); Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	111-121
15.	Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek di mana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada).	123
16.	Kronologi pencatatan Efek lainnya selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 15, yang paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada).	124-125
17.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal.	126-127
18.	Dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan; dan	126-127
19.	Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat: a. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; b. Badan atau lembaga yang memberikan; dan c. Masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada).	128-135
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MEMUAT ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI PENTING LAINNYA DENGAN PENEKANAN PADA PERUBAHAN MATERIAL YANG TERJADI DALAM TAHUN BUKU, YAITU PALING SEDIKIT MEMUAT:		
1.	Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; b. Pendapatan/penjualan; dan c. Profitabilitas.	185-188
2.	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; c. Ekuitas; d. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan e. Arus kas.	189-198
3.	Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	199
4.	Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan.	200
5.	Struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure</i>) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud.	201
6.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi: a. Tujuan dari ikatan tersebut; b. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; c. Mata uang yang menjadi denominasi; dan d. Langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	202-203

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
7.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi: a. Jenis investasi barang modal; b. Tujuan investasi barang modal; dan c. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	202-203
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada).	206
9.	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	205
10.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: a. Pendapatan/penjualan; b. Laba (rugi); c. Struktur modal (<i>capital structure</i>); atau d. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	204
11.	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: a. Pendapatan/penjualan; b. Laba (rugi); c. Struktur modal (<i>capital structure</i>); d. Kebijakan dividen; atau e. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	205
12.	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	207
13.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit: a. Kebijakan dividen; b. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; c. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan d. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	209
14.	Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan: a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.	211
15.	Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat: a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi; b. Nama pihak yang bertransaksi; c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada); d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan e. Pemenuhan ketentuan terkait	208
16.	Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	216
17.	Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	217

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
VII. TATA KELOLA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TATA KELOLA EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK PALING SEDIKIT MEMUAT URAIAN SINGKAT MENGENAI:		
1.	Direksi, mencakup antara lain: a. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; b. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi; c. Prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik; d. Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut; e. Informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi: 1) keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan 2) alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; f. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi: 1) keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan 2) alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan g. Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi;	298-313
2.	Dewan Komisaris, mencakup antara lain: a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris; c. Prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris; d. Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut; e. Kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi: 1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; 2) Kriteria yang digunakan; dan 3) Pihak yang melakukan penilaian; f. Penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan g. Dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai: 1) Alasan tidak dibentuknya komite; dan 2) Prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku;	258-288
3.	Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: a. Nama; b. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan c. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	N/A
3.	Komite Audit, mencakup antara lain: a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b. Usia; c. Kewarganegaraan; d. Riwayat pendidikan; e. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; 2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan 3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f. Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit; g. Pernyataan independensi Komite Audit; h. Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut; i. Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan j. Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Komite Audit;	318-326

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
5.	Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, yang mencakup antara lain: a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b. Usia; c. Kewarganegaraan; d. Riwayat pendidikan; e. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; 2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan 3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f. Periode dan masa jabatan anggota komite; g. Uraian tugas dan tanggung jawab; h. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite; i. Pernyataan independensi komite; j. Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; k. Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan l. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	333
6.	Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain: a. Nama; b. Domisili; c. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 1) dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan 2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; d. Riwayat pendidikan; e. Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan f. Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	335-336
7.	Unit Audit Internal, mencakup antara lain: a. Nama kepala Unit Audit Internal; b. Riwayat jabatan, meliputi informasi: 1) dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal; dan 2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; c. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); d. Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; e. Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal; f. Uraian tugas dan tanggung jawab; g. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Unit Audit Internal; dan h. Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;	336-343
8.	Uraian mengenai sistem pengendalian internal (<i>internal control</i>) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan b. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	350-354
9.	Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; b. Jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan c. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	346-349
10.	Perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi: a. Pokok perkara/gugatan; b. Status penyelesaian perkara/gugatan; dan c. Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	356
11.	Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku terakhir (jika ada);	356

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
12.	Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: a. Pokok-pokok kode etik; b. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan c. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	360-365
13.	Informasi mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) atau nilai-nilai perusahaan (jika ada);	75-76
14.	Uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain mengenai: a. Jumlah saham dan/atau opsi; b. Jangka waktu pelaksanaan; c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d. Harga pelaksanaan;	210
15.	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi: a. Cara penyampaian laporan pelanggaran; b. Perlindungan bagi pelapor; c. Penanganan pengaduan; d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan e. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi: 1) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan 2) Tindak lanjut pengaduan;	366-367
16.	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: a. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau b. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	231-241
VIII. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK		
1.	Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek: a. Lingkungan hidup, antara lain: 1) penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang; 2) sistem pengolahan limbah Emiten atau Perusahaan Publik; 3) mekanisme pengaduan masalah lingkungan; dan 4) sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki; b. Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain: 1) kesetaraan gender dan kesempatan kerja; 2) sarana dan keselamatan kerja; 3) tingkat perpindahan (<i>turnover</i>) karyawan; 4) tingkat kecelakaan kerja; 5) pendidikan dan/atau pelatihan; 6) remunerasi; dan 7) mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan;	394-395 396-401

MATERI & PENJELASAN		HALAMAN
	c. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain: 1) penggunaan tenaga kerja lokal; 2) pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten atau Perusahaan Publik antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi; 3) perbaikan sarana dan prasarana sosial; 4) bentuk donasi lainnya; dan 5) komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di Emiten atau Perusahaan Publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada);	405-408
	d. Tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain: 1) kesehatan dan keselamatan konsumen; 2) informasi barang dan/atau jasa; dan 3) sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen.	402-404
2.	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (<i>sustainability report</i>), Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan; dan	√
3.	Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	√
IX. LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN YANG TELAH DIAUDIT		
1.	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan	√
X. SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN		
1.	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	50-51



LAPORAN KEUANGAN



Pabrik Minyak Goreng Sei Mangke



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES

Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017/

Consolidated Financial Statements for the Years Ended
December 31, 2018 and 2017

Daftar Isi	Halaman/ Pages	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		Directors' Statement Letter
Laporan Auditor Independen		Independent Auditor's Report
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017		Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2018 and 2017
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	Consolidated Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	Consolidated Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	Consolidated Statements of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	Notes to Consolidated Financial Statements
Informasi Tambahan:		Supplementary Information:
Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk	Lampiran 1/ Attachment 1	Statements of Financial Position of Parent Entity
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk	Lampiran 3/ Attachment 3	Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income of Parent Entity
Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk	Lampiran 4/ Attachment 4	Statements of Changes in Equity of Parent Entity
Laporan Arus Kas Entitas Induk	Lampiran 5/ Attachment 5	Statements of Cash Flows of Parent Entity
Pengungkapan Lainnya	Lampiran 6/ Attachment 6	Other Disclosures

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2018 AND DECEMBER 31, 2017
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2018 AND 2017**

**PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (Perusahaan)
DAN ENTITAS ANAK**

**PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (The Company)
AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

We are undersigned

Nama : **Tumiyana** :
Alamat Kantor : Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta Timur 13340 :
Nomor Telepon : 021-8192808 :
Alamat Domisili : Jl. Buni Gg. Salak RT 11 RW 004 :
Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur
13850

Name
Office Address
Phone Number
Domicile Address

Jabatan : **Direktur Utama / President Director** :

Position

Nama : **Novel Arsyad** :
Alamat Kantor : Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta Timur 13340 :
Nomor Telepon : 021-8192808 :
Alamat Domisili : Jl. Petamburan IV/10 RT 005 RW 005 :
Petamburan, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10260

Name
Office Address
Phone Number
Domicile Address

Jabatan : **Direktur / Director** :

Position

Menyatakan bahwa :

State that :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
2. Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar ;

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.*
2. *The financial statements have been prepared and presented in accordance with financial accounting standard in Indonesian*
3. a. *All information contained in the company's financial statements are complete and correct*

b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material

b. The financial statements do not contain misleading material information or facts, do not omit material information and facts

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan

4. We are responsible for the company's internal control system.

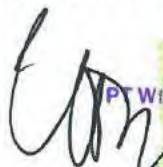
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

This statements letter is made truthfully

Jakarta, 8 Maret 2019/ March 8, 2019

**Direktur Utama /
President Director**

**Direktur /
Director**


Tumiyana




Novel Arsyad

**RSM**

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/Number : 00208/2.1030/AU.1/03/0501-1/1/III/2019

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2018, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

- Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan atas investasi pada entitas anak (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2018 and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

- Our audit of the accompanying consolidated financial statements of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2018 and for the year then ended was performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Parent Entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2018 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and other disclosures of investments on subsidiaries (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the above-mentioned consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the above-mentioned consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity

Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the above-mentioned consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the above-mentioned consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the above-mentioned consolidated financial statements taken as a whole.

- Sebagaimana di ungkapkan dalam Catatan 57, beberapa akun dalam laporan posisi keuangan telah direklasifikasi yang menyebabkan laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2017/31 Desember 2016 disajikan pada laporan posisi keuangan terlampir, sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- As described in Note 57, some accounts in the statement of financial position has been reclassified which caused the statement of financial position as of January 1, 2017/December 31, 2016 is presented on the accompanying financial statements, as required by Indonesian Financial Accounting Standards.
- Laporan keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 27 Februari 2018.
- The financial statements of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries for the year ended December 31, 2017, were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on those statements on February 27, 2018.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Rudi Hartono Purba

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0501/
Public Accountant License Number: AP.0501

Jakarta, 8 Maret/March 8, 2019

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Per 31 Desember 2018, 2017 dan
1 Januari 2017/31 Desember 2016
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2018, 2017 and
January 1, 2017/December 31, 2016
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	1 Jan 2017/ 31 Des 2016/ Jan 1, 2017 Dec 31, 2016	
		Rp	Rp	Rp	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	4, 48, 54	13,973,766,477	11,253,778,215	9,269,999,584	Cash and Cash Equivalents
Deposito Yang Dibatasi Penggunaannya	4, 54	20,000,000	20,100,000	--	Restricted Deposit
Piutang Usaha - Neto	5, 48, 54				Trade Account Receivables - Net
Bagian Lancar					Current Portion
Pihak Berelasi	50	2,745,540,433	3,000,643,116	1,195,435,762	Related Parties
Pihak Ketiga		2,605,300,003	1,929,510,016	2,555,662,357	Third Parties
Piutang Retensi - Neto	6, 48, 54				Retention Receivables - Net
Pihak Berelasi	50	677,642,045	348,167,986	230,315,881	Related Parties
Pihak Ketiga		1,246,488,344	979,998,517	556,569,838	Third Parties
Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Neto	7				Gross Amount Due From Customers - Net
Pihak Berelasi	50	5,565,798,797	5,826,664,167	1,763,089,366	Related Parties
Pihak Ketiga		4,336,247,938	3,434,294,927	2,207,768,831	Third Parties
Piutang Yang Belum Ditagih -					Unbilled Receivables -
Bagian Lancar	8, 54	924,845,767	592,563,302	349,559,336	Current Portion
Piutang Lain-Lain - Bagian Lancar	9, 54				Other Receivables - Current Portion
Pihak Berelasi	50	1,420,649,920	170,978,921	139,086,756	Related Parties
Pihak Ketiga		58,488,669	133,988,030	77,931,227	Third Parties
Persediaan	10	5,978,533,161	3,839,540,301	3,182,130,677	Inventories
Uang Muka - Bagian Lancar	11	1,487,325,514	1,180,612,848	627,823,946	Advances - Current Portion
Pajak Dibayar di Muka	27.a	1,615,704,032	1,298,271,722	757,785,883	Prepaid Taxes
Biaya Dibayar di Muka - Bagian Lancar	12	735,419,058	702,804,644	595,314,817	Prepaid Expense - Current Portion
Jaminan Usaha - Bagian Lancar	13, 54	105,100,463	88,042,632	33,211,810	Business Guarantee - Current Portion
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi					Financial Assets from Concession
Bagian Lancar	15	58,645,244	110,148,921	110,148,921	Projects - Current Portion
TOTAL ASET LANCAR		43,555,495,865	34,910,108,265	23,651,834,992	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Piutang Usaha -					Trade Account Receivables -
Bagian Tidak Lancar	5, 54				Non Current Portion
Pihak Ketiga		1,719,973	4,657,606	184,873,545	Third Parties
Piutang lain-lain -					Other Receivables -
Bagian Tidak Lancar	9, 54				Non Current Portion
Pihak Berelasi	50	3,984,331,159	1,211,412,309	285,000,000	Related Parties
Pihak Ketiga		14,617,480	5,324,891	--	Third Parties
Piutang yang belum ditagih -					Unbilled Receivable -
Bagian Tidak Lancar	8, 54	444,232,429	114,576,313	34,645,312	Non Current Portion
Uang Muka - Bagian Tidak Lancar	11	280,000,000	247,857,941	148,763,335	Advances - Non Current Portion
Biaya Dibayar di Muka -					Prepaid Expense -
Bagian Tidak Lancar	12	--	354,297,694	--	Non Current Portion
Jaminan Usaha -					Business Guarantee -
Bagian Tidak Lancar	13, 54	--	172,513,482	179,184,563	Non Current Portion
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi -					Financial Assets from Concession
Bagian Tidak Lancar	15, 54	--	58,645,244	168,794,166	Projects - Non Current Portion
Aset Real Estat	14	711,009,859	512,182,215	258,905,609	Real Estate Assets
Investasi Pada Entitas Asosiasi	16	727,823,591	396,918,845	330,174,029	Investment in Associates
Investasi Pada Ventura Bersama	17	1,813,165,802	2,812,600,560	2,114,559,007	Investment in Joint Venture
Properti Investasi - Neto	18	1,593,674,779	538,548,500	461,185,251	Investment Property
Aset Tetap - Neto	19	4,675,679,014	3,932,108,696	3,324,669,312	Fixed Assets - Net
Goodwill	20	4,847,052	4,847,052	4,847,052	Goodwill - Net
Investasi Jangka Panjang Lainnya	21, 54	559,267,882	116,658,458	89,450,795	Other Long Term Investments
Aset Takberwujud	22	714,353,513	139,077,296	--	Intangible assets
Aset Pajak Tangguhan	27.d	31,437,295	25,699,803	18,229,018	Deferred Tax Assets
Aset Lain-Lain	23, 54	118,345,546	125,739,132	100,088,704	Other Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		15,674,505,374	10,773,666,037	7,703,369,698	Total Non- Current Assets
JUMLAH ASET		59,230,001,239	45,683,774,302	31,355,204,690	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Per 31 Desember 2018, 2017 dan
1 Januari 2017/31 Desember 2016
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)**
As of December 31, 2018, 2017 and
January 1, 2017/December 31, 2016
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Des 2018/ Dec 31, 2018	31 Des 2017/ Dec 31, 2017	1 Jan 2017/ 31 Des 2016/ Jan 1, 2017 Dec 31, 2016	
		Rp	Rp	Rp	
LIABILITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Pinjaman Jangka Pendek	24, 54				Short Term Loans
Pihak Berelasi	50	1,663,039,321	2,974,410,303	1,959,410,812	Related Parties
Pihak Ketiga		2,536,992,008	3,449,443,672	2,752,415,707	Third Parties
Utang Usaha	25, 54				Trade Payables
Pihak Berelasi	50	176,597,892	139,182,504	68,179,539	Related Parties
Pihak Ketiga		13,006,775,938	8,785,803,858	4,459,255,102	Third Parties
Utang Lain-Lain	26, 54				Other Payables
Pihak Berelasi	50	--	16,879,560	--	Related Parties
Pihak Ketiga		29,816,535	248,574,924	238,762,353	Third Parties
Kewajiban Bruto Pemberi Kerja		9,705,502	--	--	Due to Customer
Utang Pajak	27.b	467,488,448	441,631,879	188,857,241	Tax Payable
Uang Muka dari Pelanggan	28	1,233,776,339	1,442,187,701	767,675,536	Advances Received From Customers
Beban Akrua	29, 54	8,634,099,492	7,805,962,536	3,247,437,280	Accrued Expenses
Pendapatan Diterima Dimuka	30	196,987,012	188,856,055	125,127,130	Unearned Revenue
Bagian Jangka Pendek dari					Short Term Portion of
Pinjaman Jangka Menengah	31, 54	250,000,000	175,000,000	800,000,000	Medium Term Notes
Utang Sewa Pembiayaan	34, 54	37,299,977	41,259,887	18,772,830	Lease Payables
Pinjaman Jangka Panjang	35, 48, 54	9,372,921	266,424,418	283,123,166	Long Term Loan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		28,251,951,385	25,975,617,297	14,909,016,696	Total Short Term Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					LONG TERM LIABILITIES
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	32	178,708,069	337,172,202	243,072,993	Employee Benefits Liabilities
Liabilitas Pajak Tangguhan	27.d	140,226,300	45,890,326	46,147,721	Deferred Tax Liabilities
Uang Muka Proyek	33	3,644,322,003	2,477,316,688	2,327,873,112	Advances for Long Term Projects
Utang Lain-Lain	26, 54	707,321,016	107,894,953	159,520,193	Other Payables non current portion
Bagian Jangka Panjang Setelah					Long Term Portion
Dikurangi Bagian Jangka Pendek					Net of Short Term Portion
Pinjaman Jangka Menengah	31, 54	6,084,622,512	1,000,000,000	425,000,000	Medium Term Notes
Utang Sewa Pembiayaan	34, 54	213,628,754	96,849,868	52,064,738	Lease Payables
Pinjaman Jangka Panjang	35, 48, 54	2,793,906,635	1,011,208,355	454,519,946	Long Term Loan
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		13,762,735,289	5,076,332,392	3,708,198,703	Total Long Term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		42,014,686,674	31,051,949,689	18,617,215,399	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan					Equity Attributable To Owners
kepada Pemilik Entitas Induk					of Parent Entity
Modal Saham					Share Capital
Nilai Nominal: Rp100 (nilai penuh)					Par Value: Rp100 (full amount)
per Saham					per Share
Modal Dasar - 35.000.000.000 Saham					Authorized Capital - 35,000,000,000 Shares
Modal Ditempatkan dan Disetor					Issued and Fully Paid-Up -
Penuh - 8.969.951.372 Saham	36	896,995,137	896,995,137	896,995,137	8,969,951,372 Share
Modal Saham Diperoleh Kembali	37	(10,272,110)	(10,272,110)	(10,272,110)	Treasury Stock
Tambahan Modal Disetor	38	6,555,720,677	6,555,720,677	6,555,720,677	Additional Paid-In Capital
Perubahan Ekuitas Entitas Anak		1,283,644,636	1,330,850,680	997,335,383	Changes in Equity of Subsidiaries
Surat Berharga Perpetual	39	597,600,000	--	--	Perpetual Securities
Saldo Laba		5,479,925,961	3,860,221,964	3,005,085,913	Retained Earnings
Sub Total		14,803,614,301	12,633,516,348	11,444,865,000	Sub Total
Kepentingan Non Pengendali	42	2,411,700,264	1,998,308,265	1,293,124,291	Non Controlling Interest
Total Ekuitas		17,215,314,565	14,631,824,613	12,737,989,291	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		59,230,001,239	45,683,774,302	31,355,204,690	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2018 Rp	2017 Rp	
PENDAPATAN BERSIH	43	31,158,193,498	26,176,403,026	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	44	(27,553,466,348)	(23,300,168,938)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		3,604,727,150	2,876,234,088	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban Penjualan	45	(10,445,343)	(9,958,720)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	46	(775,299,502)	(666,714,154)	General and Administrative Expenses
Pendapatan Lain-lain	47	1,122,197,667	416,734,338	Other Income
Beban Lain-lain	47	(106,482,566)	(295,507,893)	Other Expenses
Laba Usaha		3,834,697,406	2,320,787,659	Operating Profit
Beban dari Pendanaan		(972,528,679)	(677,973,460)	Finance Cost
Beban Pajak Penghasilan Final		(726,942,503)	(629,479,208)	Final Income Tax Expenses
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	16	(309,628,664)	(123,644,382)	Loss from Associated Entity
Bagian Laba Entitas Ventura Bersama	17	533,031,374	572,700,749	Share in Profit of Joint Venturer
		(1,476,068,472)	(858,396,301)	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		2,358,628,934	1,462,391,358	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban Pajak Penghasilan	27	(285,329,070)	(106,275,869)	Income Tax Expense
LABA NETO		2,073,299,864	1,356,115,489	NET INCOME
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK				OTHER COMPREHENSIVE INCOME AFTER TAX
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi: Keuntungan (Kerugian) aktuarial Atas Program Imbal kerja Pasti		140,243,105	(47,649,429)	Other Comprehensive Income that Will not be Reclassified Subsequently to Profit or Loss Actuarial Gain (Loss) Defined Benefit Plan
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2,213,542,969	1,308,466,060	OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KE:				INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		1,730,256,243	1,202,069,175	Owner of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	42	343,043,621	154,046,314	Non Controlling Interest
JUMLAH		2,073,299,864	1,356,115,489	TOTAL
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk		1,860,117,752	1,158,684,399	Owner of Parent Entity
Kepentingan Non Pengendali	42	353,425,217	149,781,661	Non Controlling Interest
TOTAL		2,213,542,969	1,308,466,060	TOTAL
Laba Bersih Per Saham Dasar (Nilai Penuh)		193.02	134.10	Earnings per Share (Full Amount)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES**

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Saham Diperoleh Full Paid Capital	Modal Saham/ Diperoleh Treasury Stock	Tambahan Modal Additional Paid in Capital	Perubahan Ekuitas Entitas Anak Change in Equity of Subsidiaries	Surat Berharga Perpetual Securities	Cadangan Lainnya/ Other Reserves	Saldo Laba / Retained Earnings		Jumlah / Total	Kepentingan Non Pengendali Non Controlling Interest	Total Ekuitas / Total Equity
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Cadangan General Reserves	Saldo Laba yang belum ditentukan Unappropriated Retained Earnings	Rp	Rp	Rp
SALDO PER 1 JANUARI 2017	896.995.137	(10.272.110)	6.555.720.677	997.335.383	--	892.265.556	234.577.185	1.878.240.172	11.444.855.000	1.293.124.291	12.737.989.291
Kepentingan Non Pengendali pada Pendirian Entitas Anak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	70.487.450	70.487.450
Kepentingan Non Pengendali pada Akuisisi Entitas Anak	--	--	--	333.515.297	--	--	--	--	333.515.297	9.273.112	9.273.112
Perubahan Ekuitas Entitas Anak	--	--	--	--	--	--	--	--	(303.548.348)	516.746.467	850.281.764
Dividen	--	--	--	--	--	--	101.182.772	(303.548.348)	1.202.069.175	(41.104.716)	(344.653.064)
Cadangan Wajib	--	--	--	--	--	--	--	1.202.069.175	--	--	--
Labas Tahun Berjalan Neto	--	--	--	--	--	--	--	(43.384.776)	1.202.069.175	154.046.314	1.356.115.489
Penghasilan komprehensif lain	--	--	--	--	--	--	--	--	(43.384.776)	(4.264.653)	(47.649.429)
SALDO PER 31 DESEMBER 2017	896.995.137	(10.272.110)	6.555.720.677	1.330.850.680	--	892.265.556	335.759.957	2.632.193.451	12.633.516.348	1.896.308.205	14.631.824.615
Surat Berharga Perpetual	--	--	--	--	597.600.000	--	--	--	597.600.000	--	597.600.000
Setoran Modal Entitas Anak	--	--	--	(47.206.044)	--	--	--	--	(47.206.044)	122.701.023	75.494.979
Dividen	--	--	--	--	--	--	--	(240.413.755)	(240.413.755)	(62.734.241)	(303.147.996)
Labas Tahun Berjalan Neto	--	--	--	--	--	--	--	1.730.256.243	1.730.256.243	343.043.621	2.073.299.864
Penghasilan komprehensif lain	--	--	--	--	--	--	--	129.861.509	129.861.509	10.381.596	140.243.105
SALDO PER 31 DESEMBER 2018	896.995.137	(10.272.110)	6.555.720.677	1.283.644.636	597.600.000	892.265.556	335.759.957	4.251.897.448	14.803.514.301	2.411.700.264	17.215.314.565

BALANCE AS OF JANUARY 1, 2017

Non Controlling Interest of
Newly Established Subsidiary
Non Controlling Interest of
Acquisition of Subsidiaries
Changes in Equity of Subsidiaries
Dividends
Reserve Fund
Net Income for the Current Year
Other Comprehensive Income

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2017

Perpetual Securities
Paid in Capital of Subsidiaries
Dividends
Net Income for the Current Year
Other Comprehensive Income

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2018

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
consolidated financial statements

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOWS**
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018 Rp	2017 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Kas dari Pelanggan	30,459,048,620	19,893,353,206
Pembayaran Kepada Pemasok	(24,309,687,898)	(15,712,412,482)
Pembayaran Kepada Direksi dan Karyawan	(1,508,334,970)	(1,129,902,318)
Penerimaan Bunga	311,434,815	161,892,298
Pembayaran Bunga Pinjaman	(998,921,933)	(677,973,460)
Pembayaran Pajak-pajak	(1,231,007,415)	(649,705,078)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>2,722,531,219</u>	<u>1,885,252,166</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan Aset Tak Berwujud	(584,588,901)	(13,074,442)
Penurunan (Kenaikan) Jaminan Usaha	176,584,227	(48,159,741)
Kenaikan Uang Muka Pembelian Tanah	--	(123,181,277)
Pembelian Aset Tetap	(1,247,565,871)	(996,772,993)
Arus Kas Keluar Bersih		
Pada Saat Akuisisi Entitas Anak	--	(74,927,036)
Kenaikan Properti Investasi	(666,185,287)	(15,455,962)
Kenaikan Deposito Yang Dibatasi Penggunaannya	--	(20,100,000)
Penempatan Saham Pada Entitas Asosiasi	(640,533,410)	(241,265,600)
Kenaikan Pinjaman Jangka Panjang		
kepada Entitas Asosiasi	(2,772,918,850)	(926,412,309)
Kenaikan Investasi Ventura Bersama	1,532,466,132	(125,340,804)
Uang Muka Investasi	(280,000,000)	--
Penurunan (Kenaikan) Aset Lain-Lain	7,393,586	(25,650,428)
Kenaikan Investasi Lainnya	(442,609,424)	(27,207,663)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>(4,917,957,798)</u>	<u>(2,637,548,255)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pinjaman Jangka Pendek		
Penerimaan Pinjaman	18,526,690,556	11,566,717,053
Pembayaran Pinjaman	(20,750,513,202)	(9,854,689,597)
Pinjaman Jangka Menengah		
Penerimaan Pinjaman	--	750,000,000
Pembayaran Pinjaman	(175,000,000)	(800,000,000)
Pinjaman Jangka Panjang		
Penerimaan Pinjaman	1,554,192,497	1,100,715,239
Pembayaran Pinjaman	(28,545,714)	(560,725,578)
Pinjaman Jangka Panjang		
Penerimaan Obligasi Komodo	5,400,000,000	--
Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan	(9,607,632)	(50,289,813)
Penerimaan Surat Berharga Perpetual	600,000,000	--
Penerimaan dari Penerbitan		
Saham Entitas Anak	--	920,749,214
Pembayaran Dividen	(240,413,755)	(344,653,064)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	<u>4,876,802,750</u>	<u>2,727,823,454</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	2,681,376,171	1,975,527,365
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING	38,612,091	8,251,266
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	11,253,778,215	9,269,999,584
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>13,973,766,477</u>	<u>11,253,778,215</u>

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Receipts from Customers
Payment to Suppliers
Payments for Director and Employee
Interest Received
Payment of Interest
Payment of Taxes
Net Cash Provided by Operating Activities

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Additions in Intangible Assets
Decrease (Increase) Business Guarantee
Increase in Advance for Purchase of Land
Acquisition of Fixed Assets
Net Cash Outflows on Acquisition of A Subsidiary
Increase of Investment
Addition In Restricted Deposit
Investment In Associated Entity
Addition In Long Term Payable to Associates
Increase of Investment in Joint Venture
Advance in Investment
Decrease (Increase) in Other Assets
Increase in Other Investment
Net Cash Flows Used in Investing Activities

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Short Term Loans
Proceeds From Bank Loans
Payment of Bank Loans
Medium Term Notes
Proceeds From Bank Loans
Payment Of Bank Loans
Long Term Loans
Proceeds From Bank Loans
Payment of Bank Loans
Medium Term Loans
Proceeds from Komodo Bonds
Payment of Lease Liabilities
Proceeds from Perpetual Notes
Proceed from Shares Issued by Subsidiary
Payment of Dividend
Net Cash Flows Provided by Financing Activities

NET INCREASE ON CASH AND CASH EQUIVALENTS

EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Informasi transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan pada catatan 55

Information of non cash transaction is presented in note 55

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

1. Umum

1. General

1.a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Negara Widjaja Karja ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 29 Maret 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1961, dari perusahaan asing bernama "Naamloze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedijf Vis en Co." yang dinasionalisasi Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1971, status Perusahaan berubah dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan (Persero). Selanjutnya, Perusahaan dinamakan PT Wijaya Karya (Persero) berdasarkan Akta Perusahaan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972 dari Dian Paramita Tamzil, pengganti Djojo Muljadi, S.H., notaris di Jakarta, dan perubahan naskah pendirian Perseroan Terbatas dari Kartini Muljadi, S.H., notaris di Jakarta berdasarkan akta No. 106 tanggal 17 April 1973. Akta Perusahaan Terbatas tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 1973 dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/165/14 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 21 September 1973, tambahan Berita Negara No. 683.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 5 tanggal 2 Oktober 2018 dari Dina Chozie, S.H., notaris di Jakarta, mengenai anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan standarisasi Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Negara Terbuka dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan terhadap ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0021053.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 9 Oktober 2018 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0251073 tanggal 9 Oktober 2018.

1.a. Establishment of the Company

The State Owned Company Widjaja Karja ("the Company") was established on March 29, 1961 based on Government Regulation No. 64 year 1961, from a foreign company named "Naamloze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedijf Vis en Co." which was nationalized by the Government of the Republic of Indonesia.

According to Government Regulation No. 40 year 1971, the Company's status was changed from Perusahaan Negara into Perusahaan (Persero). Furthermore, the Company's name was changed to PT Wijaya Karya (Persero) in accordance with the Deed of Limited Liability Corporation No. 110 dated December 20, 1972 of Dian Paramita Tamzil, replacing Djojo Muljadi, S.H., notary in Jakarta, and the change in the manuscript of establishment of Public Company of Kartini Muljadi, S.H., notary in Jakarta was based on deed No. 106 dated April 17, 1973. The deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on May 8, 1973 in his Decree No. Y.A.5/165/14 and was published in State Gazette of Republic of Indonesia No. 76 dated September 21, 1973, Supplement No. 683.

The Company's Articles of Association have been amended, most recently by Deed No. 5 dated October 2, 2018 of Dina Chozie, S.H., notary in Jakarta, regarding the compliance of the Company's Articles of Association with the standardization of Articles of Association of State-Owned Enterprises and granted right and authority to Minister of State-Owned Enterprises as shareholders of Series A Dwiwarna to amend and/or improve the Company's clause of Article of Association. This amended deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree Letter No. AHU-0021053.AH.01.02 Tahun 2018 dated October 9, 2018 and Acceptance of Notification of Amendment to the Articles of Association from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU-AH.01.03-0251073 dated October 9, 2018.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggara perkereta apian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kbandarudaraan, logistik, perdagangan, *engineering procurement, construction*, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi atas jasa engineering, perencanaan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan atau jasa.

Perusahaan beralamat di Jl. D.I Panjaitan Kav. 9-10, Jakarta Timur dengan lokasi kegiatan utama di seluruh Indonesia dan luar negeri. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1961.

1.b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Pada tanggal 11 Oktober 2007, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-5275/BL/2007 untuk melakukan penawaran umum atas 1.846.154.000 (nilai penuh) lembar saham seri B dari total 5.846.154.000 (nilai penuh) lembar saham Perusahaan kepada masyarakat, dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dan harga penawaran Rp420 (nilai penuh) per saham yang didasarkan pada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) No. KD.01/3406/DPRRI/2007 tanggal 26 April 2007, Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. RIS-15/D2.MBU/2007, tanggal 14 Juni 2007 dan surat persetujuan Menteri Negara BUMN No. S-717/MBU/2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang persetujuan program *Employee Stock Allocation (ESA)*, *Employee Stock Option Plan (ESOP)* dan *Management Stock Option Plan (MSOP)*. Pada tanggal 29 Oktober 2007 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta.

Sampai dengan tahun 2014, Perusahaan menerbitkan total 303.071.000 (nilai penuh) saham baru untuk pelaksanaan ESOP dan MSOP dan total modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi 6.149.225.000 (nilai penuh) saham.

Pada tanggal 3 November 2016, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-631/D.04/2016 atas pernyataan pendaftaran dalam melakukan penawaran umum terbatas.

In accordance with Article 3 of the Articles of Association, the purpose and objective of the Company is to engage in the construction industry, industrial manufacturing, rental services, agency services, investment, agroindustry, energy industry, renewable energy and energy conversion, services railway, organizing harbor, holding airport services, logistics, trade, engineering procurement, construction, development and management area, service upgrades in construction services, information technology of engineering services, planning and optimizing the utilization of resources to produce goods and or services.

The Company's head office is located at Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10, East Jakarta, and its main activities are throughout Indonesia and overseas. The Company started commercial operations in 1961.

1.b. Public Offering of the Company's Shares

On October 11, 2007, the Company obtained the notice of effectivity from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) in his letter No. S-5275/BL/2007 for its public offering of 1,846,154,000 (full amount) shares of B series from total of 5,846,154,000 (full amount) shares from the Company's shares, with par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp420 (full amount) per share based on the approval of Parliament of the Republic of Indonesia (DPR RI) No. KD.01/3406/DPRRI/2007, dated April 26, 2007, the Extraordinary Shareholders Meeting No. RIS-15/D2.MBU/2007, dated June 14, 2007 and approval letter of the Minister of State Enterprises No. S-717/MBU/2007 dated October 8, 2007 about Approval of Program Employee Stock Allocation (ESA), Employee Stock Option Plan (ESOP) and Management Stock Option Plan (MSOP). On October 29, 2007, these shares were listed on the Jakarta Stock Exchange.

Until the year of 2014, total issued new shares of the Company for ESOP and MSOP are 303,071,000 (full amount) shares and total issued and paid up capital to 6,149,225,000 (full amount) shares.

On November 3, 2016, the Company obtained the notice of effectivity from Financial Services Authority (OJK) No. S-631/D.04/2016 for the registration statement in limited offering.

Pada tanggal 25 November 2016 seluruh saham Perusahaan yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Terbatas sebanyak 2.820.726.372 (nilai penuh) saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

On November 25, 2016, all shares issued by the Company through the limited offering of 2,820,726,372 (full amount) shares were listed in Indonesia Stock Exchange (BEI).

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saham Perusahaan sejumlah 8.969.951.372 (nilai penuh) lembar saham telah dicatatkan pada BEI.

As of December 31, 2018 and 2017, the Company's 8,969,951,372 (full amount) outstanding shares have been listed on the BEI.

1.c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Akta Nomor 94 tanggal 26 April 2018, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-HA.01.03-0209136 tanggal 24 Mei 2018, susunan Dewan komisaris dan Direksi per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

1.c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

Based on the Deed Number 94 dated April 26, 2018, made before Fathiah Helmi, S. H., Notary in Jakarta which notice has been recorded by the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia number of AHU-HA.01.03.0209136 dated May 24, 2018, the composition of the Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2018 are as follows:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Ir. Imam Santoso, M.Sc.
Eddy Kristanto, S.H.
Lilie Mayasari, S.E.
Drs. Freddy R Saragih, M.P.Acc.
Imas Aan Ubudiah, Spd.
Drs. Achmad Hidayat
Prof. Ir. Suryo Hapsoro Tri Utomo, Phd.

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur *Human Capital*
dan Pengembangan Sistem
Direktur Operasi I
Direktur Operasi II
Direktur Operasi III
Direktur *Quality, Health,*
Safety and Environment

Ir. Tumiyana, M.B.A.
Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, S.E., M.M-FI.
Ir. Novel Arsyad, M.M.
Agung Budi Waskito, S.T., M.Tech.
Ir. Bambang Pramujo, M.T.
Ir. Destiawan Soewardjono, M.M.
Danu Prijambodo, S.T. Master Medea

Board of Directors

President Director
Finance Director
Human Capital and System
Development Director
Director of Operations I
Director of Operations II
Director of Operations III
Quality, Health, Safety and
Environment Director

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 80/DK/WIKA/2018 tanggal 2 Juli 2018, susunan Komite Audit tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Based on Decree No. 80/DK/WIKA/2018 dated July 2, 2018, the composition of the Audit Committee as of December 31, 2018 are as follows:

Komite Audit

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Prof. Ir. Suryo Hapsoro Tri Utomo, Phd.
Drs. Achmad Hidayat
Ir. Muhammad Sjukri Amien, M.M.
Nirsihing Asmoro, Ak., CPA.
Nanda A. Wijayanti, S.E., Ak., MBA., CA., CPMA

Audit Committee

Chairman
Member
Member
Member
Member

Berdasar Akta No. 39 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang pemberituannya telah dicatat oleh Menteri

Based on Deed No.39 dated March 23, 2017, made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, which notice has been recorded by the Minister of Justice and Human

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan No. AHU-AHA.01.03.0127318 tertanggal 13 April 2017, susunan Dewan komisaris dan Direksi per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Rights of the Republic of Indonesia as stated in the Letter of Acceptance of Notification of Change of Corporate Data, with the number of AHU-AHA.01.03.0127318 dated April 13, 2017, the composition of the Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2017 are as follows:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Ir. Imam Santoso M.Sc.
Komisaris	Eddy Kristanto, S.H.
Komisaris	Liliek Mayasari, S.E.
Komisaris	Drs. Freddy R Saragih, M.P.Acc
Komisaris Independen	Imas Aan Ubudiah, Spd.
Komisaris Independen	Ir. Nurrachman, S.T., M.M

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Dewan Direksi

Direktur Utama	Bintang Perbowo, SE., MM.
Direktur Keuangan	Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, SE, MM-FI
Direktur <i>Human Capital</i> dan Pengembangan Sistem	Ir. Novel Arsyad, M.M.
Direktur Operasi I	Ir Chandra Dwiputra, M.M.T
Direktur Operasi II	Ir. Bambang Pramujio. M.T.
Direktur Operasi III	Ir. Destiawan Soewardjono, M.M.

Board of Directors

President Director
Finance Director
Human Capital and System Development Director
Director of Operations I
Director of Operations II
Director of Operations III

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 56/DK/WIKA/2017 tanggal 22 Juni 2017, susunan Komite Audit tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Based on Decree No. 56/DK/WIKA/2017 dated June 22, 2017, the composition of the Audit Committee as of December 31, 2017 are as follows:

Komite Audit

Ketua	Ir. Nurrachman, ST., M.M.
Anggota	Ir. Muhammad Sjukrul Amien, M.M.
Anggota	DR.Darsono Prawironegoro, SE, M.M.
Anggota	Dra. Waluyati Supriyantini, CA,QIA, M.M.

Audit Committee

Chairman
Member
Member
Member

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi No. SK.02.01/A.DIR.7124/2017 tanggal 9 Juni 2017, Sekretaris Perusahaan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Puspita Anggraeni.

Based on Decree No. SK.02.01/A.DIR.7124/2017 dated June 9, 2017 of the Board of Directors, the Secretary of the Company on December 31, 2018 and 2017 is Puspita Anggraeni.

Jumlah Pegawai Perusahaan dan entitas anak (Grup) pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebanyak 2.588 dan 2.446 (tidak diaudit).

Total number of employees of the Company and its subsidiaries (the "Group") as of December 31, 2018 and 2017 are 2,588 and 2,446, respectively (unaudited).

Jumlah gaji dan tunjangan yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan masing-masing sebesar Rp27.486.638 dan Rp20.941.870 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Salaries and allowance for Board of Commissioners and Directors of the Company are amounting to Rp27,486,638 and Rp20,941,870 for the years ended December 31, 2018 and 2017, respectively.

1.d. Struktur Entitas Anak

Perusahaan memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham entitas anak berikut:

1.d. Structure of the Subsidiaries

The Company has direct as well as indirect ownership, over 50% on the following subsidiaries:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Kegiatan Usaha/ Scope of Business	Tahun Mulai Operasi Komersial/ Year of Commercial Activities	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		Total Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination	
				2018 %	2017 %	2018 Rp	2017 %
Dikonsolidasi / Consolidated							
Kepemilikan Langsung / Direct Ownership							
PT Wijaya Karya Beton Tbk	Indonesia	Industri Beton / Concrete Industry	1997	60.00	60.00	8,881,778,299	7,067,976,095
PT Wijaya Karya Realty Tbk	Indonesia	Real Estate	2000	93.05	90.88	9,104,506,456	6,284,755,329
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	Indonesia	Industri dan Konstruksi / Industrial and Construction	2000	97.22	97.22	3,276,203,760	984,095,172
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	Indonesia	Konstruksi dan Mekanik Listrik / Construction and Electrical Mechanical	1984	90.04	90.04	380,602,741	270,572,803
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Indonesia	Konstruksi dan Properti / Construction and Property	2008	69.30	69.30	5,890,299,960	4,607,728,183
PT Wijaya Karya Bitumen	Indonesia	Tambang Aspal / Asphalt Mining	2013	99.00	99.00	168,967,330	119,506,885
PT Wijaya Karya Serang Panimbang	Indonesia	Jalan Tol / Toll Road	2017	80.00	80.00	2,678,584,520	479,114,080
KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Navigate Energy	Indonesia	Tenaga Listrik / Power Plant	2011	100.00	100.00	341,262,804	304,245,698
KSO - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Navigate Energy - PT Prastiwahyu Trimitra Engineering	Indonesia	Tenaga Listrik / Power Plant	2011	100.00	100.00	99,961,233	115,875,236
Kerja Sama Usaha - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk PT Balai Pustaka (Persero)	Indonesia	Pengembangan dan Pengelolaan Tanah/	2014	100.00	100.00	351,174,787	174,295,177
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui/ Indirect Ownership Through/							
PT Wijaya Karya Komponen Beton *)	Indonesia	Industri Beton / Concrete Industry	2012	30.60	30.60	154,771,465	227,477,520
PT Wijaya Karya Krakatau Beton *)	Indonesia	Industri Beton / Concrete Industry	2014	36.00	36.00	90,061,554	75,180,534
PT Citra Lautan Teduh *)	Indonesia	Industri Beton / Concrete Industry	1994	59.70	59.70	475,855,087	349,977,356
PT Wijaya Karya Gedung Pracetak **)	Indonesia	Industri Beton / Concrete Industry	2017	79.11	79.11	101,380,633	89,769,341
PT Kurnia Realty Jaya ***)	Indonesia	Properti dan Real Estate / Property and Realty	2000	46.35	46.35	297,530,000	288,245,000
PT Wijaya Karya Industri Energi ***)	Indonesia	Industri Energi Terbarukan / Renewable Energy Industry	2010	60.00	60.00	341,064,000	309,399,000
PT Wika Industri Manufaktur ****)	Indonesia	Industri Otomotif / Automotive Industry	2018	60.00	--	25,319,127	--

*) Entitas anak / Subsidiary of PT Wijaya Karya Beton Tbk

**) Entitas anak / Subsidiary of PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

***) Entitas anak / Subsidiary of PT Wijaya Karya Realty

****) Entitas anak / Subsidiary of PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi

PT Wijaya Karya Beton Tbk ("WIKABETON")

WIKABETON sebelumnya merupakan bagian dari departemen produk beton milik Perusahaan sejak tahun 1974. Pada tanggal 11 Maret 1997 sesuai dengan akta WIKABETON No. 44 tanggal 11 Maret 1997 dari Achmad Bajumi, S.H., selaku pengganti dari Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta, WIKABETON menjadi entitas anak Perusahaan.

Saham WIKABETON dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 April 2014.

WIKABETON bergerak dalam bidang perdagangan dan industri beton, jasa konstruksi dan bidang usaha yang terkait.

PT Wijaya Karya Realty Tbk ("WIKAREALTY")

WIKAREALTY didirikan berdasarkan akta Imas Fatimah, S.H., No.17 tanggal 20 Januari 2000. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.C-20856HT01.01.TH2000, tanggal 15 September 2000.

Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham WIKAREALTY yang diaktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH, No.21 tanggal 6 April 2018 telah diputuskan sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar dari Rp4.000.000.000 menjadi Rp13.320.000.000;
2. Menyetujui untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor senilai Rp1.440.000.000 dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham, yang diambil bagian oleh Perusahaan;

PT Wijaya Karya Beton Tbk ("WIKABETON")

WIKABETON was previously part of precast product division since in 1974. On March 11, 1997, in accordance with deed of WIKABETON No. 44 dated March 11, 1997 of Achmad Bajumi, S.H., as replacement of Imas Fatimah, S.H., notary in Jakarta, WIKABETON has become the subsidiary of the Company.

WIKABETON's shares are listed on the Indonesia Stock Exchange on April 8, 2014.

WIKABETON is engaged in manufacturing concrete, construction services and other related business.

PT Wijaya Karya Realty Tbk ("WIKAREALTY")

WIKAREALTY was established based on notarial deed No.17 dated January 20, 2000 of Imas Fatimah, S.H. The deed of establishment was approved by Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his decision letter No.C-20856HT01.01.TH2000 dated September 15, 2000.

In accordance with Shareholder Meeting of WIKAREALTY which is notarized by the Notary Deed of Fathiah Helmi, SH, No. 21 dated April 6, 2018 has been decided as follows:

1. Agreed to increase authorized capital from Rp4,000,000,000 to Rp13,320,000,000;
2. Agreed to conduct a capital increase subscribed and paid Rp1,440,000,000 with a par value of Rp100 (full amount) per share, which is subscribed by the Company;

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- Menyetujui untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor senilai Rp54.667.435.100 (nilai penuh) dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham, yang diambil bagian oleh Koperasi Karya Mitra Satya; dan
- Peningkatan modal ditempatkan/ disetor sebesar Rp517.659.851.400 (nilai penuh) yang berasal dari kapitalisasi agio saham dan sebagian saldo laba.

Atas peningkatan modal saham ini, persentase kepemilikan Perusahaan berubah menjadi 93,05%.

WIKA Realty bergerak dalam bidang usaha *realty*, jasa properti dan jasa lainnya, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi (WIKA IKON)

WIKA IKON, sebelumnya bernama PT Wijaya Karya Intrade didirikan berdasarkan akta Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., No. 16 tanggal 20 Januari 2000. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. C-19656HT 01.TH 2000, tanggal 4 September 2000.

Berdasarkan akta No. 35 tanggal 12 April 2013 dari Sri Ismiyati, SH, notaris di Jakarta, PT Wijaya Karya Intrade berubah nama menjadi WIKA IKON. Perubahan anggaran dasar telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-21488.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 22 April 2013.

Berdasarkan Akta Notaris Sri Ismiyati, SH, MKn, notaris di Jakarta, No. 164 tanggal 31 Desember 2018, para pemegang saham WIKA Ikon menyetujui menyetujui untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan atau disetor dari 2.099.468.918 (nilai penuh) saham menjadi sebesar 13.055.017.085 (nilai penuh) saham dan menyetujui meningkatkan modal dasar WIKA Ikon dari semula sebesar Rp830.000.000 menjadi sebesar Rp5.000.000.000.

WIKA IKON bergerak dalam bidang industri, perdagangan suku cadang mobil, alat teknik, mekanikal, elektrik, pipa katup sambungan dan *packing valves*, bejana tekan, bahan-bahan konstruksi serta usaha jasa konstruksi.

PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (WIKA RK)

WIKA RK sebelumnya bernama PT Wijaya Karya Insan Pertiwi didirikan berdasarkan akta No. 21 tertanggal 28 Februari 1984 dari Ali Harsoyo, S.H.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- Agreed to conduct a capital increase subscribed and paid Rp54,667,435,100 (full amount) with a par value of Rp100 (full amount) per share, which is subscribed by Koperasi Karya Mitra Satya; and
- Agreed to conduct a capital increase subscribed and paid with nominal of Rp517,659,851,400 (full amount) which is subscribed by capitalization of the agio and profit.

For the increase in share capital, the percentage of ownership of the Company changed to 93.05%.

WIKA Realty is engaged in *realty*, property and other services, except in law and tax services.

PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi (WIKA IKON)

WIKA IKON, previously PT Wijaya Karya Intrade, was established based on notarial deed No. 16 dated January 20, 2000 of Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., replacement of Imas Fatimah, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his decision letter No. C 19656HT 01.TH 2000 dated September 4, 2000.

Based on deed No 35, dated April 12, 2013 of Sri Ismiyati, S.H., notary in Jakarta, PT Wijaya Karya Intrade has changed its name into WIKA IKON. Amendments to the articles of association were approved by Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU- 21488.AH.01.02. Tahun 2013, dated April 22, 2013.

Based on Notarial Deed Sri Ismiyati, SH, MKn, notary in Jakarta, No. 164 dated December 31, 2018, WIKA Ikon's shareholders agreed to increase the capital issued and paid from 2,099,468,918 (full amount) shares to 13,055,017,085 (full amount) and approved to increase the authorized capital of WIKA Ikon from Rp830,000,000 to Rp5,000,000,000.

WIKA IKON is engaged in manufacturing, trading auto parts, engineering tools, mechanical, electrical, plumbing, connections and packing valves, pressure vessels, construction materials and construction services business.

PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi (WIKA RK)

WIKA RK, previously PT Wijaya Karya Insan Pertiwi, was established based on notarial deed No. 21 dated February 28, 1984 of Ali Harsoyo, S.H.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Akta pendirian disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-6005.HT.01.01TH.84 tertanggal 24 Oktober 1984.

Berdasarkan akta No. 50 tanggal 12 November 2013 dari Sri Ismiyati, S.H., notaris di Jakarta. PT Wijaya Karya Insan Pertiwi berubah nama menjadi WIKAR. Perubahan anggaran dasar telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-63607.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 5 Desember 2013.

WIKAR bergerak dalam bidang jasa konstruksi mekanikal dan elektrikal serta jasa operasi dan pemeliharaan.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKAGedung)

WIKAGedung didirikan berdasarkan akta No. 43 tanggal 24 Oktober 2008 dari Imas Fatimah, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU.92223.AH.01.01.TH 2008, tertanggal 1 Desember 2008. Ruang lingkup kegiatan WIKAGedung adalah industri konstruksi dan *engineering*, jasa pemborongan dengan pola progres termin maupun *turnkey*, *Build Operate Transfer (BOT)*, pengelolaan dan penyewaan gedung/kawasan niaga terpadu, perdagangan dan pemeliharaan peralatan serta material konstruksi, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi dan *engineering* pada khususnya sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan terbatas, realti sebagai pengembang realti, properti sebagai investor properti dan industri pendukung konstruksi bangunan gedung. Saham WIKAGedung dicatatkan di BEI pada tanggal 30 November 2017.

PT Wijaya Karya Bitumen (WIKABitumen)

WIKABitumen, sebelumnya bernama PT Sarana Karya (Persero), didirikan berdasarkan akta Imas Fatimah, S.H., No. 1 tanggal 1 September 1984. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-931.HT.01.01.TH 1986, tanggal 7 Februari 1986.

Berdasarkan akta No. 83 tanggal 30 Juni 2014 dari M. Nova Faisal, S.H., notaris di Jakarta, PT Sarana Karya (Persero) berubah nama menjadi WIKABitumen. Perubahan anggaran dasar telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-05084.40.20.2014 Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.C2-6005.HT.01.01TH.84 dated October 24, 1984.

Based on deed No. 50, dated November 12, 2013 of Sri Ismiyati, S.H., notary in Jakarta, PT Wijaya Karya Insan Pertiwi has changed its name into WIKAR. Amendments of the article association was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU-63607.AH.01.02. Year 2013, dated December 5, 2013.

WIKAR is engaged in construction service, mechanical and electrical, services operation and maintenance.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKAGedung)

WIKAGedung was established based on notarial deed No. 43 dated October 24, 2008 of Imas Fatimah, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU.92223.AH.01.01.TH 2008 dated December 1, 2008. The scope of activities of WIKAGedung is to engage in construction and industrial engineering services contract with progress terms or turnkey, Build Operate Transfer (BOT), the management and leasing of buildings/ integrated commercial areas, trade and maintenance of construction equipment and materials, service upgrades in construction and engineering services specifically in accordance with the principles of limited companies, realty developers, property investor and support of building construction industry. WIKAGedung's shares are listed on the BEI on November 30, 2017.

PT Wijaya Karya Bitumen (WIKABitumen)

WIKABitumen, previously PT Sarana Karya (Persero), was established based on notarial deed no. 1 dated September 1, 1984 of Imas Fatimah, S.H. The deed of establishment was approved by Minister of Justice of the Republic Indonesia in his decision letter No. C2-931.HT.01.01.TH 1986 dated February 7, 1986.

Based on deed No. 83, dated June 30, 2014 of M. Nova Faisal, S.H., notary in Jakarta, PT Sarana Karya (Persero) changed its name into WIKABitumen. Amendments to the articles of association was approved by Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU- 05084.40.20.2014 Year 2014, dated July 7, 2014.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Wijaya Karya Bitumen yang telah diaktakan oleh Sri Ismiyati, SH, Notaris di Jakarta, dengan akte 112. Tanggal 31 Agustus 2018, diputuskan bahwa menyetujui melakukan peningkatan modal disetor sebesar Rp63.699.000 dengan nilai nominal Rp1.000 per saham.

WIKA Bitumen bergerak dalam eksplorasi, eksploitasi, pengolahan batuan aspal dan semua bitumen, baik padat maupun cair.

PT Wijaya Karya Serang Panimbang

PT Wijaya Karya Serang Panimbang didirikan berdasarkan akta Rita Utami Djauhari, S.H., No. 02 tanggal 17 Pebruari 2017. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU 0007805.AH.01.01.Tahun 2017.

Sesuai akta Pernyataan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya Serang Panimbang No. 18 tanggal 28 Desember 2018, oleh notaris Rina Utami Djauhari, SH, pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan/disetor dari Perusahaan sebesar 12.791.755.200 saham atau senilai Rp1.279.175.520.

PT Wijaya Karya Serang Panimbang bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol.

KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Navigat Energy (KSO WIKA-NE)

KSO WIKA-NE didirikan berdasarkan Perjanjian Konsorsium tanggal 14 Desember 2010 sebagaimana terakhir diubah dan dinyatakan kembali melalui Perjanjian Konsorsium yang diubah dan disajikan kembali oleh Yurisa Martanti SH., Notaris di Jakarta, dengan akta No. 271/Leg/Not/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.

KSO WIKA-NE bergerak dalam bidang pekerjaan pengadaan sewa beli pembangkit PLTG Borang 60 MW kepada PT PLN (Persero) selama 7 (tujuh) tahun setelah tercapainya tanggal operasi komersial.

Pada tanggal pelaporan, partisipasi atas hak dan kewajiban KSO ini adalah 100% Perusahaan dan 0% PT Navigat Energy.

KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Navigat Energy - PT Prastiwahyu Trimitra Engineering (KSO WIKA-NE-PTE)

KSO WIKA-NE-PTE dibentuk berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) No. 22/2011 tanggal 4 Mei 2011 dari Fatin, SH, MKN, Notaris di Bogor sebagaimana diubah dengan Perjanjian Konsorsium dari Suzie FH Tajoeidin, Notaris di Jakarta dengan legitisasi No. 076/L/ST/2011 tanggal 6 September 2011.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Based on the Deed of Decision of Shareholders' Decision Outside the Meeting of PT. Wijaya Karya Bitumen which was notarized by Sri Ismiyati, SH, Notary in Jakarta, with deed 112. dated August 31, 2018, it was decided that it agreed to increase paid in capital by Rp63,699,000 with a nominal value of Rp1,000 per share.

WIKA Bitumen is engaged in exploitation, processing and all the rock asphalt bitumen, both solid and liquid.

PT Wijaya Karya Serang Panimbang

PT Wijaya Karya Serang Panimbang was established based on notarial deed No. 02 dated February 17, 2017 of Rita Utami Djauhari, S.H. The deed of establishment was approved by Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-0007805.AH.01.01. Year 2017.

In accordance with the deed of Minutes Statement of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wijaya Karya Serang Panimbang No. 18 dated December 28, 2018, by notary Rina Utami Djauhari, SH, the shareholders agreed to increase the issued/paid-up capital of the Company amounting to 12,791,755,200 shares or valued at Rp1,279,175,520.

PT Wijaya Karya Serang Panimbang is engaged in toll road concession right.

KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Navigat Energy (KSO WIKA-NE)

KSO WIKA-NE is incorporated under the Consortium Agreement dated December 14, 2010 as last amended and restated through the Amended and Revised Consortium Agreement of Yurisa Martanti SH., Notary in Jakarta, with deed No. 271/Leg/Not/VII/2011 dated July 11, 2011.

KSO WIKA-NE is engaged in the procurement of lease purchase of PLTG Borang 60 MW to PT PLN (Persero) for 7 (seven) years after the commercial operation date.

At the reporting date, the participation in the rights and obligations of this KSO are 100% the Company and 0% PT Navigat Energy.

KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Navigat Energy - PT Prastiwahyu Trimitra Engineering (KSO WIKA-NE-PTE)

KSO WIKA-NE-PTE was established based on Letter of Cooperation Agreement (KSO) No. 22/2011 dated May 4, 2011 of Fatin, SH, MKN, Notary in Bogor as amended by Consortium Agreement of Suzie FH Tajoeidin, Notary in Jakarta with the legalization No. 076/L/ST/2011 dated September 6, 2011.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

KSO WIKA-NE-PTE bergerak dalam bidang pekerjaan pengadaan sewa beli pembangkit PLTMG Rengat 20 MW kepada PT PLN (Persero) selama 7 (tujuh) tahun setelah tercapainya tanggal operasi komersial.

Pada tanggal pelaporan, partisipasi atas hak dan kewajiban KSO ini adalah 100% Perusahaan, 0% PT Navigat Energy dan 0% PT Prastiwahyu Trimitra Engineering.

KSU PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Balai Pustaka (Persero) (WIKI-BP)

Pada tanggal 24 Desember 2013, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan PT Balai Pustaka (Persero) melakukan perjanjian kerjasama usaha. Kerjasama usaha yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Usaha (PKSU) No. TP.01.03/A.DIR.9522/2013 sebagaimana terakhir diubah dengan PKSU No. TP.01.03/A.DIR.3424/2016 tanggal 30 Maret 2016.

KSO WIKI-BP bergerak dalam bidang pengembangan dan pengelolaan tanah milik PT Balai Pustaka (Persero) di Sepanjang Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi seluas 9.354 m2 untuk proyek pembangunan Apartemen Tamansari Iswara.

Pada tanggal pelaporan, partisipasi atas hak dan kewajiban KSO ini adalah 100% Perusahaan dan 0% PT Balai Pustaka (Persero).

Kepemilikan Tidak Langsung

PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKI KOBE)
WIKI KOBE didirikan berdasarkan Akta Karin Christiana Basoeki, S.H., No. 18 tanggal 10 Mei 2012. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU- 25815.AH.01.01 tanggal 14 Mei 2012. Ruang lingkup kegiatan WIKI KOBE adalah bergerak dalam usaha perindustrian dan perdagangan beton pracetak.

PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKI Kraton)
WIKI KRATON didirikan berdasarkan akta No. 16, pada tanggal 16 Desember 2013 dari Indrajati Tandjung, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU 02372.AH.01.01 Tahun 2014 tertanggal 17 Januari 2014. Ruang lingkup WIKI KRATON adalah bidang usaha perindustrian dan perdagangan beton pracetak.

PT Citra Lautan Teduh (CLT)

CLT didirikan berdasarkan akta No. 24 tanggal 29 Oktober 1994 dari Nurhayati Suryasumirat, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

KSO WIKI-NE-PTE is engaged in the procurement of lease purchase of PLTMG Rengat 20 MW to PT PLN (Persero) for 7 (seven) years after the commercial operation date.

At the reporting date, the participation in the rights and obligations of this KSO are 100% the Company, 0% PT Navigat Energy dan 0% PT Prastiwahyu Trimitra Engineering

KSU PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - PT Balai Pustaka (Persero) (WIKI-BP)

On December 24, 2013, the Company and PT Balai Pustaka (Persero) entered into a business cooperation agreement. Business cooperation undertaken under the Cooperation Agreement (PKSU) No. TP.01.03/A.DIR.9522/2013 as amended with PKSU No. TP.01.03/A.DIR.3424/2016 dated March 30, 2016.

KSO WIKI-BP is engaged in the development and management of land owned by PT Balai Pustaka (Persero) in Sepanjang Jaya, Bekasi Timur District, Bekasi with area of 9,354 m2 for the development Tamansari Iswara Apartment project.

At the reporting date, the participation in the rights and obligations of this KSO are 100% the Company and 0% PT Balai Pustaka (Persero).

Indirect Ownership

PT Wijaya Karya Komponen Beton (WIKI KOBE)
WIKI KOBE was established based on notarial deed No. 18 dated May 10, 2012 of Karin Christiana Basoeki, S.H. The deed of establishment was approved by Minister of Justice of the Republic Indonesia in his decision letter No. AHU-25815.AH.01.01 dated May 14, 2012. The scope of activities of WIKI KOBE is to engage in industry and trading of concrete.

PT Wijaya Karya Krakatau Beton (WIKI Kraton)
WIKI KRATON was established based on notarial deed no. 16 dated December 16, 2013 of Indrajati Tandjung, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic Indonesia in his decision letter No. AHU-02372.AH.01.01 year 2014 dated January 17, 2014. The scope of WIKI KRATON is to engage in industry and trading of concrete.

PT Citra Lautan Teduh (CLT)

CLT was established based on notarial deed No. 24 dated October 29, 1994 of Nurhayati Suryasumirat, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic Indonesia in

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

No. C2-5921.HT.01.01.TH.95. tertanggal 11 Mei 1995. Ruang lingkup kegiatan CLT adalah usaha perindustrian dan perdagangan beton pracetak.

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WIKAPracetak Gedung)

WIKAPracetak Gedung, didirikan berdasarkan akta No. 142 tanggal 23 Desember 2016 dari Sri Ismiyati, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU- 0001918.AH.01.01 tertanggal 17 Januari 2017. Ruang lingkup WIKAPracetak Gedung adalah usaha perindustrian dan perdagangan beton pracetak.

PT Kurnia Realty Jaya (KRJ)

KRJ didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 14 Juni 2000 dari Sri Rahayu Sedyono M. S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-18832.HT.01.01.TH2001 tertanggal 6 November 2001. Ruang lingkup KRJ adalah usaha pengembangan dan pengelolaan properti.

PT Wijaya Karya Industri Energi (Winner)

Winner didirikan berdasarkan akta No. 32 tanggal 18 Juni 2010 dari Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-32045.AH. 01.01/2010 tertanggal 24 Juni 2010. Ruang lingkup Winner adalah industri pabrikan, industri energi, energi terbarukan, dan energi konversi.

PT WIKAIndustri Manufaktur (WIMA)

Berdasarkan akta notaris Karin Christiana Basoeki, S.H. No. 12, tanggal 28 Juni 2018, WIKAIKON dan PT Gesits Technologies Indo, mendirikan WIMA dengan modal dasar sejumlah Rp50.000.000 yang terdiri dari 50.000 (nilai penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Modal yang ditempatkan sebesar Rp12.500.000 (12.500 (nilai penuh) lembar saham).

Akta Pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0031340.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018.

Perusahaan dan entitas anak selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

his decision letter No. C2-5921.HT.01.01.TH.95.dated May 11, 1995. The scope of activities of CLT is to engage in industry and trading of concrete.

PT Wijaya Karya Pracetak Gedung (WIKAPracetak Gedung)

WIKAPracetak Gedung was established based on notarial deed No. 142 dated December 23, 2016 of Sri Ismiyati, S.H., M.Kn. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic Indonesia in his decision letter No. AHU-0001918.AH.01.01 dated January 17, 2017. The scope of activities of WIKAPracetak Gedung is to engage in industry and trading of concrete.

PT Kurnia Realty Jaya (KRJ)

KRJ was established based on notarial deed No. 1 dated June 14, 2000 of Sri Rahayu Sedyono M. S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic Indonesia in his decision letter No. C-18832.HT.01.01.TH2001 dated November 6, 2001. The scope of activities of KRJ is to engage in development and management property.

PT Wijaya Karya Industri Energi (Winner)

Winner was established based on notarial deed No. 32 dated June 18, 2010 of Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic Indonesia in his decision letter No. AHU-32045.AH. 01.01/2010 dated June 24, 2010. The scope of activities of Winner is to engage in the industrial manufacturing, energy industry, renewable energy and energy conversion.

PT WIKAIndustri Manufaktur (WIMA)

Based on notarial deed Karin Christiana Basoeki, S.H. No.12, dated June 28, 2018, WIKAIKON and PT Gesits Technologies Indo, established WIMA with authorized capital amounting to Rp50,000,000 composed of 50,000 (full amount) shares with par value amounting to Rp1,000 per share. Issued capital amounted to Rp12,500,000 (12,500 (full amount) shares).

The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0031340.AH.01.01.Tahun 2018, dated July 5, 2018.

The Company and subsidiaries are collectively referred to as "the Group".

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam periode berjalan, Grup telah menerapkan standar baru, beberapa penyesuaian, dan interpretasi untuk PSAK yang diterbitkan oleh

2. Significant Accounting Policies

2.a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and regulations in the Capital Market include Regulations of Financial Services Authority/ Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

2.b. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared on going concern assumption and accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows using the cash basis. The basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Company. Each entity in the Group determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

In the current period, the Group adopted new and revised standards and interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board-

Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018.

Indonesian Institute of Accountants that effective for accounting period beginning on January 1, 2018.

Penerapan amandemen dan interpretasi standar berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

The application of the following amendments and interpretation to standards have not resulted to material impact to disclosures or on the amounts recognized in the current and prior year consolidated financial statements:

- PSAK 16 (Amandemen 2015): "Aset Tetap tentang Agrikultur: Tanaman Produktif"
- PSAK 69: "Agrikultur"
- PSAK 2 (Amandemen 2016): "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan"
- PSAK 46 (Amandemen 2016): "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi"
- PSAK 13 (Amandemen 2017): "Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi"
- PSAK 53 (Amandemen 2017): "Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- PSAK 67 (Penyesuaian 2017): "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain"

- *PSAK 16 (Amendment 2015): "Property, Plant and Equipment regarding Agriculture: Bearer Plants"*
- *PSAK 69: "Agriculture"*
- *PSAK 2 (Amendment 2016): "Statements of Cash Flows regarding Disclosure Initiative"*
- *PSAK 46 (Amendment 2016): "Income Tax regarding Deferred Tax Assets Recognition for Unrealised Loss"*
- *PSAK 13 (Amendment 2017): "Investment Property regarding Transfer of Investment Property"*
- *PSAK 53 (Amendment 2017): "Share-based Payment regarding Classification and Measurement of Share-based Payment Transaction"*
- *PSAK 15 (Improvement 2017): "Investment in Associates and Joint Ventures"*
- *PSAK 67 (Improvement 2017): "Disclosure of Interests in Other Entities"*

Namun, penerapan PSAK 2 (Amandemen 2016) mensyaratkan Perusahaan menyediakan pengungkapan bagi pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan. Persyaratan tersebut telah diungkapkan di Catatan 55.

However, the implementation of PSAK 2 (Amendment 2016) requires the Company to provide disclosures to users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities. These requirements have been disclosed in Note 55.

2.d.Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Grup seperti disebutkan pada Catatan 1.d.

2.d.Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Group as described in Note 1.d.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

A subsidiary is an entity controlled by the Group, videlicet the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:
(a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;

The existence and effect of substantive potential voting rights in which the Group has the practical ability to exercise (i.e, substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls other entities.

The Group's financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transaction between entities are eliminated in full.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity of the owners of the parent.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in cessation of control are equity transactions (videlicent transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

*If the Group loses control, the Group:
(a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*

- (b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
- (c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- (d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- (e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
- (f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

2.e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

- (b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);
- (c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;
- (d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;
- (e) Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the former subsidiary;
- (f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

2.e. Transactions with Related Parties

Related party represent a person or an entity who is related to the reporting entity:

- a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. Has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. Has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b) One entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to each others);
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian (Catatan 50).

2.f. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup melakukan pencatatan dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing selama tahun berjalan dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta

- v. The entity a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the beneficiary of such plan, the sponsoring employers are also a related party;
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
- viii. The entity, or any members of a group of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Government that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE's Ministry as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements (Note 50).

2.f. Foreign Currency Transactions and Balances

In preparing the financial statements, each of the entities within the Group keep records by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and the subsidiaries is Rupiah.

Transactions during the year in foreign currency are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount using the spot exchange rate

asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, videlicent middle rate of Bank of Indonesia at December 31, 2018 and 2017 as follows:

	2018	2017
Dolar Amerika Serikat	14,481.00	13,548.00
EURO Eropa	16,559.75	16,173.62
Yen Jepang	131.12	120.22
Dolar Singapura	10,602.97	10,133.53
Dolar Brunei	10,602.97	10,133.53
Ringgit Malaysia	3,493.20	3,335.31
Dinar Aljazair	118.22	118.20

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.g. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2.g. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability.

Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial assets in one of the following four categories:

(i) Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau;
- (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

(ii) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- (a) those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*
- (b) those that upon initial recognition designated as available for sale; or*
- (c) those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.*

After initial recognition, loans and receivable are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iii) Held-to-Maturity (HTM) Investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

(i) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

(iv) Available-for-Sale (AFS) Financial Assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available for sale on initial recognition or are not classified as (a) loans and receivable, (b) held-to-maturity investment, or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

After initial recognition, AFS financial assets are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value is recognized on other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets is derecognized.

At that time, the cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

(i) Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

(ii) Liabilitas Keuangan Lainnya

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(ii) Other Financial Liabilities

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer.

Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

The Group removes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti

Impairment of Financial Assets

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and impairment lossess are incurred, if and only if, there is objective evidence of impairment as a

objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (loss event), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The following are objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired:

- (a) Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- (b) A breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments;*
- (c) It becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- (d) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.*

For investment in equity instrument, a significant and prolonged decline in the fair value of the equity instrument below its cost is an objective evidence of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on loans and receivable or held-to-maturity investments carried at amortized cost, the amount of impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate and recognized in profit or loss.

When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognized in other comprehensive income and there is objective evidence that the asset is impaired, the cumulative loss that had been recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment even though the financial assets has not been derecognized.

Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Grup tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan

The amount of the cumulative loss that is reclassified are the difference between the acquisition cost (net of any principal repayment and amortisation) and current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in profit or loss.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reclassification

The Group shall not reclassify a derivative out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify that financial asset out of the fair value through profit or loss category if a financial asset is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term. The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

If, as a result of a change in Group's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held to maturity, it shall be reclassified as available for sale and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification

diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengukuran dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset

of more than an insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sales or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);*
- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);*
- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).*

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an

atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Surat berharga perpetual diklasifikasikan sebagai ekuitas

Surat berharga perpetual yang tidak mengakibatkan Grup memiliki kewajiban kontraktual untuk menyerahkan uang tunai atau aset keuangan lainnya, atau menukar aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan pemegang perpetual *securities* dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan Grup, diklasifikasikan sebagai ekuitas. Distribusi yang timbul dari instrumen tersebut diakui dalam ekuitas karena tidak ada kewajiban kontraktual untuk membayar distribusi pada instrumen ini. Biaya eksternal tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan instrumen tersebut dicatat sebagai pengurang ekuitas.

2.h. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.i. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

2.j. Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Grup yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognised by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

Perpetual securities classified as equity

Perpetual securities which do not result in the Group having a contractual obligation to deliver cash or another financial asset, or to exchange financial assets or financial liabilities with the holder under conditions that are potentially unfavourable to the Group, are classified as equity. Distributions arising from such instruments are recognized in equity as there is no contractual obligation to pay distributions on these instruments. Incremental external costs directly attributable to the issuance of such instruments are accounted for as a deduction from equity.

2.h. Cash and Cash Equivalent

Cash and Cash Equivalent are cash on hand, cash in banks (demand deposits), and time deposits with maturity periods of 3 months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

2.i. Retention Receivables

Retention receivable represents the Group's receivable from owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain condition in the contract. Retention receivable is recorded when certain percentage deduction is applied in every account receivable's claim which retained by the owner of project up to certain condition after completion of the contract has been met.

2.j. Gross Amount Due from Customers

Gross amount due from customers represents the Group's receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan, dimana faktur belum dapat ditagihkan karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progress*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the consolidated statement of financial position date.

2.k. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka, dan sewa dibayar dimuka. Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

2.k. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are costs that have been paid but will be incurred future periods, such as prepaid insurance premiums, prepaid interest and rent paid in advance. Prepaid expenses are amortized over the periods benefit using the straight-line method.

2.l. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan terdiri dari seluruh biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

2.l. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprises all costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Penyisihan penurunan nilai persediaan dibentuk berdasarkan penelaahan fisik persediaan pada akhir periode.

Allowance for decrease in value of inventory is provided based on the physical check of inventory at the end of the period.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognised as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs.

Persediaan - Aset Real Estat

Aset real estat, yang terutama terdiri dari tanah dalam pematangan, unit bangunan siap jual dan unit bangunan dalam penyelesaian, dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata. Biaya perolehan atas tanah dalam pematangan termasuk biaya pengembangan dan pematangan tanah. Biaya perolehan atas unit bangunan terdiri dari biaya aktual konstruksi.

Inventories - Real Estate Assets

Real estate assets, mainly consisted of land, building unit ready for sale and building unit under construction, are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost is determined using the average method. Expenditures include land development and improvement cost. Acquisition costs for building units are comprised of actual construction costs.

Beban keuangan atas pinjaman bank dan fasilitas pinjaman lainnya yang diperoleh yang dapat diatribusikan langsung dengan pembelian; pengembangan dan pematangan tanah; serta konstruksi aset real estat akan dikapitalisasi.

Tanah yang dimiliki oleh Grup untuk pengembangan di masa yang akan datang, disajikan sebagai "Tanah untuk Pengembangan" di bagian aset di laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada saat dimulainya pengembangan dan pembangunan infrastruktur, nilai tanah tersebut akan diklasifikasikan sebagai persediaan, properti investasi atau aset tetap, mana yang lebih sesuai.

Selisih lebih nilai tercatat persediaan atas estimasi jumlah terpulihkannya diakui sebagai rugi penurunan nilai sebagai "Penyisihan atas Penurunan Nilai Persediaan" dalam laba rugi.

2.m. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk menaikkan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan property investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi property investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

- a. Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;

Borrowing costs on loans obtained from banks, and other financing facilities that are directly attributable to the acquisition; development and improvement of the land; and constructions of real estate assets are capitalized.

Land for future development of the Group is classified as "Land for Development" in assets section of the consolidated statement of financial position. Upon the commencement of development and construction of infrastructure, the carrying costs of land will be transferred to the respective inventory, investment property or fixed assets accounts, whichever is appropriate.

The excess of carrying value of inventories over their estimated recoverable value is recognized as impairment loss under "Provision for Decline in Value of Inventories" in profit or loss.

2.m. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

Investment property are measured at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

Maintenance and repairment costs are charged to profit or loss as incurred, while renewals and betterments are capitalized.

The Group shall transfer a property, to, or from investment property when, and only when, there the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of the change in use, include:

- a. *Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;*

- b. Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
- c. Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk dijual, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi;
- d. Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

2.n. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Penyusutan diakui dengan metode garis lurus, kecuali peralatan proyek diakui dengan metode *sum of the year*, setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa aset tetap. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.01.03./A.DIR 7677/2013 tanggal 30 Oktober 2013 taksiran masa aset tetap adalah sebagai berikut:

- b. *Commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment property to inventories;*
- c. *End of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment property; and*
- d. *Inception of an operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment property.*

An investment property is derecognizes on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

2.n.Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Lands are recognized at its cost and are not depreciated.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method, except for project equipment using sum of the year method, based on the estimated useful lives of the assets. Based on Directors's decision letter No. 01.03./A.DIR 7677/2013 dated October 30, 2013 the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/ Years	
Bangunan	10-20	Building
Prasarana	20	Infrastructure
Perlengkapan kantor	3-4	Office equipment
Kendaraan bermotor	4-5	Motor Vehicles
Peralatan Pabrik dan Proyek	4-30	Project and Plant Equipment

Tambang di sajikan sebesar harga perolehan, disusutkan dengan menggunakan unit produksi dimulai dari awal operasi komersial, penyusutan tersebut dihitung berdasarkan estimasi cadangan. Perubahan dalam estimasi cadangan dilakukan secara prospektif dimulai sejak periode terjadinya perubahan.

Mining are stated at cost less, the value of mining properties is depreciated using the unit of production method from the date of the commencement of commercial operation. The depreciation is calculated based on estimated mineable reserves. Change in estimated reserves are accounted for on a prospective basis, from the beginning of the period in which the change occurs.

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset Tetap dalam Pembangunan" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi.

Self-constructed fixed assets are presented as part of the fixed assets under "Fixed Asset Under Construction" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction.

Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

At the end of each reporting period, the Group made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

2.o. Aset Takberwujud

Merk Dagang

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Nilai perolehan aset takberwujud yang diperoleh dari kombinasi bisnis pada awalnya diakui sesuai nilai wajar pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi, jika ada, akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset tak berwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas

Aset takberwujud dengan umur tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah masa manfaat masih mendukung dan terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai.

Hak Pengusahaan Jalan Tol

Grup telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa Pengungkapan" (ISAK 22).

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan jalan tol yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian ruas jalan tol. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi jalan tol diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

2.o. Intangible Assets

Trademark

Intangible assets are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired from business combinations is initially recognized at fair value as at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and if any, accumulated impairment loss. The useful life of intangible assets are assessed to be either finite or indefinite.

Intangible assets with indefinite life are not amortized. The useful life of an intangible asset with an indefinite useful life is reviewed annually to determine whether the useful life assessment continues to be supportable and when circumstances indicate that the carrying amount may be impaired.

Toll Road Concession Right

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22).

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of rights and liabilities related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are toll road concession rights which will be amortized over the remaining concession period from the date of operation of the toll road. During the construction period, the accumulated toll road construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tanpa syarat.

Aset konsesi yang diberikan kepada Grup dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/ BPJT. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/ BPJT pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selama periode hak pengusahaan jalan tol, aset hak pengusahaan jalan tol dapat dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup jika jalan tol diserahkan (dikuasakan) kepada pihak lain atau Pemerintah/ BPJT mengubah status jalan tol menjadi jalan non-tol atau tidak ada manfaat ekonomi yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset konsesi diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Selain itu, Grup mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" (PSAK 34) dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Grup menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Grup diakui pada nilai wajar.

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan jalan tol atau peningkatan kapasitas jalan tol yang meliputi pengadaan tanah, studi kelayakan dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan jalan tol, termasuk biaya pembangunan jalan akses ke jalan tol, jalan alternatif dan fasilitas jalan umum yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman lain yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut telah selesai dan aset konsesi telah siap untuk dioperasikan.

Grup mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset tak berwujud dimana Grup menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) for no consideration.

Concession assets granted to the Group are transferrable with approval from the Government/ BPJT. These concession right assets will be transferred to the Government/ BPJT at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

During the toll road concession rights period, the concession rights assets may be derecognized from the consolidated statement of financial position of the Group if the toll road is transferred to another party or the Government/BPJT has changed the status of the toll road to non-toll road or if there is no economic benefit expected from usage of the toll road. Gain or loss from discontinuance or disposal of concession assets is recognized in the statement of profit or loss and other consolidated comprehensive income.

In addition, the Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" (PSAK 34) and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

Construction contract comprises all the amounts of toll road construction costs or toll road capacity improvement consisting of land acquisition cost, feasibility study cost and other costs that are directly attributable to the toll road construction, including construction costs for access roads, alternative roads and required public road facilities, interest and other borrowing costs, either directly or indirectly used for financing the development of assets. These costs are capitalized until the construction is completed and the concession assets are ready to be operated.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public

publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Grup mencatat aset tak berwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya. Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian (*qualifying assets*), dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

Provisi Pelapisan Jalan Tol

Dalam pengoperasian jalan tol, Grup mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yaitu antara lain dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala. Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi pelapisan ulang jalan tol diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini.

Aset jalan tol terdiri dari jalan dan jembatan, gerbang dan bangunan pelengkap jalan tol dan sarana pelengkap jalan tol dicatat sebagai aset hak perusahaan jalan tol yang dinyatakan sebesar nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Amortisasi aset jalan dan jembatan dilakukan dengan menggunakan metode unit produksi (jumlah lalu lintas kendaraan kendaraan) selama masa hak perusahaan jalan tol (masa konsesi). Sedangkan aset hak perusahaan jalan tol selain jalan dan jembatan diamortisasi selama periode yang lebih pendek antara masa hak perusahaan jalan tol (masa konsesi) dan umur manfaat aset.

services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract. Construction cost is the value of acquisition the construction contract.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.

Provision for Toll Road Overlay

In operating toll roads, the Group is obliged to maintain quality in accordance with the SPM (Minimum Service Standards) established by the Ministry of Public Works of the Republic of Indonesia, i.e., by performing toll road overlay regularly. The cost of this overlay is periodically provided based on estimated utilization of toll road by customers. The estimated net provision for toll road overlay is discounted to its present value that reflects management estimates against cost incurred to settle current provision.

Toll road assets consisting of roads and bridges, gates and complementary building toll roads and toll supplementary facilities are recorded as toll road concession rights which are stated at fair value at the date assets or revaluation less accumulated depreciation and accumulated impairment losses that occur after the date of revaluation.

Amortization of assets roads and bridges were calculated using the unit of production (the amount of vehicle traffic vehicles) during the period of the concession (concession period). While the toll road concession rights assets other than roads and bridges are amortized over the shorter period between the period of concession (concession period) and the useful life of the asset.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaannya atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset tak berwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan (jika ada) dan jumlah tercatat aset. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya. Keuntungan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Intangible assets are derecognized when removed or when there are no further future economic benefits are expected from its use or disposal. Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset is determined as the difference between the net disposal proceeds (if any) and the carrying amount of assets. Gains or losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized. Gains are recognized as other income.

2.p. Penurunan Aset Non-Keuangan Kecuali Goodwill

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup akan melakukan penilaian apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas yaitu jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus ditentukan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Pemulihan rugi penurunan nilai aset yang telah diakui periode sebelumnya dicatat jika terdapat indikasi penurunan nilai aset tersebut sudah tidak ada lagi atau menurun. Pemulihan rugi penurunan nilai aset diakui dalam laba rugi. Namun demikian, kenaikan nilai tercatat aset karena pemulihan rugi penurunan nilai hanya diakui sepanjang tidak melebihi nilai tercatat yang ditentukan (setelah dikurangi penyusutan dan amortisasi) jika rugi penurunan nilai aset tidak diakui pada tahun sebelumnya.

2.p. Impairment of Non-Financial Assets Except Goodwill

At the end of the reporting period, the Group will assess whether there is an indication of assets impairment. If such indication exists, the Group estimates the recoverable amount of an asset or cash-generating unit is the higher amount between the fair value less costs to sell and value in use. If the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of an asset should be determined by the recoverable amount. Impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Recovery of impairment losses of assets which has been recognized in prior periods are recorded when there is indication of impairment of the asset no longer exists or decreases. Recovery of impairment losses of assets recognized in the profit or loss. However, the increase in the carrying value of assets due to the recovery of an impairment loss is recognized only if it is not exceed the carrying amount that would have been determined (after deducting depreciation and amortization) if no impairment losses of assets recognized in prior years.

2.q. Aset Keuangan dari Perjanjian Konsesi Jasa

Grup menerapkan ISAK 16 "Perjanjian Konsesi Jasa" atas Perjanjian Jual Beli Listrik (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN).

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian dimana pemerintah atau badan lainnya (pemberi konsesi) memberikan kontrak untuk penyediaan layanan publik ke entitas sektor swasta ("operator"). Perjanjian tersebut sering disebut sebagai perjanjian 'publik-ke-swasta'.

Dalam perjanjian ini, operator membangun infrastruktur yang akan digunakan untuk menyediakan jasa publik dan mengoperasikan

2.q. Financial Asset from Service Concession Arrangements

Group applies ISAK 16 "Service Concession Arrangements" on its Power Purchase Agreement (PPA) with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN).

Service concession arrangements are arrangements whereby a government or other body (the "grantor") grants contracts for the supply of public services to a private sector entity (the "operator"). This is often referred to as a 'public-to-private' arrangement.

In this type of arrangement, an operator constructs the infrastructure that will be used to provide the public service and operates and

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

serta mengelola infrastruktur tersebut untuk jangka waktu tertentu. Operator dibayar untuk jasa yang dibayarkan selama periode perjanjian. Perjanjian diatur oleh suatu kontrak yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian harga, dan pengaturan untuk menengahi perselisihan. Dalam beberapa kasus, operator dapat meningkatkan infrastruktur yang ada.

Beberapa ciri umum dari perjanjian konsesi jasa meliputi:

- Pemberi konsesi merupakan entitas sektor publik, termasuk badan pemerintah, atau entitas sektor swasta yang telah diberikan tanggung jawab atas layanan tersebut.
- Operator bertanggung jawab setidaknya atas sebagian pengelolaan infrastruktur dan jasa terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas kepentingan pemberi konsesi.
- Kontrak menetapkan harga awal yang akan dikenakan oleh operator dan mengatur perubahan harga selama periode perjanjian jasa.
- Operator diwajibkan untuk menyerahkan infrastruktur kepada pemberi konsesi pada akhir periode perjanjian dalam kondisi yang telah ditentukan, dengan sedikit atau tanpa imbalan tambahan, terlepas dari pihak yang awalnya mendanai infrastruktur.

PPA antara PLN dan Grup memenuhi definisi sebagai perjanjian konsesi jasa dimana PLN bertindak sebagai pemberi konsesi dan Grup bertindak sebagai operator. Grup setuju untuk merancang, membiayai, membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik tenaga mini hidro ("infrastruktur") dan menjual kepada PLN energi yang dihasilkan darinya dengan syarat dan kondisi sebagaimana disepakati dalam PPA. Infrastruktur digunakan untuk seluruh masa manfaatnya untuk tujuan perjanjian konsesi jasa.

Dalam ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan hak dan kewajiban terkait dengan konsesi jasa, Grup tidak mengakui infrastruktur sebagai aset tetap namun mengakui sebagai aset keuangan, karena Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menerima kas dari PLN melalui pembayaran kapasitas berdasarkan PPA. Aset keuangan dicatat sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang" sesuai dengan PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

maintains that infrastructure for a specified period of time. The operator is paid for the services over the period of the arrangement. A contract sets out performance standards, pricing mechanisms, and arrangements for arbitrating disputes. In some cases, the operator may upgrade the existing infrastructure.

Some common features of service concession arrangements include:

- *The grantor is a public sector entity, including a governmental body, or a private sector entity to which the responsibility for the service has been devolved.*
- *The operator is responsible for at least some of the management of the infrastructure and related services and does not merely act as an agent on behalf of the grantor.*
- *The contract sets the initial prices to be levied by the operator and regulates price revisions over the period of the service arrangement.*
- *The operator is obliged to hand over the infrastructure to the grantor in a specified condition at the end of the period of the arrangement, for little or no incremental consideration irrespective of which party initially financed it.*

The PPA between PLN and the Group meets the definition of a service concession arrangement, where PLN acts as a grantor and the Group acts as the operator. The Group agrees to design, finance, construct, own and operate a mini hydro power generating facility (the "infrastructure") and sell to PLN the power generated therefrom on terms and conditions as agreed in the PPA. The infrastructure is used for its entire useful life for the purpose of the service concession arrangement.

Under ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession, Group does not recognize the infrastructure as property and equipment but recognizes it as a financial asset, as Group has an unconditional right to receive cash from PLN through the capacity payments under the PPA. The financial asset is accounted as a "loans and receivables" in accordance with PSAK 55, "Financial Instruments: Recognition and Measurement".

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession agreement.

Grup tidak mengakui penjualan kapasitas listrik, namun mengakui pendapatan keuangan (melalui aset keuangan). Grup menghitung pendapatan yang terkait dengan jasa operasi sesuai dengan PSAK 23, "Pendapatan". Grup mencatat kewajiban kontraktual untuk memelihara atau mengembalikan infrastruktur di lokasi operasi sesuai dengan PSAK 57, Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aktiva Kontinjensi.

Group does not recognize sale of electrical capacity, but recognizes financial revenue (through the financial asset). Group accounts for revenue relating to operation services in accordance with PSAK 23, "Revenue". Group accounts for the contractual obligations to maintain or restore the infrastructure in the plant operations in accordance with PSAK 57, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

2.r. Liabilitas Bruto kepada Subkontraktor

Liabilitas bruto kepada subkontraktor diakui atas dasar akrual yang merupakan utang prestasi kerja subkontraktor yang belum diberitaacitakan, baik dari subkontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak. Utang bruto kepada subkontraktor disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba atau dikurangi kerugian yang diakui.

2.r. Gross Amount Due to Subcontractors

Gross amount due to subcontractors is recognised on accrual basis which represents uncertified subcontractor's working progress, either from subcontractor or materials which are recognized as progress as it has not fulfilled the certain payment condition as stated in the contract. Gross amount due to subcontractor is presented as the differences between costs occurred added by income or deducted by realized loss.

2.s. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian), yang diukur berdasarkan kemajuan fisik pada tanggal akhir periode pelaporan yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan eksternal.

2.s. Revenue and Expense Recognition

Contract revenue and contract cost associated with the construction contract are recognized as revenue and expense respectively by reference to the stage of completion of the contract activity at the end of the reporting period (percentage of completion method), which is measured based on the physical progress at the end of reporting period, which is stated on the minutes of external progress of completion works.

Jika kemungkinan besar terjadi total beban kontrak akan melebihi pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban.

If it is most likely to occur the total contract expenses will exceed contract revenue, the estimated loss is recognized immediately as an expense.

Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal.

Contract revenue comprises the initial amount of revenue that agreed in the contract and variations in contract work, claims, and incentive payments to the extent that is probable that it will result in revenue and can be reliably measured.

Biaya kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak secara umum dan dapat dialokasikan pada kontrak dan biaya lain yang secara spesifik dapat ditagihkan ke pelanggan sesuai isi kontrak.

Contract cost comprises costs that related directly to the specific contract, costs that are attributable to contract activity in general and can be allocated to the contract and such other costs specifically can be billed to the customer under the terms of the contract.

Pendapatan dari penjualan real estate diakui berdasarkan PSAK No. 44 "Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate" sebagai berikut:

- (i) Pendapatan dari penjualan bangunan rumah, ruko dan bangunan sejenis lainnya beserta kaveling tanahnya diakui dengan metode akrual penuh apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi:
1. proses penjualan telah selesai;
 2. harga jual akan tertagih;
 3. tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa depan terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli; dan
 4. penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut.
- (ii) Pendapatan dari penjualan kaveling tanah tanpa bangunan diakui dengan metode akrual penuh pada saat pengikatan jual beli apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi:
1. jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli;
 2. harga jual akan tertagih;
 3. tagihan penjual tidak bersifat subordinasi terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli di masa depan;
 4. proses pengembangan tanah telah selesai sehingga penjual tidak berkewajiban lagi untuk menyelesaikan kaveling tanah yang dijual, seperti kewajiban untuk memamatkan kaveling tanah atau kewajiban untuk membangun fasilitas-fasilitas pokok yang dijanjikan oleh atau menjadi kewajiban penjual, sesuai dengan pengikatan jual beli atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. hanya kavling tanah saja yang dijual, tanpa diwajibkan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan di atas kaveling tersebut.

Revenue from the sale of real estate is recognized based on PSAK No. 44 "Accounting for Real Estate Development Activities" as follows:

- (i) *Revenues from sales of houses, shop houses, and other similar property and related land are recognized under the full accrual method if all of the following conditions are met:*
1. *a sale is consummated;*
 2. *the selling price is collectible;*
 3. *the seller's receivable is not subject to future subordination against other loans which will be obtained by the buyer; and*
 4. *the seller has transferred the risks and rewards of ownership to the buyer through a transaction that is in substance a sale and does not have substantial continuing involvement with the property.*
- (ii) *Revenues from sales of lots that do not require the seller to construct building are recognized under the full accrual method if all of the following conditions are met:*
1. *total payments by the buyer are at least 20% of the agreed selling price and the amount is not refundable;*
 2. *the selling price is collectible;*
 3. *the receivable is not subordinated to other loans in the future;*
 4. *the land development process is complete so that the seller has no further obligations related to the lots sold, such as obligation to construct amenities or obligation to build other facilities applicable to the lots sold as provided in the agreement between the seller and the buyer or regulated by law; and*
 5. *only the lots are sold, without any requirement of the seller's involvement in the construction of building on the lots.*

(iii) Pendapatan dari penjualan unit bangunan kondominium, apartemen, perkantoran, pusat belanja dan bangunan sejenis lainnya, serta unit dalam kepemilikan secara *time sharing*, diakui dengan metode persentase penyelesaian apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi:

1. proses konstruksi telah melampaui tahap awal, yaitu fondasi bangunan telah selesai dan semua persyaratan untuk memulai pembangunan telah terpenuhi;
2. jumlah pembayaran oleh pembeli telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati dan total tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli; dan
3. jumlah pendapatan penjualan dan biaya unit bangunan dapat diestimasi dengan andal.

Apabila semua persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi, semua penerimaan uang yang berasal dari pelanggan dicatat sebagai uang muka dari pelanggan dengan menggunakan metode deposit, sampai semua persyaratan terpenuhi.

Beban pokok penjualan tanah ditentukan berdasarkan nilai perolehan tanah ditambah estimasi pengeluaran-pengeluaran lain untuk pengembangan tanah. Beban pokok penjualan rumah tinggal meliputi seluruh beban pembangunan.

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

2.t. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi.

(iii) Revenues from sales of condominiums, apartments, offices, shopping centre and other similar property, and units in a time sharing ownership, are recognized using the percentage-of-completion method if all of the following conditions are met:

1. the construction process has already commenced, i.e., the building foundation has been completed and all of the requirements to commence construction have been fulfilled;
2. total payments by the buyer are at least 20% of the agreed selling price and the amount is not refundable; and
3. the amount of revenue and the cost of the property can be reliably estimated.

If any of the above conditions is not met, the payments received from the buyer are recorded as advances received from buyers by using deposit method, until all of the criteria are met.

Cost of land sold is determined based on acquisition cost of the land plus other estimated expenditures for its improvement and development. The cost of residential house sold is determined based on actual cost incurred to complete the work.

Expenses are recognised as incurred on an accruals basis.

2.t. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

Konstruksi yang termasuk dalam perolehan aset tertentu adalah proyek-proyek pre-financing yang pembangunannya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.

2.u. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar seluruh aset yang dialihkan oleh Grup pada tanggal akuisisi, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi, dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan SAK yang relevan.

Komponen kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto teridentifikasi dari pihak diakuisisi.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugiannya, jika ada, diakui dalam laba rugi. Apabila dalam periode sebelumnya, perubahan nilai wajar yang berasal dari kepentingan ekuitasnya sebelum tanggal akuisisi telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain, jumlah tersebut diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika Grup telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses

Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

Construction included in acquisition of certain assets is the pre-financing projects whose constructions time is required more than one year.

2.u. Business Combinations

Business combination is a transaction or other events in which an acquirer obtains control of one or more businesses. Business combination is accounted for by applying the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is computed as the sum of the fair value of the assets transferred by the Group at acquisition date, liabilities recognized by the Group to former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized as expenses in the period in which the costs are incurred and the services are rendered.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at the fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant SAK.

Components of non-controlling interests of the acquiree are measured either at fair value or according to proportional share of the equity instruments in the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured at its fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. If in prior periods, changes in fair value of its equity interest in the acquiree prior to the acquisition date had been recognized in other comprehensive income, that amount shall be recognized with the same basis as would be required had the Group disposed of the previously held equity interest directly.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts

akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara tersebut, dan mengakui tambahan aset atau liabilitas, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi, yang jika diketahui, akan menyebabkan pengakuan aset dan liabilitas yang dimaksud pada tanggal tersebut.

Pada tanggal akuisisi, Grup mengakui *goodwill* yang diukur sebagai selisih lebih antara (a) nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali, dan, jika kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki Grup atas pihak yang diakuisisi; dan (b) selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi.

Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto pihak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan dari akuisisi setelah sebelumnya manajemen menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penelaahan tersebut.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas dari Grup yang diperkirakan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditempatkan dalam Unit Penghasil Kas tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu Unit Penghasil Kas dan operasi tertentu atas Unit Penghasil Kas tersebut dilepaskan, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepaskan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi Unit Penghasil Kas yang ditahan.

Saat penentuan imbalan dari kombinasi bisnis termasuk imbalan kontinjensi, imbalan kontinjensi ini diukur pada nilai wajar saat tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi

for the items for which the accounting is incomplete. During the measurement period, the Group shall retrospectively adjust those provisional amounts and recognize additional assets or liabilities, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

At acquisition date, the Group recognizes goodwill which is measured as the excess of (a) the aggregate of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest, and, in a business combination achieved in stages, the acquisition-date fair value of the Group's previously held equity interest in the acquiree; and (b) the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed.

If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the acquiree, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously the management reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and all of the liabilities assumed and recognize any additional assets or liabilities that are identified in that review.

Subsequent to initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purposes of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, is allocated to each of the Group's Cash Generating Units that is expected to benefit from the synergies of the business combination, regardless of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those Cash Generating Units.

If goodwill was allocated to a Cash Generating Unit and certain operations on the Cash Generating Unit are disposed, the goodwill associated with the disposed operation is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or losses on disposal. Disposed goodwill is measured on the basis of relative values of the disposed operation and the portion of the Cash Generating Units retained.

When the determination of consideration from a business combination includes contingent consideration, it is measured at its fair value on acquisition date. Contingent consideration is

diklasifikasikan sebagai ekuitas atau liabilitas keuangan. Jumlah yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar dimana perubahan pada nilai wajar tersebut diakui dalam laba rugi atau ketika penyesuaian dicatat diluar periode pengukuran. Perubahan pada nilai wajar imbalan kontinjensi yang memenuhi persyaratan sebagai penyesuaian periode pengukuran, disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang timbul dari informasi tambahan yang didapat selama periode pengukuran, yang tidak boleh melebihi satu tahun dari tanggal akuisisi, tentang fakta dan kondisi yang ada pada saat tanggal akuisisi.

2.v. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup.

Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset ataupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) dicatat sesuai dengan nilai buku seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Entitas yang menerima bisnis, dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dalam akun tambahan modal disetor.

2.w. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

classified either as equity or a financial liability. Amounts classified as a financial liability are subsequently remeasured to fair value with changes in fair value recognized in profit or loss when adjustments are recorded outside the measurement period. Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement-period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments made against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period, which cannot exceed one year from the acquisition date, about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

2.v. Business Combination between Entities Under Common Control

Business combination of entities under common control transactions, such as transfers of business conducted within the framework of the reorganization of the entities that are in the same group, not a change of ownership in terms of economic substance, so that the transaction can not result in a gain or loss for the Group as a whole or the individual entity within the Group.

Due to business combination transactions of entities under common control does not lead to change in economic substance of ownership on the exchanged asset, liability, shares or other ownership instrument, then the transferred asset or liability (in its legal form) is recorded at its carrying amount as well as a business combination under the pooling of interest method.

An entity that receives the business, in a business combination of entities under common control, recognizes the difference between the amount of the consideration transferred and the carrying amount of each transaction is a business combination of entities under common control in equity under additional paid in capital.

2.w. Income Tax

The tax expense is the combined amount of current tax and deferred tax which calculated in determining profit or loss in the period.. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset.

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset.

Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of prior periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) the initial recognition of goodwill; or*
- b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.x. Pajak Penghasilan Final

Beban pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui selama tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah

The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) *the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b) *the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. *the same taxable entity; or*
 - ii. *different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

The Group offsets current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a) *has legally enforceable right to set off the recognized amounts, and*
- b) *intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

2.x. Final Income Tax

Final income tax expense is recognized proportionately with the accounting income recognized during the year. The difference between the final income tax paid and the final tax expense in the profit or loss for the period is

yang dibebankan pada penghitungan laba atau rugi tahun berjalan, diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak. Jika penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final, perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

recognized as prepaid tax or tax payable. If the income is already subjected to final income tax, the differences between the consolidated financial statements carrying value of existing assets and liabilities and their tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities.

2.y. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

2.y. Employee Benefits

Short-Term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU No. 13/2003").

Post-Employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Labor Law No. 13/2003 ("Law No. 13/2003").

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determined by discounting the benefit.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

The Group not only record for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbalan hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liabilities (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets and any change in effect of the asset are recognized in other comprehensive income.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

Termination Benefits

The Group recognizes liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- (a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan

- (a) *When the Group no longer can withdraw the offer of those benefits; and*

(b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan jangka panjang lain seperti cuti berimbalan jangka panjang dan dihitung dengan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini.

(b) When the Group recognizes costs for a restructuring within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

Other Long-Term Employee Benefits

Other long-term benefits such as long service leave and calculated using the projected unit credit method and discounted to present value.

2.y. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Pengaturan Bersama

Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* akan mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- (a) Jika investasi menjadi entitas anak, dan
- (b) Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.

2.y. Investments in Associates and Joint Arrangement

Associates

Associates are entities in which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but has no control or jointly control over those policies (significant influence).

Investment in associates is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost and the carrying amount is added or subtracted by the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee will reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- (a) If the investment becomes a subsidiary, and
- (b) If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measures the retained interest at fair value.

- (c) Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika investee telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan atas dua atau lebih pihak yang memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang hanya ada ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

1) Operasi Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- Pendapatan dari penjualan bagiannya atas *output* yang dihasilkan dari operasi bersama;
- Bagian atas pendapatan dari penjualan *output* oleh operasi bersama; dan
- Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

2) Ventura Bersama

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

- (c) When the Group discontinues the use of the equity method, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

Joint Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The Group classifies joint arrangement as:

1) Joint Operation

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operator.

A joint operator recognizes in relation to its interest in a joint operation:

- Its assets, including its share of any assets held jointly;
- Its liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;
- Its revenue from the sale of its share of the *output* arising from the joint operation;
- Its share of the revenue from the sale of the *output* by the joint operation; and
- Its expenses, including its share of any expenses incurred jointly.

2) Joint Venture

The Group classifies joint arrangement as a joint venture whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

A joint venturer recognizes its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

2.z. Biaya Emisi Obligasi Saham dan Surat Berharga Perpetual

Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi bersih obligasi. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan.

Biaya emisi saham disajikan sebagai bagian tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi. Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

2.aa. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrument berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

2.bb. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal didalam Grup.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2.z. Bond Shares Issuance Costs and Perpetual Securities

Bond issuance costs are transaction costs to be deducted from the proceeds in order to determine the net proceeds of bonds. The difference between the net proceeds and the nominal value is a discount or premium and will be amortized over the term of the bonds.

Share issuance costs are deducted from additional paid in capital and not amortized. Share issuance costs are presented as a deduction of additional paid-in capital and not amortized.

2.aa. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

For the purpose of calculation diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

2.bb. Operating Segment

The Group presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.

An operating segment is a component of the entity:

- *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- *whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and*
- *for which separate financial information is available.*

**2.cc. Program Opsi Kepemilikan Saham
Manajemen dan Karyawan (MESOP)**

Perusahaan menyediakan program opsi saham untuk karyawan yang berhak dan anggota manajemen (MESOP). Program ini terdiri dari program opsi saham bahwa setelah diselesaikan melalui penerbitan saham (pengaturan pembayaran saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas) dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas kepada anggota manajemen dan layanan sejenis lainnya diukur pada nilai wajar instrumen ekuitas pada tanggal pemberian opsi.

Nilai wajar yang ditentukan pada tanggal pemberian opsi pembayaran saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas dicatat sebagai beban dengan metode garis lurus sepanjang periode *vesting*, berdasarkan estimasi instrumen ekuitas Perusahaan yang akhirnya akan diberikan, dengan peningkatan yang sesuai pada ekuitas.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengubah estimasi dari jumlah instrumen ekuitas yang diharapkan akan diberikan.

Dampak dari perubahan atas estimasi awal, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai biaya kumulatif yang mencerminkan perubahan estimasi, dengan penyesuaian berdasarkan cadangan imbalan kerja yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas.

2.cc. Management and Employee Stock Option Program (MESOP)

The Company provides stock option program to their eligible employees and members of management (MESOP). This program consists of stock option plan that upon exercise is settled through issuance of shares (equity – settled share based payment arrangement) which is accounted as equity transaction.

Equity-settled share-based payments to member of management and others providing similar services are measured at the fair value of the equity instruments at the grant date.

The fair value determined at the grant date of the equity-settled share-based payments is expensed on a straight-line basis over the vesting period, based on the Company's estimate of equity instruments that will eventually vest, with a corresponding increase in equity.

At the end of each reporting period, the Company revises its estimate of the number of equity instruments expected to vest.

The impact of the revision of the original estimates, if any, is recognised in statements of comprehensive income such that the cumulative expense reflects the revised estimate, with a corresponding adjustment to the equity-settled employee benefits reserve.

**3. Pertimbangan Kritis Akuntansi dan
Estimasi Akuntansi yang Signifikan**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, Direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

**3. Critical Accounting Judgments and
Estimates**

In the application of the Group accounting policies, the Directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana direksi telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Grup dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan keputusan keuangan, operasional dan modal dari pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Grup mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama, apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
 - a. Bentuk legal dari kendaraan terpisah;
 - b. Persyaratan dari perjanjian kontraktual; dan
 - c. Fakta dan kondisi lainnya, jika relevan.

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut merupakan sebuah ventura bersama.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Below are the critical judgments, apart from those involving estimations, that the directors have made in the process of applying the Group accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Interests in joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the financial, operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle*
- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:*
 - a. *The legal form of the separate vehicle;*
 - b. *The terms of the contractual arrangement; and*
 - c. *Other relevant facts and circumstances*

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the consolidated financial statements.

The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures. These structures and the terms of the contractual arrangement indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangement. The Group also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and concluded that the arrangements are joint ventures.

Investasi pada entitas asosiasi

PT Wika Realty Minor Development (WRMD) dan PT Wijaya Karunia Realtindo (WKR) merupakan asosiasi dari Grup meskipun Grup memiliki 50% kepemilikan di WRMD dan WKR. Direksi WIKAREALTY menilai apakah Grup memiliki kontrol atau tidak atas WRMD dan WKR, dan juga berdasarkan apakah Grup memiliki kemampuan yang nyata untuk mengatur kegiatan WRMD dan WKR secara sepihak. Dalam membuat penilaian mereka, Direksi mempertimbangkan keberadaan perwakilan Grup di dewan direksi WRMD dan WKR yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan kegiatan WRMD dan WKR secara sepihak. Karena WRMD dan WKR memiliki perwakilan dalam dewan direksi WRMD dan WKR, direksi menilai bahwa Grup tidak memiliki kontrol tetapi hanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap WRMD dan WKR.

Pajak penghasilan final

Pajak penghasilan dari aktivitas jasa konstruksi dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 tahun 2009 mengenai perubahan atas PP No. 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Agustus 2008, dimana perlakuan pengenaan pajak final dikenakan atas kontrak sebesar 3% yang diperoleh mulai tanggal 1 Agustus 2008

Pajak penghasilan final disajikan diluar beban pajak penghasilan pada laba rugi.

Perbedaan nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Sumber Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Pengakuan pendapatan dan beban pokok penjualan

Grup mengakui pendapatan dan beban pokok penjualan dari proyek yang masih dalam progress pembangunan berdasarkan metode persentase penyelesaian. Tahap penyelesaian diukur berdasarkan kebijakan akuntansi. Asumsi yang penting diperlukan adalah dalam menentukan tahap penyelesaian (persentase penyelesaian) dan jumlah estimasi pendapatan dan jumlah biaya pembangunan. Dalam membuat asumsi, Grup mengevaluasinya berdasarkan pengalaman di waktu yang lampau dan bantuan dari spesialis. Pendapatan dari proyek diungkapkan dalam Catatan 43 dan beban dari proyek diungkapkan dalam Catatan 44.

Investments in associates

PT Wika Realty Minor Development (WRMD) and PT Wijaya Karunia Realtindo (WKR) are associates of the Group although the Group owns 50% ownership interest in WRMD and WKR. The directors of WIKAREALTY assessed whether or not the Group has control over WRMD and WKR based on whether the Group has practical ability to direct the relevant activities of WRMD and WKR unilaterally. In making their judgement, the Directors considered the Group's representation in WRMD and WKR's Board of Directors which has the power to direct the relevant activities of WRMD and WKR unilaterally. As the Group does not have a representative in WRMD and WKR's Board of directors, the directors assessed that the Group has no control but only significant influence in WRMD and WKR.

Final income tax

Income tax from construction is computed based on the Government Regulation No. 40 year 2009 concerning amendments of Government Regulation No. 51 year 2008 concerning income tax from the construction business which effective starting August 1, 2008, final tax at 3% is applied for contract signed starting August 1, 2008.

Final income tax is presented outside income tax expenses in profit or loss.

The difference between the final income tax carrying amounts of existing assets and liabilities, and their respective final tax bases are not recognised as deferred tax assets or liabilities.

Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Revenue and cost of revenue recognition

The Group recognize revenues and cost of revenues from the construction and project in development stage based on percentage of completion method. Stage of completion is measured based on the accounting policies. Important assumption is required in determining the stage completion (percentage of completion) and the amount of estimated income and total development cost. In making assumptions, the Group evaluate them based on past experience and with the assistance of specialist. Revenue from the project are disclosed in Note 43 and expenses from the project are disclosed in Note 44.

Rugi penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang

Grup menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang telah diungkapkan dalam Catatan 5, 6, 7, 8, dan 9.

Penyisihan penurunan nilai persediaan

Grup membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi persediaan yang digunakan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Grup. Nilai tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 10.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut. Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 19.

Pengukuran nilai wajar untuk properti investasi

Properti investasi Grup diukur pada nilai wajar untuk tujuan pelaporan keuangan. Dalam mengestimasi nilai wajar, Grup menugaskan penilai independen untuk melakukan penilaian. Penilaian tersebut

Impairment loss on loans and receivables

The Group assesses its loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of loans and receivables are disclosed in Notes 5, 6, 7, 8, and 9.

Allowance for decline in value of inventories

The Group provides allowance for decline in value of inventories based on estimated future usage of such inventories. While it is believed that the assumptions used in the estimation of the allowance for decline in value of inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the allowance for decline in value of inventories, which ultimately will impact the result of the Group's operations. The carrying amount of inventories is disclosed in Note 10.

Estimated useful lives of property, plant and equipment

The useful life of each item of the Group's property, plant and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying amounts of these assets. The carrying amounts of property, plant and equipment are disclosed in Notes 19.

Fair value measurements of investment properties

The Group's investment property was measured at fair value for financial reporting purposes. In estimating the fair value, the Group engaged independent valuers to perform the valuation. Such

didasarkan pada pendekatan data pasar. Nilai tercatat properti investasi diungkapkan dalam Catatan 18.

valuation was based on market data approach. The carrying amount of the investment properties are disclosed in Note 18.

Manfaat karyawan

Penentuan liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi aktual yang berbeda dari asumsi Grup akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya yang diakui di laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Grup. Nilai tercatat liabilitas imbalan pasca kerja diungkapkan dalam Catatan 32.

Employee benefits

The determination of post-employment benefits obligation is dependent on selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Group's assumptions generally affect the recognized expense in profit or loss and other comprehensive income and recorded obligation in future periods. While it is believed that the Group's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions may materially affect the Group's post-employment benefit obligations. The carrying amounts of post-employment benefits obligations are disclosed in Note 32.

Penurunan nilai goodwill

Menentukan apakah suatu goodwill turun nilainya mengharuskan estimasi nilai pakai unit penghasil kas dimana goodwill dialokasikan. Perhitungan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk mengestimasi arus kas masa depan yang diharapkan timbul dari unit penghasil kas yang menggunakan tingkat pertumbuhan yang tepat dan tingkat diskonto yang sesuai untuk perhitungan nilai kini. Dimana aktual arus kas masa depan kurang dari yang diharapkan, kerugian penurunan nilai material mungkin timbul. Nilai tercatat goodwill pada akhir periode pelaporan disajikan pada Catatan 20.

Impairment of goodwill

Determining whether goodwill is impaired requires an estimation of the value in use of the cash generating units to which goodwill has been allocated. The value in use calculation requires the management to estimate the future cash flows expected to arise from the cash-generating unit using an appropriate growth rate and a suitable discount rate in order to calculate present value. Where the actual future cash flows are less than expected, a material impairment loss may arise. The carrying amount of goodwill at the end of the reporting period are set out in Note 20.

4. Kas dan Setara Kas

4. Cash and Cash Equivalents

	2018 Rp	2017 Rp
Kas/ Cash on Hand	26,519,734	16,055,937
Bank - Pihak Berelasi/ Bank - Related Parties (Catatan 50/Note 50)	8,218,256,493	7,073,336,141
Bank - Pihak Ketiga/ Bank - Third Parties		
Rupiah		
PT Bank DKI	909,730,450	181,984,475
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ	552,853,680	3,617,157
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	301,423,871	--
PT Bank DBS Indonesia	220,739,848	139,837,169
PT Bank CIMB Niaga Tbk	145,912,182	12,558,219
PT Bank Pan Indonesia Tbk	101,146,317	4,606,129
PT Bank HSBC Indonesia	80,957,345	47,324,963
PT Bank Permata Tbk	79,253,543	528,845
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	64,925,317	708,967
PT Bank ICBC Indonesia	13,088,611	6,590,811
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	12,865,819	255,378,192

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018 Rp	2017 Rp
PT Bank Central Asia Tbk	6,980,245	12,247,578
PT Shin Han Bank	1,912,998	--
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	1,770,658	5,296,159
Indonesia Eximbank	1,505,410	1,833,077
PT Bank Mega Tbk	1,163,787	1,166,653
PT Bank OCBC NISP Tbk	1,055,280	1,034,066
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	649,571	54,603,623
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	593,050	587,968
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	543,042	--
PT Bank MNC Internasional Tbk	542,166	536,087
PT Bank SulutGo	474,772	298,153
PT Bank Bukopin Tbk	332,396	1,676,237
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	235,329	896,951
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	231,456	110,237
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	191,269	956,859
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah	113,200	113,425
PT Bank Resona Perdania	100,000	--
PT Bank UOB Indonesia	47,492	50,012
PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel	17,376	8,493,331
PT Bank China Construction Bank	2,104	--
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	857	--
PT Bank Mitraniaga Tbk	--	45,551
Mata Uang Asing / Foreign Currencies		
USD		
PT Bank DBS Indonesia	32,756,784	11,932,648
PT Bank HSBC Indonesia	21,130,514	18,687,430
PT Bank Pan Indonesia Tbk	3,471,507	3,245,385
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ	3,464,975	3,412,595
PT Bank Permata Tbk	2,884,671	2,708,238
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1,299,576	1,218,334
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	212,512	1,369,679
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	180,793	169,214
PT Bank CIMB Niaga Tbk	157,774	79,086
PT Bank OCBC NISP Tbk	13,124	13,150
Bank of China	172	534
JPY		
PT Bank DBS Indonesia	288,006	221,902
PT Bank HSBC Indonesia	2,343	2,182
EURO		
PT Bank DBS Indonesia	44,857	43,949
PT Bank HSBC Indonesia	253	253
MYR		
RHB Bank Kuching	100,486	34,353
Public Bank Kuching	--	3,747
DINAR		
Bank CPA	16,411,805	--
Banque exterieure d'Algerie	--	2,017,064
Sub Total	2,583,779,593	788,240,637
Total Bank / Banks	10,802,036,086	7,861,576,778

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018	2017
	Rp	Rp
Deposito Berjangka - Pihak Berelasi (Catatan 50)/ Time Deposits - Related Parties (Note 50)	<u>2,563,626,520</u>	<u>2,396,245,500</u>
Deposito Berjangka - Pihak Ketiga/ Time Deposits - Third Parties		
Rupiah		
PT Bank DKI	250,000,000	300,000,000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	110,384,137	10,000,000
PT Bank Mega Tbk	79,800,000	100,900,000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	51,200,000	15,000,000
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ	50,000,000	--
PT Bank Bukopin Tbk	18,200,000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	15,000,000	300,000,000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	10,000,000	10,000,000
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	10,000,000	--
PT Bank DBS Indonesia	4,000,000	4,000,000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2,000,000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Riau	1,000,000	--
PT Bank Pan Indonesia Tbk	--	100,000,000
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	--	100,000,000
PT Bank Mandiri Taspen	--	50,000,000
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	--	10,000,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	100,000
Sub Total	<u>601,584,137</u>	<u>1,000,000,000</u>
	<u>3,165,210,657</u>	<u>3,396,245,500</u>
Dikurangi Deposito yang Dibatasi Penggunannya/ Less Restricted Deposits	<u>(20,000,000)</u>	<u>(20,100,000)</u>
Total Deposito	<u>3,145,210,657</u>	<u>3,376,145,500</u>
Total	<u>13,973,766,477</u>	<u>11,253,778,215</u>

Kisaran tingkat bunga kontraktual dan jangka waktu deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

The range of annual interest rates and time period of time deposits as follows:

	2018	2017
Tingkat Bunga/ Interest Rates		
Rupiah	4.25% - 8.00%	4.00% - 11.00%
USD	0.75%	0.25%
Jangka Waktu/ Maturity Period	1 - 3 Bulan/ Months	1 - 3 Bulan/ Months

Deposito yang dijaminan merupakan deposito yang dijadikan jaminan utang bank atas fasilitas kredit dari PT Bank Muamalat Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan jangka waktu deposito berjangka adalah 1-3 bulan, tingkat bunga 6,00% - 6,75% dan nilai bagi hasil (nisbah syariah) 70% - 83,72%.

Restricted deposits represent deposits which are used as collateral for bank loans of credit facilities from PT Bank Muamalat Tbk and PT Bank Maybank Indonesia Tbk with time deposits period of 1-3 months, annual interest rate 6.00% - 6.75% and profit sharing (syariah) 70% - 83.72%.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

5. Piutang Usaha

5. Trade Accounts Receivables

	2018 Rp	2017 Rp
Bagian Lancar / Current Portion		
Pihak Berelasi/ Related Parties (Catatan 50/Note 50)	2,793,767,239	3,055,532,845
Dikurangi/ Less : Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(48,226,806)	(54,889,729)
	<u>2,745,540,433</u>	<u>3,000,643,116</u>
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Tamansari Jiwa	188,700,949	192,111,405
PT Surya Bumimegah Sejahtera	140,140,918	110,736,400
ZEESM Government of Republik Demokratik Timor Leste	102,239,662	--
PT D&C Engineering Company	92,501,618	15,452,455
PT Trans Cibubur Property	86,731,918	17,342,612
PT Graha Tunas Selaras	72,370,917	--
DPU Pemkab Penajam Paser Utara	72,020,987	--
Sino Road and Bridge Group Co. Ltd - Utama Karya KSO	57,236,180	--
PT Trans Ritel Property	51,032,436	72,980,328
Tamansari Lagoon Apartemen	42,752,431	38,945,888
AADL Housing Ministry of Algeria	42,086,212	--
PT Waskita - Gorip KSO	40,297,876	--
PT Dago Trisinergi Property	40,254,802	44,960,191
CSTS Joint Operation	39,904,449	--
PT Bukit Darmo Property Tbk	39,494,464	44,494,464
PT Gunung Bara Utama	39,055,099	57,348,315
PT Natpac Graha Arthamas	38,043,751	--
PT Anugrah Duta Sejati	36,498,426	25,976,799
Tamansari Metropolitan Manado	31,493,180	--
PT Truba Jaya Enginerring	29,925,235	--
PT WIKA Realty Minor Development	29,619,873	--
PT Fantasy Batam Island	28,364,570	28,364,570
Tamansari Hive Office	27,388,494	38,308,150
PT Dian Previta	26,648,997	--
PT Satyamitra Surya Perkasa	24,144,693	32,379,207
KSO Griya Sarana Jaya Property	23,875,585	16,800,313
Soesana Soeharsono	23,856,840	--
PT Bogor Jasmin Lestari	22,624,004	--
Unit Penjualan Aset/Asset Unit Sales WIKA Realty	21,821,408	23,561,585
Tamansari Tera	21,330,310	22,949,553
Yasapola Remaja-Calista Perkasa KSO	19,654,995	42,878,224
Tamansari Sudirman	19,510,806	--
PT Raya Bumi Nusantara Permai	19,360,800	--
Tamansari De Papilio	18,967,385	--
Zecon & Co Kuching Malaysia	17,854,698	17,854,698
PT Yasapola Remaja	17,428,260	--
PT Kukuh Mandiri Lestari	16,826,652	--
PT Wikaraga Sapta Utama	16,769,195	16,769,195
PT Trans Retail Indonesia	16,674,391	10,465,096
PT Banua Anugerah Sejahtera	16,543,469	16,543,469
PT Alfa Retail Indonesia	16,371,583	--
Tamansari Semanggi	16,271,654	--
PT Girder Indonesia	14,840,101	--
High Speed Railway Contractor Consortium	14,839,828	--
PT Dewanto Cipta Pratama	14,624,574	--
PT Industri Nabati Lestari	14,597,091	16,234,955
PT Cempaka Sinergi Realty	14,311,322	--

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018 Rp	2017 Rp
PT Murinda Iron Steel	13,926,690	20,160,258
National Group Construction Dubai	13,921,504	--
PT Sumber Cipta Sejati	13,866,899	--
KOKAR Beton Makmur Wijaya	13,576,814	--
PT Maju Gemilang Serpong	13,486,316	21,116,857
PT Mitra Panca Perkasa	12,667,291	17,677,921
PT Kantaraya Utama	12,517,572	12,517,572
Proyek Bintaro	11,683,569	--
PT Patra Jasa	11,538,378	--
PT Jaya Daido Concrete	11,022,501	10,887,974
KSU Perum Perumnas-PT Propernas	10,762,131	14,007,255
PT Adaro Persada Mandiri	10,663,832	--
PT Rekayasa Industri	10,363,261	--
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd	9,307,913	--
PT Lucky Sakti	9,198,651	--
PT Yayasan Masjid Surakarta	8,636,500	--
PT Hegar Amanah Jaya Bersama	8,634,466	20,997,380
PT Dharma Leksana-Multi Indah KSO	6,665,122	30,967,201
PT Sejahtera Intercon	5,946,959	11,286,756
PT Tlatah Gema Anugerah	5,520,227	29,959,017
Tamansari Panoramic	5,285,234	7,714,464
Tamansari La Grande	4,189,805	23,490,187
Marubeni Corporation	3,342,729	24,615,693
PT Puncak Dharmahusada	2,869,938	38,767,550
Kementerian Pekerjaan Umum Pupra	--	126,966,249
PT Agung Podomoro Land	--	78,462,621
PT Pulomas Jaya	--	66,118,033
Georgina Neto Dos Santos LDA	--	39,616,973
PT Pembangunan Perumahan - Modern KSO	--	29,787,903
BPJS Kesehatan	--	15,030,455
DPU Tata Ruang Tarakan	--	11,881,542
CV Usaha Multi Guna	--	11,820,977
CHEC - CSCEC - HK JO	--	10,522,970
PT VSL Indonesia	--	10,436,912
PT Jasapower Indonesia	--	10,346,982
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp5.000.000)/ Others (each below Rp5.000.000)	810,810,667	539,453,851
Sub Total	2,858,308,057	2,138,069,425
Dikurangi/ Less : Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(253,008,054)	(208,559,409)
Total Pihak Ketiga - Neto/ Total Third Parties - Net	2,605,300,003	1,929,510,016
Total Bagian Lancar / Current Portion	5,350,840,436	4,930,153,132
Bagian Tidak Lancar / Non Current Portion		
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Grand Tamansari Samarinda	798,750	137,200
Tamansari Skylounge Balikpapan	516,678	459,932
Tamansari The Hive	404,545	978,510
Tamansari Semanggi Apartmen	--	1,812,508
Tamansari De Papilio	--	1,269,456
Total Bagian Tidak Lancar / Non Current Portion	1,719,973	4,657,606

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Details of trade accounts receivables by currencies are as follows:

	2018 Rp	2017 Rp
Rupiah	5,334,118,859	5,127,960,649
Dolar Amerika Serikat/ <i>United States Dollar</i>	257,991,444	51,721,893
Dinar Algeria	42,086,212	--
Ringgit Malaysia	19,598,754	17,854,698
Saudi Arabian Riyal	--	722,636
Sub Total	5,653,795,269	5,198,259,876
Dikurangi/ <i>Less</i> : Kerugian Penurunan Nilai/ <i>Allowance for Impairment Losses</i>	(301,234,860)	(263,449,138)
Total	5,352,560,409	4,934,810,738

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging of trade accounts receivables is as follows:

	2018 Rp	2017 Rp
< 1 Bulan/ <i>Month</i>	1,815,518,764	907,901,448
1 - 3 Bulan/ <i>Months</i>	1,752,315,465	1,356,441,844
3 - 6 Bulan/ <i>Months</i>	394,703,065	719,152,489
6 - 12 Bulan/ <i>Months</i>	372,740,193	607,305,308
> 12 Bulan/ <i>Months</i>	1,318,517,782	1,607,458,787
Sub Total	5,653,795,269	5,198,259,876
Dikurangi/ <i>Less</i> : Kerugian Penurunan Nilai/ <i>Allowance for Impairment Losses</i>	(301,234,860)	(263,449,138)
Total	5,352,560,409	4,934,810,738

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on trade accounts receivable are as follows:

	2018 Rp	2017 Rp
Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	263,449,138	196,573,572
Mutasi/ <i>Movements</i>	37,785,722	66,875,566
Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	301,234,860	263,449,138

Manajemen telah membentuk cadangan penurunan nilai piutang berdasarkan penilaian individual atas masing-masing pelanggan.

The Management provided allowance for impairment losses on receivables based on individual assessment of each customers.

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha cukup untuk menutup kemungkinan kerugian di masa depan dari tidak tertagihnya piutang.

Management of the Group believes that the allowance for impairment losses on trade accounts receivables is sufficient to cover possible losses on uncollectible of receivables in the future.

Sebagian piutang usaha dijamin untuk fasilitas pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang (Catatan 24 dan 35).

Some trade accounts receivables have been pledged as collateral for facilities from short term and long term loans (Notes 24 and 35).

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

6. Piutang Retensi

6. Retention Receivables

	2018 Rp	2017 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 50)/ Related Parties (Note 50)	677,642,045	348,167,986
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Jakarta Propertindo	232,382,417	122,931,769
ZEESM, Government of RDTL	164,165,948	74,440,464
PT D&C Engineering Company	128,876,300	89,773,082
Chevron Corporation	116,970,978	91,161,720
PT Surya Bumi Megah Sejahtera	48,238,633	33,995,777
PT Marga Sarana Jabar	39,355,446	--
PT Graha Tunas Selaras	34,623,246	16,682,005
PT Puncak Dharmahusada	32,999,253	31,708,734
PT Trans Cibubur Property	27,437,584	--
PT Wikaraga Sapta Utama	21,689,499	21,689,499
PT Trans Ritel Property	20,996,124	--
Pemprov Jabar Bina Marga dan Penataan Ruang	20,241,540	--
Universitas Sam Ratulangi	19,419,050	--
PT Industri Nabati Lestari	17,691,632	--
PT Bangun Prima Raya	16,640,286	16,640,286
PT Tlatah Gema Anugerah	15,706,081	14,971,825
PT Pulomas Jaya	14,169,367	11,768,405
PT Hegar Amanah Jaya Bersama	11,923,206	11,502,960
PT Trans Ritel Indonesia	11,581,754	14,129,605
PT Dago Trisinergi	11,448,710	11,448,710
PT Jaya Real Propertindo	9,322,307	14,472,471
DPU Kepulauan Riau	9,090,942	14,012,201
PT Kukuh Mandiri Lestari	8,825,212	--
PT Truba Jaya Engineerring	8,659,901	--
British Protenum	--	41,808,711
JAICA - UI	--	29,209,365
SNVT PLK Jar.Sumber Air Brantas Sungai	--	24,702,064
PT Jakarta International Container Terminal	--	20,450,281
PT Gunung Bara Utama	--	17,802,810
Satker Pelaksanaan SDA Ciliwung Cisadane	--	12,129,074
Dikurangi/ Less : Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(30,592,749)	(9,882,010)
Sub Total	1,246,488,344	979,998,517
Total	1,924,130,389	1,328,166,503
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp5.000.000)/ Others (each below Rp5,000,000)	234,625,677	252,448,709
Sub Total	1,277,081,093	989,880,527

Rincian piutang retensi berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Details of retention receivables by currencies are as follows:

	2018 Rp	2017 Rp
Rupiah	1,669,060,652	1,302,771,189
Dolar Amerika Serikat	285,124,463	35,575,955
Ringgit Malaysia	538,023	--
Sub Total	1,954,723,138	1,338,347,144
Dikurangi/ Less : Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(30,592,749)	(10,180,641)
Total	1,924,130,389	1,328,166,503

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses on retention receivable are as follows:

	2018 Rp	2017 Rp
Saldo Awal/ Beginning Balance	10,180,641	8,162,524
Mutasi/ Movements	20,412,108	2,018,117
Saldo Akhir/ Ending Balance	30,592,749	10,180,641

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang retensi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian di masa depan dari tidak tertagihnya piutang retensi.

Management of the Group believes that the allowance for impairment losses on retention receivables is sufficient to cover possible losses on uncollectible of retention receivables in the future.

7. Tagihan Bruto Ke Pemberi Kerja

7. Gross Amount Due from Customers

	2018 Rp	2017 Rp	
Biaya Konstruksi	56,561,074,799	37,675,015,129	Construction Cost
Laba yang Diakui	3,674,574,818	1,932,968,880	Recognized Profit
Sub Total	60,235,649,617	39,607,984,009	Sub Total
Penagihan	(50,322,554,682)	(30,345,031,220)	Progress Billing
Tagihan Bruto Pemberi Kerja	9,913,094,935	9,262,952,789	Due from Customer
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(11,048,200)	(1,993,695)	Allowance for Impairment Losses
Total	9,902,046,735	9,260,959,094	Total

Rincian saldo tagihan bruto pemberi kerja adalah sebagai berikut:

Details of gross amount due from customers are as follows:

	2018 Rp	2017 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 50)/ Related Parties (Note 50)	5,565,798,797	5,826,664,167
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Jakarta Propertindo	663,448,825	758,014,690
AADL Ministry of Housing Algeria	565,641,496	--
PT Bosowa Marga Nusantara	325,926,469	--
PT D&C Engineering Company	258,072,424	121,307,512
Chevron Corporation	222,432,541	215,609,946
BP Berau, Ltd.	221,502,607	209,280,348
PT Trans Cibubur Property	179,560,670	21,523,173
PT Natpac Graha Arthamas	118,464,339	--
SNVT Pel.Jar Sumber Air Cil-Cis	107,116,192	112,501,268
Marubeni Corporation	103,226,944	122,233,123
Summitomo	95,855,683	95,857,047
DPU dan Tata Ruang Kota Tarakan	65,896,742	47,564,775
PT Jakarta International Container Terminal	55,096,817	55,096,817
Presidency of Republic Civil Cabinet	47,924,617	--
PT Industri Nabati Lestari	46,624,038	73,052,813
PT Istaka Karya - Cahaya KSO	42,286,233	--
PU Aceh	34,317,803	60,494,626

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018 Rp	2017 Rp
PT Indonesia Energi Nusantara	33,598,735	--
Yayasan Masjid Taman Sriwedari	30,147,551	--
PT Graha Tunas Selaras	29,819,825	--
PT Trans Ritel Indonesia	27,600,268	--
PT Bogor Jasmin Lestari	27,370,535	--
PT Cempaka Sinergy Lestari	25,454,273	25,430,775
PT Mitra Panca Perkasa	23,400,490	--
Esperanca Timor Aon Lda	23,007,187	21,279,153
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	22,436,165	--
PT Raya Bumi Nusantara Permai	20,130,627	--
HSR CC	18,121,175	--
Dubai National Group Construction	16,192,327	30,091,033
PT Pura Delta	15,825,529	--
PT Kukuh Mandiri Lestari	14,879,428	--
PT Muliaguna Propertindo Development	13,798,055	13,684,886
Ciputra Development	12,999,060	--
PT Maju Gemilang Serpong	12,404,882	--
PT Puncak Dharmahusada	12,005,276	--
PT Multi Tower Indo Perkasa	11,396,518	--
PT Surya Bumimegah Sejahtera	11,251,681	39,875,912
PT Gunung Suwarna Abadi	9,940,674	--
Shwe Taung Development Co. Ltd.	8,807,868	--
Kementerian Pupra	6,462,642	--
PT Chalidana Inti Permata	5,781,107	17,308,054
PT Bersama Zatta Jaya	4,845,636	11,735,688
PT Trans Ritel Properti	2,603,790	55,210,916
PT Anugrah Duta Sejati	2,312,675	11,593,358
Zeesm, Government Of Rdtdl	--	307,254,472
Ministere De L'Habitat, De L'Urbanisme Et De La Ville	--	162,719,627
DPU Kab.Penajam Paser Utara	--	103,470,529
DPU Pemerintah Prov. Kalimantan Timur	--	92,906,749
PT Fantasy Batam Island	--	19,397,508
Dirjen Bina Marga Maluku Dan Maluku Utara	--	15,170,106
PT Budi Kencana Megah Jaya	--	14,037,668
PT Pulo Mas Jaya	--	13,718,056
Kementerian PU SKPJK Wil II Prov Kalsel	--	13,396,191
Hospital Indonesia	--	12,190,262
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 5.000.000)/ Others (each below Rp5,000,000)	751,307,719	563,281,541
	4,347,296,138	3,436,288,622
Dikurangi/ Less : Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(11,048,200)	(1,993,695)
Sub Total	4,336,247,938	3,434,294,927
Total	9,902,046,735	9,260,959,094

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas tagihan bruto ke pemberi kerja cukup untuk menutup kemungkinan kerugian di masa depan dari tidak tertagihnya tagihan bruto.

Management of the Group believes that the allowance for impairment losses on gross amount due from customers is sufficient to cover possible losses on uncollectible of due from customers in the future.

Pada tanggal 31 Desember 2018 terdapat saldo tagihan bruto yang masih dalam proses addendum dari pemberi kerja, yaitu SNVT Pelaksana Jaringan

As of December 31, 2018 there are a gross amount due from customers balance that still in process to addendum with the owners, are as follows SNVT

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Sumber Daya Air Ciliwung Cisadane, PT Jakarta International Container Terminal, PT Chevron Indonesia, BP Berau Ltd, PT Industri Nabati Lestari, PT Bukit Asam Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/ PLTU Ketapang, PT Batam Island, Esperanca Timor AON, Marubeni Corporation, National Gulf Contruction dan KSO WIKA – CNT.

Pelaksana Jaringan Sumber Daya Air Ciliwung Cisadane, PT Jakarta International Container Terminal, PT Chevron Indonesia, BP Berau Ltd, PT Industri Nabati Lestari, PT Bukit Asam Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/ PLTU Ketapang, PT Batam Island, Esperanca Timor AON, Marubeni Corporation, National Gulf Contruction dan KSO WIKA – CNT.

8. Piutang Yang Belum Ditagih

8. Unbilled Receivables

	2018 Rp	2017 Rp
Pelanggan/Customer WIKA Beton	852,769,977	536,281,233
Piutang Perusahaan / the Company's Receivable	502,376,425	160,316,623
Pelanggan/Customer WIKA Ikon	13,931,794	10,541,759
Sub Total	1,369,078,196	707,139,615
Dikurangi Bagian Lancar/ Less Current Portion	(924,845,767)	(592,563,302)
Bagian Tidak Lancar/ Non Current Portion	444,232,429	114,576,313

Akun ini merupakan piutang usaha yang belum ditagihkan selain dari aktivitas pelaksanaan proyek.

This account represents unbilled accounts receivables arising from activities other than project construction activities.

Piutang yang belum ditagih bagian tidak lancar merupakan piutang bunga atas pinjaman dari Perusahaan kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

Noncurrent portion of unbilled receivables pertains to unbilled interest receivables on loan from the Company to PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

9. Piutang Lain-Lain

9. Other Receivables

	2018 Rp	2017 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 50)/ Related Parties (Note 50)		
Dikurangi Bagian Lancar/ Less Current Portion	5,404,981,079	1,382,391,230
Bagian Tidak Lancar Pihak Berelasi / Non Current Portion of Related Parties	(1,420,649,920)	(170,978,921)
	3,984,331,159	1,211,412,309
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Artama Indocitramulia	--	13,814,146
KSO WASKITA-PP	--	29,929,744
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 10,000,000)/ Others (each below Rp 10,000,000)	76,019,932	120,881,088
Sub Total	76,019,932	164,624,978
Dikurangi/ Less: Penurunan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(2,913,783)	(25,312,057)
	73,106,149	139,312,921
Dikurangi Bagian Lancar/ Less Current Portion	(58,488,669)	(133,988,030)
Bagian Tidak Lancar Pihak Ketiga / Non Current Portion of Third Parties	14,617,480	5,324,891
Bagian Tidak Lancar/ Non Current Portion	3,998,948,639	1,216,737,200

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Piutang lain-lain pihak berelasi pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia merupakan pinjaman dana sesuai Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman antara Perusahaan dengan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

Other accounts receivable related party from PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia is based on Lending Agreement between the Company and PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

Peruntukan dari pinjaman ini adalah untuk uang muka setoran modal guna memenuhi persyaratan pengurusan izin trase dan badan usaha dalam rangka mendukung Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Perusahaan mempunyai hak untuk mengkonversi pokok dan bunga pinjaman menjadi saham setelah Perusahaan mendapat persetujuan RUPS untuk penempatan modal di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

The purpose of this loan is to advance the payment of capital in order to meet the requirement of permits alignment and business operation in order to support the Acceleration of Infrastructure and facilities Provision Fast Trains between Jakarta and Bandung. The loan will be converted into shares after the RUPS approval for the issuance of capital in PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain cukup untuk menutup kemungkinan kerugian di masa depan dari tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Management of the Group believes that the allowance for impairment losses on others receivables is sufficient to cover possible losses on uncollectible of others receivables in the future.

10. Persediaan

10. Inventories

	2018 Rp	2017 Rp	
Barang Jadi			Finished Goods
Produk Beton	616,725,737	727,327,075	Concrete Products
Produk Konstruksi Baja dan Otomotif	332,995,782	64,483,010	Steel Structure and Automotives
Persediaan Aspal	850,342	17,871,650	Asphalt Inventories
Persediaan Konversi Energi	900,196	--	Conversion Energy Inventories
Barang dalam Proses			Work in Process
Suku Cadang Otomotif dan Konversi Energi	182,910,672	35,547,342	Automotive Spareparts and Conversion Energy
Bahan Baku			Raw Materials
Beton dan Semen	717,406,089	436,797,757	Concrete and Cement
Konstruksi	630,425,687	266,817,204	Construction
Metal dan Otomotif	167,367,126	81,420,927	Metal and Automotive
Aspal	8,625,911	178,608	Asphalt
Suku Cadang			Spareparts
Peralatan Produksi	18,477,631	29,081,942	Production Equipments
Persediaan dalam Pengiriman			Inventory in Transit
Persediaan Tabung	1,790,408	1,479,871	Cylinder Tank
Produk Komponen			Component Product
Suku Cadang Otomotif	624,465	2,227,251	Automotive Spareparts
Aset Real Estat			Real Estate Assets
Bangunan Dalam Konstruksi	2,417,645,778	1,582,034,042	Buildings Under Construction
Bangunan Jadi	394,447,860	355,784,933	Buildings
Tanah dalam Pengembangan	477,114,862	229,212,837	Land under Development
Tanah Matang	10,421,240	9,472,477	Land Available for Sale
Sub Total	5,978,729,786	3,839,736,926	Sub Total
Penyisihan Penurunan Nilai	(196,625)	(196,625)	Allowance for Decline in Value
Total	5,978,533,161	3,839,540,301	Total

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Bangunan dalam konstruksi terdiri dari:

Buildings under construction consists of:

	2018 Rp	2017 Rp
Benhil Central Park	489,703,052	473,973,068
Tamansari Sky Lounge Balikpapan	458,320,251	340,860,005
Urban Sky	434,000,000	--
Tamansari Iswara	341,927,149	188,920,683
Tamansari Emerald	193,102,457	163,388,521
Tamansari Cendikia	162,006,706	119,073,971
Tamansari Gangga	137,581,797	65,288,762
Tamansari Sky Lounge Makasar	82,884,779	24,228,751
Apartemen Tamansari Tera	78,224,043	98,246,386
Tamansari Metropolitan Manado	11,370,094	--
Tamansari Grand Samarinda	9,291,349	11,946,094
Tamansari Urbano	5,946,915	37,855,248
Tamansari Amarta	3,308,649	38,234,725
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10.000.000)/ <i>Others (each below Rp10,000,000)</i>	9,978,537	20,017,828
Total	2,417,645,778	1,582,034,042

Bangunan dalam konstruksi merupakan biaya perolehan bangunan rumah tinggal, rumah kantor, apartemen dan perkantoran yang masih dalam proses konstruksi setelah dikurangi dengan pengakuan beban pokok penjualan berdasarkan persentase penyelesaian proyek. Manajemen berpendapat tidak terdapat hambatan dalam penyelesaian proyek

Buildings under construction consist of acquisition cost of houses, home offices, apartments and offices under construction, net of costs of sales recognized based on the project's percentage of completion. Management believes that there are no constraints in the completion of the projects.

Bangunan jadi terdiri dari:

Buildings consists of:

	2018 Rp	2017 Rp
Tamansari Lagoon	217,033,414	217,033,413
Tamansari La Grande	56,636,340	11,779,034
Tamansari Panoramic	37,332,072	36,683,850
Tamansari Bale Hinggil	17,522,727	17,522,727
Apartement Sentra Land	--	15,606,114
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10.000.000)/ <i>Others (each below Rp10,000,000)</i>	65,923,307	57,159,795
Total	394,447,860	355,784,933

Bangunan jadi merupakan apartemen, kios, counter, perkantoran, rumah dan ballroom yang telah selesai pembangunannya dan siap untuk dijual.

Buildings represents apartments, kiosks, counters, offices, houses and ballrooms which have been completed and ready for sale.

Tanah dalam pengembangan terdiri dari:

Land under development consist of:

	2018 Rp	2017 Rp
Tamansari Metropolitan Manado	125,021,498	17,816,378
Tamansari Palembang	114,350,739	--
Tamansari Cyber	100,857,002	100,806,286

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018 Rp	2017 Rp
Grand Tamansari Samarinda	43,627,577	41,926,487
Tamansari Puri Bali Extensiom	35,838,599	33,770,506
Tamansari Cilegon	24,433,849	--
Tamansari Kahyangan Kendari	23,361,264	25,134,676
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10.000.000)/ <i>Others (each below Rp10,000,000)</i>	9,624,334	9,758,504
Total	477,114,862	229,212,837

Tanah matang terdiri dari:

Land available for sale consists of:

	2018 Rp	2017 Rp
Grand Tamansari Samarinda	4,991,954	4,971,307
Tamansari Kahyangan Kendari	1,873,781	--
Unit Penjualan Aset/ <i>Assets Selling Unit</i>	1,824,074	1,824,074
Tamansari Bukit Mutiara	922,376	922,376
Tamansari Metropolitan Manado	316,541	316,541
Tamansari Puri Bali	255,783	255,783
Debang Tamansari Medan	236,731	236,731
Tamansari Hills Residence	--	875,700
Tamansari Majapahit Semarang	--	69,965
Total	10,421,240	9,472,477

Sebagian aset real estat telah diasuransikan kepada PT Zurich Insurance Indonesia dengan total pertanggungan masing-masing sebesar Rp2.003.795.000 dan Rp1.368.240.849.

Some real estate assets are insured to PT Zurich Insurance Indonesia with total coverage of Rp2,003,795.000 and Rp1,368,240,849, respectively.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut dapat menutupi kemungkinan risiko kerugian atas aset yang dipertanggungan.

Management believes that the value of insurance coverage is adequate to cover possible loss on assets insured.

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan cukup untuk menutup kemungkinan kerugian persediaan.

Management of the Group believes that the allowance for impairment losses on inventories is sufficient to cover possible losses on inventories.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, sebagian persediaan telah diasuransikan kepada sebuah konsorsium yang dipimpin oleh PT Asuransi Bintang terhadap semua resiko dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp71.678.503. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang diasuransikan.

As of December 31, 2018 and 2017, inventories were insured partially through a consortium lead by PT Asuransi Bintang against all risks for Rp71,678,503. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses.

Sebagian persediaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang Grup (Catatan 24 dan 35).

Some inventories are used as collateral for the Group's short term and long term loans (Notes 24 and 35).

11. Uang Muka

11. Advance Payments

	2018 Rp	2017 Rp	
Subkontraktor	877,940,314	661,992,611	Subcontractor
Pemasok	510,887,968	374,292,050	Supplier
Investasi	280,000,000	--	Investment
Lain-lain	98,497,232	392,186,128	Others
Sub Total	1,767,325,514	1,428,470,789	Sub Total
Dikurangi: Bagian Lancar	(1,487,325,514)	(1,180,612,848)	Less: Current Portion
Bagian Tidak Lancar	280,000,000	247,857,941	Non Current Portion

Uang muka lancar merupakan uang muka yang diberikan kepada pemasok dan subkontraktor sehubungan dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan proyek, serta pengadaan bahan baku dan material konstruksi di proyek.

Current advances represents advances paid to suppliers and subcontractors in connection with contract of project work operation and procurement of construction raw materials and construction material at the project.

Uang muka investasi merupakan pembayaran kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atas surat penawaran kerjasama aset properti investasi melalui konsorsium Perusahaan, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Hutama Karya (Persero).

Advances in investment represent payments to PT Asuransi Jiwasraya (Persero) for the offering letter of joint investment property assets through a consortium of the Company, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk and PT Hutama Karya (Persero).

12. Biaya Dibayar di Muka

12. Prepaid Expenses

	2018 Rp	2017 Rp	
Biaya Usaha	304,314,988	488,666,743	Operating Expenses
Biaya Produksi	188,610,978	81,146,827	Production Expenses
Biaya Distribusi	142,267,010	4,280,000	Distribution Expenses
Biaya Pengelolaan	80,479,502	80,938,443	Management Expenses
Sewa Lahan	--	354,297,694	Land Rent
Lain-lain	19,746,580	47,772,631	Others
Sub Total	735,419,058	1,057,102,338	Sub Total
Dikurangi: Bagian Lancar	(735,419,058)	(702,804,644)	Less: Current Portion
Bagian Tidak Lancar	--	354,297,694	Non Current Portion

Biaya usaha dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan seperti biaya pengusahaan proyek, tender dan biaya usaha lainnya.

Prepaid operating expenses represent costs incurred in connection to business activities such as cost of project concession, bid and other business expenses.

Biaya pengelolaan dibayar di muka merupakan biaya untuk pembukaan kawasan baru yang akan dikembangkan oleh Grup.

Prepaid management expenses represent costs paid in advance for the opening of new areas to be developed by the Group.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

13. Jaminan Usaha

13. Business Guarantees

	2018 Rp	2017 Rp	
Jaminan Pelaksanaan	74,427,556	225,812,462	Performance Bond
Lain-lain	30,672,907	34,743,652	Others
Sub Total	105,100,463	260,556,114	Sub Total
Dikurangi: Bagian Lancar			Less: Current Portion
Jaminan Pelaksanaan	(105,100,463)	(88,042,632)	Performance Bond
Bagian Tidak Lancar	--	172,513,482	Non Current Portion

14. Aset Real Estat

14. Real Estate Assets

Grup memiliki aset real estat yang tercatat sebagai tanah belum dikembangkan di WIKA Realty dan WIKA Gedung dengan rincian sebagai berikut:

The Group owns real estate assets which are recorded as land for development as follows:

	2018 Rp	2017 Rp
Tanah/ Land - Wika Gedung	136,166,548	135,885,347
Tanah/ Land M.T. Haryono II - Jakarta	111,304,099	105,110,500
Tamansari Gangga Ext. - Bali	108,585,506	108,585,506
Tanah/ Land Steady Safe	80,000,000	--
Tanah/ Land Palembang - Palembang	70,000,000	60,000,000
Tamansari Grand Samarinda	55,096,223	54,353,702
Tanah/ Land Pulo Mas	42,417,324	--
Tanah/ Land Tanjung Lesung	20,867,050	--
Tanah/ Land Cakung	18,400,000	--
Tanah/ Land Sinar Kasih	18,310,950	--
Tanah/ Land Paiton	15,000,000	--
Unit Penjualan Aset/ Assets Selling Unit	11,759,389	11,313,503
Tanah/ Land Patra Jasa - Jakarta	11,490,440	10,000,000
Tanah/ Land Bitung Manado	10,386,830	--
Tanah/ Land Soreang - Bandung	1,225,500	1,225,500
Tamansari Sepinggan - Balikpapan	--	25,708,157
Total	711,009,859	512,182,215

Sebagian aset real estat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang Grup (Catatan 24 dan 35).

Some real estate assets are used as collateral for the Group's short term and long term loans (Notes 24 and 35).

15. Aset Keuangan Dari Proyek Konsesi

15. Financial Assets from Concession Projects

	2018 Rp	2017 Rp	
Aset Konsesi	58,645,244	168,794,165	Concession Assets
Dikurangi: Bagian Lancar	(58,645,244)	(110,148,921)	Less: Current Portion
Bagian Tidak Lancar	--	58,645,244	Non Current Portion

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Akun ini merupakan nilai aset keuangan untuk proyek konsesi "Pembangkit Listrik Tenaga Gas" (PLTG) Borang Sumatera Selatan yang digunakan untuk produksi listrik ventura bersama Perusahaan – PT Navigat Energy pada pekerjaan pengadaan sewa beli pembangkit PLTG Borang 60 MW selama tujuh tahun sejak Juli 2012 dan setelah periode operasi (BOT) akan menjadi milik pemberi kerja tunggal PLN.

This account consists of financial assets for the concession project of "Pembangkit Listrik Tenaga Gas" (PLTG) Borang, South Sumatera for electric power production. The Company and PT Navigat Energy, as venturers, perform the procurement lease for power plant production PLTG Borang 60 MW for seven years from July 2012 and after which the ownership of the powerplant will be transferred to PLN.

16. Investasi Pada Entitas Asosiasi

16. Investments In Associates

2018							
Nama Entitas Asosiasi/ Name of Associates	Domisili/ Domicile	Bidang Usaha/ Type of Business	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Carrying Value Beginning Balance	Penambahan (Pengurangan)/ Addition (Deduction)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Income (Loss) Portion in Current Year	Nilai Tercatat Akhir Tahun/ Carrying Value Ending Balance
			(%)	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Jasamarga Surabaya - Mojokerto	Jakarta	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/ Construction and development of toll road	20	204,905,614	(15,457,240)	(24,369,110)	165,079,264
PT WIKA Realty Minor Development	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	50	84,698,188	--	(7,207)	84,690,981
PT Jasamarga Manado - Bitung	Jakarta	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/ Construction and development of toll road	20	64,952,669	23,320,000	(273,223)	87,999,446
PT Citra Marga Lintas Jabar	Jakarta	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/ Construction and development of toll road	25	133,295,745	114,237,183	(26,978,229)	220,554,699
PT Makasar Coastal City	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	35	4,482,653	--	169,926	4,652,579
PT Tegal Luar City Development	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	33	3,990,403	(3,990,403)	--	--
PT Jakarta River City	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	30	3,673,720	490,400,000	(3,638,293)	490,435,427
PT Wijaya Karunia Realtindo	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	50	7,500,000	--	(2,918,568)	4,581,432
PT WIKA Jabar Power	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant industry	20	2,802,548	--	(140,771)	2,661,777
PT WIKA Ever Joy Bitumen Industries	Jakarta	Industri produk dari hasil kilang minyak bumi dan ekstrak bitumen/ Oil refinery products industry and bitumen extract	25	2,381,581	--	--	2,381,581
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Jakarta	Transportasi, perdagangan, jasa industri, pembangunan, perkebunan dan pertanian/ Transportation, trade, service industry, construction, plantation and agriculture	38	(115,764,276)	32,023,870	(251,473,189)	(335,213,595)
Total				396,918,845	640,533,410	(309,628,664)	727,823,591

2017							
Nama Entitas Asosiasi/ Name of Associates	Domisili/ Domicile	Bidang Usaha/ Type of Business	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Carrying Value Beginning Balance	Penambahan (Pengurangan)/ Addition (Deduction)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Income (Loss) Portion in Current Year	Nilai Tercatat Akhir Tahun/ Carrying Value Ending Balance
			(%)	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Jasamarga Surabaya - Mojokerto	Jakarta	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/ Construction and development of toll road	20	188,990,390	45,411,489	(29,496,265)	204,905,614
PT WIKA Realty Minor Development	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	50	85,163,587	--	(465,399)	84,698,188
PT Jasamarga Manado - Bitung	Jakarta	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/ Construction and development of toll road	20	14,357,577	50,800,000	(204,908)	64,952,669
PT Citra Marga Lintas Jabar	Jakarta	Pembangunan dan pengusahaan jalan tol/ Construction and development of toll road	25	6,639,385	128,872,774	(2,216,414)	133,295,745
PT Makasar Coastal City	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	35	--	4,200,000	282,653	4,482,653
PT Tegal Luar City Development	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	33	3,961,032	--	29,371	3,990,403
PT Jakarta River City	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	30	--	3,600,000	73,720	3,673,720
PT Wijaya Karunia Realtindo	Jakarta	Industri realti dan properti jasa/ Realty and property industry	50	--	7,500,000	--	7,500,000
PT WIKA Jabar Power	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ Power plant industry	20	3,944,960	--	(1,142,412)	2,802,548
PT WIKA Ever Joy Bitumen Industries	Jakarta	Industri produk dari hasil kilang minyak bumi dan ekstrak bitumen/ Oil refinery products industry and bitumen extract	25	--	2,381,581	--	2,381,581
PT WIKA Industri Energi	Jakarta	Industri dan perdagangan produk konversi energi/ Industry and trading of energy conversion product	25	46,750,036	(46,750,036)	--	--
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Jakarta	Transportasi, perdagangan, jasa industri, pembangunan, perkebunan dan pertanian/ Transportation, trade, service industry, construction, plantation and agriculture	38	(19,632,937)	(5,626,611)	(90,504,728)	(115,764,276)
Total				330,174,030	190,389,197	(123,644,382)	396,918,845

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Ringkasan informasi keuangan dari entitas asosiasi Grup ditetapkan di bawah ini. Ringkasan informasi keuangan ini mencerminkan jumlah yang terdapat dalam laporan keuangan entitas asosiasi yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Summarized financial information in respect of the Group's material associates are set out below. The summarized financial information below represent amounts shown in the associate's financial statements prepared in accordance with Indonesian Accounting Standards.

2018				
	Aset/ Assets Rp	Liabilitas/ Liabilities Rp	Pendapatan/ Revenues Rp	Laba (Rugi)/ Income (Loss) Rp
PT Jasamarga Surabaya - Mojokerto	5,101,137,307	4,311,569,260	347,745,451	(119,808,802)
PT WIKA Realty Minor Development	237,844,380	67,731,511	--	(14,413)
PT Jasamarga Manado - Bitung	1,607,178,222	1,167,377,416	603,553,067	(1,366,116)
PT Citra Marga Lintas Jabar	1,948,798,914	1,262,458,455	--	(91,235,134)
PT Makasar Coastal City	963,148,392	950,172,897	--	485,503
PT Jakarta River City	1,577,590,570	568,864,850	--	(7,425,088)
PT Wijaya Karunia Realtindo	705,398,422	696,235,559	--	(1,031,772)
PT WIKA Jabar Power	5,079,491	7,053	--	(703,854)
PT WIKA Ever Joy Bitumen Industries	18,486,335	4,047,033	--	(5,633,697)
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	27,483,225,462	23,875,835,622	--	(661,771,551)
2017				
	Aset/ Assets Rp	Liabilitas/ Liabilities Rp	Pendapatan/ Revenues Rp	Laba (Rugi)/ Income (Loss) Rp
PT Jasamarga Surabaya - Mojokerto	5,073,745,438	4,311,569,260	1,488,559,171	(138,226,711)
PT WIKA Realty Minor Development	224,847,713	55,451,334	--	(930,795)
PT Jasamarga Manado - Bitung	918,093,324	1,167,377,416	603,553,067	(1,366,116)
PT Citra Marga Lintas Jabar	1,972,295,742	1,466,623,159	1,672,125	(13,707,584)
PT Makasar Coastal City	956,672,283	943,864,704	--	807,578
PT Tegal Luar City Development	12,042,937	--	--	89,001
PT Jakarta River City	1,441,897,916	1,429,652,187	--	245,729
PT Wijaya Karunia Realtindo	628,345,591	618,150,956	--	(4,805,364)
PT WIKA Jabar Power	5,763,232	4,223	--	(4,830,305)
PT WIKA Ever Joy Bitumen Industries	18,486	4,047,033	--	(5,633,697)
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	3,953,174,695	2,726,772,282	--	(252,977,211)

17. Investasi Pada Ventura Bersama

17. Investments In Joint Ventures

2018						
Nama Ventura Bersama/ Name of Joint Venture	Nama Proyek/ Name of Project	Porsi Bagi Hasil/ Portion of Shares	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Carrying Value Beginning Balance	Penambahan (Pengurangan)/ Addition (Deduction)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Income (Loss) Portion in Current Year	Nilai Tercatat Akhir Tahun/ Carrying Value Ending Balance
		(%)	Rp	Rp	Rp	Rp
WIKA-Technip	Fasilitas Produksi Gas Matindock	76	720,002,622	(50,810,374)	(910,822)	668,281,426
WIKA-PP-Hutama	Bendungan Jati Gede	25	216,426,230	79,303	--	216,505,533
WIKA-Tokyu	Proyek MRT 102-103 Elevated	40	82,262,018	47,329,637	1,064,215	130,655,870
WIKA-Indeluxso	Proyek APMS Bandara Soekarno Hatta	90	87,803,393	(11,788,088)	22,299,607	98,314,912
WIKA-LIMAN-EEA	PLTMG Rawaminyak	70	111,947,739	(11,249,474)	(6,401,498)	94,296,767
WIKA-WRK	PLN Paket III	90	--	63,699,424	30,487,301	94,186,725
WIKA-Rebana- Klesri	Jaringan Pipeline Gresik Semarang	40	104,022,751	(17,050,275)	630,021	87,602,497
WIKA-PP-Waskita- Hyundai	Proyek Terminal 3 SHIA	50	91,457,722	(4,786,695)	--	86,671,027
WIKA Gedung-Mutiara Masyur	Apartemen Prospero	60	77,863,634	3,386,511	3,253,496	84,503,641
WIKA-Shimizu-Obayashi-Jakon	Proyek MRT 104-105 Underground	15	87,410,773	(10,246,268)	1,768,436	78,932,941
WIKA Gedung-Mahoni	Apartemen Mahogany	60	73,882,673	107,869	2,293,773	76,284,315
WIKA - DMT KSO	Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara Paket I	85	--	56,501,445	10,769,751	67,271,196
WIKA-Krakatau Posco	Terminal LPG Tanjung Sekong	50	52,768,110	(35,947,486)	46,770,795	63,591,419
WIKA-CRBC-PP	Tol Solo Kertosono Phase 1	25	36,532,721	(8,433,552)	29,865,064	57,964,233
WIKA-Beijing Urban-PP KSO	RBIDP Balikpapan - Samarinda Toll Road Development	20	--	35,323,019	9,386,615	44,709,634
WIKA-Mirlindo	Proyek PLTD Bali	85	186,215,198	(142,929,811)	--	43,285,387
WIKA-PP	Bandara BIJB Kertajati Majalengka	55	37,898,514	(16,913,171)	14,747,942	35,733,285
WIKA-Daya-Istaka	Pelebaran Jln Batas Serawak-Entikong- Bl. Karangan-Kembayan	70	33,018,807	(2,301,022)	4,019,369	34,737,154
WIKA-Bumi Karsa	Bendungan Paseloreng	75	52,495,610	(21,678,862)	2,435,713	33,252,461
WIKA-HK JO	Terminal Petikemas Belawan	50	44,992,976	(32,440,610)	19,499,589	32,051,955

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

2018						
Nama Ventura Bersama/ Name of Joint Venture	Nama Proyek/ Name of Project	Porsi Bagi Hasil/ Portion of Shares	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Carrying Value Beginning Balance	Penambahan (Pengurangan)/ Addition (Deduction)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Income (Loss) Portion in Current Year	Nilai Tercatat Akhir Tahun/ Carrying Value Ending Balance
		(%)	Rp	Rp	Rp	Rp
WIKA - Multinas - Barata	Pabrik Gula Asembagoes	55	--	16,337,292	14,251,827	30,589,119
WIKA-Angkasa Pura	Perluasan Bandara Banjarmasin	47	--	8,628,840	21,058,717	29,687,557
WIKA-Winarta	Proyek Tarum Barat	62	21,985,324	(445,980)	6,404,803	27,944,147
WIKA-BRANTAS	Bendungan Kuningan	51	22,092,215	1,265,184	3,310,118	26,667,517
WIKON-Fery-Yodya	Proyek Gedung Sekolah DKI II	85	17,252,644	9,371,173	--	26,623,817
WB-Emrail KSO	Proyek LRT Velodrome Klp Gading	50	--	675,596	24,946,491	25,622,087
WIKA-AAE-MSI	PLTD Ambon	85	44,925,590	16,056,494	(36,424,555)	24,557,529
WIKA-Firdi	Pekerjaan Jembatan Soibada	99	13,734,274	9,736,536	161,678	23,632,488
WIKA-DAELIM-ASTALDI	Karian Multiporse DAM	27	20,062,393	1,528,830	960,999	22,552,222
WIKA-Abdi Mulia	Pengendalian Banjir dan Rob Kaligawe	62	--	13,884,740	5,276,925	19,161,665
WIKA-MMM	Pekerjaan Jalan Soibada	99	23,813,889	(5,808,414)	609,225	18,614,700
WIKA-Hutama-Nindya	Waduk Bendo	34	15,331,841	(740,440)	3,687,075	18,278,476
WIKA-Barata	Revitalisasi PG Rendeng Kudus	70	--	8,925,351	6,086,867	15,012,218
WG-Pemprov DKI	Pembangunan Sekolah 2	49.5	--	7,439,476	6,950,375	14,389,851
WIKA-Nindya-Waskita-MCC	Tol Cismudawu Phase 2	20	--	(10,108,053)	24,339,973	14,231,920
WIKA-Arkonin	Stadion GBK	97.5	--	14,216,442	--	14,216,442
WIKON-Bina Karya - Hana	Proyek Gedung Sekolah DKI I	85	--	13,800,439	--	13,800,439
WIKA-Nindya	Bendungan Logung	60	15,448,941	(8,989,554)	6,706,859	13,166,246
WIKA-Bumi Karsa	Pekerjaan Bendungan Lau si Mei Mei	65	--	10,533,472	1,301,408	11,834,880
	Deli Serdang					
WIKA-Arkonin	Venue GBK	97.50	--	4,554,997	6,766,469	11,321,466
WIKA-Multi	ITB JICA III	70	28,558,858	(17,271,178)	--	11,287,680
WIKA-Cakra	Proyek Wisma Atlit	20	11,125,819	159,984	--	11,285,803
WIKA-PP-Waskita	Jemb. Merah Putih Bentang Tengah	33	11,163,391	100,000	--	11,263,391
WIKA-Sinar Agung	Pekerjaan Jalan Oksibil Seredala	70	12,748,185	(1,540,626)	--	11,207,559
WIKA-Sinar Agung Lestari	Jalan Nasional Oksibil Dekay	60	17,570,126	(7,518,467)	--	10,051,659
WIKA-HK-Waskita	Konstruksi Runway Bandara - Samarinda	20	11,168,788	211,053	(1,698,278)	9,681,563
WG-Pemprov DKI	Pembangunan Sekolah 1	85	--	676,577	8,810,995	9,487,572
WIKA-Cakra	Pekerjaan Rusun Rawa Bebek	98	--	9,350,412	--	9,350,412
WIKA-Jasin-Bakti KSO	Balikkapan Samarinda Freeway	52	--	9,261,052	--	9,261,052
WG-Pemprov DKI	Pembangunan Sekolah 5	49.5	--	814,506	8,437,575	9,252,081
WIKA-Mafrijaya	Rehabilitasi Kelambu Kiri	80	19,482,711	(14,430,428)	4,164,280	9,216,563
WIKA-Adhi Karya	Pembangunan Terowongan Nanjung	51	--	3,164,093	5,764,248	8,928,341
	Bandung					
WIKA-Bahagia Bangun Nusa	Pembangunan Pengaman Muara Sungai	75	--	6,679,444	2,151,801	8,831,245
	Ijo Cilacap					
WIKA-Apta	Pengendalian Banjir Sungai Palu Kota Palu	70	--	4,422,261	4,220,393	8,642,654
	Sulawesi Tengah					
WIKA-Jaya	Sabo Dam Merapi Kaliworo	70	14,460,329	(14,358,685)	8,528,157	8,629,801
WIKA-Tri Bhakti	Pemb. Irigasi Bahuga Komering P1	71	--	(2,329,173)	10,882,152	8,552,979
WRK-APS	Operational Maintenance Bandara	49	--	7,439,281	711,299	8,150,580
WIKA-Brantas	Diversi Channel in Putih River	55	--	8,076,737	--	8,076,737
WIKA - DMT KSO	Pembangunan Bendungan Pamukkulu	85	--	7,320,860	471,513	7,792,373
	Paket 1 Kab. Takalar					
WIKA-Apta	Penanganan Banjir Surakarta P-2	70	11,682,941	(6,803,162)	2,396,112	7,275,891
WIKA-NKE	Pemb. Sarana Prasarana Pengendalian	67.50	--	3,021,108	3,693,406	6,714,514
	Banjir Batang Agam Payakumbuh					
WIKA-Hutama	Pembangunan Elevated Road	60	--	7,504,629	(1,071,673)	6,432,956
	Segmen - 1 (MYC)					
WG-Jakarta Konsultindo	Gedung Asrama Siswa PKP	49.5	--	6,357,638	--	6,357,638
WIKA-Minarta	Suplesi Jabung Lampung	60	--	9,183,945	(2,867,531)	6,316,414
WB-Semen Indogreen KSO	Apartemen Podomoro Cimanggis	50	--	6,709,923	(518,617)	6,191,306
WIKA - Bina Nusa Lestari	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pamarayan	60	--	389,910	5,073,400	5,463,310
	Ciujung Serang					
WIKA-Vicente Philipines	Pembangunan Clarins Bridge Philipines	40	--	4,820,941	395,238	5,216,179
WIKA-NSE	Pelebaran dan Perpanjangan Runway	100	5,491,441	(1,073,351)	1,073,351	5,491,441
	Bandara Banyuwangi					
WIKA-WRK	PLTMG P3	10	--	1,694,411	3,387,478	5,081,889
WIKA-JOVA	Bridge Bacau Timor Leste	85	22,058,162	(22,058,162)	--	--
WIKA-Nindya-Rekin	Jaringan Gas Prabumulih	60	21,093,852	(21,218,634)	124,782	--
WIKA-Pelita	Rekonstruksi National Road P2 JICA	55	11,451,674	(11,451,674)	--	--
Laswi		--	--	360,000,000	--	360,000,000
WIKA - CRIC - CRDC - CREC - CRSC	High Speed Railway Jakarta Bandung	30	--	(1,264,510,888)	100,016,524	(1,164,494,364)
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 5,000,000)/ Others (each below Rp 5,000,000)			322,895,681	(555,974,410)	80,510,148	(152,568,581)
Total			2,812,600,560	(1,532,466,132)	533,031,374	1,813,165,802

2017						
Nama Ventura Bersama/ Name of Joint Venture	Nama Proyek/ Name of Project	Porsi Bagi Hasil/ Portion of Shares	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Carrying Value Beginning Balance	Penambahan (Pengurangan)/ Addition (Deduction)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Income (Loss) Portion in Current Year	Nilai Tercatat Akhir Tahun/ Carrying Value Ending Balance
		(%)	Rp	Rp	Rp	Rp
WIKA-Technip	Fasilitas Produksi Gas Matindock	76	149,119,687	558,958,805	11,924,131	720,002,623
WIKA-PP-Hutama	Bendungan Jati Gede	25	206,300,978	10,125,253	--	216,426,231
WIKA-Mirilindo	Proyek PLTD Bali	85	296,613,221	(178,624,874)	68,226,851	186,215,198
WIKA-LIMAN-EEA	PLTMG Rawaminyak	70	126,917,174	(78,781,462)	63,812,027	111,947,739
WIKA-Rebana- Klesri	Jaringan Pipeline Gresik Semarang	40	50,576,788	38,498,524	14,947,439	104,022,751
WIKA-PP-Waskita- Hyundai	Proyek Terminal 3 SHIA	50	101,862,848	(10,405,126)	--	91,457,722
WIKA-Indeluxso	Proyek APMS Bandara Soekarno Hatta	90	16,321,816	12,058,452	59,423,125	87,803,393

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Nama Ventura Bersama/ Name of Joint Venture	Nama Proyek/ Name of Project	2017				
		Porsi Bagi Hasil/ Portion of Shares	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Carrying Value Beginning Balance	Penambahan (Pengurangan)/ Addition (Deduction)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Income (Loss) Portion in Current Year	Nilai Tercatat Akhir Tahun/ Carrying Value Ending Balance
		(%)	Rp	Rp	Rp	Rp
WIKA-Shimizu-Obayashi-Jakon	Proyek MRT 104-105 underground	15	71,422,095	15,988,678	--	87,410,773
WIKA-Tokyu	Proyek MRT 102-103 Elevated	40	42,199,533	37,329,123	2,733,362	82,262,018
WIKA-Mutiara Masyur	Apartemen Prospero	60	71,177,914	2,079,752	4,605,968	77,863,634
WIKA Gedung - Mahoni	Apartemen Mahogany	60	61,820,318	2,356,321	9,706,034	73,882,673
WIKA-Krakatau Posco	Tanjung Sekong	50	29,951,991	4,388,436	18,427,683	52,768,110
WIKA-Bumi Karsa	Bendungan Paseloreng	75	7,222,375	24,188,169	21,085,066	52,495,610
WIKON-Fery-Yodya	Proyek Gedung Sekolah DKI II	85	--	30,536,554	15,590,884	46,127,438
WIKA-AAE-MSI	PLTD Ambon	85	73,501,490	6,499,850	(35,075,750)	44,925,590
WIKA - HK JO	Terminal Petikemas Belawan	50	19,060,268	(1,046,673)	26,979,382	44,992,977
WIKA-PP	Bandara BIJB Kertajati Majalengka	55	13,294,899	2,108,802	22,494,814	37,898,515
WIKA- CRBC-PP	Tol Solo Kertosono Phase 1	25	12,942,940	3,705,955	19,883,826	36,532,721
WIKA-Daya-Istaka	Pelebaran Jln Batas Serawak-Entikong- Balai Karangan-Kembayan	70	16,491,163	4,907,710	11,619,934	33,018,807
WIKA - Multi	ITB JICA III	70	44,066,684	(15,507,826)	--	28,558,858
WIKA-MMM	Pekerjaan Jalan Soibada	99	--	23,813,889	--	23,813,889
WIKA-BRANTAS	Bendungan Kuningan	51	20,221,077	(2,841,727)	4,712,864	22,092,214
WIKA-JOVA	Bridge Bacau Timor Leste	85	--	12,976,347	9,081,815	22,058,162
WIKA-Multinas-Barata	Pabrik Gula Asembagoes	55	--	16,006,552	5,990,445	21,996,997
WIKA-Winarta	Proyek Tarum Barat	62	--	7,992,135	13,993,189	21,985,324
WIKA-Nindya-Rekin	Jaringan Gas Prabumulih	60	32,008,601	(10,914,749)	--	21,093,852
WRK-PT APS	OM Bandara T3 SHIA	49	--	20,408,756	--	20,408,756
WIKA-DAELIM-ASTALDI	Karian Multiporse DAM	27	12,147,026	(249,477)	8,164,844	20,062,393
WIKA-Mafrijaya	Rehabilitasi Kelambu Kiri	80	13,254,465	(2,280,524)	8,508,769	19,482,710
WIKA-Sinar Agung Lestari	Jalan Nasional Oksibil Dekay	60	26,902,168	(9,332,042)	--	17,570,126
WIKA-Nindya	Bendungan Logung	60	--	1,396,303	14,052,638	15,448,941
WIKA-Hutama-Nindya	Waduk Bendo	34	12,432,338	(2,499,401)	5,398,904	15,331,841
WIKA-Jaya	Sabo Dam Merapi Kaliworo	70	3,707,893	(763,322)	11,515,758	14,460,329
WIKA-Minarta	Suplesi Jabung Lampung	60	4,581,237	8,421,084	1,003,447	14,005,768
WIKA-Firdur	Pekerjaan Jembatan Soibada	99	--	13,734,274	--	13,734,274
WIKA - Sinar Agung	Pekerjaan Jalan Oksibil Seredala	70	9,584,155	3,164,030	--	12,748,185
WIKA-DMT	Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara Paket I	85	6,107,890	(2,262,651)	8,674,093	12,519,332
WIKA-Apta	Penanganan Banjir Surakarta P-2	70	--	3,052,957	8,629,984	11,682,941
WIKA-Pelita	Rekonstruksi National Road P2 JICA	55	28,520,363	(21,212,254)	4,143,565	11,451,674
WIKA-Beijing-PP	RBIDP Balikpapan - Samarinda Toll Road Development	20	(8,433,551)	15,795,497	4,015,230	11,377,176
WIKA - HK- Waskita	Konstruksi Runway Bandara Samarinda	20	23,839,797	(12,671,009)	--	11,168,788
WIKA-PP-Waskita	Jemb. Merah Putih Bentang Tengah	33	39,456,578	(28,293,187)	--	11,163,391
WIKA-Cakra	Proyek Wisma Atlit	20	6,276,204	(33,042,089)	37,891,704	11,125,819
WIKA-Cakra	Rumah Susun Rawa Bebek	98	819,361	7,616,964	2,050,778	10,487,103
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 5,000,000)/ Others (each below Rp 5,000,000)			472,269,223	(352,039,975)	88,487,946	208,717,194
Total			2,114,559,007	125,340,804	572,700,749	2,812,600,560

18. Properti Investasi

18. Investment Properties

	2018						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Kenaikan Nilai Investasi/ Increase in Investment Value	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Nilai Wajar							At Fair Value
Tanah	96,077,700	1,880,287	--	--	--	97,957,987	Land
Bangunan dan Prasarana	442,470,800	664,305,000	--	4,067,200	384,873,792	1,495,716,792	Building and Equipment
Total	538,548,500					1,593,674,779	Total
	2017						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Kenaikan Nilai Investasi/ Increase in Investment Value	Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Nilai Wajar							At Fair Value
Tanah	91,621,451	848,310	--	--	3,607,939	96,077,700	Land
Bangunan dan Prasarana	369,563,800	14,607,652	--	--	58,299,348	442,470,800	Building and Equipment
Total	461,185,251					538,548,500	Total

Properti investasi berupa tanah, yang berlokasi di Bali, Surabaya, Samarinda dan Balikpapan. Sedangkan Bangunan berlokasi di Jakarta, Tangerang, Bandung dan Surabaya yang merupakan area komersial, kondotel dan ruko.

Investment properties of land are located in Bali, Surabaya, Samarinda and Balikpapan. While the buildings are located in Jakarta, Tangerang, Bandung and Surabaya, which are commercial area, condotel and commercial building.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Berikut adalah nama Penilai, tanggal penilaian, dan tanggal laporan penilaian dalam menentukan nilai wajar properti investasi:

The following are the names of the Valuer, and the dates of the appraisal report in determining the fair value of the investment property:

Nama Penilai / Name of Valuer	Tanggal Laporan / Report date	Objek / Object	Nilai Wajar/ Fair Value
Herman Meirizki & Rekan	5 Okt 2018/ Oct 5, 2018	Tamansari Hive	179,057,000
Herman Meirizki & Rekan	5 Okt 2018/ Oct 5, 2018	Tamansari Skylounge	81,254,000
Herman Meirizki & Rekan	5 Okt 2018/ Oct 5, 2018	Tamansari Hive Office	18,849,000
Ayon Suherman & Rekan	10 Okt 2018/ Oct 10, 2018	Tamansari Semanggi	80,410,400
Ayon Suherman & Rekan	10 Okt 2018/ Oct 10, 2018	Tamansari Papilio	37,555,100
Ayon Suherman & Rekan	10 Okt 2018/ Oct 10, 2018	Tamansari Pesona Bali	1,494,500
Firman Aziz & Rekan	9 Okt 2018/ Oct 9, 2018	Tamansari La Grande	52,545,900
Toha Okky Heru & Rekan	27 Sep 2018/ Sep 27, 2018	Sudirman Suite	315,545,892
Toto Suharto & Rekan	30 Des 2018/ Dec 30, 2018	CBD Ciledug	711,455,000
Toha Okky Heru & Rekan	30 Des 2018/ Dec 30, 2018	The Hills Tamansari Semarang	15,150,000

Pendekatan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar properti adalah pendekatan pendapatan dan metode yang digunakan adalah Arus Kas Terdiskonto. Nilai wajar properti investasi tersebut telah didukung oleh bukti pasar.

The approach used in determining the fair value of property is the revenue approach and the method used is Discounted Cash Flow. The fair value of the investment property has been supported by market evidence.

Keuntungan sebesar Rp384.873.792 untuk tahun 2018 dan Rp61.907.287 untuk tahun 2017, yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi Grup, dicatat pada laba atau rugi.

The gain amounting to Rp384,873,792 in 2018 and Rp61,907,287 in 2017, arising from the change in the fair value of the Group's investment properties was recognized in profit or loss.

Pendapatan sewa dari properti investasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan real estat masing-masing sebesar Rp87.855.641.012 dan Rp74.533.112.651 untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017.

Rental revenue earned from investment property recognized as a part of real estate revenue amounted to Rp87,855,641,012 and Rp74,533,112,651 for the years ended December 31, 2018 and 2017, respectively.

Berdasarkan penelaahan manajemen pada akhir tahun, tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas properti investasi milik Grup.

Based on management's evaluation at the end of year, there is no provision for impairment on the investment properties of the Group.

19. Aset Tetap

19. Fixed Assets

	2018					
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Nilai Tercatat						Acquisition Cost
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Hak atas Tanah	871,123,977	--	--	369,441,210	1,240,565,187	Landrights
Lahan Tambang	112,463,309	--	--	1,752,369	114,215,678	Quarry
Bangunan	806,458,033	20,636,107	(22,606)	127,509,370	954,580,904	Buildings
Prasarana	284,207,572	39,456,364	--	37,895,591	361,559,527	Infrastructures
Perlengkapan Kantor	168,318,048	--	--	(114,450,594)	53,867,454	Office Equipment
Peralatan Pabrik dan Proyek	2,810,083,381	472,265,034	(563,895,518)	147,853,999	2,866,306,896	Project and Plant Equipment
Kendaraan	12,098,178	882,000	(3,538,381)	--	9,441,797	Vehicles
Aset dalam Penyelesaian	383,200,303	714,326,366	--	(573,644,445)	523,882,224	Assets in Progress
Aset Sewa Pembiayaan						Leasing Assets
Peralatan	241,521,496	145,724,373	(274,236,270)	3,642,500	116,652,099	Equipment
	5,689,474,297	1,393,290,244	(841,692,775)	--	6,241,071,766	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Pemilikan Langsung						Direct Ownership
Lahan Tambang	3,854,629	2,090,274	--	--	5,944,903	Quarry
Bangunan	227,428,028	1,310,685	--	--	228,738,713	Buildings
Prasarana	112,613,619	29,066,097	--	--	141,679,716	Infrastructures
Perlengkapan Kantor	27,603,584	6,331,336	(588,709)	--	33,346,211	Office Equipment
Peralatan Pabrik dan Proyek	1,281,496,000	181,507,253	(356,585,408)	--	1,106,417,845	Project and Plant Equipment
Kendaraan	7,192,501	2,379,061	(2,754,369)	--	6,817,193	Vehicles

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

		2018						
		Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp		
Aset Sewa Pembiayaan							Leasing Assets	
Peralatan		97,177,240	69,024,118	(123,753,187)	--	42,448,171	Equipment	
		1,757,365,601	291,708,824	(483,681,673)	--	1,565,392,752		
Nilai Buku		3,932,108,696				4,675,679,014	Book Value	
		2017						
		Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp		
Nilai Tercatat							Acquisition Cost	
Pemilikan Langsung							Direct Ownership	
Hak atas Tanah		846,698,651	24,086,671	--	338,655	871,123,977	Landrights	
Lahan Tambang		110,991,312	494,970	--	977,027	112,463,309	Quarry	
Bangunan		699,785,482	72,702,235	--	33,970,316	806,458,033	Buildings	
Prasarana		259,361,167	661,119	--	24,185,286	284,207,572	Infrastructures	
Perlengkapan Kantor		32,314,871	135,615,661	--	387,516	168,318,048	Office Equipment	
Peralatan Pabrik dan Proyek		2,236,881,307	522,459,220	--	50,742,854	2,810,083,381	Project and Plant Equipment	
Kendaraan		11,957,178	141,000	--	--	12,098,178	Vehicles	
Aset dalam Penyelesaian		213,491,769	280,310,188	--	(110,601,654)	383,200,303	Assets in Progress	
Aset Sewa Pembiayaan							Leasing Assets	
Peralatan		123,959,496	117,562,000	--	--	241,521,496	Equipment	
		4,535,441,233	1,154,033,064	--	--	5,689,474,297		
Akumulasi Penyusutan							Accumulated Depreciation	
Pemilikan Langsung							Direct Ownership	
Lahan Tambang		2,199,594	1,655,035	--	--	3,854,629	Quarry	
Bangunan		135,578,221	91,849,807	--	--	227,428,028	Buildings	
Prasarana		87,323,100	25,290,519	--	--	112,613,619	Infrastructures	
Perlengkapan Kantor		18,926,009	8,677,575	--	--	27,603,584	Office Equipment	
Peralatan Pabrik dan Proyek		902,837,879	378,658,121	--	--	1,281,496,000	Project and Plant Equipment	
Kendaraan		3,839,556	3,352,945	--	--	7,192,501	Vehicles	
Aset Sewa Pembiayaan							Leasing Assets	
Peralatan		60,067,562	37,109,678	--	--	97,177,240	Equipment	
		1,210,771,921	546,593,680	--	--	1,757,365,601		
Nilai Buku		3,324,669,312				3,932,108,696	Book Value	

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp291.708.824 dan Rp546.593.680 yang dialokasikan pada beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi.

Depreciation expenses for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp291,708,824 and Rp546,593,680, respectively which allocated to cost of revenues and general and administrative expenses.

Aset tetap kecuali tanah Grup diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan resiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dengan nilai pertanggungan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp3.824.993.391 dan Rp504.040.768.

Fixed assets except land of the Group are insured against fire and other risks under package policies with insurance coverage as of December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp3,824,993,391 and Rp504,040,768, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the fixed assets insured.

Berdasarkan penelaahan manajemen pada akhir tahun, tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas aset tetap milik Grup.

Based on management's evaluation at the end of the year, there is no provision for impairment on fixed assets of the Group.

Aset dalam penyelesaian atas bangunan, peralatan proyek dan pabrik, dan prasarana merupakan pembangunan pabrik baru milik WIKA Beton dan WIKA Bitumen dengan rincian sebagai berikut:

Assets in progress of buildings, project and plant equipment, and infrastructure pertains to the construction of new factory of WIKA Beton and WIKA Bitumen with detail are as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018 Rp	2017 Rp	
Bangunan	301,753,609	162,267,156	Buildings
Peralatan Pabrik dan Proyek	180,023,796	--	Project and Plant Equipment
Hak atas Tanah	42,104,819	194,293,666	Landrights
Prasarana	--	26,639,481	Infrastructures
Total	523,882,224	383,200,303	

Persentase aset dalam penyelesaian WIKA Beton pada tanggal 31 Desember 2018 dengan progress sebesar, antara lain prasarana 22%, peralatan pabrik 65%, cetakan 24% yang diestimasikan akan selesai pada 12 (dua belas) bulan. Tidak terdapat hambatan dalam penyelesaian pembangunan aset tetap tersebut.

Percentage of WIKA Beton's assets in progress as of December 31, 2018 consists of infrastructure 22%, plant equipment 65%, molding 24% that were estimated to be completed by 12 (twelve) month. There are no obstacles in the completion of the construction in progress.

Persentase aset dalam penyelesaian Wika Ikon pada tanggal 31 Desember 2018 dengan progress sebesar, antara lain bangunan 86% yang diestimasikan akan selesai pada Mei 2019. Tidak terdapat hambatan dalam penyelesaian pembangunan aset tetap tersebut.

Percentage of Wika Ikon's assets in progress as of December 31, 2018 consists of building 86% that were estimated to be completed on May 2019 month. There are no obstacles in the completion of the construction in progress.

Persentase aset dalam penyelesaian Wika Bitumen pada tanggal 31 Desember 2018 dengan progress sebesar, antara lain bangunan 45% yang diestimasikan akan selesai pada Desember 2020. Tidak terdapat hambatan dalam penyelesaian pembangunan aset tetap tersebut.

Percentage of Wika Ikon's assets in progress as of December 31, 2018 consists of building 45%, that were estimated to be completed on December 2020. There are no obstacles in the completion of the construction in progress.

20. Goodwill

20. Goodwill

	Harga Perolehan/ Acquisition Cost	Nilai Aset Neto/ Net Asset Value	Goodwill	Penurunan Nilai Goodwill/ Goodwill Impairment	Goodwill Neto/ Goodwill Net
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
WIKAR	21,395,496	8,834,291	12,561,205	(7,714,153)	4,847,052
Total	21,395,496	8,834,291	12,561,205	(7,714,153)	4,847,052

Akun ini merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Grup atas nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai.

This account represents the excess of acquisition cost over the Group's interest in the fair value of the net assets of the acquired subsidiaries net of accumulated impairment.

Berdasarkan pengujian penurunan nilai yang telah dilakukan, Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai goodwill pada 31 Desember 2018 dan 2017.

Based on the impairment test which have been done, the Management believes that there is no impairment on goodwill for the years ended December 31, 2018 and 2017.

21. Investasi Jangka Panjang Lainnya

21. Other Long Term Investments

Akun ini merupakan investasi Grup dengan jumlah kepemilikan saham kurang dari 20%, yang terinci sebagai berikut:

This account represents Group's investment with share ownership of less than 20%, with details as follows:

	2018 %	2017 %	2018 Rp	2017 Rp
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	16.93	15.00	449,000,000	29,700,000
PT Prima Terminal Petikemas	15.00	15.00	93,536,000	72,107,000
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	2.1	2.1	9,136,746	7,256,322
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	0.14	0.14	4,791,136	4,791,136
PT Jasamarga Bali Tol	0.4	0.4	2,664,000	2,664,000
PT Air Minum Indonesia	14.00	14.00	140,000	140,000
Total			559,267,882	116,658,458

PT Jasamarga Balikpapan Samarinda

Pada bulan November 2018, Perusahaan telah menambah penyertaan sebanyak 192.088 lembar saham, sehingga kepemilikan saham Perusahaan menjadi sebesar 16,93%.

PT Jasamarga Balikpapan Samarinda

In November 2018, the Company added 192,088 shares, therefore the Company's ownership becomes 16.93%.

PT Jasamarga Balikpapan Samarinda yang bergerak dalam bidang jasa berupa pengusahaan jalan tol Balikpapan - Samarinda, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PT Jasamarga Balikpapan Samarinda is engaged in the form of concession Balikpapan - Samarinda, which includes financing, technical planning, construction, operation and maintenance of highways, as well as other business in accordance with the legal provisions of the legislation.

PT Prima Terminal Petikemas

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas (PTP) No. 41 tanggal 30 April 2018 dari notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., semua pemegang saham meningkatkan kepemilikan sahamnya, sehingga persentase kepemilikan saham Perusahaan di PTP tidak berubah.

PT Prima Terminal Petikemas

Based on the deed of Decision of the Shareholders Meeting of PT Prima Terminal Petikemas (PTP) No. 41 dated April 30, 2018 from notary Risna Rahmi Arifa, S.H., all shareholders increased their ownership, therefore the percentage of the Company's share ownership in JM KC did not change.

PT Prima Terminal Petikemas yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan operasi kapal, jasa pelayanan operasi lapangan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan pelayanan terminal petikemas yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan.

PT Prima Terminal Petikemas is engaged in vessel operations services, field operations services and other services related to the container terminal services including financing, engineering design, construction, operation and maintenance.

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JM KC) bergerak dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas jalan tol.

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng

PT Jasamarga Kunciran Cengkareng provides toll road facility development and management

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham JM KC No. 31 tanggal 21 Desember 2018 dari notaris Umi Chamidah, S.H., M.Kn., semua pemegang saham meningkatkan kepemilikan sahamnya, sehingga persentase kepemilikan saham Perusahaan di JM KC tidak berubah.

Based on the deed of Decision of the Shareholders of JM KC No. 31 dated December 21, 2018 from notary Umi Chamidah, S.H., M.Kn., all shareholders increased their ownership, therefore the percentage of the Company's share ownership in JM KC did not change.

PT Trans Pacific Petrochemica Indotama

PT Trans Pacific Petrochemical Indotama bergerak dalam bidang produksi produk aromatik dan bahan bakar minyak. Kepemilikan saham di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ini merupakan hasil konversi atas piutang Perusahaan di Wijaya Karya - Adhi Karya - Inti Karya Persada Teknik JO (WAIJO).

PT Trans Pacific Petrochemical Indotama

PT Trans Pacific Petrochemical Indotama is engaged in the production of aromatic products and fuel oil. Shareholding in PT Trans Pacific Petrochemical Indotama represents the conversion of receivables of the Company in Wijaya Karya - Adhi Karya - Inti Karya Persada Teknik JO (WAIJO).

PT Jasamarga Bali Tol

PT Jasamarga Bali Tol yang bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa Bali, yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, serta usaha lainnya

PT Jasamarga Bali Tol

PT Jasamarga Bali Toll is engaged in toll concession Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa Bali toll road. It includes the financing, planning, engineering, construction, operation and maintenance of toll roads, as well as other business.

PT Air Minum Indonesia

PT Air Minum Indonesia yang bergerak dalam bidang Sistem Penyediaan Air Minum yang meliputi kegiatan kelembagaan, pendanaan, dan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan serta usaha-usaha lainnya yang terkait langsung dengan kegiatan usaha utama perusahaan

PT Air Minum Indonesia

PT Air Minum Indonesia is engaged in Water Supply System which includes institutional, financial and technical planning, construction, operation and maintenance as well as other businesses that are directly related to its main business activity.

22. Aset Takberwujud

22. Intangible Assets

	2018					
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Hak Konsesi - Ruas						Concession Rights - Toll
Jalan Tol (Catatan 52)	13,074,442	584,588,901	--	--	597,663,343	(Note 52)
Merk Dagang	126,002,854	--	(9,312,684)	--	116,690,170	Trademark
Total	139,077,296	584,588,901	(9,312,684)	--	714,353,513	Total

	2017					
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan/ Deduction Rp	Reklasifikasi/ Reclassification Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Hak Konsesi - Ruas						Concession Rights - Toll
Jalan Tol (Catatan 52)	--	13,074,442	--	--	13,074,442	(Note 52)
Merk Dagang	--	126,002,854	--	--	126,002,854	Trademark
Total	--	139,077,296	--	--	139,077,296	Total

Merk dagang yang dimiliki oleh Winner terdiri atas WIKA Solar Water Heater (SWH) dan perjanjian jaringan distribusi ke seluruh Indonesia.

Trademark of Winner consists of WIKA Solar Water Heater (SWH) and agreement distribution channels throughout Indonesia.

23. Aset Lain-Lain

23. Other Assets

	2018 Rp	2017 Rp	
Beban Ditangguhkan	43,592,119	5,485,720	Deferred Expenses
Retensi	52,325,544	58,770,526	Retention
Lain-lain	22,427,883	61,482,886	Others
Total	118,345,546	125,739,132	Total

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Beban ditangguhkan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan kawasan-kawasan pada WIKA Realty yang masih dalam proses persiapan dan pengurusan perijinan.

Deferred expenses represent costs incurred for the development areas of WIKA Realty, that are still in the process for preparation and administration.

24. Pinjaman Jangka Pendek

24. Short Term Loan

	2018 Rp	2017 Rp
Perusahaan/ the Company		
Pihak Berelasi (Catatan 50)/ Related Parties (Note 50)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	469,185,745	800,910,002
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	431,672,156	1,101,948,873
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	200,000,000	100,000,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	328,623	271,316,077
Sub Total	<u>1,101,186,524</u>	<u>2,274,174,952</u>
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	986,000,000	1,450,000,000
PT Bank DKI	400,300,516	474,800,516
PT Bank Pan Indonesia Tbk	100,000,000	250,000,000
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ	100,000,000	175,000,000
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Indonesia Eximbank	50,000,000	220,000,000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1,138	521,873
PT Bank DBS Indonesia	--	75,000,000
PT Bank ICBC Indonesia	--	50,000,000
PT Bank HSBC Indonesia	--	50,000,000
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	--	50,000,000
PT Bank Permata Tbk	--	47,989,543
PT Bank Danamon Tbk	--	33,417,805
Sub Total	<u>1,636,301,654</u>	<u>2,876,729,737</u>
Sub Total	<u>2,737,488,178</u>	<u>5,150,904,689</u>
Entitas Anak/ Subsidiaries		
Pihak Berelasi (Catatan 50)/ Related Parties (Note 50)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	291,009,969	273,237,122
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	169,794,517	72,525,000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	51,500,000	195,000,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	49,548,311	159,473,229
Sub Total	<u>561,852,797</u>	<u>700,235,351</u>
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	205,000,000	310,000,000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	145,877,498	89,024,162
PT Bank ICBC Indonesia	140,000,000	--
PT Bank DKI	117,862,856	34,474,924
Bank of Tokyo -MUFG	110,000,000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	67,950,000	32,200,000
HSBC	50,000,000	--
PT Bank Danamon Tbk	45,000,000	--
PT Bank DBS Indonesia	12,500,000	76,414,849
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Indonesia Eximbank	6,500,000	10,000,000
PT Bank OCBC NISP Tbk	--	20,600,000
Sub Total	<u>900,690,354</u>	<u>572,713,935</u>
Sub Total	<u>1,462,543,151</u>	<u>1,272,949,286</u>

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Total Pinjaman Jangka Pendek/ Short Term Loan

Pihak Berelasi/ Related Parties

Pihak Ketiga/ Third Parties

Total

2018 Rp	2017 Rp
1,663,039,321	2,974,410,303
2,536,992,008	3,449,443,672
4,200,031,329	6,423,853,975

Perusahaan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan menandatangani perpanjangan perjanjian fasilitas Kredit Modal Kerja, Kredit Modal Kerja RC Terbatas & Promes / Revolving, Credit Term Loan, dan Forex Line Facility dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Perjanjian telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No.40, 41, 42, 43, 44 dan 45.

Maksimum fasilitas yang diberikan adalah untuk fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp300.000.000 serta tambahan sebesar Rp400.000.000, untuk fasilitas Kredit Modal Kerja RC Terbatas & Promes / Revolving sebesar Rp350.000.000, untuk fasilitas Credit Term Loan sebesar Rp500.000.000 dan untuk fasilitas Forex Line sebesar USD10,000,000. Fasilitas tersebut untuk mendanai proyek-proyek khusus dengan tingkat suku bunga sebesar 8,75% - 9,00% per tahun.

Masa berlaku kredit sampai dengan 20 Mei 2019.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan tagihan termin atas proyek-proyek yang dibiayai oleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimum 1 kali;
- Rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimum 4 kali; dan
- Rasio laba utang minimum 1 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp431.672.156 dan Rp1.101.948.873.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.718.000.000 dan Rp1.099.595.022.

The Company

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

The Company entered into an extension agreement of Working Capital Loan, Limited RC Working Capital & Promes/Revolving, Credit Term Loan and Forex Line Facility with PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. The agreement has been amended on July 31, 2018 based on deed No. 40, 41, 42, 43, 44 and 45 of Fathiah Helmi, S.H.

Maximum facility for Working Capital Loan is Rp300,000,000 each and an additional Rp400,000,000, for Limited RC Working Capital & Promes/ Revolving is Rp350,000,000, for Credit Term Loan Facility is Rp500,000,000 and Forex Line Facility is USD10,000,000. The facilities are used to fund specified project with interest rate of 8,75% - 9,00% per annum.

The validity period of the credit agreement is until May 20, 2019.

The loan is collateralized by receivables from projects financed by credit facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Current ratio minimum 1 time;
- Debt to equity ratio (DER) maximum of 4 times; and
- Debt service coverage ratio minimum 1 time.

As of December 31, 2018, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp431,672,156 and Rp1,101,948,873, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp2,718,000,000 and Rp1,099,595,022, respectively.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perusahaan menandatangani perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja *Revolving* dan Kredit Modal Kerja Transaksional dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perjanjian telah mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Sri Ismiati, S.H., M.Kn., No. 21 dan 22 pada tanggal 10 Juni 2018.

Maksimum fasilitas yang diberikan adalah untuk fasilitas Kredit Modal Kerja *Revolving* sebesar Rp100.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9%, untuk fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional sebesar Rp900.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,5 %. Fasilitas tersebut untuk mendanai proyek-proyek khusus.

Masa berlaku kredit sampai dengan 10 Juni 2019.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan piutang, persediaan, tanah dan bangunan. (Catatan 5, 10, dan 19).

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimum 1 kali; dan
- DER maksimum 3,5 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp469.185.745 dan Rp800.910.002.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.827.473.849 dan Rp1.008.595.512.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan menandatangani perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perjanjian telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 21 Desember 2018 berdasarkan Akta Notaris Sri Ismiyati, SH., MKn., S.H., No. 112, 113, 114, 115, 116 dan 117.

Fasilitas yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja dengan limit Rp500.000.000 serta fasilitas bank garansi atau *stand by letter of credit* sebesar Rp7.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,25% per tahun dan *foreign exchange line* maksimum sampai USD40,000,000.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

The Company entered into an extension agreement of *Revolving Working Capital Loan* and *Transactional Working Capital Loan* with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The agreement has been amended based on notarial deed No. 21 and 22 on June 10, 2018 of Sri Ismiati, S.H., M.Kn.

Maximum facility for *Revolving Working Capital Loan* is Rp100,000,000 with interest rate of 9%, *Transactional Working Capital* is Rp900,000,000 with interest rate 7.5 % per annum. The facilities is used to fund specified project.

The validity period of the credit agreement is until June 10, 2019.

The loan is collateralized with receivables, inventories, land and building (Notes 5, 10, and 19).

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Current ratio minimum 1 time; and
- DER maximum 3.5 times.

As of December 31, 2018, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp469,185,745 and Rp800,910,002, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp1,827,473,849 and Rp1,008,595,512, respectively.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

The Company entered into an extension agreement of *Working Capital Loan* with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. The agreement has been amended on December 21, 2018 based on notarial deed No. 112, 113, 114, 115, 116 and 117 of Sri Ismiyati, SH., MKn.

Facilities provided are *Working Capital Loan* with a limit of Rp500,000,000 and bank guarantee facilities or *stand by letter of credit* amounting to Rp7,000,000,000 with interest rate of 9,25% per annum and *foreign exchange line* up to USD40,000,000.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Masa berlaku kredit sampai dengan 30 November 2019.

The validity period of the credit agreement is until November 30, 2019.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang atas proyek-proyek yang ditunjuk dan tanah dan bangunan milik Perusahaan (Catatan 5 dan 19).

The loan is collateralized with accounts receivable of the projects and land and building owned by the Company (Notes 5 and 19).

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi batasan untuk mempertahankan rasio utang maksimum 567%.

The Company is required to maintain maximum debt to equity ratio of 567%.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2018, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp328.623 dan Rp271.316.077.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp328,623 and Rp271,316,077, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.140.782.770 dan Rp710.389.873.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp1,140,782,770 and Rp710,389,873, respectively.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Perusahaan menandatangani perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Perjanjian telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 6 April 2018 berdasarkan Akta Notaris Sri Ismiati SH., MKn. No.08

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

The Company entered into an extension agreement of Working Capital Loan with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). The agreement has been amended on April 6, 2018 based on Notarial Deed No.08 of Sri Ismiati SH., MKn.

Maksimum fasilitas yang diberikan adalah untuk fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp500.000.000.

Maximum facility for Working Capital Loan is Rp500,000,000.

Masa berlaku kredit sampai dengan 6 April 2019.

The validity period of credit facility is until April 6, 2019.

Tingkat suku bunga adalah 8,5% per tahun yang akan direviu setiap saat dan akan disesuaikan apabila terdapat ketentuan/kebijakan baru dari Bank.

The interest rate is 8.5% per year which will be reviewed at any time and will be adjusted if there is a provision/new policy from Bank.

Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan fidusia piutang proyek dengan pengikatan sebesar 125% dari limit pembiayaan (Catatan 5).

This financing facility is secured with project receivables that should be maintained at 125% from facility limit (Note 5).

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Rasio lancar minimum 1 kali.
- DER maksimum 3,5 kali.
- EBITDA terhadap beban bunga maksimum 2 kali.

- *Current ratio minimum 1 time.*
- *DER maximum 3.5 times.*
- *EBITDA to interest maximum 2 times.*

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2018, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp200.000.000 dan Rp100.000.000.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp100.000.000 dan nihil.

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Perusahaan telah mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Fasilitas yang diberikan berupa Fasilitas *Cash Loan* dengan limit maksimum Rp450.000.000, Fasilitas *Bridging Loan* dengan limit maksimum Rp2.000.000.000, dengan tingkat suku bunga sebesar 7,6% per tahun.

Masa berlaku kredit sampai dengan 28 Juni 2019.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimum 1 kali;
- *Interest coverage ratio* minimum 1,5 kali; dan
- Rasio utang terhadap aset maksimum 2,5 kali.

Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang (Catatan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp986.000.000 dan Rp1.450.000.000.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp3.148.000.000 dan Rp775.000.000.

PT Bank DKI

Perusahaan menandatangani perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Berjangka (KMK PTB) dan Kredit Modal Kerja Pinjaman Rekening Koran (KMK PRK) dari PT Bank DKI. Perjanjian telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan Akta Notaris No.61 dari Sri Ismiati, S.H., M.Kn,

Fasilitas yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Berjangka (KMK PTB) Sublimit kredit *money market line* Bank garansi dan SKBDN dengan limit Rp750.000.000 dan Kredit Modal Kerja Pinjaman Rekening Koran (KMK PRK) dengan limit sebesar Rp150.000.000 dengan tingkat suku bunga Kredit KMK PTB sebesar 7,5% dan KMK PRK sebesar 9%.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp200,000,000 and Rp100,000,000, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp100,000,000 and nil, respectively.

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

The Company has entered into a credit agreement with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Facilities provided are Cash Loan Facility with maximum limit of Rp450,000,000, Bridging Loan Facility with maximum limit of Rp2,000,000,000, interest rates of 7.6% per annum.

The validity period of credit facility is until June 28 2019.

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- *Current ratio* minimum 1 time
- *Interest coverage ratio* minimum 1.5 times; and
- *Debt to total asset ratio* maximum 2.5 times.

This credit is secured with Fiduciary Deed of Receivables (Note 5).

As of December 31, 2018, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp986,000,000 and Rp1,450,000,000, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp3,148,000,000 and Rp775,000,000, respectively.

PT Bank DKI

The Company entered into an extension agreement of Fixed Working Capital Loan (KMK PTB) and Overdraft Loan Facility (KMK PRK) with PT Bank DKI. The agreement has been amended on July 18, 2018 based on Notarial Deed No.61 of Sri Ismiati S.H., M.Kn.

Facilities provided are Fixed Working Capital Loan (KMK PTB) Sublimit credit money market line Bank guarantee and SKBDN with limit of Rp750,000,000 and Overdraft Loan Facility (KMK PRK) with limit of Rp150,000,000 with interest rate of Fixed Working Capital Loan (KMK PTB) of 7.5% and Overdraft Loan Facility (KMK PRK) of 9%.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha (Catatan 5).

The loan is collateralized with trade accounts receivable (Note 5).

Masa berlaku kredit sampai dengan 23 Juli 2019.

The validity period of credit facility is until July 23, 2019.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Rasio lancar minimum 1 kali;
- Gearing Ratio maksimum 2,5 kali; dan
- *Debt service coverage ratio* minimum 1 kali

- *Current ratio* minimum 1 time;
- *Gearing Ratio* maximum 2.5 times; and
- *Debt service coverage ratio* minimum 1 time.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2018, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp400.300.516 dan Rp474.800.516.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp400,300,516 and Rp474,800,516, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.915.500.000 dan Rp1.160.245.311.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp1,915,500,000 and Rp1,160,245,311, respectively.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Perusahaan menandatangani perpanjangan fasilitas Kredit Modal Umum (*Revolving*) dari PT Bank Panin Tbk. Perjanjian telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 2 Agustus 2018 berdasarkan akta notaris Karin Christiana Basoeki, S.H., No. 2.

PT Bank Pan Indonesia Tbk

The Company entered into an extension agreement of Working Capital Loan (Revolving) with PT Bank Panin Tbk. The agreement has been amended on August 2, 2018 based on Notarial Deed No. 2 of Karin Christiana Basoeki, S.H.

Fasilitas yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja dengan limit Rp750.000.000 dengan tingkat suku bunga sebagai berikut:

Facilities provided are Working Capital Loan with limit of Rp750,000,000 with interest rates as follows:

- Untuk jangka waktu pinjaman 1 bulan, bunga sesuai tingkat suku bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) jangka 1 bulan ditambah 1,75 % per tahun;
- Untuk jangka waktu pinjaman 3 bulan, bunga sesuai tingkat suku bunga LPS jangka 1 bulan ditambah margin 2,00% per tahun; dan
- Untuk jangka waktu pinjaman 3 bulan, bunga sesuai tingkat suku bunga LPS jangka 1 bulan ditambah margin 2,25% per tahun.

- *For maturities of 1 month, according to "Lembaga Penjamin Simpanan" (LPS) interest rate plus a margin of 1 month term 1.75% per annum;*
- *For maturities of 3 months, according to LPS interest Rate plus a margin of 1 month term 2.00% per annum; and*
- *For maturities of 3 months, according to LPS interest rate plus a margin of 1 month term 2.25% per annum.*

Fasilitas Kredit Modal Kerja tersebut berlaku sampai dengan 16 Juni 2019.

The Working Capital Loan facilities is valid until June 16, 2019.

Pinjaman tersebut di atas dijamin berupa tagihan proyek dengan nilai 60% dari jumlah maksimum kredit atau senilai Rp450.000.000 (Catatan 5).

The loan is collateralized with project receivables with a value of 60% of the maximum amount of credit or equivalent to Rp450,000,000 (Note 5)

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Rasio lancar minimum 1 kali;
- DER maksimum 3 kali; and

- *Current ratio* minimum 1 time;
- *DER* maximum 3 times; and

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- EBITDA dibagi beban bunga pinjaman minimum 1,6 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp100.000.000 dan Rp250.000.000.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp350.000.000 dan Rp650.000.000.

The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ

Perusahaan telah mengadakan perjanjian kredit dengan The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ (BTMU). Fasilitas yang diberikan berupa Kredit Jangka Pendek (*Cash Loan*) Tanpa Komitmen dengan limit sebesar Rp500.000.000. Perjanjian telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 15 November 2018 berdasarkan Akta Notaris Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., No. 81.

Masa berlaku kredit sampai dengan 18 November 2019 dengan tingkat suku bunga *Cost of Fund* + 0,6% per tahun.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha dengan nilai maksimum sampai dengan 120% dari batas fasilitas (Catatan 5).

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimum 1 kali; and
- Rasio *gearing eksternal* maksimum 2,5 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp100.000.000 dan Rp175.000.000.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp875.000.000 dan Rp1.215.000.000.

Lembaga Pembiayaan Ekspor – Indonesia Eximbank

Perusahaan telah mengadakan perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor – Indonesia Eximbank. Fasilitas yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja Ekspor dengan kredit limit

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- *EBITDA divided by interest expense minimum 1.6 times.*

As of December 31, 2018, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp100,000,000 and Rp250,000,000, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp350,000,000 and Rp650,000,000, respectively.

The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ

The Company has entered into a credit agreement with The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ (BTMU). Facilities provided are Short-Term Credit (Cash Loan) Without Commitments facility amounting to Rp500,000,000. The agreement has been amended on November 15, 2018 based on Notarial Deed No.81 of Sri Ismiyati S.H., M.Kn.

The validity period of credit is until November 18, 2019 with interest rate of Cost of Fund + 0.6% per annum.

The loan is collateralized with accounts receivable with a maximum value of up to 120% of the facility limit (Note 5).

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- *Current ratio minimum 1 time; and*
- *External gearing ratio maximum 2.5 times.*

As of December 31, 2018, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp100,000,000 and Rp175,000,000, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp875,000,000 and Rp1,215,000,000, respectively.

Lembaga Pembiayaan Ekspor – Indonesia Eximbank

The Company has entered into a Working Capital Loan with Lembaga Pembiayaan Ekspor – Indonesia Eximbank. Facilities provided are Export Working Capital Loan with total maximum limit of

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

maksimum Rp400.000.000. Perjanjian telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan Akta Notaris Sri Ismiati, S.H., M.Kn, No. 58.

Rp400,000,000. The agreement has been amended on July 18, 2018 based on Notarial Deed No.58 of Sri Ismiati S.H., M.Kn.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha atas proyek (Catatan 5).

The loan is collateralized with accounts receivables of project (Note 5).

Masa berlaku kredit sampai dengan 21 Juli 2019 dengan tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:

The validity period of credit agreement is until July 21, 2019 with interest rate per annum as follows:

- 5,35% per tahun untuk Dolar Amerika Serikat.
- 9 % per tahun untuk mata uang Rupiah.
- CoM bank + margin dalam Rupiah tenor 1 bulan

- 5.35% per annum for US Dollar
- 9 % per annum for Indonesian Rupiah.
- CoM Bank +Margin in Rupiah time period 1 month

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2018, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp50.000.000 dan Rp220.000.000.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp50,000,000 and Rp220,000,000, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp270.000.000 dan Rp350.000.000.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp270,000,000 and Rp350,000,000, respectively.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Perusahaan menandatangani perpanjangan fasilitas kredit rekening koran dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Perjanjian telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan Akta Notaris Adi Triharso, S.H., No. 34.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

The Company entered into an extension agreement of bank overdraft facility with PT Bank Maybank Indonesia Tbk. The agreement has been amended on July 11, 2018 based on Notarial Deed No. 34 of Adi Triharso, S.H.

Fasilitas yang diberikan berupa kredit rekening koran dengan limit Rp25.000.000 dengan tingkat suku bunga 9% untuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran.

Facilities provided is in the form of overdraft loan facility with a limit of Rp25,000,000 with interest rate of 9% for Overdraft Loan Facility.

Masa berlaku kredit sampai dengan 11 Juli 2019.

The validity period of credit facility is until July 11, 2019.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan piutang usaha yang dibiayai oleh bank ataupun tidak dibiayai oleh bank (Catatan 5).

The loan is collateralized with accounts receivable financed by the bank or non financed by the bank (Note 5).

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Rasio lancar minimum 1 kali; dan
- DER maksimum 2,5 kali.

- Current ratio minimum 1 time; and
- DER maximum 2.5 times.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

As of December 31, 2018, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.138 dan Rp521.872.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp1,138 and Rp521,872, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp535.360 dan nihil.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp535,360 and nil, respectively.

PT Bank DBS Indonesia

Perusahaan telah mengadakan perubahan dan penegasan perjanjian kredit dengan PT Bank DBS Indonesia. Fasilitas yang diberikan berupa uncommitted omnibus trade limit maksimum hingga Rp600.000.000, *uncommitted revolving credit facility (RCF)* maksimum hingga Rp200.000.000, *uncommitted revolving supplier payment services (SPS)* maksimum hingga Rp225.000.000 dan *uncommitted forex facility* maksimum USD1,500,000,000.

PT Bank DBS Indonesia

The Company has signed change and affirmation of the credit agreement with PT Bank DBS Indonesia. Facilities provided are uncommitted omnibus trade limit maximum limit Rp600,000,000, uncommitted revolving credit facility (RCF) maximum limit up to Rp200,000,000, uncommitted revolving supplier payment services (SPS) maximum limit up to Rp225,000,000 and the uncommitted forex facility maximum limit up to USD1,500,000,000.

Masa berlaku kredit sampai dengan 7 Oktober 2019 dengan tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:

The validity period of credit facility is until October 7, 2019 with interest rate per annum as follows:

Untuk penarikan dalam Rupiah:

- *Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR)* ditambah 3% per tahun untuk penarikan selama 1 bulan;
- *JIBOR* ditambah 3,15% per tahun untuk penarikan selama 3 bulan;
- *JIBOR* ditambah 3,25% per tahun untuk penarikan selama 6 bulan.

For withdrawal in Indonesian Rupiah:

- *Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) plus 3% per annum for the withdrawal for 1 month*
- *JIBOR plus 3.15% per annum for the withdrawal for 3 months; and*
- *JIBOR plus 3.25% per annum for the withdrawal for 6 months.*

Untuk penarikan dalam Dollar Amerika Serikat:

- *London Interbank Offered Rate (LIBOR)* ditambah 4,65% per tahun untuk penarikan selama 1 bulan;
- *LIBOR* ditambah 4,70% per tahun untuk penarikan selama 3 bulan; dan
- *LIBOR* ditambah 4,78% per tahun untuk penarikan selama 6 bulan.

For withdrawal in US Dollar:

- *London Interbank Offered Rate (LIBOR) plus 4.65% per annum for the withdrawal for 1 month;*
- *LIBOR plus 4.70% per annum for the withdrawal for 3 months; and*
- *LIBOR plus 4.78% per annum for the withdrawal for 6 months.*

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan piutang usaha yang diikat dengan Addendum III Akta Jaminan Fidusia No. 162 tanggal 21 Desember 2017 (Catatan 5).

The loan is collateralized with accounts receivables which tied with Addendum III Fiduciary Warranty Deed No. 162 dated December 21, 2017 (Note 5).

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Rasio lancar minimum 1 kali;
- Rasio gearing maksimum 2,5 kali; dan
- *Interest coverage ratio* minimum 1,5 kali.

- *Current ratio* minimum 1 time;
- *Gearing ratio* maximum 2.5 times; and
- *Interest coverage ratio* minimum 1.5 times.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

As of December 31, 2018, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp75.000.000.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil and Rp75,000,000, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp375.000.000 dan Rp325.000.000.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp375,000,000 and Rp325,000,000, respectively.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

PT Bank ICBC Indonesia

Perusahaan menandatangani perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap *on Demand (PTD)* - A dari PT Bank ICBC Indonesia. Perjanjian telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 18 Maret 2018 berdasarkan akta notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., No. 49.

Ketentuan fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- Pinjaman Tetap *on Demand* maksimum Rp100.000.000; dan
- Fasilitas Omnibus Line untuk *L/C Sight* atau *L/C Usance* atau *UPAS L/C* dan *SKBDN, Trust Receipt, UPAS/UPAM* dan Bank Garansi sebesar Rp200.000.000 atau setara dalam *multicurrency*.

Masa berlaku kredit sampai dengan 18 Maret 2019 dengan tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:

- 8,5% per tahun untuk pinjaman tetap, *Trust Receipt*;
- 8,5% per tahun untuk pinjaman *UPAS/UPAM* dalam Rupiah; dan
- 4,00% per tahun untuk *Trust Receipt* dan *UPAS/UPAM* dalam USD dan *multicurrency*.

Pinjaman ini dijamin sesuai dengan Akta Fidusia atas Piutang No. 47 (Catatan 5).

Perusahaan diharuskan memenuhi batasan untuk memelihara DER sebesar 3 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp50.000.000.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp100.000.000 dan Rp50.000.000.

PT Bank HSBC Indonesia

Perusahaan menandatangani perpanjangan fasilitas kredit pinjaman dengan PT Bank HSBC Indonesia. Perjanjian telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 16 Oktober 2018 berdasarkan Akta Notaris Yualita Widyadhari, SH., MKn., No. 9.

Fasilitas yang diberikan berupa kredit pinjaman dengan limit Rp125.000.000 dengan tingkat suku bunga 5,84% pertahun dan *non cash loan* dengan limit sebesar Rp2.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 5,20% per tahun dibawah BL1 Rate dari Bank.

PT Bank ICBC Indonesia

The Company entered into an extension agreement of Fixed Working Capital Loan on Demand (PTD) – A with PT Bank ICBC Indonesia. The agreement has been amended on March 18, 2018 based on Notarial deed No. 49 of Mellyani Noor Shandra, S.H.

The credit facilities have the following conditions:

- Fixed Working Capital on demand Facility to a maximum of Rp100,000,000; and
- Omnibus Line facilities for *L/C Sight* or *L/C Usance* or *UPAS L/C* and *SKBDN, Trust Receipt, Usance Payable at UPAM* and Bank Guarantee amounting to Rp200,000,000 or equivalent in *multicurrency*.

The validity period of credit facility is until March 18, 2019 with interest rate per annum as follows:

- 8.5% per annum for fixed working capital, *Trust Receipt*
- 8.5% per annum for *UPAS/UPAM* in Indonesia Rupiah; and
- 4.00% per annum for *Trust Receipt* and *UPAS/UPAM* in USD and *multicurrency*.

This loan is secured in accordance with Fiduciary Deed of Receivables No. 47 (Note 5).

The Company is required to comply with restrictions, including maintaining DER of 3 times.

As of December 31, 2018, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil and Rp50,000,000, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp100,000,000 and Rp50,000,000, respectively.

Bank HSBC Indonesia

The Company entered into a credit agreement with PT Bank HSBC Indonesia. The agreement has been amended on October 16, 2018 based on Notarial Deed No. 9 of Yualita Widyadhari, SH., MKn.

Facilities provided are credit loan with a limit of Rp125,000,000 with interest rate of 5.84% and non cash loan with a limit of Rp2,000,000,000 with interest rate of 5.20% per annum under BL1 Rate from Bank.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Masa berlaku kredit sampai dengan 31 Mei 2019.

The validity period of credit facility is until May 31, 2019.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan piutang usaha sebesar Rp2.400.000.000 (Catatan 5).

The loan is collateralized with trade accounts receivable amounting to Rp2,400,000,000 (Note 5)

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Rasio lancar minimum 1 kali; dan
- Rasio gearing eksternal maksimum 2,5 kali.

- *Current ratio minimum 1 time; and*
- *External gearing ratio maximum 2.5 times*

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2018, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp50.000.000.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil and Rp50,000,000, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp331.099.727 dan Rp157.615.871.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp331,099,727 and Rp157,615,871, respectively.

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

Perusahaan menandatangani perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Perjanjian telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 14 Maret 2017 berdasarkan Akta Notaris Sri Ismiati S.H., M.Kn. No. 28.

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

The Company entered into an extension agreement of Working Capital Loan with PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. The agreement has been amended on March 14, 2017 based on Notarial Deed No. 28 of Sri Ismiati S.H., M.Kn.

Fasilitas yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja dengan limit Rp 100.000.000.

Facilities provided are Working Capital Loan with limit of Rp 100,000,000.

Masa berlaku kredit sampai dengan 13 Maret 2018 dengan tingkat suku bunga 8% per tahun.

The validity period of extension agreement is until March 13, 2018 with interest rate of 8% per annum.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp50.000.000.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil and Rp50,000,000, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp50.000.000 dan nihil.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp50,000,000 and nil, respectively.

PT Bank Permata Tbk

Perusahaan menandatangani perpanjangan fasilitas Cash Loan dari PT Bank Permata Tbk. Perjanjian telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 18 Oktober 2017 berdasarkan Akta Notaris Sri Ismiati S.H., M.Kn No. 48

PT Bank Permata Tbk

The Company entered into an extension agreement of Cash Loan with PT Bank Permat Tbk. The agreement has been amended October 18, 2017 based on Notarial Deed No. 48 of Sri Ismiati S.H., M.Kn

Fasilitas yang diberikan berupa Cash Loan dengan limit Rp125.000.000 dengan tingkat suku bunga 8% per tahun untuk Rupiah, 2,5% per tahun untuk Dollar Amerika Serikat dan 3% per tahun untuk Euro (EUR).

Facilities provided are Cash Loan with a limit of Rp125,000,000 with interest rate of 8% per annum for Rupiah, 2.5% per annum for USD and 3 % per annum for Euro.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Masa berlaku kredit sampai dengan 19 Juli 2019.

The validity period of credit facility is until July 19, 2019.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan piutang usaha sampai dengan 125% dari batasan fasilitasnya (Catatan 5).

The loan is collateralized with accounts receivable with a maximum value of up to 125% of the facility limit (Note 5).

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Rasio lancar minimum 1 kali;
- Rasio antara total *interest bearing debt* terhadap total ekuitas maksimum 2 kali; dan
- EBITDA dibagi beban bunga pinjaman minimum 1,5 kali

- *Current ratio minimum 1 time;*
- *Total interest bearing debt to total equity maximum 2 times; and*
- *EBITDA divided by interest expense minimum 1.5 times.*

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2018, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 2016 masing-masing sebesar nihil dan Rp47.989.543.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil and Rp47,989,543, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp47.989.543 dan Rp126.658.296.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp47,989,543 and Rp126,658,296, respectively.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Perusahaan menandatangani perpanjangan fasilitas kredit pinjaman dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Perjanjian telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 25 Mei 2018 berdasarkan Akta Sri Ismiati S.H., M.Kn., No. 91 dan 92. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dan *Uncommitted Omnibus Trade* dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk maksimum untuk masing-masing fasilitas adalah sebesar Rp50.000.000 dan Rp500.000.000. Masa berlaku kredit sampai dengan 22 April 2019 dengan tingkat suku bunga 9,50 % per tahun.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

The Company entered into a credit agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk. The agreement has been amended on May 25, 2018 based on Notarial Deed No. 91 and 92 of Sri Ismiati S.H., M.Kn. The facility of Credit Current Account and Uncommitted Omnibus Trade with PT Bank Danamon Indonesia Tbk have maximum limit of Rp50,000,000 and Rp500,000,000, respectively. The validity period of credit is until April 22, 2019 with interest rate of 9,50% per annum.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan piutang usaha (Catatan 5).

The loan is collateralized with accounts receivable (Note 5).

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Rasio lancar minimum 1 kali;
- DER maksimum 3,5 kali; dan
- *Debt service coverage ratio* minimum 1 kali.

- *Current ratio minimum 1 time;*
- *DER maximum 3.5 times; and*
- *Debt service coverage ratio minimum 1 time.*

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2018, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 2016 masing-masing sebesar nihil dan Rp33.417.805.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil and Rp33,417,805, respectively.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp183.629.028 dan Rp287.555.501.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Perusahaan telah mengadakan perjanjian fasilitas kredit pinjaman dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Perjanjian telah ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2018 berdasarkan akta Sri Ismiati, S.H., M.Kn No. 43.

Fasilitas yang diberikan berupa *Uncommitted Cash Loan* (fasilitas pinjaman transaksi khusus (PTK), fasilitas *Trust Receipt (TR)*, fasilitas pinjaman transaksi khusus ekstra (PTK Ekstra) dan *Uncommitted non cash loan* (Fasilitas *Credit Commercial Lines (CC Lines)*) dengan limit tunai sebesar Rp500.000.000 masa berlaku sampai dengan 16 Maret 2019 dengan tingkat suku bunga 8% per tahun.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang usaha.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- ISCR minimal 1,5 kali; dan
- Rasio lancar minimum 1 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil.

Penerimaan dan pembayaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.700.000.000 dan Rp1.700.000.000.

WIKA Beton

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 10 Juli 2018, WIKA Beton telah melakukan persetujuan perpanjangan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan penawaran pemberian kredit No. CBG.LC2/SPPK.031/2018.

Fasilitas KMK *Revolving* Rp15.000.000, Fasilitas KMK Transaksional Rp450.000.000, Fasilitas kredit NCL senilai Rp335.000.000, Fasilitas *Supplier Financial* Rp350.000.000, Fasilitas *Treasury Line* senilai USD1.000.000, Fasilitas KMK Transaksi II Rp600.000.000, *Bill Purchasing Line* Rp10.000.000.

Tingkat bunga berkisar 8.25% - 9.50% per tahun.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp183,629,028 and Rp287,555,501, respectively.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

The Company has entered into a Credit loan with PT CIMB Niaga Tbk. The agreement has been signed on March 16, 2018 based on notarial deed No. 43 of Sri Ismiati, S.H., M.Kn.

Facilities provided are Uncommitted Cash Loan (Special Transaction Loan Facility(PTK)), Trust Receipt facility (TR), Extra special transaction loan facility(PTK Ekstra) and Uncommitted non cash loan (Fasilitas Credit Commercial Lines(CC Lines)) with cash limit amounting to Rp500,000,000. The validity period until March 16, 2019 with interest rate of 8% per annum.

The loan is collateralized with accounts receivable.

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- *ISCR minimum 1,5 times; and*
- *Current ratio minimum 1 time.*

As of December 31, 2018, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil, respectively.

Receipt and payments for the year ended December 31, 2018 are amounted to Rp1,700,000,000 and Rp1,700,000,000, respectively.

WIKA Beton

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On July 10, 2018, WIKA Beton has approved the extension of credit facilities to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with agreement No. CBG.LC2/SPPK.031/2018.

Facilities KMK Revolving value Rp15,000,000, KMK Transaksional Facility value Rp450,000,000, Credit NCL Facility amounted to Rp335,000,000, Supplier Financial Facility Value Rp350,000,000, Treasury Line Facility value USD1,000,000, KMK Transaktion Facility value II Rp600,000,000, Bill Purchasing Line value Rp10,000,000.

The interest rate is about 8.25% - 9.50% per year.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas adalah 10 Juli 2018 sampai dengan 10 Juni 2020.

The validity period of the agreement according to the extension of facilities is July 10, 2018 until June 10, 2020.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang, persediaan, tanah dan bangunan. (Catatan 5, 10, dan 19).

The loan is collateralized with receivables, inventories, land and building. (Notes 5, 10 and 19).

WIKI Beton diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimal sebesar 100% dan
- *Debt to Equity Ratio* maksimal 400%.

WIKI Beton is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- *Current Ratio* of at least 100% and
- *Debt to Equity Ratio* maximum of 400%.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, WIKI Beton telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2018 and 2017, WIKI Beton is compliance with the terms and conditions of the loans.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp410.813.937 dan Rp563.115.190

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp410,813,937 and Rp563,115,190, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.672.198.773 dan Rp1.269.317.614.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp1,672,198,773 and Rp1,269,317,614, respectively.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Pada tanggal 13 September 2018, WIKI Beton telah melakukan persetujuan perpanjangan fasilitas kredit kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan perjanjian No.R.II.228-OPK/DKD/09/2018. Dengan tingkat bunga berkisar 10% per tahun. Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas adalah 13 September 2018 sampai dengan 13 September 2019.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

On September 13, 2018, WIKI Beton has approved the extension of a credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with a treaty number No.R.II.228-OPK/DKD/09/2018. With interest rates ranging from 10% per year. The validity period of the extension agreement in accordance facilities is September 13, 2018 until September 13, 2019.

Fasilitas yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja dengan total senilai Rp125.000.000 serta fasilitas *Non Cash Loan* dengan limit Rp50.000.000 dan fasilitas Penangguhan Jaminan Atas Impor (PJI) Rp28.000.000 (*Interchangeable* dengan fasilitas *Non Cash Loan*).

Facilities provided are Working Capital Loan with a total value of Rp125,000,000 and Non Cash Loan facility with a limit of Rp50,000,000 and facilities for Import Suspension of Guarantees (PJI) of Rp28,000,000 (Interchangeable with Non Cash Loan).

Pinjaman ini dijamin dengan persediaan, tanah, bangunan, mesin dan peralatan (Catatan 10 dan 19).

The loan is collateralized by inventory, land, buildings, machinery and equipment (Notes 10 and 19).

WIKI Beton diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- a. *Current Ratio* minimal sebesar 100%;
- b. *Debt to Equity Ratio* maksimal 400%.

WIKI Beton is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- a. *Current Ratio* of at least 100%;
- b. *Debt to Equity Ratio* maximum of 400%.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, WIKI Beton telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2018 and 2017, WIKI Beton is compliance with the terms and conditions of the loans.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp30.000.000 dan Rp178.942.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp30,000,000 and Rp178,942, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp178.942 dan Rp126.162.570.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp178,942 and Rp126,162,570, respectively.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Fasilitas *Cash Loan* yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja dengan nilai Rp50.000.000 dan *Non Cash Loan* berupa LC/SKBDN; GB/SBLC; SCF/OAF, T/R dengan nilai Rp50.000.000. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2017 WIKA Beton menyepakati perubahan mengenai Perpanjangan dan Tambahan Fasilitas Kredit dengan No. BIN/2.2/487/R dimana terdapat tambahan fasilitas KMK yang sebelumnya dari Rp50.000.000 menjadi Rp200.000.000 dan fasilitas *Non Cash Loan* berupa LC/SKBDN; GB/SBLC; SCF/OAF, T/R dengan nilai Rp50.000.000 menjadi Rp200.000.000.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Cash Loan facility provided in the form of working capital loans with a value of Rp50,000,000 and Non-Cash Loan in the form of LC / SKBDN; GB / SBLC; SCF / OAF, T/R with a value of Rp50,000,000. On October 25, 2017 WIKA Beton agreed to the amendment of Extension and Additional Credit Facility No. BIN/2.2/487/R number where there are additional Working Capital facilities from Rp50,000,000 to Rp200,000,000 and Non Cah Loan facility in the form of LC / SKBDN; GB / SBLC; SCF / OAF, T / R with a value of Rp50,000,000 changed to Rp200,000,000.

Tingkat bunga berkisar 9.25% per tahun.

The interest rate is around 9.25% per year.

Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas adalah 8 November 2018 sampai dengan 8 November 2019.

The validity period of the agreement according to the extension of facilities is November 8, 2018 until November 8, 2019.

Agunan atas perjanjian tersebut berupa Piutang sebesar Rp100.000.000 dan Persediaan sebesar Rp100.000.000 (Catatan 5 dan 10).

Collaterals of the agreement are in the form of Receivables amounting to Rp100,000,000 and Inventory amounting to Rp100,000,000 (Note 5 and 10).

WIK A Beton diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

WIK A Beton is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- a. *Current Ratio* minimal sebesar 100% ;
- b. *Debt to Equity Ratio* maksimal 400% dan;
- c. *Debt Service Coverage* minimal 100%

- a. *Current Ratio* of at least 100% ;
- b. *Debt to Equity Ratio* maximum of 400% and;
- c. *Debt Service Coverage* is 100%

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, WIK A Beton telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2018 and 2017, WIK A Beton is compliance with the terms and conditions of the loans.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp30.000.000 dan Rp170.000.000.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp30,000,000 and Rp170,000,000, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp430.000.000 dan Rp110.000.000.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp430,000,000 and Rp110,000,000, respectively.

PT Bank DBS Indonesia

Pada tanggal 8 Januari 2018, WIK A Beton telah melakukan penandatanganan perubahan atas perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank DBS dengan perjanjian kredit No. 033/PFPA-DBSI//1-2/2018.

PT Bank DBS Indonesia

On January 8, 2018, WIK A Beton signed a loan agreement with PT Bank DBS with a number of credit agreement No. 033/PFPA-DBSI//1-2/2018.

Fasilitas yang diberikan berupa *Omnibus Facility* dengan total senilai Rp50.000.000 serta *Revolving Credit Facility* dengan limit Rp25.000.000.

Facilities provided in the form of Omnibus Facility with a total value of Rp50,000,000 and Revolving Credit Facility with a limit of Rp25,000,000.

Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas dengan nomor 033/PFPA-DBSI/I/1-2/2018 adalah dari tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018.

The validity period of the agreement in accordance with the extension of facility with number 033/PFPADBSI/ I/1-2/2018 is from January 8, 2018 until October 7, 2018.

Pinjaman ini dijamin dengan piutang dan persediaan (Catatan 5 dan 10).

The loan is collateralized by receivables and inventories (Notes 5 and 10).

WIKA Beton diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

WIKA Beton is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- a. *Gearing Ratio* sebesar-besarnya 250% pada setiap saat;
- b. *Interest Service Coverage Ratio* sekurang-kurangnya 150% pada setiap saat.

- a. *Gearing Ratio is no more than 250% at all times;*
- b. *Interest Service Coverage is at least 150% of all times.*

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp25.000.000.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil and Rp25,000,000, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp25.000.000 dan Rp30.000.000.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp25,000,000 and Rp30,000,000, respectively.

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

Pada tanggal 4 September 2018, WIKI Beton telah melakukan penandatanganan perpanjangan perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dengan nomor perjanjian fasilitas No. SMBCI/NS/0487.

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

On September 4, 2018, WIKI Beton entered into a facility agreement with PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia under the facility agreement No. SMBCI/NS/0487.

Fasilitas yang diberikan berupa fasilitas *cash loan* dalam bentuk *Loan on Note* untuk tujuan modal kerja dengan total senilai Rp100.000.000 serta fasilitas dalam bentuk *Commercial L/C, Acceptance, Loan on Note T/R, Loan on Note ARF, Loan on Note APF* dan *Guarantee* dengan limit Rp500.000.000.

Facility provided on cash loan facility in the form of Loan on Note for the purpose of working capital with a total of Rp100,000,000 and facilities in the form of Commercial L/C, Acceptance, Loan on Note T/R, Loan on Note ARF, Loan on Note APF, and Guarantee with limit Rp500,000,000.

Tingkat bunga yang digunakan adalah *Cost of Fund + 2%* atau sesuai dengan kesepakatan.

The interest rate used is Cost of Fund + 2% or in accordance with the agreement.

Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas adalah 31 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2019.

The validity period of the agreement according to the extension of facilities is August 31, 2018 until August 31, 2019.

Agunan atas perjanjian tersebut berupa *Non Fixed Assets* (Piutang) senilai Rp600.000.000 (Catatan 5).

Collateral for the agreement in the form of Non Fixed Assets (Receivables) worth Rp600,000,000 (Note 5).

WIKI Beton diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

WIKI Beton is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- a. *Current Ratio* minimal sebesar 100%;
- b. *Debt to Net Worth* maksimal 350%;

- a. *Current Ratio of at least 100% ;*
- b. *Debt to Net Worth is 350%;*

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

c. *Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)* minimal 200%.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, WIKA Beton telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp205.000.000 dan Rp310.000.000.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp705.000.000 dan Rp50.000.000.

PT Bank HSBC Indonesia

WIKA Beton memproses perpanjangan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Perbankan Korporasi dengan PT Bank HSBC Indonesia atas perjanjian nomor No.JAK/180760/U/180903.

Fasilitas yang diberikan berupa fasilitas *cash loan* sejumlah Rp100.000.000 dan *Non Cash Loan* sebesar Rp500.000.000. Bunga sesuai kesepakatan yaitu *Term Landing Rate* 4,3 % dan *Best Landing Rate* 5%.

Sebagai jaminan atas fasilitas-fasilitas tersebut diatas, Bank akan selalu memiliki hak jaminan atas seluruh agunan sebagai berikut sehingga seluruh kewajiban debitur kepada Bank berdasarkan pada sehubungan dengan Perjanjian ini telah dinyatakan lunas oleh Bank secara tertulis.

Jaminan Fidusia atas persediaan barang dan piutang dengan nilai gabungan sebesar Rp600.000.000 dimana piutang yang dijaminakan tidak termasuk milik debitur yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun.

Debitur akan menjaga, dengan ketentuan bahwa Bank lain dari Debitur juga memberlakukan kesepakatan finansial berikut ini:

- Rasio lancar minimum 1 kali
- Rasio *Leverage* pada maksimum 4 kali
- Rasio EBITDA pada terhadap beban bunga pada minimum 2 kali

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, WIKA Beton telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp50.000.000 dan nihil.

c. *Interest Coverage Ratio (EBITDA / Interest Expense)* is 200%.

As of December 31, 2018 and 2017, WIKA Beton is compliance with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp205,000,000 and Rp310,000,000, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp705,000,000 and Rp50,000,000, respectively.

PT Bank HSBC Indonesia

WIKA Beton is processing the ectantion of Corporate Banking Credit facility Agreement with PT HSBC Indonesia about agreement No.JAK/180760/U/180903.

The facilities provided in the form of cash loan facilities amounting to Rp100,000,000 and Non Cash Loan of Rp500,000,000. The agreed interest rate is *Term Landing Rate* of 4.3% and *Best Landing Rate* of 5%.

As collateral for the above facilities, the Bank will always have the collateral rights to all collaterals as follows so that all liabilities of the debtor to the Bank based on the terms of this Agreement have been declared fully paid by the Bank in writing.

Fiduciary Guarantee on Inventory of Goods and Receivables with a combined value of Rp600,000,000 where the *Guaranteed Receivable* does not include the property of the debtor who is more than 1 (one) year old.

Debtor shall keep, provided that another Bank of Debtor also applies the following financial agreement:

- *Current ratio* minimum 1 time
- *Leverage ratio* at a maximum of 4 times
- *Ratio of EBITDA to the interest expense* at a minimum of 2 times

As of December 31, 2018 and 2017, WIKA Beton is compliance with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp50,000,000 and nil, respectively.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp200.000.000 dan nihil.

MUFG Bank, Ltd

WIKI Beton telah melakukan permohonan perpanjangan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Perbankan Korporasi dengan MUFG Bank, Ltd.

Fasilitas yang diberikan berupa *Uncommitted Trade Facility* sebesar Rp50.000.000, Fasilitas *Uncommitted Vendor Financing* sebesar Rp300.000.000 dan Fasilitas *Uncommitted Short Term Loan* sebesar Rp250.000.000. Bunga sesuai kesepakatan yaitu BTMU USD/IDR COF + 1,00% p.a. untuk Fasilitas *Uncommitted Trade* dan *Uncommitted Vendor Financing Facility* serta BTMU USD/IDR COF + 1,25% p.a. untuk Fasilitas *Uncommitted Short Term Loan*.

Jaminan Fidusia atas *Persediaan Barang* dan tagihan-tagihan dengan nilai gabungan sebesar 120% dari limit fasilitas (Catatan 10).

Masa berlaku perjanjian fasilitas adalah 21 Desember 2018 sampai dengan 21 Desember 2019.

Jaminan fidusia atas persediaan barang dan tagihan-tagihan dengan nilai gabungan sebesar 120 dari limit fasilitas.

WIKI Beton diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- Cash Ratio* minimal 1 kali;
- Debt to Equity Ratio* maksimal 2.5 kali;
- Current Ratio* minimum 1.1 kali;
- Leverage Ratio* pada maksimum 4 kali;
- EBITDA Ratio* terhadap beban bunga minimum 2 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, WIKI Beton telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp110.000.000 dan nihil.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp240.000.000 dan nihil.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Fasilitas yang diberikan berupa Pinjaman Rekening Koran (*PRK*)-*Revolving* sebesar Rp15.000.000 dengan bunga sesuai kesepakatan, yaitu 9,00% p.a., Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (*PTK*) sebesar Rp250.000.000 dengan bunga sesuai kesepakatan

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp200,000,000 and nil, respectively.

MUFG Bank, Ltd

WIKI Beton has approved the extension of the Corporate Banking Credit Facility Agreement with MUFG Bank, Ltd.

The facilities provided in the form of *Uncommitted Trade Facility* amounted to Rp50,000,000, *Uncommitted Vendor Financing Facility* of Rp300,000,000, and *Uncommitted Short Term Loan Facility* of Rp250,000,000. Interest according to agreement is BTMU USD/IDR COF + 1.00% p.a. for *Uncommitted Trade Facility* and *Uncommitted Vendor Financing Facility* and BTMU USD / IDR COF + 1.25% p.a. to *Uncommitted Short Term Loan Facility*.

Collaterals of the agreement are Inventory and bills with a combined value of 120% from facility limit (Note 10).

The facility agreement validity period is December 21, 2018 until December 21, 2019.

Collaterals of the agreement are inventory and bills with a combined value of 120 from facility limit.

WIKI Beton is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Cash Ratio* at least 1 time;
- Debt to Equity Ratio* max 2.5 times;
- Current Ratio* at least 1.1 times;
- Leverage Ratio* max 4 times;
- EBITDA Ratio* to Interest Expense at least Min 2 times.

As of December 31, 2018 and 2017, WIKI Beton is compliance with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp110,000,000 and nil, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp240,000,000 dan nil, respectively.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

The facilities provided are in the form of a *Current Account (PRK) Revolving* loan of Rp15,000,000 with interest rate 9.00% p.a., a *Special Transaction Loan Facility (PTK)* of Rp250,000,000 with interest rate 8.50% p.a., *Fixed Loan Facility (PT)*-*Revolving* in the

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

yaitu 8,50% p.a., Fasilitas Pinjaman Tetap (PT)-*Revolving* sebesar Rp100.000.000 dengan bunga sesuai kesepakatan yaitu 9,00% p.a dan *CC Lines-Revolving* untuk pembukaan LC/SKBDN sebesar Rp100.000.000 dengan bunga sesuai kesepakatan yaitu 9,00% p.a.

amount of Rp100,000,000 with interest rate 9.00% p.a. and *CC Lines-Revolving* for opening LC/SKBDN in the amount of Rp100,000,000 with interest rate 9.00% p.a.

Masa berlaku perjanjian fasilitas adalah 25 Juni 2018 sampai dengan 24 Juni 2019.

The facility agreement validity period is June 25, 2018 until June 24, 2019.

WIK A Beton diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

WIK A Beton is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- a. *Current Ratio* minimal sebesar 100%;
- b. *Debt to Equity Ratio* maksimal 400% dan;
- c. *Debt Service Coverage* minimal 100%.

- a. *Current Ratio* minimum of 100%;
- b. *Debt to Equity Ratio* maximum of 400% and;
- c. *Debt Service Coverage* minimum of 100%.

Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang, persediaan, tanah, dan bangunan (Catatan 5, 10, dan 19)

The loan is collateralized with receivables, inventories, land and building (Notes 5, 10, and 19).

Pada tanggal 31 Desember 2018, WIK A Beton telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2018, WIK A Beton is compliance with the terms and conditions of the loans.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp100.000.000 dan nihil.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp100,000,000 and nil, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp115.000.000 dan nihil.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp115,000,000 dan nil, respectively.

**PT Wijaya Karya Kompon Beton (WIK A Kobe)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Pada tanggal 4 Juni 2018 WIK A Kobe telah melakukan pengajuan perpanjangan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan surat No.CGB.LC2/SPPK.025/2018 atas Perjanjian Kerja No. CRO.KP/226/KMK/14, Akta Nomor : 23 tanggal 9 Oktober 2014 (Adendum III) kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PT Wijaya Karya Kompon Beton (WIK A Kobe)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

On June 4, 2018 WIK A Kobe has applied for extension of credit facility to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk by letter No.CGB.LC2 / SPPK.025 / 2018 on Work Agreement No CRO.KP/226/KMK/14, Deed No. 23 dated October 9, 2014 (Addendum III) to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. With the terms and conditions as follows:

- Limit kredit: Rp60.000.000,
- Jenis kredit: Kredit modal kerja,
- Tujuan penggunaan: Tambahan modal kerja produksi beton pracetak,
- Jangka waktu: 11 Juni 2018 sampai 10 Juni 2019,
- Suku bunga: 9,95%, dan
- Agunan : aset tetap, piutang dan persediaan

- Credit limitation : Rp60,000,000,
- Type of credit : Working capital kredit,
- The intended use : Additional working capital of precast concrete production,
- Time period : June 11, 2018 to June 10, 2019,
- Interest Rate : 9.95%, and
- Collateral : Fix asset, receivable and inventories.

WIK A Kobe diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

WIK A Kobe is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- a. *Current ratio* minimal 100%;
- b. *Debt to Equity Ratio* maksimal 2,5 kali;
- c. *EBITDA to Interest* minimal sebesar 110%.

- a. *Current ratio* minimum of 100%;
- b. *Debt to Equity Ratio* maximum of 2.5 times;
- c. *EBITDA to Interest* minimum of 110%.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2018, WIKA Kobe telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp25.000.000 dan nihil.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp40.000.000.

PT Citra Lautan Teduh (CLT)

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 18 Januari 2017, CLT telah melakukan persetujuan perjanjian kredit kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan perjanjian No. 3 tahun 2017 dan telah diperpanjang dengan amandemen perjanjian kredit No: 269/AMD/CB/JKT/2017 yang akan berakhir pada Tanggal 14 Juli 2018 dan telah dilakukan perubahan kedua dan pernyataan kembali terhadap akta perjanjian kredit No. 3 tahun 2017 pada tanggal 31 Desember 2018 dengan jatuh tempo fasilitas kredit pada tanggal 14 Juli 2019. Fasilitas yang diberikan berupa Pinjaman Rekening Koran dengan Plafon Rp10.000.000, dan Pinjaman Transaksi Khusus yang terdiri dari Kredit Modal Kerja dan *Non Cash Loan* dengan nilai total sebesar Rp40.000.000. Adapun tingkat bunga berkisar antara 9% sampai dengan 10% per tahun.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp1.024.162.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.024.162 dan Rp11.993.174.

WIKA Realty

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 18 Juli 2014, WIKA Realty menerima fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. 078/PPWK/CBD/III/2014 dan penambahan plafond atas surat penawaran kredit No. CBG.CB2/SPPK.14/2015 dengan Addendum II (Kedua) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.KP/166/KMK/14 dengan akta No. 63 tanggal 19 Juni 2015 dan Adendum II (Kedua) atas Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* No. CRO.KP/167/NCL/14 dengan akta No. 64 tanggal 19 Juni 2015, pada tanggal 31 Mei 2018 melakukan perpanjangan fasilitas kredit dan penambahan fasilitas baru atas dasar surat penawaran pemberian kredit (SPPK) No. BSG.LC1/SPD.SPPK.008/2018 dengan fasilitas pinjaman sebagai berikut:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

As of December 31, 2018, WIKA Kobe is compliance with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp25,000,000 and nil, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil and Rp40,000,000, respectively.

PT Citra Lautan Teduh (CLT)

PT Bank CIMB Niaga Tbk

On January 18, 2017, CLT has entered into a loan agreement with PT Bank CIMB Niaga Tbk with an agreement No. 3 of 2017 and has been extended with an amendment to credit agreement No. : 269 / AMD / CB / JKT / 2017 which will expire on July 14, 2018 and a second amendment has been made and a restatement of the credit agreement deed No. 3 of 2017 on December 31, 2018 with the maturity of the credit facility on July 14, 2019. Facilities provided in the form of Current Account Loans with a Ceiling of Rp10,000,000, and Special Transaction Loans consisting of Working Capital Loans and Non Cash Loans with total value of Rp40,000,000. The annual interest rates range from 9% to 10%.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil dan Rp1,024,162, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp1,024,162 and Rp11,993,174, respectively.

WIKA Realty

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On July 18, 2014, WIKA Realty received a working capital loan facility from PT Bank Mandiri (Persero), Tbk With Letter of Credit (FIES) No 078/PPWK/CBD/III/2014, and the addition of a ceiling on the offer letter of credit number CBG.CB2 /SPPK.14/2015 with Addendum II (Second) of Working Capital Credit Agreement No. CRO.KP/166/KMK/14 with deed number 63 dated June 19, 2015 and Addendum II (Second) on Non-Cash Facility Agreement Loan No. CRO.KP/167/NCL/14 with deed number 64 dated June 19, 2015, on May 31, 2018 did a renewal of credit facilities and the addition of new facilities on the basis of the offer letter of credit (FIES) No. BSG.LC1/SPD.SPPK.008/2018, with loan facilities as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- Fasilitas Kredit Modal Kerja transaksi pinjaman khusus PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebelumnya sebesar Rp150.000.000 ditambah sebesar Rp50.000.000 menjadi Rp200.000.000 dengan suku bunga sebesar 9,50% pa, provisi 0,75% pa, denda tunggakan 2% pa dan masa berlaku perjanjian adalah sampai dengan tanggal 10 Juni 2019.
- Fasilitas SKBDN sebesar Rp80.000.000 dengan provisi pembukaan tarif Bank Guarantee Penawaran 0,5% pa, tarif Bank Guarantee Lainnya 0,5% pa, tarif penerbitan SKBDN 0.5% pa, tariff akseptasi 0.5% pa dan minimal tarif keseluruhan dalam setiap penerbitan Rp250/USD25 dan masa berlaku sampai dengan 10 Juni 2019.
- Fasilitas *Supplier Financing* sebesar Rp50.000.000 dengan tingkat bunga 8,25% per tahun, masa berlaku sampai dengan 10 Juni 2019.

Jaminan berupa (Catatan 19):

- 18 SHMSRS berlokasi di Tamansari Semanggi Apartemen, Jl. Akri, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan SHMSRS No 1196/II, 1197/II, 1199/II, 1200/II, 1201/II, 1204/II, 1205/II, 1206/II, 1207/II, 1208/III, 1209/III, 1210/III, 1211/III, 1217/III, 1218/III, 1219/III, 1220/III, dan 1221/III;
- 8 SHMSRS berlokasi di Tamansari Semanggi Apartemen, Jl. Akri, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan SHMSRS No 1198/II, 1202/II, 1203/II, 1212/III, 1213/III, 1214/III, 1215/III, dan 1216/III; dan
- Sebidang tanah berupa 16 HGB berlokasi di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan dengan HGB No 21808, 21679, 21680, 21681, 21682, 21683, 21684, 21685, 21686, 21687, 21688, 21689, 21690, 21691, 21692, dan 21693.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp191.000.000 dan nihil.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp150.000.000.

PT Bank ICBC Indonesia

Pada tanggal 6 Oktober 2015, WIKA Realty memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank ICBC Indonesia dengan surat penawaran kredit No. 222/CBIII/ICBC/X/2015. Pada tanggal 5 November 2018, WIKA Realty melakukan perpanjangan fasilitas *trade finance* sebagai sublimit dari fasilitas PTD-A (Pinjaman Tetap on Demand) dengan surat No. 286/CBII/ICBC/XI/2018. Rincian fasilitas kredit antara lain:

- *Working Capital Loan Facility* loan of special loan transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk before Rp150,000,000 plus Rp50,000,000 with total Rp200,000,000 with an interest rate of 9.50% pa. provision 0.75% pa. fines arrears of 2% pa and duration of the agreement is until the date of June 10, 2019.
- *Letter of credit facilities* of Rp80,000,000 with opening provision rate offers Bank Guarantee 0.5% pa, another Bank Guarantee rates 0.5% pa, issuing Letter of Credit rates 0.5% pa, acceptance rate 0.5% pa and minimum overall rate in each issue of Rp250/USD25 and the validity period up to June 10, 2019
- *The Supplier Financing Facility* of Rp50,000,000 with interest rate 8.25% per annum, period of validity until June 10, 2019.

Collateral (Note 19):

- 18 SHMSRS located in Tamansari Semanggi Apartment, Jl. Akri, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta with SHMSRS No 1196/II, 1197/II, 1199/II, 1200/II, 1201/II, 1204/II, 1205/II, 1206/II, 1207/II, 1208/III, 1209/III, 1210/III, 1211/III, 1217/III, 1218/III, 1219/III, 1220/III, and 1221/III;
- 8 SHMSRS located in Tamansari Semanggi Apartment Jl. Akri, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta with SHMSRS No 1198/II, 1202/II, 1203/II, 1212/III, 1213/III, 1214/III, 1215/III, and 1216/III; and
- Land in the form of 16 HGB located in Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, South Sulawesi with HGB No 21808, 21679, 21680, 21681, 21682, 21683, 21684, 21685, 21686, 21687, 21688, 21689, 21690, 21691, 21692, and 21693.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp191,000,000 dan nil, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil and Rp150,000,000, respectively.

PT Bank ICBC Indonesia

On October 6, 2015, WIKA Realty obtained a credit facility from PT Bank ICBC Indonesia with a credit offer letter No: 222/ CBIII / ICBC / X / 2015. On November 5 2018, WIKA Realty extended the trade finance facilities as sublimit of PTD-A facility (Fixed Loans on Demand) under letter No. 286/CBII/ICBC/XI/2018. Details of credit facilities include:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- Fasilitas PTD-A sebesar Rp200.000.000 dengan sublimit Fasilitas *Trade Finance* untuk L/C atau SKBDN (*Sight/Usage*), *Trust Receipt*, UPAS/UFAM dan Bank Garansi/SBLC sebesar Rp50.000.000.
- Jangka waktu perjanjian sampai dengan 13 November 2019.
- Suku bunga sebesar 10,50% p.a (*floating*) untuk fasilitas PTD-A dan sebesar 9,50% p.a (*floating*) untuk fasilitas *Trust Receipt* dan UPAS/UFAM. Tunggalan pokok, bunga dan jumlah lain akan dikenakan bunga dengan tingkat bunga per tahun sebesar 2% diatas tingkat bunga yang berlaku.

Tujuan pinjaman tersebut adalah untuk pembiayaan modal kerja untuk proyek debitur, diluar proyek Apartemen Iswara, Bekasi.

Jaminan berupa:

- APHT dari SHGB No. 02670/ pisangan atas nama WIKA Realty dengan total luas tanah 17.430 m2 yang berlokasi di Jl. Tarumanegara, Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. (Tanah Tamansari Pesona Bali).
- 156 unit Kondotel dari Hotel Kyriad, berlokasi di Jalan Surya Dharma, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten tertera pada SHMSRS atas nama WIKA Realty.
- Persediaan dan piutang dari debitur sebagai berikut: 8 sertifikat SHM dari area komersial di Tamansari Hive Apartement dan Kondotel, Jl. DI Panjaitan Kav 3-4 Cawang Jakarta Timur, atas nama WIKA Realty sebesar Rp138.869.598.

Dalam perjanjian perusahaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank :

- Memberikan pinjaman (kecuali dalam rangka kegiatan usaha normalnya) atau memberikan jaminan kepada pihak lain.
- Melepaskan aset material yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- Mengubah bentuk / status badan hukum.
- Mengubah anggaran dasar terkait dengan kegiatan usaha dan pemegang usaha, kecuali Perusahaan masih menjadi pemegang saham mayoritas.
- Konsolidasi, merger akuisisi atau melakukan investasi baru diluar bidang usaha WIKA Realty.

Syarat rasio finansial harus menjaga DER : 2,5 x.

- *PTD-A Facility of Rp200,000,000 with sublimit Trade Finance Facility for L/C or SKBDN (Sight/ Usage), Trust Receipt, UPAS/UFAM and Bank Guarantee / SBLC amounting to Rp50,000,000.*

- *The term of the agreement is up to November 13, 2019.*

- *interest rate of 10.50% p.a (floating) for PTD-A facility and 9.50% p.a (floating) for Trust Receipt and UPAS/UFAM facilities. Arrears on principal, interest and other amounts will be charged interest at annual rate of 2% above the prevailing interest rate.*

The purpose of the loan is to finance workin capital for the debtor project, excluding the Iswara Apartment project, Bekasi.

Collateral:

- *APHT (Security right upon land) from SHGB No. 02670 / pisangan on behalf of WIKA Realty a land area of 17,430 sqm located on Jl. Tarumanegara, Pisangan, Kecamatan East Ciputat, South Tangerang City, Provinsi Banten. (Tanah Tamansari Pesona Bali).*
- *156 condotel unit from Kyriad hotel located on Surya Dharma, Kelurahan Karang Sari, Neglasari sub-district, Tangerang City, Banten Province, SHMSRS listed on the behalf of WIKA Realty.*
- *Inventory and receivables debtor as follows: 8 SHM certificate from a commercial area in Tamansari Hive and Condotel Apartment, Jl. DI Panjaitan Kav 3-4 Cawang, East Jakarta, on Behalf of WIKA Realty amounting to Rp138,869,598.*

Under the agreement the company must obtain written approval from the Bank:

- *Provide loans (except in the normal course of business) or provide guarantees to others.*
- *Dispose of material assets required to carry out business activities.*
- *Change the form / status of legal entity.*
- *Change the articles of association related to business activities and business owners, except If the Company is still the majority shareholder.*
- *consolidate, merge acquisitions or make new investments outside WIKA Realty 's business field.*

Terms of financial ratios (Financial Covenant) is DER of 2.5 x.

Ketentuan jaminan:

1. PT Dinamika Panca Gemilang (pemilik tanah sebelumnya) harus menandatangani perjanjian jaminan / APHT;
2. Perusahaan akan menyerahkan Surat Kuasa untuk Menjual yang diperoleh dari PT Dinamika Panca Gemilang sebagai satu kesatuan dengan PPJB, sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit; dan
3. Fidusia piutang Perusahaan kecuali proyek Apartemen Tamansari Iswara, Bekasi, senilai Rp113.025.689.227 (lihat Catatan 5).

Pada tanggal 31 Desember 2018, WIKA Realty telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp140.000.000 dan nihil.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp200.000.000.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 14 Juli 2012, WIKA Realty menerima fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Pada tanggal 30 Mei 2018 WIKA Realty melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman dengan perjanjian kredit No. 085/PP&PWK/CBD/IV/2018 dengan jangka waktu fasilitas selama setahun sampai tanggal 22 April 2019. Fasilitas pinjaman sebagai berikut:

- Fasilitas Modal Kerja sebesar Rp35.000.000, dengan suku bunga sebesar 9,50% per tahun untuk tenor 6 bulan dan 9,25% per tahun untuk tenor 3 bulan and provisi 0,5% per tahun. Masa berlaku perjanjian adalah sampai dengan tanggal 22 April 2019.
- Fasilitas *Trade Supplier Financing* sebesar Rp60.000.000, dengan suku bunga 8,5% per tahun. Masa berlaku perjanjian adalah sampai 22 April 2019. Berikut adalah pembatasan Rasio PT Bank Danamon Indonesia Tbk:
 - a. *Current Ratio* > 1.0 x
 - b. *Gearing Ratio* < 3.0 x
 - c. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* > 1.0x
 - d. *Interest Service Coverage Ratio (ISCR)* > 1.0x

Dalam perjanjian, WIKA Realty harus menyatakan dan menjamin :

- Debitur tidak memiliki tunggakan atas kewajiban pada pihak ketiga atau pemerintah dalam hal perpajakan.

Terms of guarantee:

1. *PT Dinamika Panca Gemilang (previous land owner) must sign a guarantee agreement / APHT;*
2. *The Company will submit a Power of Attorney to sell obtained from PT Dinamika Panca Gemilang as a whole with PPJB, before signing the Credit Agreement; and*
3. *Fiduciary receivables from the company except for the Tamansari Iswara Apartment Project, Bekasi, valued at Rp113,025,689,227 (see Note 5).*

As of December 31, 2018, WIKA Realty is compliance with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp140,000,000 dan nil, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil and Rp200,000,000, respectively.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

On July 14, 2012, WIKA Realty received a working capital loan facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk. On May 30, 2018, WIKA Realty extend the loan term with the credit agreement 085/PP&PWK/CBD/IV/2018 until April 22, 2019. The loan facilities are as follows:

- *The Working Capital Facility of Rp35,000,000 with an interest rate of 9.50% p.a for 6 month tenor and 9.25% p.a for 3 month tenor and provision 0.5% p.a. The term of the agreement is valid until April 22, 2019.*
- *Trade Supplier Financing facility of Rp60,000,000, with an interest rate of 8.5% p.a. The term of the agreement is valid until April 22, 2019. Here are the restrictions Ratio of PT Bank Danamon Indonesia Tbk:*
 - a. *Current Ratio* > 1.0 x
 - b. *Gearing Ratio* < 3.0 x
 - c. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* > 1.0x
 - d. *Interest Service Coverage Ratio (ISCR)* > 1.0x

Under the agreement, WIKA Realty must obtain written and guarantee :

- *The Debtor has no arrears on obligations on the third phrase or the government in the case of taxation.*

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- Debitur tidak sedang mengajukan permohonan pembayaran terhadap fasilitas kredit yang diberikan dan tidak sedang mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.
- Kolektibilitas seluruh hutang adalah tergolong lancar atau mempunyai kolektabilitas 1.
- Utang dan kewajiban debitur pada bank sedikitnya memiliki peringkat yang sama.

Pada tanggal 31 Desember 2018, WIKA Realty telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Jaminan berupa (Catatan 19):

- Tanah dan bangunan (*Sport Club*), Tamansari Persada, Cibadak, Tanah Sereal Bogor SHGB 1408.
- Tanah dan bangunan (*Sport Club*), Tamansari Pesona Bali SHGB 1894.
- Tanah dan bangunan, Tamansari Bukit Bandung, Jl. Jaya Wijaya Raya, Kel. Sindang Jaya Kec. Mandalajati dengan nomor. SHGB: 00068.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp35.000.000 dan nihil.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp35.000.000.

**PT Wijaya Karya Industri Energi (Winner)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Sesuai Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 08 dan No. 09, tanggal 15 Juni 2017, Notaris Sri Ismiyati S.H., Notaris di Jakarta, diperbarui 4 Mei 2018 dengan surat No. R.II.112-OPK/DKD/05/2018 Winner telah menerima persetujuan perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dengan fasilitas kredit modal kerja sebagai berikut:

- Fasilitas KMK Rp25.000.000 keperluan tambahan modal kerja yang digunakan untuk membiayai produksi produk konversi energi dan photovoltaik.
- Suku bunga 11% pa, provisi 0,65% pa, media penarikan Bilyet Giro/Cek.

Masa berlaku kredit sampai dengan 2 Mei 2019.

Sesuai Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 21, tanggal 5 Mei 2017, Notaris Sri Ismiyati S.H., Notari di Jakarta, diperbaharui dengan surat No. R.II. 112-OPK/DKD/05/2018, Winner telah menerima persetujuan perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

- *The Debtor is not applying for the extension of the credit facility granted and is not currently applying for bankruptcy.*

- *The collectibility of all debts is either classified or has a collectability of 1.*
- *Debts and liabilities of the debtor to the bank have at least the same rank.*

As of December 31, 2018, WIKA Realty is compliance with the terms and conditions of the loans.

Guarantee (Note 19):

- *Land and building (Sport Club), Tamansari Persada, Cibadak, Tanah Sereal Bogor SHGB 1408.*
- *Land and building (Sport Club), Tamansari Pesona Bali SHGB 1894.*
- *Land and building, Tamansari Bukit Bandung, Jl. Jaya Wijaya Raya, Kel. Sindang Jaya Kec. Mandalajati with SHGB number: 00068.*

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp35,000,000 dan nil, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil and Rp35,000,000, respectively.

**PT Wijaya Karya Industri Energi (Winner)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

According to Addendum Agreement Deed Number 08 and Number 09 dated June 15, 2017 made before Sri Ismiyati S.H., Notary in Jakarta, updated May 4, 2018 with letter Number R.II.112-OPK/DKD/05/2018, Winner has received approval of an extension of credit facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Working capital credit facilities, are as follows:

- *KMK facilities Rp25,000,000 need additional working capital that are used to fund the production our energy conversion Photovoltaik.*
- *Interest rates 11% pa, provision 0.65 % p.a, media withdrawal bilyet giro / check.*

The validity period of the credit agreement is until May 2, 2019.

According to Addendum Agreement No. 21 dated May 5, 2017 by Sri Ismiyati S.H., Notary in Jakarta, updated with letter No R.II.112- OPK/DKD/05/2018, Winner has received approval of an extension of credit facilities from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Fasilitas LC/SKBDN Usance/Sight/UPAS (Resolving) adalah sebagai berikut:

- *Plafond* Rp25.000.000 bertujuan untuk penanguhan jaminan atas impor yang dilakukan oleh Winner dalam rangka pembelian bahan baku.
- Mata uang *multi currency*, komisi LC/SKBDN dan amandement 0.125% minimal USD50/Rp500, komisi akseptasi 1% pa, masa tenor 180 hari.
- Jangka waktu 1 tahun.
- Komisi 1% per *opening*, minimal Rp500.

Fasilitas Bank Garansi/*Stand by Letter of Credit* adalah sebagai berikut:

- *Plafond* Rp75.000.000 bertujuan penerbitan *Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond, Payment Bond, Maintenance Bond, Retention Bond*, dan *Custom Bond* untuk proyek-proyek yang terkait dengan lini bisnis usaha Solar Water Heater, Aircon Water Heater dan Photovoltaic.
- Provisi BG/SBLC 0,25% - 1% minimal Rp500, masa tenor maksimal 12 bulan sepanjang *availability period* belum jatuh tempo.

Pemberian Fasilitas *Forex Line* dengan plafon sebesar USD500,000.

Fasilitas kredit dijamin dengan

- a. Fidusia piutang usaha debitur sebagaimana ternyata dalam target kontrak distributor/dealer Winner Tahun 2015 dengan nilai penjaminan sebesar 60% x Rp137.600.000 atau sebesar Rp82.560.000 (Catatan 5).
- b. Fidusia atas seluruh Bangunan dan sarana dengan nilai penjamin sebesar Rp4.008.200 berdasarkan laporan independen appraisal KJPP Iskandar & Rekan pada tanggal 12 Juni 2014 (Catatan 19).
- c. *Letter of Support* yang menyatakan Perusahaan akan menjaga kelangsungan usaha Winner.

Negative Covenant dalam perjanjian kredit Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk antara lain:

- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga untuk menyatakan pailit dari debitur sendiri.
- Menyewakan aset yang dijaminkan ke bank pada pihak lain.
- Memperoleh kredit / fasilitas baru dalam pinjaman lain dari Bank atau lembaga keuangan lain yang menyebabkan rasio DER melebihi 150%.
- Memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) atau perusahaan dalam bentuk atau dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga.
- Melunasi utang kepada pemegang saham atau utang sebelum utang pada Bank.

Fasilitas LC / SKBDN Usance / Sight / UPAS (Resolving), are as follows:

- *Plafond* Rp25,000,000 aims preshipment import financing conducted by Winner contract in order to purchase raw material.
- Currency *multi currency*, the commission LC/SKBDN and amendment 0.125% minimum of USD50/Rp500, the commission acceptance 1% p.a, the tenor 180 days.
- Duration of 1 year.
- Commission 1% per opening, minimum Rp500.

Guarantees Bank/*Stand by Letter of Credit* Facilities are as follows:

- *Plafond* Rp75,000,000 aims as *Bid Bond issue, Performance Bond, Advance Payment Bond, Payment Bond, Maintenance Bond, Retention Bond*, and *Custom Bond* for projects related to business lines business Solar Water Heater, Aircon Water Heater and Photovoltaic.
- Provision BG/SBLC 0,25% - 1% minimum Rp500, the tenor maximum 12 month throughout *availability period* not due.

Facility, forex line with plafond of USD500,000.

These credit facilities are collateralized with:

- a. Debtor fiduciary business as it turns out that the contract distributor / dealer Winner By the year 2015 guarantee of 60% x Rp137,600,000 or Rp82,560,000 (Note 5).
- b. Fiduciary over all buildings and a means of Reinsurer Rp4,008,200 based on the report independent appraisal KJPP Iskandar & Rekan on June 12, 2014 (Note 19).
- c. *Letter of Support* stating, the Company will maintain the continuity of Winner.

Negative Covenant in credit agreement of Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, among others:

- Apply for bankruptcy declaration to the commercial court to declare bankruptcy from the debtor herself.
- Lease assets that are pledged to the bank on the other party
- Obtain new credits / facilities in other loans from banks or other financial institutions that cause the DER ratio to exceed 150%.
- Transferring as a major asset or material asset or company in any form or by any means to a third party.
- Pay off the debt to shareholders or debt before the debt to the bank

- Melakukan perubahan anggaran dasar dan perubahan modal saham.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Winner telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp19.548.311 dan Rp41.414.849.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp29.464.676 dan nihil.

PT Bank DBS Indonesia

Sesuai dengan akta perubahan ke 4 atas Perjanjian fasilitas perbankan No. 124 tanggal 18 Desember 2017 dan perjanjian No. 2805/XII/DBS/IBG-JKT/2018 perihal persetujuan sementara perubahan pasal 2 perjanjian fasilitas perbankan yang berlaku sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019.

Fasilitas kredit modal kerja, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Fasilitas RCF Rp2.500.000 keperluan tambahan modal kerja yang digunakan untuk membiayai produksi produk konversi energi dan produk photovoltaik.
- Suku bunga 10.50% pa, provisi 2.75% pa, media penarikan bilyet giro/cek.
- Jangka waktu 1 tahun.
- Komisi 0.5% pa, per *opening*, minimal USD50.

Fasilitas LC/SKBDN Usance/Sight/UPAS (Resolving) adalah sebagai berikut:

- *Plafond* Rp70.000.000 bertujuan untuk penangguhan jaminan atas impor yang dilakukan oleh Winner dalam rangka pembelian bahan baku.
- Mata uang multi *currency*, komisi LC/SKBDN dan amandemen 0.5% minimal USD50, komisi akseptasi 1% pa.
- Komisi 0.5% pa, per *opening*, minimal USD50.

Persyaratan lain yang penting dari pinjaman ini adalah Winner agar menjaga *current ratio* dan *interest service coverage ratio* masing-masing sebesar 1 kali dan 1,5 kali.

Negative Covenant yang terdapat dalam perjanjian bank Bank DBS Indonesia antara lain:

- Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya
- Mengubah jenis usaha Winner.
- Mengubah bentuk dan/atau status hukum Winner, melikuidasi meleburkan, menggabungkan dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal

- *Make changes to the articles of association and changes in share capital.*

As of December 31, 2018, Winner is compliance with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp19,548,311 and Rp41,414,849, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp29,464,676 and nil, respectively.

PT Bank DBS Indonesia

In accordance with the fourth amendment deed of banking Facility agreement No. 124 dated December 18, 2017 and agreement No. 2805/XII/DBS/IBG-JKT/2018 concerning the temporary approval of amendment to article 2 of the banking facility agreement which is effective from December 8, 2018 to January 7, 2019.

Working capital credit facilities, which are described as follows:

- *RCF Facility Rp2,500,000 additional working capital used to finance the production of energy conversion and photovoltaic products.*
- *Interest rates 10.50% pa, provision 2.75% pa, withdrawal via bilyet giro / check.*
- *Duration of 1 year.*
- *Commission 1% per opening, minimum USD50.*

Facilities LC/SKBDN Usance/Sight/UPAS (Resolving) as follows:

- *Plafond Rp70,000,000 aims to preshipment import financing conducted by Winner contract in order to purchase raw material.*
- *Currency multi currency, the commission LC/SKBDN and amendment 0.5 % min USD50 the commission acceptance 1% pa.*
- *The commission 0,5% pa, per opening, minimum USD50.*

Other important requirement of this loan is Winner to keep the current ratio and interest service coverage ratio of 1 and 1.5 times respectively.

Negative Covenant contained in the agreement of Bank DBS Indonesia Bank, among others:

- *Receive new and/or additional loans and/or loans from other banks or other third parties*
- *Changing the type of business of Winner.*
- *Changing the legal form and/or legal status of Winner, liquidating merge, merge and/or dissolve and/or do other things for the benefit of its creditor*

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

lain untuk kepentingan krediturnya (selain bank) termasuk mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi waran atau instrumen-instrumen jenis lainnya.

- Memindahtangankan sebagai besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) atau Winner dalam bentuk atau dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga.
- Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaaan pembayarannya
- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga.
- Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham Winner atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak sebelumnya.

Persyaratan lain yang penting dari pinjaman ini adalah Winner agar menjaga *current ratio* dan *interest service coverage ratio* masing-masing sebesar 1 kali dan 1,5 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Winner telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.500.000 dan Rp36.675.020.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp60.402.391 dan nihil.

WIKI Ikon

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Pada tanggal 20 Juli 2017, WIKI Ikon melakukan perjanjian dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan menandatangani fasilitas perbankan dengan No. 483/JKC/CSMU/VII/2017 untuk fasilitas *Cash Loan* dan *Non Cash Loan* sebesar Rp50.000.000. Perjanjian ini berlaku sejak 20 Juli 2017 sampai April 2018 dan hanya berlaku selama 3 tahun.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 06 Notaris Joko Suryanto, SH, tertanggal 9 Mei 2018, dibuat di hadapan WIKI Ikon memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Kredit Modal Kerja/Working Capital Credit
Plafon	Rp143.100.000
Jangka Waktu	9 bulan sampai dengan 9 Februari 2019 / 9 months until February 9, 2019
Tujuan	Proyek Terminal Teluk Lamong Pelindo III

(other than bank) including issuing new shares and/or selling existing shares, or other types of instruments.

- Transferring as a major asset or material asset or Winner in any form or by any means to a third party.
- Apply for bankruptcy or request for postponement of payment
- Bind themselves as guarantor (borg) against third parties.
- Create and sign a material agreement that benefits the members of the Board of Directors, Commissioners or Shareholders of Winner or parties to whom the parties have been in conflict.

Other important requirement of this loan is Winner to keep the *current ratio* and *interest service coverage ratio* of 1 and 1.5 times, respectively.

As of December 31, 2018, Winner is compliance with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp2,500,000 and Rp36,675,020, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp60,402,391 and nil, respectively.

WIKI Ikon

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

On July 20, 2017 WIKI Ikon made an agreement with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk by sign the Agreement for Banking Facilities No. 483/JKC/CSMU/VII/2017 for Cash Loan and Non Cash Loan Facilities with a credit limit of Rp50,000,000. This Agreement is valid from July 20, 2017 until April, 2018 and only valid for 3 years.

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 06 Notary Joko Suryanto, dated May 9, 2018, SH, WIKI Ikon obtained a loan facility from PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk with the following details:

Facility Type
Limit
Time Period
Purpose

Berdasarkan surat No. 192/JKC/BCSU/II/2019, WIKA Ikon menerima persetujuan untuk perpanjangan jangka waktu pinjaman sampai dengan 9 November 2019.

Based on letter No. 192 / JKC / BCSU / II / 2019, WIKA Ikon receives approval to extend the credit time period until November 9, 2019.

Fasilitas ini WIKA Ikon wajib menyerahkan legalitas tanah proyek yang menjadi agunan pokok berupa tanah dan bangunan, sarana dan prasarana serta peralatan yang ada dan yang akan berdiri di atasnya, serta wajib memenuhi persyaratan menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

On this facility WIKA Ikon is obliged to submit the legality of the project land which becomes the principal collateral in the form of land and buildings, infrastructure as well as existing equipment and those that will stand on it, and must fulfill certain requirements where is to maintain financial ratios as follows:

- *Current Ratio* tidak kurang dari 120%;
- *Debt to Equity Ratio* tidak lebih dari 500%;
- *Debt Service Coverage Ratio* tidak lebih dari 100%.

- *Current Ratio* is not less than 120%;
- *Debt to Equity Ratio* is not more than 500%;
- *Debt Service Coverage Ratio* is not more than 100%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 54 Notaris Joko Suryanto, SH, tertanggal 27 September 2018, dibuat di hadapan WIKA Ikon memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 54 Notary Joko Suryanto, SH, dated September 27, 2018, SH, WIKA Ikon obtained a loan facility from PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk with the following details:

Jenis Fasilitas	Kredit Modal Kerja/Working Capital Credit	Facility Type
Plafon	Rp36.000.000	Limit
Jangka Waktu	6 bulan/6 months	Time Period
Tujuan	Proyek Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper Kunciran	Purpose

Fasilitas ini WIKA Ikon wajib menyerahkan legalitas tanah proyek yang menjadi agunan pokok berupa tanah dan bangunan, sarana dan prasarana serta peralatan yang ada dan yang akan berdiri di atasnya, serta wajib memenuhi persyaratan menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

On this facility WIKA Ikon is obliged to submit the legality of the project land which becomes the principal collateral in the form of land and buildings, infrastructure as well as existing equipment and those that will stand on it, and must fulfill certain requirements where is to maintain financial ratios as follows:

- *Current Ratio* tetap berada diatas 100%;
- *Debt to Equity Ratio* tetap berada dibawah 500%;
- *Debt Service Coverage Ratio* tetap berada diatas 100%.

- *Current Ratio* remain above 100%;
- *Debt to Equity Ratio* remain under 500%;
- *Debt Service Coverage Ratio* remain above 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, WIKA Ikon telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of December 31, 2018 and 2017, WIKA Ikon is compliance with the terms and conditions of the loans.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp169.794.517 dan Rp72.525.000.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp169,794,517 and Rp72,525,000, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp143.642.483 dan Rp159.300.000.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp143,642,483 and Rp159,300,000, respectively.

PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk

Pada tanggal 21 Juni 2017, WIKA Ikon melakukan perjanjian dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk dengan menandatangani

PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk

On June 21, 2017, WIKA Ikon entered into an agreement with PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk by signing a working

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

fasilitas kredit modal kerja dengan No. 72 untuk fasilitas *Cash Loan* dan *Non Cash Loan* sebesar Rp100.000.000. Perjanjian ini berlaku sejak 21 Juni 2017 sampai 21 Juni 2019 dan hanya berlaku selama 2 tahun.

capital credit facility with No. 72 for a Cash Loan and Non Cash Loan facility amounting Rp100,000,000. This agreement is valid from June 21, 2017 to June 21, 2019 and is only valid for 2 years

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 72 Notaris H. Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn tertanggal 21 Juni 2017, dibuat di hadapan WIKA Ikon memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 72 Notary H. Aristiawan Dwi Putranto, S.H., M.Kn dated June 21, 2017, WIKA Ikon obtained a loan facility from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk with following details of the facilities:

Jenis Fasilitas	<i>Fasilitas Cash Loan dan/and Non Cash Loan</i>	<i>Facility Type</i>
Plafon	Rp70.000.000	<i>Limit</i>
Jangka Waktu	sampai dengan 21 Juni 2019 / <i>until June 21, 2019</i>	<i>Time Period</i>
Tujuan	Untuk membiayai kebutuhan umum terkait dengan bisnis Pembiayaan Peminjam/ <i>For general needs related to the Borrower's Financing business</i>	<i>Purpose</i>

Jenis Fasilitas	<i>Fasilitas Non Cash Loan (Supply Chain Financing)</i>	<i>Facility Type</i>
Plafon	Rp30.000.000	<i>Limit</i>
Jangka Waktu	sampai dengan 21 Juni 2019 / <i>until June 21, 2019</i>	<i>Time Period</i>
Tujuan	Untuk membiayai kebutuhan umum terkait dengan bisnis Pembiayaan Peminjam/ <i>For general needs related to the Borrower's Financing business</i>	<i>Purpose</i>

Fasilitas ini WIKA Ikon wajib menyerahkan jaminan fidusia atas piutang sebesar minimal 125% dari *Outstanding Kredit* sebesar Rp125.000.000.

On this facility, WIKA Ikon must submit a fiduciary guarantee of receivables in the amount of at least 125% of Outstanding Credit amounting to Rp125,000,000.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp67.950.000 dan Rp32.200.000.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp67,950,000 and Rp32,200,000, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp148.200.000 dan Rp10.550.000.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp148,200,000 and Rp10,550,000, respectively.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 22 Mei 2018, WIKA Ikon melakukan perpanjangan terhadap perjanjian kredit sebelumnya dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan No:118/PPWK/CBD/V/2018 untuk fasilitas *uncommitted omnibus trade finance*. Perjanjian ini berlaku sejak 22 Mei 2018 sampai 22 April 2019 dan hanya berlaku selama 1 tahun.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

On May 22, 2018, WIKA Ikon made an extension of the previous credit agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk by signing a credit facility agreement with No: 118/PPWK/CBD/V/2018 for uncommitted trade finance omnibus facilities. This agreement is valid from May 22, 2018 to April 22, 2019 and is only valid for 1 year.

Berdasarkan Akta Perpanjangan Perjanjian Kredit No:118/PPWK/CBD/V/2018 Notaris E. Betty Budiyaniti Moesigit, SH tertanggal 22 Mei 2018, dibuat di hadapan WIKA Ikon memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Based on the Deed of Credit Agreement No:118/PPWK/CBD/V/2018 Notary E. Betty Budiyaniti Moesigit, SH dated 22 May 2018, WIKA Ikon obtained a loan facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk with the following details:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Jenis Fasilitas	<i>Sight Letter of Credit (L/C) dan/and SKBDN</i>	Facility Type
Plafon	Rp40.000.000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 22 April 2019 / <i>until April 22, 2019</i>	Time Period
Jenis Fasilitas	<i>Usance Letter of Credit (L/C) Impor dan/and SKBDN</i>	Facility Type
Plafon	Rp40.000.000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 22 April 2019 / <i>until April 22, 2019</i>	Time Period
Jenis Fasilitas	<i>L/C Impor dan/and SKBDN UPAS</i>	Facility Type
Plafon	Rp40.000.000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 22 April 2019 / <i>until April 22, 2019</i>	Time Period
Jenis Fasilitas	<i>Bank Garansi/Bank Guarantee</i>	Facility Type
Plafon	Rp10.000.000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 22 April 2019 / <i>until April 22, 2019</i>	Time Period
Jenis Fasilitas	<i>Standby Letter of Credit</i>	Facility Type
Plafon	Rp10.000.000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 22 April 2019 / <i>until April 22, 2019</i>	Time Period
Jenis Fasilitas	<i>Open Account Financing</i>	Facility Type
Plafon	Rp10.000.000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 22 April 2019 / <i>until April 22, 2019</i>	Time Period
Jenis Fasilitas	<i>Fasilitas Trade Supplier Financing</i>	Facility Type
Plafon	Rp40.000.000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 22 April 2019 / <i>until April 22, 2019</i>	Time Period

Fasilitas ini WIKA Ikon wajib menyerahkan jaminan fidusia atas piutang dan/atau kontrak penjualan dan/atau *purchase order* dengan nilai penjaminan minimal sebesar 115% dari total *outstanding* Fasilitas *Omnibus Trade Finance* dan menyerahkan jaminan *cash margin* sebesar 15% setiap pembukaan *Letter of Credit (L/C)*, *Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)*, *Usance Payable At Sight (UPAS)*, *Bank Garansi (BG)*, dan *Stand By Letter of Credit (SBLC)*), serta wajib memenuhi persyaratan menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimum 1 (satu) kali;
- *Total Debt to Equity* maksimum 3 kali;
- *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum 2 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, WIKA Ikon telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan nihil.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp36.700.000 dan Rp23.165.742

On this facility WIKA Ikon is obliged to submit trade accounts receivable and / or inventories and / or working in progress and / or due from customer minimum of 115% (one hundred twenty five percent) of the Working Capital Credit Facility Account (PRK KMK) and Capital Credit Permanent Fixed-Term Sublimit Bank Guarantee Loans, LC / SKBDN, and must fulfill the requirements of maintaining financial ratios as follows:

- *Current Ratio* minimum of 1 (one) time;
- *Debt to Equity Ratio* maximum of 3 times;
- *Debt Service Coverage Ratio* minimum of 2 times.

As of December 31, 2018 and 2017, WIKA Ikon is compliance with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp10,000,000 and nil, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp36,700,000 and Rp23,165,742, respectively.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

PT Bank DKI

Pada tanggal 9 November 2018, WIKA Ikon dengan PT Bank DKI menandatangani perjanjian kredit modal kerja No. 20 untuk fasilitas pinjaman rekening koran sebesar Rp20.000.000, fasilitas modal kerja konstruksi sebesar Rp80.000.000, fasilitas pinjaman tetap Rp100.000.000. Perjanjian ini berlaku sejak 11 November 2018 sampai 11 November 2019 dan hanya berlaku selama 1 tahun.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 20 Notaris E. Betty Budiyaniti Moesigit, SH tertanggal 9 November 2018, dibuat di hadapan WIKA Ikon memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank DKI dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Kredit Modal Kerja/Working Capital Credit	Facility Type
Plafon	Rp20.000.000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 11 November 2019 / until November 11, 2019	Time Period
Tujuan	Modal Kerja Operasional/Operational Working Capital	Purpose
Jenis Fasilitas	Kredit Modal Kerja/Working Capital Credit	Facility Type
Plafon	Rp80.000.000.	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 11 November 2019 / until November 11, 2019	Time Period
Tujuan	Untuk pengerjaan proyek/ For project	Purpose
Jenis Fasilitas	Kredit Modal Kerja/Working Capital Credit	Facility Type
Plafon	Rp100.000.000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 11 November 2019 / until November 11, 2019	Time Period
Tujuan	Untuk pengerjaan proyek/ For project	Purpose

Fasilitas ini WIKA Ikon wajib menyerahkan piutang usaha dan/atau persediaan dan/atau pekerjaan dalam pelaksanaan dan/atau tagihan bruto pemberi kerja minimal sebesar 125% dari Fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Rekening Koran (KMK PRK) dan Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Berjangka Sublimit Bank Garansi, LC/SKBDN, serta wajib memenuhi persyaratan menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Current Ratio minimal 100%;
- Debt Service Coverage Ratio minimal 100%;
- Debt to Equity Ratio maksimal 450%.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, WIKA Ikon telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp117.862.736 dan Rp34.474.924

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp188.405.000 dan Rp237.914.509.

PT Bank DKI

On November 9, 2018, WIKA Ikon with PT Bank DKI signing a working capital loan agreement No. 20 for a checking account credit facility of Rp20,000,000, a construction working capital facility amounting to Rp80,000,000, fixed loan facility amounting to Rp100,000,000. This Agreement is valid from November 11, 2018 until November 11, 2019 and is only valid for 1 year.

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. 20 Notary E. Betty Budiyaniti Moesigit, SH, dated November 9, 2018, WIKA Ikon obtained a loan facility from PT Bank DKI with the following details:

On this facility WIKA Ikon is obliged to submit trade accounts receivable and / or inventories and / or working in progress and / or due from customer minimum of 125% of the Working Capital Credit Facility Account (PRK KMK) and Capital Credit Permanent Fixed-Term Sublimit Bank Guarantee Loans, LC / SKBDN, and must fulfill the requirements of maintaining financial ratios as follows:

- Current Ratio minimum of 100%;
- Debt Service Coverage Ratio minimum of 100%;
- Debt to Equity Ratio maximum of 450%.

As of December 31, 2018 and 2017, WIKA Ikon is compliance with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp117,862,736 and Rp34,474,924, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp188,405,000 and Rp237,914,509, respectively.

PT Bank DBS Indonesia

Pada tanggal 4 Januari 2018, WIKA Ikon melakukan perpanjangan perjanjian dengan PT Bank DBS Indonesia dengan menandatangani perjanjian fasilitas perbankan dengan No.001/PFPA-DBSI//1-2/2018 untuk fasilitas *Bank Guarantee/BG, Sight L/C, Usance L/C, Upas L/C* sebesar Rp100.000.000. Perjanjian ini berlaku sejak 4 Januari 2018 sampai 7 Oktober 2018 dan hanya berlaku selama 9 bulan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan No.001/PFPA-DBSI//1-2/2018 Notaris Mala Mukti, S.H., Lex Legibus Magister tertanggal 4 Januari 2018, dibuat di hadapan WIKA Ikon memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank DBS Indonesia dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Fasilitas Perbankan/Banking facilities	Facility Type
Plafon	Rp100.000.000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 7 Oktober 2018 / until October 7, 2018	Time Period

Berdasarkan perjanjian No 003/PFPA-DBSI//1-2/2019, WIKA Ikon dan PT Bank DBS Indonesia memperpanjang jangka waktu pinjaman sampai dengan 9 Oktober 2019.

Fasilitas ini WIKA Ikon wajib menyerahkan Jaminan kebendaan Fidusia atas Tagihan/Sales Contract tertentu/*Purchase Order* tertentu nasabah-nasabah yang dibiayai oleh bank berdasarkan perjanjian ini untuk menjamin kewajiban nasabah kepada bank berdasarkan Fasilitas Perbankan dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sejumlah Rp62.500.000, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No W7-015369 HT.04.06.TH.2008/STD, tertanggal 24 November 2008 dan Perjanjian gadai atas deposito milik nasabah yg disimpan di bank untuk menjamin kewajiban nasabah kepada bank berdasarkan fasilitas perbankan dengan nilai penjaminan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari jumlah terutang Fasilitas Perbankan apabila nasabah dapat menyetorkan langsung hasil usahanya melalui bank atau sekurang-kurangnya sebesar 10% dari jumlah terutang Fasilitas Perbankan apabila nasabah tidak dapat menyetorkan langsung hasil usahanya melalui bank, serta wajib memenuhi persyaratan menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- *EBITDA to Interest Expenses* sekurang-kurangnya 1,25 kali.
- *Current Ratio* sekurang-kurangnya 1,2 kali.
- *Quick Ratio* sekurang-kurangnya 0,70 kali.
- *Minimum Total Networth* sekurang-kurangnya Rp50.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, WIKA Ikon telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

PT Bank DBS Indonesia

On January 4, 2018, WIKA Ikon extended the agreement with PT Bank DBS Indonesia by signing a banking facility agreement with No.001/PFPA-DBSI//1-2/2018 for Bank Guarantee / BG, Sight L/C, Usance L/C, Upas L/C amounting to Rp100,000,000,000. This agreement is valid from January 4, 2018 to October 7, 2018 and is only valid for 9 months.

Based on the Deed of Banking Facility Agreement No.001/PFPA-DBSI//1-2/2018 Notary Mala Mukti, SH, Lex Legibus Magister dated January 4, 2018, WIKA Ikon obtained a loan facility from PT Bank DBS Indonesia with detail of the facilities as follows:

Based on the agreement No. 003/PFPA-DBSI//1-2/2019, WIKA Ikon and PT Bank DBS Indonesia extend the time period of the credit until October 9, 2019.

On this facility WIKA Ikon is obliged to submit a Fiduciary Material Guarantee for a particular Bill/Sales Contract/certain Purchase Orders for customers financed by the bank based on this agreement to guarantee customer obligations to banks based on Banking Facilities with a guarantee value of at least Rp62,500,000 as set forth in the Fiduciary Guarantee Certificate No.W7-015369 HT.04.06.TH.2008/STD, dated November 24, 2008 and a mortgage agreement on deposits held by customers deposited in the bank to guarantee customer obligations to the bank based on banking facilities with a guarantee value of at least 5% of the outstanding amount of the Banking Facility if the customer can deposit the proceeds directly through the bank or at least 10% of the outstanding amount of the Banking Facility if the customer cannot deposit the proceeds directly through the bank, and is obligated to maintain financial ratio requirements as follows:

- *EBITDA to Interest Expenses* of at least 1.25 times
- *Current Ratio* of at least 1.20 times.
- *Quick Ratio* of at least 0.70 times.
- *Minimum Networth Total* is at least Rp50,000,000.

As of December 31, 2018 and 2017, WIKA Ikon is compliance with the terms and conditions of the loans.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan Rp10.000.000.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp10,000,000 and Rp10,000,000, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp10.000.000 dan Rp167.676.517.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp10,000,000 and Rp167,676,517, respectively.

PT Bank OCBC NISP Tbk

Pada tanggal 13 April 2015, WIKA Ikon melakukan perjanjian dengan PT Bank OCBC NISP Tbk dengan menandatangani fasilitas Perbankan untuk fasilitas Gadai Deposito.

- Fasilitas Trade Gabungan 1
Fasilitas Bank Garansi (BG), *Performance Bonds*, Fasilitas Surat Kredit Berdokumentasi Dalam Negeri (SKBDN). Fasilitas *Letter of Credit* dengan ketentuan jumlah penggunaan fasilitas sebesar Rp100.000.000.
- Fasilitas Trade Gabungan 2
Fasilitas *Trade Receivable Financing* dan Fasilitas *Post Export Financing* dengan Fasilitas sebesar Rp50.000.000.
- Fasilitas Valuta Asing sebesar USD1,000,000.

PT Bank OCBC NISP Tbk

On April 13, 2015, WIKA Ikon entered into an agreement with PT Bank OCBC NISP Tbk by signing a Banking facility for Pawn Deposit facilities.

- *Facilities Trade Combined 1*
Facility Bank Guarantee (BG), *Performance Bonds*, Letter of Credit Facility (SKBDN). Letter of Credit Facility with the terms of the facility amount of Rp100,000,000.
- *Facilities Trade Combined 2*
Trade Receivable Financing Facilities and Post Export Financing Facility amounting to Rp50,000,000.
- Foreign Exchange Facility amounting to USD1,000,000.

Atas fasilitas tersebut telah diperpanjang berdasarkan surat No. 159/CBL/PPKS/IV/2018 tanggal 13 April 2018 sampai dengan 13 April 2019.

The facility has been extended by a letter No. 159/CBL/PPKS/IV/2018 letter date April 13, 2018 until April 13, 2019.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp20.600.000.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil and Rp20,600,000, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp20.600.000 dan Rp105.473.352.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp20,600,000 and Rp105,473,352, respectively.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 6 Juni 2011, WIKA Ikon melakukan perpanjangan perjanjian dengan PT Bank CIMB Niaga dengan menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan No:312/AMD/CB/JKT/2018 untuk fasilitas Bank Garansi sebesar Rp300.000.000, L/C dan SKBDN sebesar Rp300.000.000, Fasilitas pinjaman transaksi khusus II sebesar Rp140.000.000, Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp10.000.000, dan Fasilitas *Trust Receipt* sebesar Rp150.000.000. Perjanjian ini berlaku sejak 6 Juni 2011 sampai 14 Juli 2019 dan hanya berlaku selama 1 tahun.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

On June 6, 2011, WIKA Ikon made an extension of the agreement with PT Bank CIMB Niaga by signing a credit facility agreement with No:312/AMD/CB/JKT/2018 for a Bank Guarantee facility of Rp300,000,000, L/C and SKBDN of Rp300,000,000, Special transaction loan facility II amounting to Rp140,000,000, Current Account Loan amounting to Rp10,000,000, and Trust Receipt Facility amounting to Rp150,000,000. This agreement is valid from June 6, 2011 to July 14, 2019 and is only valid for 1 year.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. No:312/AMD/CB/JKT/2018 Notaris E. Betty Budiyaniti Moesigit, SH tertanggal 21 Juni 2017, dibuat di hadapan WIKA Ikon memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Based on the Agreement Deed of Working Capital Credit No. No: 312 / AMD / CB / JKT / 2018 Notary E. Betty Budiyaniti Moesigit, SH dated June 21, 2017, WIKA Ikon to obtain a loan facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk with the following details:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Jenis Fasilitas	Bank Garansi/Bank Guarantee	Facility Type
Plafon	Rp300.000.000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 14 Juli 2019 / until July 14, 2019	Time Period
Jenis Fasilitas	Letter of Credit Impor	Facility Type
Plafon	Rp300.000.000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 14 Juli 2019 / until July 14, 2019	Time Period
Suku Bunga	UPAS sebesar Subject to Market Rate	Interest
Jenis Fasilitas	Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus II /Special transaction loan facility II	Facility Type
Plafon	Rp140.000.000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 14 Juli 2019 / until July 14, 2019	Time Period
Jenis Fasilitas	Pinjaman Rekening Koran (PRK) /Current Account Loan	Facility Type
Plafon	Rp10.000.000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 14 Juli 2019 / until July 14, 2019	Time Period
Jenis Fasilitas	Fasilitas Trust Receipt/Trust Receipt Facility	Facility Type
Plafon	Rp150.000.000	Limit
Jangka Waktu	sampai dengan 14 Juli 2019 / until July 14, 2019	Time Period
Tujuan	Untuk penyelesaian Letter of Credit (L/C) dan SKBDN/For completion of Letter of Credit (L / C) and SKBDN	Purpose

Fasilitas ini WIKA Ikon wajib menyerahkan mesin-mesin milik debitur dengan nilai penjaminan sebesar Rp42.820.780 yang diikat secara fidusia, Barang persediaan milik debitur dengan nilai penjaminan sebesar Rp50.000.000 yang diikat secara fidusia, Piutang dagang (tagihan) milik debitur dengan nilai penjaminan sebesar Rp500.000.000 yang diikat secara fidusia dengan ketentuan piutang dagang berstatus lancer, *Letter of Comfort* dari Perusahaan untuk selalu mendukung penuh kegiatan usaha debitur, serta wajib memenuhi persyaratan menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- *Current Ratio* minimum 1 kali

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, WIKA Ikon telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp45.877.618 dan Rp88.624.130.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.562.420.995 dan Rp1.073.033.822.

On this facility WIKA Ikon is obliged to deliver machinery owned by the debtor with a guarantee value amounting Rp42,820,780, bound by fiduciary, inventory of debtor with a guarantee value amounting to Rp50,000,000 tied in a fiduciary manner, accounts receivable (bills) owned by the debtor with a guarantee value amounting to Rp500,000,000 bound by fiduciary provisions on the accounts receivable trading status, Letter of Comfort from the Company to always fully support the debtor's business activities, and must fulfill the requirements of maintaining financial ratios as follows

- *Current Ratio* minimum of 1 time.

As of December 31, 2018 and 2017, WIKA Ikon is compliance with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp458,77,618 and Rp88,624,130, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp1,562,420,995 and Rp1,073,033,822, respectively.

WIKA RK

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. BIN/2.1/034/R tanggal 20 Februari 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

WIKA RK

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Under the Credit Agreement No. BIN/2.1.034/R dated February 20, 2018, the terms and conditions are as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Fasilitas kredit:

i. *Plafond KMK Transaksional*

<i>Plafon</i>	:	Rp50.000.000.
<i>Jangka waktu</i>	:	1 (satu) tahun, periode tanggal 22 Februari 2018 s/d 20 Mei 2019
<i>Sifat</i>	:	- <i>Plafond bersifat Revolving</i> - <i>Proyek atau angsuran sesuai term in yang Masuk</i>
<i>Bunga</i>	:	9,75% per tahun
<i>Provisi</i>	:	0,50% dari maksimum kredit dibayar 1 kali dipungut di muka.
<i>Biaya Adm</i>	:	Rp25.000.000.

ii. *Plafond Non Cash Loan*

<i>Plafon</i>	:	Rp100.000.000.
<i>Jangka waktu</i>	:	1 (satu) tahun, periode tanggal 22 Februari 2018 s/d 20 Mei 2019.
<i>Biaya Adm</i>	:	Rp25.000.000.
<i>Provisi</i>	:	Untuk Penerbitan GB/SBLC - 0,50 % p.a nominal diatas Rp 10 Milyar dan jangka waktu diatas 6 bulan 0,75 % p.a proporsional dengan jangka waktu selain kriteria diatas Untuk Penerbitan LC atau SKBDN Pembukaan 0,50% p.a dari nilai LC/SKBDN Amandement 0,50% p.a dari nilai perubahan LC/SKBDN Akseptasi 0,75% p.a dihitung dari nilai dan tenor akseptasi.
<i>Jaminan</i>	:	Tagihan termin proyek minimal senilai 200% dari maksimum fasilitas kredit atau sebesar Rp300.000.000. yang akan diikat fidusia notariil pada saat penandatanganan perjanjian kredit.

Dalam perjanjian kredit WIKA RK tidak diperkenankan melakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar WIKA RK yang dapat mengurangi kemampuan WIKA RK melunasi fasilitas kredit kepada BNI, kecuali dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The credit facility:

i. *Plafond KMK Transactional*

<i>Ceiling</i>	:	Rp50,000,000.
<i>Duration</i>	:	1 (one) year period from February 22, 2018 until May 20, 2019.
<i>Character</i>	:	- <i>Character Ceiling is Revolving</i> - <i>Loans are to clean up the realization of a project or installments of incoming billings</i>
<i>Interest rate</i>	:	9.75% per year
<i>Provision</i>	:	0.50% from maximum credit is paid 1 time prepaid collected.
<i>Administration</i>	:	Rp25,000,000.

ii. *Plafond Non Cash Loan*

<i>Ceiling</i>	:	Rp100,000,000.
<i>Duration</i>	:	1 (one) year period from February 22, 2018 until May 20, 2019.
<i>Administration Exp</i>	:	Rp25,000,000.
<i>Character</i>	:	For Publishing GB/SBLC – 0.50% p.a nominal over Rp 10 Billion and over a period of 6 months – 0.75%p.a proportional with duration criteria above For Publishing LC or SKBDN - Opening 0.50% p.a of the value LC/SKBDN – Amended to 0.50% p.a of the change in value of LC/SKBDN Acceptance 0.75% p.a calculated from the value and acceptance of the tenor.
<i>Warranty</i>	:	Project term bill for minimum value of 200% from the maximum credit facility amounting to Rp300,000,000. which is bound by fiduciary notarized at the signing of the loan agreement.

In the credit agreement, WIKA RK is not allowed to do are the following:

- 1) Make changes to business activities as stated in the Articles of Association of WIKA RK that can reduce the ability of WIKA RK to repay credit facilities to BNI, unless required by applicable laws and regulations.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

2) Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/ aset milik WIKA RK dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi. 3) Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran perseroan maupun rekonstruksi (Tindakan Korporasi). 4) Mengajukan permohonan Pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas WIKA RK kepada instansi yang berwenang. 5) Melakukan perubahan bentuk hukum. 6) Memberikan penjaminan atau pinjaman kepada anak perusahaan, kecuali yang telah berjalan. 7) Melakukan perubahan komposisi pemegang saham yang mengakibatkan Perusahaan tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas WIKA RK. 8) Menerima tambahan fasilitas kredit dari bank/ lembaga keuangan lain atau melakukan penerbitan obligasi, kecuali dalam hal setelah menerima tambahan fasilitas kredit atau melakukan penerbitan obligasi tersebut rasio keuangan masih memenuhi <i>financial covenant</i> $CR \geq 100\%$, $DER \leq 300\%$ dan $DSC \geq 100\%$ maka WIKA RK cukup memberitahukan secara tertulis kepada BNI.	2) <i>Selling or transferring rights or transferring all or part of the assets / WIKA RK owned assets in one transaction or in several transactions.</i> 3) <i>Conduct fusion, merger, separation, dissolution of company and reconstruction (Corporate Actions).</i> 4) <i>Submitting a Bankruptcy application or request for a Delay of Debt Payment Obligations (DDPO) for WIKA RK to the authorized agency.</i> 5) <i>Making changes in legal form.</i> 6) <i>Providing guarantees or loans to subsidiaries, except those that have been carried out.</i> 7) <i>Make changes to the composition of shareholders which resulted in the Company no longer being the majority shareholder of WIKA RK.</i> 8) <i>Receiving additional credit facilities from other banks / financial institutions or issuing bonds, except in the event that after receiving additional credit facilities or issuing bonds, the financial ratio shall meet $CR \geq 100\%$ financial covenant, $DER \leq 300\%$ and $DSC \geq 100\%$ then WIKA RK simply notifies in writings to BNI.</i>

Pada tanggal 31 Desember 2018, WIKA RK telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

As of December 31, 2018, WIKA RK is compliance with the terms and conditions of the loans.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp21.500.000 dan Rp25.000.000.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp21,500,000 and Rp25,000,000, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp3.500.000 dan nihil.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp3,500,000 and nil, respectively.

Indonesia Eximbank

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank No. 118 tertanggal 29 Desember 2011, dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., di Jakarta Utara, sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank No. SE.01.01/WRK.DIR.056/2018 tanggal 23 Februari 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Indonesia Eximbank

Based the Deed of Guarantee Facility Agreement No. Indonesia Eximbank. 118 dated December 29, 2011, was made in the presence of Sri Ismiyati, S.H., Notary in North Jakarta, as amended several times and recently by Letter of Guarantee Renewal Facility Agreement Indonesia Eximbank No. SE.01.01/WRK.DIR.056/2018 dated February 23, 2018 with terms and conditions as follows:

Fasilitas kredit : Jaminan Indonesia Eximbank
Plafon : Rp125.000.000.
Jangka waktu : 1 (satu) tahun, periode tanggal 24 Maret 2018 - 24 Maret 2019

*The credit : Indonesia Eximbank guarantees facility
Ceiling : Rp125,000,000.
Duration : 1 (one) year period from March 24, 2018 until March 24, 2019*

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Tujuan penggunaan:

Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan untuk proyek-proyek infrastruktur berorientasi ekspor dan Penunjang Ekspor

Purpose used:

Guarantee offer, Performance Security, Advance Payment Security and Insurance for infrastructure projects and export oriented Support for Exports

Imbal Jasa:	a	0,65% per tahun per penerbitan untuk Jaminan Penawaran dan Jaminan Pemeliharaan
	b	0,80% per tahun per penerbitan untuk Jaminan Pelaksanaan
	c	1,00% per tahun per penerbitan untuk Jaminan Uang Muka
Biaya administrasi	:	Rp250 per penerbitan
Denda	:	2% per tahun

Return on Services:	a	0.65% per year per publication for Guarantee Offer and Maintenance Guarantee
	b	0.80% per year per publication for Performance Security
	c	1.00% per year per publication for the Advance Payment Security
Administrative Expenses	:	Rp250 per publishing
Pinalty	:	2% per year

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1 tertanggal 10 Agustus 2012, dibuat di hadapan Yunita Permatasari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana diperpanjang berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Pemberian Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank No. SE.01.01/WRK.DIR.056/2018 tanggal 23 Februari 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Based on the Deed No. Working Capital Credit Agreement. 1 dated August 10, 2012, made before Yunita Permatasari, S.H., Notary in South Jakarta, as amended by Letter of Renewal Guarantee Facility Agreement Indonesia Eximbank. No. SE. 01.01/WRK.DIR.056/2018 dated February 23, 2018 with terms and conditions as follows:

i. Kredit Modal Kerja Ekspor I (Eksisting, Perpanjangan)

Fasilitas Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Sifat Kredit	:	Revolving
Plafon	:	Rp10.000.000.
Jangka waktu	:	1 (satu) tahun, periode tanggal 24 Maret 2018 - 24 Maret 2019
Tujuan Penggunaan	:	Modal kerja usaha jasa konstruksi, Mekanikal Elektrikal, Industri Pabrikasi dan Operasional dan Maintenance
Bunga	:	10% per tahun
Provisi	:	0,50% per tahun dari limit kredit, dibayar dimuka

i. Export Working Capital Loan I (Existing, Extension)

The credit facility	:	Working Capital Loan
Credit Properties	:	Revolving
Ceiling	:	Rp10,000,000.
Duration	:	1 (one) year period from March 24, 2018 until March 24, 2019
The Purpose Use	:	Working Capital Construction services, Electrical Mechanical, Industrial Manufacturing and Operations & Maintenance
Interest rate	:	10% per year
Provision	:	0.50% per year from limit, prepaid expense

ii. Kredit Modal Kerja Ekspor II

Fasilitas Kredit	:	Kredit Modal Kerja Ekspor
Sifat Kredit	:	Transaksional
Plafon	:	Rp40.000.000.

ii. Export Working Capital Loan II

The credit facility	:	Export Working Capital Loan
Credit Properties	:	Transactional
Ceiling	:	Rp40,000,000.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Jangka waktu : 1 (satu) tahun,
periode tanggal 24
Maret 2018 s/d 24
Maret 2019

Tujuan Penggunaan : Modal kerja usaha
jasa konstruksi,
Mekanikal Elektrikal,
Industri Pabrikasi dan
Operasional
Maintenance yang
dapat digunakan
secara bersama-
sama untuk: - Kredit
Modal Kerja Ekspor II
Transaksional -
Penerbitan LC
dan/atau SKBDN

Bunga : 10%per tahun
Provisi : 0,50% per tahun dari
limit kredit, dibayar
dimuka

Duration : 1 (one) year period from
March 24, 2018 until
March 24, 2019

The Purpose Use : Working Capital
Construction services,
Electrical Mechanical,
Industrial Manufacturing
and Operations &
Maintenance which can
used be together to: -
Export Working Capital
Loan II Transactional -
Publishing LC or/and
SKBDN

Interest rate : 10% per year
Provision : 0.50% per year from limit,
prepaid expense

Jaminan atas Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank sebagaimana dalam Akta. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank No. 118 tertanggal 29 Desember 2011, dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta Utara, dan Jaminan atas Fasilitas Kredit Modal Kerja sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 1 tertanggal 10 Agustus 2012, dibuat di hadapan Yunita Permatasari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diubah berdasarkan Surat Persetujuan Perpanjangan Pemberian Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank No. SE.01.01/WRK.DIR.056/2018 tanggal 23 Februari 2018 adalah:

- Jaminan Fidusia atas seluruh piutang dagang yang saat ini sudah ada maupun yang akan ada kemudian sebesar Rp210.000.000.
- Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp2.000.000 atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan mess diatasnya yang terletak di Bantar Gebang - Bekasi, berdasarkan SHM No. 207 tanggal 07-02-1992 atas nama Suprpto, luas tanah 765 m2 dan SHM No. 235 dengan luas tanah sebesar 2.305 m2, luas bangunan 306 m2 terdaftar atas nama Suprpto.
- Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp1.500.000 atas 2 (dua) unit suites kantor yang terletak di Jl. MT. Haryono Kav.23 Gedung MTH Lantai 17 Suites 1706-1707 Strata Title PT Wijaya Karya Insan Pertiwi dengan SHM atas Satuan Rumah Susun No. 126/XV11706 dan 1271XV/1707 dengan luas bangunan 206 m².

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 3 tanggal 17 September 2012, dibuat di hadapan Yunita Permatasari, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

The collateral for Indonesia Eximbank's Facility Security Deed. The Deed of Guarantee for Indonesia Eximbank Facility Agreement No. 118 dated December 29, 2011, was made in the presence of Sri ismiyati, SH, Notary in North Jakarta, and Securing Working Capital Credit Facility as in Deed No. 1 Working Capital Credit Agreement dated August 10, 2012, made before Yunita Permatasari, S.H., Notary in South Jakarta, which has been modified by Renewal Approval Guarantee Facility Indonesia Eximbank. No. SE.01.01/WRK.DIR.056/2018 dated February 23, 2018 are:

- Guarantee Fiduciary of all accounts receivable that are currently existing or that will exist amounting to Rp210,000,000.*
- The Dependants Level II amounting to Rp2,000,000 of 1 (one) plot following the mess building there on located in Bantar Gebang Bekasi, based on SHM No. 207 dated 07-02-1992 register name Suprpto, land area of 765 sqm and SHM No. 235 with land area 2,305 sqm, building area of 306 sqm register name to Suprpto.*
- The Dependants Level II amounting to Rp1,500,000 of 2 (two) units of office suites located in Jl. MT. Haryono Kav.23 MTH Building floor 17 Suites 1706-1707 Strata Titles of PT Wijaya Karya Insan Pertiwi with SHM over the Unit Flats No. Broad 126/XV11706 and 1271XV/1707 with building area of 260 sqm.*

Under the Banking Act No. Facility Agreement 3 dated September 17, 2012, draw up before Yunita Permatasari, S.H., Notary in South Jakarta, the terms and conditions as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Fasilitas Kredit : Kredit Modal Kerja

The credit facility : Export Working Capital Loan

Plafon : Rp50.000.000.
Sub Fasilitas Kredit

*Ceiling : Rp50,000,000.
Sub Credit Facility*

Hal-hal yang dilarang:

Things that are prohibited:

- 1) Melakukan investasi atau perluasan usaha di luar bidang usaha menurut anggaran dasar Debitur.
- 2) Menjamin dan/ atau mengalihkan aset Debitur kepada pihak lain manapun juga terbatas pada aset yang telah dijaminkan kepada Kreditur.
- 3) Memberikan jaminan perusahaan atau *corporate guarantee* kepada pihak lain manapun yang digunakan untuk menjamin pinjaman Debitur atau menjamin pinjaman anak perusahaan Debitur atau afiliasi Debitur (jika ada).
- 4) Menjual atau pemindahtanganan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitur yang sudah diserahkan sebagai Jaminan kepada Kreditur selain dalam rangka kegiatan usaha Debitur.
- 5) Meminjamkan uang kepada siapapun juga termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya diluar kegiatan usahanya sehari-hari yang terdapat dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Perusahaan.
- 6) Bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan atas nama apapun juga dan/ atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain, sepanjang menurut pertimbangan Kreditur bahwa nilai Jaminan yang telah diserahkan oleh Debitur kepada Kreditur belum mencukupi.

- 1) *Investing or expanding business outside the business field according to the articles of association of the Debtor.*
- 2) *Guarantee and / or transfer of assets of the Debtor to any other party is also limited to assets that have been pledged to the Creditor.*
- 3) *Providing company guarantees or corporate guarantees to any other party used to guarantee a Debtor loan or guarantee a loan from a Debtor subsidiary or a Debtor affiliate (if any).*
- 4) *Selling or transferring in any way or releasing part or all of the Debtor's assets that have been pledged as collateral to the Creditor other than in the context of the Debtor's business activities.*
- 5) *Lending money to anyone also including but not limited to affiliated companies outside of their daily business activities contained in the Articles of Association/Company Budget.*
- 6) *Acting as guarantor or guarantor in any form and on behalf of any and / or pledging or collateralizing Debtor assets to other parties, as long as according to the creditor's consideration that the guarantee value that has been submitted by the debtor to the creditor is insufficient.*

Pada tanggal 31 Desember 2018, WIKA RK telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

As of December 31, 2018, WIKA RK is compliance with the terms and conditions of the loans.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp6.500.000 dan Rp10.000.000.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp6,500,000 and Rp10,000,000, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp3.500.000 dan nihil.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp3,500,000 and nil, respectively.

WIKA Gedung

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan persetujuan Perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja dan perpanjangan fasilitas *Non cash Loan* No. R.II.130-OPK/DKD/05/2018 tertanggal 18 Mei 2018 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan persyaratan kredit sebagai berikut:

a. Fasilitas Cash Loan

Plafon: Rp200.000.000.
Jangka 1 (satu) tahun, tanggal 14 Mei
Waktu: 2018 Waktu s/d 14 Mei 2019

WIKA Gedung

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Based on the approval of the Extension of Working Capital Credit facility and extension of Non cash loan facility No. R.II.130-OPK/DKD/05/2018 dated May 18, 2018 from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with the following credit terms:

a. Cash Loan Facility

Plafond: Rp200,000,000.
Time 1 (one) year period from May 14,
Period: 2018 until May 14, 2019

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Tingkat 10,0% per tahun
Bunga:
Jaminan: Jaminan Pokok:
- Piutang Proyek Puncak Dharmahusada Tower B dan C Merrc Surabaya dengan nilai Rp47.452.000.
- Piutang Proyek Pelindo III sebesar Rp466.965.000.
- Piutang Proyek Puncak CBD Surabaya Tower A, B dan Ruko dengan nilai sebesar Rp183.815.000.
- Piutang Proyek Puncak CBD Surabaya Tower C dengan nilai sebesar Rp261.775.000.
- Piutang Proyek Pelabuhan Benoa sebesar Rp77.935.000.
- Piutang Proyek Rumah Sakit Palembang sebesar Rp148.801.000.
- Piutang proyek yang telah dan atau yang akan dibiayai oleh BRI dengan total nilai minimum 120% dari *outstanding*.

Interest: 10.0% per year

Warranty: Principal Warranty:
- Account receivables on Project of Puncak Dharmahusada Tower B and C Merrc Surabaya amounting Rp47,452,000.
- Account receivables on Project of Pelindo III amounted to Rp466,965,000.
- Account receivables on Project of Puncak CBD Surabaya Tower A, B and Shop House amounting Rp183,815,000.
- Account receivables on Project of Puncak CBD Surabaya Tower C amounting Rp261,775,000.
- Account receivables on Project of Pelabuhan Benoa amounted to Rp77,935,000.
- Account receivables on Project of Rumah Sakit Palembang amounted to Rp148,801,000.
- Project receivables that have been or will be funded by BRI with a total minimum value of 120% of *outstanding*.

b. Fasilitas *Non Cash Loan*
Limit Rp750.000.000.
Kredit:
Jangka 1 (satu) tahun, tanggal 14 Mei
Waktu: 2018 Waktu s/d 14 Mei 2019
Tujuan: Bank Garansi, LC/SKBDN dan *Comercial Line* Penggunaan (*Forfaiting*)
Agunan: Agunan terkait fasilitas KMK Konstruksi.

b. *Non Cash Loan Facility*
Credit Rp750,000,000.
Limit:
Time 1 (one) year period from May 14,
Period: 2018 until May 14, 2019
Purpose Bank Guarantee, LC/SKBDN and
of use: Commercial Line (*Forfaiting*)
Collateral: Collateral Credit facility is KMK Construction

Selama masa pembiayaan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan terkait perjanjian yaitu mengajukan permohonan pailit debitur kepada pengadilan niaga dan mengadakan transaksi dengan pihak yang berafiliasi maupun pihak ketiga diluar aspek kewajaran.

Matters that should not be done related to the agreements are applying for a declaration of bankruptcy of the debtor to the Commercial Court and enter into transactions with affiliated parties and third parties outside the aspect of fairness.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp122.619.267.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil and Rp122,619,267, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp122.619.267 dan Rp76.699.004.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp122,619,267 and Rp76,699,004, respectively.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Berdasarkan perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. 108 tanggal 26 April 2018 dengan persyaratan sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Based on Transactional of Working Capital Capital Agreement No. 108 dated April 26, 2018 with the following conditions:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Plafon: Rp200.000.000.
Jangka Waktu: 30 Mei 2018 sampai dengan 29 Mei 2019
Tingkat Bunga: 9,50% per tahun
Jaminan: Segala harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang ada di kemudian hari. Dan Piutang termin proyek dan diikat secara Cessie.

Plafond: Rp200,000,000.
Time Period: May 30, 2018 until May 29, 2019

Interest: 9,50% per annum

Warranty: All the treasures of whether movable or immovable, either existing or in the future. And instalment receivables projects in Connective is Cessie.

Berdasarkan perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional Nomor 109 tanggal 26 April 2018 dengan persyaratan sebagai berikut:

Based on the agreement of Working Capital Transaction Number 109 dated April 26, 2018 with the following conditions:

Plafon: Rp550.000.000.
Jangka Waktu: 30 Mei 2018 sampai dengan 29 Mei 2019
Tingkat Bunga: 10 % per tahun
Jaminan: Segala harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang ada di kemudian hari. Dan Piutang termin proyek dan diikat secara Cessie.

Plafond: Rp550,000,000.
Time Period: May 30, 2018 until May 29, 2019

Interest: 10% per year

Warranty: All the treasures of whether movable or immovable, either existing or in the future. And instalment receivables projects in Connective is Cessie.

Selama masa pembiayaan, WIKA Gedung wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut: *Current Ratio* minimal 1 kali, *Debt Equity Ratio* (DER) maksimal 4 kali dan *Debt Service Coverage* minimal 100%.

WIKA Gedung shall seek financial performance indicators as follows: *Current Ratio* of at least 1 time; *Debt to Equity Ratio* (DER) maximum of 4 times and *Debt Service Coverage* of at least 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2018, WIKA Gedung telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

As of December 31, 2018, WIKA Gedung is compliance with the terms and conditions of the loans.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp115.000.015.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil and Rp115,000,015, respectively.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Addendum perjanjian kredit Modal Kerja Nomor : CBG.LC2/SPPK.012/2018 tanggal 24 April 2018 dengan persyaratan sebagai berikut:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on Addendum Credit Working Capital agreement Number: CBG.LC2/SPPK.012/2018 dated April 24, 2018 terms and conditions:

- a. Fasilitas KMK *Revolving*
Limit Kredit: Rp5.000.000.
Jangka waktu: 11 Juni 2018 sampai dengan 10 Juni 2019
Tingkat Bunga: 9,95 % per tahun

- a. *Revolving Working Capital Facility*
Credit Limit: Rp5,000,000.
Time Period: June 11, 2018 until June 10, 2019
Interest Rate: 9,95% per annum

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- Jaminan:
- 2 (dua) unit *Tower Crane* telah diikat Fidusia dengan nilai pengikatan sebesar Rp3.340.000
 - Persediaan yang telah diikat Jaminan Fidusia sebesar Rp30.000.000.
 - Piutang/tagihan yang telah diikat Jaminan Fidusia sebesar Rp621.660.000.
 - Omset Kontrak Proyek

- Collateral:*
- Two (2) units of *Tower Crane* have been *Fiduciary tied* with binding value of Rp3,340,000.
 - *Inventories* that have been *Fiduciary tied* Rp30,000,000.
 - *Account Receivables / bills* that have been *Fiduciary tied* amounting to Rp621,660,000
 - *Turnover of the Project Contract*

b. Fasilitas KMK Transaksional
Limit Kredit: Rp95.000.000.

Jangka Waktu: 11 Juni 2018 sampai dengan 10 Juni 2019
Tingkat Bunga: 9,50% per tahun
Tujuan: Tambahan modal kerja.
Penggunaan: *Joint collateral dan cross default* dengan seluruh fasilitas kredit a.n WIKA Gedung Tbk di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

b. *Transactional of Working Capital Facility*
Credit Rp95,000,000.

Limit:
Time June 11, 2018 until June 10, 2019
Interest 9.50% per year
Rate:
Purpose: Additional working capital .

Collateral: *Joint collateral and cross default* with all credit facilities WIKA Gedung Tbk in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

c. Fasilitas Non Cash Loan
Limit Kredit: Rp600.000.000.

Jangka waktu: 11 Juni 2018 sampai dengan 10 Juni 2019
Tujuan: Bank Garansi, *Letter Of Credit (L/C)* dan penggunaan
Agunan: *Joint collateral dan cross default* dengan seluruh fasilitas kredit a.n WIKA Gedung Tbk di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

c. *Non Cash Loan Facility*
Credit Rp600,000,000.

Limit:
Time June 11, 2018 until June 10, 2019
Period:
Intended Bank Guarantee, *Letter Of Credit (L/C)*
Use:
Collateral: *Joint collateral and cross default* with all credit facilities of WIKA Gedung Tbk in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

d. *Supplier Financing*
Limit Kredit: Rp400.000.000.

Jangka Waktu: 11 Juni 2018 sampai dengan 10 Juni 2019
Tujuan: Pembiayaan *Supplier Financing* untuk Supplier/ Subkontraktor atas dasar Akseptasi *Invoice* secara *without recourse*.
Penggunaan:
Agunan : *Joint collateral dan cross default* dengan seluruh fasilitas kredit a.n WIKA Gedung Tbk di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

d. *Supplier Financing*
Credit Rp400,000,000.

Limit:
Time June 11, 2018 until June 10, 2019
Period:
Intended *Financing Supplier Financing* for Supplier / Sub. Contractor on the basis of acceptance of invoices without recourse.
Use:
Collateral: *Joint collateral and cross default* with all credit facilities WIKA Gedung Tbk in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Selama masa pembiayaan WIKA Gedung wajib menjaga rasio keuangan yaitu *current ratio* minimal sebesar 100%, *leverage* maksimal 500% dan EBITDA to I minimal sebesar 200%.

During the period of financing, WIKA Gedung is required to maintain the financial ratio of the current ratio of at least 100%, maximum leverage of 500% and EBITDA to I at least 200%.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas perubahan modal kerja dan penggantian pengurus.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp269.663.033.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp269.663.033 dan nihil.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

WIKA Gedung memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank CIMB Niaga Tbk sesuai dengan Perubahan ke-VII (ke tujuh) atas Perjanjian Kredit No. 19 Tanggal 10 Januari 2011. Addendum perjanjian tahun 2018 sampai pada saat terbit laporan masih dalam proses. Ketentuan perjanjian sebagai berikut:

a. Fasilitas <i>Cash Loan</i>	
Limit Kredit	Rp5.000.000.
Jangka Waktu:	14 Juli 2018 sampai dengan 14 Juli 2019
Tingkat Bunga:	9,25 % per tahun
Tujuan Penggunaan:	Modal Kerja
b. Fasilitas <i>Non Cash Loan</i>	
Limit Kredit:	Rp150.000.000.
Jangka Waktu:	1 (satu) tahun dari tanggal 14 Juli 2017
Tujuan:	Bank Garansi (BG), <i>Letter of Credit</i> (L/C) dan Penggunaan SKBDN

Selama masa pembiayaan WIKA Gedung wajib memberitahukan apabila melakukan perubahan anggaran dasar dan melaporkan peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan, harta kekayaan, jalannya usaha atau keuangan debitur.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp17.916.270.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

WIKA Gedung menerima fasilitas kredit dari Bank Muamalat dengan Surat persetujuan atas perubahan pada persyaratan terkait perpanjangan fasilitas pembiayaan *line facility* modal kerja dengan skema *Trade Finance* kepada Perusahaan

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Notify in writing to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk upon changes in working capital and change of management.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil and Rp269,663,033, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp269,663,033 and nil, respectively.

PT Bank CIMB Niaga Tbk

WIKA Gedung obtained a credit facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk in accordance with the Seventh Amendment (seventh) of Credit Agreement No. 19 Dated January 10, 2011. Addendum of agreement year 2018 still in process. Subject to the following conditions are as follows:

a. Cash Loan Facility	
Credit Limit:	Rp5,000,000.
Time Period:	July 14, 2018 to July 14, 2019
Interest Rate:	9,25 % per year
Intended Use:	Working capital
b. Non Cash Loan Facility	
Credit Limit:	Rp150,000,000.
Time Period:	1 (one) year from July 14, 2017 to July
Intended Use:	Bank Guarantee (BG), Letter of Credit (L/C) and SKBDN

During the financing period, WIKA Gedung is obliged to notify if there are amendments in the articles of association and report the events or circumstances that may affect the circumstances, assets, business operations or financials of the debtor.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil and Rp17,916,270, respectively.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

WIKA Gedung received credit facilities from Bank Muamalat with a letter of approval to the amendment to the terms of the extension of the working line financing facility under Trade Finance scheme to the Company No. 047/OL/BMI/EMB/VIII/16 dated August

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

No. 047/OL/BMI/EMB/VIII/16 tanggal 23 Agustus 2016. Addendum perjanjian tahun 2018 sampai pada saat terbit laporan masih dalam proses. Ketentuan perjanjian sebagai berikut:

23, 2016. Addendum of agreement year 2018 still in process. Subject to the following conditions are as follows:

Limit Kredit: Rp200.000.000.
Jangka Waktu: 18 Bulan, sejak 23 Agustus 2016
Tujuan: Bank Garansi, SKBDN, fasilitas modal kerja, Talangan atas piutang Nasabah kepada *bowheer* dan fasilitas anjak utang
Penggunaan: Porsi Nisbah: Nisbah ditentukan kemudian pada saat pengikatan, sesuai kondisi *cost of fund* Bank Muamalat Indonesia
Porsi Syirkah: Syirkah ditentukan kemudian pada saat pencairan, yang dihitung dari rasio antara nilai yang di Musyarakah kan sebagai porsi Bank Muamalat, dengan harga pokok penjualan perusahaan pada bulan saat SKBDN/LC/BG terkait Musyarakah diterbitkan sebagai porsi nasabah
Biaya Administrasi: 1. Biaya *issuance* SKBDN sebesar setara 0.25% p.a dari nominal *issuance* SKBDN
2. Biaya *issuance* Bank Garansi sebesar setara 0.4% p.a dari nominal *issuance* Bank Garansi
3. Biaya *issuance Cash Facility* Modal Kerja sebesar 0.5% dari plafond fasilitas
Jaminan: Tagihan piutang dengan nilai fiducia sebesar 125% dari total Plafon, surat kuasa dari nasabah yang mengizinkan bank untuk mendebet rekening nasabah di bank dan perbaruan *letter of comfort* dan juga deposito senilai Rp10.000.000.

Credit Limit Rp200,000,000.
Time Period: 18 Months, starting from August 23, 2016
Intended Use: Bank Guarantee, SKBDN, bailouts receivables Customer to *bowheer* and debt factoring facility
Nisbah: The ratio is determined later at the time of binding, according to the condition of the cost of funds of Bank Muamalat Indonesia
Shirkah: Shirkah is determined at the time of disbursement, calculated from the ratio between the value in Musharaka as the portion of Bank Muamalat, to the cost of the company's sales in the month when the related SKBDN/LC/BG is issued as a portion of the customer
Provision: 1. The cost of the SKBDN *issuance* is equal to 0.25% p.a of the nominal *issuance* of the SKBDN
2. *Issuance fee* of Bank Guarantee equal to 0.4% p.a of nominal *issuance* of Bank Guarantee
3. *Issuance Cash Facility Cost* of Working Capital is 0.5% of the facility's ceiling
Collateral: Fiduciary account receivable with a value of 125% of the total ceiling, a letter of authorization from the customer that allows the bank to debit the customer's account at the bank and updates the letter of comfort and also the deposits amount Rp10,000,000.

Selama masa pembiayaan WIKA Gedung wajib memberitahukan secara tertulis apabila melakukan perubahan anggaran dasar WIKA Gedung dan menarik kembali modal disetor.

During the financing period, WIKA Gedung is required to notify in writing when making changes to WIKA Gedung's articles of association and withdraw all of paid up capital.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 amounted to nil, respectively.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

WIKA Gedung menerima fasilitas kredit dari Bank Maybank Indonesia Tbk dengan Perpanjangan Perjanjian Kredit (Badan Usaha) No.S.2018.026/Dir Global – Public Sector & Energy tanggal 12 April 2018 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

WIKA Gedung received credit facilities from Bank Maybank Indonesia Tbk with Extension of Credit Agreement (Business Entity) No.S.2018.026/Dir Global – Public Sector & Energy dated April 12, 2018 with terms and conditions as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

- a. *Non Cash Loan* sebesar Rp200.000.000 dipakai bersama fasilitas L/C, SKBDN dan Bank Garansi.
- b. Fasilitas berlaku dari 12 April 2018 sampai dengan 12 April 2019.
- c. Jaminan berupa Piutang usaha, 10% margin deposit setiap penerbitan LC/SKBDN, BG dan deposito senilai Rp10.000.000.

Selama masa pembiayaan WIKA Gedung wajib memberitahukan secara tertulis apabila melakukan perubahan pemegang saham, menarik modal disetor dan melakukan penggabungan atau akuisisi perusahaan, menyerahkan seluruh laporan kejadian yang mempengaruhi pembayaran debitur.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp10.447.251.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp10.447.251 dan nihil.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Berdasarkan Addendum perjanjian kredit No. 231/JKC/COM/CSMU/IV/2018 tanggal 25 April 2018, WIKA Gedung menerima fasilitas kredit *Non Cash Loan* dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Fasilitas *Non Cash Loan*

Limit Kredit	Rp500.000.000.000
Jangka Waktu	sampai dengan 12 Desember 2019
Tujuan Penggunaan	Bank Garansi (<i>Bid bond</i> , <i>Advance Payment Bond</i> , <i>Performance Bond</i> dan <i>Maintenance Bond</i>)
Agunan	Cessie atas tagihan/ piutang usaha Cash Collateral/ minimal dana tersedia pada Bank BTN

Selama masa pembiayaan WIKA Gedung wajib memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atas perubahan modal kerja dan penggantian pengurus.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil.

- a. *Non Cash Loan* amounting to Rp200,000,000 is used with L/C, SKBDN and Bank Guarantee facilities.
- b. Facility is valid from April 12, 2018 until April 12, 2019.
- c. Guarantee in the form of Accounts Receivable, 10% margin deposit every issuance of LC/SKBDN, BG and deposits worth Rp10,000,000.

During the financing period, WIKA Gedung is obligated to notify in writing if the shareholder changes, withdraws the paid up capital and mergers or acquires a company, submits all incident reports affecting the debtor's payment.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil and Rp10,447,251, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp10,447,251 and nil, respectively.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Based on Addendum credit agreement No. 231/JKC/COM/CSMU/IV/2018 dated April 25, 2018, WIKA Gedung received Non-Cash Loan credit facility from PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk with terms and conditions as follows:

- a. Cash Non Loan Facility

Credit Limit	Rp500,000,000,000
Time Period	until December 12, 2019
Intended Use	Bank Guarantee (<i>Bid bond</i>), <i>Advance Payment Bond</i> , <i>Performance Bond</i> and <i>Maintenance Bond</i>
Collateral	Cessie on Accounts Receivables Cash Collateral/ minimum fund available in Bank BTN

During the financing period, WIKA Gedung is obliged to notify PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in writing on the change of working capital and the replacement of the management.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil, respectively.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. B 102 S-CBD/0518 tanggal 11 Mei 2018, WIKA Gedung menerima fasilitas kredit *Non Cash Loan* dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Fasilitas *Non Cash Loan*
Limit Kredit Ro100.000.000
Jangka sampai dengan 22 April 2019
Waktu
Tujuan Untuk kebutuhan modal kerja
Penggunaan perusahaan melalui pembiayaan
 terhadap supplier dari obligor
Agunan Cessie atas tagihan/ piutang
 usaha
 Rasio kecukupan nilai jaminan
 setiap saat harus bernilai 125%
 dari jumlah fasilitas terhutang
 pada bank

Selama masa pembiayaan WIKA Gedung wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank atas perubahan modal kerja dan penggantian pengurus.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Based on credit agreement No. B 102 S-CBD/0518 dated May 11, 2018, WIKA Gedung received *Non-Cash Loan credit facility* from PT Bank Danamon Indonesia Tbk with terms and conditions as follows:

- a. Cash Non Loan Facility
Credit Limit Rp100,000,000
Time until April 22, 2019
Period
Intended For the company's working
Use capital needs through financing
 the obligor supplier
Collateral Cessie on Accounts Receivables
 The adequacy ratio of the
 collateral value must be worth
 125% of the total facility owed to
 the bank at any time

During the financing period, WIKA Gedung is obliged to notify Bank in writing to the change of working capital and the replacement of the management.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil, respectively.

25. Utang Usaha

25. Trade Payables

	2018 Rp	2017 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 50)/ Related Parties (Note 50)	176,597,892	139,182,504
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Master Steel Manufactory	493,031,576	96,565,579
PT Jakarta Cakra Tunggal Steel Mills	140,371,741	23,755,914
PT Inti Roda Makmur	124,698,912	68,755,598
PT SCG Ready Mix Indonesia	89,536,073	19,019,008
PT Adhimix Precast Indonesia	82,689,228	52,574,254
PT Hanil Jaya Steel	82,487,493	15,236,432
PT Mitra Karya Makmur	78,749,091	--
PT Samjin Elex	76,827,368	--
PT Varia Usaha Beton	74,092,411	29,291,564
Santilestari Graha Aksimeka	60,662,442	--
PT Kingdom Indah	58,914,104	83,753,960
PT Sumiden Serasi	51,837,417	46,763,290
PT Hanwa	46,625,935	--
PT Interworld Steel Mills Indonesia	46,334,527	22,480,951
PT Balikpapan Ready Mix	45,986,475	27,362,937
PT Focon Indobeton	44,135,287	37,972,399
PT Lancarjaya Mandiri Abadi	42,521,575	--

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018 Rp	2017 Rp
PT Arsimekon	41,463,915	--
PT Asta Rekayasa Unggul	39,288,151	25,499,007
PT Sido Bangun Utama	37,928,000	37,928,000
PT Indonesia Pondasi Raya	36,541,567	26,019,647
CV Delta Mas	36,261,644	55,303,698
PT Holcim Beton	35,894,534	24,531,987
PT Citra Baru Steel	31,790,918	--
PT Schneider Indonesia	31,648,050	--
PT Adhimix RMC Indonesia	31,463,581	--
CV Wira Wiri Perkasa	31,148,259	13,447,133
PT Sinar Indah Perkasa	29,840,408	19,377,477
PT Wira Karya Baru	26,481,699	--
PT Berdikari Pondasi Perkasa	25,816,239	--
PT Matiere SAS	25,419,103	--
PT Bollore Logistic Indonesia	24,891,681	--
PT Maruni Daya	24,538,289	--
PT Pioneer Beton Industri	24,312,647	--
PT Sinar Indah Jaya kencana	23,896,135	46,496,202
CV Cipta Prestasi	23,582,626	13,369,736
PT Bumi Steel	23,372,760	--
PT Swadaya Graha	23,276,879	--
PT Redja Abadi	23,237,267	10,736,272
Daeati Ltd.	22,646,757	--
PT Multi Bangun Sejahtera	22,236,152	--
PT Krakatau Wosm	21,292,670	22,644,313
PT Megah Kreasi Makmur	21,223,594	--
PT Panca Duta Prakarsa	21,135,111	19,947,251
PT Berkat Manunggal Energi	21,100,500	--
PT Baswara Sinar Mulia	21,043,662	15,105,342
PT Persada Nusantara Steel	17,294,474	24,236,936
PT Gunawan Dian Jaya Steel	16,094,088	69,090,082
PT Inti Sumber Baja Sakti	14,917,845	48,058,250
Falcon Foundry Company Ltd	6,570,983	23,065,307
PT Motive Mulia	6,027,228	28,796,915
PT Mills & Mines International	5,373,606	21,196,869
PT Steel Pipe Industries	3,050,244	55,328,492
PT Madya Mangunkarsa	--	34,026,266
PT Komponindo Betonjaya	--	33,917,195
Kawasaki Trading Co., Ltd	--	33,698,193
PT Sumber Sinar	--	24,035,217
MTU Maintenance Berlin Bradenburg GmbH Ltd	--	23,913,486
PT Gaya Makmur Traktor	--	23,476,438
KHI Pipe Industries	--	22,732,901
PT Urika Teknik	--	22,079,707
Lain-lain/ Others (Masing-masing dibawah Rp20.000.000/ Each below Rp20,000,000)	10,495,173,017	7,444,213,653
Sub Total	13,006,775,938	8,785,803,858
Total	13,183,373,830	8,924,986,362

Pada saldo utang usaha- lain-lain terdapat utang kredit mitra yang merupakan utang usaha yang sudah dibayarkan oleh beberapa bank dan akan jatuh tempo pembayaran sampai dengan 120 hari dan tidak dikenakan bunga.

The balance of trade payable - others includes credit mitra payable that represent trade payables already paid by several banks and the payment will be due until 120 days and no interest.

26. Utang Lain-lain

26. Other Payables

	2018 Rp	2017 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 50)	--	16,879,560	Related Parties (Note 50)
Pihak Ketiga			Third Parties
Utang Pengurusan Dokumen	565,291,486	55,187,631	Handling Document Payables
Koperasi Karyawan WIKA	--	52,483,013	Koperasi Karyawan WIKA
PT Cyberindo Persada Nusantara	--	43,492,955	PT Cyberindo Persada Nusantara
Ir. H. Bambang Purwanto	--	29,369,209	Ir. H. Bambang Purwanto
PT Balai Pustaka (Persero)	--	20,000,000	PT Balai Pustaka (Persero)
Properti I	--	18,989,353	Properti I
PT Graha Blessing Family- Manado	--	13,693,487	PT Graha Blessing Family- Manado
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10.000.000)	171,846,065	123,254,229	Others (each below Rp10,000,000)
Sub Total	737,137,551	356,469,877	Sub Total
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	(29,816,535)	(248,574,924)	Less Short Term Portion
Bagian Jangka Panjang -Pihak Ketiga	707,321,016	107,894,953	Long Term Portion - Third Parties

Utang lain-lain merupakan titipan biaya pembuatan akta jual beli, sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama pembeli untuk unit-unit, titipan uang tanda jadi yang nantinya apabila sudah menentukan unit akan dialihkan ke uang muka dan utang kepada pihak ketiga.

Other payable represents the cost of making deed of sale and purchase, certificate Hak Guna Bangunan on behalf of buyers for these units, money deposit that later will be transferred to advance payment when the unit is already determined and payables to other third parties.

27. Perpajakan

27. Taxation

a. Pajak dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2018 Rp	2017 Rp	
Pajak Penghasilan			Income Taxes
Pasal 22	24,253,603	24,063,394	Article 22
Pasal 23	60,356,931	23,098,046	Article 23
Pasal 24	35,989,744	21,903,332	Article 24
Pasal 25	3,948,674	17,181,750	Article 25
Final	141,792,062	77,330,669	Final
Pajak Pertambahan Nilai	1,349,363,018	1,134,694,531	Value Added Tax
Total	1,615,704,032	1,298,271,722	Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	2018 Rp	2017 Rp	
Pajak Penghasilan			Income Taxes
Pasal 4 (2)	111,548,157	160,919,537	Article 4 (2)
Pasal 21	33,994,328	22,284,621	Article 21
Pasal 22	29,965,811	11,005,099	Article 22
Pasal 23	--	11,201,114	Article 23
Pasal 26	1,298,240	616,321	Article 26
Pasal 29			Article 29
Tahun 2018	68,348,529	--	Year 2018
Tahun 2017	--	54,630,002	Year 2017
Pajak Pertambahan Nilai	169,915,067	167,850,494	Value Added Tax
Utang Pajak Luar Negeri	52,418,316	13,124,691	Foreign Tax Payable
Total	467,488,448	441,631,879	Total

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

c. Income Tax Benefit (Expense)

	2018 Rp	2017 Rp	
Perusahaan			The Company
Pajak Kini	(49,979,650)	(16,290,721)	Current Tax
Entitas Anak			Subsidiaries
Pajak Kini	(152,801,122)	(97,476,526)	Current Tax
Pajak Tangguhan	(82,548,298)	7,491,378	Deferred Tax
Total	(285,329,070)	(106,275,869)	Total

WIK A Beton

Pada tahun 2017, WIK A Beton menerima pengembalian atas kelebihan Pajak Penghasilan Badan tahun 2015 sebesar Rp48.826.965.739 (nilai penuh). Kantor Pelayanan Pajak juga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Pajak PPh pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa Pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2015 sebesar Rp19.123.199.844 (nilai penuh) dan telah menerima pembayaran pada bulan Agustus 2017.

WIK A Beton

In 2017, WIK A Beton received tax refunds for corporate income tax of 2015 overpayment amounting to Rp48,826,965,739 (full amount). The Office of the Tax Service of the Large Taxpayer Four also issued 17 Tax Assessment Letters on Tax Income Tax Article 21, Article 22, Article 23, Article 4 (2) and Value Added Tax (VAT) for the Tax Period from January to December 2015 Rp19,123,199,844 (full amount) and payment has been received in August 2017.

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laba fiskal untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between profit before income tax expense presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and fiscal income for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

	2018 Rp	2017 Rp	
Laba sebelum Pajak	2,358,628,934	1,462,391,358	Profit before Tax
Dikurangi			Less
Laba Entitas Anak sebelum			Profit of Subsidiaries before
Pajak Penghasilan	(1,534,416,671)	(877,704,361)	Income Tax
Eliminasi	161,521,150	389,565,892	Elimination
Laba sebelum Pajak -			Income before Tax -
Perusahaan	<u>985,733,413</u>	<u>974,252,889</u>	the Company
Perbedaan Tetap			Permanent Differences
Bagian Laba Entitas Ventura			Share in Profit of Joint
Bersama	(445,239,466)	(513,979,480)	Venturer
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	141,713,371	123,564,726	Loss from Associated Entity
Laba atas Penghasilan yang			Revenue already Subjected
Dikenakan Pajak Final	(482,288,718)	(518,675,251)	to Final Tax
Total Perbedaan Tetap	<u>(785,814,813)</u>	<u>(909,090,005)</u>	Total Permanent Differences
Laba Kena Pajak Perusahaan	199,918,600	65,162,884	Taxable Income of
			the Company
Taksiran Penghasilan Kena			Estimated Taxable Income
Pajak (Dibulatkan)	<u>199,918,600</u>	<u>65,162,884</u>	(Rounded)
Beban Pajak Kini			Current Tax Expense
Tarif 25%	<u><u>49,979,650</u></u>	<u><u>16,290,721</u></u>	Rates 25%

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar pengisian SPT PPh Badan.

Taxable income results of reconciliation became the basis for Corporate Income Tax Return.

d. Pajak Tangguhan

Pajak Tangguhan dihitung berdasarkan beda waktu antara nilai tercatat dari total aset dan liabilitas yang dicatat berdasarkan laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas. Rincian aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

d. Deferred Tax

Deferred tax is calculated based on temporary differences between the carrying value of the total assets and liabilities are recorded based on the financial statements and the tax bases of assets and liabilities. Details of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:

	2016	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba (Rugi)/ Credited (Charged) to Statement of Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	2017	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba (Rugi)/ Credited (Charged) to Statement of Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (Charged) to Other Comprehensive Income	2018	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aset Pajak Tangguhan								Deferred Tax Assets
Perusahaan	2,200,000	(2,200,000)	--	--	--	--	--	The Company
Entitas Anak								Subsidiaries
Wika Ikon	13,570,471	3,103,604	--	16,674,075	8,258,505	(1,705,321)	23,227,259	Wika Ikon
Wika Bitumen	2,458,547	3,877,316	--	6,335,863	543,919	(1,753,909)	5,125,873	Wika Bitumen
Wika Beton	--	--	--	--	1,312,528	--	1,312,528	Wika Beton
Wika Realty	--	2,371,348	236,802	2,608,150	598,491	(1,482,887)	1,723,754	Wika Realty
Wika Gedung	--	81,715	--	81,715	(33,834)	--	47,881	Wika Gedung
Total	18,229,018	7,233,983	236,802	25,699,803	10,679,609	(4,942,117)	31,437,295	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan								Deferred Tax Liabilities
Entitas Anak								Subsidiaries
Wika Realty	(17,796,610)	(15,344,993)	--	(33,141,603)	(95,483,265)	--	(128,624,868)	Wika Realty
Wika Beton	(28,351,111)	15,602,388	--	(12,748,723)	2,255,358	(1,108,067)	(11,601,432)	Wika Beton
Total	(46,147,721)	257,395	--	(45,890,326)	(93,227,907)	(1,108,067)	(140,226,300)	Total

28. Uang Muka Dari Pelanggan

28. Advances Received From Customers

	2018 Rp	2017 Rp
WIK A Beton	555,711,077	222,928,812
WIK A Realty	539,811,554	814,055,471
WIK A Ikon	100,960,937	18,955,594
Wika Rekayasa	34,197,562	--
WIK A Bitumen	3,095,209	--
WIK A Gedung	--	386,247,824
Total	1,233,776,339	1,442,187,701

Uang muka WIK A Realty merupakan uang muka atas penjualan real estate dan jasa konstruksi yang diterima dari konsumen dan pemberi kerja, namun belum memenuhi syarat pengakuan penjualan.

Advances of WIK A Realty represent advances from sale of real estate and construction services received from customers and employers, but not yet qualified to be recognized as sales.

Uang muka WIK A Gedung, WIK A Beton dan WIK A Ikon merupakan uang muka yang diterima dari pembeli berdasarkan kontrak dan akan dikurangi secara periodik dengan tagihan progres.

Advances of WIK A Gedung, WIK A Beton and WIK A Ikon represent advances from customers based on contract and will be deducted on a periodic basis with progress billing.

29. Beban Akrua

29. Accrued Expenses

	2018 Rp	2017 Rp	
Biaya Produksi	4,861,859,128	5,816,077,019	Production Expenses
Biaya Distribusi	1,421,990,843	779,853,053	Distribution Expenses
Biaya Usaha	1,235,966,645	541,723,306	Operating Expenses
Cadangan Pajak Penghasilan Final	497,223,585	245,911,325	Final Income Tax Accrued
Biaya Pengadaan	81,291,564	22,520,152	Logistic Expenses
Biaya Pengelolaan	74,055,174	62,940,557	Management Expenses
Biaya Pemeliharaan	73,384,710	50,264,969	Maintenance Expenses
Lain-lain	388,327,843	286,672,155	Others
Total	8,634,099,492	7,805,962,536	Total

Biaya produksi yang masih harus dibayar merupakan biaya yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga maupun tenaga kerja proyek sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Accrued production expenses represents amount outstanding from third parties or project workers regarding to the field work.

Biaya distribusi yang masih harus dibayar merupakan biaya atas distribusi produk WIKA Beton dan produk WIKA Ikon.

Accrued distribution expenses represent costs for the product distribution of WIKA Beton and WIKA Ikon.

Biaya usaha yang masih harus dibayar merupakan liabilitas yang belum ditagihkan oleh pihak ketiga sehubungan dengan aktivitas umum dan administrasi Grup.

Accrued operating expenses represent obligation which were not yet billed from third party referring to the Group's public activity and administration.

30. Pendapatan Yang Diterima di Muka

30. Unearned Revenues

	2018 Rp	2017 Rp	
Beton dan Beton Pracetak	188,646,631	171,661,598	Concrete and Precast Concrete
Jasa Properti	4,497,321	3,713,275	Property Services
Jasa Konstruksi	3,709,972	13,348,094	Construction Services
Aspal	133,088	133,088	Asphalt
Total	196,987,012	188,856,055	Total

Beton dan beton pracetak merupakan kewajiban prestasi dari WIKA Beton.

Concrete and precast concrete is performance liabilities from WIKA Beton.

Jasa properti merupakan kewajiban prestasi dari WIKA Realty.

Property service is performance liabilities from WIKA Realty.

Jasa konstruksi merupakan kewajiban prestasi dari WIKA Ikon dan Perusahaan.

Construction services is performance liabilities from WIKA Ikon and the Company.

Aspal merupakan kewajiban prestasi dari WIKA Bitumen.

Asphalt is performance liabilities from WIKA Bitumen.

31. Pinjaman Jangka Menengah

31. Medium Term Notes

	2018 Rp	2017 Rp	
Surat Utang Jangka Menengah	6,400,000,000	1,175,000,000	Medium Term Notes
Bagian Jangka Pendek yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(250,000,000)	(175,000,000)	Current Maturities of Medium Term Notes
	<u>6,150,000,000</u>	<u>1,000,000,000</u>	
Dikurangi:			Less:
Biaya Langsung yang Belum Diamortisasi	(65,377,488)	--	Unamortized Related Cost
Pinjaman Jangka Menengah Jangka Panjang	<u>6,084,622,512</u>	<u>1,000,000,000</u>	Long Term Portion of Medium Term Notes

Perusahaan

Pada tanggal 29 Januari 2018, Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah/Komodo Bonds (MTN) berdenominasi rupiah sebesar Rp5.400.000.000 yang akan jatuh tempo pada bulan Januari 2021. MTN ini dikenakan biaya bunga 7,7% per tahun, MTN ini tercatat di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) dan telah mengajukan permohonan ke London Stock Exchange agar MTN tersebut dicatat di London Stock Exchange's International Securities Market (the "ISM").

The Company

On January 29, 2018, The Company issued Medium Term Notes/Komodo Bonds (MTN) denominated in Rupiah amounting to Rp5,400,000,000 which will due in January 2021. The MTN bear interest at 7.7% per annum, MTN are listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) and has made an application to the London Stock Exchange for the MTN to be admitted to the London Stock Exchange's International Securities Market (the "ISM").

Bertindak selaku wali amanat adalah The Bank of New York Mellon dan Global Notes mendapat peringkat "Ba2" dari Moody's Investors Service ("Moody's") dan "BB" dari Fitch.

Acting as trustee for the Global Notes is The Bank of New York Mellon and are rated "Ba2" by Moody's Investors Service. Inc. ("Moody's") and "BB" by Fitch.

Surat Utang akan ditawarkan dan dijual oleh para pembeli awal tanpa didaftarkan berdasarkan U.S. Securities Act of 1933 dan tidak akan ditawarkan dan dijual dengan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

The Notes will be offered and sold by the Initial Purchasers without being registered under U.S. securities Act of 1993 and will not be offered and sold in a manner that would constitute a public offering under Indonesian Law No. 8 of 1995 on Capital Markets and its implementing regulations.

WIK Realty

Pada utang MTN III dan MTN VI tidak ada jaminan fidusia dari piutang penjualan (bersifat *clean base*), pada utang MTN IV Berkelanjutan Tahap I dan II dan MTN V ada jaminan fidusia dari piutang penjualan.

WIK Realty

MTN III and MTN VI have no fiduciary guarantee from sales of receivables (clean base) while MTN IV Berkelanjutan Tahap I and II and MTN V have fiduciary guarantee from sales receivables.

Pemakaian dana dari MTN ini diperuntukkan sebagai pemakaian modal kerja pembangunan kawasan realti.

MTN funds are working capital for the development of realty area.

Rincian dari MTN per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Details of MTN as of December 31, 2018 and 2017, are as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

2018				
Uraian / Description	Wali Amanat/ Trustee	Jatuh Tempo/ Maturity	Tingkat bunga/ Interest rate	Pokok/ Principal
MTN IV Berkelanjutan WIKA Realty Tahun 2016 Tahap I	Bank Mandiri	19 Mei/ May 2019	12.25%	150,000,000
MTN IV Berkelanjutan WIKA Realty Tahun 2016 Tahap II	Bank Mandiri	18 Mei/ May 2019	12.25%	100,000,000
MTN V WIKA Realty Tahun 2017	Bank Mandiri	8 Nop/ Nov 2020	10.35%	250,000,000
MTN VI WIKA Realty Tahun 2017	Bank Mandiri	24 Okt/ Oct 2020	9.75%	500,000,000
				1,000,000,000

2017				
Uraian / Description	Wali Amanat/ Trustee	Jatuh Tempo/ Maturity	Tingkat bunga/ Interest rate	Pokok/ Principal
MTN III WIKA Realty Tahun 2015 Seri A	Bank Mandiri	7 Mei/ May 2018	11.5%	125,000,000
MTN III WIKA Realty Tahun 2015 Seri B	Bank Mandiri	7 Mei/ May 2018	11.5%	50,000,000
MTN IV Berkelanjutan WIKA Realty Tahun 2016 Tahap I	Bank Mandiri	19 Mei/ May 2019	12.25%	150,000,000
MTN IV Berkelanjutan WIKA Realty Tahun 2016 Tahap II	Bank Mandiri	18 Mei/ May 2019	12.25%	100,000,000
MTN V WIKA Realty Tahun 2017	Bank Mandiri	8 Nop/ Nov 2020	10.35%	250,000,000
MTN VI WIKA Realty Tahun 2017	Bank Mandiri	24 Okt/ Oct 2020	9.75%	500,000,000
				1,175,000,000

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan MTN sebagai berikut:

The parties involved in the issuance of MTN are as follows:

Keterangan/ Description	Wali Amanat/ Trustee	Pemeringkat/ Rating Company	Underwriter/ Underwriter	Notaris/ Notary
MTN III Wika Realty Tahun 2015 Seri A & B	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	PT Pefindo	PT Mandiri Securitas	Arry Soepratno, SH
MTN IV Berkelanjutan WR Tahun 2016 Tahap I	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	PT Pefindo	PT Mandiri Securitas	Arry Soepratno, SH
MTN IV Berkelanjutan WR Tahun 2016 Tahap II	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	PT Pefindo	PT Mandiri Securitas	Arry Soepratno, SH
MTN V Wika Realty Tahun 2017	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	PT Pefindo	PT Danareksa Capital	Arry Soepratno, SH
MTN VI Wika Realty Tahun 2017	PT BRI (Persero) Tbk	PT Pefindo	PT Asta Kapital Asia	Arry Soepratno, SH

Pinjaman ini dijamin dengan:

1. Pada Utang MTN III tidak ada jaminan fidusia dari piutang penjualan (bersifat *Clean Basis*);
2. Pada Utang MTN IV Berkelanjutan Tahap I dan II ada jaminan fidusia dari piutang penjualan;
3. Pada Utang MTN V ada jaminan fidusia dari piutang penjualan; dan
4. Pada Utang MTN VI tidak ada jaminan fidusia dari piutang penjualan (bersifat *Clean Basis*).

Collateral for this loan:

1. On MTN III Loan there is no fiduciary guarantee from sales receivables (is *Clean Base*);
2. On MTN IV Loan there is fiduciary guarantee from sales receivables;
3. On MTN V Loan there is fiduciary guarantee from sales receivables; and
4. On MTN VI Loan there is no fiduciary guarantee from sales receivables (is *Clean Base*).

Pemakaian dana dari *Medium Term Notes* ini diperuntukkan sebagai pemakaian modal kerja pembangunan kawasan Realty.

Use of funds from the Medium Term Notes is intended as the use of working capital for the construction of the Realty area.

Pembatasan yang dipersyaratkan dalam kontrak penerbitan MTN sebagai berikut:

1. WIKA Realty tidak dapat menjamin pinjaman kepada pihak lain tanpa persetujuan bank;
2. WIKA Realty tidak dapat menjaminkan harta kekayaan kepada pihak ketiga kecuali 1) sudah dijaminkan sebelumnya, 2) jaminan sehubungan kegiatan sehari-hari, 3) harta kekayaan yang dijaminkan untuk refinancing tanpa persyaratan bank;

The restrictions required in the MTN issuance contract are as follows:

1. WIKA Realty can not guarantee loans to other parties without bank approval;
2. WIKA Realty can not pledge assets to a third party unless 1) has been previously pledged, 2) guarantee in respect of daily activities, 3) assets pledged for refinancing without bank requirements;

3. WIKA Realty tidak dapat memberikan *corporate guarantee* kecuali untuk kegiatan usaha dan anak perusahaan;
4. Melakukan penggabungan yang menyebabkan bubarnya Penerbit atau mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan melaksanakan kewajiban Penerbit;
5. Menjual aktiva tetap Penerbit lebih besar dari 10% dari total aktiva; dan
6. Mengubah bidang usaha utama Penerbit.

3. WIKA Realty can not provide corporate guarantee except for business activities and subsidiaries;
4. Merge which causes the Publisher to discharge or has a negative effect on the ability to perform the Issuer's obligations;
5. The issuer sells its fixed assets greater than 10% of the total assets; and
6. Changes main business of the Publisher.

32. Imbalan Pasca Kerja

32. Employee Benefit Liabilities

Program Pensiun Iuran Pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan lokal.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Wijaya Karya yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. S.408/MK.13/1988 tanggal 20 Mei 1988. Pendiri Dana Pensiun Wijaya Karya adalah Perusahaan.

Pendanaan Dana Pensiun Wijaya Karya terutama berasal dari kontribusi pemberi kerja dan karyawan. Kontribusi pemberi kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah Rp33.972.449 dan Rp28.521.207. Kontribusi karyawan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah Rp13.577.513 dan Rp11.418.678 (sesuai dengan kontribusi yang ditetapkan oleh dana pensiun).

Program Pensiun Imbalan Pasti

Grup menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan lokal. Program ini memberikan imbalan pensiun berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Wijaya Karya.

Pendanaan Dana Pensiun Wijaya Karya terutama berasal dari kontribusi pemberi kerja dan karyawan. Kontribusi karyawan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah Rp4.358.158 dan Rp4.309.497 (sesuai dengan skema kontribusi yang ditetapkan oleh dana pensiun).

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

Defined Contribution Pension Plan

The Group established defined contribution pension plan covering all the local permanent employees.

The pension plan is managed by Dana Pensiun Wijaya Karya, the deed of establishment of which was approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in his decision letter No. S.408/MK.13/1988 dated May 20, 1988. Dana Pensiun Wijaya Karya was established by the Company.

Dana Pensiun Wijaya Karya is funded by contributions from both employer and employee. Employers' contributions for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp33,972,449 and Rp28,521,207, respectively. Employees' contributions for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp13,577,513 and Rp11,418,678, respectively (based on the contribution scheme stated in pension plan).

Defined Benefit Pension Plan

The Group established defined benefit pension plan covering all the local permanent employees. This plan provides pension benefits based on years of service and salaries of the employees.

The pension plan is managed by Dana Pensiun Wijaya Karya.

Dana Pensiun Wijaya Karya is funded by contributions from both employer and employee. Employees' contributions for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp4,358,158 and Rp4,309,497, respectively (based on the contribution scheme stated in pension plan).

The defined benefit pension plan typically expose the Group to actuarial risks such as: investment risk, interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi pemerintah berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek ekuitas, deposito dan emas. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek ekuitas dan real estat untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Harapan Hidup

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Dian Artha Tama. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

	2018	2017	
Tingkat Diskonto	8.5% p.a.	7.7% p.a.	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Gaji	10% p.a.	10% p.a.	Salary Increment Rate
Tingkat Kematian	GAM-1971	GAM-1971	Mortality Rate
Tingkat Cacat	0.01% p.a.	0.01% p.a.	Disability Rate
Tingkat Pengunduran Diri	18-44 Tahun/Years : 1% p.a. 45-54 Tahun/Years : 0.05% p.a.	18-44 Tahun/Years : 1% p.a. 45-54 Tahun/Years : 0.05% p.a.	Resignation Rate
Tingkat Pensiun Normal	55, 56, 58 Tahun/Years	55, 56, 58 Tahun/Years	Normal Retirement Rate
Imbal Hasil Ekspektasian Aset Program	8.5% p.a.	8.5% p.a.	Expected Return on Plan Assets

Beban imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya yang diakui di laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

Investment Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality government bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently the plan has a relatively balanced investment in equity securities, time deposit and gold. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested in equity securities and in real estate to leverage the return generated by the fund

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability; however, this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments

Longevity Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants during their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan's liability.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

The cost of providing post-employment benefits is calculated by independent actuary, PT Dian Artha Tama. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

Amounts recognized in profit or loss and other comprehensive income in respect of the defined benefit pension plan and other long-term employee benefits are as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018 Rp	2017 Rp	
Biaya Jasa Kini	38,450,722	62,322,949	Current Service Cost
Beban Bunga	20,810,763	44,282,199	Net Interest Expense
Keuntungan Aktuaria	(54,530,305)	--	Actuarial Gain
Pembayaran Manfaat	(20,572,612)	(12,310,382)	Benefits Paid
Pengukuran Kembali Imbalan Jangka Panjang Lainnya	(10,194,452)	(10,817,958)	Remeasurement of Other Long-Term Employee Benefits
Total	(26,035,884)	83,476,808	Total

Liabilitas imbalan pasca kerja Grup sehubungan dengan program pensiun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The amounts included in the consolidated statements of financial position arising from the Group's obligation in respect of the defined benefits plan is as follows

	2018 Rp	2017 Rp	
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	336,635,920	508,965,093	Present Value of Employee Benefits Obligation
Nilai Wajar Aset Program	(157,927,851)	(171,792,891)	Fair Value of Plan Assets
Liabilitas pada Akhir Tahun	178,708,069	337,172,202	Liabilities at End of Year

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the employee benefits obligation were as follows:

	2018 Rp	2017 Rp	
Liabilitas Awal Tahun	508,965,093	379,760,438	Liability at Beginning of Year
Biaya Jasa Kini	38,450,722	62,322,949	Current Service Cost
Beban Bunga	20,810,763	44,282,199	Net Interest Expense
Keuntungan Aktuaria	(54,530,305)	--	Actuarial Gain
Pembayaran Manfaat	(20,572,612)	(12,310,382)	Benefits Paid
Pengukuran Kembali Imbalan Jangka Panjang Lainnya	(10,194,452)	(10,817,958)	Remeasurement of Other Long-Term Employee Benefits
Penilaian Kembali Kerugian Atas Liabilitas Imbalan Pasti	(146,293,289)	45,727,847	Remeasurement Losses on The Defined Benefits Obligation
Liabilitas pada Akhir Tahun	336,635,920	508,965,093	Liabilities at End of Year

Mutasi nilai wajar dari aset program adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value of the plan assets were as follows:

	2018 Rp	2017 Rp	
Saldo Nilai Wajar Aset Program Pada Awal Tahun	171,792,891	136,687,445	Balance of Fair Value of Plan Assets at Beginning of the Year
Pengukuran kembali Kerugian	--	(2,158,384)	Remeasurement Loss
Kontribusi	58,627,945	49,574,212	Contributions
Pembayaran Manfaat	(20,572,612)	(12,310,382)	Benefits Payment
Perubahan Pengaruh Aset	(51,920,373)	--	Change in Effect of Assets Ceiling
Saldo Akhir Tahun	157,927,851	171,792,891	Balance at End of Year

Aset program terdiri atas deposito di bank, investasi saham, emas, real estat, investasi obligasi, dan lain-lain.

The plan assets consisted of deposits in bank, shares, gold investment, real estate, debt investments, and others.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefits obligation are discount rate, expected salary increase and mortality. The sensitivity analyses below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

Analisa Sensitivitas

Sensitivitas dari liabilitas imbalan pasca-kerja terhadap perubahan asumsi aktuarial adalah sebagai berikut:

Sensitivity Analysis

The sensitivity of post-retirement obligations to changes in the weighted assumptions is as follows:

	Perubahan Asumsi/ Changes in Assumption	Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja/ Present Value of Benefit Obligation	Imbalan Jasa Kini/ Current Service Cost	Beban Bunga/ Interest Cost
Tingkat Diskonto/ Discount Rate	Kenaikan/Increase 1%	372,153,002	27,835,948	19,212,254
	Penurunan/Decrease 1%	374,943,188	30,036,754	19,212,254
Tingkat Kenaikan Gaji/ Salary Increase Rate	Kenaikan/Increase 1%	281,925,759	15,083,610	16,433,904
	Penurunan/Decrease 1%	281,393,874	12,674,637	16,433,904

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit is as follows:

	Dalam 1 Tahun/ Within 1 Years Rp	1 - 2 Tahun/ 1 - 2 Years Rp	2 - 5 Tahun/ 2 - 5 Years Rp	Diatas 5 Tahun/ Over 5 Years Rp
Manfaat Pasti/ Defined Benefit	6,842,054	27,088,506	33,149,113	65,518,178

33. Uang Muka Proyek Jangka Panjang

Uang muka proyek jangka panjang merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja atau pemilik proyek atas pekerjaan konstruksi yang memiliki jangka waktu penyelesaian proyek lebih dari satu tahun. Jumlah tersebut secara proporsional akan dikompensasikan dengan tagihan yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai dengan rincian sebagai berikut:

33. Advances For Long Term Projects

Advances for long-term projects represent advances received from the employer or owner of the construction project that has completion period of more than one year. The amount is deducted in proportion based on the physical progress achieved. Detail of advances for long term projects are as follows:

	2018 Rp	2017 Rp
Proyek Tol Serang Panimbang	828,481,818	--
Proyek Halte LRT Kelapa Gading Velodrome	623,048,950	--
Proyek Teluk Lamong	250,164,082	--
Pek. Pembangunan Terminal Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat	249,115,446	--
Proyek LRT Koridor Klp Gading - Velodrome	135,900,056	627,107,181
Proyek Pembangunan Pulman Hotel	102,096,707	--
Proyek PLTGU Muara Karang	93,102,162	120,902,071
Proyek Sulsel Barru-2 Coal Fired Steam Power Plant (1X100)	91,946,304	--
Proyek Transmart Cibubur Transpark	91,525,807	20,821,824
Proyek Gedung Pelindo III Surabaya	73,333,944	--
Proyek Pekerjaan Mandiri University	66,909,091	--
Proyek Coal Unloading Jetty DWT PLTU Pangkalan Susu	62,360,597	65,892,464

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018 Rp	2017 Rp
Proyek Tamansari Emerald	54,150,000	--
Proyek Apartemen Cornell Denver Ciputra	50,043,978	--
Proyek Apartemen Puncak MERR	46,903,688	63,545,396
Pabrikasi Feronikel Halmahera Timur	46,734,546	239,527,967
Proyek Pembangunan 1,250 Unit + 1,000 Unit Logement AADL di EL Baraki & El Harrach, Algeria	46,127,668	--
Proyek Gedung Telkom Manyar	43,765,579	--
Proyek Pembangunan 700 Unit + 1,000 Unit Logement AADL di EL Baraki & El Harrach, Algeria	40,384,703	--
Proyek CBD Surabaya	38,959,963	81,403,887
Proyek Tamansari Cendikia	37,300,000	--
Proyek Apartemen Arandra Residence	36,544,491	25,016,072
Proyek Kaltim 2x125MW CFSP Project	34,461,173	--
Proyek Sumbagut 2 Peaker Power Plant 250 MW	31,590,645	--
Proyek Pekerjaan Jalan Tol Balikpapan Samarinda Section 5A	29,363,025	--
Proyek Apartemen Mall Grand Gresik	28,540,100	43,924,950
Design and Build Perpanjangan Dermaga Bagendang dan Pembangunan Dermaga Multipurpose Pelabuhan Bumiharjo	25,725,000	--
Proyek Stasiun Double Double Track Bekasi	22,108,946	22,108,946
Proyek Ruko dan Sekolah Podomoro	20,834,834	--
Proyek Halte MRT Lebak Bulus Cipete	17,273,679	22,500,000
EPC Proyek Pembangunan Pabrik NPK Fussion II	16,970,882	41,154,389
Proyek Expantion Cilacap 1x1000MW	15,806,999	38,390,307
Proyek DDT Manggarai - Jatinegara	15,298,821	22,211,596
Proyek Apartemen Podomoro View	15,062,580	61,772,165
Proyek Transmart Jember	8,200,244	24,545,522
Proyek Stasiun Medan	5,419,229	24,334,512
Proyek High Speed Rail (HSR) KCIC	--	118,785,450
New Development of Oecusse Airport Timor Leste	--	81,942,226
Geothermal Powerplant Marubeni Corp	--	61,508,632
Proyek PLTMG Paket 4 Sumbagut	--	56,615,839
Proyek Bangunan Mabes Polri	--	46,008,206
Civil works 1x125MW Bontang	--	45,828,054
Proyek Tol Gempol Pasuruan Grati	--	40,076,176
Proyek Sodekan Ciliwung BKT	--	30,786,294
Proyek Gedung Kampus UnLam	--	30,401,025
Proyek Transmart Kupang	--	27,404,827
Proyek Gedung OR Velodrom Rawamangun	--	25,230,911
Proyek Apartemen Tamansari Iswara	--	21,654,735
Lain-lain (dibawah Rp20.000.000)/ Others (each below Rp20,000,000)	248,766,266	345,915,064
Total	3,644,322,003	2,477,316,688

34. Utang Sewa Pembiayaan

34. Lease Payables

Jadwal pembayaran sewa minimum berdasarkan perjanjian sewa guna usaha Grup pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The future minimum lease payments required under the Group's outstanding lease agreements as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Pembayaran Minimum Sewa Pembiayaan/ <i>Minimum Lease Payments</i>		Nilai Kini Pembayaran Minimum Sewa Pembiayaan/ <i>Present Value of Minimum Lease Payments</i>		
	2018 Rp	2017 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Rincian Liabilitas Sewa					<i>Lease Liabilities Detail</i>
Berdasarkan Jatuh Tempo					<i>By Due Date</i>
Tidak Lebih dari Satu Tahun	83,939,048	59,057,529	37,299,977	41,259,887	<i>Not Later than One Year</i>
Lebih dari Satu Tahun dan					<i>Later than One Year and</i>
Kurang dari Lima Tahun	210,958,210	116,600,019	213,628,754	96,849,868	<i>not Later than Five Years</i>
Sub Total	294,897,258	175,657,548	250,928,731	138,109,755	<i>Sub Total</i>
Dikurangi: Biaya Keuangan					<i>Less: Future Finance</i>
Masa Depan	(43,968,527)	(37,547,793)	--	--	<i>Charges</i>
Nilai Kini Pembayaran					<i>Present Value of Minimum</i>
Minimum Sewa	250,928,731	138,109,755	250,928,731	138,109,755	<i>Lease Payments</i>
Bagian yang Jatuh Tempo			(37,299,977)	(41,259,887)	<i>Current Maturity</i>
dalam Waktu Satu Tahun					<i>Long-term Lease</i>
Liabilitas Sewa Jangka					<i>Liabilities - Net</i>
Panjang - Neto			213,628,754	96,849,868	

Grup mendapat pembiayaan dari PT Bringin Srikandi Finance, PT Orix Indonesia Finance, Koperasi Karyawan WIKA dan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia dengan rincian seperti dibawah ini:

The Group obtained financing from PT Bringin Srikandi Finance, PT Orix Indonesia Finance, Koperasi Karyawan WIKA and PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia with details as follows:

**Perusahaan/ The Company
PT Bringin Srikandi Finance**

Tahun Mulai/ Starting Year	Nomor Kontrak/ Contract Number	Aset Sewaan/ Leased Assets	Total Unit	Periode Sewa/ Lease Period Tahun/ Years	Suku Bunga/ Interest Rate %	Total Nilai Kontrak/ Total Contract Amount Rp
2013	051/OL	Dump Truck Izuzu, type GIGA FVZ 34P-285	5	5	10.50	4,180,000
2013	055/OL	Dump Truck Izuzu, type GIGA FVZ 34P-285	5	5	10.50	4,180,000
2013	056/OL	Dump Truck Izuzu, type GIGA FVZ 34P-285	10	5	10.50	7,662,182
2013	058/OL	XCMG Crawler Crane QUY55	1	5	10.50	2,743,625
2013	060/OL	Dump Truck Izuzu, type GIGA FVZ 34P-285	10	5	10.50	7,662,182
2013	063/OL	Dump Truck Izuzu, type GIGA FVZ 34P-285	10	5	10.50	7,662,182
2013	064/OL	Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-8	3	5	10.50	3,797,028
2013	061/OL	Bulldozer Caterpillar D6R/XL/CANOPY/A-Blade	2	5	10.50	4,431,000
2013	067/OL	Dump Truck Izuzu, type GIGA FVZ 34P-285	10	5	10.50	7,662,182
2014	071/OL	Mobile Crane 25 ton Zoomlion Truck Crane	1	5	11.50	1,762,034
2014	075/OL	Truck Izuzu, type GIGA FVZ 34P-MX	2	5	11.50	1,741,284
2014	095/OL	Isuzu GIGA FVZ Truck Mixer	3	5	11.50	2,642,018
2014	096/OL	FG Wilson Genset Model P550-1 (Silent Type)	4	4	11.50	3,070,200
2014	098/OL	Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-8/S11	5	5	11.50	6,931,000
2014	083/OL	Zoomlion ZCC800, Crawler Crane 80 Tonnes	2	5	11.50	9,960,000
2014	070/OL	Ripper D6R XL tahun 2014	2	5	13.00	459,900
2015	106/OL	Crawler Crane FUWA FWX 55	1	5	13.00	3,181,920
2016	133/OL	Head Tractor MAN tahun 2014	1	5	13.00	1,290,000
2016	139/OL	Komatsu Excavator PC 200-8 MO	4	5	13.00	16,700,000

PT Orix Indonesia Finance

Tahun Mulai/ Starting Year	Nomor Kontrak/ Contract Number	Aset Sewaan/ Leased Assets	Total Unit	Periode Sewa/ Lease Period Tahun/ Years	Suku Bunga/ Interest Rate %	Total Nilai Kontrak/ Total Contract Amount Rp
2017	L17J00154E	Sumitomo Hydraulic Excavator Type SH350HD-5 CAP 2017	2	5	10.00	3,309,600
2016	L16J01646A	Isuzu Truck Concrete Pump FVZ 285PS 2015	1	5	10.00	3,622,825
2016	L16J01648E	HAMM VIBRATORY COMPACTOR 311D, 2016	2	5	10.00	1,615,000
2016	L16J01761A	MAN TGS 40.400 (6x4) MT BB/BBS, 2014	1	5	10.00	1,032,000
2017	L16J01652E	Sumitomo Hydraulic Excavator SH210-5 2016	4	5	10.00	4,370,000
2017	L16J02690A	Isuzu GIGA FVZ 34P-285PS 6x4 MT + DUMP 2016	8	5	10.00	4,923,997
2017	L16J02774E	Kobelco Excavator SK200-10 Cap 20 Ton 2016	2	5	10.00	1,812,400
2017	L16J02775E	HAMM VIBRATORY COMPACTOR 311D, 2016	2	5	10.00	1,276,560
2017	L16J02796E	Sumitomo Hydraulic Excavator SH210-5 2016	2	5	10.00	1,812,400
2017	L17J01377E	HAMM VIBRATORY COMPACTOR 311D, 2017 & HAMM VIBRATORY COMPACTOR PAD FOOT DRUM 311D 2017	1	5	10.00	2,122,872
2017	L17J01382E	Kobelco Excavator SK 330-8 Cap 30 Ton 2017	3	5	10.00	4,964,400
2017	L17J01378A	Isuzu GIGA FVZ 34P 285PS 6x4 MT + DUMP 2017	15	5	10.00	9,232,495

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Tahun Mulai/ Starting Year	Nomor Kontrak/ Contract Number	Aset Sewaan/ Leased Assets	Total Unit	Periode Sewa/ Lease Period Tahun/ Years	Suku Bunga/ Interest Rate %	Total Nilai Kontrak/ Total Contract Amount Rp
2017	L17J01383E	Kobelco Excavator SK200-10 Cap 20 Ton 2017	3	5	10.00	2,718,600
2017	L17J01388A	Isuzu GIGA FVZ 34P 285PS 6x4 MT + DUMP 2017	25	5	10.00	15,387,491
2017	L17J01389E	HAMM VIBRATORY COMPACTOR 311D, 2017 & HAMM VIBRATORY COMPACTOR PAD FOOT DRUM 311D 2017	1	5	10.00	1,380,576
2017	L17J01453E	Caterpillar Bulldozer D5R XL Cap 16 Ton 2017	1	5	10.00	1,717,840
2017	L17J01454E	HAMM VIBRATORY COMPACTOR 311D, 2017 & HAMM VIBRATORY COMPACTOR PAD FOOT DRUM 311D 2017	1	5	10.00	1,380,576
2017	L17J00379A	Quester CWE 280 6x4 RIGID MT+DUMP 24M3	8	5	10.00	4,923,997
2017	L17J00578A	Isuzu GIGA FVZ 34P-285PS +DUMP CAP 24m3	10	5	10.00	6,154,996
2017	L17J00624E	HAMM VIBRATORY COMPACTOR 311D, 2017 & HAMM VIBRATORY COMPACTOR PAD FOOT	3	5	10.00	2,657,136

WIKA Ikon

Tahun Mulai/ Starting Year	Nomor Kontrak/ Contract Number	Aset Sewaan/ Leased Assets	Total Unit	Periode Sewa/ Lease Period Tahun/ Years	Suku Bunga/ Interest Rate %	Total Nilai Kontrak/ Total Contract Amount Rp
2014	90/OL	Shell Core Machine	2	4	8.40	2,368,047
2014	90/OL	Core Box Clamping Auto Clamp System	1	4	8.40	2,368,047
2014	91/OL	CNC Machining Center Dossan	2	4	8.71	1,343,151
2014	92/OL	Gravity Casting Machine	3	4	9.77	1,659,650
2014	99/OL	Dossan Machining Center	3	4	8.89	4,647,924
2014	99/OL	Dossan Tapping STD Turning Center	5	4	8.89	4,647,924
2014	101/OL	Line Machining Dossan DNM	1	4	8.59	580,859
2014	105/OL	CNC Machining Center Dossan DNM type 500	1	4	9.13	670,851

**Koperasi Karyawan WIKA
WIKA Ikon**

Tahun Mulai/ Starting Year	Nomor Kontrak/ Contract Number	Aset Sewaan/ Leased Assets	Total Unit	Periode Sewa/ Lease Period Tahun/ Years	Suku Bunga/ Interest Rate %	Total Nilai Kontrak/ Total Contract Amount Rp
2015	005/SPPA/KOKAR	Line Machining Center Dossan DNM	5	3	12.80	3,219,887

**PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia
WIKA Bitumen**

Tahun Mulai/ Starting Year	Nomor Kontrak/ Contract Number	Aset Sewaan/ Leased Assets	Total Unit	Periode Sewa/ Lease Period Tahun/ Years	Suku Bunga/ Interest Rate %	Total Nilai Kontrak/ Total Contract Amount Rp
2017	wkb17071220	Excavator and Breaker	3	3	11.25	3,419,413

WIKA Beton

Tahun Mulai/ Starting Year	Nomor Kontrak/ Contract Number	Aset Sewaan/ Leased Assets	Total Unit	Periode Sewa/ Lease Period Tahun/ Years	Suku Bunga/ Interest Rate %	Total Nilai Kontrak/ Total Contract Amount Rp
2018	00204-001	Bar Bender (Takeda) TB 42, Bar Cutter (Toyo) TK 42	6	3	9.15	782,504
2018	00204-002	Structure Gantry Crane 1X20 Ton + Accessories Crane	2	3	9.15	1,639,147
2018	00204-003	Struktur Gantry Crane 20x40 ton	2	3	9.15	2,574,465
2018	00204-004	Used Concrete Pump IHI Truck Isuzu Model CVR17K	1	3	9.15	1,227,261
2018	00204-005	Kaesar Compressor ASD-40 SIGMA, Kaeser Refrigerant TC-36, Eco Drain	1	3	9.15	156,008
2018	00204-006	Tractor Head Isuzu GIGA FVZ 34 KMX	2	3	9.15	1,394,968
2018	00204-007	Tractor Head Isuzu GIGA FVZ 34 KMX, Gentong Mixer True Max	2	3	9.15	1,595,055
2018	00204-008	Tractor Head Isuzu GIGA FVZ 34 KMX, Gentong Mixer True Max	1	3	9.15	797,636
2018	00204-009	Monorail MISIA Wire Rope Hoist 40 Ton	2	3	9.15	1,120,751
2018	00204-010	Used Generator Set Hartec HT-750 CN	1	3	9.15	625,260
2018	00204-011	Crawler Crane 100T Sumitomo SC 1000, Tahun 1995	1	3	9.15	4,185,641
2018	00204-012	Compression Testing Machine 3000 KN Matest Italy, 1 Pc Graphic printer C127N, 1 Pc Distance Pieces	1	3	9.15	224,344

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Tahun Mulai/ Starting Year	Nomor Kontrak/ Contract Number	Aset Sewaan/ Leased Assets	Total Unit	Periode Sewa/ Lease Period Tahun/ Years	Suku Bunga/ Interest Rate %	Total Nilai Kontrak/ Total Contract Amount Rp
2018	00204-013	Lowbed Trailer Kap 60000 Kg Double Busneck Lebar 3-3,2 Meter	1	3	9.15	401,943
2018	00204-014	Tower Crane Hammer Head Model MC 310	1	3	9.15	2,955,840
2018	00204-015	Lowbed Trailer	1	3	9.15	516,000
2018	00204-016	Monorail MISIA Wire Rope Hoist 40 Ton	2	3	9.15	1,349,364
2018	00204-017	ISUZU Concrete Pump	1	3	9.15	1,524,441
2018	00204-018	Wheel Loader	1	3	9.15	793,351
2018	00204-019	Water chiller 60pk second, Tangki 3000 liter, Pompa Sirkulasi	1	3	9.15	277,259
2018	00204-020	Batching Plant	1	3	9.15	2,873,248
2018	00204-021	Generator Set	1	3	9.15	324,748
2018	00204-022	Jembatan Timbang 9m	1	3	9.15	187,652
2018	00204-023	Crawler Crane	1	3	9.15	6,998,192
2018	00204-024	Tractor Head Isuzu GIGA FVZ 34 KMX, Gentong Mixer True Max	1	3	9.15	1,814,269
2018	00204-025	Tractor Head Isuzu GIGA FVZ 34 KMX, Gentong Mixer True Max	2	3	9.15	1,814,269
2018	00204-026	Tractor Head Isuzu GIGA FVZ 34	1	3	9.15	808,466
2018	00204-027	Generator Set "Silent Type" 300 KVA	1	3	9.15	364,990
2018	00204-028	ISUZU Concrete Pump	1	3	9.15	1,379,990
2018	00204-029	Wheel Loader	1	3	9.15	750,465
2018	00204-030	SDLG Wheel Loader	1	3	9.15	768,745
2018	00204-031	Flat Bed Trailer	1	3	9.15	219,990
2018	00204-032	Kyokuto mixer	5	3	9.15	1,199,990
2018	00204-033	Head Truck	5	3	9.15	4,062,458
2018	00204-034	Wheel Loader	1	3	9.15	798,968
2018	00511-001	Peralatan Jalur Putar	1	3	9.15	15,861,501
2018	00449-001	Batching Plant, Truck Mixer	1	3	9.15	3,345,958
2018	00449-002	Truck Mixer	2	3	9.15	1,771,131
2018	00449-003	Diesel Genset 350Kva	1	3	9.15	350,947
2018	00449-004	Wheel Loader	1	3	9.15	396,803
2018	00449-005	Dump Truck	2	3	9.15	1,549,507
2018	00449-006	Truck Mixer HINO	2	3	9.15	2,146,047
2018	00449-007	Truck Mixer HINO	1	3	9.15	1,073,018
2018	00449-008	Genset Stamford 20Kva	1	3	9.15	94,352

35. Pinjaman Jangka Panjang

35. Long Term Loan

	2018 Rp	2017 Rp
Perusahaan/ The Company		
Pihak Berelasi (Catatan 50)/ Related Parties (Note 50)		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	23,280,000
Pihak Ketiga/ Third Parties		
Pinjaman Sindikasi/ Syndicated Loan		
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ	1,766,368,511	708,893,096
IKB Deutsche Industriebank AG	--	24,673,686
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Indonesia Eximbank	--	11,085,714
Sub Total	1,766,368,511	744,652,496
Entitas Anak/ Subsidiaries		
Pihak Berelasi (Catatan 50)/ Related Parties (Note 50)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	350,000,000	200,000,000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	271,622,614	177,329,672
Pinjaman Sindikasi/ Syndicated Loan		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	408,316,823	123,311,094
Dikurangi: Biaya Langsung yang belum Diamortisasi/ Less: Unamortized Related Cost	(2,401,313)	(5,132,428)
Sub Total	1,027,538,124	495,508,338
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	9,689,534	14,298,124
Dikurangi: Biaya Langsung yang belum Diamortisasi/ Less: Unamortized Related Cost	(316,613)	(106,185)
Sub Total	9,372,921	14,191,939
Total	2,803,279,556	1,277,632,773

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018 Rp	2017 Rp
Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Jangka Panjang/ <i>Current Portion of Long Term Loan</i>		
<u>Perusahaan/ The Company</u>		
Pihak Berelasi (Catatan 50)/ <i>Related Parties (Note 50)</i>		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	23,280,000
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>		
IKB Deutsche Industriebank AG	--	24,673,686
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia - Indonesia Eximbank	--	11,085,714
Sub Total	--	35,759,400
<u>Entitas Anak/ Subsidiaries</u>		
Pihak Berelasi (Catatan 50)/ <i>Related Parties (Note 50)</i>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	200,000,000
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>		
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	9,689,534	7,385,018
Dikurangi: Biaya Langsung yang belum Diamortisasi/ <i>Less: Unamortized Related Cost</i>	(316,613)	--
Total Bagian Jangka Pendek / <i>Short Term Portion</i>	9,372,921	266,424,418
Pinjaman Jangka Panjang setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek/ <i>Long Term Loan, Net Current Portion</i>		
<u>Perusahaan/ The Company</u>		
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>		
Pinjaman Sindikasi/ <i>Syndicated Loan</i>		
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ	1,766,368,511	708,893,096
Sub Total	1,766,368,511	708,893,096
<u>Entitas Anak/ Subsidiaries</u>		
Pihak Berelasi (Catatan 50)/ <i>Related Parties (Note 50)</i>		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	271,622,614	177,329,672
Pinjaman Sindikasi/ <i>Syndicated Loan</i>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	118,178,666
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	350,000,000	--
Pinjaman Sindikasi/ <i>Syndicated Loan</i>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	408,316,823	--
Dikurangi: Biaya Langsung yang belum Diamortisasi/ <i>Less: Unamortized Related Cost</i>	(2,401,313)	--
Sub Total	1,027,538,124	295,508,338
Pihak Ketiga/ <i>Third Parties</i>		
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	--	6,806,921
Sub Total	--	6,806,921
Total Bagian Jangka Panjang / <i>Long Term Portion</i>	2,793,906,635	1,011,208,355

a. Pinjaman Sindikasi – Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ (BTMU)

Perusahaan melakukan perjanjian pinjaman dengan BTMU, PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank CTBT Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, Bank of China Limited, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank BNP Paribas Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dengan BTMU sebagai agen.

a. Syndicated loan – The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ (BTMU)

The Company entered into a loan agreement with BTMU, PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank CTBT Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, Bank of China Limited, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank BNP Paribas Indonesia and PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), with BTMU as agent.

Bank memberikan fasilitas kredit investasi sebesar Rp5.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran modal kerja secara umum dari proyek infrastruktur dengan tingkat suku bunga sebesar JIBOR + 2%.

Banks provide investment credit facility amounting to Rp5,000,000,000 to be used for financing the construction and general working capital expenditure of infrastructure projects with interest rate of JIBOR + 2%.

Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas adalah sampai dengan 15 Maret 2020.

The validity period of the agreement according to the extension of facilities is until March 15, 2020.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan hasil asuransi dan piutang usaha (Catatan 5).

The trade loan is collateralized with insurance claim and accounts receivable (Note 5).

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- Rasio lancar minimal 1 kali ; dan
- Rasio utang terhadap ekuitas maksimal 3,5 kali

- *Current ratio minimum 1 time ; and*
- *Debt to equity ratio maximum 3.5 times*

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

As of December 31, 2018, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.766.368.511 dan Rp708.893.096.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp1,766,368,511 and Rp708,893,096, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to nil, respectively.

b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 10 Juli 2018, WIKA Beton telah melakukan perjanjian fasilitas kredit No. CBG.LC2/SPPK.031/2018 sebesar Rp1.760.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,50% dengan jangka waktu 2 tahun.

b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On July 10, 2018, WIKA Beton has a credit facility agreement No. CBG.LC2/SPPK.031/2018 amounting to Rp1,760,000,000 with an interest rate of 9.50% with a term of 2 years.

Fasilitas yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja I dengan total senilai Rp450.000.000, Kredit Modal Kerja II dengan total senilai Rp600.000.000, *Supplier Financial (SF)* sebesar Rp350.000.000 serta fasilitas *Non Cash Loan* dengan limit Rp335.000.000 Fasilitas. Fasilitas tersebut dituangkan dalam akta Perjanjian Pinjaman Transaksi Khusus pada tanggal 10 Juli 2018 dengan No. CBG.LC2/SPPK.031/2018.

Facilities provided in the form of working capital credit I with a total value of Rp450,000,000, working capital credit II with a total value of Rp600,000,000, Supplier Financial with a total value of Rp350,000,000 and Non-Cash Loan facility with a limit of Rp335,000,000. The facilities are reflected in the Deed of the Special Transaction Loan Agreement on July 10, 2018 with No. CBG.LC2/SPPK.031/2018.

Tingkat bunga 9,50% per tahun.

The interest rate are 9.50% per year.

Masa berlaku perjanjian sesuai perpanjangan fasilitas adalah 10 Juli 2018 sampai dengan 2 Juni 2020.

The validity period of the agreement according to the extension of facilities is July 10, 2018 until June 2, 2020.

Agunan atas perjanjian tersebut berupa Non aset tetap (piutang dan persediaan) dan aset tetap (tanah dan bangunan).

Collateral for the agreement in the form of non fixed assets (receivables and inventory) and fixed assets (land and buildings).

Rasio keuangan yang harus diperhatikan:
Current Ratio minimal sebesar 100% dan
Leverage Ratio maksimal 400%.

*Financial ratios that must be considered:
Current Ratio of at least 100% and Leverage
Ratio maximum of 400%.*

Pada tanggal 31 Desember 2018, WIKA Beton telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

As of December 31, 2018, WIKA Beton is compliance with the terms and conditions of the loans.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp350.000.000 dan Rp 200.000.000

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp350,000,000 and Rp200,000,000, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp200.000.000 dan Rp120.000.000.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 are amounted to Rp200,000,000 and Rp120,000,000, respectively.

c. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Pada tanggal 13 November 2017 WIKA Realty telah mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan surat No 1291/BLP.III/CMLU/XI/2017 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 13 November 2022. Rincian fasilitas kredit sebagai berikut:

c. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

On November 13, 2017, WIKA Realty has obtained credit facilities from PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk by letter No. 1291/BLP.III/CMLU/XI/2017 with a term up to November 13, 2022. Details of credit facility as follows:

Jenis fasilitas	Fasilitas kredit modal kerja konstruksi / <i>Construction working capital credit facility</i>	Facility Type
Plafon	Rp208.000.000	Limit
Jangka Waktu	5 tahun / 5 years	Time Period
Tingkat Bunga	9.00% per tahun / per annum	Interest Rate
Tujuan	Modal kerja untuk pembangunan Apartemen Tamansari Skylounge Balikpapan yang berlokasi di Jl. Pelita Kel.Sepingan, Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan / <i>Working capital for the construction of the Tamansari Skylounge Balikpapan Apartment located in Jl. Pelita Kel. Kepingan, Kec.Balikpapan Selatan, Balikpapan City</i>	Purpose

Pinjaman ini dijamin dengan:

1. Tamansari Skylounge Balikpapan yang berlokasi di Jl. Pelita, Kel. Sepinggan Raya, Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan minimal seluas 15.239 m2 beserta bangunan yang ada dan akan ada di B2atasnya. Dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SKGB) an. PT WIKA Realty+B23;
2. Fidusia yang berkaitan dengan aktivitas transaksi penjualan dan/atau aktivitas operasional proyek Apartemen Tamansari Skylounge Balikpapan; dan
3. Asuransi kerugian all risk dengan nilai pertanggungan minimal sebesar plafond kredit atau sesuai dengan syarat *banker's clause* dari BTN.

Collateral for this loan:

1. Land and building of Tamansari Skylounge Balikpapan project which is located on Jl. Pelita, Kelurahan Sepinggan Raya, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Land area is 15,239 sqm along with existing buildings and will be in B2 above. With proof of ownership in the form of a Sertifikat Hak Guna Bangunan (SKGB). PT WIKA Realty + B23;
2. Fiduciary relating to the activity of sale transaction and / or operational activities of Tamansari Skylounge Makassar Apartment Project; and
3. All risk insurance with minimum coverage of credit limit or in accordance with banker's clause requirements from BTN.

Berikut adalah pembatasan rasio Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk:

The following are the restrictions ratio of Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk:

1. Rasio Hutang terhadap total modal (DER) maksimal 500%;
2. Rasio modal disetor terhadap total hutang Perusahaan (hutang yang ada dan yang akan ada) di Bank BTN minimal sebesar 10%;
3. Ekuitas yang positif;
4. Rasio agunan minimal sebesar 125%; dan
5. *Debt Service Coverage* di atas 100%.

Negative Covenants yang ada pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyebutkan bahwa WIKA Realty harus melaporkan kepada bank atas aktivitas yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Menyewakan aset yang digunakan ke pihak lain;
2. Mengubah Anggaran Dasar Perusahaan; dan
3. Mengubah Susunan Pengurus.

Meminta izin terlebih dahulu kepada bank atas aktivitas sebagai berikut:

1. Menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan peruntukan kredit;
2. Memindah tangankan agunan; dan
3. Mengajukan permohonan pailit.

Pada tanggal 21 Juni 2018, WIKA Realty telah mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan surat No 074/MKS/SP2K/CSMU/VI/2018 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 21 Juni 2022. Rincian fasilitas kredit sebagai berikut:

Jenis fasilitas	Fasilitas kredit modal kerja konstruksi / Working Capital Loans Facilities	Facility Type
Plafon	Rp135.000.000	Limit
Jangka Waktu	4 tahun / 4 year	Time Period
Tingkat Bunga	9.00% per tahun/ per annum	Interest Rate

Pinjaman ini dijamin dengan:

1. Tanah dan bangunan proyek Tamansari Skylounge Makassar yang berlokasi di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Luas tanah adalah sebesar 7.379 m²;
2. Fidusia yang berkaitan dengan aktivitas transaksi penjualan dan/atau aktivitas operasional proyek Apartemen Tamansari Skylounge Makassar; dan
3. Asuransi kerugian all risk dengan nilai pertanggungan minimal sebesar plafond kredit atau sesuai dengan syarat banker's clause dari BTN (lihat Catatan 9).

Berikut adalah pembatasan rasio Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk:

1. *Debt to Equity (DER) ratio* up to 500%;
2. *The ratio of paid up capital to total company debt (existing and outstanding debt) in Bank BTN* is at least 10%;
3. *Positive equity*;
4. *The minimum collateral ratio of 125% land*;
5. *Debt Service Coverage* above 100%.

Negative Covenants at Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk stated that WIKA Realty must report to the bank the following activities:

1. *Renting assets used by other parties*;
2. *Changing the Company's Articles of Association*; and
3. *Changing the Composition of the Board*.

Requesting the bank's prior permission for the following activities:

1. *Using credit facilities outside the purpose of credit allocation*;
2. *Transfer of collateral*; and
3. *Applying for bankruptcy*.

On June 21, 2018, WIKA Realty has obtained credit facilities from PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk by letter No 074/MKS/SP2K/CSMU/VI/2018 with a term up to On June 21, 2022. Details of credit facility as follows:

Collateral for this loan:

1. *Land and building of Tamansari Skylounge Makassar project which is located on J Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Land area is 7,379 sqm*;
2. *Fiduciary relating to the activity of sale transaction and / or operational activities of Tamansari Skylounge Makassar Apartment Project*; and
4. *All risk insurance with minimum coverage of credit limit or in accordance with banker's clause requirements from BTN (see Note 9).*

The following are the restrictions ratio of Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk:

1. Rasio Hutang terhadap total modal (DER) maksimal 500%;
2. Ekuitas yang positif;
3. Rasio agunan minimal sebesar 125%; dan
4. *Debt Service Coverage* di atas 100%.

Negative Covenants yang ada pada Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyebutkan bahwa WIKA Realty harus melaporkan kepada bank atas aktivitas yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Menyewakan aset yang digunakan ke pihak lain;
2. Mengubah Anggaran Dasar; dan
3. Mengubah Susunan Pengurus.

Meminta izin terlebih dahulu kepada bank atas aktivitas sebagai berikut:

1. Menggunakan fasilitas kredit diluar tujuan peruntukan kredit;
2. Memindahtangankan agunan; dan
3. Mengajukan permohonan pailit.

Pada tanggal 31 Desember 2018, WIKA Realty telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp271.622.613 dan Rp177.329.672

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil.

d. Pinjaman Sindikasi – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 16 November 2017, WIKA Serang Panimbang memperoleh fasilitas kredit Sindikasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri).

Ketentuan perjanjian kredit sindikasi tersebut sebagai berikut:

- Bank memberikan fasilitas kredit sindikasi sebesar Rp894.000.000;
- Porsi fasilitas kredit masing-masing sebagai berikut:
 - i. BNI maksimal sebesar Rp447.000.000.
 - ii. Bank Mandiri maksimal sebesar Rp447.000.000.
- Jangka waktu fasilitas kredit adalah 24 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

1. *Debt to total capital (DER) ratio up to 500%;*
2. *Positive Equity;*
3. *The minimum collateral ratio of 125%; and*
4. *Debt Service Coverage above 100%.*

Negative Covenants at Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk stated that WIKA Realty must report to the bank the following activities:

1. *Renting assets used by other parties;*
2. *Changing the Articles of Association; and*
3. *Changing the Composition of the Board.*

Requesting the bank's prior permission for the following activities:

1. *Using credit facilities outside the purpose of credit allocation;*
2. *Transfer of collateral; and*
3. *Applying for bankruptcy.*

As of December 31, 2018, WIKA Realty is compliance with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp271,622,613 and Rp177,329,672, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to nil.

d. Syndicated Loan – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On November 16, 2017, WIKA Serang Panimbang obtained a syndicated credit facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri).

The provisions of the syndicated credit agreement are as follows:

- *Bank provide syndicated credit facilities amounting to Rp894,000,000;*
- *Each portion of credit facilities are as follows:*
 - i. *BNI maximum amount of Rp447,000,000.*
 - ii. *Bank Mandiri maximum amount of Rp447,000,000.*
- *The validity of credit facilities are 24 months after the credit assignment date.*

- Debitur wajib melakukan pembayaran kembali (*mandatory payment*) apabila Debitur telah menerima pembayaran dana talangan tanah dari BLU-LMAN atau instansi lain yang ditunjuk Pemerintah dan/atau pembayaran klaim dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah pembayaran yang diterimanya, baik secara bertahap atau seluruhnya (*bullet payment*). Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak diterimanya pembayaran dana talangan tanah tersebut dari BLU-LMAN atau PT PII dengan ketentuan paling lambat pada akhir jangka waktu fasilitas kredit.
- Tingkat suku bunga sebesar 9% per tahun. Namun, pihak kreditur berhak untuk melakukan reviu tarif suku bunga berdasarkan kebijakan dan pertimbangan para kreditur.

Pinjaman tersebut dijamin dengan:

- Segala harta kekayaan Debitur.
- Tagihan atas pengembalian Dana Talangan Tanah dari Pemerintah dan/atau BLU-LMAN dan/atas instansi berwenang lain yang ditunjuk Pemerintah, diikat secara fidusia.
- Tagihan klaim penjaminan yang diterima dari PT PII, diikat secara fidusia dalam bentuk akta notarial.

WIKI Serang Panimbang diharuskan untuk mematuhi batasan untuk mempertahankan rasio keuangan, yaitu DER maksimum 4 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2018, WIKI Serang Panimbang telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp408.316.822 dan Rp123.311.093

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp43.504.798 dan nihil.

e. PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 18 Agustus 2015, WIKI Realty menerima fasilitas kredit untuk pembiayaan proyek D'Bandara di Balikpapan berupa fasilitas kredit Pinjaman Transaksi Khusus 4 (*On Liquidation*) dengan nilai pinjaman pada *tranche A* senilai Rp89.000.000 dan *tranche B* senilai Rp192.000.000.

- *The debtor is obligated to make mandatory payment once they have received the land bailout payment from BLU-LMAN, or other institutions appointed by the government, or payment of claim from PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). The payment amount is in accordance with the amount received either partially or bullet payment. The payment must be done within 10 working days after the received payment under condition no later than the end of credit term.*
- *The interest rate is 9% per annum. However, the creditor is entitled to review the interest rate according to the policy and consideration of the creditors.*

The loan is collateralized with :

- *All of the assets of Debtor.*
- *Claims on the refund of the Government Bailout Fund and / or BLU-LMAN and / other authorized institutions designated by the Government, fiduciary bound.*
- *Claim for guarantee claim received from PT PII, tied in fiduciary in the form of notarial deed.*

WIKI Serang Panimbang is required to comply with restrictions to maintain financial ratio of DER maximum of 4 times.

As of December 31, 2018, WIKI Serang Panimbang is compliance with the terms and conditions of the loans.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp408,316,822 and Rp123,311,093, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp43,504,798 and nil, respectively.

e. PT Bank CIMB Niaga Tbk

On August 18, 2015, WIKI Realty received a credit facility for financing the D'Bandara in Balikpapan in the form of credit facilities Special Transactions 4 Loan (On Liquidation) with value of Tranche A Rp89,000,000 and tranche B Rp192,000,000.

Pada tanggal 29 Januari 2016 terdapat perubahan nilai fasilitas kredit dengan nilai pinjaman pada *tranche A* senilai Rp109.000.000 dan *tranche B* senilai Rp172.000.000.

On January 29, 2016, there is a change in the value of the credit facility with the value of the *tranche A* loan amounting to Rp109,000,000 and *tranche B* amounting to Rp172,000,000.

Total nilai pinjaman sebesar Rp282.000.000 berdasarkan surat penawaran kredit No. 180/OL/CBGIII-CCS/VIII/2015 dan perubahan nilai fasilitas dengan surat penawaran perubahan fasilitas kredit PTK IV No. 013/OL/CBGIII-CCS/II/2016 ketentuan atas bunga sebesar 11% per tahun *floating rate*, dan provisi 0,5% *flat* dari total plafond dengan jangka waktu 18 bulan setelah penarikan pertama.

The total value of loans amounted to Rp282,000,000 by letter of credit offer No. 180/OL/CBGIII-CCS/VIII/2015 and changes in the value of the facility with a letter of credit facility changes PTK deals IV No. 013/OL/CBGIII-CCS/II/2016. provisions on interest of 11% per annum *floating rate*, and the provision of 0.5% of the total *flat ceiling* with a term of 18 months after the first drawdown.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan piutang, tanah dan bangunan (Catatan 5 dan 19).

The loan is collateralized with receivables, land and building (Notes 5 and 19).

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil.

The bank loan balance as of December 31, 2018 and 2017 amounted to nil, respectively.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp172.404.520.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to nil and Rp172,404,520, respectively.

f. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi jangka panjang dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan limit sebesar Rp349.200.000 yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Borang 2 x 30 MW.

f. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
The Company obtained a long-term investment credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with limit of Rp349,200,000 which is used to finance the construction of Gas Power Plant (PLTG) Borang 2 x 30 MW.

Apabila porsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Indonesia Eximbank tidak dipakai maka bank dapat mengambil porsi tersebut, sehingga plafond maksimal sebesar Rp582.000.000.

If the Company not utilized the portion of Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Indonesia Eximbank then bank may take the portion thus the facility can be increased to maximum of Rp582,000,000.

Masa berlaku perjanjian adalah terhitung dari 17 Januari 2012 sampai dengan 17 Januari 2018 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9% per tahun.

The validity of the agreement is effective from January 17, 2012 to January 17, 2018 with fixed interest rate at 9% per annum.

Perjanjian dijamin sesuai Perjanjian Jaminan Fidusia No. 24, 25 dan 26 tanggal 17 Januari 2012 dibuat dihadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta.

The agreement is guaranteed in accordance Fiduciary Guarantee Agreement No. 24, 25 and 26 dated January 17, 2012 made before Sri Ismiyati, S.H., Notary in Jakarta.

Perusahan juga memperoleh fasilitas kredit investasi jangka panjang dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk Proyek PLTMG Rengat 20 MW dengan limit fasilitas kredit sebesar Rp116.400.000.

The Company also obtained a long-term investment credit facility from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk for PLTMG Rengat 20 MW project with credit facility amounting to Rp116,400,000.

Masa berlaku perjanjian adalah terhitung dari 31 Januari 2013 sampai dengan 30 Januari 2019 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,70% per tahun selama 2 tahun dan dapat direviu setiap saat pada tahun ke 3 sampai dengan tahun ke 6.

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan peralatan mekanikal dan elektrikal, bangunan sipil dan piutang usaha (Catatan 5 dan 19).

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp23.280.000.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp23.280.000 dan Rp93.120.000.

g. IKB Deutsche Industrie Bank. AG

IKB Deutsche Industrie Bank AG menyediakan fasilitas kredit sebesar USD26,098,364 yang akan digunakan untuk pembiayaan pengadaan peralatan proyek PLTD MFO 55 MW Bali dengan rincian sebagai berikut:

- Fasilitas 1 digunakan untuk membiayai 85% dari nilai impor Equipment senilai USD23,597,638.
- Fasilitas 2 digunakan untuk membiayai Asuransi kepada Euler Helmes senilai USD1,699,821.
- Fasilitas 3 disediakan untuk pembayaran bunga senilai USD800,905.

Masa berlaku perjanjian adalah terhitung dari Oktober 2010 sampai dengan Oktober 2018 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 4,7% per tahun.

Perjanjian dijamin sesuai perjanjian jaminan fidusia No. 31 tanggal 29 November 2010 dibuat dihadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp23.001.068.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp23.001.068 dan Rp50.858.199.

h. PT Bank China Contraction Bank Indonesia Tbk

Pada tanggal 11 April 2017, WIKA Bitumen menerima fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp3.000.000 dan Kredit Investasi

The validity of the agreement is effective from January 31, 2013 to January 30, 2019 with fixed interest rate of 8.70% per year for 2 years and reviewable at any time in year 3 to year 6.

The loan is collateralized with mechanical and electrical equipment, civil construction and accounts receivable (Notes 5 and 19).

The outstanding balance as of December 31, 2018 and 2017 amounted to nihil and Rp23,280,000, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp23,280,000 and Rp93,120,000, respectively.

g. IKB Deutsche Industrie Bank. AG

IKB Deutsche Industrie Bank AG provide credit facilities of USD26,098,364 which will be used to finance the procurement of equipment MFO 55 MW PLTD Bali with details as follow:

- *Facility 1 used for 85% imported equipment as amount USD23,597,638.*
- *Facility 2 used for insurance to Euler Helmes as amount USD1,699,821.*
- *Facility 3 used for interest payment as amount USD800,905.*

The validity of the agreement is effective from October 2010 to October 2018 with the interest rate fixed at 4.7% per annum.

The agreement is guaranteed in accordance Fiduciary Guarantee Agreement No. 31 dated November 29, 2010 made before Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., notary in Jakarta.

The outstanding balance as of December 31, 2018 and 2017 amounted to nil and Rp23,001,068, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp23,001,068 and Rp50.858.199, respectively.

h. PT Bank China Contraction Bank Indonesia Tbk

On April, 11 2017, WIKA Bitumen received Overdraft Loan facility (PRK) amounting Rp3,000,000 and credit investment (KI)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

(KI) Rp12.000.000 dengan tingkat suku bunga 11% per tahun.

Masa berlaku perjanjian untuk fasilitas PRK adalah 1 tahun sejak akad dan untuk fasilitas Kredit Investasi adalah 3 tahun sejak akad dan *Grace Period* 6 bulan sejak akad

Pinjaman tersebut di atas dijamin dengan tanah milik WIKA Bitumen (Catatan 19) sebagai berikut:

- Tanah di Jalan RA Kartini, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara dengan SHGB No. 00142 sampai dengan 25 Agustus 2038 atas nama WIKA Bitumen, dengan luas tanah 544 m2 senilai Rp3.200.000;
- Tanah di Jalan Protokol, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dengan SHGB No. 006 sampai dengan 12 Oktober 2027 atas nama PT Sarana Karya (Persero), dengan luas tanah 122.014 m2 senilai Rp10.000.000;
- Tanah di Jalan Protokol, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dengan SHGB No. 001 sampai dengan 12 Oktober 2027 atas nama PT Sarana Karya (Persero), dengan luas tanah 35.690 m2 senilai Rp3.300.000;
- Tanah di Jalan Protokol, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dengan SHGB No. 003 sampai dengan 12 Oktober 2027 atas nama PT Sarana Karya (Persero), dengan luas tanah 3.490 m2 senilai Rp412.000; dan
- Tanah di Jalan Protokol, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dengan SHGB No. 004 sampai dengan 12 Oktober 2027 atas nama PT Sarana Karya (Persero), dengan luas tanah 9.135 m2 senilai Rp650.000.

WIKA Bitumen terikat untuk memelihara syarat sebagai berikut:

- Menyalurkan aktivitas usaha melalui rekening di PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk minimal 10% dari omset dalam waktu 6 bulan sejak akad;
- Jika seluruh perijinan sudah dialihkan menjadi atas nama WIKA Bitumen, maka seluruh aktivitas ekspor (L/C) dan transaksi keuangan perusahaan menggunakan/ melalui PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk dan

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**

For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

amounting to Rp12,000,000 with fixed interest rate 11% pa.

The validity of the agreement for PRK Facility is 1 year since the signing of the agreement and for Credit Investment (KI) is 3 years since the signing of the agreement and Grace Period for 6 months since the agreement.

The loan is collateralized with land of WIKA Bitumen (Note 19) as follow:

- *Land on Jalan RA Kartini, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara with SHGB No. 00142 until August 25, 2038 on behalf WIKA Bitumen, with land area of 544 sqm amounted to Rp3,200,000;*
- *Land on Jalan Protokol, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara with SHGB No. 006 until October 12, 2027 on behalf PT Sarana Karya, with land area of 122,014 sqm amounted to Rp10,000,000;*
- *Land on Jalan Protokol, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara with SHGB No. 001 until October 12, 2027 on behalf PT Sarana Karya, with land area of 35,690 sqm amounted to Rp3,300,000.*
- *Land on Jalan Protokol, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara with SHGB No. 003 until October 12, 2027 on behalf PT Sarana Karya, with land area of 3,490 sqm amounted to Rp412,000; and*
- *Land on Jalan Protokol, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara with SHGB No. 004 until October 12, 2027 on behalf PT Sarana Karya (Persero), with land area of 9,135 sqm amounted to Rp650,000.*

WIKA Bitumen is required to comply with the following, among others:

- *Distributing business activities through accounts at PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk at least 10% of turnover within 6 months of the contract;*
- *If all licenses have been transferred on behalf of WIKA Bitumen, all export activities (L/C) and financial transactions of the company use / through PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk and*

- Menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit paling lambat 6 bulan setelah tanggal periode laporan keuangan berakhir, serta Laporan Keuangan *Inhouse* per semester paling lambat 2 bulan setelah tanggal periode laporan keuangan berakhir.

Pada tanggal 31 Desember 2018, WIKA Bitumen telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp9.689.533 dan Rp14.298.124.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp4.608.590 dan Rp701.875

i. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Indonesia Eximbank

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi jangka panjang dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Indonesia Eximbank dengan limit sebesar Rp232.800.000 yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan PLTG Borang 2 x 30 MW.

Masa berlaku perjanjian adalah terhitung dari 17 Januari 2012 sampai dengan 17 Januari 2018 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9% untuk tahun pertama, tahun kedua sampai dengan jatuh tempo kredit sebesar JIBOR 3 bulan + 2%.

Perusahaan terikat untuk memelihara DER maksimum dari 3 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo utang bank per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar nihil dan Rp11.085.714

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp11.085.714 dan Rp44.342.857.

- *Submit Audited Annual Financial Statements no later than 6 months after the date of the ending financial reporting period, and Inhouse Financial Report per semester no later than 2 months after the date of the financial statement period ends.*

As of December 31, 2018, WIKA Bitumen is compliance with the terms and conditions of the loans.

The outstanding balance as of December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp9,689,533 and Rp14,298,124, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp 4,608,590 and Rp701,875, respectively.

i. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Indonesia Eximbank

The Company obtained a long-term investing credit facilities from Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Indonesia Eximbank with credit limit amounting to Rp232,800,000 that used to finance the construction of PLTG Borang 2 x 30 MW.

The validity of the agreement is effective from January 17, 2012 to January 17, 2018 with fixed interest rate of 9% for the first year, second year until the loan matures at JIBOR for 3 months + 2%.

The Company is required to comply with restriction to aintain DER maximum of 3 times.

As of December 31, 2018, Perusahaan is compliance with the terms and conditions of the loans.

The outstanding balance as of December 31, 2018 and 2017 amounted to nil and Rp11,085,714, respectively.

Payments made for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounted to Rp11,085,714 and Rp44,342,857, respectively.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

36. Modal Saham

36. Share Capital

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut: *The composition of shareholders as of December 31, 2018 are as follows:*

	Total Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Total Modal Saham/ Total Capital Shares Rp	
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)				<i>Preferred Stock (Series A Dwiwarna)</i>
Pemerintah Republik Indonesia	1	0.00	0.1	<i>Indonesian Government</i>
Saham Biasa (Seri B)				<i>Common Stock (Series B)</i>
Pemerintah Republik Indonesia	5,834,850,000	65.05	583,485,000	<i>Indonesian Government</i>
Direksi				<i>Directors:</i>
Novel Arsyad (Direktur)	856,700	0.01	85,670	<i>Novel Arsyad (Director)</i>
Agung Budi Waskito (Direktur)	7,200	0.00	720	<i>Agung Budi Waskito (Director)</i>
Karyawan	57,550,181	0.64	5,755,018	<i>Employees</i>
Masyarakat	3,076,687,290	34.30	307,668,729	<i>Public</i>
Total	8,969,951,372	100.00	896,995,137	Total

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut: *The composition of shareholders as of December 31, 2017 are as follows:*

	Total Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Total Modal Saham/ Total Capital Shares Rp	
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)				<i>Preferred Stock (Series A Dwiwarna)</i>
Pemerintah Republik Indonesia	1	0.00	0.1	<i>Indonesian Government</i>
Saham Biasa (Seri B)				<i>Common Stock (Series B)</i>
Pemerintah Republik Indonesia	5,834,850,000	65.05	583,485,000	<i>Indonesian Government</i>
Direksi				<i>Directors:</i>
Novel Arsyad (Direktur)	718,124	0.01	71,812	<i>Novel Arsyad (Director)</i>
Agung Budi Waskito (Direktur)	80,935	0.00	8,094	<i>Agung Budi Waskito (Director)</i>
Karyawan	65,626,882	0.64	6,562,688	<i>Employees</i>
Masyarakat	3,068,675,430	34.30	306,867,543	<i>Public</i>
Total	8,969,951,372	100.00	896,995,137	Total

37. Modal Saham yang Diperoleh Kembali

37. Treasury Stock

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 37 ("UU No.40 Tahun 2007) dan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.KEP-401/BL/2008 Peraturan XI.B.3 : Pembelian Kembali Saham Emiten atau Perseroan Publik Dalam Kondisi Pasar yang berpontesi Krisis, Perusahaan memutuskan untuk melaksanakan Program Pembelian Kembali Saham (*Buyback*).

Pursuant to Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company in Article 37 ("Law No.40 Year 2007) and Attachment of Decree of Chairman of Supervisory agency for capital market and financial institution No.KEP- 401/BL/2008 of Regulation XI.B.3:Emiten Sock Repurchasor Public Company. In crisis potencial market condition, the company shall decide to implement Stock Buyback Program.

Saham-saham yang diperoleh kembali tersebut dicatat dengan menggunakan metode nilai nominal (*par value method*) dan disajikan sebagai pengurang akun-akun sebagai berikut:

Reacquired shares shall be recorded using par value method and preserved as the deduction of accounts set forth as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Total Saham/ Number of Shares	Nilai perolehan kembali/ Buyback value Rp	
Periode <i>Buy Back</i>			<i>Buyback Period</i>
Tanggal 3 September 2013			September 3, 2013 until
Sampai 2 Desember 2013	6,018,500	10,267,070	December 2, 2013
<i>Buyback Cost</i>	--	5,040	<i>Buyback Cost</i>
Total	6,018,500	10,272,110	Total

38. Tambahan Modal Disetor

38. Additional Paid In Capital

	2018 Rp	2017 Rp	
Agio Penawaran Umum Saham	590,769,280	590,769,280	<i>Initial Public Offering Premium</i>
Agio Penawaran Terbatas 1	5,867,110,854	5,867,110,854	<i>Right Issue Premium</i>
Opsi Saham (Esop/Msop) Tahap 1	9,829,400	9,829,400	<i>Stage 1 of ESOP/MSOP</i>
Opsi Saham (Esop/Msop) Tahap 2	8,281,950	8,281,950	<i>Stage 2 of ESOP/MSOP</i>
Agio Opsi ESOP/MSOP			<i>Premium From ESOP/MSOP</i>
Tahap 1 Dan 2	63,381,648	63,381,648	<i>Stage 1 and 2</i>
Biaya Emisi Saham	(15,798,010)	(15,798,010)	<i>Share Issuance Cost</i>
Biaya Emisi Penawaran Terbatas 1	(41,004,523)	(41,004,523)	<i>Share Issuance Cost</i>
Agio Penjualan Saham			<i>Premium From Buy Back</i>
yang Diperoleh Kembali	96,962,538	96,962,538	<i>Treasury Stocks</i>
Akuisisi			<i>Acquisition of</i>
Wika Bitumen	(37,568,017)	(37,568,017)	<i>Wika Bitumen</i>
Selisih Aset dan Liabilitas			<i>Difference of Tax Amnesty</i>
Pengampunan Pajak	13,755,557	13,755,557	<i>Assets and Liabilities</i>
Total	6,555,720,677	6,555,720,677	Total

Opsi Pembelian Saham untuk Manajemen dan Karyawan (ESOP/MSOP)

Pelaksanaan ESOP/MSOP Perusahaan mengacu pada Surat Perusahaan ke Bursa Efek Indonesia No.PU.01.09/A.DIR.0421/2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Laporan Rencana Pelaksanaan ESOP/MSOP Perusahaan.

Pelaksanaan Program ESOP/MSOP dilaksanakan dengan menerbitkan Hak Opsi dalam 2 tahap dengan jumlah Hak Opsi yang diterbitkan adalah masing-masing sebanyak 153.846.000 lembar saham seri B setiap tahap dengan harga pelaksanaan ESOP/MSOP per saham Rp322,74.

Hak Opsi Tahap Pertama dan Kedua dapat digunakan untuk membeli saham Seri B baru Perusahaan setelah melewati masa tunggu selama 1 tahun. Hak Opsi yang diberikan dapat digunakan pada Periode Pelaksanaan yang telah ditetapkan terhitung tanggal 29 Oktober 2007 dan telah berakhir pada 30 hari bursa dimulai sejak 13 Mei 2013 pada Tahap Pertama.

Shares Purchase Optional Plan for Management and Employees

Implementation of the Company's ESOP/MSOP refers to the Letter to the Indonesia Stock Exchange No.PU.01.09/A.DIR.0421/2008 dated May 7, 2008 on the Implementation Plan Report of the Company's ESOP/MSOP.

Implementation ESOP/MSOP Program was implemented with Option Rights issue in 2 stages with the number of Stock Option issued were 153,846,000 series B shares with each of ESOP/MSOP value of Rp322.74 per share.

The First and Second Phase Option Rights may be used to purchase the Company's new Series B Shares after a one year waiting period. The option rights granted may be used in the Period of Implementation as of October 29, 2007 and expired on 30 trading days beginning on May 13, 2013 in the First Phase.

Tahap Kedua pelaksanaan ditetapkan tanggal 29 Oktober 2008 dan telah berakhir pada 30 hari bursa sejak tanggal 14 Mei 2014.

The second phase of implementation is set on October 29, 2008 and has ended on 30 trading days since May 14, 2014.

Saham yang didistribusikan berasal dari saham dalam portofolio, dan bukan merupakan saham yang telah diterbitkan atau dibeli kembali oleh Perusahaan.

Shares distributed are derived from shares in the portfolio, and are not shares that have been issued or buyback by the Company.

Tambahan Modal Disetor yang Berasal dari Opsi Saham (ESOP/MSOP)

Beban kompensasi ditentukan berdasarkan nilai wajar pada tanggal pemberian opsi, Nilai wajar setiap opsi yang diberikan ditentukan dengan menggunakan metode penentuan harga opsi dengan asumsi sebagai berikut:

Additional Paid-In Capital from Stock Option (ESOP / MSOP)

The burden of compensation is determined based on fair value at the date of granting options, fair value of each option granted is determined using option pricing methods with the following assumptions:

	Tahap I/ Stage 1	Tahap III/ Stage II	
Prakiraan Dividen	16.00%	13.01%	<i>Estimated of Dividend</i>
Ketidakstabilan Harga Yang Diharapkan	53.62%	52.30%	<i>Expected Volatility</i>
Suku Bunga Bebas Resiko Yang Diharapkan	9.09%	11.49%	<i>Expected Risk - Free Interest Rate</i>
Periode Opsi Yang Diharapkan	5 Tahun / Year	5 Tahun / Year	<i>Expected Lives</i>

39. Surat Berharga Perpetual Tahap I

39. Perpetual Securities Phase I

Perusahaan menerbitkan surat berharga perpetual tahap 1 tahun 2018 sebesar Rp600 Miliar (nilai penuh) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5 % per tahun. Surat berharga Perpetual tahap I tahun 2018, yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2018, tidak mempunyai batas waktu atau sampai dengan dilaksanakannya Opsi Tebus yaitu pada hari ulang tahun ke-3 atau ke-5 sejak tanggal penerbitan.

The Company issued Perpetual Securities Phase I Year 2018 amounting to Rp600 Billion (full amount) with a fixed interest rate of 10.5% per annum. The Perpetual Securities Phase I Year 2018, was issued on December 28, 2018 with no time limit or until the buy option is exercised on the 3rd or 5th anniversary since the date of issue.

	2018 Rp	2017 Rp	
Surat Berharga Perpetual	600,000,000	--	Perpetual Securities
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Biaya Langsung yang Belum Diamortisasi	(2,400,000)		<i>Unamortized Related Cost</i>
Surat Berharga Perpetual Neto	597,600,000	--	Perpetual Securities Net

40. Dividen

40. Dividends

Pembagian laba Grup serta penggunaan saldo laba sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasi telah diputuskan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai berikut:

Dividends and appropriation of retained earnings before reissuance the consolidated financial statements of the Group, which were decided during the General Meeting of Shareholders (RUPS), are as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018 Rp	2017 Rp	
Cadangan Wajib	--	101,182,772	Reserve Fund
Laba Ditahan	961,689,213	607,096,598	Retained Earnings
Dividen Tunai	240,413,755	303,548,348	Cash Dividends

Data per 31 Desember 2018, merupakan penggunaan laba bersih tahun 2017, sedangkan data per 31 Desember 2017 merupakan penggunaan laba bersih tahun 2016.

Data on December 31, 2018 is using the profit for the year 2017, while the data on December 31, 2017 is using the profit for the year 2016.

41. Laba Bersih per Saham Dasar

41. Basic Earnings per Share

	2018 Rp	2017 Rp	
Laba yang Digunakan Dalam Perhitungan	1,730,256,243	1,202,069,175	Earnings Used in Calculation
Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham	8,963,932,872	8,963,932,872	Weighted Average Number of Shares
Laba Bersih per Saham (nilai penuh)	193.02	134.10	Net Earnings per Share (full amount)

42. Kepentingan Non Pengendali

42. Non Controlling Interest

Mutasi saldo kepentingan non pengendali untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Movement on non controlling interest for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

	2018 Rp	2017 Rp	
Saldo Awal Tahun	1,998,308,265	1,293,124,291	Balance at Beginning of Year
Laba Bersih Tahun Berjalan	343,043,621	154,046,314	Profit For The Year
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	10,381,596	(4,264,653)	Other Comprehensive Income For The Year
Dividen	(62,734,241)	(41,104,716)	Dividends
Kepentingan Nonpengendali Pada Pendirian Entitas Anak	--	70,487,450	Noncontrolling Interests of Newly Established Subsidiaries
Pada Akuisisi Entitas Anak	--	9,273,112	Newly Acquired Subsidiary
Perubahan Ekuitas Entitas Anak	122,701,023	516,746,467	Changes In Equity of Subsidiaries
Total	2,411,700,264	1,998,308,265	Total

Saldo kepentingan non pengendali berdasarkan entitas anak per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Non controlling interest balance based on subsidiaries as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018 Rp	2017 Rp
Wika Beton	1,242,340,701	1,224,169,213
Wika Gedung	670,312,600	521,468,257
Wika Realty	403,235,135	167,080,633
Serang Panimbang	71,570,329	70,563,538
Wika Rekon	13,369,959	9,314,587
Wika Ikon	10,840,498	5,422,527
Wika Bitumen	31,042	289,510
Total	2,411,700,264	1,998,308,265

43. Pendapatan Neto

43. Net Revenues

	2018 Rp	2017 Rp	
Infrastruktur dan Gedung	20,599,606,700	17,120,202,886	Infrastructure and Building
Energi dan Industrial Plant	5,122,920,493	3,962,674,299	Energy and Industrial Plant
Industri Beton	4,124,881,774	3,624,747,238	Precast
Realty dan Properti	1,310,784,531	1,468,778,603	Realty and Property
Total	31,158,193,498	26,176,403,026	Total

Rincian pemberi kerja dengan nilai kontribusi pendapatan melebihi 10% dari pendapatan usaha Grup untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Details of the project owners with contribution value exceeding 10% of the Group's revenues for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

	2018 Rp	2017 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 50)/ Related Parties (Note 50)	12,964,544,159	12,614,447,395
Pihak Ketiga/ Third Parties		
PT Jakarta Propertindo	2,343,229,182	2,921,815,045
PT DNC Engineering Company	896,904,901	497,103,012
ZEESM, Pemerintah RDTL	682,827,135	618,533,001
AADL Ministry of Housing Algeria	565,967,348	162,719,627
PT Trans Cibubur Property	525,785,221	125,581,664
Koperasi Jasa Marga Bakti Pusat	453,999,156	82,153,294
Pemprov Jabar	404,830,802	--
PT Graha Tunas Selaras	387,534,344	312,619,782
Tamansari Urbano	325,198,464	210,286,148
PPLH UNIVERSITAS SAMRATULANGI	299,165,412	89,215,587
PT Surya Bumimegah Sejahtera	256,232,881	377,832,029
Kementerian Perhubungan dan Perumahan Rakyat	228,243,598	113,297,492
PT Natpac Graha Arthamas	204,471,802	--
Marubeni Corporation	195,115,025	207,598,842
Badan Siber dan Sandi Negara	183,632,727	--
PT. Kukuh Mandiri Lestari	179,116,971	3,150,341
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	169,045,900	--
RSUD Cengkareng Provinsi DKI Jakarta	146,979,160	--

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018 Rp	2017 Rp
Bendahara SNVT PJPA Pemali Juana	139,967,185	57,414,660
PT Industri Nabati Lestari	129,729,450	236,771,489
PPK Bendungan III, SNVT Pembangunan Bendungan BBWS	126,123,843	--
PT Alfa Retail Indonesia	124,042,936	7,162,324
PT Cempaka Sinergy Realty	114,484,128	48,134,372
PT Maju Gemilang Serpong	105,957,155	50,089,168
PT. Marga Sarana Jabar	100,169,858	--
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100.000.000)/ Others (each below Rp 100,000,000)	8,904,894,753	7,440,477,753
Total	18,193,649,337	13,561,955,630

44. Beban Pokok Pendapatan

44. Cost of Revenues

	2018 Rp	2017 Rp	
Infrastruktur dan Gedung	18,597,468,914	14,145,757,917	Infrastructure and Building
Energi dan Industrial Plant	4,606,987,897	3,586,793,131	Energy and Industrial Plant
Industri	3,182,546,106	4,399,745,067	Industry
Realti dan Properti	1,166,463,431	1,167,872,823	Realty and Property
Total	27,553,466,348	23,300,168,938	Total

Rincian beban pokok pendapatan Grup untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

Details of Group's cost of revenues for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

	2018 Rp	2017 Rp	
Infrastruktur dan Gedung			Infrastructure and Building
Biaya Material	5,184,778,761	4,680,938,689	Material Costs
Subkontraktor	7,353,714,473	5,871,415,464	Subcontractor
Biaya Tidak Langsung	2,123,666,182	1,225,600,269	Indirect Costs
Biaya Upah	2,178,421,612	1,646,477,684	Wages
Biaya Peralatan	1,172,298,985	708,251,368	Equipment Costs
Total Infrastruktur dan Gedung	18,012,880,013	14,132,683,474	Total Infrastructure and Building
Energi dan Industrial Plant			Energy and Industrial Plant
Biaya Material	2,029,819,679	1,981,929,318	Material Costs
Subkontraktor	1,689,336,896	892,532,265	Subcontractors
Biaya Tidak Langsung	379,988,373	292,497,736	Indirect Costs
Biaya Upah	343,852,774	269,258,386	Wages
Biaya Peralatan	163,990,175	150,575,426	Equipment Costs
Total Energi dan Industrial Plant	4,606,987,897	3,586,793,131	Total Energy and Industrial Plant
Realti dan Properti	1,166,463,431	1,167,872,823	Realty and Property
Biaya Konstruksi Atas Proyek Konsesi	584,588,901	13,074,442	Construction of Cost of Concession Project
Industri Beton			Precast
Persediaan Awal			Finished Goods at
Barang Jadi	727,327,075	507,596,208	Beginning of the Year
Produksi Barang Jadi	2,189,560,304	3,242,159,269	Finished Goods Production
Barang Tersedia Untuk Dijual	2,916,887,379	3,749,755,477	Goods Available for Sale

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018 Rp	2017 Rp	
Persediaan Akhir			Finished Goods at
Barang Jadi	(528,886,752)	(727,327,075)	End of the Year
Harga Pokok Penjualan	2,388,000,627	3,022,428,402	Cost of Goods Sold
Biaya Pelaksanaan Proyek	655,889,568	1,046,246,392	Project Implementation Costs
Beban Material	69,094,782	143,627,621	Material Costs
Beban Upah	29,446,561	21,019,382	Direct Labour Costs
Total Industri Beton	3,142,431,538	4,233,321,797	Total Precast
Material Industri	40,114,568	166,423,271	Material Industry
Total	27,553,466,348	23,300,168,938	Total

45. Beban Penjualan

45. Selling Expenses

Beban penjualan merupakan beban-beban sehubungan dengan penawaran jasa konstruksi dan penjualan produk diversifikasi lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp10.445.343 dan Rp9.958.720.

Selling expenses are expenses relating to the tendering of construction services and sale of other diversified products for the years ended December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp10,445,343 and Rp9,958,720, respectively.

46. Beban Umum dan Administrasi

46. General and Administrative Expenses

	2018 Rp	2017 Rp	
Personalia	550,386,709	528,534,495	Personnel
Fasilitas kantor	154,484,945	72,428,906	Office facilities
Penelitian dan pengembangan	48,249,064	34,515,402	Research and development
Informatika	14,468,275	9,690,820	Informatics
Administrasi Bank	7,710,509	21,544,531	Bank Administration
Total	775,299,502	666,714,154	Total

47. Pendapatan (Beban) Lain-lain

47. Other Income (Expenses)

	2018 Rp	2017 Rp	
Pendapatan			Income
Selisih Nilai Wajar Properti			Fair Value Difference
Investasi	384,873,792	61,907,287	Investment Property
Pendapatan Bunga Bank	313,457,225	241,823,299	Bank Interest Income
Pendapatan Bunga Pinjaman	310,212,300	79,931,001	Interest Income from Loan
Laba Selisih Kurs	38,978,341	766,143	Gain in Foreign Exchange
Keuntungan Pembelian dengan Diskon	--	32,306,608	Gain on Purchase Discounts
Lain-lain - Neto	74,676,009	--	Others - Net
Sub Total	1,122,197,667	416,734,338	Sub Total
Beban			Expenses
Beban Penurunan Nilai Piutang	(106,482,566)	(106,899,705)	Impairment of Receivables
Lain-lain - Neto	--	(188,608,188)	Others - Net
Sub Total	(106,482,566)	(295,507,893)	Sub Total
Total	1,015,715,101	121,226,445	Total

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

48. Aset Dan Liabilitas Moneter Dalam Mata Uang Asing

48. Monetary Assets And Liabilities Denominated In Foreign Currencies

Pada 31 Desember 2018 dan 2017, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

As at December 31, 2018 and 2017, the Group has monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as follow:

	2018		2017		
	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Setara Rupiah/ Rupiah Equivalent	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Setara Rupiah/ Rupiah Equivalent	
Aset					Assets
Kas dan Setara Kas					Cash and Cash Equivalents
USD	25,882	374,797,077	44,361	600,997,780	USD
EUR	14	231,101	164	2,648,170	EUR
JPY	64,392	8,443,077	2	510,425	JPY
DZD	138,824	16,411,805	16,916	2,017,064	DZD
MYR	29	100,486	11	38,100	MYR
SGD	10	108,905	10	105,297	SGD
Piutang Usaha					Trade Account Receivables
USD	17,816	257,991,444	3,818	51,721,893	USD
Dinar AlGeria	355,999	42,086,212			Algeria Dinar
MYR	5,611	19,598,754	5,353	17,854,698	MYR
SAR		--	200	722,636	SAR
Piutang Retensi					Retention Receivables
USD	19,690	285,124,463	2,626	35,575,955	USD
MYR	154	538,023	--	--	MYR
		<u>1,004,893,324</u>		<u>712,192,018</u>	
Liabilitas					Liabilities
Pinjaman Jangka Panjang					Long Term Loan
USD		--	1,821	24,673,686	USD
Aset Bersih Dalam Mata Uang Asing		<u>1,004,893,324</u>		<u>687,518,332</u>	Net Assets in Foreign Currencies

49. Informasi Segmen

49. Segment Information

	2018 (Dalam Jutaan / in Million)						
	Infrastruktur dan Gedung/ Infrastructure and Building Rp	Energi dan Industri/ Energy and Industrial Plant Rp	Industri/ Industry Rp	Realiti dan Properti/ Realty and Property Rp	Eliminasi/ Elimination Rp	Konsolidasian/ Consolidation Rp	
Penjualan	21,788,100	5,280,718	6,935,063	1,350,320	(4,196,008)	31,158,193	Sales
Beban Pokok Penjualan	(19,684,431)	(4,823,732)	(6,031,952)	(1,209,359)	4,196,008	(27,553,466)	Cost of Goods Sold
Laba Bruto	2,103,669	456,986	903,111	140,961	--	3,604,727	Gross Profit
Beban Usaha	(475,408)	(60,094)	(169,916)	(80,327)	--	(785,745)	General Expenses
Laba Ventura Bersama	468,602	64,428	--	--	--	533,031	Profit Joint Ventures
Bagian Rugi dari Entitas Asosiasi	--	(303,235)	--	(6,394)	--	(309,629)	Share in Gain (Loss) of Associates
Beban dari pendanaan	(581,363)	(208,336)	(120,833)	(61,995)	--	(972,527)	Finance Costs
Pendapatan bunga	261,576	906	920	50,055	--	313,457	Interest Income
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(226,848)	(126,237)	(20,929)	349,329	--	(24,685)	Other Income (Expenses)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1,550,227	(175,579)	592,351	391,629	--	2,358,629	Profit Before Income Tax
Penghasilan (Beban) Pajak							Income Tax (Expense)
Pajak Tidak Final	(66,160)	--	(129,534)	(7,086)	--	(202,780)	Non Final Tax
Pajak Tangguhan	(35)	--	12,370	(94,884)	--	(82,549)	Deferred Tax
Laba (Rugi) Bersih	<u>1,484,033</u>	<u>(175,579)</u>	<u>475,187</u>	<u>289,659</u>	<u>--</u>	<u>2,073,300</u>	Net Income (Loss)
Informasi Lainnya							Other Information
Aset Segmen	43,530,554	6,389,557	12,082,572	8,565,278	(13,878,949)	56,689,013	Segment Assets
Investasi pada Ventura Bersama	247,453	1,186,208	--	379,504	--	1,813,165	Investments in Joint Venture
Investasi pada Perusahaan Asosiasi	--	143,463	--	584,360	--	727,823	Investments in Associates
Jumlah Aset Segmen	<u>43,778,007</u>	<u>7,719,228</u>	<u>12,082,572</u>	<u>9,529,142</u>	<u>(13,878,949)</u>	<u>59,230,001</u>	Total Segment Assets
Jumlah Liabilitas Segmen	<u>40,758,200</u>	<u>6,526,682</u>	<u>11,577,781</u>	<u>8,275,620</u>	<u>(25,123,597)</u>	<u>42,014,686</u>	Total Segment Liabilities

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

2017 (Dalam Jutaan / in Million)						
Infrastruktur dan Gedung/ Infrastructure and Building	Energi dan Industrial Plant/ Energy and Industrial Plant	Industri/ Industry	Realti dan Properti/ Realty and Property	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasian/ Consolidation	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Penjualan	17,388,041	4,024,994	5,006,506	1,511,382	(1,754,520)	26,176,403
Beban Pokok Penjualan	(15,825,809)	(3,593,313)	(4,413,220)	(1,167,873)	1,700,046	(23,300,169)
Laba Bruto	1,562,232	431,681	593,286	343,509	(54,474)	2,876,234
Beban Usaha	(383,030)	(109,753)	(162,212)	(64,281)	42,603	(676,673)
Laba Ventura Bersama	425,500	146,750	450	--	--	572,700
Bagian Laba (Rugi) dari Entitas Asosiasi	--	(123,564)	874	(80)	(874)	(123,644)
Beban dari pendanaan	(345,792)	(150,927)	(102,083)	(79,171)	--	(677,973)
Pendapatan bunga	237,632	291	3,900	--	--	241,823
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(245,967)	(134,292)	(29,710)	42,300	(382,408)	(750,077)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1,250,575	60,186	304,505	242,277	(395,153)	1,462,390
Penghasilan (Beban) Pajak	--	--	(95,072)	(6,787)	--	(113,767)
Pajak Tidak Final	(11,908)	--	22,583	(12,974)	--	7,491
Pajak Tangguhan	(2,118)	--	--	--	--	--
Laba (Rugi) Bersih	1,236,549	60,186	232,016	222,516	(395,153)	1,356,114
Informasi Lainnya						
Aset Segmen	28,594,995	4,908,675	8,114,797	6,189,723	(5,333,936)	42,474,254
Investasi pada Ventura Bersama	1,476,388	1,307,188	29,025	--	--	2,812,601
Investasi pada Perusahaan Asosiasi	486	340,583	27,756	104,345	(76,251)	396,919
Jumlah Aset Segmen	30,071,869	6,556,446	8,171,578	6,294,068	(5,410,187)	45,683,774
Jumlah Liabilitas Segmen	17,571,818	6,336,856	5,199,486	3,737,301	(1,793,511)	31,051,950

1. Infrastruktur dan Gedung terdiri dari bidang usaha jasa konstruksi sipil umum yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan dermaga, bandara, bendungan, irigasi, dan gedung termasuk jasa konstruksi atas konsesi tol.
2. Energi dan Industrial Plant meliputi bidang usaha jasa konstruksi bidang energi dan EPC serta jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik. Pada segmen ini termasuk investasi pada sektor kelistrikan yang mayoritas pendanaan dan operasinya dikendalikan oleh Perusahaan.
3. Industri terdiri dari usaha beton pracetak seperti tiang pancang, girder, bantalan rel kereta api, konstruksi baja, spare part otomotif, produk konversi energi dan industri pertambangan.
4. Realty dan properti terdiri dari usaha landed housing dan high rise building seperti apartemen serta pengelolaan gedung dan kondotel.

1. Infrastructure and Building consists of civil construction services such as general construction and infrastructure example roads, bridges, harbours, airports, dams, irrigation, and building include construction service on toll concession.
2. Energy and Industrial Plant consists of energy and EPC construction, field operations and maintenance services of the power plant. In this segment includes investments in the electricity sector with majority financing and its operation controlled by the company.
3. Industry consisting of a concrete precast of piles, a girder, rail pad, steel construction, automotive spare parts, energy conversion product and mining industry.
4. Realty and property consists of the business landed housing and high rise such as an apartment building and building and condotel management.

Segmen Geografis

Data berikut menunjukkan distribusi dari seluruh pendapatan, laba bersih dan aset perusahaan berdasarkan geografis:

Geographical Segment

The following data shows the distribution of total revenue, profit and assets by geography:

	Nilai Tercatat Aset Segmen/ Carrying Amount of Segment Assets		Pendapatan/ Revenues		Laba Bersih Tahun Berjalan/ Profit for the Year		
	2018 Rp	2017 Rp	2018 Rp	2017 Rp	2018 Rp	2017 Rp	
Indonesia	57,641,517	44,538,970	29,611,735	25,097,164	1,982,473	1,302,993	Indonesia
Luar negeri	1,588,484	1,144,804	1,546,458	1,079,239	90,827	53,122	Overseas
Total	59,230,001	45,683,774	31,158,193	26,176,403	2,073,300	1,356,115	Total

50. Sifat Dan Transaksi Pihak Berelasi

**50. Nature Of Relationship and Transactions
with Related Parties**

Sifat pihak berelasi

1. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan adalah pemegang saham utama Perusahaan;
2. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia serta entitas di mana Kementerian Keuangan Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan: Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Grup;
4. Entitas yang merupakan perusahaan asosiasi dari Grup;
5. Entitas yang merupakan ventura bersama dari Grup;
6. Manajemen kunci yang meliputi anggota dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan; dan
7. Dana Pensiun Wijaya Karya adalah entitas yang didirikan oleh Perusahaan untuk mengelola program manfaat imbalan dan iuran pasti Perusahaan.

Nature of Relationship

1. The Government of the Republic of Indonesia represented by Ministry of Finance, is the majority stockholder of the Company;
2. All entities that are owned and controlled by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia including entities where the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia has significant influence: Stateowned Enterprise (SOE);
3. Related parties which main shareholder is the same with Group;
4. The entities which part of the investment in associates;
5. The entities which part of joint ventures;
6. Key management personnel includes Commissioners and Directors of the Company; and
7. Dana Pensiun Wijaya Karya is an entity cofounded by the Company to manage the Company's defined benefit and contribution pension plan.

Ikhtisar pihak-pihak yang berelasi dengan Grup adalah sebagai berikut:

The summary of parties having the special relations with the Group is as follows:

Pihak berelasi / Related Parties	Sifat Pihak Berelasi / The Nature of Relationship	Transaksi / Transaction
Bank Indonesia	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Rekening Koran, Pinjaman Dana / Account, Loan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Rekening Koran, Pinjaman Dana / Account, Loan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Rekening Koran, Pinjaman Dana / Account, Loan
PT Bank Syariah Mandiri	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Rekening Koran, Pinjaman Dana / Account, Loan
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Rekening Koran, Pinjaman Dana / Account, Loan
PT Bank BRI Syariah	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Rekening Koran / Account
PT Bank BNI Syariah	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Rekening Koran / Account
PT Hutama Karya (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Antam (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Angkasa Pura Property	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT PLN (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT PP (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Istaka Karya (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
BPJS Kesehatan	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Hutama Karya Infrastruktur	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Waskita Beton Precast Tbk	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Boma Bisma Indra (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Yodya Karya (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Pihak berelasi / Related Parties	Sifat Pihak Berelasi / The Nature of Relationship	Transaksi / Transaction
PT Indah Karya (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Citra Marga Lintas Jabar	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Marga Sarana Jabar	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Kereta Cepat Indonesia China	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Angkasa Pura II (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Kawasan Berikat Nusantara	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Pindad (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Semen Tonasa Indonesia (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Bhandha Ghara Rekasa (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Pertamina (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PLTD Ambon (Sewa Mesin)	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
Koperasi Jasa Marga Indonesia	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Industri Nabati Lestari	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Jasamarga Kunciran Cengkareng	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Nindya Karya (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Indonesia Power	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Semen Padang	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Jakarta River City	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Makassar Coastal City	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Wijaya Karunia Realindo	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
Koperasi Karyawan WIKA	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services
Koperasi Karyawan Beton Makmur	Kepemilikan Sama Terikat / Common Ownership	Jasa Konstruksi / Construction Services

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

Transactions with Related Parties

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties, including the following:

	Total		Persentase terhadap Total Aset yang Terkait/ Percentage to Total Related Assets	
	2018 Rp	2017 Rp	2018 %	2017 %
Bank / Banks				
Rupiah				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4,118,255,861	2,814,311,318	6.95	6.16
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,701,884,952	1,568,670,389	2.87	3.43
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,051,872,633	1,501,466,389	1.78	3.29
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,040,410,563	619,056,693	1.76	1.36
PT Bank Syariah Mandiri	1,622,972	21,215,317	0.00	0.05
PT Bank BRI Syariah	964,971	953,646	0.00	0.00
PT Bank BNI Syariah	53,242	53,296	0.00	0.00
Mata Uang Asing / Foreign Currencies				
USD				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	237,568,518	431,819,457	0.40	0.95
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	42,766,218	108,957,512	0.07	0.24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12,168,336	1,740,952	0.02	0.00
PT Bank Syariah Mandiri	2,240,603	2,095,566	0.00	0.00
SGD				
PT Bank BNI (Persero) Tbk	108,905	105,297	0.00	0.00
EURO				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	185,991	2,603,968	0.00	0.01

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Total		Persentase terhadap Total Aset yang Terkait/ Percentage to Total Related Assets	
	2018 Rp	2017 Rp	2018 %	2017 %
JPY				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8,128,145	219,871	0.01	0.00
PT Bank BRI (Persero) Tbk	24,583	66,470	0.00	0.00
	<u>8,218,256,493</u>	<u>7,073,336,141</u>	<u>13.54</u>	<u>15.48</u>
Deposito Berjangka / Time Deposits				
Rupiah				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,185,000,000	463,000,000	2.00	1.01
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	576,145,520	953,697,500	0.97	2.09
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	423,000,000	471,000,000	0.71	1.03
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	365,000,000	495,000,000	0.62	1.08
Mata Uang Asing / Foreign Currencies				
USD				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14,481,000	13,548,000	0.02	0.03
	<u>2,563,626,520</u>	<u>2,396,245,500</u>	<u>4.33</u>	<u>5.25</u>
Total	<u>10,781,883,013</u>	<u>9,469,581,641</u>	<u>17.87</u>	<u>20.73</u>
Piutang Usaha / Trade Receivables				
PT Makasar Coastal City	542,076,455	597,531,000	0.92	1.31
PT Jakarta River City	412,878,473	843,980,800	0.70	1.85
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	273,307,999	35,250,766	0.46	0.08
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	244,607,929	104,370,287	0.41	0.23
PT Hutama Karya (Persero)	172,912,519	176,702,000	0.29	0.39
KSO Angkasa Pura Property - WR	165,882,952	135,187,146	0.28	0.30
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	132,753,263	145,426,541	0.22	0.32
KSO PT Wika Gedung - Mahoni	93,440,724	64,025,697	0.16	0.14
PT Hutama Karya Infrastruktur	79,267,631	23,201,542	0.13	0.05
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	68,589,095	37,888,819	0.12	0.08
PT Pelabuhan Indonesia	51,169,913	--	0.09	--
PT Kurnia Realty Jaya	50,842,353	--	0.09	--
KSO PT Wika Gedung - Mutiara Masyur	37,939,273	44,697,273	0.06	0.10
PT Pupuk Sriwijaya	36,527,085	--	0.06	--
MCC-WIKA-NINDYA-WASKITA	25,798,936	--	0.04	--
PT Indah Karya (Persero)	25,057,717	32,557,717	0.04	0.07
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	24,746,936	--	0.04	--
CRBC - WIKA - PP JO	23,985,803	24,811,100	0.04	0.05
WIKA - Bahagia Bangunnusa KSO	22,475,118	--	0.04	--
PT Istaka Karya (Persero)	20,634,055	19,891,412	0.03	0.04
PT Nindya Karya	20,505,538	--	0.03	--
PT Boma Bisma Indra (Persero)	18,013,092	20,674,274	0.03	0.05
PT Pelindo III (Persero)	17,586,256	14,699,317	0.03	0.03
WIKA-Penta Ocean-TOA-Rinkai-PP JO	16,668,373	--	0.03	--
WIKA-Lestari KSO	14,474,070	--	0.02	--
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	14,426,310	11,699,889	0.02	0.03
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	11,937,408	--	0.02	--
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	11,016,420	69,349,941	0.02	0.15
PT WIKA BETON - EMRAIL KSO	9,676,874	14,400,707	0.02	0.03
PT Pindad Enginerring	9,352,500	--	0.02	--
WIKA - Abdi Mulia KSO	8,878,740	17,352,920	0.01	0.04
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)	830,648	42,089,560	0.00	0.09
PT Pertamina (Persero)	127,367	37,184,334	0.00	0.08
Wijaya - Indulexso KSO	--	95,482,530	--	0.21
PT Citra Marga Lintas Jabar	--	56,016,417	--	0.12
Tokyu - WIKA Joint Operation	--	34,668,927	--	0.08
Konsorsium WIKA-PEN	--	28,418,675	--	0.06

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Total		Persentase terhadap Total Aset yang Terkait/ Percentage to Total Related Assets	
	2018 Rp	2017 Rp	2018 %	2017 %
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	--	26,673,405	--	0.06
WIKI - Sacna JO	--	24,603,741	--	0.05
PT Waskita Beton Precast Tbk	--	24,053,453	--	0.05
PLTD Ambon WIKI AAE MSE	--	19,112,786	--	0.04
BPJS Kesehatan	--	15,030,455	--	0.03
PT Angkasa Pura II (Persero)	--	13,257,372	--	0.03
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	--	12,430,142	--	0.03
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000.000)/ Others (each below Rp10,000,000)	135,379,414	192,811,900	0.23	0.42
Sub Total	2,793,767,239	3,055,532,845	4.72	6.69
Dikurangi/ Less : Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	(48,226,806)	(54,889,729)	(0.08)	(0.12)
Total	2,745,540,433	3,000,643,116	4.49	6.57
Piutang Retensi/ Retention Receivables				
PT Hutama Karya	106,551,618	48,305,494	0.18	0.11
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	103,172,604	--	0.17	--
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	97,016,559	21,153,605	0.16	0.05
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	85,073,775	33,084,246	0.14	0.07
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	40,736,261	42,351,320	0.07	0.09
PT Citra Marga Lintas Jabar	35,634,200	35,058,628	0.06	0.08
PT Pertamina (Persero)	29,206,753	14,521,201	0.05	0.03
PT Transmarga Jatim Pasuruan	16,549,657	--	0.03	--
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)	14,973,889	--	0.03	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13,907,045	13,907,045	0.02	0.03
PT Pupuk Sriwijaya	12,894,261	--	0.02	--
KSO PT Wika Gedung - Mahoni Citra Persada	12,085,089	--	0.02	--
PT KAI Balai Perkeretaapian Wil Jakarta dan Banten	11,412,528	--	0.02	--
PT Bukit Asam	10,025,710	--	0.02	--
KSO PT Wika Gedung - Mutiara Mashyur	8,270,113	--	0.01	--
PT GMF Aeroasia	--	22,225,000	--	0.05
PT Pelindo III (Persero)	--	20,177,337	--	0.04
Markas Besar Polisi Republik Indonesia	--	11,590,477	--	0.03
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5.000.000)/ Others (each below Rp 5,000,000)	80,131,983	86,092,264	0.14	0.19
	677,642,045	348,466,617	1.14	0.76
Dikurangi/ Less : Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses	--	(298,631)	--	(0.00)
Total	677,642,045	348,167,986	1.14	0.76
Tagihan Bruto ke Pemberi Kerja/ Gross Amount Due from Customers				
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	2,023,827,845	2,541,229,910	3.42	5.56
PT Marga Kunciran Cengkareng	1,061,739,726	--	1.79	--
PT Pelindo II (Persero)	351,221,944	--	0.59	--
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	335,039,581	141,860,860	0.57	0.31
PT Pelindo III (Persero)	179,987,936	--	0.30	--
PT Hutama Karya (Persero)	166,032,593	251,038,467	0.28	0.55
PT Antam (Persero) Tbk.	128,932,376	467,865,426	0.22	1.02
PT Pertamina (Persero)	116,688,936	277,019,192	0.20	0.61
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	108,739,226	--	0.18	--
PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	81,711,225	87,554,320	0.14	0.19
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	63,374,589	63,374,589	0.11	0.14
PT Semen Padang	57,885,533	--	0.10	--

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Total		Persentase terhadap Total Aset/Liabilitas yang Terkait/ Percentage to Total Related Assets/Liabilities	
	2018 Rp	2017 Rp	2018 %	2017 %
Koperasi Jasa Marga Indonesia	56,355,401	116,292,391	0.10	0.25
PT Citramarga Lintas Jabar	51,937,214	--	0.09	--
PT Transmarga Jatim Pasuruan	48,915,813	--	0.08	--
PT Indah Karya (Persero)	45,697,143	32,617,517	0.08	0.07
PT Bank Mandiri (Persero)	30,587,794	--	0.05	--
WIKA - CNT JO	24,610,092	--	0.04	--
PT Yodya Karya (Persero)	15,855,310	30,656,283	0.03	0.07
WIKON - Bukaka	15,606,044	--	0.03	--
PT Marga Sarana Jabar	15,348,781	703,658,833	0.03	1.54
PT Kereta Cepat Indonesia Cina	12,517,347	297,823,202	0.02	0.65
PT Patra Jasa	10,621,771	--	0.02	--
PT Pelindo I (Persero)	10,465,870	209,317,389	0.02	0.46
KSO PT Wika Gedung - Mahoni	10,287,043	19,754,916	0.02	0.04
PT Kurnia Realty Jaya	8,914,000	--	0.02	--
PT Pembangunan Perumahan	7,071,425	--	0.01	--
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	5,409,104	315,478,907	0.01	0.69
PT Pelindo IV (Persero)	--	55,182,050	--	0.12
Bank Indonesia	--	15,511,418	--	0.03
Lain-lain/Others (masing-masing di bawah Rp5.000.000)/each below Rp 5,000,000)	520,417,135	200,428,497	0.88	0.44
Total	5,565,798,797	5,826,664,167	9.19	12.75
Piutang Lain-lain / Other Receivables				
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	3,984,331,159	1,211,412,309	6.73	2.65
Lembaga Manajemen Aset Negara	879,274,593	--	1.48	--
PT Jakarta River City	166,405,030	12,000,000	0.28	0.03
PT Wijaya Karunia Realtindo	121,054,473	61,660,690	0.20	0.13
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	101,445,750	--	0.17	--
PT Citra Marga Lintas Jabar	40,641,520	40,641,520	0.07	0.09
PT High Speed Railway Contractor Consortium	22,059,930	--	0.04	--
PT Makassar Coastal City	21,828,850	--	0.04	--
KSO WIKA - Indulexso	16,039,164	8,932,021	0.03	0.02
KSO WIKA Gedung - Mahoni	9,007,095	--	0.02	--
KSO Tokyu - Wika	8,320,201	17,742,827	0.01	0.04
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5.000.000)/ Others (each below Rp5,000,000)	34,573,314	30,001,863	0.06	0.07
Sub Total	5,404,981,079	1,382,391,230	8.92	3.03
Dikurangi Bagian Lancar/ Less Current Portion	(1,420,649,920)	(170,978,921)	(2.40)	(0.37)
Total	3,984,331,159	1,211,412,309	6.52	2.64
Investasi Pada Entitas Asosiasi/ Investment in Associates	727,823,591	396,918,845	1.23	0.87
Investasi Pada Ventura Bersama Investment in Join Venture	1,813,165,802	2,812,600,560	3.06	6.16
Pinjaman Jangka Pendek / Short Term Loan Perusahaan/ the Company	1,101,186,524	2,274,174,952	2.62	7.32
Entitas Anak/ Subsidiaries	561,852,797	700,235,351	1.34	2.26
Total	1,663,039,321	2,974,410,303	3.96	9.58

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Total		Persentase terhadap Total Liabilitas/Pendapatan yang Terkait/ Percentage to Total Related Liabilities/Revenues	
	2018 Rp	2017 Rp	2018 %	2017 %
Pinjaman Jangka Panjang/ Long Term Loan				
Perusahaan/ the Company	--	23,280,000	--	0.07
Entitas Anak/ Subsidiaries	1,027,538,124	495,508,338	2.45	1.60
Total	1,027,538,124	518,788,338	2.45	1.67
Utang Usaha / Trade Payable				
PT Semen Tonasa Indonesia (Persero)	34,704,218	20,989,395	0.08	0.07
Koperasi Karyawan Wika	29,503,814	27,226,727	0.07	0.09
Koperasi Karyawan Beton Makmur Wijaya	25,179,477	35,281,788	0.06	0.11
WIKABeton - Emrail KSO	15,248,939	--	0.04	--
PT Pindad (Persero)	10,578,834	9,215,283	0.03	0.03
PT Bhanda Ghara Rekso (Persero)	--	11,139,518	--	0.04
Lain-lain/ Others (Masing-masing di bawah Rp5.000.000/ Each below Rp5,000,000)	61,382,610	35,329,793	0.15	0.11
Total	176,597,892	139,182,504	0.42	0.45
Utang Lain-lain/ Other Payable				
JAKON WIKABeton	--	16,836,342	--	0.05
KSO WIKABeton - PT Sinar Agung Jaya Lestari	--	42,975	--	0.00
WIKABeton - Istana Putra Agung	--	243	--	0.00
Total	--	16,879,560	--	0.05
Pendapatan / Income				
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	2,785,629,150	2,491,190,146	8.94	9.52
PT PLN (Persero)	2,060,549,536	1,315,657,238	6.61	5.03
PT Antam (Persero) Tbk	1,676,734,405	1,201,527,508	5.38	4.59
PT Hutama Karya (Persero)	1,258,743,353	1,073,540,230	4.04	4.10
PT Marga Kunciran Cengkareng	910,117,177	138,566,340	2.92	0.53
PT Pertamina (Persero)	750,785,781	590,119,243	2.41	2.25
PT Transmarga Jatim Pasuruan	376,658,765	3,250,178	1.21	0.01
PT Pelindo III (Persero)	356,308,772	111,906,026	1.14	0.43
PT Pelindo II (Persero)	351,221,944	3,617,142	1.13	0.01
PT Pupuk Sriwijaya	258,029,963	--	0.83	--
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	224,879,070	774,906,453	0.72	2.96
PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	212,782,314	120,103,434	0.68	0.46
TOKYU-WIKABeton JO	175,208,272	136,260,661	0.56	0.52
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	146,347,240	111,058,788	0.47	0.42
PT Hutama Karya Infrastruktur	141,871,156	47,857,287	0.46	0.18
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	137,083,760	109,231,799	0.44	0.42
PT Kereta Cepat Indonesia China	108,741,762	358,773,169	0.35	1.37
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	108,388,106	--	0.35	--
PT Pelindo IV (Persero)	107,052,472	158,403,553	0.34	0.61
PT Marga Sarana Jabar	100,169,858	686,939,053	0.32	2.62
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	--	447,134,850	--	1.71
KSO WIKABeton - INDULEXCO	--	112,538,630	--	0.43
PT Jakarta River City	--	579,348,000	--	2.21
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100.000.000) Others (Each Below Rp100,000,000)	717,241,303	2,042,517,667	2.30	7.80
Total	12,964,544,159	12,614,447,395	41.61	48.18

51. Masalah Hukum

51. Legal Matters

Proyek LJ Meritus, Surabaya

Perusahaan mempunyai piutang usaha dari PT Gloria Ramayana Interhotel atas Proyek Pembangunan Hotel LJ Meritus senilai Rp16.347.099 dan telah dilakukan penurunan nilai atas piutang usaha tersebut sebesar Rp6.611.656. Untuk penyelesaian piutang tersebut, Perusahaan telah mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta dengan nomor register 430/XI/ARB-BANI/2011, tertanggal 11 November 2011. Pada tanggal 9 Agustus 2012 permohonan tersebut telah dikabulkan oleh BANI dan sudah diajukan pendaftaran untuk dilakukan eksekusi oleh Pengadilan negeri Surabaya pada tanggal 16 Oktober 2012. Pengadilan Negeri Surabaya telah mengeluarkan surat peringatan No.79/Eks/2012/PN.Sby kepada PT Gloria Ramayana untuk mengangsur kewajibannya kepada Perusahaan. Saldo piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.585.601 dan telah dilakukan pencadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha tersebut.

Proyek Adhiwangsa, Surabaya

Perusahaan mempunyai piutang usaha dari PT Adhibaladika (PT Bukit Darmo Property Tbk) atas Proyek Pembangunan Mall dan Apartemen Adhiwangsa senilai Rp44.494.464 dan telah dilakukan penurunan nilai senilai Rp44.494.464. Untuk penyelesaian piutang tersebut, Perusahaan mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan nomor register 478K/Pdt.Sus-Arbt/2013 tanggal 12 September 2013. Pada tanggal 7 November 2013, putusan Mahkamah Agung memenangkan Perusahaan.

Pada 31 Juli 2015, PT Bukit Darmo Property mengajukan gugatan untuk menunda atas putusan Mahkamah Agung.

Pada tanggal 18 Mei 2016 dengan perkara No. 454/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara dengan amar putusan mengabulkan gugatan PT Bukit Dharmo Property untuk sebagian menyatakan tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum, menghukum para tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp100.000.

Pada tanggal 17 Januari 2017 dengan perkara perdata No. 4/PDT/2017/PT DKI pengadilan tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 Mei 2016 No. 454/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL.

LJ Meritus Project, Surabaya

The Company has trade accounts receivable from PT Gloria Ramayana Interhotel on LJ Meritus Hotel Development Project amounting to Rp16,347,099 and has impaired the receivable amounting to Rp6,611,656. For the settlement of the accounts, the Company has applied for arbitration to the Indonesian National Board of Arbitration (BANI) in Jakarta with the register number 430/XI/ARB-BANI/2011, dated November 11, 2011. On August 9, 2012, the petition has been granted by BANI and has been submitted for registration made execute the Surabaya District Court on October 16, 2012. The Surabaya District Court has issued the reminder letter No. 79/Eks/2012/PN.Sby to PT Gloria Ramayana to repay its obligations to the Company. As of December 31, 2018, the outstanding balance of the receivables was Rp7,585,601, which has already been provided with allowance for impairment losses of receivable.

The Adhiwangsa Project, Surabaya

The Company has trade accounts receivable from PT Adhibaladika (PT Bukit Darmo Property Tbk) on The Adhiwangsa Mall and Residences Development Project amounting to Rp44,494,464, and has impaired an amount of Rp44,494,464. For the settlement of the accounts, the Company has applied for arbitration to the Indonesian National Board of Arbitration (BANI) with the register number 478K/Pdt.Sus-Arbt/2013 dated September 12, 2013. On November 7, 2013, there has been a decision from the Supreme Court, which was favorable to the Company.

On July 31, 2015, PT Bukit Darmo Property filed a lawsuit against the decision of the Supreme Court to postpone the verdict.

On May 18, 2016, registered case No. 454/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL, South Jakarta District Court has ruled the case in favor of PT Bukit Dharmo Property, said the defendant has acted against the law, punish the defendants to pay immaterial damages amounting to Rp100,000.

On January 17, 2017 registered case No. 4/PDT/2017/PT DKI High Court DKI Jakarta decided to reverse the South Jakarta District Court of 18 May 2016 No. 454 / Pdt.G / 2015 / PN.JKT.SEL.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Proyek Lucky Square Mall Bandung

Sesuai Perjanjian Penyelesaian Utang Piutang tanggal 21 Juni 2012 antara Perusahaan dengan PT Lucky Sakti telah disepakati nilai piutang Perusahaan senilai Rp11.837.991. Penagihan atas piutang tersebut dilakukan secara bertahap sampai dengan Agustus 2016. Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai piutang dari PT Lucky Sakti sebesar Rp9.448.651 dan telah dilakukan pencadangan kerugian penurunan nilai.

The Lucky Square Mall Project, Bandung

In accordance with Debt Settlement Agreement dated June 21, 2012 between the Company and PT Lucky Sakti, the agreed value of the Company's receivables amounted to Rp11,837,991. The collection of such receivable will be made gradually until August 2016. As of December 31, 2018, the balance of receivable from PT Lucky Sakti amounted to Rp9,448,651 which has already been provided with allowance for impairment losses.

52. Perikatan Dan Kontinjensi Signifikan

52. Significant Commitments And Contingencies

Grup melakukan perikatan kontrak konstruksi dengan berbagai pihak. Kontrak signifikan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

The Group has entered into a construction contract with other parties. Significant contracts as of December 31, 2018 are as follows:

Nama Proyek / Name of Projects	Nilai Kontrak / Contract Value	Pemberi Kerja/ Owner	Masa Pelaksanaan / Period of Time	
			Mulai / Started	Selesai / Ended
PLTG Borang 2 x 30 MW	815,658,407	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Juni 2011	Januari 2019
PLTD Pesanggaran Bali 50 MW	929,856,000	PT Indonesia Power	Oktober 2010	Januari 2019
Upper Cisokan Package 1 Lot 1A dan 1 B	931,840,000	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Oktober 2015	Oktober 2019
Pembangunan PLTMG Rengat 25 Megawatt di Propinsi Riau	293,753,460	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Oktober 2011	Februari 2019
MRT Underground CP 104	941,198,607	PT Mass Rapid Transit Jakarta	Juni 2013	Mei 2018
MRT Underground CP 105	1,001,004,880	PT Mass Rapid Transit Jakarta	Juni 2013	Mei 2018
Mass Rapid Transit Jakarta CP 101 & CP 102	1,030,199,000	PT Mass Rapid Transit	September 2015	April 2018
Bendungan Paseloreng	496,454,000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Mei 2015	April 2018
Pembuatan Jalan DDT Manggarai - Jatinegara	330,242,704	Direktorat Jenderal Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten	Juli 2015	Januari 2018
Tol Solo Kertosono (Soker) Loan	717,789,000	Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga	Agustus 2015	Agustus 2018
Tol Cisumdawu Tahap 2	633,818,000	Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga	September 2015	September 2018
Pembangunan Jalan Liang Anggang - Dermaga Trisakti	358,383,000	Direktorat Jendral Bina Marga Wilayah	November 2015	November 2018
Pembangunan Sarana Prasarana Pengendalian	115,853,214	Dirjen Sumber Daya Alam Sumatera	Juli 2017	Januari 2020
Pembangunan Jalan dan Jembatan Manggar	247,123,000	Direktorat Jendral Bina Marga Wilayah	November 2015	November 2018
Freeway Lanjutan (Loan China)	154,283,000	Direktorat Jendral Bina Marga Wilayah	November 2015	November 2017
Giant Sea Wall / Perkuatan Tanggul NCICD Cilicis	221,327,000	Departemen Pekerjaan Umum - Direktorat Jendral Sumber Daya Alam Ciliwung Cisadane	November 2015	November 2017
PLTU 2 X 100 MW Jenepono Sulawesi	358,000,000	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	November 2015	November 2018
Gedung Bank Indonesia Cabang Banten	133,097,000	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	November 2015	November 2017
Rehabilitasi Sungai Citarum Hilir	123,903,790	Direktorat Jendral Sumber Daya Air Citarum	November 2015	Januari 2019
Dermaga Multi Purpose Belawan Sumatera Utara	209,317,000	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Desember 2015	Desember 2017
Rel KA Layang Medan - Kualanamu Sumatera Utara	262,713,000	Balai Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara	Desember 2015	Desember 2018
Jembatan Pulau G (Jakarta Utara)	300,000,000	PT Muara Wisesa Samudera	Desember 2015	Desember 2018
Irigasi DI Rentang (SIGegesik)	179,412,000	Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air	Desember 2015	Desember 2018
Jalan Tol Seroja	628,117,000	PT Marga Lintas Jabar	Desember 2015	Desember 2018
Jalan Tol Lampung	2,181,885,000	PT Hutama Karya (Persero)	Desember 2015	Desember 2018
Tol Surabaya Mojokerto Seksi 2	167,708,000	Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga	Desember 2015	Desember 2017
Tol Surabaya Mojokerto Seksi 3	154,018,000	Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga	Desember 2015	Desember 2017
NCDT British Petroleum II Stasiun Kereta Api Medan	357,110,000	British Petroleum	Desember 2015	Desember 2018
Entikong Infrastruktur	218,450,000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	Desember 2015	Desember 2017
PLBN Aruk	208,167,000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	Desember 2015	Desember 2017
Pembangunan Terminal Bandara Jabar	119,210,000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	Desember 2015	Desember 2017
Wisma Atlit DKI Jakarta	697,500,000	Bandara Internasional Jawa Barat	Februari 2016	Desember 2018
Pembangunan Jaringan Gas Bumi Prabumulih	978,745,000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	Februari 2016	Desember 2018
Jembatan Semanggi Jakarta	269,196,000	PT Pertamina Gas	Februari 2016	Desember 2018
Pemb Fabrik Minyak Goreng Kapasitas 600000 ton	313,697,000	PT Mitra Panca Pesada	Maret 2016	Maret 2018
Agen Premium & Minyak Solar Bandara Soeta	399,609,000	PT Industri Nabati Lestari	Maret 2016	Maret 2018
Tanjung Sekong	380,025,000	PT Angkasa Pura I (Persero)	Mei 2016	Mei 2018
Bendung Karian	969,000,000	PT Pertamina Patra Niaga	Juni 2016	Juni 2018
Freeway Balsam Balikpapan Samarinda	262,456,000	Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga	Juni 2015	Juni 2018
Pembangunan Dermaga Sorong	5,984,850,000	PT Jasa Mandiri Sukses	Oktober 2016	Oktober 2019
Proyek Bogor Ring Road (BORR) Tahap II	247,844,000	PT Pelabuhan Indonesia III	Oktober 2016	Oktober 2018
Bendungan Sukamahi Bogor Jawa Barat	775,137,000	PT Marga Sarana Jabar	November 2016	April 2018
Light Rail Transit Kelapa Gading Velodrom (main works)	218,487,000	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	Desember 2016	Desember 2018
	5,295,824,000	PT Jakarta Propertindo	Desember 2016	Desember 2018

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Nama Proyek / Name of Projects	Nilai Kontrak / Contract Value	Pemberi Kerja/ Owner	Masa Pelaksanaan / Period of Time	
			Mulai / Started	Selesai / Ended
High Speed Railway	14,427,202,000	PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)	Desember 2016	Desember 2019
Bendungan Cipanas Jawa Barat	598,193,000	Dinas Pekerjaan Umum Jawa Barat	November 2016	November 2019
Jalan Tol Gempol - Porong Surabaya Jawa Timur	772,982,000	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Desember 2016	Desember 2019
Refining Development Master Project Project	552,452,000	PT Pertamina Refinery	November 2016	November 2019
Sumatera Bagian Utara 2 Peaker	549,958,000	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	November 2016	November 2019
Power Plant 250 MW (Arun)				
Jalan Toll Borr 2	775,136,503	PT Marga Sarana Jabar	Desember 2016	Desember 2018
Bandara Internasional Jawa Barat	634,090,909	PT Bandar Udara Jawa Barat	Desember 2016	Desember 2017
Gelora Bung Karno Stadion JO	193,538,182	Pemerintah Provinsi DKI	Desember 2016	Januari 2018
Pos Lintas Batas Negara Aruk II JO	183,221,555	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	16/12/2016	06/03/2019
Pekerjaan Kualifikasi Pelelangan Kontraktor EPC (Engineering Procurement Construction and Comissioning) PG Asembagoes	727,735,800	Perkebunan Nusantara IX	23/03/2017	28/09/2018
Proyek EPCC Revitalisasi PG Rendeng-Kudus-PTPN IX	224,778,400	Perkebunan Nusantara IX	16/08/2017	28/02/2019
Proyek Pembangunan DPPU Kerjajati-Jawa Barat	258,000,454	PT Pertamina (Persero)	05/09/2017	04/09/2019
Proyek Pengembangan Sarfas TUKS Migas	390,500,000	PT Pertamina (Persero)	12/09/2017	11/03/2019
PT Pertamina Terminal LPG Tanjung Sekong di Merak Mas-Banten				
Proyek Relokasi Pipa M1 & M2 dan Pemasangan Hydrant System Terminal Cargo SKH	190,500,000	PT Pertamina (Persero)	12/09/2017	06/03/2019
GEDUNG UNLAM	384,739,000	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Universitas Samaratulangi	26/07/2017	18/08/2019
Civil Work ix1000MV CFSPF Cilacap	841,000,000	PT P&C Engineering Company	22/02/2017	12/10/2019
PLTMG Paket 4	875,514,824	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	01/07/2017	20/09/2018
Pek Jin Tol Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	2,478,915,530	PT Marga Kunciran Cengkareng	17/04/2017	30/06/2019
Pembangunan Jembatan Tumbang Samba (MYC 2016-2019)	258,470,693	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Tengah	03/04/2017	18/01/2020
Pemb JI Tol Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar	1,366,747,799	PT Hutama Karya (Persero)	13/03/2017	21/07/2018
Jalan dan Penataan Pantai Kuta Mandalika	125,551,818	PT Indonesia Tourism Development Corporation	16/01/2017	14/01/2018
Pembangunan Jalan Tol Ruas Bakauheni Terbanggi	515,292,879	PT Hutama Karya (Persero)	01/06/2017	31/03/2018
Pengendalian Banjir Sistem Sungai Jragung	175,655,050	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	31/08/2016	17/02/2019
Peningkatan CY 01 di TPKS Semarang	124,530,230	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tbk	31/10/2014	28/12/2017
Bendungan Kuningan	215,549,252	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia - Sumber Daya Alam	29/12/2016	31/05/2019
Pengendalian Banjir dan Rob Kaligawe	146,132,915	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia - Sumber Daya Alam	16/12/2016	04/06/2019
Sukamahi Zero ccount	218,486,608	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia - Sumber Daya Alam	21/12/2016	10/06/2019
EPC Proyek Pembangunan Pabrik NPK Fussion II	356,060,000	PT Pupuk Sriwidjaja	10/01/2018	05/09/2019
Bontang	769,178,736	PT P&C Engineering Company	01/11/2017	15/03/2020
Sulsel Barru	648,018,066	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	01/12/2017	31/12/2020
Pembangunan 3 Unit Jembatan Sungai Tahang	212,860,875	PT Kukuh Mandiri Lestari	11/01/2017	31/12/2018
Pekerjaan Pembangunan Jembatan Cipamingkis II	87,800,000	PT Pura Delta	13/11/2017	31/12/2018
Gerbang Tol Bogor	163,800,000	PT Gunung Suawarna Abadi	01/11/2017	31/12/2019
Container Yard (CY) Tahap 2 - Teluk Lamong	325,480,000	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	01/08/2015	01/08/2017
Jalan Akses Gede Bage	278,064,000	PU Dirjen Bina Marga	Aug 15	Aug 17
Gedung Kantor Yodya Karya	118,636,000	PT Yodya Karya (Persero)	Sept 15	Sept 17
Pembangunan Jalan Perbatasan KalBar Tahap II	277,519,000	Dirjen Bina Marga Wilayah Kalimantan Barat		
Rehabilitasi Bendung Kelambu Kiri	246,939,000	PU Dirjen SDA Jawa Tengah	Oct 15	Oct 17
In - out let Sudetan Sungai Ciliwung	115,357,000	DPU - Dirjen SDA Ciliwung Cisadane	Dec 15	Dec 17
Bandara Sultan Tha'ha Jambi	60,508,000	Angkasa Pura II	Dec 15	Dec 18
PJU Cerdas dan POME	150,798,000	Kementerian ESDM	Mar 16	Mar 17
Pembangunan Mini Hydro	158,429,000	Kementerian ESDM	Mar 16	Mar 17
PLTD CPO Belitung	88,935,000	Kementerian ESDM	Apr 16	Apr 17
Approach Dock Babelan	73,696,000	PT Cikarang Listrindo	Apr 16	Apr 17
LRT Kelapa Gading-Velodrome	57,661,000	PT Jakarta Propertindo	Jun 16	Jun 17
Fasilitas Bandara SSK	62,727,000	PT Angkasa Pura I	Jun 16	Jun 17
Rehabilitasi Saluran Citarum Barat Bekasi - Cawang	185,208,000	Kementerian PU & Pera	Okt 16	Okt 17
Feni Haltim	3,421,425,000	PT Antam	20/01/2017	27/05/2019
Dormitory Jeneponto	71,537,614	Dept Power Energy - PT WIKA (Persero) Tbk	01/08/2017	01/08/2018
Bateen Al Samar Residential Complex (FASE 1) Dubai	159,803,800	National Gulf Construction LLC	Jun 17	Nov 18
The Development of Villa Obhur Project	1,965,320	Adil Makki Construction (AMCO)	Jul 17	01/08/2018
Roas Rehabilitation JCT A09 Fatucamanaun Leohat 1	53,789,645	Ministerio Das Obras Publicas Transporte	20/02/2017	20/02/2018
Package 1 Municipio De manatutu				
Construction of new Steel Bridge 100 m in Milotu	43,668,749	Ministerio Das Obras Publicas Transporte	20/02/2017	20/02/2018
Sahe River Soibada Timor Leste				
Construction of Natar Bora Road Timor Leste				
Package 1	60,832,481	Ministerio Das Obras Publicas Transporte	20/02/2017	20/02/2019
Construction of Natar Bora Road Timor Leste				
Package 2	40,142,351	Ministerio Das Obras Publicas Transporte	20/02/2017	20/02/2019
Construction of Natar Bora Road Timor Leste				
Package 3	41,776,294	Ministerio Das Obras Publicas Transporte	20/02/2017	20/02/2019
Road Rehabilitation of Project From Area Baguia to Ossauna Matebian Hun	193,336,865	Concorcio Helin HD Lda	20/02/2017	19/08/2017
Construction of Wai Chua Bridge in Bacau District Timor Leste	54,665,460	Ministerio Das Obras Publicas Transporte	23/03/2017	07/11/2017
Proyek Pembangunan 1000 unit + 1250 unit Logement	573,944,381	Ministere De L'Habitat De L'Urbanisme	20/09/2017	08/01/2020
AADL di Ain Deffa & Khemis Miliana Alegria				
Proyek Pembangunan 700 unit + 1000 unit Logement				
AADL di Baraki & El Harrach Berouagui Alegria	780,513,994	Ministere De L'Habitat De L'Urbanisme	25/09/2017	15/09/2019
Jalan KA Bandar Tinggi-Kuala Tanjung	96,125,936	Kemenhub-Dirjen Perkeretaapian	05/07/2017	21/03/2018
Pembangunan Coal unloading Jetty Kapasitas 12000 DWT	374,550,000	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	11/12/2017	04/06/2019
Pembangunan Penahan Beban (Counterweight)				
Waduk Jatigede	65,946,718	PUPR-Dirjen SDA	07/08/2017	18/12/2017
Tol Lampung Paket 4 Kontrak Anak II	1,471,394,337	PT HK (Persero)	05/04/2017	07/07/2018
Pembangunan Tol Lampung Paket 4 Kontrak Anak III	566,768,732	PT HK (Persero)	30/08/2017	31/03/2018
Jalan Akses Gede Bage 3	57,646,330	PUPR-Dirjen Bina Marga	23/03/2017	18/11/2017
Overpass Soroja	15,250,000	PT Citra Marga Lintas Jabar	02/05/2017	14/10/2017
Tol Gempol Pasuruan Paket 3A	440,837,900	PT Transmarga Jatim Pasuruan	11/10/2017	11/10/2018
Penyediaan Air Baku Semarang Barat (MYC)	99,557,799	PUPR-Dirjen SDA	27/11/2017	18/09/2019
Tol Serang Panimbang	3,645,319,000	PT Wijaya Karya Serang Panimbang	04/12/2017	04/12/2019
Pedestrian Semanggi	171,821,136	PT Mitra Panca Persada	03/04/2018	27/06/2019

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Nama Proyek / Name of Projects	Nilai Kontrak / Contract Value	Pemberi Kerja/ Owner	Masa Pelaksanaan / Period of Time	
			Mulai / Started	Selesai / Ended
Proposed Sg Limbang Cable Stay Bridge	225,654,000	JKR Sarawak	20/04/2018	21/02/2021
Wisma Atlit Difable	87,272,727	Kementerian PU & Pera	07/06/2018	13-Dec-18
IPAL Suwung	76,161,660	PU SDA	26/03/2018	16-Dec-19
Proyek NPK Fussion II PUSRI	356,060,000	Pupuk Sriwijaya	11/01/2018	11/09/2019
VENUE GBK STADION JO	135,202,891	KEMENTERIAN PU	28/02/2018	18/07/2018
Pembangunan Fasilitas Sarana Tambat (Dermaga) di TBBM Surabaya dan TBBM Tanjungwangi	207,400,000	PT Pertamina (Persero)	06/03/2018	05/03/2019
FO Teluk Lamong (Pelindo 3)	1,190,811,510	PT Pelindo III	05/02/2018	05/02/2019
Terminal Kijing Mempawah	2,491,154,460	PT Pelindo II	17-May-2018	07/11/2019
Masjid Sriwedari Surakarta	165,252,372	Panitia Pembangunan Masjid Sriwedari Surakarta	28/06/2018	23-Dec-20
Contract Package 3 – Reconstruction Of Clarin Bridge	45,468,833	Department Of Public Works and Highways Bonafico Drive Port Area 1018 Manila	01/02/2018	01/03/2019
Proyek Pembangunan 400 Unit Logement AADL di Kourifra Algeria	154,329,780	Ministere De L'Habitat De L'Urbanisme Et De La Ville	01/02/2018	20/11/2019
Pembangunan Jalur Kereta Api Solo Balapan - Bandara Adi Soemarmo Km 2+000 s/d Km 4+000 Antara Solo	106,537,900	Departemen Perhubungan	23/03/2018	31-Dec-18
Dharmahusada	660,841,687	PT Puncak Dharmahusada	18/03/2013	12/10/2016
CBD Surabaya	1,032,564,136	PT Surya Bumimegah Sejahtera	05/05/2014	20/12/2016
Puncak Merr	475,163,136	PT Surya Bumimegah Sejahtera	01/03/2017	30/06/2019
Mall Green Gresik	56,811,923	PT Raya Bumi Nusantara Permai	13/04/2015	13/10/2016
Hegarmahan	254,545,455	PT Hegar Amanah Jaya Bersama	06/07/2015	05/07/2017
Thamrin Office	153,746,117	PT Mapalus Mancacakti	22/06/2015	12/04/2017
PARKIR RSPAD	136,363,636	PT Adimas Tirta Teknologi	18/08/2018	18/08/2019
MANDIRI UNIVERSITY	334,545,546	Bank Mandiri	28/09/2018	14/04/2021
UIII PAKET 2	140,336,619	Kementerian Agama	26/11/2018	25/02/2020
RENOVASI BANDARA PALU	33,585,455	Kementerian Perhubungan	01/10/2018	31/12/2018
APARTEMEN FEMALE MARGONDA	144,052,929	PT Grahaloka Pangestu	21/12/2018	10/08/2019
MIC UGM	110,000,000	PT Pertamina (Persero)	01/10/2018	24/03/2020
Penanganan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Asmat dalam Rangka Tanggap Darurat Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak dan Gizi Buruk	86,135,351	PPK IV.3 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Papua (Jayawijaya)	26/03/2018	31/12/2018
Pekerjaan Design and Build Perpanjangan Dermaga di Pelabuhan Bagendang dan Pembangunan Dermaga Multipurpose Pelabuhan Bumiharjo	183,750,000	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Sampit	11/07/2018	06/05/2019
Irigasi Sei Silau, (Deli - Serdang)	138,789,480	Kementerian PUPERA Dirjen SDA	18/10/2018	28/12/2021
Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru Padang, Seksi Bangkinang - Pangkalan	8,684,338,840	Kementerian PUPERA Dirjen SDA	19/12/2018	18/12/2020
Perbaikan Longsor Tol Gempol-Pandaan	9,145,619	PT Transmarga Jatim	15/03/2018	31/08/2018
Exit Tol Gedebage KM 149 Padaleunyi	225,500,000	PT Mahkota Permata Perdana	17/10/2018	17/02/2020
Paket Longsor Ruas Puncak - Bts. Kota Cianjur (Puncak Pass)	5,847,828	PUPERA-Dirjen Bina Marga	10/12/2018	18/03/2019
Jalan Tol Lampung Paket 4 Kontrak Anak IV	127,563,232	PT Hutama Karya (Persero)	22/11/2018	22/12/2018
Dermaga Patimban, Cirebon	727,336,231	PT Pelindo III (Persero)	27/07/2018	25/08/2020
Bendungan Komerling II / Tiga Dihaji Paket 4	596,525,732	PUPERA-Dirjen SDA	16/10/2018	19/09/2023
Jalan KA Solo Balapan-Bandara	106,537,901	Dephub	23/03/2018	31/12/2018
Jaringan AL Terpusat IPAL Suwung	76,264,785	PUPERA-Dirjen Cipta Karya	26/03/2018	16/12/2019
Reklamasi Kalibaru Semarang	524,000,000	PT Pelindo III	27/07/2018	17/05/2018
Pembangunan Bendungan Tugu di Kab. Trenggalek (MYC) (Tahap II)	540,508,945	PUPERA-Dirjen SDA	11/12/2018	09/01/2022

Perusahaan

- Perusahaan melakukan perjanjian pemanfaatan lahan milik KAI yang berlokasi di Jalan Laswi, Bandung - Jawa Barat, sesuai dengan sertifikat hak pakai No. 6 tahun 1988 seluas 206.400 m² atas nama KAI.

Kedua pihak telah menandatangani nota kesepakatan untuk pemanfaatan lahan dengan nomor TP.01.03/A.DIR.13154/2017 dan KL.701/X/31/KA-2017 tanggal 10 Oktober 2017 dengan jangka waktu 50 tahun terhitung setelah berakhirnya *grace period* selama 36 bulan.

- Pada tanggal 8 Desember 2015, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman antara Perusahaan dengan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar Rp 285.000.000. Tujuan pemberian pinjaman untuk setoran modal kepada PT Kereta Cepat Indonesia China.

Pada tanggal 27 Januari 2017 ditandatangani amandemen perjanjian tahap II dengan tambahan pinjaman sebesar Rp440.012.309.

The Company

- The Company has an agreement with KAI about utilization of land located in Laswi, Bandung - West Java based on use right No. 6 year 1988 with the area of 206,400 sqm on behalf of KAI.

Both parties have signed a memorandum of understanding for land development with number TP.01.03/A.DIR.13154/2017 and KL.701/X/31/KA-2017 dated October 10, 2017 with time period of 50 years after grace period of 36 months.

- On December 8, 2015, a Loan Agreement between the Company and PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) was made and signed in the amount of Rp285,000,000. The purpose of lending for paid in capital of PT Kereta Cepat Indonesia China.

On January 27, 2017, a phase II agreement was signed with an additional loan of Rp440,012,309.

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 2 Oktober 2017 ditandatangani amandemen perjanjian tahap III dengan tambahan pinjaman sebesar Rp486.400.000.

On October 2, 2017 a phase III agreement was signed with an additional loan of Rp 486,400,000.

Pada tanggal 20 November 2017 ditandatangani amandemen perjanjian tahap IV dengan tambahan pinjaman sebesar sebesar Rp5.244.000.

On November 20, 2017 the amendment to the Phase IV agreement was signed with an additional loan of Rp5,244,000.

Pada tanggal 6 Februari 2018 ditandatangani amandemen perjanjian tahap V dengan tambahan pinjaman sebesar sebesar Rp940.000.000.

On February 6, 2018, an amendment to the Phase V agreement was signed with an additional loan amounting to Rp940,000,000.

Pada tanggal 12 Maret 2018 ditandatangani amandemen perjanjian tahap VI dengan tambahan pinjaman sebesar sebesar Rp373.000.000.

On March 12, 2018, an amendment to the Phase VI agreement was signed with an additional loan amounting to Rp373,000,000.

Pada tanggal 11 April 2018 ditandatangani amandemen perjanjian tahap VII dengan tambahan pinjaman sebesar sebesar Rp625.000.000.

On April 11, 2018, a phase VII agreement amendment was signed with an additional loan of Rp625,000,000.

Pada tanggal 19 Oktober 2018 ditandatangani amandemen perjanjian tahap VII dengan tambahan pinjaman sebesar sebesar Rp600.000.000.

On October 19, 2018 a phase VII agreement amendment was signed with an additional loan of Rp600,000,000.

**Entitas Anak
WIKI Gedung**

WIKI Gedung melakukan perjanjian bangun, guna, serah (BOT) dengan PT Sarinah (Persero) tentang Pengembangan Property di Jalan Braga No. 10 Bandung - Jawa Barat sesuai dengan sertifikat hak guna bangunan No. 649 seluas 1.763 m2 atas nama PT Sarinah (Persero).

Untuk melakukan kerjasama dengan WIKI Gedung, PT Sarinah (Persero) telah memperoleh persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam surat No. S-89/MBU/01/2016 tertanggal 25 Januari 2016 tentang Persetujuan Pendayagunaan Aset Milik PT Sarinah (Persero) di Jl. Braga No. 10 Bandung, Jawa barat. Sedangkan WIKI Gedung telah memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham yang tertuang dalam Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat WIKI Gedung No: MJ.01.00/PS.WG.037/2015 tertanggal 13 November 2015 tentang Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat WIKI Gedung.

WIKI Gedung telah merencanakan jumlah investasi yang akan ditanamkan untuk membangun hotel dan fasilitas penunjang dengan investasi awal sebesar Rp81.192.000 dengan jangka waktu Pengelolaan selama 25 tahun. Sedangkan PT Sarinah (Persero) berhak atas pembayaran sewa lahan sebesar 3,33%

**Subsidiaries
WIKI Gedung**

WIKI Gedung has an agreement of build, operate, and transfer (BOT) with PT Sarinah (Persero) about the development of property in Braga No. 10 Bandung - West Java based on building right No. 649 with the area of 1,763 sqm on behalf of PT Sarinah (Persero).

To have a partnership with WIKI Gedung, PT Sarinah (Persero) had obtained approval from Minister of State-Owned Enterprises (BUMN) as General Meeting of Shareholders set forth in letter No. S-89 / MBU/01 / 2016 dated January 25, 2016 regarding Approval of Utilization of Assets owned by PT Sarinah (Persero) on Jl. Braga No. 10 Bandung West Java. Whereas WIKI Gedung had obtained approval by the shareholders set out in the resolution shareholders outside meeting WIKI Gedung No: MJ.01.00 / PS.WG.037 / 2015 dated November 13, 2015 about decision shareholders out meeting of WIKI Gedung.

WIKI Gedung has planned for the funding required to build the hotel and supporting facilities with an initial investment of Rp81,192,000, with the term of the management for 25 years. Whereas PT Sarinah (Persero) is entitled for the collection of land lease of 3.33% of the tax object value of land every year as

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

dari nilai NJOP tanah setiap tahunnya sebagaimana tertera dalam Peraturan Kementerian Keuangan No: 33/PMK.06/2012 dan berhak mendapatkan Ruang Komersial seluas 132 m2 selama masa berlakunya perjanjian kerjasama tanpa dikenakan biaya sewa ruang dan biaya jasa.

WIKI Gedung berkewajiban menyerahkan kembali dan mengalihkan obyek BOT pada tanggal pengalihan bangunan dan penyerahan kembali tanah tanpa adanya kewajiban ganti rugi yang diberikan PT Sarinah (Persero) kepada WIKI Gedung sebagai bentuk penyerahan dan atau transfer yang timbul dalam perjanjian kerjasama ini.

Selain itu, WIKI Gedung juga mempunyai komitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, diantaranya adalah sebagai berikut:

stationed in regulation of the Ministry of Finance No: 33/PMK.06/2012, and is eligible to receive commercial space of 132 sqm during the period of the agreements without charged for rent and service.

WIKI Gedung is obliged to hand over and transfer the BOT object on the date of transfer of buildings and land without obligation of PT Sarinah (Persero) to provide compensation to WIKI Gedung arising from this agreement.

WIKI Gedung also has commitments to carry out the following construction works:

Nama Proyek / Name of Projects	Nilai Kontrak / Contract Value	Pemberi Kerja / Owner	Masa Pelaksanaan / Period of Time	
			Mulai / Started	Selesai / Ended
Mahogany Konstruksi	250,215,341	KSO PT Wika Bangunan Gedung - Mahoni	18/04/2015	31/03/2017
Tamansari Prospero	186,300,344	KSO PT Wika Bangunan Gedung - PT Mutiara Masyhur Sejahtera	09/05/2015	15/04/2017
Sudirman Hill	126,804,292	PT Mulia Guna Propertindo Development	01/04/2016	22/03/2018
Transmart Mataram	195,386,481	PT Trans Retail Indonesia	30/04/2016	24/02/2017
Velodrome	319,625,909	PT Jakarta Propertindo	25/04/2016	14/06/2016
Metro Galaxy	268,727,273	PT Anugrah Duta Sejati	03/06/2016	30/04/2018
Podomoro	745,454,545	PT Graha Tunas Selaras	22/08/2016	31/12/2018
Wuku Lanjutan	35,929,482	PT Accolades Lakshmi Resort	10/10/2011	15/11/2012
Apartemen Gresik	250,000,000	PT Raya Bumi Nusantara Permai	10/11/2016	31/12/2019
Transmart Kupang	244,322,325	PT Trans Ritel Properti	23/12/2016	18/02/2018
Grand Zam-Zam	179,787,704	KSO Griya Sarana Jaya Property	08/12/2016	12/09/2018
5 Pasar Rakyat Dki	56,979,000	Perusahaan daerah Pasar Jaya Prov DKI Jakarta	22/12/2016	04/11/2017
Bezaya	54,670,909	PT Bersama Zatta Jaya	23/01/2017	19/11/2017
Transmart Sidoarjo	143,820,664	PT Chalidana Inti Permata	02/03/2017	10/01/2018
Jakarta International Equestrian Park Pulomas	272,586,585	PT Pulo Mas Jaya	22/02/2017	10/07/2018
Trans Studio Cibubur	741,654,880	PT Trans Cibubur Property	17/02/2017	23/11/2018
Transmart Bogor	164,742,703	PT Bogor Jasmin Lestari	14/03/2017	15/10/2017
Mabes Polri	538,530,909	Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Staf Logistik	24/03/2017	31/12/2018
		Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat		
		Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan		
Rusun Jabar	123,193,636	Satuan Kerja Pengembangan Perumahan	21/03/2017	15/11/2017
MRT Lebak Bulus-Cipete	150,000,000	JO WIKI - TOKYU	10/04/2017	06/03/2018
		KSU PT Wijaya Karya (Persero) Tbk -		
Apartemen Iswara	473,978,142	PT Balai Pustaka (Persero)	29/03/2017	29/12/2017
KBN	64,073,142	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	11/04/2017	06/01/2018
Telkom Manyar	252,000,000	Telkom Property (PT Graha Sarana Duta)	16/01/2018	07/11/2019
Arandra	412,605,179	PT Cempaka Sinergy Realty	22/05/2017	24/10/2019
LRT	617,928,155	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (DSU 1)	05/06/2017	06/05/2018
Apartemen B Residences	177,484,620	PT Maju Gemilang Serpong	10/04/2017	31/08/2019
Hotel Patra Jasa	77,954,614	PT Patra Jasa	10/07/2017	09/07/2018
Perumahan Halim	299,477,789	PT Kereta Cepat Indonesia China	07/07/2017	02/02/2018
Transmart Jember	156,400,000	PT Alfa Retail Indonesia	23/11/2017	30/08/2018
Masjid Aceh	51,039,091	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat		
		Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Satuan		
		Kerja Pengembangan Perumahan	22/09/2017	18/07/2018
Pullman Hotel	311,272,727	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) /Indonesia	07/12/2017	27/11/2019
		Tourism Development (ITDC)		
RS Pelabuhan Palembang	139,927,312	PT Pelabuhan Indonesia	31/10/2017	14/02/2019
Pelindo 3	424,514,000	Pelindo 3	08/12/2017	31/07/2019
Mesjid Raya Jabar	464,545,455	Pemprov Jabar	21/12/2017	20/12/2018
Mandiri Medan	169,090,909	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	28/12/2017	04/03/2019
Lifeguard Kuta Mandalika	15,111,384	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (DSU 2)	20/11/2017	15/03/2018
Transmart Majapahit Semarang	124,400,000	CV Sumber Cipta Sejati	18/01/2018	18/01/2019
Transmart Pekalongan	119,628,653	Pasaraya Sri Ratu	28/03/2018	27/02/2019
Gedung Biofarma	146,857,630	PT Bio Farma (Persero)	16/03/2018	08/06/2019
Marketing & Gallery Trans Icon Surabaya	9,464,128	PT Trans Properti Indonesia	07/03/2018	11/05/2018
Pelabuhan Cabang Benoa	70,850,000	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	07/03/2018	05/07/2018
RSUD Cengkareng	155,369,091	RSUD Cengkareng Provinsi DKI Jakarta	28/03/2018	28/11/2018
Gedung Dinas Pendidikan Jakarta	178,695,455	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	12/04/2018	20/12/2018
Tamansari Tera	122,803,318	KSO PT Wika Bangunan Gedung - Andi Ahsan	22/01/2014	30/06/2018
		Nasrudin Tanudjiwa		
Tamansari Urbano	603,331,456	PT Patra Jasa	11/05/2015	31/08/2019
Gedung Serba Guna	18,090,909	YAYASAN TAHIR	01/05/2017	10/12/2017
Rusun Rawa Bebek	667,349	KSO Wika - Cakra	12/05/2017	30/04/2018
Rusun Pangadegan	2,264,542	KSO Wika - Cakra	12/05/2017	30/04/2018
Rusun Tegal Alur	1,003,158	KSO Wika - Cakra	12/05/2017	30/04/2018
Proyek Pipe Prack Tj Sekong	12,771,775	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (DIP)	03/08/2017	28/02/2018

WIKA Bitumen

Perjanjian Jual Beli Aspal Buton
Perjanjian jual beli aspal alam antara PT Wijaya Karya Bitumen dengan Ever Joy (Asia) Resource Limited, No. TP.01.03/A.DIR/WBt/SPJB/149/VI/2017 tanggal 10 Juli 2017 untuk penjualan Asbuton Kabungka Keras dalam bentuk (pecahan) dari Pelabuhan Banabungi di Pasarwajo, Buton, jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2017, sebanyak 7.000 MT, harga komoditas USD25 MT FOBST di atas kapal.

WIKA Serang Panimbang

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)
WIKA Serang Panimbang telah memperoleh penetapan hak pengusahaan jalan tol (Hak Konsesi) Serang-Panimbang yang diterbitkan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03.01-Mn/02 tanggal 4 Januari 2017 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan PPJT pada tanggal 22 Februari 2017 dengan masa konsesi selama 40 tahun.

Perjanjian Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol

WIKA Serang Panimbang memiliki perjanjian dengan Badan Layanan Umum – Badan Pengatur Jalan Tol (BLU–BPJT) mengenai penggunaan dana bergulir untuk penggantian pembelian tanah dalam rangka pengusahaan ruas jalan tol.

Tata cara penggunaan dana bergulir pada BLUBPJT untuk pengadaan tanah jalan tol diatur dalam Peraturan Menteri PU No. 04/PRT/M/2007, tanggal 26 Februari 2007. BLU-BPJT akan melaksanakan pembayaran terlebih dahulu (dana talangan), untuk pembelian tanah untuk pembangunan ruas jalan tol yang merupakan kewajiban dari WIKA Serang Panimbang kepada Pemerintah sebagaimana diatur dalam PPJT. Dalam hal 1 seksi selesai dibebaskan, WIKA Serang Panimbang harus mentransfer seluruh biaya ganti rugi tanah termasuk bunga ke Rekening BLU-BPJT dan BLU BPJT membuat berita acara serah terima tanah kepada entitas.

Menujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRTM/2008 tentang tata cara penggunaan dana bergulir pada BLU-BPJT untuk pengadaan tanah jalan tol diatur penghapusan surety bond dalam perjanjian Penggunaan Dana Bergulir BLU, maka sebagai pengganti jaminan atas pengembalian dana bergulir ini akan diberlakukan cross default PPJT apabila WIKA Serang Panimbang gagal membayar dana bergulir BLU.

WIKA Bitumen

Buton's asphalt purchase agreement
Natural asphalt purchase agreement between PT Wijaya Karya Bitumen with Ever Joy (Asia) Resource Limited. No. TP.01.03/A.DIR/WBt/SPJB/149/VI/2017 dated July 10, 2017 for sales of Kabungka Natural Hard Asphalt Crushed in port of Banabungi in Pasarwajo, Buton, perio until December 31, 2017 with total volume 7,000 MT, commodity price of USD25 per MT FOBST on Board.

WIKA Serang Panimbang

Toll Road Concession Agreements (PPJT)
WIKA Serang Panimbang has acquired the right of toll road concession (Concession Right) Serang Panimbang issued by the Government, with the Minister of Public Works and Housing Decree No. 03.01-Mn/02 dated January 4, 2017 followed by the signing of the PPJT on February 22, 2017 with the concession period of 40 years.

Land Acquisition Funding Agreement for Toll Road

WIKA Serang Panimbang has an agreement with Badan Layanan Umum – Badan Pengatur Jalan Tol (BLU – BPJT) regarding the use of revolving fund for replacement of land purchase in the framework of concession of toll road.

The procedures of using revolving fund at BLUBPJT for toll road land acquisition is based on the Decree of Public Works No. 04/PRT/M/2007 dated Febuary 26, 2007. BLU-BPJT will conduct the payment in advance (bailout fund), for acquisition of land for toll road construction, which represents WIKA Serang Panimbang's obligation to the Government, according to the Concession Rights Agreement (PPJT) In case one section has been completed, WIKA Serang Panimbang should transfer all compensation costs including interest to BLU-BPJT account and BLU-BPJT should make minutes of land hand over to the entity.

Referring to the Decree of the Minister of Public Works No. 14/PRT/M/2008 regarding the procedure for revolving fund usage at BLU-BPJT for land acquisition of toll road shall be regulated for the abolition of the surety bond under the BLU Revolving Fund Agreement therefore as a replacement of guarantee on the revolving fund, cross default PPJT is applied if WIKA Serang Panimbang failed to pay such revolving fund from BLU.

WIKA BETON

PT Sumiden Serasi Wire Products

Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku utama, WIKA BETON mengadakan Berita Acara Negosiasi jual beli *PC Strand*, *PC Wire* dan *PC Bar* dengan PT Sumiden Serasi Wire Products. Perjanjian tersebut dibuat 2 November 2017 dan berlaku sampai dengan 31 Januari 2018 dan akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atau rencana produksi total harga diluar PPN.

PT Kingdom Indah

Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, WIKA Beton mengadakan Berita Acara Negosiasi jual beli *PC Wire*, *PC Strand*, *PC Wire* dan *Spiral Wire* dengan PT Kingdom Indah. Perjanjian tersebut berlaku sejak 12 Desember 2017 sampai dengan adanya perubahan atas kesepakatan dari kedua belah pihak dan juga diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atau rencana produksi total harga diluar PPN.

PT Intisumber Bajasakti

Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, WIKA Beton mengadakan perjanjian jual beli besi beton dengan PT Intisumber Bajasakti. Perjanjian tersebut berlaku sejak 19 Desember 2017 sampai dengan adanya perubahan atas kesepakatan dari kedua belah pihak dan juga diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atau rencana produksi total harga diluar PPN.

PT Focon Indo Beton

Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku utama, WIKA Beton mengadakan Berita Acara Negosiasi jual beli Semen dengan PT Focon Indo Beton. Perjanjian tersebut berlaku sejak 1 Maret 2017 sampai dengan adanya perubahan atas kesepakatan dari kedua belah pihak dan juga diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atau rencana produksi total harga diluar PPN.

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

WIKA Beton melakukan perjanjian jual beli Gas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. untuk memenuhi kebutuhan gas di pabrik Pasuruan, pabrik Bogor dan pabrik Jatiwangi, untuk mendukung operasional WIKA BETON. Perjanjian tersebut berlaku mulai tanggal 1 April 2013 sampai dengan 31 Maret 2018, dan terus dilakukan perpanjangan, pemakaian minimum gas 10.000 m³/bulan sedangkan pemakaian maksimum 50.000 m³/bulan.

WIKA REALTY

PT Cyberindo Persada Nusantara

WIKA Realty melakukan perjanjian kerjasama operasi dengan PT Cyberindo Persada Nusantara tentang pengembangan tanah dan pengelolaannya

WIKA BETON

PT Sumiden Serasi Wire Products

In providing the needs of the main raw materials, WIKA BETON entered into a Letter of Negotiation with PT Sumiden Serasi Wire Products for PC Strand, PC Wire and PC Bar. The agreement was entered on November 2, 2017 and is valid until January 31, 2018 and will be extended according to the requirement or production plan of total price excluding VAT.

PT Kingdom Indah

In providing the needs of raw materials, WIKA Beton entered into a Letter of Negotiation with PT Kingdom Indah for PC Wire, PC Strand, PC Wire and Spiral Wire. The agreement has been valid since December 12, 2017 until there are changes agreed by both parties and also extended in accordance with the needs or planned production beyond the total price of VAT.

PT Intisumber Bajasakti

In providing the needs of the raw material, WIKA BETON entered into a spiral wires purchase agreement with PT Intisumber Bajasakti. The agreement has been valid since December 19, 2017, until there are changes agreed by both parties and also extended in accordance with the needs or planned production beyond the total price of VAT.

PT Focon Indo Beton

In providing the the needs of the main raw material, WIKA BETON entered into a Letter of Negotiation for cemen with PT Focon Indo Beton. The agreement has been valid since March 1, 2017 until there are changes agreed by both parties and also extended in accordance with the needs or planned production beyond the total price of VAT.

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

WIKA BETON made a purchase agreement with PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. To meet the needs of the gas at the factory Pasuruan, Bogor and Jatiwangi, to support the operation of the WIKA BETON. The agreement has been valid since April 1, 2013 until March 31, 2018, and continues to do an extension, with a minimum usage 10,000 m³/month of gas per month while the maximum usage 50,000 m³/month.

WIKA REALTY

PT Cyberindo Persada Nusantara

WIKA Realty entered into a joint operation agreement with PT Cyberindo Persada Nusantara regarding land development and management

yang berlokasi di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor – Jawa Barat. Pembangunan tersebut terletak di lahan atau tanah seluas 99.202 m2, atas nama Tamansari Cyber.

located in Mulyaharja Village, Bogor Selatan District, Bogor City - West Java. The construction is located on a land or land area of 99,202 sqm, on behalf of Tamansari Cyber.

Perjanjian kerjasama antara WIKA Realty dengan PT Cyberindo Persada Nusantara ini berdasarkan nomor HK.02.09/A.DIR.WR.072/2014 pada tanggal 10 Maret 2014.

The cooperation agreement between WIKA Realty and PT Cyberindo Persada Nusantara is based on HK.02.09/A.DIR.WR.072/2014 on March 10, 2014.

Pada perjanjian tersebut WIKA Realty wajib menyediakan modal kerja usaha secara bertahap, dan PT Cyberindo Persada Nusantara wajib menyediakan tanah. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa nilai total tanah adalah sebesar Rp81.245.600. Pembagian keuntungan untuk setiap unit rumah yang terjual adalah sebesar 50% untuk WIKA Realty dan 50% untuk PT Cyberindo Persada Nusantara.

Under the agreement WIKA Realty is required to provide working capital gradually and PT Cyberindo Persada Nusantara is obliged to provide land. The agreement states that the total land value is Rp81,245,600. The profit sharing for each unit sold is 50% for WIKA Realty and 50% for PT Cyberindo Persada Nusantara.

53. Akuisisi Entitas Anak

53. Acquisition of a Subsidiary

PT Wijaya Karya Industri Energi (Winner)

Pada bulan Desember 2017, WIKA Realty melakukan perjanjian pembelian 60% atau sebanyak 54.481 saham Winner dengan biaya perolehan Rp77.000.000.

PT Wijaya Karya Industri Energi (Winner)

In December 2017, WIKA Realty acquired 60% equity ownership or 54,481 shares of Winner at acquisition cost of Rp77,000,000.

Pada saat tanggal akuisisi Winner, nilai wajar aset yang diperoleh dan liabilitas diasumsikan sebagai berikut:

As of the date of the acquisition of Winner, the fair value of assets acquired and liabilities assumed are as follows:

	<u>Rp</u>	
Kas dan Setara Kas	2,072,964	Cash and Cash Equivalents
Jumlah Aset Lancar (Tidak Termasuk Kas dan Setara Kas	73,275,048	Total Current Asset (Exclude Cash and Cash Equivalent)
Aset Pajak Tangguhan	1,359,871	Deferred Tax Asset
Aset Tetap	15,611,400	Property, Plant and Equipment
Aset Tidak Berwujud	126,002,854	Intangible Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	2,106,833	Other Noncurrent Assets
Liabilitas Jangka Pendek	(41,627,572)	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	(9,345,776)	Noncurrent Liabilities
Nilai Wajar Aset Bersih Yang Diakuisisi	<u>169,455,622</u>	Fair Value of Net Assets Acquired

Keuntungan dalam diskon dan arus kas keluar bersih yang timbul dari akuisisi adalah sebagai berikut:

Gain on bargain purchase and net cash outflow arising from such acquisition are as follows:

	<u>Rp</u>	
Imbalan Yang Dialihkan	77,000,000	Consideration Transferred
Ditambah: Nilai Wajar Kepentingan Perusahaan Atas Winner	50,875,902	Add: Fair Value of the Company's Interest In Winner
Kepentingan Nonpengendali	9,273,112	Non Controlling Interests
Dikurangi: Nilai Wajar Aset Bersih Teridentifikasi Yang Diperoleh	(169,455,622)	Less: Fair Value of Identifiable Net Assets Acquired
Keuntungan Dalam Diskon	<u>(32,306,608)</u>	Gain on Bargain Purchase

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	<u>Rp</u>	
Biaya Akuisisi	77,000,000	Acquisition Cost
Dikurangi:		Less:
Kas Dan Setara Kas Yang Diperoleh	<u>(2,072,964)</u>	Cash and Cash Equivalents Acquired
Arus kas keluar bersih pada saat akuisisi	<u>74,927,036</u>	Net Cash Outflow on Acquisition

**54. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko
Keuangan Dan Modal**

**54. Financial Instruments, Financial Risk And
Capital Management**

A. Kategori dan Kelas Instrumen Keuangan

**A. Categories and Classes of Financial
Instruments**

	<u>2018</u>			
	<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables Rp</u>	<u>Tersedia untuk dijual/ Available- for-sale Rp</u>	<u>Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at amortised cost Rp</u>	
Aset Keuangan Lancar				Current Financial Assets
Kas dan Setara Kas	13,973,766,477	--	--	Cash and Cash Equivalents
Deposito Yang Dibatasi Penggunaannya	20,000,000	--	--	Restricted Deposits
Piutang Usaha				Trade Accounts Receivable
Pihak Berelasi	2,745,540,433	--	--	Related Parties
Pihak Ketiga	2,605,300,003	--	--	Third Parties
Piutang Retensi				Retention Receivables
Pihak Berelasi	677,642,045	--	--	Related Parties
Pihak Ketiga	1,246,488,344	--	--	Third Parties
Piutang Yang Belum Ditagih	924,845,767			Accrued Income
Piutang Lain-Lain				Other Receivable
Pihak Berelasi	1,420,649,920	--	--	Related Parties
Pihak Ketiga	58,488,669	--	--	Third Parties
Jaminan Usaha	105,100,463			Business Guarantees
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi	--	58,645,244	--	Financial Assets From Concession
Aset Keuangan Tidak Lancar				Non-Current Financial Assets
Piutang Usaha	1,719,973			Accounts Receivable
Piutang Lain-Lain				Other Receivable
Pihak Berelasi	3,984,331,159	--	--	Related Parties
Pihak Ketiga	14,617,480	--	--	Third Parties
Piutang Belum Ditagih	444,232,429	--	--	Unbilled Receivable
Liabilitas Jangka Pendek				Current Financial Liabilities
Pinjaman Jangka Pendek				Short Term Loans
Pihak Berelasi	--	--	1,663,039,321	Related Parties
Pihak Ketiga	--	--	2,536,992,008	Third Parties
Utang Usaha				Trade Accounts Payable
Pihak Berelasi	--	--	176,597,892	Related Parties
Pihak Ketiga	--	--	13,006,775,938	Third Parties
Utang Lain-Lain	--	--	29,816,535	Other Payable
Beban Akrua	--	--	8,634,099,492	Accrued Expenses
Liabilitas Jangka Panjang				Long Term Liabilities
Pinjaman Jangka Menengah	--	--	250,000,000	Medium Term Notes
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	37,299,977	Finance Lease Liabilities
Pinjaman Jangka Panjang	--	--	9,372,921	Long Term Loans
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang				Short Term Financial Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang				Short Term Liabilities
Utang Lain-Lain	--	--	707,321,016	Other Payable
Pinjaman Jangka Menengah	--	--	6,084,622,512	Medium Term Notes
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	213,628,754	Finance Lease Liabilities
Pinjaman Jangka Panjang	--	--	2,793,906,635	Long Term Loans

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

2017			
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i> Rp	Tersedia untuk dijual/ <i>Available- for-sale</i> Rp	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Liabilities at amortised cost</i> Rp
Aset Keuangan Lancar			Current Financial Assets
Kas dan Setara Kas	11,237,722,278	--	Cash and Cash Equivalents
Deposito Yang Dibatasi Penggunaannya	20,100,000	--	Restricted Deposits
Piutang Usaha			Accounts Receivable
Pihak Berelasi	3,000,643,116	--	Related Parties
Pihak Ketiga	1,929,510,016	--	Third Parties
Piutang Retensi			Retention Receivables
Pihak Berelasi	348,167,986	--	Related Parties
Pihak Ketiga	979,998,517	--	Third Parties
Piutang Belum Ditagih	592,563,302	--	Unbilled Receivable
Piutang Lain-Lain			Other Receivable
Pihak Berelasi	170,978,921	--	Related Parties
Pihak Ketiga	133,988,030	--	Third Parties
Jaminan Usaha	88,042,632	--	Business Guarantees
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi	110,148,921	--	Financial Assets from Concession
Aset Keuangan Tidak Lancar			Non-Current Financial Assets
Piutang Usaha	4,657,606	--	Accounts Receivable
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi	58,645,244	--	Financial Assets from Concession
Jaminan Usaha	172,513,482	--	Business Guarantees
Piutang Belum Ditagih	114,576,313	--	Unbilled Receivable
Piutang Lain-lain			Other Receivable
Pihak Berelasi	1,211,412,309	--	Related Parties
Pihak Ketiga	5,324,891	--	Third Parties
Aset Keuangan Lainnya	--	116,658,458	Other Financial Assets
Liabilitas Jangka Pendek			Short Term Financial Liabilities
Pinjaman Jangka Pendek			Short Term Loans
Pihak Berelasi	--	--	Related Parties
Pihak Ketiga	--	--	Third Parties
Utang Usaha			Accounts Payable
Pihak Berelasi	--	--	Related Parties
Pihak Ketiga	--	--	Third Parties
Utang Lain-Lain			Other Payable
Pihak Berelasi	--	--	Related Parties
Pihak Ketiga	--	--	Third Parties
Beban Akrua	--	--	Accrued Expenses
Liabilitas Jangka Panjang			Long Term Liabilities
Pinjaman Jangka Menengah	--	--	Medium Term Notes
Pinjaman Jangka Panjang	--	--	Long Term Loans
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	Finance Lease Liabilities
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang			Long Term Financial Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang			Long Term Liabilities
Pinjaman Jangka Menengah	--	--	Medium Term Notes
Pinjaman Jangka Panjang	--	--	Long Term Loans
Utang Sewa Pembiayaan	--	--	Finance Lease Liabilities

B. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrument keuangan yang dimiliki Grup adalah risiko suku bunga, risiko mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Grup dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Grup.

I. Manajemen risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan

B. Financial Risk Management Policies and Objectives

The main risks arising from financial instruments held by the Group are interest rate, foreign currency risk, credit risk and liquidity risk. The Group's operational activities are carried out carefully by managing those risks in order not to incur any potential losses for the Group.

I. Foreign currency risk management

Foreign exchange risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected due to

terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko nilai tukar, diungkapkan dalam Catatan 48.

Selain pinjaman jangka panjang, Grup memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan. Eksposur dalam mata uang asing tersebut jumlahnya tidak material.

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing serta kurs konversi yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 diungkapkan dalam Catatan 48 atas laporan keuangan konsolidasian.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Pelemahan Rupiah sebesar 5% terhadap mata uang asing per 31 Desember 2018 dan 2017 akan meningkatkan laba tahun berjalan dan ekuitas masing-masing sebesar Rp50.236.778 dan Rp34.375.917

Penguatan Rupiah sebesar 5% terhadap mata uang asing per 31 Desember 2018 dan 2017 akan memberikan efek kebalikan yang sama besarnya, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap sama.

II. Manajemen risiko tingkat bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang dan utang sewa pembiayaan.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Grup mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel dan dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang baru.

Eksposur Grup terhadap suku bunga dalam aset keuangan dan liabilitas keuangan dirinci dalam bagian manajemen risiko likuiditas pada catatan ini.

changes in exchange rates. The Group's exposures to foreign exchange risk, are disclosed in Note 48.

In addition to long-term loans, the Group has exposure in foreign currencies arising from its operational transactions. Such exposure arises because the relevant transaction is made in a currency other than the functional currency of the operating unit or the other party. The exposure in such foreign currency is immaterial.

The monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies and conversion rates used at December 31, 2018 and 2017 are disclosed in Note 48 to the consolidated financial statements.

Foreign currency sensitivity analysis

A 5% weakening of the Rupiah against the foreign currency as of December 31, 2018 and 2017 would have increased profit and equity by Rp50,236,778 and Rp34,375,917, respectively.

A 5% strengthening of the Rupiah against the foreign currency as of December 31, 2018 and 2017 would have had the equal but opposite effect, on the basis that all other variables remain constant.

II. Interest rate risk management

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Group's exposures to interest rate risk relates primarily to short term loans, long term loans and finance lease liabilities.

To minimize interest rate risk, the Group manage interest expense through fixed rate and variable-rate debt combinations and by evaluating market interest rates. Management also conducts a review of the various interest rates offered by creditors to obtain favorable interest rates before making a decision to initiate a new debt obligation.

The Group's exposures to interest rates on financial assets and financial liabilities are detailed in the liquidity risk management section of this note.

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk instrument keuangan pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun.

Kenaikan atau penurunan 50 basis poin digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada karyawan kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Kenaikan tingkat bunga sebesar 1% terhadap per 31 Desember 2018 dan 2017 akan menurunkan laba tahun berjalan dan ekuitas masing-masing sebesar Rp70.033.109 dan Rp77.014.867.

Penurunan tingkat bunga sebesar 1% terhadap per 31 Desember 2018 dan 2017 akan memberikan efek kebalikan yang sama besarnya, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap sama.

III. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi Grup.

Risiko kredit Grup terutama melekat pada rekening bank, tagihan bruto pemberi kerja, piutang usaha, piutang retensi dan piutang lain-lain. Grup menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya. Piutang usaha dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi.

Eksposur Grup dan pihak lawan dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara pihak lawan yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan pihak lawan yang di review dan disetujui oleh komite manajemen risiko secara tahunan.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

IV. Manajemen risiko likuiditas

Tanggung jawab utama untuk manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka kerja manajemen risiko

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analyses below have been determined based on the exposure to interest rates for financial instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year.

A 50 basis point increase or decrease is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

A 1% increasing of interest rate as of December 31, 2018 and 2017 would have decrease profit and equity by Rp70,033,109 and Rp77,014,867, respectively.

A 1% decreasing of interest rate as of December 31, 2018 and 2017 would have had the equal but opposite effect, on the basis that all other variables remain constant.

III. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in financial loss to the Group.

The Group's credit risk is primarily attributed to its cash in banks, gross amount due from customers trade, retention receivables and other accounts receivable. The Group places its bank balances with credit worthy financial institutions. Trade accounts receivable are entered with respected and credit worthy third parties and related parties company.

The Group's exposure and its counterparties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties. Credit exposure is controlled by counterparty limits that are reviewed and approved by the risk management committee annually.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Group's exposure to credit risk.

IV. Liquidity risk management

Ultimate responsibility for liquidity risk management rests with the board of directors, which has established an appropriate liquidity risk

likuiditas yang sesuai untuk manajemen Grup dan pendanaan jangka pendek-menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Grup mengelola risiko likuiditas dengan memelihara cadangan yang memadai, fasilitas perbankan dan fasilitas pinjaman cadangan, dengan terus memantau arus kas prakiraan dan aktual, dan dengan cara mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel risiko likuiditas dan suku bunga

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan nonderivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Grup. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang tak terdiskonto dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Grup dapat diminta untuk membayar. Tabel mencakup arus kas bunga dan pokok. Sepanjang arus bunga tingkat mengambang jumlah tidak didiskontokan berasal dari kurva suku bunga pada akhir periode pelaporan. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal di mana Grup mungkin akan diminta untuk membayar.

Tabel berikut juga merinci ekspektasi jatuh tempo untuk aset keuangan non-derivatif Grup. Tabel disusun berdasarkan jatuh tempo kontrak tak terdiskonto dari aset keuangan termasuk bunga yang akan diperoleh dari aset tersebut. Dicantumkanannya informasi aset keuangan non-derivatif diperlukan dalam rangka untuk memahami manajemen risiko likuiditas Grup di mana likuiditas dikelola atas dasar aset dan liabilitas bersih.

management framework for the management of the Group's short-medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, banking facilities and reserve borrowing facilities, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

Liquidity and interest risk tables

The following tables detail the Group's remaining contractual maturity for its non-derivative financial liabilities with agreed repayment periods. The tables have been drawn up based on the undiscounted cash flows of financial liabilities based on the earliest date on which the Group can be required to pay. The tables include both interest and principal cash flows. To the extent that interest flows are floating rate, the undiscounted amount is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay.

The following table details the Group's expected maturity for its non-derivative financial assets. The table has been drawn up based on the undiscounted contractual maturities of the financial assets including interest that will be earned on those assets. The inclusion of information on non-derivative financial assets is necessary in order to understand the Group liquidity risk management as the liquidity is managed on a net asset and liability basis.

2018							
Aset	Tingkat Bunga Rata-rata Tertimbang Efektif/ Weighted Average Effective Interest Rate Rp	1-3 Bulan/ 1-3 months Rp	3 Bulan Sampai 1 Tahun/ 3 Months to 1 Year Rp	Lebih dari 1 Tahun/ More Than 1 Year Rp	Jumlah/ Total Rp		
						Assets	
Tanpa Bunga						Non-Interest Bearing	
Kas	--	26,519,734	--	--	26,519,734	Cash on Hand	
Piutang Usaha	--	1,815,518,764	2,519,758,723	1,318,517,782	5,653,795,269	Accounts Receivable	
Piutang Retensi	--	--	1,954,723,138	--	1,954,723,138	Retention Receivables	
Piutang Lain-Lain	--	--	1,479,138,589	14,617,480	1,493,756,069	Other Receivable	
Jaminan Usaha	--	--	105,100,463	--	105,100,463	Business Guarantee	
Piutang Yang Belum Ditagih	--	--	1,369,078,196	--	1,369,078,196	Unbilled Receivable	
Instrumen Suku Bunga Variabel						Variable Interest Rate Instruments	
Kas di Bank	1,00% - 2,50%	10,802,036,086	--	--	10,802,036,086	Cash In Bank	
Piutang Lain-Lain	9%	1,479,138,589	--	3,998,948,639	5,478,087,228	Other Receivable	
Instrumen Suku Bunga Tetap						Fixed interest rate instruments	
Deposito Berjangka	4% - 11%	3,145,210,657	--	--	3,145,210,657	Time Deposits	
Deposito Yang Dibatasi Penggunaannya	4,1% - 7,25%	20,000,000	--	--	20,000,000	Restricted Deposits	
Aset Keuangan dari Proyek						Financial Assets From Concession	
Konsesi - Bagian Lancar	15%	--	58,645,244	--	58,645,244	Projects - Current Portion	
Total		17,288,423,830	7,486,444,353	5,332,083,901	30,106,952,084	Total	
Liabilitas							
						Liabilities	
Tanpa Bunga						Non-Interest Bearing	
Utang Usaha	--	13,183,373,830	--	--	13,183,373,830	Trade Accounts Payable	
Utang Lain-Lain	--	29,816,535	--	--	29,816,535	Other Payable	
Beban Akrua	--	8,634,099,492	--	--	8,634,099,492	Accrued Expense	
Instrumen Suku Bunga Variabel						Variable Interest Rate Instruments	
Utang Sewa Pembiayaan	8,4% - 13%	37,299,977	--	--	37,299,977	Lease Liabilities	
Pinjaman Jangka Pendek	3,96% - 11,25%	4,200,031,329	--	--	4,200,031,329	Short-Term Loan	
Pinjaman Jangka Panjang	7,35% - 11%	9,372,921	--	--	9,372,921	Long-Term Loan	

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

2018							
	Tingkat Bunga Rata-rata Tertimbang Efektif/ Weighted Average Effective Interest Rate Rp	1-3 Bulan/ 1-3 months Rp	3 Bulan Sampai 1 Tahun/ 3 Months to 1 Year Rp	Lebih dari 1 Tahun/ More Than 1 Year Rp	Jumlah/ Total Rp		
Instrumen Suku Bunga Tetap						Fixed Interest Rate Instruments	
Pinjaman Jangka Pendek	2,25% - 12,00%	--	--	--	--	Short-Term Loan	
Pinjaman Jangka Menengah	9,75% - 11,50%	250,000,000	--	6,150,000,000	6,400,000,000	Medium-Term Loan	
Pinjaman Jangka Panjang	4,7 % - 11%	3,490,214	--	2,394,798,046	2,398,288,260	Long-Term Loan	
Total		26,347,484,298	--	8,544,798,046	34,892,282,344	Total	
2017							
	Tingkat bunga rata-rata tertimbang efektif/ Weighted average effective interest rate Rp	1-3 bulan/ 1-3 months Rp	3 bulan sampai 1 tahun/ 3 months to 1 year Rp	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year Rp	Jumlah/ Total Rp		
Aset						Assets	
Tanpa Bunga						Non-Interest Bearing	
Kas	--	16,055,937	--	--	16,055,937	Cash on Hand	
Piutang Usaha	--	4,930,153,132	--	4,657,606	4,934,810,738	Accounts Receivable	
Piutang Retensi	--	--	1,328,166,503	--	1,328,166,503	Retention Receivables	
Piutang Lain-Lain	--	--	304,966,951	5,324,891	310,291,842	Other Receivable	
Jaminan Usaha	--	--	88,042,632	172,513,482	260,556,114	Business Guarantee	
Piutang Yang Belum Ditagih	--	--	592,563,301	114,576,313	707,139,614	Unbilled Receivable	
Instrumen Suku Bunga Variabel						Variable Interest Rate Instruments	
Kas di Bank	1,00% - 2,50%	7,873,041,576	--	--	7,873,041,576	Cash in Bank	
Piutang Lain-Lain	9%	28,013,910	84,041,729	1,435,523,586	1,547,579,225	Other Receivable	
Instrumen Suku Bunga Tetap						Fixed interest rate instruments	
Deposito Berjangka	4% - 11%	63,679,603	3,587,284,309	--	3,650,963,912	Time Deposits	
Deposito Yang Dibatasi Penggunaannya	4,1% - 7,25%	20,385,169	--	--	20,385,169	Restricted Deposits	
Aset Keuangan dari Proyek						Financial Assets From Concession	
Konsesi - Bagian Lancar	15%	6,329,781	129,138,265	76,238,817	211,706,863	Projects - Current Portion	
Total		12,937,659,108	6,114,203,690	1,808,834,695	20,860,697,493	Total	
Liabilitas							
Tanpa Bunga						Non-Interest Bearing	
Utang Usaha	--	5,663,094,720	3,261,891,642	--	8,924,986,362	Trade Accounts Payable	
Utang Lain-Lain	--	--	265,454,484	107,894,953	373,349,437	Other Payable	
Beban Akrua	--	7,805,962,536	--	--	7,805,962,536	Accrued Expense	
Instrumen Suku Bunga Variabel						Variable Interest Rate Instruments	
Utang Sewa Pembiayaan	8,4% - 13%	14,764,382	44,293,147	116,600,019	175,657,548	Lease Liabilities	
Pinjaman Jangka Pendek	3,96% - 11,25%	91,526,605	759,394,561	--	850,921,166	Short-Term Loan	
Pinjaman Jangka Panjang	7,35% - 11%	27,600,228	48,780,706	838,974,979	915,355,913	Long-Term Loan	
Instrumen Suku Bunga Tetap						Fixed Interest Rate Instruments	
Pinjaman Jangka Pendek	2,25% - 12,00%	1,905,111,022	4,145,665,187	--	6,050,776,209	Short-Term Loan	
Pinjaman Jangka Menengah	9,75% - 11,50%	31,210,938	268,632,813	1,212,500,000	1,512,343,751	Medium-Term Loan	
Pinjaman Jangka Panjang	4,7 % - 11%	34,223,959	263,519,971	349,778,755	647,522,685	Long-Term Loan	
Total		15,573,494,390	9,057,632,511	2,625,748,706	27,256,875,607	Total	

Jumlah yang dicakup di atas untuk instrumen suku bunga variabel untuk aset dan liabilitas keuangan non-derivatif akan berubah jika perubahan suku bunga variabel berbeda dengan estimasi suku bunga yang ditentukan pada akhir periode pelaporan.

The amounts included above for variable interest rate instruments for both nonderivative financial assets and liabilities is subject to change if changes in variable interest rates differ to those estimates of interest rates determined at the end of the reporting period.

C. Tujuan Manajemen Risiko Modal

Grup mengelola modal untuk memastikan bahwa entitas dalam Grup akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Grup terdiri dari pinjaman yang saling hapus dengan kas dan setara kas dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, tambahan modal disetor, saldo laba dan kepentingan nonpengendali dan dikurangi dengan modal saham diperoleh kembali.

Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan review struktur permodalan Grup. Sebagai bagian dari review ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

C. Capital Risk Management

The Group manages capital to ensure that entities in the Group will be able to continue as going concerns, in addition to maximizing the profits of the shareholders through the optimization of the balance of debt and equity. The Group capital structure consists of debt offset by cash and cash equivalents and equity shareholders of the holding consisting of capital stock, additional paid-in capital, retained earnings and non-controlling interests and deduct with treasury stock.

The Board of Directors of the Group periodically reviews the Group's capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The gearing ratio as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

	2018 Rp	2017 Rp	
Pinjaman	13,328,560,476	9,014,596,503	Debt
Kas dan Setara Kas	13,973,766,477	11,253,778,215	Cash and Cash Equivalents
Kas - Bersih	(645,206,001)	(2,239,181,712)	Cash - Net
Ekuitas	17,215,314,565	14,631,824,613	Equity

D. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang dicatat pada biaya perolehan amortisasi.

Manajemen menganggap bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya karena memiliki jatuh tempo yang singkat sedangkan liabilitas keuangan tidak lancar memiliki tingkat bunga pasar.

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada:

- Pengukuran nilai wajar *level 1* adalah yang berasal dari harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; dimana entitas dapat mengakses pada tanggal pengukuran;
- Pengukuran nilai wajar *level 2* adalah yang berasal dari *input* selain harga kuotasi yang termasuk dalam *level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan
- Pengukuran nilai wajar *level 3* adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup *input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi).

D. Fair Value Measurements

Fair value of financial instruments carried at amortized cost.

Management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities measured at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values because of short-term maturities while the non-current financial liabilities carry market rate of interest.

Fair value measurement hierarchy of the Group's assets and liabilities.

Measurement of fair value based on:

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date;
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

55. Pengungkapan Tambahan Atas Aktivitas Investasi dan Pendanaan Nonkas

Pada tahun 2018 dan 2017, Grup melakukan transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan setara kas dan tidak termasuk dalam laporan arus kas konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

55. Supplemental Disclosures on Noncash Investing and Financing Activities

In 2018 and 2017, the Group has investment and financing transactions that did not affect cash and cash equivalents and hence not included in the consolidated statements of cash flows with details as follows:

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun - tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS (Continued)**
For The Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018 Rp	2017 Rp	
Penambahan Aset Tetap Melalui Sewa Pembiayaan	145,724,373	117,562,000	Additional Fixed Assets Through Lease Liabilities
Penambahan Aset Tetap Melalui Pembayaran Uang Muka Tanah	--	24,086,671	Additional Fixed Assets Through Advance Payment of Land
Penambahan Aset Tetap Melalui Akuisisi Entitas Anak	--	15,611,400	Additional Fixed Assets Through Acquisition of a Subsidiary
Penambahan Aset Tidak Berwujud Melalui Akuisisi Entitas Anak	--	126,002,854	Addition of Intangible Assets Through Acquisition of a Subsidiary

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018:

The table below sets out a reconcillation of liabilities arising from financing activities for the year ended December 31, 2018:

2017	Arus Kas/ Cash Flow	Perubahan Nonkas/ Non-cash Changes		2018	
		Pergerakan Valuta Asing/ Foreign Exchange Movement	Perubahan Nilai Wajar/ Fair Value Changes		
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Utang Bank Jangka Pendek	6,423,853,975	(2,223,822,646)	--	4,200,031,329	Short-Term Bank Loans
Pinjaman Jangka Menengah	1,175,000,000	5,225,000,000	--	6,400,000,000	Medium Term Note
Utang Bank Jangka Panjang	1,277,632,773	1,525,646,783	--	2,803,279,556	Long-Term Bank Loans
Total Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan	8,876,486,748	4,526,824,137	--	13,403,310,885	Total Liabilities from Financing Activities

56. Informasi Keuangan Tambahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir (Lampiran 1-6), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

56. Supplementary of Financial Information on The Consolidated Financial Statements

The accompanying financial information (Attachments 1-6) of the Company (parent), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2018 and 2017, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes equity, and statements of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the consolidated financial statements.

57. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017/31 Desember 2016 telah direklasifikasi sesuai dengan penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2018 untuk tujuan perbandingan.

57. Reclassification of Accounts

Some accounts on the financial statements for the years ended December 31, 2017 and January 1, 2017/December 31, 2016 have been reclassified in accordance with the presentation of the financial statement for the year ended December 31, 2018 for the purpose of comparison.

31 Des 2017/ Dec 31, 2017			
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification	
	Rp	Rp	
Persediaan	1,663,036,012	3,839,540,301	Inventories
Aset Real Estat - Bagian Lancar	2,176,504,289	--	Real Estate Assets - Current Portion
Total	3,839,540,301	3,839,540,301	Total
1 Jan 2017/ Jan 1, 2017			
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification	
	Rp	Rp	
Persediaan	1,164,210,665	3,182,130,677	Inventories
Aset Real Estat - Bagian Lancar	2,017,920,012	--	Real Estate Assets - Current Portion
Total	3,182,130,677	3,182,130,677	Total

58. Standar Akuntansi Baru

Amandemen dan penyesuaian atas standar, serta Interpretasi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu :

- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): "Kombinasi Bisnis"
- PSAK 24 (Amandemen 2018): "Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program"
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): "Biaya Pinjaman"
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): "Pajak Penghasilan"
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): "Pengaturan Bersama"
- ISAK 33: "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"
- ISAK 34: "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73: "Sewa"
- PSAK 62 (Amandemen 2017): "Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi"
- PSAK 15 (Amandemen 2017): "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"

58. New Accounting Standards

Amendments and improvements to standards, and Interpretation of standards which effective for the periods beginning on or after January 1, 2019, with early adoption is permitted, are as follows :

- PSAK 22 (Improvement 2018): "Business Combination"
- PSAK 24 (Amendment 2018): "Employee Benefit regarding Plan Amendment, Curtailment or Settlement"
- PSAK 26 (Improvement 2018): "Borrowing Cost"
- PSAK 46 (Improvement 2018): "Income Taxes"
- PSAK 66 (Improvement 2018): "Joint Arrangement"
- ISAK 33: "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration"
- ISAK 34: "Uncertainty over Income Tax Treatments"

New standards and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 71: "Financial Instrument"
- PSAK 72: "Revenue from Contract with Customer"
- PSAK 73: "Lease"
- PSAK 62 (Amendment 2017): "Insurance Contract regarding Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract"
- PSAK 15 (Amendment 2017): "Investment in Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures"

- PSAK 71 (Amandemen 2018): "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

- PSAK 71 (Amendment 2018): "Financial Instrument regarding Prepayment Features with Negative Compensation"

Until the date of the consolidated financial statements is authorized, the Company is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

59. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada 8 Maret 2019.

59. Management Responsibility to the Consolidated Financial Statements

The Company's Management is responsible for the preparation of the consolidated financial statements which were authorized to be issued by Directors on March 8, 2019.

LAMPIRAN 1

ATTACHMENT 1

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (PARENT)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
 As of December 31, 2018 and 2017
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018 Rp	2017 Rp
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	10,008,368,830	7,889,717,316
Piutang Usaha - Neto	1,577,022,708	881,493,324
Piutang Retensi - Neto	1,413,535,131	955,800,327
Tagihan Bruto Pemberi Kerja - Neto	8,328,238,496	8,294,523,545
Piutang Yang Belum Ditagih	556,407,924	177,198,333
Piutang Lain-Lain	1,917,194,578	727,883,711
Persediaan	923,760,937	544,886,601
Uang Muka	723,627,920	999,387,610
Pajak Dibayar Dimuka	1,000,408,462	997,864,257
Biaya Dibayar Dimuka	301,023,181	626,493,685
Jaminan Usaha	40,044,461	4,995,900
Bagian jangka pendek dari Piutang Sewa Jangka Panjang	58,645,244	110,148,921
TOTAL ASET LANCAR	26,848,277,872	22,210,393,530
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang Lain-Lain	3,984,331,159	1,211,412,309
Jaminan Usaha	--	170,947,851
Investasi Pada Entitas Anak	6,226,818,050	3,445,066,030
Investasi Pada Entitas Asosiasi	201,193,584	340,582,702
Piutang Sewa Jangka Panjang	--	58,645,244
Aset Keuangan Lainnya	1,645,100,416	122,058,458
Uang Muka Dikurangi Bagian Lancar	280,000,000	--
Investasi Pada Ventura Bersama	1,022,911,800	2,590,173,763
Properti Investasi	72,763,288	68,483,000
Aset Tetap - Neto	620,880,439	1,066,642,207
Aset Lain-Lain	19,023,576	28,748,288
Jumlah Aset Tidak Lancar	14,073,022,312	9,102,759,852
JUMLAH ASET	40,921,300,184	31,313,153,382

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and Cash Equivalents
Trade Account Receivables - Net
Retention Receivables - Net
Due From Customer - Net
Unbill Receivable
Other Receivables
Inventories
Advances
Prepaid Taxes
Prepaid Expense
Business Guarantee
Current portion of Long Term Lease Receivables
TOTAL CURRENT ASSETS
NON-CURRENT ASSETS
Other Receivables
Business Guarantee
Investment in Subsidiaries
Investment in Associates
Long Term Portion of Lease Receivables
Other Financial Assets
Advances Net Current Portion
Investment in Joint Venture
Investment Property
Fixed Assets - Net
Other Assets
Total Non- Current Assets
TOTAL ASSETS

LAMPIRAN 2

ATTACHMENT 2

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)

Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (PARENT)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)

As of December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018 Rp	2017 Rp	
LIABILITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Pinjaman Jangka Pendek	2,737,488,177	5,150,904,689	Short Term Loans
Utang Usaha	8,075,376,905	5,889,050,105	Trade Payables
Utang Lain-Lain	728,829,313	54,483,148	Other Payables
Kewajiban Bruto Pemberi Kerja	9,705,502	--	Due to Customer
Utang Pajak	247,045,726	173,458,962	Tax Payable
Beban Akrua	7,188,023,065	6,581,122,065	Accrued Expenses
Pendapatan Diterima Dimuka	1,168,310	685,711	Unearned Revenue
Bagian Jangka Pendek dari			Short Term Portion of
Utang Sewa Pembiayaan	11,988,489	33,595,967	Lease Payables
Pinjaman Jangka Panjang	--	59,039,400	Long Term Loan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	18,999,625,487	17,942,340,047	Total Short Term Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			LONG TERM LIABILITIES
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	23,901,983	124,137,221	Employee Benefits Liabilities
Uang Muka Proyek	2,711,942,488	1,894,344,696	Advances for Long Term Projects
Bagian Jangka Panjang Setelah			Long Term Portion
Dikurangi Bagian Jangka Pendek			Net of Short Term Portion
Pinjaman Jangka Menengah	5,334,622,512	--	Medium Term Notes
Utang Sewa Pembiayaan	156,754,757	93,873,521	Lease Payables
Pinjaman Jangka Panjang	1,766,368,511	708,893,096	Long Term Loan
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9,993,590,251	2,821,248,534	Total Long Term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	28,993,215,738	20,763,588,581	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal Saham			Share Capital
Nilai Nominal: Rp100 (nilai penuh)			Par Value: Rp100 (full amount)
per Saham			per Share
Modal Dasar - 35.000.000.000 Saham			Authorized Capital - 35,000,000,000
			Shares
Modal Ditempatkan dan Disetor			Issued and Fully Paid-Up -
Penuh - 8.969.951.372 Saham	896,995,137	896,995,137	8,969,951,372 Share
Modal Saham Diperoleh Kembali	(10,272,110)	(10,272,110)	Treasury Stock
Tambahan Modal Disetor	6,579,533,138	6,579,533,138	Additional Paid-In Capital
Surat Berharga Perpetual	597,600,000	--	Perpetual Securities
Saldo Laba	3,864,228,281	3,083,308,636	Retained Earnings
Total Ekuitas	11,928,084,446	10,549,564,801	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	40,921,300,184	31,313,153,382	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

LAMPIRAN 3

ATTACHMENT 3

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2018 dan 2017
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (PARENT)
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the Years Ended
 December 31, 2018 and 2017
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2018 Rp	2017 Rp	
PENDAPATAN BERSIH	43	18,989,153,568	16,505,376,406	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	44	(17,120,516,742)	(15,059,965,471)	COST OF REVENUES
LABA KOTOR		1,868,636,826	1,445,410,935	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban Penjualan	45	(5,196,732)	(5,162,775)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	46	(467,443,811)	(379,112,395)	General and Administrative Expenses
Pendapatan Lain-lain	47	616,459,524	598,104,173	Other Income
Beban Lain-lain	47	(36,894,784)	(155,693,902)	Other Expenses
Laba Usaha		1,975,561,023	1,503,546,036	Operating Profit
Beban Pajak Penghasilan Final		(506,179,107)	(458,418,623)	Final Income Tax Expenses
Beban Keuangan		(787,174,598)	(461,289,278)	Finance Cost
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	16	(141,713,371)	(123,564,726)	Loss from Associated Entity
Bagian Laba Entitas Ventura Bersama	17	445,239,466	513,979,480	Share in Profit of Joint Venturer
		(989,827,610)	(529,293,147)	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		985,733,413	974,252,889	PROFIT BEFORE INCOME TAX
Beban Pajak Penghasilan		(49,979,650)	(14,090,721)	Income Tax Expense
LABA BERSIH		935,753,763	960,162,168	NET INCOME
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK				OTHER COMPREHENSIVE INCOME AFTER TAX
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi: Keuntungan (Kerugian) aktuarial Atas Program Imbal kerja Pasti		85,579,638	(30,139,416)	Other Comprehensive Income that Will not be Reclassified to Profit or Loss Actuarial Gain (Loss) Defined Benefit Plan
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1,021,333,401	930,022,752	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (INDUK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (PARENT)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2018 and 2017
(In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital	Modal Saham/ Diperoleh Kembali/ Treasury Stock	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid in Capital	Surat Berharga Perpetual/ Perpetual Securities	Saldo Laba/ Retained Earnings	Total Ekuitas / Total Equity
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
SALDO PER 1 JANUARI 2017	896,995,137	(10,272,110)	6,579,533,138	--	2,456,834,231	9,923,090,396
Dividen	--	--	--	--	(303,548,348)	(303,548,348)
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	--	960,162,168	960,162,168
Penghasilan komprehensif lain	--	--	--	--	(30,139,416)	(30,139,416)
SALDO PER 31 DESEMBER 2017	896,995,137	(10,272,110)	6,579,533,138	--	3,083,308,635	10,549,564,800
Surat Berharga Perpetual	--	--	--	597,600,000	--	597,600,000
Dividen	--	--	--	--	(240,413,755)	(240,413,755)
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	--	935,753,763	935,753,763
Penghasilan komprehensif lain	--	--	--	--	85,579,638	85,579,638
SALDO PER 31 DESEMBER 2018	896,995,137	(10,272,110)	6,579,533,138	597,600,000	3,864,228,281	11,928,084,446

BALANCE AS OF JANUARY 1, 2017

Dividends
Net Income for the Current Year
Other Comprehensive Income

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2017

Perpetual Securities
Dividends
Net Income for the Current Year
Other Comprehensive Income

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2018

LAMPIRAN 5

ATTACHMENT 5

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (INDUK)
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2018 dan 2017
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (PARENT)
STATEMENTS OF CASH FLOWS
 For the Years Ended
 December 31, 2018 and 2017
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2018 Rp	2017 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari Pelanggan	18,620,254,820	11,026,952,479	Receipts from Customers
Pembayaran Kepada Pemasok	(13,834,472,322)	(9,004,899,853)	Payments to Suppliers
Pembayaran Kepada Direksi Dan Karyawan	(988,265,412)	(765,999,014)	Payment to Directors and Employees
Penerimaan Bunga	188,500,055	143,930,902	Interest Received
Pembayaran Beban Keuangan	(545,425,008)	(461,289,278)	Finance Charges Paid
Penerimaan (Pembayaran) Pajak-Pajak	(506,179,107)	(452,619,049)	Receipt (Payment) of Taxes
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2,934,413,026	486,076,187	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Kenaikan Jaminan Usaha	135,899,290	5,632,664	Increase of Business Guarantee
Penerimaan Dividen dari Entitas Anak	152,813,588	186,142,271	Dividend Income from Subsidiary
Kenaikan Pinjaman Jangka Panjang dari Entitas Asosiasi	(2,772,918,850)	(926,412,309)	Addition in Long Term Payable from Associate
Penambahan Investasi pada Entitas Anak	(2,781,752,021)	(899,687,494)	Addition Investment in Subsidiary
Penempatan Saham pada Entitas Asosiasi	(154,123,813)	(223,584,017)	Addition Investment in Associate
Peningkatan pada Investasi Ventura Bersama	1,567,261,963	(119,451,405)	Increase Investment in Joint Ventures
Uang Muka Investasi	(280,000,000)	--	Advance in Investment
Penjualan Aset Tetap	445,761,768	--	Disposal of Fixed Assets
Perolehan Aset Tetap	--	(160,388,210)	Acquisition of Fixed Assets
Pembayaran atas Perolehan Aset Keuangan Lainnya	(1,523,041,958)	(27,207,663)	Acquisition of Other Financial Assets
Penurunan (Kenaikan) Aset Lain-Lain	9,724,712	(3,441,785)	Decrease (Increase) in Other Assets
Kenaikan Properti Investasi	(1,880,288)	(848,310)	Increase in Investment Properties
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(5,202,255,609)	(2,169,246,258)	Net Cash Flows Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pinjaman Jangka Pendek			Short Term Loans
Penerimaan Pinjaman	12,969,593,767	10,293,767,766	Proceeds from Loans
Pembayaran Pinjaman	(15,383,010,277)	(8,181,887,977)	Payment of Loans
Pinjaman Jangka Panjang			Long Term Loans
Penerimaan Pinjaman	1,057,475,415	791,014,962	Proceeds from Long Term Loans
Pembayaran Pinjaman	(57,366,782)	(268,321,057)	Payment of Long Term Loans
Pinjaman Jangka Menengah			Medium Term Loans
Penerimaan Obligasi Komodo Bonds	5,400,000,000	--	Proceeds from Komodo Bonds
Pembayaran Pinjaman	--	(800,000,000)	Payment of Long Medium Term Loans
Penerimaan Surat Berharga Perpetual	600,000,000	--	Proceeds from Perpetual Notes
Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan	--	(48,278,179)	Payment of Lease Liabilities
Pembayaran Dividen	(240,413,755)	(303,548,348)	Dividend Payments
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	4,346,278,368	1,482,747,167	Net Cash Provided by Financing Activities
(PENURUNAN) KENAikan BERSIH KAS DAN SETARA KAS	2,078,435,785	(200,422,904)	NET INCREASE ON CASH AND CASH EQUIVALENTS
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING	40,215,729	7,515,592	EFFECTS OF CHANGES FOREIGN EXCHANGE RATE
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	7,889,717,316	8,082,624,628	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	10,008,368,830	7,889,717,316	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (INDUK)
PENGUNGKAPAN LAINNYA
 Per 31 Desember 2018 dan 2017
 (Dalam Ribuan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK (PARENT)
OTHER DISCLOSURE
 As of December 31, 2018 and 2017
 (In Thousand Rupiah, unless Otherwise Stated)

1. Laporan Keuangan Tersendiri

Berdasarkan PSAK 4 (Penyesuaian 2015), Perusahaan memilih untuk menyajikan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas entitas induk sebagai laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung, bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto investee.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan informasi keuangan entitas induk adalah sama dengan kebijakan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2 (dua) atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak.

Sesuai dengan PSAK 4 (Penyesuaian 2015), Perusahaan mencatat penyertaan pada entitas anak dengan menggunakan metode biaya.

1. Separate Financial Statements

In accordance with PSAK 4 (Improvement 2015), the Company elected to present the statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the parent entity as a separate financial statements which represents additional information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by parent entity which recorded investments in subsidiary on direct equity ownership basis rather than basis of reported results and investee's net asset.

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity's financial information are same as the accounting policies adopted in the preparation of the Group's consolidated financial statements as disclosed in Note 2 (two) to the consolidated financial statements, except for investments in subsidiary.

In accordance with PSAK 4 (Improvement 2015), the Company records investment in subsidiary using cost method.

2. Daftar Investasi pada Entitas Anak

2. Schedule of Investment in Subsidiaries

Entitas Anak/ <i>Subsidiaries</i>	Lokasi/ <i>Domicile</i>	Harga Perolehan/ <i>Acquisition Cost</i>	
		2018 Rp	2017 Rp
Wika Realty	Indonesia	3,112,259,768	1,660,101,816
Serang Panimbang	Indonesia	1,561,125,320	281,949,800
Wika Ikon	Indonesia	211,091,193	208,961,944
Wika Gedung	Indonesia	663,300,000	663,300,000
Wika Beton	Indonesia	522,928,000	522,928,000
Lain-lain (<i>Others</i>)	Indonesia	156,113,770	107,824,470
Total		6,226,818,051	3,445,066,030

3. Metode Pencatatan Investasi

Investasi pada entitas anak sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan entitas induk dicatat menggunakan metode biaya perolehan.

3. Method of Investment Recording

Investment in subsidiaries mentioned in the financial statements of parent entity is recorded using cost method.



Laporan Tahunan 2018



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

WIKA Tower 1 & 2

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 - 10

Jakarta 13340 - Indonesia

Telp : +6221 806 79200

Fax : +6221 228 93830

E-mail : investor.relations@wika.co.id



PT Wijaya Karya



@PTWijayaKarya



ptwijayakarya



WIJAYA KARYA TV

www.wika.co.id